

PROSIDING KONFERENSI NASIONAL KEWARGANEGARAAN V:

# Kontribusi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menjawab Tantangan Global



Editor:  
Anjulin Yonathan Kamlasi  
Farid Fadillah  
Ikhtiyar Setiawan  
Kwartanti Fajriatin  
Muhammad Nasir Salasa  
Tri Utami

 UIN  
PRESS

**Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan V  
Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
Program Pascasarjana  
Universitas Negeri Yogyakarta**

**Kontribusi Pendidikan Kewarganegaraan dalam  
Menjawab Tantangan Global**

**21-22 November 2020**

**Aula lt. 3 Gedung Sugeng Mardiyono  
Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta**



**Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan V:**

**Kontribusi Pendidikan Kewarganegaraan dalam menjawab Tantangan Global.**

**Tempat dan Tanggal Pelaksanaan: Aula lt. 3 Gedung Sugeng Mardiyono, 21-22 November 2020, Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.**

Penasihat: Dr. Sunarso, M. Si  
Dr. Mukhamad Murdiono, M. Pd

*Sterring Committee:* Rianda Usmi, S. Pd  
Kwartanti Fajriatin, S. Pd  
Amar Ma'ruf, S. Pd  
Anjulin Yonathan Kamlasi, S. Pd  
Ikhtiyar Setiawan, S. Pd

*Reviewer:* Dr. Mukhamad Murdiono, M. Pd

Penyunting: Anjulin Yonathan Kamlasi, S. Pd  
Farid Fadillah, S. Pd  
Ikhtiyar Setiawan, S. Pd  
Kwartanti Fajriatin, S. Pd  
Muhammad Nasir Salasa, S. Pd  
Tri Utami, S. Pd

Cover: Ikhtiyar Setiawan, S. Pd

ISBN: 978-602-498-218-8

Cetakan: Pertama, Januari 2021

Penerbit:

UNY Press

Kampus Karangmalang, Yogyakarta, Kode Pos: 55281

Telp. (0274) 589346), Email: unypress. [yogyakarta@gmail.com](mailto:yogyakarta@gmail.com)

## Kata Pengantar

*Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

Puji syukur kehadirat Allah SWT., yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga Konferensi Nasional Kewarganegaraan (KNKn) Ke-V dengan tema “Kontribusi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menjawab Tantangan Global” dapat terlaksana dengan sukses di tengah kondisi Pandemi *Covid-19*. Konferensi ini terlaksana atas kerjasama yang baik, antara Program Studi Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dengan Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (AP3KnI) Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Konferensi ini juga merupakan bagian dari pelaksanaan praktik Mata Kuliah Seminar Isu Kontemporer Mahasiswa Prodi S2 PPKn Pascasarjana UNY Angkatan 2019. Sebagai Koordinator Program Studi Magister PPKn Pascasarjana UNY, saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Mahasiswa Program Studi Magister PPKn Pascasarjana UNY Angkatan 2019 yang telah berhasil dan sukses menyelenggarakan konferensi dan menyusun prosiding.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yakni; Dr. Epin Sepudin, M.Pd, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Freddy Kirana Kalidjernih, Ph.D, peneliti interdisipliner bidang humaniora, Prof. Dr. Sapriya, M.Ed., Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia/Sekjen AP3KnI, dan Dr. Eny Kusdarini, M.Hum., dosen Prodi PPKn Pascasarjana UNY.

Program Studi Magister PPKn Pascasarjana UNY memandang bahwa konferensi kewarganegaraan merupakan kegiatan akademik yang sangat penting dan perlu dilaksanakan meskipun masih dalam kondisi Pandemi *Covid-19*. Setidaknya ada 3 (tiga) alasan penting yakni: menguatkan kontribusi pendidikan kewarganegaraan dalam menjawab tantangan global, mendiseminasikan hasil-hasil penelitian dan pemikiran terkait pendidikan kewarganegaraan untuk memperkuat jati diri komunitas pendidikan kewarganegaraan, dan memperluas jaringan kerja sama dalam rangka pengembangan dan penerapan hasil-hasil penelitian dan pemikiran tentang kewarganegaraan.

Terakhir, saya ucapkan selamat atas terbitnya prosiding KNKn Ke-V ini sebagai warisan akademik monumental mahasiswa Prodi S2 PPKn Angkatan 2019. Tidak lupa, saya sampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada *reviewer* dan tim penyusun yang telah bekerja keras sehingga prosiding dapat terbit. Semoga prosiding yang berisi pemikiran dari para peserta KNKn Ke-V ini dapat bermanfaat untuk pengembangan keilmuan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.*

Yogyakarta, 21 November 2020  
Koordinator Program Studi Magister PPKn Pascasarjana UNY

**Dr. Mukhamad Murdiono, M.Pd**

## **Sambutan Ketua Komite Eksekutif**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

*Salam sejahtera untuk kita semua.*

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena berkat karunia-Nya kita dapat mengikuti Konferensi Nasional Kewarganegaraan Ke V ini dalam keadaan sehat wal'afiat dan penuh semangat meskipun di tengah kondisi pandemi *Covid-19*.

Konferensi Nasional Kewarganegaraan Tahun 2020 merupakan kegiatan konferensi kelima yang telah berlangsung sejak tahun 2015. Tema pada Konferensi Nasional Kewarganegaraan Ke V ini adalah "Kontribusi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Menjawab Tantangan Global". Tema ini diangkat karena pada Abad 21 saat ini cukup banyak tantangan-tantangan global dengan lahirnya fenomena dan permasalahan global seperti kondisi pandemi *Covid-19* yang mempengaruhi semua tatanan kehidupan, revolusi industri 4.0, masyarakat *society 5.0* dan seterusnya. Harapannya, melalui kegiatan Konferensi Nasional Kewarganegaraan ini yang didasarkan pada hasil pemikiran para pakar dan temuan penelitian tentang pendidikan kewarganegaraan diharapkan muncul gagasan ide tentang pendidikan kewarganegaraan yang dapat berkontribusi dalam menjawab tantangan global. Kegiatan Konferensi Nasional Kewarganegaraan Ke V ini disertai dengan pembentukan Ikatan Alumni Program Pascasarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang turut serta dan bahu membahu saling membantu dalam menyukseskan konferensi ini. Kami juga mohon maaf, jika dalam penyelenggaraan Konferensi Nasional Kewarganegaraan Ke V Tahun 2020 ini terdapat kekurangan dalam layanan, atau hal-hal lainnya yang kurang berkenan di hati bapak/ibu/saudara/i peserta sekalian. Akhir kata, kami mengharapkan hasil konferensi ini dapat dipergunakan sebagai bahan kajian pengembangan pendidikan kewarganegaraan yang berkontribusi untuk menjawab persoalan tantangan kebangsaan dalam dinamika global.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

*Salam sejahtera untuk kita semua.*

Ketua Komite Eksekutif

**Rianda Usmi, S.Pd.**

## Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Kata Sambutan Ketua Eksekutif.....	ii
Daftar Isi.....	iii
1. Pengembangan Literasi Digital Aplikasi <i>Civication</i> ( <i>Civic Application</i> ) Meningkatkan <i>Civic Competence</i> Siswa di Era Adaptasi Kebiasaan Baru.....	1
<b>Ahmad Rifai, Muhammad Mona Adha, Ahman Tosy Hartino, Eska Prawisudawati Ulpa, Supriyono</b>	
2. Eksistensi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Meningkatkan <i>Civic Responsibility</i> di Masa Pembelajaran Daring.....	14
<b>Ahman Tosy Hartino, Muhammad Mona Adha, Ahmad Rifai, Eska Prawisudawati Ulpa, Supriyono</b>	
3. Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran PPKn Melalui Penambahan Jam Mata Pelajaran dan Inovasi Metode Pembelajaran.....	28
<b>Alidono Setia, Zahrotum Barorina, Ardhana Januar Mahardhani</b>	
4. Peran dan Tantangan <i>Civil Society</i> dalam Kehidupan Demokrasi di Indonesia.....	47
<b>Alil Rinenggo</b>	
5. Pancasila sebagai Dasar Negara serta Manifestasi Kebangsaan Indonesia.....	63
<b>Amar Ma'ruf</b>	
6. Etika Aktor Politik dan Birokrasi Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Indonesia.....	85
<b>Anjulin Yonathan Kamlasi</b>	
7. Urgensi Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Penguatan Keterampilan Berpikir Kritis....	103
<b>Arum Putri Pertiwi, Sunarso</b>	
8. Prinsip-Prinsip Dasar Demokrasi Politik dan Ekonomi dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pengembangannya dalam Sistem Politik Indonesia.....	118
<b>Awang Nakulanang</b>	
9. Inovasi Media Pembelajaran Berbasis Komik dalam Menanamkan Nilai-Nilai Pancasila.....	134
<b>Awang Nakulanang, Elly Nur Rahmawati, Muhammad Abdul Aziz</b>	
10. Penguatan Masyarakat Difabel dalam Partisipasi Politik Pencalonan Legislatif.....	143
<b>Billy Andieyufra</b>	
11. Pengembangan Antiperundangan <i>Pocket Book</i> sebagai Media Pembelajaran Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal <i>Tepo Seliro</i> .....	158
<b>Daffa Fakhri Maulana, Awang Nakulanang, Yohana Suryana, Anis Samchati, Hery Cahyono</b>	
12. Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan di Era Disrupsi.....	174
<b>Delfiyan Widiyanto, Annisa Istiqomah</b>	
13. Implementasi Kebijakan Penegakan Disiplin Protokol Kesehatan	

dalam Meningkatkan Kedisiplinan Masyarakat di Kabupaten Ponorogo.....	185
<b>Della Puspita, Sujud Tri Fajar Pamungkas, Ardhana Januar</b>	
14. Pendidikan Pancasila dengan Strategi FAST ( <i>Family Based Education</i> ) sebagai Solusi di Tengah Pandemi Covid-19.....	199
<b>Erlinda Ika Mawarti</b>	
15. Semangat Gotong Royong dan Kepatuhan Masyarakat dalam Menghadapi Pandemi Covid-19.....	216
<b>Farid Fadillah, Mukhamad Murdiono</b>	
16. Penguatan Pancasila dalam Kontestasi Politik 4 Pilar MPR RI.....	233
<b>Hastangka</b>	
17. Implementasi Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa .....	253
<b>Herman Hendrik</b>	
18. Eksistensi Paguyuban Sendang Mataram dalam Menjaga Budaya sebagai Penguatan Identitas Nasional.....	272
<b>Ikhtiyar Setiawan</b>	
19. Kajian Konflik dalam Lintas Pendidikan Multikultural.....	284
<b>Izuddinsyah Siregar, Cipto Duwi Priyono</b>	
20. Eksistensi Pancasila sebagai Ideologi Negara dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 dan <i>Society 5.0</i> .....	300
<b>Maqrifa Wahyu Perdana</b>	
21. Kebijakan Karantina Calon Kepala Desa Serentak Kabupaten Semarang Tahun 2018.....	317
<b>Martien Herna Susanti, Setiajid</b>	
22. Peran Pendidikan Politik terhadap Partisipasi Politik Pemilih Muda dalam Menumbuhkan Sikap Demokrasi terhadap Masyarakat.....	328
<b>Ikke Widya Kusuma Sari, Sarlly Marlyana, Ardhana Januar Mahardhani</b>	
23. Upaya Meningkatkan Karakter disiplin Peserta Didik pada Pembelajaran daring di Masa Pandemi Covid-19.....	343
<b>Maria Alifah, Muhammad Mona Adha, Dayu rika Perdana, Ahman Tosy Hartino, Ahmad Rifai</b>	
24. Menumbuhkan Kedisiplinan Siswa Selama Pembelajaran Daring di SMAN 2 Tanah Grogot.....	355
<b>Kwartanti Fajriatin, Mukhamad Murdiono</b>	
25. Gender dan Transformasi Dunia Pendidikan di Era Disrupsi Industri 4.0.....	374
<b>Mizani Alam Semesta</b>	
26. Pendidikan Karakter Melalui Pembelajaran PKn di Masa Pandemi Covid-19 demi Masyarakat Taat PSBB.....	387
<b>Muhammad Mona Adha, Hario Parakesit, Dayu Rika Perdana, Ahman Tosy Hartino, Eska Prawisudawati Ulpa</b>	
27. Pengembangan Bahan Ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Berbentuk <i>Booklet</i> Berbasis <i>QR Barcode</i> .....	408
<b>Muhammad Nasir Salasa</b>	
28. Identitas, Posisi, dan Peran Perempuan Tionghoa dalam Perkawinan dengan Laki-Laki Jawa di Surabaya, Jawa Timur.....	425

	<b>Putri Fremelia Muli, Irwan Martua Hidayana</b>	
29.	Strategi dan Model Pendidikan Nilai di Sekolah Menengah Pertama (SMP).....	443
	<b>Putri Hardina Pratiwi</b>	
30.	Revitalisasi Nilai Pancasila Melalui Metode <i>Project Based Learning</i> Menggunakan Diary di kelas II CLC fantasi Generasi.....	461
	<b>Rahmi Syalfitri Riska</b>	
31.	Aktualisasi Pancasila sebagai Upaya Penguatan Etika Politik di Indonesia.....	475
	<b>Ravita Mega Saputri, Mukhamad Murdiono</b>	
32.	Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Pecinta Alam sebagai Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila.....	489
	<b>Repy Hapyan</b>	
33.	Pembelajaran PPKn pada Masa Pandemi Covid-19 di MAN 1 Gunung Kidul.....	507
	<b>Mulyati</b>	
34.	Eksistensi Pancasila dalam Pembentukan Karakter Bangsa Melalui pendidikan Multikultural di Era Global.....	520
	<b>Rhindra Puspitasari</b>	
35.	Penguatan Jati Diri Pendidikan Kewarganegaraan di Era Revolusi Industri 4.0.....	536
	<b>Rianda Usmi</b>	
36.	Peran Perguruan Tinggi dalam Membangun Karakter Generasi Muda Indonesia.....	551
	<b>Saiful, Muhammad Husein, Masri</b>	
37.	Penanaman Pendidikan Karakter dalam Membentuk Sikap dan Perilaku Anak Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka.....	559
	<b>Septi Kuntari, Nur Afiyati</b>	
38.	RUMPI (Rumah Pintar): Sekolah Dusun Berbasis Pendidikan Karakter Guna Mengatasi Dekadensi Moral di Indonesia.....	576
	<b>Siska Dwi Utami</b>	
39.	Peran Mahasiswa dalam Menuntaskan Degradasi Moral Politik dan Merawat Demokrasi.....	593
	<b>Sismonika Puspitasari, Imam Asrofi</b>	
40.	Penguatan Karakter Empati Mahasiswa Kebidanan Melalui Metode Siodrama pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.....	608
	<b>Supriyono, Muhammad Mona Adha</b>	
41.	Penanaman Nilai Karakter Nasionalis Berbasis Budaya Sekolah pada Sekolah Muhammadiyah.....	623
	<b>Syifa Siti Aulia, Dikdik Baehaqi Arif, Iqbal Arpanudin</b>	
42.	Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Penguatan Karakter untuk Memperkuat Nilai Gotong Royong.....	636
	<b>Taufiqurahman</b>	
43.	Implementasi Pancasila di Era Globalisasi Bagi Peserta Didik.....	650
	<b>Tri Utami, Mukhamad Murdiono</b>	
44.	Penguatan Nilai-Nilai Pancasila di Kalangan Siswa SMA Negeri 9 Bandar Lampung.....	664
	<b>Wayan Putra Irawan</b>	

45. Pengarusutamaan Aspek Karakter Kewarganegaraan (*Civic Disposition*) dalam Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan..... 678  
**Zain Nugroho**

# **Pengembangan Literasi Digital Aplikasi *Civication (Civic Application)* Meningkatkan *Civic Competence* Siswa di Era Adaptasi Kebiasaan Baru**

**<sup>1</sup>Ahmad Rifai, <sup>2</sup>Muhammad Mona Adha, <sup>3</sup>Ahman Tosy Hartino, <sup>4</sup>Eska Prawisudawati Ulpa, <sup>5</sup>Supriyono**  
[new.rifai19@gmail.com](mailto:new.rifai19@gmail.com).

## **Abstrak**

Pengembangan literasi digital sangatlah penting adanya, terlebih di tengah situasi covid-19 ini. Mengingat pelaksanaan pembelajaran saat ini dilaksanakan secara dalam jaringan (daring), maka diperlukan kemampuan literasi digital agar dalam penggunaan teknologi dapat dilaksanakan secara sebaik baiknya. Berbicara tentang pembelajaran dalam jaringan, terdapat permasalahan yang salah satunya datang dari diri peserta didik yakni merasa bosan karena sumber belajar hanyalah buku paket, *google*, *youtube*, dan materi yang dikirimkan oleh pendidik. Dengan adanya hal tersebut penulis ingin memberikan suatu gagasan terkait media pembelajaran berbasis aplikasi yakni *Civication (Civic Application)*, dalam media ini terdapat berbagai menu diantaranya adalah artikel, video, lagu, dan juga kuis. Dapat dikatakan bahwa aplikasi ini lebih efektif dan efisien karena dalam satu aplikasi terangkum berbagai macam fitur yang diperlukan dalam pembelajaran. Dalam menulis artikel ini, metode yang digunakan oleh penulis dalam menulis artikel ini adalah studi literatur. Diharapkan dengan adanya aplikasi ini dapat mempermudah peserta didik dalam pembelajarannya serta meningkatkan daya literasi digital peserta didik.

**Kata Kunci:** Literasi Digital, *Civic Competence*, Era Adaptasi Kebiasaan Baru

## **PENDAHULUAN**

Pemanfaatan teknologi di era revolusi Industri 4.0 ini tentu sangat penting adanya, di tengah modernisasi, kehidupan manusia tak dapat dilepaskan dari teknologi. Namun faktanya, berdasarkan data dari Pusat Data dan Informasi KEMENDIKBUD RI, tingkat literasi di Indonesia menduduki peringkat ke-57 dari 63 Negara. Jika dilihat dari jumlah pengguna internet di Indonesia, tentu ini sangatlah berbanding terbalik. Kurnia (2017) mengutarakan bahwa jumlah pengguna Internet di Indonesia telah mencapai 132.7 juta orang dari 256.2 juta orang populasi Indonesia. Ini berarti, pengguna Internet di Indonesia telah mencapai 51.8% dari jumlah penduduk Indonesia.

Menurut Paul Gilster, literasi digital adalah kemampuan dalam menggunakan serta memanfaatkan teknologi yang berasal dari perangkat digital untuk kehidupan sehari-hari secara efektif dan efisien, contohnya seperti dalam konteks pendidikan, kehidupan sehari-hari, dan lain sebagainya. Dapat dikatakan bahwa literasi tak hanya terkait dengan hal membaca saja, tetapi juga pemanfaatan serta kecakapan juga.

Saat ini Indonesia sedang berada dalam situasi yang sulit, sejak Maret 2020 Covid-19 telah menyebar di Indonesia (Buana, 2020). Adanya penyebaran virus ini, tentu saja memberikan dampak dalam berbagai lini kehidupan bernegara. Pendidikan merupakan salah satu bidang yang terdampak secara signifikan oleh Covid-19 ini, saat ini pembelajaran tatap muka menjadi terkendala dan pada akhirnya para peserta didik dituntut untuk belajar dari rumah masing masing melalui pembelajaran dalam jaringan. Pelaksanaan pembelajaran dalam jaringan tentu saja tidak dapat dilepaskan dari teknologi. Oleh karena itu, di era adaptasi kebiasaan baru saat ini, literasi digital sangatlah penting adanya. Tak dapat disangkal bahwa di tengah situasi saat ini segala aktivitas tak dapat dilepaskan dari teknologi, yang tentunya menuntut masyarakat untuk dapat memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, begitu juga dalam dunia pendidikan. Termasuk juga gotong-royong yang kini dapat dilakukan dengan wujud digital (Adha, 2015). Literasi digital juga berkaitan dengan pendidikan media, Buchingham (2001) mengutarakan bahwa pendidikan media bertujuan untuk mengembangkan baik dari segi kognitif berupa pemahaman ataupun dari segi partisipasi secara aktif, sehingga dalam melahirkan individu yang mampu membuat penafsiran terkait dengan suatu informasi berdasar informasi yang telah diperolehnya.

Pentingnya literasi digital di tengah era teknologi ini, tak dapat dipisahkan dari hadirnya kesempatan dan tantangan terkait dengan maraknya teknologi, dan juga berguna untuk memilah dampak dari penggunaan teknologi itu sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya upaya pengembangan literasi digital guna meningkatkan kompetensi kewarganegaraan (*civic competence*) terkhusus keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*). Selain itu, berdasar penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Pritanova, (2017), menyebutkan bahwa ketika seseorang kurang memahami terkait dengan literasi digital, maka dapat berpengaruh terhadap psikologis orang tersebut, orang yang kurang memiliki pemahaman terkait dengan literasi digital cenderung menghina orang lain, menimbulkan sikap iri terhadap orang lain, mengakibatkan depresi, terbawa arus suasana hati terhadap komentar negatif, serta terbiasa berbicara dengan bahasa kurang sopan. Oleh karena itu,

memiliki pemahaman dan kemampuan dalam literasi digital sangatlah penting adanya, guna mewujudkan hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan ataupun pelatihan literasi digital (Siliviana, 2020). Upaya pengembangan literasi digital sebenarnya telah digaungkan semenjak beberapa tahun silam. KEMENDIKBUD (2017) telah mencanangkan upaya pengembangan literasi digital dengan nama GLN (Gerakan Literasi Nasional) sejak 2017 silam.

Upaya pengembangan literasi digital ini dapat dilakukan dengan berbagai macam strategi yang salah satunya adalah dengan meningkatkan jumlah dan ragam sumber belajar bermutu, di dalamnya terdapat salah satu langkah yakni penggunaan aplikasi-aplikasi edukatif sebagai sumber belajar peserta didik (Nasrullah, et al., 2017). Oleh karena itu disini penulis bermaksud untuk mencanangkan sebuah inovasi terkait dengan aplikasi belajar yakni "*Civication (Civic Application)*". Aplikasi ini memuat berbagai macam konten di dalamnya, mulai dari video tentang kenegaraan, bacaan tentang sejarah, kuis, dan hal lain yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Diharapkan dengan adanya aplikasi ini dapat meningkatkan *civic competence* terkhusus *civic skills* peserta didik yakni keterampilan literasi digital.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah studi literatur. Metode studi literatur adalah kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan membaca, mencatat, dan mengolah data yang didapat dari pustaka (Zed, 2008). Kajian literatur ini dilakukan dengan mencari literatur dari berbagai artikel ataupun jurnal yang telah dipublikasikan yang relevan dengan pengembangan literasi digital dengan menggunakan aplikasi di tengah era adaptasi kebiasaan baru. Berbagai macam literatur tersebut diantaranya adalah jurnal yang telah dipublikasikan secara *online*, E-prosiding seminar, dan lain sebagainya. Kemudian melakukan analisis terhadap artikel ataupun jurnal yang telah didapatkan dan kemudian dituangkan dalam bentuk data deskriptif.

## **PEMBAHASAN**

### **Literasi Digital**

Bawden (2001) mengutarakan bahwa literasi digital berakar dari literasi komputer dan literasi informasi, di dalamnya juga berkaitan dengan teknis mengakses, merangkai, memahami, dan menyebarkan informasi. Literasi komputer telah ada sejak bertahun lalu, namun konklusi didalamnya pun masih sama yakni terkait dengan kemampuan untuk mengakses, merangkai, dan memahami informasi.

Shapiro & Hughes (Herlina, 1996) mengemukakan bahwa literasi komputer terdiri dari tujuh komponen yaitu sebagai berikut.

1. Literasi alat, kemampuan menggunakan suatu perangkat baik perangkat lunak ataupun keras ini diperlukan karena dalam pengoperasian tentu saja berkaitan dengan perangkat yang digunakan.
2. Literasi sumber, kemampuan dalam memahami berbagai macam sumber suatu informasi.
3. Literasi sosial-struktural, pemahaman tentang pemanfaatan informasi secara sosial.
4. Literasi penelitian, penggunaan teknologi informasi untuk penelitian dan pengetahuan.
5. Literasi penerbitan, kemampuan berkomunikasi dan menerbitkan informasi.
6. Literasi teknologi baru, pemahaman mengenai perkembangan teknologi informasi.
7. Literasi kritis, kemampuan untuk mengevaluasi manfaat teknologi baru

Kemudian, ada juga literasi informasi yang dipelopori oleh para pustakawan. SCONUL (Society of College, National, and University Libraries) di UK oleh SCONUL (Martin, 2008) mengutarakan bahwa literasi informasi berkaitan dengan beberapa aspek berikut:

1. Mengenali informasi yang dibutuhkan.
2. Menentukan cara untuk menyelesaikan kesenjangan informasi.
3. Mengkonstruksi strategi untuk mendapatkan informasi.
4. Mencari dan mengakses.

5. Membandingkan dan mengevaluasi.
6. Mengorganisir, melaksanakan dan berkomunikasi.
7. Meringkas dan menciptakan.

Ahli lain pun memiliki pandangan yang berbeda terkait dengan literasi digital, menurut Rettberg (2015) dalam Konferensi *Electronic Literature of Organization* (ELO) memaparkan bahwa literasi digital adalah suatu bahan literasi yang di dalamnya mencakup seni, visual, dan hal lainnya yang digunakan untuk mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang literatur elektronik dan berkaitan dengan disiplin akademis serta praktik artistik lainnya. Selanjutnya Paul Gilster literasi digital adalah kemampuan dalam menggunakan serta memanfaatkan teknologi yang berasal dari perangkat digital untuk kehidupan sehari-hari secara efektif dan efisien. Dengan kata lain Paul Gilster lebih menekankan pada kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memanfaatkan suatu perangkat digital, yang dalam pelaksanaannya digunakan secara efektif dan efisien.

Dari beberapa pendapat ahli yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa literasi digital adalah suatu kemampuan dalam mencari, memahami, mengolah dan memanfaatkan informasi berbasis digital secara bijak serta dalam pelaksanaannya berpegang teguh pada konstitusi yang berlaku.

### ***Civic Competence***

Pesatnya perkembangan teknologi serta peradaban menuntut masyarakat dunia untuk terus berkembang. Dalam perkembangannya tentu saja diperlukan sebuah kompetensi ataupun suatu kecakapan yang harus dimiliki oleh individu. Bagi seorang warganegara, tentu harus memiliki kompetensi yakni kompetensi kewarganegaraan (*civic competence*). Adanya kompetensi ini tentu saja bertujuan untuk membentuk warganegara terkhusus peserta didik agar memiliki kemampuan bersaing, agar setiap peserta didik senantiasa beretika, bermoral, sopan santun dan dapat berinteraksi dan membangun masyarakat agar kedepan lebih baik (Adha, 2020).

*Civic competence* sendiri memiliki beberapa komponen di dalamnya, di antaranya adalah kompetensi kewarganegaraan ini dikemukakan oleh Branson

(Winataputra & Dasim, 2009) yaitu *Civic knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan), berkaitan dengan kandungan atau apa yang seharusnya diketahui oleh individu sebagai warga negara, *Civic skill* (kecakapan kewarganegaraan), adalah kecakapan intelektual dan partisipatoris warga negara. *Civic disposition* (watak kewarganegaraan) yang mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional.

Pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) berisi mengenai kiat-kiat pengetahuan yang seharusnya diketahui dan dipahami oleh seorang individu sebagai warga negara. Selain itu, pengetahuan kewarganegaraan berisi materi pembelajaran (*learning materials*), yaitu sekumpulan pengetahuan, sikap dan keterampilan yang harus dipelajari siswa untuk membantu tercapainya kompetensi atau tujuan pembelajaran (Gafur, 2012). Sedangkan Budimansyah (2010) pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) berkaitan dengan kandungan yang seharusnya diketahui oleh warga dengan apa-apa yang perlu diketahui dan dipahami secara layak oleh warga negara.

Berdasar Permendiknas No. 22 Tahun 2006, terdapat delapan (8) ruang lingkup kajian *civic knowledge*, delapan (8) ruang lingkup kajian itu di antaranya adalah persatuan dan kesatuan bangsa, norma, hukum dan peraturan, hak asasi manusia, kebutuhan warga negara, kekuasaan dan politik, Pancasila dan globalisasi (Winarno, 2014). Dapat dilihat bahwa pengetahuan kewarganegaraan tak hanya mengenai pengetahuan ataupun pemahaman tentang warga negara saja, tetapi memiliki berbagai macam lingkup kajian di dalamnya yang tentunya saling menunjang guna membentuk pengetahuan kewarganegaraan seorang warga negara. Di tengah perkembangan teknologi, literasi digital tentu sangat penting guna membentuk pengetahuan kewarganegaraan.

Watak kewarganegaraan (*civic disposition*) berorientasi pada dua hal yakni karakter privat dan karakter publik. Pada orientasi yang pertama yakni karakter privat, terdapat beberapa lingkup di dalamnya, di antaranya adalah tanggung jawab moral, disiplin dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu. Sedangkan untuk karakter publik merujuk kepada kepedulian

sebagai warga negara, berpikir kritis, mendengar dan berkompromi. Keduanya merupakan satu kesatuan yang artinya harus dimiliki oleh setiap individu sebagai warganegara guna membangun demokrasi secara baik (Winarno, 2014).

Pembentukan karakter privat dan karakter publik ini tak dapat dipisahkan dari pendidikan kewarganegaraan, upaya pembentukan seorang warga negara yang berkarakter khususnya sebagai warga negara muda Indonesia adalah sesuatu yang sangat penting (Adha et al., 2019b). Di tengah era revolusi industri 4.0 yang serba teknologi, karakter seorang warga negara haruslah tetap dijaga dan mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) merupakan keterampilan seorang warga negara dalam menerapkan hak-haknya sebagai warganegara serta menunaikan kewajibannya sebagai warga negara, yang di dalamnya terdapat kecakapan intelektual (*intellectual skill*) dan kecakapan partisipatoris (*participatory skill*) (Winarno, 2014). Kecakapan intelektual di sini berkaitan dengan kemampuan seorang warga negara dalam berfikir kritis, sedangkan kecakapan partisipatori adalah kemampuan berpartisipasi aktif dalam kehidupan sehari-hari.

### ***Civication (Civic Application)***

Pesatnya perkembangan teknologi mengharuskan masyarakat dunia untuk dapat mengikuti perkembangannya, digitalisasi telah terjadi dalam berbagai bidang kehidupan, di antaranya merambah dalam bidang pendidikan (Efendi, 2018). Terlebih saat ini Indonesia sedang dilanda pandemi Covid-19, yang menyebabkan pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh) atau kerap dikenal dengan pembelajaran dalam jaringan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa sektor pendidikan dituntut untuk dapat mengikuti perkembangan zaman yakni sudah mengarah pada digitalisasi pendidikan. Guna merealisasikannya, seluruh elemen dalam dunia pendidikan haruslah memiliki kesiapan terlebih dahulu sebelum dilaksanakannya digitalisasi pendidikan.

Pembelajaran dalam jaringan mengharuskan peserta didik untuk dapat bijak dalam menggunakan teknologi. Kemampuan dalam menggunakan teknologi disini berkaitan erat dengan literasi digital. Selain itu, pembelajaran dalam

jaringan memiliki berbagai kendala baik yang datang dari dalam diri peserta didik ataupun dari luar dirinya. Kendala tersebut diantaranya adalah peserta didik sulit untuk memahami materi yang disampaikan karena dalam pemaparan biasanya hanya mengirimkan materi ataupun tugas saja.

Saat ini perkembangan media serta teknologi untuk pembelajaran telah terjadi dengan pesatnya, yang hal tersebut merupakan bagian dari revolusi industri (Adiningsih, 2019). Oleh karena itu, disini penulis bermaksud untuk menginovasikan pembelajaran dalam jaringan melalui suatu aplikasi yakni *CIVICATION (Civic Apliaction)*, yang bertujuan untuk memudahkan peserta didik dalam belajar serta memupuk kemampuan literasi digital peserta didik guna mengembakan *civic competence* peserta didik.

*CIVICATION* adalah aplikasi berbasis *mobile* yang memiliki tampilan menu yang *friendly*, serta terdapat beberapa menu di dalamnya, yaitu:

1. Artikel, di dalamnya berisi mengenai berbagai macam artikel terkait dengan materi-materi PPKn yang dikelompokkan dalam setiap kelas, bab, dan sub bab materi, agar memudahkan peserta didik dalam mengakses. Selain itu terdapat juga bacaan cerita yang berkaitan dengan nilai pancasila ataupun nilai terkait dengan materi yang sedang dibuka, diharapkan peserta didik dapat memahami nilai-nilai dalam kehidupan melalui cerita. Tulisan disini dapat diakses langsung melalui aplikasi ataupun diunduh dalam bentuk file (pdf) agar memudahkan peserta didik yang wilayahnya memiliki keterbatasan dalam akses internet.
2. Video, berisi berbagai macam video yang mampu mengedukasi serta menambah wawasan peserta didik, seperti video terkait dengan materi pembelajaran yang ditampilkan dalam menu per-bab dan di dalamnya terdapat sub materi, video ini juga dapat diakses melalui bagian bawah menu artikel ketika sedang membuka materi yang diinginkan, sehingga bagi peserta didik yang lebih berminat untuk menyimak materi dapat membuka fitur ini. Kemudian terdapat video kekayaan bangsa Indonesia yang menggambarkan keberagaman bangsa Indonesia, baik dari segi kebudayaan, suku, kekayaan alam, dan lain sebagainya. Fitur ini

diharapkan mampu mempermudah peserta didik dalam memahami hal-hal tentang PPKn;

3. Lagu, berisi dua kategori yakni lagu nasional dan lagu daerah. Diharapkan dengan adanya fitur ini dapat mengenalkan bermacam lagu daerah kepada peserta didik dan pengguna aplikasi ini.
4. Kuis, berisi pertanyaan yang dikelompokkan berdasar judul besar materi (sesuai dengan judul di menu artikel). Pertanyaan disini berbentuk pilihan ganda, berisi pertanyaan singkat dan juga analisis. Kuis pun dapat diakses langsung melalui bagian bawah menu artikel setelah pengguna selesai membaca artikel ataupun menyimak video terkait dengan penjelasan materi

Dengan adanya beberapa menu tersebut, diharapkan mampu memudahkan peserta didik dalam memahami materi.

### **Konsep Pengembangan Literasi Digital Guna Meningkatkan *Civic Competence* Peserta Didik**

Sesuai dengan beberapa uraian yang telah penulis uraikan, dapat dilihat bahwa literasi digital sangatlah penting di tengah pesatnya perkembangan teknologi, terlebih di era pandemi Covid-19 ini hampir keseluruhan sektor mengalami digitalisasi, dengan adanya digitalisasi pada keseluruhan sektor termasuk dalam bidang pendidikan, maka seluruh elemen di dalamnya pun dituntut untuk mampu menyesuaikan diri.

Tak hanya penyesuaian terhadap digitalisasi, tetapi juga kemampuan dalam literasi digital pun harus dikembangkan agar dalam penggunaan teknologi dapat digunakan secara positif serta menanggalkan dampak negatifnya. Diperlukannya pengembangan literasi digital guna meningkatkan kemawasan peserta didik dalam menggunakan teknologi. Dengan aplikasi *Civication* ini, akan mempermudah peserta didik dalam mengakses bermacam hal hanya melalui satu aplikasi saja, sesuai dengan yang disampaikan oleh Nasrullah (2017) bahwa penggunaan aplikasi-aplikasi edukatif sebagai sumber belajar peserta didik dapat menjadi salah satu pengembangan literasi digital. Maka dengan penggunaan media pembelajaran berbasis aplikasi diharapkan mampu meningkatkan

Adanya berbagai menu dalam aplikasi *Civication* ini, diharapkan mampu juga mengembangkan *civic competence* peserta didik. Mekanismenya sebagai berikut.

1. *Civic knowledge* (Pengetahuan Kewarganegaraan)

Peserta didik akan terbangun melalui keseluruhan menu yang ada di dalam aplikasi (artikel, video, lagu, dan kuis). Disuguhkannya berbagai bacaan baik itu bacaan materi ataupun cerita yang mengandung berbagai nilai, dengan membaca materi yang telah disediakan, peserta didik akan bertambah pengetahuannya, tak hanya itu saja, tetapi dengan membaca akan meningkatkan pemahaman seseorang terhadap suatu bacaan (Patiung, 2016). Tak hanya melalui bahan bacaan saja, dengan menu video pun *civic knowledge* peserta didik akan meningkat, disuguhkannya video terkait dengan penjelasan materi ataupun pemaparan mengenai kekayaan bangsa Indonesia, tentu sangatlah berperan dalam meningkatkan *civic knowledge* peserta didik. Selain itu, melalui menu kuis juga peserta didik akan terus diasah pengetahuannya.

2. *Civic Skills* (Keterampilan Kewarganegaraan) peserta didik terasah baik intelektual ataupun partisipatori. Dengan berbagai bacaan serta kuis di dalamnya, peserta didik dilatih untuk berfikir kritis, terlebih dalam menu kuis soal yang tertera akan diperbaharui sesuai dengan kondisi yang ada. Keterampilan partisipatori secara tidak langsung akan terbentuk manakala peserta didik membaca cerita yang mengandung nilai-nilai Pancasila di dalamnya.

3. *Civic Disposition* (Watak Kewarganegaraan) peserta didik akan terus terbentuk manakala ia melakukan suatu hal secara terus menerus. Dengan menggunakan aplikasi ini, peserta didik akan memiliki karakter baru manakala ia merasa lebih dimudahkan dalam pembelajaran ketika menggunakan aplikasi ini. Berbagai watak akan terbentuk seperti disiplin, percaya diri, mandiri, dan lain sebagainya.

Dari berbagai uraian tersebut, dapat dilihat bahwa *civication* akan dapat mengembangkan *civic competence* peserta didik, namun tentu saja ini tidak serta

merta terjadi. Pembelajaran yang dilaksanakan akan banyak menggunakan bantuan aplikasi *civication*, pendampingan serta pengarahan dari pendidik tentu saja sangat diperlukan, agar dalam pelaksanaannya *civic competence* peserta didik dapat ditingkatkan serta dikembangkan sesuai dengan tujuan awal.

Penggunaan aplikasi yang lebih efektif dan efisien, kemampuan peserta didik dalam membangun watak, serta penggunaan sumber belajar secara digital akan mengembangkan tingkat literasi digital pada generasi muda. Dengan begitu, apabila seluruhnya terlaksana dengan baik maka literasi digital semakin berkembang, dan sekaligus juga mengembangkan *civic competence* peserta didik.

## **SIMPULAN**

Berdasar permasalahan yang telah terjadi dan dialami oleh sebagian besar peserta didik di tengah pembelajaran dalam jaringan, maka dapat dikatakan bahwa aplikasi *civication (Civic Application)* dapat dijadikan sebagai rekomendasi media pembelajaran yang dapat memudahkan peserta didik. Melalui berbagai menu di dalamnya yang berisi mengenai bacaan serta cerita yang memiliki nilai Pancasila, lagu yang berisi lagu daerah dan lagu nasional, video yang berisi video tentang keberagaman keberagaman dan juga kesatuan, dan juga kuis yang akan melatih daya pikir peserta didik, diharapkan dapat meningkatkan *civic competence* (kompetensi kewarganegaraan) peserta didik yakni pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), serta keterampilan kewarganegaraan (*civic disposition*). Serta dengan penggunaan sumber belajar yang lebih efektif dan efisien berbasis aplikasi, diharapkan dapat mengembangkan literasi digital peserta didik.

## **REFERENSI**

- Adha, M. M. (2015). *Understanding the relationship between kindness and gotong royong for Indonesian citizens in developing Bhinneka Tunggal Ika*. The Proceeding of the Commemorative Academic Conference for the 60th Anniversary of the 1955 Asian – African Conference in Bandung, Indonesia.
- Adha, M. M. (2020). *Pemahaman dan implementasi nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari*. Universitas Lampung.

- Adha, M. M. (2019). Advantegous of volunterism values for indonesian community and neighbourhoods. *International Journal of Community Service Learning*, 3(2), 83-87.
- Adha, M. M., Budimansyah, D., Sapriya, & Sundawa, D. (2019). Emerging volunteerism for Indonesia millennial generation: volunteer participation and responsibility. *Journal of Human Behavior in the Social Environment*, 29(4), 467- 483.
- Bawden, D. (2001). Information and digital literacies: a review of concepts. *Journal of documentation*, 57(2), 218-259.
- Buana, D. R. (2020). Analisis perilaku masyarakat Indonesia dalam menghadapi pandemi virus corona (Covid-19) dan kiat menjaga kesejahteraan jiwa. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 7(3), 217-226.
- Budimansyah, D. (2010). *Pembelajaran pendidikan kesadaran kewarganegaraan multidimensional*. Bandung: Genesindo.
- Center for Civic Edutaion/ CCE (1994). *Civitas: National Standars for Civics and Government Calabastas*. CCE
- Efendi, N. M. (2018). Revolusi Pembelajaran Berbasis Digital (Penggunaan Animasi Digital Pada Start Up Sebagai Metode Pembelajaran Siswa Belajar Aktif). *Habitus: Jurnal Pendidikan, Sosiologi, & Antropologi*, 2(2), 173-182.
- Gafur, A. (2012). *Desain pembelajaran: konsep, model, dan aplikasinya dalam perencanaan pelaksanaan pembelajaran*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Gilster, P. (2012). "Digital Literacy", dalam Riel, J., Christian, S., & Hinson, B., *Charting Digital Literacy: A Framework For Information Technology and Digital Skills Education in The Community College*. *Presentado en Innovations*. pp. 17.
- Herlina, D. (2015). Membangun karakter bangsa melalui literasi digital. *In Prosiding Seminar Nasional Kontribusi Ilmu-Ilmu Sosial dalam Percepatan Pembangunan Indonesia Bermartabat*.
- Kemendikbud. (2020). Pusat data dan informasi KEMENDIKBUD. *Literasi Digital sebagai Tulang Punggung Pendidikan*. <https://pusdatin.kemdikbud.go.id/literasi-digital-sebagai-tulang-punggung-pendidikan>.
- Kurnia, N. (2017). *Peta pergerakan literasi digital di Indonesia: Studi Tentang Pelaku, Ragam Kegiatan, Klompok Sasaran, dan Mitra*. Universitas Gajah Mada.

- Martin, A. (2008). *Digital Literacy and the 'Digital Society' dalam Lankshear, C and Knobel, M (ed). Digital literacies: concepts, policies and practices.* Die Deutsche Bibliothek
- Nasrullah, R. dkk. (2017). *Materi pendukung literasi digital.* Jakarta Timur: Kemendikbud.
- Pratiwi, N., & Pritanova, N. (2017). Pengaruh literasi digital terhadap psikologis anak dan remaja. *Semantik*, 6(1), 11-24.
- Patiung, D. (2016). Membaca sebagai sumber pengembangan intelektual. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 5(2), 352-376.
- Rettberg, S. (2015). Digital Literacy. disadur dari tulisan berjudul *Introduction: The End(s) of Electronic Literature*, 1(1)
- Silvana, H., & Darmawan, C. (2018). Pendidikan literasi digital di kalangan usia muda di kota bandung. *PEDAGOGIA*, 16(2), 146-156.
- Winarno. (2014). *Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan: Isi, Strategi dan Penilaian.* Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Winataputra, U. S. dan Budimansyah, D. (2007). *Civic Education.* Bandung: Program Studi PKn SPs UPI.
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan.* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

# Eksistensi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Meningkatkan *Civic Responsibility* di Masa Pembelajaran Daring

<sup>1</sup>Ahman Tosy Hartino, <sup>2</sup>Muhammad Mona Adha, <sup>3</sup>Ahmad Rifai, Eska  
<sup>4</sup>Prawisudawati Ulpa, <sup>5</sup>Supriono  
[ahmantosyhartino22@gmail.com](mailto:ahmantosyhartino22@gmail.com)

## Abstrak

Pembelajaran daring dalam kondisi Covid-19 tentu menjadi sebuah solusi sekaligus menjadi permasalahan baru. Pembelajaran daring, dilaksanakan setelah adanya surat edaran dari Kementerian Pendidikan sebagai wujud untuk meminimalisir kasus covid-19 di lingkungan pendidikan ataupun lingkungan sekolah lainnya. Pembelajaran daring akan membawa dampak pada sebuah urgensi rasa tanggung jawab peserta didik dalam eksistensi pendidikan kewarganegaraan. Artikel ini bertujuan untuk mengukuhkan sebuah eksistensi pendidikan kewarganegaraan dalam meningkatkan *civic responsibility*. Metode yang digunakan dalam penulisan ini yakni menggunakan metode studi literatur dan metode pengamatan. Hasil dari artikel ini membahas mengenai eksistensi, pendidikan kewarganegaraan, kemudian *civic responsibility* dan pembelajaran daring, serta yang terakhir membahas mengenai urgensi dari eksistensi *civic responsibility* dalam pembelajaran daring. Sementara, rekomendasi artikel ini dapat menyoal kepada masyarakat yang masih awam sekali terhadap meningkatkan rasa tanggung jawab.

**Kata Kunci:** Pembelajaran Daring, *Civic Responsibility*, Pendidikan Kewarganegaraan

## PENDAHULUAN

Negara yang memiliki tingkat pendidikan baik, maka akan berdampak pula dengan keadaan suatu negaranya. Karena dengan pendidikan, semua bisa terarah dengan baik dan teratur sesuai tujuannya. Pendidikan kita saat ini, sedang mengupayakan sebuah pendidikan yang sesuai dengan harapan masyarakat dan elemen pendidikan. Tentunya hal ini membutuhkan sebuah dukungan dan dorongan dari semua pihak agar tercipta pendidikan yang sesuai dengan cita-cita bangsa. Dukungan ataupun dorongan yang dapat diberikan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam praktek dilapangan. Permasalahan pendidikan kita saat ini, sangatlah kompleks sekali, mulai dari fasilitas hingga sistem kurikulum yang bisa dikatakan setiap kepemimpinan dapat berubah. Tentu kita harus meminimalisir permasalahan, dan menciptakan sebuah solusi atas permasalahan dan perkembangan tersebut.

Berbicara mengenai pendidikan, kita tentu harus secara paham mengetahui konsep pendidikan itu sendiri. Pendidikan mempunyai peran yang vital dalam

kehidupan masyarakat. Pendidikan itu penting dalam kemajuan suatu bangsa, seperti yang dikatakan diawal bahwa pendidikan baik akan berdampak pada keadaan suatu bangsa. Karena dengan pendidikan, kita sepakat bahwa sebagai ujung tombak masyarakat untuk mengetahui yang belum diketahui, dan menjadi ajang untuk saling mengetahui tentang hal-hal baru yang bersifat inovatif dan kreatif, bahkan nantinya dapat menciptakan sebuah gagasan atau ide setelah mengetahui tentang sesuatu. Dari situlah, akan tercipta sistem-sistem yang akan membuat maju atau menjadi terobosan suatu bangsa. Seperti halnya, kita dapat melihat contoh negara-negara yang maju seperti Jepang misalnya, Jepang secara pendidikan terbilang bagus dalam hal kecanggihan teknologinya sehingga dapat menciptakan inovasi dan kreasi dari teknologi itu sendiri, beranjak dari situ dapat menjadi sebuah sektor yang menguntungkan untuk perekonomian negara.

Hamalik (2001:79) menjelaskan bahwa Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungan dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkannya untuk berfungsi secara kuat dalam kehidupan masyarakat. Mempunyai makna bahwa peserta didik atau siswa itu harus mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar dengan komunikasi yang baik, agar setelah selesai menjadi peserta didik, dapat berfungsi dimasyarakat dengan bekal yang sebelumnya yang telah dipunyainya. Menurut Zulyan, dkk. (2014) pendidikan memegang peranan penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kondisi saat ini, tentu kita mengetahui secara bersama bahwa dengan adanya Covid-19 semua sektor sangat terdampak, baik sektor ekonomi, politik, sosial budaya, dan bahkan pendidikan. Sektor pendidikan, sangat dirasakan sekali, oleh masyarakat kita secara langsung. Bagaimana tidak? Semenjak tanggal 24 Maret 2020 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran COVID, dalam Surat Edaran tersebut dijelaskan bahwa proses belajar dilaksanakan di rumah, sehingga

melalui pembelajaran daring atau jarak jauh dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Dari situ, kegiatan belajar mengajar pun mulai berubah, sekolah-sekolah yang ada di berbagai daerah menyiapkan pembelajaran daring bagi peserta didiknya. Seiring berjalannya waktu, pembelajaran daring terlaksana sehingga peserta didik mulai belajar dari rumah. Akan tetapi, terlaksananya pembelajaran daring tidak begitu saja berjalan dengan lancar, ada kenyataan-kenyataan yang terjadi dilapangan di dalam pelaksanaan pembelajaran daring, yang sedapatnya diatasi oleh semua pihak.

Pembelajaran daring menimbulkan beberapa hal yang perlu ditindak lanjuti. Sebab, semakin hari peserta didik semakin jenuh dengan pembelajaran daring dan bahkan tidak sedikit peserta didik merasa bosan dan malas untuk sekolah daring. Sementara itu, dari sisi orang tua peserta didik merasa kewalahan atas pembelajaran daring, yang dimana orang tua secara tidak langsung menjadi pendidik pengganti selama Covid-19, dan diakui oleh orang tua peserta didik bahwa itu tidak mudah dan cukup melelahkan. Apalagi, ketika orang tua peserta didik yang memiliki kesibukan lain (bekerja) yang tidak hanya dirumah sajadan lain sebagainya, tentu peserta didik yang akan terdampak. Begitu kompleks, atas apa terjadi dalam pembelajaran daring saat ini.

Dalam pembelajaran daring secara tidak langsung merubah kebiasaan peserta didik. Kebiasaan yang dimaksudkan dalam hal ini mengarah kepada kebiasaan yang bersifat negatif, contohnya seperti peserta didik hanya sekedarhadir saja dalam pembelajaran daring tanpa memperhatikan, dan bahkan kelas ditinggal untuk melakukan aktifitas yang lain. Bisa dikatakan bahwa peserta didik hanya muncul sesaat dalam pembelajaran daring kemudian ditinggal mengerjakan aktifitas yang lain. Melihat berbagai perkembangan dan permasalahan yang terjadi, tentu dibutuhkan sebuah komitmen dan kontrak belajar yang mengatur kesemuanya agar pembelajaran daring dapat berjalan sesuai harapan. Kontrak belajar tersebut paling tidak dapat mengatur apakah kamera harus dalam keadaan hidup atau dimatikan dan aturan lainnya. Hal inilah yang menimbulkan sebuah keresahan dari elemen pendidikan, dimana rasa tanggung jawab dari peserta didik ini menurun atau berkurang seiring berjalannya waktu

pembelajaran daring. Padahal peserta didik mempunyai tugas besar dalam proses pembelajaran untuk bertanggung jawab (*civic responsibility*) menerima hak dan kewajiban dalam menuntut ilmu. Sehingga dalam hal ini, pendidikan terkhusus pendidikan kewarganegaraan mempunyai peran sentral dalam eksistensi untuk meningkatkan *civic responsibility* dari peserta didik dalam pembelajaran daring dikondisi pandemic Covid-19.

## **METODE**

Metode yang digunakan oleh penulis, dalam artikel ini adalah studi kepustakaan dan pengamatan. Studi kepustakaan dimanfaatkan dalam bentuk sumber referensi dan kajian literatur (Zed, 2008). Data-data atau bahan yang diperlukan berupa buku, jurnal, kamus, dokumen, majalah, dan lain sebagainya yang dapat mendukung proses penulisan. Sedangkan, pengamatan yaitu peninjauan secara cermat atas apa yang akan diamati oleh penulis. Pengamatan merupakan kegiatan peneliti untuk menangkap gejala-gejala dari obyek yang diamati baik secara langsung maupun tak langsung. Menurut Nawari Ismail, mengatakan bahwa di dalam pengamatan peneliti harus berpedoman kepada rumus 5W+1H.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Eksistensi dan Pendidikan Kewarganegaraan**

Kemajemukan yang ada di Indonesia tentu membawa sebuah dampak yakni keberadaan. Bicara mengenai keberadaan tentu kita berbicara tentang eksistensi, sebab eksistensi berhubungan dengan keberadaan sesuatu hal. Sehingga, dalam konteks ini, kita perlu memahami lebih lanjut mengenai konsep dari eksistensi itu sendiri. Tetapi bukan hanya kemajemukan saja yang membawa keberadaan, sektor pendidikan dan sektor lainnyapun tentu akan membawa keberadaan, pada lingkungan sekitar untuk menunjukkan bahwa pendidikan itu eksistensinya ada, dan sektor lainnya juga ada.

Menurut Watloly (2001:94) bahwa eksistensi merupakan semacam keberadaan yang merupakan ciri dari kesadaran diri manusia. Artinya bahwa keberadaan manusia dengan ciri-cirinya merupakan suatu bentuk dari eksistensi

didalam lingkungan kehidupan sehari-hari. Sjafirah & Prasanti (2016:3) menyatakan bahwa eksistensi diartikan sebagai keberadaan. Keberadaan manusia yang selalu ada di dalam lingkungannya untuk menunjukkan bahwa manusia itu ada. Agar eksistensi tetap ada, tentu harus ada sikap peduli yang dimunculkan. Sikap kepedulian itu muncul dikarenakan seorang relawan mampu mengelola emosi dan sikap perbuatannya sebagai individu yang ingin terus belajar dan berkembang, bermanfaat bagi masa depan, diri sendiri dan orang yang ada di sekitarnya (Adha, 2019). Jadi orang yang mampu mengelola emosi kemudian dapat bermanfaat bagi sekitar dikategorikan seseorang yang memiliki kepedulian.

Menurut Wahyudi (2012:374) dalam eksistensi terdapat ciri umum yang menjadi dasar bersama, antara lain: (a). Motif pokok yang disebut eksistensi adalah cara manusia berada, artinya bahwa hanya dengan keberadaannya manusia dianggap eksistensi; (b). Bereksistensi harus diartikan secara dinamis, artinya bahwa sesuatu itu ada karena selalu berubah-ubah tidak tetap; (c). Dalam filsafat manusia dipandang sebagai sesuatu yang terbuka, artinya bahwa manusia mampu menerima berbagai macam masukan yang disampaikan kepadanya; (d). Filsafat ekistensialisme memberi tekanan pada pengalaman yang konkret dan eksistensi. Pengalaman yang berdasarkan pada kenyataan di lapangan walaupun pengalaman setiap individu berbeda-beda.

Selanjutnya, mengenai pendidikan kewarganegaraan, kita harus paham dengan apa itu pendidikan kewarganegaraan. Somantri (2001:154) menyatakan bahwa, PKn merupakan usaha untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar yang berkenan dengan hubungan antarwarga negara dengan negara serta pendidikan pendahuluan bela negara menjadi warga negara agar dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Maksudnya, di dalam pendidikan kewarganegaraan itu peserta didik benar-benar untuk dapat menjadi individu yang berguna bagi bangsa dan negara, baik melalui pengetahuannya ataupun keterampilan yang lain. Melalui pendidikan kewarganegaraan dapat memberikan kemampuan dalam berdemokrasi sekaligus memiliki nilai-nilai yang baik bagi kehidupan sosial warga masyarakat, siswa pada khususnya (Adha, 2015). Artinya, pendidikan kewarganegaraan memberikan ruang kepada warga

negara untuk terbuka dalam mempelajari demokrasi dan nilai-nilai yang ada di dalamnya, demi kehidupan yang lebih baik lagi.

Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang mefokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 (Depdiknas, 2006:49). Artinya bahwa, warga negara dibentuk untuk dapat taat aturan dan mengetahui serta memahami norma, kewajiban, dan haknya sebagai warga negara, serta bersikap sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di dalam masyarakat sehari-hari. Sementara itu, Secara khusus di dalam mata pelajaran PPKn dapat mengaplikasikan *project citizen* sebagai bentuk memperkuat interaksi dan karakter siswa (Adha, et al., 2019c). *Project citizen* ini mengasah kemampuan kita untuk berfikir secara kritis dan dapat mengembangkan diri kita kearah yang mempunyai kekuatan dasar dalam berargumentas.

Dengan demikian, dari penjabaran yang telah dijelaskan, dapat kita ambil sebuah kesimpulan mengenai eksistensi dan pendidikan kewarganegaraan, bahwa keberadaan dari pendidikan kewarganegaraan sangat penting untuk menjamin tetap beradanya dari PKn itu sendiri. Pendidikan kewarganegaraan harus menunjukkan konsep yang menawarkan kepada orang lain untuk berbeda, baik secara moril atau materiil. Eksistensi di dalam hal ini, artinya bahwa pendidikan kewarganegaraan harus selalu ada.

### ***Civic Responsibility dan Pembelajaran Daring***

Pada tujuan pembelajaran PKn dapat dilihat secara bersama bahwa tercantum 3 dimensi utama yaitu dipergunakan bagi perkembangan kecerdasan warga negara (*civic intelligence*), diperlukan dalam penumbuhan karakter tanggung jawab (*civic responsibility*) dan pemenuhan warga negara dalam berperan aktif (*civic participation*) (Dzulhijjah, 2020). Ketiga dimensi tersebut, saling berkaitan satu sama lain, dan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Di mana ketika warga negara itu memiliki kecerdasan, maka akan muncul rasa tanggungjawab pada dirinya atas sesuatu hal, dan warga negara tersebut akan berperan aktif di dalamnya.

Warga negara yang bertanggung jawab adalah warga negara yang baik, sedangkan warga negara yang baik ialah warga negara yang memiliki keutamaan dan kebajikan selaku warga negara (Syaifullah, 2008: 45). Artinya bahwa tanggung jawab (*civic responsibility*) memiliki nilai penting dalam kehidupan sehari-hari warga negara, bahkan disebutkan ketika bertanggung jawab maka akan menjadi warga negara yang baik. Adapun bentuk dari tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*) yakni mampu berperan dan berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Berpartisipasi dalam segala hal atau sektor yang mengarah kepada hal positif dan tentu mengedepankan rasa tanggungjawab ketika di dalam berpartisipasi diberi sebuah amanah. Tanggungjawab merupakan salah satu karakter yang dibentuk melalui pendidikan karakter (Juwita, et.al, 2019). Sebab, tanggungjawab sangat memiliki tingkat urgensi yang sangat vital dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan, menurut Hasan (2010) menyatakan bahwa tanggungjawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dilakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa. Artinya bahwa melakukan sesuatu hal yang menggambarkan keadaan dirinya.

Sehingga terdapat beberapa hal yang harus dipenuhi, untuk menjadi warga negara yang baik, yakni seperti: (1) mampu memiliki jati diri, artinya warga negara harus dapat mengidentifikasi dirinya sendiri, dalam kehidupan dimasyarakat; (2) bersyukur dengan hak dan kewajiban yang dimiliki serta dapat menerapkannya, artinya warga negara harus dapat memaksimalkan apa yang dipunya untuk hal yang lebih baik; (3) bertanggung jawab atas kewajiban yang ditanggung, artinya warga negara harus bertanggung jawab atas apa yang sedang diamanahkan pada dirinya, dijalankan dengan baik dan jangan sampai mengecewakan; (4) memiliki ketertarikan yang tinggi dalam berpartisipasi, artinya warga negara itu harus aktif dalam kegiatan yang bersifat publik dan mampu untuk mempengaruhi orang lain agar aktif berpartisipasi juga; (5) mampu menerima nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat. Artinya warga negara tidak pilih nilai dalam kehidupan, sehingga nilai-nilai yang ada diterima oleh warga negara dan nilai yang baik dapat diimplementasikan.

Sementara itu, mengenai pembelajaran daring tentu sudah tidak asing lagi, bagi kita semua mendengar kata pembelajaran daring. Sebab, saat inipun kita sedang berada pada situasi daring. Banyak saudara-saudara kita baik dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi melaksanakan pembelajaran daring, ini dampak dari sebuah adanya Covid-19. Lalu apa itu pembelajaran daring? Kita harus dapat memahaminya secara konkrit.

Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang menggunakan jaringan internet dengan aksesibilitas, konektivitas, fleksibilitas, dan kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran (Sadikin & Hamidah, 2020). Jaringan yang digunakan harus mendukung untuk proses pembelajaran, berdasarkan aksesnya, kemudian konektivitasnya, dan kemampuan untuk melakukan interaksi dalam ruang digital, sebab jika tidak mendukung akan membuat proses pembelajaran menjadi terkendala. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang mampu mempertemukan mahasiswa dan dosen untuk melaksanakan interaksi pembelajaran dengan bantuan internet (Kuntarto, 2017). Bertemu melalui ruang digital, dimana berada pada tempatnya masing-masing tetapi dalam suasana pembelajaran ditengah situasi Covid-19 seperti saat ini. Pembelajaran secara daring telah menjadi tuntutan dunia pendidikan sejak beberapa tahun terakhir (He, Xu, & Kruck, 2014). Hal ini dikarenakan, perkembangan zaman yang semakin modern dan canggih ilmu pengetahuan dan teknologinya. Kemudian, pembelajaran daring dibutuhkan dalam pembelajaran di era revolusi industri 4.0 (Pangondian, Santosa, & Nugroho, 2019). Sehingga, menjadi sebuah transformasi kearah era digital yang menjadi harapan semua elemen pendidikan, akan tetapi tentu membutuhkan sebuah persiapan yang matang ketika secara menyeluruh untuk bertransformasi kepada pembelajaran daring.

Dengan demikian kita dapat mengambil kesimpulan mengenai *civic responsibility* dan pembelajaran daring. Rasa tanggungjawab, harus ditingkatkan dengan baik untuk mengikuti pembelajaran daring. Karena kebanyakan dari kita, rasa jenuh dalam pembelajaran daring sudah mulai dirasakan oleh semua elemen. Tanggung jawab itu sangatlah penting untuk menjamin pembelajaran daring yang

sesuai dengan kemauan. Antara rasa tanggungjawab dengan pembelajaran daring merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

### **Urgensi *Civic Responsibility* Dimasa Pembelajaran Daring**

Peserta didik saat ini sudah menjalani pembelajaran daring selama kurang lebih 7 bulan, semenjak dikeluarkannya kebijakan dari Kementerian Pendidikan mengenai pembelajaran daring. Waktu 7 bulan bukanlah waktu yang singkat, waktu yang penuh dengan kekhawatiran di dalam kondisi yang krisis, terutama pada sektor pendidikan kita. Saat ini, di lapangan tidak sedikit peserta didik yang sudah mulai merasa jenuh dengan sistem pembelajaran daring. Bahkan, peserta didik sudah enggan atau tidak mau untuk mengikuti pembelajaran daring. Inilah yang menjadi persoalan baru ketika pembelajaran daring menjadi sebuah solusi.

Beberapa hal, yang dialami oleh peserta didik dalam pembelajaran daringpun terklasifikasi. Ada peserta didik yang sudah merasa jenuh dengan tugas yang diberikan oleh pendidik, kemudian tidak sedikit peserta didik memandang bahwa pembelajaran daring terlalu monoton dan hanya memberikan materi kemudian memberikan tugas, atau hanya memberikan tugas kemudian nanti dikumpulkan, fasilitas yang tidak memadai atau tidak mendukung, serta kendala wilayah yang berbeda-beda kondisi konektivitas internetnya.

Sementara itu, ada peserta didik yang ikut pembelajaran daring tetapi hanya sekedar ikut masuk pada ruangan *zoom* atau *google meet* semata tanpa memperhatikan atau mengikuti pembelajaran di dalamnya, karena tidak sedikit kasus ketika pembelajaran daring kita temukan peserta didik yang meninggalkan alat komunikasinya ditempat kemudian melakukan aktifitas yang lain, dan sengaja kamera untuk tidak dihidupkan, serta peserta didik hanya melakukan presensi di grup *whatsapp* kemudian tidak mengikuti proses pembelajaran. Hal inilah yang menjadi fokus dan konsen dalam tulisan ini.

Bagaimana sebuah rasa tanggungjawab (*civic responsibility*) peserta didik saat ini, menjadi menurun seiring berjalannya waktu pembelajaran daring. Tentu, hal ini jika tidak secepatnya untuk dicari sebuah solusi akan menjadi permasalahan dikemudian hari. Karena bukan hanya saja rasa tanggungjawab yang menurun dari peserta didik, melainkan kebiasaan akademiknyapun ikut

menurun atau berubah. Seperti, kebiasaan bangun pagi ketika sekolah *offline*, kebiasaan untuk aktif di dalam kelas, kebiasaan belajar kelompok, dan kebiasaan akademik lainnya.

Urgensi dari rasa tanggungjawab (*civic responsibility*) peserta didik saat pembelajaran daring pun perlu ditingkatkan dan perlu diolah lagi oleh pendidik. Oleh karena itu, pembinaan tanggungjawab peserta didik dapat dilakukan melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Hal tersebut, sesuai dengan tujuan dari pembelajaran PKn salah satunya adalah memiliki rasa bangga dan bertanggungjawab. Winataputra dan Budimansyah (2012) memandang ada tiga domain PKn yaitu domain kurikuler, domain sosiokultural, dan domain kajian ilmiah, ketiga domain itu saling keterkaitan satu sama lainnya. Sehingga domain tersebut tidak bisa dipisahkan dalam kajian PKn itu sendiri, domain budaya dapat dipadukan dengan domain sosial budaya, serta diakhir dapat dikaji dengan kajian ilmiah.

Pada ranah peserta didik dalam dunia pendidikan, maka peserta didik memiliki jenis tanggungjawab, yakni seperti: tanggungjawab peserta didik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, artinya bahwa peserta didik harus melaksanakannya sebagai bekal rohani dalam mencari ilmu, tanggungjawab peserta didik terhadap diri sendiri, artinya bahwa peserta didik harus mampu menghargai dirinya sendiri dan bertanggung jawab atas apa yang sudah diperbuat jika melakukan suatu kesalahan, tanggungjawab peserta didik terhadap orang tua, artinya peserta didik harus menghargai orang tua dalam mencari uang untuk sekolah, sehingga peserta didik sekolah harus sesuai aturan tidak boleh main-main, tanggungjawab peserta didik terhadap pendidik, artinya bahwa apa yang disampaikan pendidik harus diperhatikan oleh peserta didik, sebagai orang tua dilingkungan sekolah, dan tanggungjawab peserta didik terhadap tugas-tugas sekolah, artinya bahwa peserta didik harus menyelesaikan amanah berupa tugas sekolah dengan disiplin dan sesuai aturan.

Sebab tanggung jawab (*civic responsibility*) merupakan salah satu karakter. Oleh karena itu penguatan pendidikan karakter dalam suatu proses pembelajaran, saat ini sangat penting untuk mengatasi kondisi permasalahan

krisis moral yang terjadi di negara Indonesia (Zubaedi, 2011:1; Adha & Yunisca, 2016; Adha et al., 2019a). Mengatasi krisis moral, yang dirasa memang sangat efektif adalah dengan karakter, karakter dari berbagai macam sudut pandang sebagai landasan untuk melakukan sesuatu hal, karakter yang dijadikan sebagai proses pembelajaran sangat vital sekali. Pelaksanaan pendidikan karakter, tidak cukup dilakukan dengan mengajarkan sesuatu yang benar dan salah, tetapi juga membentuk kebiasaan berdasarkan contoh-contoh langsung pada peserta didik, agar timbul rasa kepedulian, kesadaran, dan pemahaman yang tinggi dalam penerapan di kehidupan sehari-hari (Mulyasa, 2013; Adha et al., 2019b; Adha et al., 2019c). Karakter tidak bisa diajarkan hanya teorinya saja melainkan butuh bukti nyata dilapangan secara konkrit dan langsung, sehingga selain dapat merasakan maka akan dapat melakukannya. Pengembangan nilai karakter dan pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari merupakan hal utama yang dikedepankan (Adha, 2020). Terlebih dalam hal ini mengenai karakter tanggung jawab, setiap dalam kehidupan harus dilaksanakan untuk tatanan kehidupan yang lebih baik lagi.

## **SIMPULAN**

Kondisi Covid-19 sangat berdampak pada dunia pendidikan. Solusi yang muncul untuk mengatasi permasalahannya adalah dengan memberlakukan pembelajaran daring. Kita ketahui bersama bahwa pembelajaran daring merupakan suatu proses pembelajaran dengan menggunakan media jaringan dan alat komunikasi untuk dapat melaksanakan proses pembelajaran dimanapun dan kapanpun sesuai dengan kesepakatan bersama. Tentu dalam pembelajaran daring banyak sekali terjadi permasalahan baik yang bersifat teknis maupun non-teknis. Beberapa kendala yang dialami oleh peserta didik atau pendidik perlu untuk diminimalisir guna menciptakan sebuah pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan walaupun di tengah situasi pandemi Covid-19.

Rasa tanggungjawab (*civic responsibility*) dari peserta didik pun tidak luput menjadi sorotan bersama. Bahwa peserta didik menunjukkan tanda-tanda menurunnya rasa tanggungjawab sebagai peserta didik dalam melaksanakan

proses pembelajaran daring. Peserta didik ketika pembelajaran daring ada yang hanya presensi saja, bergabung pada ruang *zoom* atau *google meet* saja, dan lain-lainnya. Sehingga hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, perlu adanya sebuah pemahaman lebih mengenai urgensi dari tanggungjawab (*civic responsibility*) peserta didik dalam hal ini pada pendidikan kewarganegaraan. Oleh sebab itu, untuk membentuk rasa tanggung jawab, pendidikan kewarganegaraan menjadi salah satu mata pelajaran yang cocok untuk dapat melaksanakannya. Jangan sampai tanggung jawab peserta didik menurun secara drastis sehingga akan menjadi sebuah dampak panjang kedepan jika sudah kembali kepada pembelajaran *offline*.

## REFERENSI

- Adha, M. M. (2015). Pendidikan kewarganegaraan mengoptimalkan pemahaman perbedaan budaya warga masyarakat Indonesia dalam kajian manifestasi pluralisme di era globalisasi. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 14(2), 1-10.
- Adha, M. M. (2019). Advantegous of volunteerism values for Indonesian community and neighbourhoods. *International Journal of Community Service Learning*, 3(2), 83-100.
- Adha, M. M., Ulpa, E. P., Johnstone, J. M., & Cook, B. L. (2019). Pendidikan moral pada aktivitas kesukarelaan warga negara muda (Koherensi Sikap Kepedulian dan Kerjasama Individu). *Journal of Moral and Civic Education*, 3(1), 28-37.
- Adha, M. M., Budimansyah, D., Sapriya & Sundawa, D. (2019b). Emerging volunteerism for Indonesia millennial generation: volunteer participation and responsibility. *Journal of Human Behavior in the Social Environment*, 29(4), 467- 483.
- Adha, M. M. (2020). Pemahaman dan implementasi nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari. *Media Komunikasi FIS*, 11(3), 216-224.
- Adha, M. M., & Nurmalisa, Y. (2016). Peran lembaga sosial terhadap pembinaan moral remaja di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(1): 64-71.
- Dzulhijjah, A. K. (2020). *Keefektifan program generasi berencana (Genre) Kota Surakarta dalam penguatan civic responsibility*. E-Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Kewarganegaraan. Laboratorium Program Studi PPKn FKIP Universitas Sebelas Maret.

- Depdiknas. (2006). *Kurikulum tingkat satuan pendidikan*. Jakarta: Depdiknas
- Hamalik, O. (2002). *Proses belajar mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasan. 2013. *Marketing dan kasus-kasus pilihan*. Yogyakarta: Center for Academic Publishing.
- He, W., Xu, G., & Kruck, S. E. (2014). Online IS education for the 21st century. *Journal of Information Systems Education*, 25(2), 101-106.
- Ismail, Nawari. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Umy
- Juwita, R., Munajat, A., & Elnawati. (2019). Mengembangkan sikap tanggungjawab melaksanakan tugas sekolah melalui metode bercerita pada anak usia 5-6 tahun di TK Aisyiyah Bustanul Athfal 2 Kota Sukabumi. *Jurnal Kependidikan*, 5(2), 144-152.
- Kuntarto, E. (2017). Keefektifan Model Pembelajaran Daring dalam Perkuliahan Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi. *Indonesian Language Education and Literature*, 3(1), 99-110.
- Menteri Pendidikan. (2020). Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pendidikan dalam Masa Darurat CoronaVirus (COVID-19).
- Mulyasa, E (2013). *Manajemen pendidikan karakter*. Jakarta: Bumi Aksara
- Pangondian, R. A., Santosa, P. I., & Nugroho, E. (2019). *Faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan pembelajaran daring dalam revolusi industri 4.0*. In Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS) (Vol. 1, No. 1).
- Sadikin, A & Hamidah, A. (2020). Pembelajaran daring di tengah wabah covid-19. *BIODIK: Jurnal Ilmiah Pendidikan Biologi*, 6(02).
- Soemantri. (2001). *Menggagas pembaharuan pendidikan IPS*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Sjafirah, N.A. & Prasanti, D. (2016). Penggunaan media komunikasi dalam budaya lokal bagi komunitas tanah aksara. *Jurnal Kajian Komunikasi* 4(1).
- Syaifullah. (2008). *Ilmu kewarganegaraan (Civic)*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia.
- Wahyudi. (2010). *Manajemen sumber daya manusia*. Bandung: Sulita
- Watloly. (2001). *Tanggung jawab pengetahuan mempertimbangkan epistemologi secara kultural*. Yogyakarta: Kanisius
- Winataputra, & Budimansyah. (2012). *Civic education: konteks, landasan, bahan ajar, dan kultur kelas*. Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan SPS UPI Bandung.

- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zulyan, S.V., Pitoewas, B., Adha, M. M. (2014). Pengaruh keteladanan guru terhadap sikap belajar peserta didik. *Jurnal FKIP UNILA*. 2(2), 1-12.
- Zubaedi. (2011). *Desain pendidikan karakter: konsep dan aplikasinya dalam lembaga pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

## **Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran PPKn Melalui Penambahan Jam Mata Pelajaran dan Inovasi Metode Pembelajaran**

**Alidono Setia<sup>1</sup>, Zahrotum Barorina<sup>2</sup>, Ardhana Januar Mahardhani<sup>3</sup>**  
[zahrobaror99@gmail.com](mailto:zahrobaror99@gmail.com)

### **Abstrak**

Tujuan pembelajaran dapat dikatakan sebagai hasil belajar. Di dalam proses Pencapaian suatu tujuan pembelajaran dapat diukur melalui perolehan hasil belajar. Tolak ukur dari hasil belajar dapat dilihat dari hasil belajar sebelumnya yang rendah menjadi tinggi atau sebaliknya, sehingga pendidik dapat mengetahui hasil belajar dan dapat mengetahui tujuan pembelajarannya apakah sudah tercapai atau belum tercapai. Hasil belajar tentunya harus ditingkatkan dari waktu ke waktu. Peningkatan hasil belajar ini dapat dilakukan dengan cara penambahan jam mata pelajaran yang dilakukan oleh pendidik melalui jam tambahan diluar kelas maupun didalam kelas. Di dalam proses penyampaian materi pembelajaran pendidik tentunya menciptakan inovasi-inovasi metode pembelajaran. Inovasi ini dapat berupa mengajak belajar di perpustakaan terbuka maupun perpustakaan sekolah, mengajak berkreasi ke tempat bersejarah, berkunjung ke gedung pemerintah. Inovasi lain yang dapat dilakukan adalah dengan menambah implemetasi atau praktek langsung pada materi pembelajaran PPKn. Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan merupakan ladang terciptanya atau penanaman nilai moral, karakter, dan cinta tanah air. Untuk itu penting halnya melestarikan dan menumbuhkan sikap cinta terhadap mata pelajaran PPKn pada generasi penerus bangsa Indonesia

**Kata kunci:** Hasil belajar, metode pembelajaran, PPKn

### **PENDAHULUAN**

Guru atau pendidik merupakan sumber panutan bagi peserta didiknya baik dalam segi sikap dan perbuatan. Guru juga memiliki tugas utama sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah, pelatih, penilai dan pengevaluasi peserta didik pada semua jenjang pendidikan baik anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas maupun perguruan tinggi (Mulyana, 2017: 103). Menurut undang-undang republik Indonesia tahun 1945 tahun 2005 tentang guru dan dosen menyatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Peran dari seorang guru sejatinya sangat memengaruhi cita-cita luhur bangsa Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Cita-cita bangsa Indonesia ini termuat dalam UUD 1945 pada alenia ke-4.

Dalam proses pembelajaran, guru dituntut untuk membuat siswanya atau peserta didiknya mengerti dan memahami pembelajaran yang telah disampaikan bahkan dapat mengimplentasikan kedalam kehidupan sehari-hari. Tuntutan pemahaman ini berlaku bagi semua mata pelajaran baik yang dianggap mudah, sulit, umum dan khusus. Pendidik merupakan profesi yang mulia karena dari tangannya lahirlah generasi bangsa yang dapat memajukan bangsa, muncul berbagai profesi lainnya, tercapailah cita-cita seorang peserta didik.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan salah satu mata pelajaran yang digunakan sebagai alat pengembang watak dan karakter warganegara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan pembelajaran yang penting karena digunakan sebagai sarana di dalam menanamkan sikap dan prilaku yang sesuai dengan nilai-nilai kejuangan, cinta tanah air serta rela berkorban bagi bangsa dan negara (Susanto, 2016:234). Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa penerapan dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sejatinya harus sejak dini atau pada jenjang sekolah dasar. Usia mereka ini merupakan usia yang haus akan ilmu pengetahuan dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi sehingga sangat cocok untuk diterapkannya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pemberian konsep dasar tentang materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tentunya harus terkonsep dan terarah. Hal ini dilakukan agar pola pikir dan prilaku pribadi tidak salah pada kehidupan dimasyarakat dan jenjang selanjutnya. Tujuan puncaknya adalah menjadikan generasi muda ini menjadi pribadi yang bermutu baik didalam akhlaknya maupun ilmu pengetahuannya. Jadi materi-materi yang ada di PPKn mempunyai Goals untuk dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Di dalam proses implementasi ini tentunya membutuhkan bimbingan lebih dari seorang pendidik.

Pendidikan Kewarganegaraan dapat diartikan sebagai wahana pendidikan karakter yang dibangun untuk membina dan mengembangkan warga negara yang cerdas dan baik dalam jalur pendidikan formal, informal, atau pun nonformal yang sudah menjadi bagian tujuan dari pendidikan nasional di Indonesia. Salah satu tanggung jawab Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu

mencerdaskan kehidupan bangsa, hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Pendidikan moral dan karakter pada dasarnya tidak hanya terdapat pada Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan saja tetapi juga terdapat di dalam muatan mata pelajaran lain. Akan tetapi muatan pendidikan karakter di dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki beban moral yang besar yaitu menyangkut moral bangsa Negara Indonesia. Hal ini yang kemudian dijadikan latar belakang bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan perlu untuk diperhatikan dan perlu untuk di inovasi baik di dalam proses belajarnya maupun metode pembelajarannya.

Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKn merupakan salah satu mata pelajaran yang perlu ditingkatkan pemahamannya guna mencapai tujuan yang diinginkan oleh para pendidik. Mata pelajaran ini merupakan salah satu pelajaran yang penting dan wajib untuk diajarkan karena menyangkut tentang Negara dan bangsa Indonesia. Nilai karakter yang sudah mulai luntur juga merupakan salah satu alasan kenapa mata pelajaran PPKn ini wajib untuk diajarkan serta dipahamkan kepada peserta didik. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 37 telah diamanatkan bahwa mata pelajaran ini merupakan mata pelajaran yang wajib untuk dipelajari sehingga mata pelajaran ini tidak bisa dianggap remeh.

Namun kenyataannya mata pelajaran ini dianggap remeh oleh para peserta didik, padahal realitanya mata pelajaran ini tidak mudah untuk dipahami bagi para peserta didik. Mata pelajaran PPKn yang dianggap remeh ini tentunya harus mendapat perhatian lebih dari para pendidik. Fenomena yang terjadi di lapangan pada saat KBM atau kegiatan belajar mengajar berlangsung yaitu peserta didik mengantuk, bermalas-malasan, tidak memperhatikan dan kurang paham terhadap materi yang disampaikan. Kebanyakan dari para peserta didik menganggap pembelajaran PPKn membosankan dan kurang menarik. Hal yang mendorong pembelajaran PPKn dianggap membosankan dan kurang menarik oleh para peserta didik adalah metode pembelajaran yang diterapkan oleh pendidik yang kebanyakan masih menggunakan metode tradisional atau konvensional. Kurangnya inovasi pada metode pembelajaran PPKn menyebabkan turunnya hasil

belajar siswa. Walaupun sudah menganut kurikulum 2013 atau biasa disebut *K-13* Kejadian di lapangan menunjukkan guru masih menggunakan sistem pembelajaran dengan metode *TCL (Teacher Center Learning)* yang menjadikan guru sebagai sumber dari segala informasi. Definisi dari Kurikulum 2013 sendiri yaitu kurikulum yang menganut sistem *SCL (Student Center Learning)* dimana guru hanya dijadikan sebagai fasilitator saja dan siswa yang lebih mendominasi pada saat KBM berlangsung.

Kurikulum 2013 seharusnya dijalankan dengan semestinya oleh para pendidik sehingga peserta didik tidak pasif pada saat KBM berlangsung. Di lapangan kurikulum 2013 dianggap tidak efektif oleh para pendidik karena peserta didik tidak mau aktif didalam pembelajarannya. Peserta didik yang tidak mau aktif ini tentunya menjadi PR tersendiri bagi para pendidik. Kepasifan dari peserta didik ini bukan tanpa sebab. Salah satu sebab dari pasifnya peserta didik dapat berasal dari ketidakpahaman dan juga timbulnya perasaan bingung yang muncul pada diri peserta didik terhadap materi baik pada materi yang sulit, medium maupun mudah. Di dalam menjalankan kurikulum 2013 tentunya harus menerapkan pembelajaran abad 21. Pembelajaran abad 21 mencerminkan 4 hal yaitu *Critical thinking and problem solving, Creativity and innovation dan Communication collaboration*.

Hal ini mengharuskan pendidik untuk membuat sistem sendiri dalam meningkatkan hasil belajar siswa yaitu melalui penambahan jam mata pelajaran disertai dengan merenovasi metode pembelajaran. Penambahan jam mata pelajaran ini dapat terjadi pada saat pembelajaran di kelas maupun di luar kelas sedangkan inovasi metode pembelajaran dilakukan oleh para pendidik dengan menciptakan metode-metode pembelajaran yang belum pernah diterapkan ataupun yang sudah pernah diterapkan tetapi sudah dimodifikasi sehingga akan menarik minat dan memotivasi peserta didik di dalam memahami dan mempelajari materi-materi yang diajarkan. Di dalam meningkatkan hasil belajar tentunya terdapat beberapa faktor yang memengaruhi di antaranya faktor dari dalam yang meliputi semangat, respon, dan motivasi. Sedangkan untuk faktor eksternalnya meliputi lingkungan belajar, tujuan pembelajaran, dan metode pembelajaran.

Perkembangan informasi dan teknologi yang sangat pesat tidak bisa dipungkiri dan menjadi bagian penting dari pendidikan dan pembelajaran. Guru yang merupakan ujung tombak sebuah pendidikan tentunya harus melek terhadap teknologi, mengikuti perkembangan terkini, serta dapat menyesuaikan dan menempatkan serta memanfaatkan teknologi yang ada kedalam proses pembelajaran. Pada era 4.0 ini sudah dapat dipastikan bahwa setiap pembelajaran mengandung muatan teknologi di dalamnya. Proses pembelajaran pada era ini sudah tidak dapat terbatas oleh ruang dan waktu. Karena pembelajaran dapat dilakukan kapan pun, di mana pun, serta tidak mengenal jarak. Peran guru di era 4.0 ini juga harus profesional yaitu dengan menerapkan dengan baik tata cara pembelajaran yang modern atau dapat dikatakan sebagai pembelajaran abad 21. Inovasi ini sangat dibutuhkan didalam prose pembelajaran karena dapat memajukan dan dapat mendorong tercapai tujuan pendidikan nasional.

Sebuah cara di dalam mengetahui peningkatan terhadap hasil belajar dapat diketahui apabila sudah melakukan evaluasi pembelajaran. Dalam peningkatan hasil belajar tersendiri tentunya mengandung sebuah perbandingan antara hasil pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran sesudahnya. Hal yang dapat diperhatikan dalam peningkatan hasil pembelajaran adalah hasil akhirnya yaitu jika nilai akhir lebih tinggi daripada nilai awal maka peningkatan hasil belajar sukses/efektif sedangkan jika hasil akhirnya lebih rendah daripada hasil awal maka proses peningkatan hasil pembelajaran perlu diperbaiki lagi/tidak efektif karena belum mencapai target keberhasilan.

Mata pelajaran PPKn merupakan mata pelajaran yang sangat penting untuk diajarkan kepada peserta didik yang bertujuan untuk memahami peserta didik tentang kenegaraan dan juga kebangsaannya sendiri agar lebih mencintai bangsanya sendiri. Pendidikan kewarganegaraan juga menumbuhkan sikap bela negara, penanaman nilai karakter dan juga memahami siswa untuk mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Untuk itu penambahan jam pada mata pelajaran PPKn sangat perlu dilakukan agar peserta didik lebih memahami materi-materi yang ada di dalam pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Hal yang mendasari penambahan jam mata pelajaran pada

mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah banyak sekali nilai pada mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang memprihatinkan dan perlu untuk ditindak lanjuti. Sudah seharusnya mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diberi perhatian khusus karena materi yang termuat dalam mata pelajaran ini banyak sekali mengandung pengetahuan kewarganegaraan, kemampuan kewarganegaraan, dan sikap kewarganegaraan.

Di dalam sebuah pembelajaran tentunya membutuhkan sebuah inovasi atau pembaharuan untuk melengkapi segala kekurangan yang ada sebelumnya. Inovasi yang dilakukan dalam pembelajaran dapat berupa inovasi metode pembelajaran. Proses pembelajaran tidak dapat berlangsung tanpa adanya metode. Prosedur didalam proses pembelajaran dapat dikatakan sebagai arti dari metode. Menurut safari (Sulastri, 2019:15) menegaskan bahwa metode merupakan suatu cara untuk mencapai tujuan. Jadi dalam melakukan pembelajaran perlu peran dari metode. Metode ini sering kali dikaitkan dengan kata mengajar yaitu metode mengajar yang dilakukan oleh seorang pendidik.

Metode pembelajaran menurut Sabri (Melisa, 2020:61) merupakan cara-cara atau teknik penyajian bahan pelajaran baik secara individual atau kelompok. Dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran merupakan suatu cara untuk mengimplementasikan prosedur atau rencana yang dibuat dalam bentuk *action* atau kegiatan nyata untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran yang sering diterapkan akan menimbulkan kebosanan sehingga memerlukan pembaharuan. Dalam kegiatan nyatanya metode pembelajaran memerlukan pembaharuan atau inovasi setiap waktunya hal ini berguna untuk kelangsungan dari metode pembelajaran sendiri yang berdampak pada peserta didik. Inovasi pembelajaran berkaitan dengan pembaharuan dalam pembelajaran.

Inovasi pembelajaran berkaitan dengan upaya baru dalam proses pembelajaran, dengan menggunakan berbagai metode, pendekatan, sarana, suasana yang mendukung untuk tercapainya suatu tujuan pembelajaran. Berdasarkan definisi inovasi metode pembelajaran diatas dapat disimpulkan bahwa inovasi pembelajaran merupakan pembaharuan yang dilakukan pada

komponen, cara penyampaian serta muatan yang terdapat didalamnya dengan menggunakan metode yang belum ada sebelumnya. Penting halnya pendidik mengetahui bagaimana cara meningkatkan hasil belajar melalui penambahan jam mata pelajaran pada mata pelajaran PPKn dan Inovasi apa saja yang diperlukan oleh guru dalam membuat metode pembelajaran yang menarik dan tidak membosankan.

## **METODE**

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode kepustakaan ini adalah metode yang menggunakan riset pustaka untuk memperoleh data. Metode kepustakaan sendiri dapat dilakukan dengan mengumpulkan literatur berupa buku dan jurnal tanpa harus riset ke lapangan. Teknik pengumpulan datanya dapat berasal sari buku-buku yang mengandung informasi yang dibutuhkan, media jurnal, artikel, manuskrip dan sumber referensi lainnya. Dengan banyaknya sumber literatur penulis dapat memperkaya tulisannya melalui berbagai pendapat dan dapat mengkaji buku yang telah diperoleh. Metode penelitian ini mengandung beberapa ciri di antaranya peneliti berhadapan langsung dengan teks (naskah) atau data angka yang bukan hasil dari penelitian lapangan bahkan saksi-saksi lapangan atau orang yang mengalami kejadian. Data kepustakaan juga bersifat *ready* atau peneliti tidak perlu kemana-mana hanya cukup menghadap sumber referensi saja. Data ini bersifat sekunder atau bisa diartikan peneliti memperoleh hasil penelitian dari orang lain. Kondisi data pada penulisan dengan metode kepustakaan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu karena datanya sudah mati dan akan tetap sama. Metode kepustakaan dapat dikatakan sebagai suatu cara seseorang dalam mengarang dengan memanfaatkan berbagai sumber untuk menulis guna menunjang penyelesaian tulisan yang dibuatnya (Siddik, 2016: 16).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Cara Pendidik dalam Meningkatkan Hasil Belajar Melalui Penambahan Jam Mata Pelajaran pada Mata Pelajaran PPKn**

Nilai hasil belajar adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan belajar peserta didik. Nilai hasil belajar ini mewakili dari nilai kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dalam memperoleh hasil belajar tentunya terdapat beberapa faktor yang memengaruhi baik faktor dari dalam (internal) maupun faktor dari luar (eksternal). Hal-hal yang termasuk di dalam faktor internal yaitu kedisiplinan dalam belajar, semangat belajar, motivasi serta respon. Sedangkan faktor eksternalnya yaitu lingkungan belajar, tujuan pembelajaran, metode pembelajaran dan inovasi pembelajaran. Semua faktor ini merupakan faktor yang akan menjadi tolak ukur bagi peningkatan hasil belajar terlebih bagi metode pembelajaran yang diterapkan oleh pendidik.

Di dalam penerapan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terdapat suatu tujuan nasional di antaranya yaitu: (1) Menampilkan karakter yang mencerminkan penghayatan, penerapan, dan pengamalan, nilai dan moral Pancasila serta personal dan sosial. (2) Memiliki komitmen konstitusional yang ditopang sikap positif dan pemahaman utuh tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. (3) Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif serta memiliki semangat kebangsaan serta cinta tanah air yang dijiwai dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika dan komitmen Negara Kesatuan Republik Indonesia. (4) Berpartisipasi secara aktif cerdas dan bertanggung jawab sebagai anggota masyarakat, bangsa, dan warga Negara sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang hidup bersama sesuai dengan tatanan sosial dan budaya.

Ujung tombaknya suatu pendidikan berasal dari kemampuan para pendidiknya. Untuk itu pendidik harus berusaha mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dalam mensukseskan tujuan pendidikan. Setiap mata pelajaran tentunya mempunyai kesulitan tersendiri termasuk juga pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Materi-materi yang dianggap sulit ini tentunya harus diberi

perhatian khusus oleh para pendidik ditambah lagi dengan Image pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang membosankan karena materinya banyak mengandung cerita. Proses pembelajaran yang membosankan dapat diringankan dengan adanya teknologi 4.0 yaitu dengan pembuatan berbagai metode pembelajaran berbasis teknologi serta penambahan literature pembelajaran.

Bagian terpenting berubahnya tingkah laku dapat dikatakan sebagai hasil belajar. Hasil belajar menurut Sudjana (Syahputra, 2020:24) merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan mengajar. Apabila seseorang telah belajar maka akan terjadi sebuah perubahan tingkah laku pada orang tersebut misalnya dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak mengerti menjadi mengerti dan dari tidak paham menjadi memahami.

Hasil belajar yang tinggi didapat karena terjadi peningkatan kemampuan pada diri siswa karena sudah menerima pengalaman belajar. Hasil belajar dapat dikatakan berhasil jika ada peningkatan atau ada perubahan tingkah laku pada saat pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran yang baru dilakukan. Untuk memahami siswa agar terjadi perubahan tingkah laku yang mencakup dari belum tahu menjadi tahu, yang tidak mengerti menjadi mengerti dan tidak faham menjadi faham tentunya memerlukan alokasi waktu yang cukup agar perubahan tingkah laku dapat terimplementasi dengan baik dan dapat mencapai tujuan pembelajaran.

Alokasi waktu merupakan waktu perkiraan untuk peserta didik dapat memahami materi pembelajaran. Alokasi waktu pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang hanya dibuat 3x45 menit pertemuan dalam satu (1) minggu tentunya tidak cukup untuk para peserta didik memahami materi-materi yang ada, apalagi materi-materi tersebut wajib untuk dipahami oleh peserta didik. Penting halnya bagi guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk menambah jumlah mata pelajaran menjadi 3x45 menit. Penambahan ini tentunya tidak harus dilakukan di dalam kelas tetapi bisa dilakukan di luar kelas seperti halnya les yang dilakukan setelah pulang sekolah.

Penambahan jam mata pelajaran juga dapat dilakukan dengan mengadakan ekstrakurikuler yang memuat tentang pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Penambahan jam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan melalui ekstrakurikuler merupakan salah satu terobosan yang menarik karena belum pernah ada yang menerapkan sebelumnya. Terobosan ini tentunya menjadi pergumulan tersendiri bagi para pendidik untuk membuat program di dalamnya yang menarik minat dari para siswanya.

### **Inovasi yang Diperlukan oleh Guru dalam Membuat Metode Pembelajaran yang Menarik dan Tidak Membosankan**

Inovasi memiliki definisi sebagai usaha penemuan sesuatu yang benar-benar baru. Inovasi memiliki keterkaitan dengan *invention* dan *discovery*. *Invention* merupakan penemuan sesuatu yang benar-benar baru dan belum ada sebelumnya dapat dikatakan sebagai mahakarya manusia sendiri sedangkan *discovery* merupakan penemuan terhadap benda maupun yang lainnya yang sudah pernah ditemukan sebelumnya. Inovasi biasanya berisi tentang ide, hal praktis, metode, cara dan barang-barang buatan manusia yang dirasa sebagai sebuah penemuan baru bagi seseorang atau kelompok orang atau masyarakat. Inovasi dapat dimaknai sebagai penerimaan gagasan, ide, objek, sebagai hal yang baru bagi oleh individu ataupun sekelompok orang. Inovasi menurut UU. No. 18 tahun 2002 yaitu penerapan pengetahuan dan teknologi yang telah ada dengan menggunakan cara yang baru ke dalam suatu produk. Dapat disimpulkan bahwa inovasi merupakan suatu gagasan, ide, pendapat atau penemuan terhadap sesuatu yang belum pernah ditemukan sebelumnya.

Gagasan, ide, pendapat atau penemuan sesuatu untuk dapat dikatakan sebagai motivasi maka harus masuk kedalam ciri-ciri dari inovasi itu sendiri. Ciri inovasi ini sendiri yaitu khas, di mana inovasi belum pernah ada dan mempunyai ciri khusus yang belum dimiliki oleh inovasi atau penemuan-penemuan pembaharuan yang lain tanpa ciri khas tersendiri sebuah ide, gagasan, pendapat atau penemuan baru tidak dapat dikatakan sebagai inovasi. Inovasi juga harus baru yang merupakan inovasi yang masih perdana atau belum ada yang membuat inovasi ini. Terencana merupakan salah satu ciri inovasi yang dapat dimaknai

sebagai suatu produk atau program yang sudah direncanakan secara matang untuk dilaksanakan didalam mengembangkan kegiatan atau objek-objek tertentu. Ciri yang selanjutnya yaitu memiliki tujuan.

Dasar hukum dari inovasi pembelajaran sendiri terdapat pada (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar dan suasana belajar yang membutuhkan timbal balik dari peserta didik berupa keaktifan di dalam kelas, mengembangkan potensi dirinya agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, berakhlak mulia, kecerdasan, kepribadian serta keterampilan untuk dapat menyesuaikan diri dilingkungan masyarakat. (2) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. (3) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Guru yaitu pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. (4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru. (4) Peraturan Pemerintah tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 1 ayat 4 tentang standar kompetensi lulusan dan pasal 5 ayat 1 tentang standar isi.

Mengapa perlu inovasi didalam pembelajaran? Hal ini dikarenakan proses pembelajaran terus berlanjut dan sangat membutuhkan adanya inovasi pembelajaran. Inovasi ini juga erat hubungannya dengan proses pembelajaran yang melibatkan peserta didik dan guru yang memiliki karakteristik khas, yaitu keinginan untuk mengembangkan diri, berpikir kritis dan berprestasi. Kesempatan perbaikan belajar bagi peserta didik merupakan kebutuhan yang akan dilayani secara individual oleh pendidik. Peserta didik merupakan pendorong utama timbulnya pembaharuan pendidikan, pembaharuan kurikulum, dan pembaharuan pembelajaran. Di dalam membangun proses pembelajaran yang hidup, terintegrasi dan bermakna, keinginan mencoba guru, menemukan, menggali, dan mencari berbagai terobosan, pendekatan, metode, strategi pembelajaran.

Selain inovasi pada ranah pembelajaran juga terdapat inovasi pada pendidiknya yang juga perlu berinovasi dalam pembelajaran. Inovasi ini berupa guru yang lebih kreatif dan inovatif dalam menciptakan proses pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar. Hal ini dilakukan agar proses pembelajaran

dapat berjalan dengan efisien dan efektif karena dapat memotivasi peserta didik agar bisa berpikir tingkat tinggi atau biasanya disebut sebagai HOTS, kreatif, dan inovatif. Pernyataan yang mendukung bahwa inovasi pada proses pembelajaran yaitu pendapat dari bapak Ki Hajar Dewantara, dimana sekolah harus menciptakan/dibangun menjadi taman bermain dan belajar.

Sejatinya manusia sudah ditakdirkan untuk belajar dari sejak masih usia dini. Proses pembelajaran pada manusia tidak berlangsung selama beberapa waktu saja tetapi berlangsung secara terus menerus sampai akhir hayat hidupnya sehingga pembelajaran pada manusia dapat disebut sebagai pembelajaran sepanjang hayat. Banyak sekali pepatah yang mengatakan bahwa pembelajaran itu sangat penting contohnya “Tuntutlah Ilmu Sampai ke Negri China” hal ini menunjukkan bahwa belajar itu sangat diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia. Pembelajaran juga diperlukan untuk memperbaiki manusia itu sendiri dari waktu ke waktu. Pembelajaran didefinisikan sebagai kegiatan untuk memperoleh pengetahuan. Menurut KBBI pembelajaran merupakan proses, cara, perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. pembelajaran merupakan proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar yang meliputi guru dan siswa yang saling bertukar informasi (Oktariyani, 2019: 1).

Pembelajaran mempunyai definisi yang mirip dengan pengajaran tetapi memiliki konotasi yang berbeda. Dalam konteks pendidikan guru mengajar agar peserta didik dapat mengerti dan memahami sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Keberhasilan ini berupa aspek pengetahuan (kognitif), perubahan sifat (afektif) dan keterampilan (psikomotor). Definisi pembelajaran yang lain dimaknai sebagai membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar yang merupakan penentu utama dari keberhasilan pendidikan. Pembelajaran juga dapat dikatakan sebagai komunikasi dua arah yaitu guru dan peserta didik. Pembelajaran juga dapat dimaknai sebagai suatu sistem yang tersusun dari unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan produser yang saling memengaruhi pencapaian tujuan pembelajaran. Setelah berbagai definisi pembelajaran dijelaskan maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran merupakan proses penyaluran informasi dari orang yang satu

kepada orang yang lainnya. Informasinya dapat diperoleh melalui berbagai literatur baik dari seorang pendidik, buku, internet maupun sumber literatur lainnya.

Inovasi pembelajaran merupakan pembaharuan dalam pembelajaran. Sehingga dapat dipahami bahwa inovasi pembelajaran merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk memperbarui metode, pendekatan, sarana dan prasarana untuk mencapai tujuan pendidikan. Pembaharuan terhadap suatu komponen yang diperlukan dalam memahami materi pembelajaran yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan yang berlangsung juga dapat dikatakan sebagai definisi inovasi pembelajaran. Inovasi didalam pembelajaran sangat penting dilakukan karena pembelajaran dari tahun ketahun tentunya sudah tidak sama lagi dan membutuhkan sebuah pembaharuan apalagi pada era 4.0 ini. Pembelajaran pada era 4.0 ini dituntut mau tidak mau harus modern karena untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan atau agar bisa bersaing dengan lingkungan yang lainnya.

Metode dalam inovasi pembelajaran dapat berupa multimedia, internet, pengalaman, eksperimen, kreatifitas. Multimedia merupakan salah satu alat yang digunakan pendidik untuk mengembangkan inovasi pembelajaran. Kombinasi multimedia sendiri akan menghasilkan sebuah metode baru. Jadi penguasaan pada multimedia sangat perlu untuk dilakukan oleh guru karena dapat menjadi modal penting didalam mengembangkan inovasi pembelajaran. Internet merupakan salah satu metode inovasi pembelajaran. Penting halnya pendidik dapat menguasai teknologi di era 4.0 ini dan hal ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Internet merupakan sebuah ladang bagi informasi yang dapat menjadi bagian penting pengembangan inovasi dalam pembelajaran. Metode inovasi yang lainnya yaitu pengalaman. Dari sebuah pengalaman pendidik dapat menimbulkan lahirnya sebuah inovasi baru. Banyaknya pengalaman yang dimiliki oleh pendidik akan memudahkan pendidik dalam mengembangkan model dan metode pembelajaran. Dari sebuah pengalaman seorang pendidik juga dapat dengan mudah memodifikasi pembelajaran. Sebuah inspirasi juga dapat muncul ketika pembelajaran sedang berlangsung. Ini yang kemudian disebut sebagai inovasi pembelajaran.

Inovasi yang baru ditemukan atau dilahirkan tentunya memerlukan sebuah percobaan atau eksperimen sebelum di implementasikan dan digunakan oleh khalayak ramai. Di mana percobaan ini termasuk kedalam metode inovasi pembelajaran. Eksperimen merupakan salah satu langkah nyata yang dapat dilakukan oleh pendidik untuk menguji hasil temuan yang berupa inovasi pembelajaran. Dalam eksperimen yang dilakukan tentunya terdapat kegagalan. Namun dari adanya kegagalan ini pendidik dapat mengevaluasi sumber kegagalan untuk dapat diperbaiki bahkan disempurnakan lagi. Sehingga kedepannya inovasi dapat diimplementasikan ke ranah kegiatan belajar mengajar atau KBM. Kreatifitas juga merupakan sebuah metode yang dapat digunakan dalam inovasi pembelajaran. Sejatinya kreatifitas sendiri dapat muncul dan berasal dari dalam pribadi pendidik.

Tujuan dari inovasi pembelajaran adalah untuk meningkatkan hasil pembelajaran dengan membandingkan hasil evaluasi pembelajaran yang sudah ada sebelumnya dengan evaluasi pembelajaran yang baru. Tujuan inovasi secara khusus adalah untuk berusaha meningkatkan kemampuan yang dimiliki sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik dari sebelumnya sedangkan secara umum tujuan inovasi pembelajaran yaitu sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Kesadaran kita akan pembelajaran yang dimaknai sebagai interaksi yang bersifat kompleks dan timbale balik antara pendidik dengan peserta didik. Dalam interaksi ini tentunya membutuhkan peran aktif dari peserta didik untuk membuat sebuah proses pembelajaran hidup dan tidak membosankan.

Perbaikan atau pembaharuan terhadap metode pembelajaran penting untuk dilakukan hal ini dapat terjadi karena metode yang sudah ada tidak dapat berjalan dengan semestinya. salah satu metode pembelajaran yang perlu diperbaiki adalah guru yang masih menggunakan metode tradisional atau biasa disebut TCL (*teacher Center Learning*). Perbaikan dapat berupa pelaksanaan sistem SCL (*Student center Learning*) sesuai dengan semestinya yaitu menggunakan metode aktif berpikir, memperluas pikiran belajar siswa, penerapan 5 teori yaitu: Mengingat, Memahami, Menerapkan, menganalisis dan mencipta.

Metode yang diperlukan oleh siswa agar tidak merasa bosan biasanya yang berkerja penting adalah guru. Bagaimana cara guru dalam mengolah berbagai macam strategi sesuai dengan kemampuan dan kemauan siswa belajar. Adanya perpustakaan yang terdapat bermacam-macam buku tentunya dapat dimanfaatkan oleh siswa untuk dibaca pada saat jam istirahat. Metode yang digunakan pada pembelajaran PPKn yaitu guru banyak mempersiapkan buku-buku yang menyangkut tentang sejarah atau pelajaran seni dan budaya. Dengan adanya bahan yang sudah dipelajari oleh siswa tersebut, maka selanjutnya adalah bagaimana umpan balik dari guru. Penting halnya guru mengajak siswa-siswinya untuk mengadakan lomba seperti pertandingan antarkelas, membuat poster-poster gambar pahlawan, membuat karikatur, lomba pidato kebangsaan dan masih banyak lagi. Hal ini dilakukan untuk menarik minat siswa dalam mempelajari materi-materi pembelajaran PPKn.

Di sisi lain, di luar jam sekolah, guru dapat mengajak siswa untuk berkunjung ke perpustakaan terbuka dapat membantu siswa dalam menghilangkan kegalauan atau rasa bosan dalam menerima proses pembelajaran. Selain itu guru juga mengagendakan siswa untuk berkunjung ke makam pahlawan, ke tempat-tempat bersejarah dan kunjungan gedung pemerintah. Hal ini dilakukan untuk memberikan motivasi siswa agar lebih tertarik untuk mempelajari PPKn dan menganggap PPKn bukan pelajaran yang membosankan tetapi mengasikkan. Apalagi di masa pandemi covid-19 saat ini tentu siswa akan merasa bosan dengan ketentuan proses pembelajaran nya melalui online. Kebanyakan siswa akan lebih senang proses pembelajaran nya tatap muka dibanding dengan online karena siswa lebih mengerti dan paham ketika proses KBMnya dilakukan secara tatap muka. Oleh karenanya agar proses pembelajaran nya efektif secara kesetaraan strategi yang dilakukan oleh guru adalah melalui pendekatan personal dengan ketentuan menjalankan protokol kesehatan. Apalagi akhir-akhir ini kita dikagetkan oleh penjuruh elit pemerintahan bahwasanya mapel sejarah akan dihapus kurikulum nasional apa jadi nya bangsa ini bila cucu-cucu kita nantinya tidak mengenal sejarah bangsa ini dan bagaimana jadinya bangsa kita.

Pada masa pandemi ini inovasi dalam pembelajaran juga harus tetap dilakukan bahkan penggunaan teknologi dalam penerapan pembelajaran sangat diperlukan. Pada era sekarang ini kurangnya prasarana tidak menjadi alasan bagi pendidik dan peserta didik. Hal ini dikarenakan karena semua sekolah menerapkan pembelajaran secara online sehingga para kaum pendidik mau tidak mau harus melek terhadap teknologi 4.0 yang sudah ada dan didalam proses pembelajarannya menerapkan abad 21 yaitu pembelajaran yang berfokus pada pengembangan proses berpikir tingkat tinggi pada siswa. Didalam menjalankan konsep ini tentunya terdapat konsekuensi yang harus dilakukan yaitu pada proses pembelajarannya/penyampaian materi terkait. Materi pembelajaran merupakan hal yang wajib untuk dikembangkan hal ini digunakan untuk menumbuhkembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa itu sendiri. Materi yang dikembangkan adalah materi secara teoritis maupun implementasi kedalam kehidupan sehari-hari. Keberhasilan pembelajaran abad 21 dapat terlihat pada keberhasilan didalam menerapkan proses pembelajaran yang inovatif dan membuat siswa aktif didalam kelas termasuk didalamnya aktif secara psikis, fisik maupun kognitifnya. Didalam menjalankan prakteknya pembelajaran abad 21 harus mencerminkan 4 hal yaitu: *Critical thinking and problem solving, Creativity and innovation, Communication and collaboration.*

Permasalahan bagi peserta didik yang belum bisa mengakses teknologi, belum mempunyai alat komunikasi, terkendala sinyal, maupun gagap teknologi dapat diatasi dengan pembagian *flasdisk* yang berisi materi pembelajaran dan juga pembentukan kelompokan belajar sehingga seorang guru akan mendatangi salah satu rumah siswanya untuk melakukan proses bimbingan pembelajaran serta melakukan pendekatan terhadap orang tua untuk mensukseskan proses pembelajaran.

Seperti pernyataan pemerintah, Pada Kamis pekan lalu (17/9/2020) beredar draf bertanda Kemendikbud tertanggal 25 Agustus 2020 dengan judul "Sosialisasi Penyerderhanaan Kurikulum dan Asesmen Nasional". Pada salah satu bagian, draf itu menjelaskan tentang ketidakwajiban pelajar di tingkat SMA/ sederajat untuk mengambil mata pelajaran Sejarah. Untuk siswa pada

jenjang kelas 10 SMA/ sederajat pelajaran Sejarah dilebur bersama pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Artinya Sejarah tidak lagi menjadi mata pelajaran yang diwajibkan untuk semua siswa. Pernyataan ini tentunya mengandung berbagai kontroversi. Apalagi bagi kalangan guru. Sejarah yang seharusnya termasuk mata pelajaran wajib tentunya harus dilestarikan supaya generasi penerus negeri mengerti dan memahami bagaimana secara dari bangsa Indonesia sendiri. Maka salah satu ketentuan strategis yang diperlukan di atas yaitu guru adakan taman baca. Dengan adanya salah satu bahan ini tentu siswa dengan sendirinya akan lebih mengenal bangsa ini dan mendorong kemauan untuk terus belajar sehingga dengan sendirinya bisa berjiwa kritis

Lahirnya inovasi pembelajaran pada era 4.0 ini dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran sebenarnya sudah ada sebelum adanya era industry. Dalam dunia pendidikan sendiri pemanfaatan teknologi untuk inovasi pembelajaran sudah tersedia dalam jaringan. Akan tetapi pemanfaatan teknologi pada saat sebelum era 4.0 masih mengalami keterbatasan kemampuan dan pengetahuan sehingga berdampak pada minimnya pemanfaatan teknologi pada saat itu. Pemanfaatan teknologi pada era 4.0 ini tidak dapat dipungkiri sebagai salah satu pemeran didalam proses pendidikan dan pembelajaran. Dalam menjalankan proses pembelajaran pendidikan harus mampu menyesuaikan serta memasukkan teknologi didalam proses pembelajaran. Hal ini dilakukan agar proses inovasi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan semestinya. Semakin canggihnya teknologi tentunya akan mempermudah proses inovasi pembelajaran karena akan mempermudah pendidik didalam pembuatan prangkat pembelajaran dan juga metode pembelajarannya. Kreativitas guru dalam pemanfaatan teknologi di era 4.0 ini juga sangat memengaruhi kreasi inovasi pembelajaran.

Inovasi pada bidang pendidikan atau pembelajaran tidak dapat berdiri sendiri dan membutuhkan penyangga yaitu semua unsur di dalam pendukung proses pembelajaran seperti inovator, penyelenggara inovator berupa pendidik dan peserta didik. Keberhasilan dari inovasi sendiri dapat didukung oleh beberapa faktor seperti kelengkapan fasilitas.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah jelaskan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang sangat penting untuk dipelajari dan juga salah satu mata pelajaran yang perlu mendapat tambahan jam pada alokasi waktunya. Penambahan jam mata pelajaran ini dilakukan untuk meningkatkan hasil pembelajaran siswa. Inovasi metode pembelajaran juga sangat penting dilakukan karena dapat memengaruhi minat belajar peserta didik yang akan memengaruhi hasil belajarnya juga. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh guru adalah mengagendakan proses belajar dan mengajar pada mata pelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan di luar kelas yaitu mengajak terjun langsung ke perpustakaan, ke makam pahlawan, ke museum, mengunjungi gedung pemerintahan, belajar di ruang terbuka dan lain sebagainya. Hal ini merupakan terobosan yang perlu dilakukan oleh guru. Pada era pandemic Covid-19 seperti ini inovasi atau terobosan yang dilakukan oleh seorang guru adalah dengan membuat media pembelajaran seperti video pembelajaran yang dibagikan melalui *flasdisk* hal ini digunakan untuk mempermudah peserta didik jika terkendala oleh sinyal. Untuk peserta didik yang terkendala alat komunikasi guru melakukan terobosan dengan mengunjungi rumah salah satu peserta didik dengan membuat kelompok belajar.

## **REFERENSI**

- Ahadang, et. al. (2014). Meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran PPKn di kelas IV SDN Palabatu 1 melalui metode diskusi. *Jurnal Kreatif Tadulako Online*, 2(3). <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/JKTO/article/view/2941>.
- Atsar, A. (2020). Penerapan metode diskusi sebagai salah satu upaya meningkatkan kreativitas belajar ppkn pada materi perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia. *Civic Edu: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 3(1), 1-13.
- Joenaidy, A. M. (2019). *Konsep dan strategi pembelajaran di era 4.0*. Yogyakarta: Laksana.
- Melisa. (2020). *Siapa bilang mengajar matematika sulit*. Guepedia.

- Mulyana. (2017). *Rahasia menjadi guru hebat*. Yayasan Kita Menulis.
- Nana. (2020). *Inovasi pembelajaran digital menggunakan model pembelajaran blended*. Guepedia.
- Samsidar. (2019). Meningkatkan hasil belajar PKN melalui model pembelajaran scramble siswa di SDN 13 Muara Kuang. *Jurnal Ilmiah*, 12(1), 06-30.
- Sinar. (2018). *Metode active learning*. Yogyakarta: Grup Penerbit CV Budi Utama.
- Wahyuni, E, S. (2020). *Model pembelajaran mystery learning*. Yogyakarta: Grup Penerbit CV Budi Utama
- Siddik, M. (2016). *Dasar-dasar menulis dengan penerapannya*. Malang: Tunggal Mandiri Publishing.
- Sulaiman, F. (2020). *Pendidikan di era revolusi 4.0*. Yayasan Kita Menulis.
- Susanto, A. (2016). *Teori belajar dan pembelajaran di sekolah dasar*. Jakarta: Kencana.
- Sulastri, E. (2019). *9 Aplikasi metode pembelajaran*. Guepedia.
- Syahputra, E. (2020). *Snowball throwing tingkatkan minat dan hasil belajar*. Sukabumi: Haura Publishing.
- Oktariyani. (2019). *Pembelajaran gerakan senam irama berbasis multimedia*. Lampung: CV Gre Publishing.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Inovasi Pendidikan dan Teknologi.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 37.
- Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

# Peran dan Tantangan *Civil Society* dalam Kehidupan Demokrasi di Indonesia

Alil Rinenggo  
[rinenggoalil@gmail.com](mailto:rinenggoalil@gmail.com)

## Abstrak

*Civil Society* dianggap sebagai aktor sentral dalam proses demokratisasi. Misalnya, dapat mendiagnosis lemahnya peran lembaga negara, indoktrinasi ideologi, serta pemasangan hak asasi manusia oleh pemerintah. Seiring dengan perkembangan zaman, peran *civil society* dapat dikatakan belum baik karena dalam aksi demonstrasi masih terjadi kerusuhan. Penulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran dan tantangan *Civil Society* dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Penelitian ini termasuk deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur. Hasil kajian menunjukkan bahwa peran *civil society* yaitu: (a) sebagai pelengkap peran negara yaitu memajukan kesejahteraan; (b) sebagai subtitor yaitu melakukan aktivitas yang belum/tidak dilakukan negara dalam melayani kepentingan masyarakat; (c) sebagai kekuatan tandingan negara dalam bentuk pengawasan. Tantangan *civil society* dalam kehidupan demokrasi, yaitu: (a) tantangan diskursif masyarakat sipil terhadap negara; (b) interaksi masyarakat sipil untuk mempromosikan wacana kontra melalui internet; (c) ancaman psikis dan fisik.

**Kata kunci:** *civil society*; demokrasi; Indonesia

## PENDAHULUAN

Peran masyarakat sipil selama periode demokratisasi telah berkembang dengan cepat bersamaan dengan meningkatnya minat teoretis pada otoritarianisme sebagai sistem politik (Lewis, 2013: 326). Di banyak negara, *civil society* dianggap sebagai aktor sentral dalam proses “demokratisasi gelombang ketiga” sebagaimana oleh Samuel Huntington yang dipahami sebagai diagnosis terhadap berbagai macam “penyakit” demokrasi akibat pembusukan partai politik, krisis kepercayaan terhadap parlemen, kecenderungan para politisi untuk berperilaku curang, dan sebagainya. *Civil society* seolah-olah mendapat tempat yang sakral dalam analisis politik (Khilnani, 2001).

*Civil Society* merupakan sebuah konsep dalam bentuk masyarakat yang banyak diperbincangkan dari dulu sampai sekarang. Sebenarnya konsep dan makna tentang *civil society* ada berbagai macam versi. Ada yang menekankan pada ruang (*space*), seperti individu dan kelompok dalam masyarakat dapat saling berinteraksi dengan semangat toleransi. Di dalam ruang tersebut, masyarakat dapat melakukan partisipasi dalam pembentukan kebijaksanaan publik dalam suatu negara (Gaffar, 1999: 177).

Di Indonesia, ide *civil society* sudah lama tumbuh berkembang. Ide awalnya dilakukan dengan mengidentifikasi hak-hak masyarakat yang dirampas kemudian membangun kesadaran bahwa hak-hak itu harus dikembalikan (Usman, 2001). Apabila negara terlalu kuat dan sektor swasta terlalu dominan tetapi masyarakat dalam keadaan lemah maka akan terjadi stagnasi dan ketergantungan masyarakat terhadap pasar. Cita-cita yang ingin diwujudkan yaitu tidak ada dominasi negara dan tidak ada dominasi oleh kelompok yang kuat terhadap kelompok yang lemah (Usman, 2001). Gerakan yang dilakukan *civil society* melalui CSO (*Civil Society Organization*) yaitu dengan melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat, baik di sektor pendidikan, kesehatan, maupun sektor-sektor yang lainnya.

Pada saat negara semakin meminimalisasi perannya maka muncul kekuatan *civil society* untuk mengambil alih peran yang seharusnya dilakukan oleh negara. Hal tersebut tidaklah menjadi masalah karena seperti yang dikemukakan UNDP bahwa *good governance* menuntut pada terjadinya sinergi dalam pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial yang melibatkan sektor negara dan sektor non negara dalam suatu urusan kolektif (Krina, 2003).

Masyarakat sipil di dalam negara militeristik seringkali terlibat pada berbagai upaya advokasi menyuarkan keadilan, pembangunan yang manusiawi dan berkelanjutan, anti korupsi, anti perang, dan pembelaan terhadap hak asasi manusia. Mereka dapat berada dalam kelompok partai, kelompok agama, sosial, budaya, dan sebagainya. Optimisme yang dibangun yaitu kontribusi sektor *civil society* yaitu dalam rangka untuk memastikan dan mengawal proses transformasi sosial (Fakih, 2010). Banyak kebijakan yang mengikutsertakan partisipasi masyarakat sipil, tetapi masih ada kebijakan yang kurang mengakomodasi kepentingan masyarakat (Setyawan, 2011: 14).

*Civil society* memiliki peran penting dalam mengawal proses demokratisasi. Namun semangat peran *civil society* terkadang disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, oknum LSM yang bekerja sama dengan oknum Jaksa memeras uang kepada 63 kepala sekolah di Riau terkait pengelolaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) (Halim, 2020).

Sejalan dengan penelitian Praja (2009) bahwa peran LSM dalam perspektif *civil society* mengalami distorsi yang disebabkan beberapa faktor, salah satunya yaitu adanya motif mencari keuntungan. Hal ini tentu bertentangan dengan konsep *civil society* yang notabene mengawal proses demokrasi yang bersih dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

*Civil society* yang lahir dari kalangan mahasiswa dan masyarakat umum yang tergabung dalam gerakan masa justru memberikan dampak yang signifikan bagi kualitas demokrasi di Indonesia. Mulai penggulingan Orde Baru sampai era Reformasi, elemen tersebut sangat kritis terhadap polemik kebijakan pemerintah dan melakukan aksi demonstrasi di kantor-kantor pemerintahan dengan menuntut keadilan bagi rakyat. Namun akhir-akhir ini, demonstrasi yang terjadi pada tanggal 8 Oktober 2020 yaitu penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja oleh masyarakat berakhir dengan kerusuhan dan penjarahan di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) (Ronald, 2020). Hal ini membuktikan bahwa *civil society* dalam proses demokrasi memang sangat aktif menunjukkan kontrol terhadap kebijakan pemerintah, namun di sisi lain belum memiliki proses berpikir yang matang sehingga sering kali berakhir dengan kerusuhan dan perusakan terhadap fasilitas umum.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan, maka tujuan penulisan ini yaitu mendeskripsikan makna *civil society*, karakteristik *civil society*, peran dan tantangan *civil society* dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, serta sumbangsih materi tentang *civil society* pada pembelajaran PPKn.

## **METODE**

Teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur. Data digali dari berbagai artikel jurnal, berita, dan buku untuk mendalami topik tentang peran dan tantangan *civil society* dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Setelah data terkumpulkan, kemudian data dibaca, dipahami dan disajikan dalam bentuk deskriptif untuk mengeksplorasi konsep dan fakta yang terjadi di Indonesia terkait *civil society* dalam proses demokrasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Makna *Civil Society*

*Civil society* jika dikaitkan dengan demokrasi, maka kontaminasi liberalisme menjadi tidak terelakkan. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebangkitan kembali gagasan *civil society* pada dekade 1970-an dan 1980-an, pertama kali diperkenalkan oleh para tokoh “*the Scottish enlightenment*” (pencerahan di Skotlandia) seperti Adam Fergusson, John Locke, dan John Stuart Mill, ditandai oleh sebuah janji untuk membentuk masyarakat yang aman sejahtera dengan pengakuan terhadap hak-hak individu (Hadiwinata, 2005: 6).

Konsep masyarakat sipil kembali berabad-abad dalam pemikiran Barat dengan akarnya Yunani kuno. Gagasan modern masyarakat sipil muncul pada abad ke-18, dipengaruhi oleh ahli teori politik dari Thomas Paine ke George Hegel, yang mengembangkan gagasan masyarakat sipil sebagai domain yang sejajar tetapi terpisah dari negara. Masyarakat sipil tidak harus disamakan dengan non-pemerintah organisasi (NGOS).

LSM adalah bagian dari masyarakat sipil meskipun mereka memainkan peran penting dan terkadang peran utama dalam mengaktifkan partisipasi warga dalam pembangunan sosial-ekonomi dan politik dalam membentuk atau mempengaruhi kebijakan. Masyarakat sipil adalah konsep yang lebih luas, yang mencakup semua organisasi dan asosiasi yang ada di luar negara dan pasar (Pasha, 2004: 2-3).

Masyarakat sipil melayani untuk menyeimbangkan kekuatan negara dan melindungi individu dari kekuatan negara. Dalam ketiadaan masyarakat sipil, negara seringkali perlu melangkah untuk berorganisasi individu yang tidak mampu mengatur diri mereka sendiri. Hasilnya individualisme berlebihan karenanya bukanlah kebebasan, melainkan tirani (Fukuyama, 2010:11). Masyarakat sipil paling sering didefinisikan sebagai seperangkat organisasi itu beroperasi antara negara, keluarga (individu; rumah tangga) dan produksi ekonomi (pasar; perusahaan). Masyarakat sipil independen dari negara dalam hal keuangan, dan CSO (*Civil Society Organization*) tidak bertujuan untuk

menduduki negara, tetapi mencoba untuk mempengaruhinya (Kopecky & Mudde, 2010: 5).

Masyarakat sipil merujuk pada ruang politik yang asosiasi sukarela sengaja berusaha untuk membentuk aturan yang mengatur satu atau aspek lain dari kehidupan sosial. "Aturan" dalam konsepsi ini mencakup kebijakan khusus, norma yang lebih umum, dan struktur sosial yang lebih dalam. Dengan demikian, tindakan masyarakat sipil dapat menargetkan arahan formal (seperti undang-undang), konstruksi informal (seperti banyak peran gender), dan atau tatanan sosial secara keseluruhan. Aspek kehidupan sosial yang menjadi perhatian yaitu tata kelola ranah global (Scholte, 2002:283).

Diamond (1999:221) menjelaskan bahwa masyarakat sipil merupakan wilayah kehidupan sosial yang terorganisir terbuka, suka rela, mandiri, mandiri dari negara, yang diikat oleh tatanan hukum atau serangkaian kolektif bersama aturan. Sedangkan Eisenstadt menyimpulkan bahwa *civil society* adalah sebuah masyarakat yang baik secara individual maupun secara kelompok, di dalam kehidupan bernegara dapat berinteraksi dengan negara secara independen. Namun, ada beberapa komponen yang terpenuhi untuk membentuk apa yang dinamakan *civil society*, yaitu otonom (kemandirian), akses masyarakat terhadap lembaga negara, arena publik yang otonom dan arena publik yang terbuka (Parmudi, 2015: 300).

### **Karakteristik *Civil Society***

Masyarakat di negara-negara maju yang sudah dapat dikatakan sebagai masyarakat sipil (madani), maka ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi untuk menjadi masyarakat madani, yakni adanya pemerintahan yang didasarkan pada nilai-nilai demokrasi (*democratic governance*) dan masyarakat sipilnya yang mampu mempraktikkan nilai-nilai demokrasi (*democratic civilian*) dalam segala aktivitas kehidupan berbangsa dan bernegara dengan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai *civil security*, *civil responsibility* dan *civil resilience* (Anwar, 2016:2).

Menurut Ernest Gellner, *civil society* merujuk pada masyarakat yang terdiri atas berbagai institusi non-pemerintah yang otonom dan cukup kuat untuk dapat

mengimbangi negara. Sementara Cohen dan Arato mendefinisikan sebagai wilayah interaksi sosial di antara wilayah ekonomi, politik dan negara yang di dalamnya mencakup semua kelompok-kelompok sosial yang bekerja sama membangun ikatan-ikatan sosial di luar lembaga resmi, menggalang solidaritas kemanusiaan, dan mengejar kebaikan bersama (*public goods*). Nordholt (Efendi, 2017:1-2) menyatakan bahwa *civil society* terbentuk karena adanya interaksi dengan negara disebut pula dengan istilah *civil government* oleh Jhon Locke. Ada pun syarat keberadaan *civil society* itu sendiri terdiri dari partisipasi politik, asosiasi, perlindungan hukum bagi individu. Aspek *civil society* terdiri dari pertanggungjawaban negara, keterbukaan informasi, pengakuan HAM, inklusivitas.

Tusalem (2007: 364) menjelaskan bahwa dampak masyarakat sipil yaitu positif. Argumen dengan merujuk pada pekerjaan LSM dalam mempromosikan pembangunan, solidaritas tenaga kerja, akuntabilitas demokratis, dan penyebab post-materialis dalam negara berkembang (Anheir, 2004; A.-M. Clark, 1995; J. Clark, 1995; Hilhorst, 2003; Howell dan Pearce, 2001; Kaviraj dan Khilnani, 2001; Ron et al., 2005). Sarjana telah memverifikasi bahwa LSM dapat menentang penyalahgunaan eksekutif atau legislatif otoritas, dan meminimalkan kebijakan sewenang-wenang yang diberlakukan oleh negara. Terkadang mereka dapat memaksa otoritas negara yang berwenang untuk menuntut, menghukum, sanksi, atau menghukum pejabat publik yang bandel. LSM dapat bertindak sebagai alternatif kelembagaan yang dapat memantau transparansi dan efisiensi undang-undang dan dapat mengekspos kepada publik intensitas atau bentuk dari klien-pelindung hubungan, prebendalisme, kronisme, dan nepotisme dalam pemerintahan di daerah atau tingkat nasional (Burnell dan Calvert, 2005; Gyimah-Boadi, 2004; Ndegwa, 1994).

Selain berdampak positif, masyarakat sipil menurut Juan Linz (Tusalem, 2007:366-367) juga bisa bersifat negatif. Masyarakat sipil yang kuat mempromosikan ketidakstabilan rezim, terutama karena kelompok luar seperti serikat pekerja atau masyarakat kelas pekerja dapat memilikinya terlalu banyak pengaruh dalam pembuatan kebijakan. Koneksi langsung mereka dengan negara

bisa merebut imperatif moral negara untuk memerintah di saat krisis dan mempromosikan inefisiensi pemerintahan yang efisien. Pekerjaan awal Guillermo O'Donnell (1979) tentang birokrasi dapat mengerahkan banyak tekanan pada kepentingan elit, seperti dalam memfasilitasi munculnya junta militer dan kediktatoran yang menindas di Amerika Selatan. Pesimisme dengan masyarakat sipil ini lebih terasa pada gelombang ketiga demokrasi (terutama di Amerika Latin) yang telah menyaksikan kekuatan rakyat pemberontakkan dipicu oleh masyarakat sipil yang tidak terkendali yang menggulingkan secara konstitusional terpilih atau diangkat presiden sejak akhir 1990-an.

### **Peran *Civil Society* dalam Kehidupan Demokrasi di Indonesia**

Perkembangan proses demokratisasi tidak dapat dilepaskan dari peran masyarakat sipil. Dalam hubungan dengan partisipasi rakyat ke dalam wilayah pemerintahan dan demokrasi, yang diinginkan oleh suatu sistem demokrasi yaitu adanya unsur-unsur berikut (Parmudi, 2015: 307-308):

1. Pemahaman yang jelas oleh warga negara tentang berbagai hal yang perlu diketahui.
2. Adanya wadah tempat warga negara mendiskusikan berbagai hal secara cerdas.
3. Partisipasi yang efektif bagi warga negara dalam proses pengambilan keputusan.
4. Kontrol akhir terhadap putusan-putusan politik harus tetap berada di tangan rakyat.
5. Kekuatan publik yang impersonal yakni senantiasa dibatasi oleh hukum dengan pusat otoritas yang beraneka ragam. *Civil society* merupakan masyarakat yang sadar akan politik serta berpartisipasi dalam kelangsungan politik.

Keberadaan masyarakat sipil mempunyai pengaruh yang sangat besar, tidak hanya di bidang politik saja, namun *civil society* juga memberikan sarana di bidang ekonomi, kebudayaan, dan moral. *Civil society* pun memiliki andil terbesar dalam pembangunan negara, yaitu: *Pertama*, sebagai komplementer elemen-elemen masyarakat sipil mempunyai aktivitas memajukan kesejahteraan yang

bertujuan untuk melengkapi peran negara sebagai pelayan publik. *Kedua*, sebagai subtitutor di mana masyarakat sipil melakukan serangkaian aktivitas yang belum/tidak dilakukan negara sebagai institusi yang melayani kepentingan masyarakat luas. *Ketiga*, sebagai kekuatan tandingan negara, *civil society* memiliki dua sisi wajah yaitu dalam arti bentuk baik dan buruk.

Dalam konteks ke-Indonesiaan, kebangkitan *civil society* sesungguhnya dimulai sejak zaman penjajahan Belanda. Perjuangan masyarakat melawan pemerintah kolonial melibatkan tiga kekuatan. *Pertama*, kaum petani radikal di pedesaan yang diwujudkan dalam serangkaian pemberontakan petani di Jawa dan Sumatra yang berlangsung sejak akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. *Kedua*, kaum buruh militan yang terdiri dari pekerja pabrik gula, buruh perusahaan kereta api, dan sebagainya. Melalui serikat buruh yang ada mereka melakukan demonstrasi dan pemogokan kerja untuk menuntut kenaikan upah dan perbaikan suasana kerja. *Ketiga*, kaum muda yang terdiri dari para intelektual muda berpendidikan Barat yang membentuk kelompok-kelompok diskusi di kota-kota besar dan mulai mengekspresikan semangat nasionalisme dan kebebasan berpolitik. Dengan ketiga komponen ini masyarakat saat itu berusaha keras untuk menentang dominasi dan manipulasi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda (Parmudi, 2015: 301).

Adapun beberapa efek buruk keberadaan *civil society*, karena peran *civil society* yang sangat besar dapat menyebabkan perubahan yang sangat signifikan tergantung pada legitimasi *civil society*. Banyak rezim-rezim yang jatuh karena tekanan dan tuntutan dari *civil society*. Etnisitas juga merupakan aspek di mana *civil society* berpotensi untuk menghancurkan demokrasi. Situasi hubungan antar etnis di Indonesia pasca Orde Baru seolah-olah membenarkan pendapat Jack Snyder bahwa demokratisasi yang dilakukan secara tiba-tiba di dalam masyarakat yang pluralis berpotensi untuk menyulut konflik dan kekerasan internal sehingga menciptakan instabilitas politik.

Rochmat (2003:14) menjelaskan bahwa era Reformasi yang menindas rezim Soeharto (1966-1998) dan menampilkan Wakil Presiden Habibie sebagai presiden dalam masa transisi, telah mempopulerkan konsep *civil society*

(masyarakat madani) karena Presiden beserta kabinetnya selalu melontarkan diskursus tentang konsep itu pada berbagai kesempatan. Bahkan Habibie mengeluarkan suatu Keppres No 198 Tahun 1998 tanggal 27 Februari 1999 untuk membentuk suatu dengan tugas untuk merumuskan dan mensosialisasikan konsep masyarakat madani itu. Konsep masyarakat madani dikembangkan untuk menggantikan paradigma lama yang menekankan pada stabilitas dan keamanan yang terbukti sudah tidak cocok lagi. Soeharto terpaksa harus turun tahta pada tanggal 21 Mei 1998 oleh tekanan dari gerakan Reformasi yang sudah muak dengan pemerintahan militer Soeharto yang otoriter. Gerakan Reformasi didukung oleh negara-negara Barat yang menggulirkan konsep *civil society* dengan tema pokok Hak Asasi Manusia (HAM).

Setelah era reformasi digulirkan, konflik etnis sangat merebak. Di Kalimantan Tengah, sentimen anti-Madura di kalangan penduduk asli Dayak semakin berkembang seiring dengan meningkatnya marjinalisasi di kalangan masyarakat Dayak. Kaum imigran Madura hanya tujuh persen dari total penduduk di Kalimantan Tengah. Mereka memiliki andil yang besar di berbagai sektor ekonomi seperti transportasi (darat dan sungai), pertambangan, perkayuan, dan perdagangan (formal atau informal). Selama beberapa dekade, peningkatan kesejahteraan kaum pendatang Madura ini ternyata berjalan seiring dengan marjinalisasi penduduk asli Dayak, sehingga kebencian etnis di kalangan Dayak pun semakin memuncak.

Insiden kecil yang melibatkan ke dua suku sudah cukup menyulut kerusuhan yang lebih besar. Pada tanggal 15 Desember 2000, sebuah perkelahian antara kelompok pemuda Madura dan Dayak di sebuah bar karaoke di Kereng Pangi telah menyulut kerusuhan etnis. Isu bahwa seorang Dayak terbunuh dalam perkelahian tersebut telah memobilisasi para pemuda Dayak untuk menyerang pemukiman, toko, dan kantor milik orang Madura di Kota Sampit, sehingga memaksa sekitar 1000 orang untuk lari ke hutan. Pembalasan yang dilakukan kaum Madura, beberapa hari kemudian ternyata memicu kerusuhan yang lebih besar dan berdarah. Selama Februari sampai Maret 2001, pembunuhan terhadap etnis Madura terus berlangsung dan melebar ke kota-kota lain, seperti:

Palangkaraya, Pangkalan Bun, dan Kuala Kapuas. Diperkirakan 400 orang Madura tewas terbunuh dan 108.000 lainnya mengungsi ke berbagai tempat di Jawa Timur. Dalam konteks ini, *civil society* secara ekstrim menolak demokrasi yang membutuhkan toleransi dan pengakuan terhadap pluralitas di dalam masyarakat (Hadiwinata, 2005: 15-16).

Masyarakat sipil telah diakui secara luas sebagai sektor 'ketiga' yang penting. Kekuatannya bisa memberi pengaruh positif pada negara dan pasar. Masyarakat sipil dipandang sebagai agen yang semakin penting untuk mempromosikan tata pemerintahan yang baik seperti transparansi, efektivitas, keterbukaan, daya tanggap, dan akuntabilitas. Masyarakat sipil dapat melanjutkan tata pemerintahan yang baik, pertama, dengan analisis dan advokasi kebijakan; kedua, oleh regulasi dan pemantauan kinerja negara dan tindakan dan perilaku publik pejabat; ketiga, dengan membangun modal sosial dan memungkinkan warga untuk mengidentifikasi dan mengartikulasikan nilai-nilai, kepercayaan, norma kewarganegaraan, dan praktik demokrasi; ke empat, dengan memobilisasi tertentu konstituensi, terutama bagian massa yang rentan dan terpinggirkan, untuk berpartisipasi lebih sepenuhnya dalam urusan politik dan publik; dan kelima, melalui pekerjaan pengembangan untuk meningkatkan kesejahteraan dari komunitas mereka sendiri dan lainnya (Pasha, 2004: 3).

Dewi (2011) menyatakan bahwa keberadaan masyarakat sipil memiliki peranan penting dalam proses demokrasi suatu negara. Masyarakat sipil memiliki tiga fungsi utama, yakni advokasi, *empowerment* dan *social control*, yang menunjang terciptanya demokrasi yang matang. Pertama, peran sebagai advokasi. Mereka ikut memengaruhi apa yang seharusnya menjadi kebijakan publik. Masyarakat sipil harus ikut menyampaikan aspirasi kepada elemen-elemen yang bisa membuat keputusan langsung. Elemen yang dimaksud salah satunya melalui DPR. Mereka secara aktif membuat advokasi. *Civil society* sebagai ruang publik memberikan akses penuh terhadap setiap kegiatan publik. Mereka berhak melakukan kegiatan secara merdeka atau bebas untuk menyampaikan pendapat (Efendi, dkk., 2019: 25).

Peran kedua, yakni *empowerment* dalam proses demokrasi. *Civil society* secara aktif bergerak memberdayakan masyarakat (*empowerment*). Peran ketiga, yakni fungsi kontrol sosial. Masyarakat sipil bersama-sama media menjadi pengawas dan pengontrol jalannya proses demokrasi agar tidak menyimpang dari jalurnya. Fungsi sebagai *social control*, melalui media masa, peran NGO, ormas keagamaan, bagian dari *civil society*, terorganisir, horizontal memberdayakan masyarakat. Masyarakat sipil yang baik harus sadar hak dan kewajibannya secara konstitusional. Masyarakat sipil di Indonesia cenderung menjadikan dirinya sebagai pembantu masyarakat untuk mencegah agar kekuasaan tidak semena-mena. Selama tidak ada corong bagi masyarakat untuk mengontrol dan memberikan usul kepada pemerintah, sulit pemerintah bertahan untuk demokratis.

### **Tantangan *Civil Society* dalam Kehidupan Demokrasi di Indonesia**

Tantangan *civil society* dalam kehidupan demokrasi, yaitu: pertama, tantangan diskursif masyarakat sipil terhadap negara secara vertikal poros tidak boleh mengaburkan pentingnya komunikasi horizontal dan dialog di antara para aktor dalam masyarakat sipil. Dalam konteks yang berbeda, aktivis dan akademisi menyarankan bahwa ketidakmampuan untuk mengembangkan jenis komunikasi horizontal di antara kelompok masyarakat sipil telah menjadi alasan penting bagi kegagalan untuk mengembangkan politik yang berkelanjutan tantangan terhadap pemerintahan otoriter (Ilkhamov, 2005).

Di era digital saat ini, komunikasi horizontal antar *civil society* di Indonesia dilakukan dengan cara diskursus melalui media sosial dan bertatap muka secara langsung yang biasanya diselenggarakan oleh organisasi kampus, seperti BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa). Pentingnya diskursus dengan menghadirkan pakar atau orang yang kompeten di bidang isu yang sedang berkembang yaitu membuka pikiran dan hati nurani untuk mengawal proses demokrasi yang merugikan kepentingan rakyat.

Kedua, interaksi masyarakat sipil dengan kemampuan untuk mempromosikan kontra-wacana melalui internet tampaknya semakin menekankan pentingnya pendekatan diskursif terhadap masyarakat sipil. Ruang-ruang *online* ini telah menjadi 'arena agonis' (Rahimi, 2011) rezim dan masyarakat sipil

berjuang untuk mengontrol bahasa dan wacana *online*. Namun banyak dari gerakan sosial yang terutama didasarkan pada *Twitter*, *blog*, dan situs *web* telah gagal mengembangkan tantangan berkelanjutan untuk tatanan politik otoriter. Pemerintah di Tiongkok, Rusia, Iran, dan negara-negara otoriter lainnya telah beradaptasi dengan cepat terhadap kontestasi diskursif di internet.

Seperti *civil society* yang ada di Indonesia, mempromosikan wacana kontra sebagai bentuk pengawalan proses demokrasi diawali dari provokasi atau ajakan melalui media sosial; *Whatsap*, *Instagram*, *Twitter*. Misalnya, gerakan yang sifatnya insidental dengan *hashtag* “Gejayan Memanggil”. Gerakan *civil society* yang diinisiasi oleh elemen mahasiswa dan masyarakat Yogyakarta yaitu mendesak pemerintah untuk mencabut RUU Omnibuslaw karena dianggap merugikan kaum buruh. Hal ini terjadi pada tanggal 9 Maret 2020 di Jalan Afandi (Amali, 2020). Tuntutan yang dilakukan oleh *civil society* juga terjadi di beberapa kota besar di Indonesia; DKI Jakarta, Bandung, Semarang, dan Ambon (CNN: 2020). Selain itu proses pembahasan RUU dianggap tergesa-gesa, kurang transparansi dan sosialisasi bagi masyarakat umum.

*Civil society* dalam mempromosikan wacana kontra di media sosial harus memiliki data yang valid, kritis dalam pokok permasalahan yang merugikan rakyat, dan tidak mudah terprovokasi tanpa mempelajari isu yang sedang berkembang, sehingga wacana kontra yang dimainkan memberikan corak demokrasi yang bersih, matang, dan maju. *Civi society* perlu membuat komunitas/grup di media sosial yang orientasinya membahas isu-isu atau masalah yang terjadi di Indonesia. Dengan adanya diskursus tersebut diharapkan dapat menguatkan pemikiran yang kritis dengan data yang valid, bertindak dengan memiliki alasan yang logis, memerjuangkan kemajuan, kesejahteraan, dan keadilan di masyarakat.

Bentuk tantangan yang ketiga yaitu dari pembatasan keterlibatan sampai pada ancaman secara psikis dan fisik terhadap para kelompok masyarakat sipil. Bentuk ancaman tersebut sangat bervariasi mulai dari ancaman tertulis melalui media sosial, perusakan *property* sampai dengan penculikan dan pembunuhan (Epakartika, 2020:96). Dalam konteks di negara Indonesia, misalnya pembunuhan

terjadi pada Marsinah yang memerjuangkan nasib buruh pabrik tahun 1993 dan seorang aktivis HAM yaitu Munir yang meninggal pada tahun 2004 dalam penerbangan dari Jakarta menuju Belanda. Dari kedua kasus tersebut dapat dilihat bahwa *civil society* pada saat mengakkan kebenaran dan keadilan dalam proses demokrasi terkadang berhadapan langsung dengan pemerintah atau oknum lembaga negara yang merasa terusik kepentingannya. Oleh karena itu, *civil society* harus bersatu untuk melawan ketidakadilan yang terjadi di masyarakat atau negara Indonesia.

### **Sumbangsih materi tentang *Civil Society* pada Pembelajaran PPKn**

Aspek *civic knowledge* pada pembelajaran PPKn, yang perlu diberikan kepada peserta didik tentang *civil society*, yaitu terkait makna *civil society*, karakteristik *civil society*, peran dan tantangan *civil society* dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. *Civil society* terbentuk secara independen, terlepas campur tangan dari pemerintah. Tujuan adanya *civil society* yaitu menjadi *social of control* terhadap kinerja pemerintah (negara) yang secara sah melakukan diskriminasi, ketidakadilan terhadap rakyat, sehingga timbul kesewenang-wenangan yang mutlak. Berpikir dari hal tersebut, materi tentang *civil society* sangat penting untuk diberikan kepada peserta didik khususnya jenjang SMA/SMK.

Syarat terbentuknya *civil society* yaitu adanya pemikiran yang kritis, menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, nilai keadilan dan tanggungjawab, semangat pluralitas yang tinggi. Oleh karena itu, pembelajaran PPKn di sekolah harus mencerminkan nilai-nilai tersebut (*civic disposition*) dengan cara menerapkan metode diskusi kelas, dan menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Tema-tema yang diangkat dalam proses pembelajaran dapat mengambil isu-isu permasalahan di masyarakat yang notabennya ada kaitan antara hegemoni negara terhadap rakyat yang secara realitas merugikan kepentingan rakyat.

Penerapan model pembelajaran berbasis masalah dengan metode diskusi yang mengangkat isu-isu permasalahan di masyarakat atau negara menjadi sangat relevan. Peserta didik akan mampu berpikir kritis, tidak hanya mengomentari

namun dapat menawarkan solusi terhadap isu permasalahan yang menjadi kajian di kelas (*civic skills*). Jika kebiasaan diskusi dengan menekankan pemecahan masalah di masyarakat maka ruh dari *civil society* dapat terwujud baik dalam kehidupan di sekolah maupun di masyarakat.

## **SIMPULAN**

Peran *civil society* dalam kehidupan demokrasi di Indonesia muncul sejak zaman penjajahan Belanda yang dilakukan oleh kaum petani radikal di pedesaan, kaum buruh militan, dan kaum muda yang terdiri dari para intelektual muda berpendidikan Barat. Selanjutnya pada era Orde Baru, peran *civil society* sangat besar dalam menumbangkan kepemimpinan Suharto yang sangat otoriter. *Civil society* merubah tatanan Orde Baru menuju era Reformasi yang menjadi cikal bakal pemerintahan demokratis di Indonesia. peran *civil society* yaitu (a) sebagai pelengkap peran negara yaitu memajukan kesejahteraan; (b) sebagai subtitutor yaitu melakukan aktivitas yang belum/tidak dilakukan negara dalam melayani kepentingan masyarakat; (c) sebagai kekuatan tandingan negara dalam bentuk pengawasan.

Tantangan *civil society* dalam kehidupan demokrasi, yaitu: pertama, tantangan diskursif masyarakat sipil terhadap negara secara vertikal poros tidak boleh mengaburkan pentingnya komunikasi horizontal dan dialog di antara para aktor dalam masyarakat sipil. Kedua, interaksi masyarakat sipil dengan kemampuan untuk mempromosikan kontra-wacana melalui internet tampaknya semakin menekankan pentingnya pendekatan diskursif terhadap masyarakat sipil. Ketiga, ancaman psikis dan fisik.

## **REFERENSI**

- Amali, Z. (2020). Gejayan memanggil digelar lagi hari ini: gagalkan Omnibus Law. *Berita online*. <https://tirto.id/gejayan-memanggil-digelar-lagi-hari-ini-gagalkan-omnibus-law-eDQn>.
- Anwar, A. (2016). Peranan masyarakat madani dalam menghadapi masyarakat ASEAN. Retrieved from <https://fhukum.unpatti.ac.id/hkm-internasional/567-peranan-masyarakat-madani-dalam-menghadapi-masyarakat-asean>.

- CNN Indonesia. (2020). Demo tolak Omnibus Law digelar di sejumlah daerah kemarin. *Berita online*.  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201012204822-20-557608/demo-tolak-omnibus-law-digelar-di-sejumlah-daerah-kemarin>.
- Dewi, F. A. (2011). Tiga peran masyarakat sipil dalam proses demokrasi. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-1785707/tiga-peran-masyarakat-sipil-dalam-proses-demokrasi>.
- Diamond, L. (1999). *Developing democracy toward consolidation*. Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.
- Efendi, D. (2017). Urgensi keterlibatan civil society dalam demokrasi. Retrieved from <https://www.researchgate.net/publication/317092009>
- Efendi, H. N., dkk. (2019). Dinamika peran civil society dalam ruang publik: studi Walhi Lampung. *Administrativa*, 1(1), 19-28. Retrieved from <http://administrativa.fisip.unila.ac.id/index.php/1/article/view/2>
- Epakartika, dkk. (2020). Peran masyarakat sipil dalam pemberantasan korupsi sektor sumber daya alam. *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5(2-2), 93-106. DOI: <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i2-2.485>.
- Fakih, M. (2010). Masyarakat sipil untuk transformasi sosial: pergolakan ideologi LSM Indonesia. Yogyakarta: InsistPress.
- Fukuyama, F. (2010). Social capital, civil society and development. *Third World Quarterly*, 22(1), 7-20, DOI: 10.1080/713701144.
- Gaffar, A. (1999). *Politik Indonesia: transisi menuju demokrasi*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Hadiwinata, B. S. (2005). Civil society: pembangunan dan sekaligus perusak demokrasi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 9(1), 1-22.
- Halim, D. (2020). 63 Kepsek kompak mundur, diperas oknum jaksa yang kongkalikong dengan LSM  
<https://nasional.kompas.com/read/2020/08/19/08154301/63-kepsek-kompak-mundur-diperas-oknum-jaksa-yang-kongkalikong-dengan-lsm?page=all>.
- Ilkhamov, A. (2005). The thorny path of civil society in Uzbekistan. *Central Asian Survey*, 24(3), 297-317.
- Khilnani, S. (2001). *The development of civil society*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kopecy & Mudde. (2010). Rethinking civil society. *Democratization*, 10(3), 1-14. DOI: 10.1080/13510340312331293907

- Krina P, dkk. (2003). *Indikator dan alat ukur prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi*. Sekretariat Good Public Governance: BAPPENAS.
- Lewis, D. (2013). Civil society and the authoritarian state: cooperation, contestation and discourse. *Journal of Civil Society*, 9(3), 325-340, DOI: 10.1080/17448689.2013.818767.
- Parmudi, M. (2015). Kebangkitan civil society di Indonesia. *Jurnal at-Taqaddum*, 7(2), 295-310.
- Pasha, A. G. (2004). Role of civil society organizations in governance. *6th Global Forum on Reinventing Government Towards Participatory and Transparent Governance 24-27 May 2005, Seoul, Republic of Korea*.
- Praja, A. N. (2009). Distorsi peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam perspektif civil society di Kabupaten Grobogan. *Tesis*. Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.
- Rahimi, B. (2011). The agonistic social media: cyberspace in the formation of dissent and consolidation of state power in postelection Iran. *The Communication Review*, 14(3), 158-178.
- Rochmat, S. (2003). Masyarakat madani: dialog Islam dan modernitas di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*.
- Ronald. (2020). Polisi tangkap 10 orang pelaku penjarahan kantor Kementerian ESDM saat demo UU Ciptaker. <https://indonews.id/artikel/313093/Polisi-Tangkap-10-Orang-Pelaku-Penjarahan-Kantor-Kementerian-ESDM-Saat-Demo-UU-Ciptaker/>
- Scholte, J. A. (2002). Civil society and democracy in global governance. *Global Governance*, 8(3), 281-304.
- Setyawan, D. (2011). Peran civil society sebagai pressure group dalam perumusan kebijakan public (studi pada Malang Corruption Watch [MCW]). *Jurnal Reformasi*, 1(1), 13-22.
- Tusalem, R. F. (2007). A boon or a bane? the role of civil society in third- and fourth-wave democracies. *International Political Science Review*, 28(3), 361-386.
- Usman, S. (2001). Peran civil society (masyarakat madani) dalam tata pemerintahan. Dalam membangun kemitraan antara pemerintah dan masyarakat madani untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. BAPPENAS.

# Pancasila Sebagai Dasar Negara Serta Manifestasi Kebangsaan Indonesia

Amar Ma'ruf

[amar04hard@gmail.com](mailto:amar04hard@gmail.com)

## Abstrak

Pancasila merupakan satu-satunya dasar dan falsafah bagi bangsa Indonesia yang harus di hayati dan diaktualisasikan dalam segala bidang kehidupan bangsa Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah mengembalikan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia sehingga tercipta persatuan yang harmonis antara sesama bangsa Indonesia dan semakin mempererat persatuan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan menekankan pada penelitian studi pustaka, yaitu dengan menyertakan sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian tentang Pancasila sebagai dasar dan falsafah bangsa Indonesia. Ada tiga poin penting yang harus dilakukan dalam mengembalikan Pancasila, yang pertama, memasifkan kembali pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di dalam ruang-ruang pendidikan, kedua, meningkatkan wawasan kebangsaan warga negara Indonesia tentang pancasila dan literasi sosial lainnya, ketiga, menerapkan pendidikan moral dan etika untuk menetralsisir pemahaman-pemahaman serta praktek yang menyimpang dalam penerapan Pancasila.

**Kata Kunci:** Pancasila, Dasar negara, Kebangsaan.

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang plural, berdiri dengan keberagaman yang sangat toleran. Keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia cukup kompleks, mulai dari bahasa, suku, ras, agama, budaya, bahkan warna kulit sangat beragam di Indonesia. Mulai dari Sabang, ujung Barat Indonesia sampai Merauke, di ujung Timur. Semua berbeda bahkan sangat jauh sehingga masalah yang timbul di negara ini pun juga sangat kompleks. Kondisi ini memungkinkan Indonesia memiliki podasi yang kuat untuk menyatukan segala perbedaan yang ada. Sebagai jawaban dari situasi dan kondisi tersebut, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indoensia (BPUPK) atau dalam bahasa Jepang disebut *Dokuritsu Junbi Cosakai* memberikan kesempatan kepada para *founding father* untuk menerangkan konsep dasar negara yang tepat untuk Indonesia. Radjiman yang saat itu menjadi ketua BPUPK memberikan pertanyaan, apa dan bagaimana dasar negara kita yang akan mampu mengakomodir seluruh wilayah, seluruh bahasa, seluruh suku, seluruh ras, seluruh agama dan seluruh warna kulit yang berbeda dan berada di dalam satu Indonesia ini.

Ada tiga nama populer yang menyampaikan pidato tersebut, yaitu pidato tentang usulan dasar negara yang mampu mengakomodir segala perbedaan yang ada dalam tubuh Indonesia. Tiga nama tersebut adalah Moh Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Ketiganya menyampaikan pidato yang berkaitan dengan pertanyaan ketua BPUPK untuk merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Ketiganya sama-sama memberikan beberapa usulan terkait dasar negara, namun pidato Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menjadi pidato yang paling menjawab pertanyaan tersebut. Lima hal yang disampaikan Soekarno dalam pidatonya tersebut menjadi acuan disahkannya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Walaupun pada akhirnya ada berbagai polemik yang terjadi, terutama terjadi gesekan antara golongan Islam dan golongan kebangsaan. Setelah melalui banyak proses dan revisi, akhirnya Pancasila disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan segala kelapangan hati dari berbagai golongan untuk menerima dan menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup satu-satunya di Indonesia.

Pancasila sebagai dasar negara menjadi tumpuan penting bagi kehidupan bangsa Indonesia. Bahkan Soekarno menyebut Pancasila sebagai *Philofiche Groundslag* yaitu sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yang menjadi acuan hidup, dasar hidup serta sumber dari segala aturan-aturan hukum yang ada di Indonesia. Pancasila, sesuai dengan namanya yang berarti lima dasar, ada lima poin yang menjadi kunci Pancasila. Oleh Notonegoro (1995) dasar negara Indonesia disebut sebagai Eka-Pancasila, yaitu satu dasar yang berisi lima hal dasar yang harus di patuhi dan menjadi acuan hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila memang disahkan karena sangat sesuai dengan kondisi negara Indonesia yang plural. Dengan demikian praktek kehidupan dalam satu tatanan masyarakat harus sesuai dengan Pancasila (Zabda, 2016). Hal ini juga didukung dengan pernyataan Soekarno yang menyatakan bahwa Pancasila diambil dari saripatih kehidupan bangsa Indonesia, sehingga akan mampu mengakomodir segala bentuk problematika yang ada di Indonesia. Hal inilah yang membuat posisi Pancasila begitu fundamental, bahkan Pancasila sebenarnya sudah ada jauh sebelum Pancasila itu sendiri disahkan atau bahkan sebelum negara ini ada dan merdeka.

Pada masa-masa kejayaan kerajaan ratusan tahun silam, Indonesia sudah menerapkan Pancasila dalam praktik kehidupannya, mulai dari kepercayaan, adab, persatuan, musyawarah mufakat serta keadilan, semua hal ini sudah ada dan terjadi jauh sebelum Indonesia itu ada. Walaupun pada masa itu Pancasila belum disahkan dan Indonesia belum merdeka. Tidak heran jika Pancasila menjadi dasar yang sangat kokoh dalam menjaga Indonesia tetap bersatupadu dalam satu bendera kebangsaan Merah-Putih. Apalagi dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* menambah kekuatan dan kesaktian Pancasila sebagai negara persatuan yang kuat dan tangguh tidak mudah untuk di hancurkan.

Di samping kemegahan dan superioritas Pancasila sebagai dasar negara berikut juga narasi-narasi kompleksitas yang ada di dalamnya, Indonesia tetaplah satu negara yang dinamis. Selalu ada masalah, terutama masalah perpecahan, sangat rawan terjadi di tengah keberagaman yang begitu kompleks. Seperti yang terjadi belakangan ini, banyak gerakan-gerakan separatis yang mengatasnamakan beberapa organisasi dari beberapa daerah terluar Indonesia yang menyatakan diri ingin berpisah dari Indonesia. Organisasi Papua Merdeka (OPM), Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Republik Maluku Selatan (RMS) dan lain sebagainya. Mereka adalah persatuan yang pernah mengatakan serta mengancam akan berpisah dari Indonesia dengan berbagai alasan, namun sampai hari ini Indonesia masih bisa meredam dan mempertahankan wilayah kesatuannya dari perpecahan, dan itu semua tidak lepas dari peran Pancasila sebagai dasar negara sekaligus pandangan hidup bagi rakyat Indonesia. Pancasila memiliki landasan ontologis, epistemologis dan aksiologis yang mampu tetap menjaga persatuan di tengah pluralitas bangsa Indonesia (Widiuseno, 2014).

Pancasila memang menjadi pandangan hidup serta dasar negara Indonesia yang kokoh dan perkasa, namun semakin kesini, marwah Pancasila sebagai dasar negara berikut juga pandangan hidup bangsa menjadi semakin dikucilkan. Banyak warga negara yang tidak sadar bahkan tidak peduli dengan apa itu Pancasila, apa isi kandungan dari Pancasila. Hal ini terjadi karena banyak faktor, terutama belakangan ini sangat erat di pengaruhi oleh tensi tinggi politik yang merajalela, sehingga harga kekuasaan di negeri ini lebih mahal dari pada harga dasar negara.

Kehausan warga negara terhadap kekuasaan sampai hari ini menjadi satu faktor yang cukup dominan dalam pergeseran nilai luhur Pancasila. Akibatnya, Pancasila sebagai dasar negara hanya dipahami sebagai teks, tapi tidak dengan isi kandungan yang ada di dalamnya, tidak dengan makna dari Pancasila itu sendiri, apalagi dengan praktek atau bentuk tindakan yang Pancasilais, sangat jauh dari harapan.

Permasalahn yang telah dijelaskan menjadi permasalahan yang cukup krusial, mengingat Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa semakin dilupakan nilai luhurnya, sehingaa sikap-sikap Pancasilais hanya menjadi cerminan kemunafikan yang digunakan hanya untuk pencitraan belaka guna merauk kekuasaan yang diinginkan. Hal ini menjadi perhatian penting pemerintah guna menjaga Indonesia tetap stabil dan menjaga marwah Pancasila sebagai dasar negara, sehingga Pancasila tidak hanya di jadikan alat pencitraan, namun benar-benar dipahami secara seksama dan di buktikan dengan tindakan dan sikap-sikap Pancasilais yang murni dari warga negara yang menganggap Pancasila adalah benar sebagai dasar negara dan pandangan hidup Bangsa Indonesia.

Keadaan yang demikian mengharuskan ada formulasi yang mampu mengembalikan keperkasaan Pancasila sebagai dasar negaara, serta harus mengembalikan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Pancasila sebagai pandangan hidup dan selalu menjadi acuan daalam hidup dan kehidupan warga negara Indonesia. Masyarakat harus mampu melakukan pembudayaan nilai-nilai Pancasila, harapannya mampu menghayati nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat (Asmaroni, 2017). Diterapkannya Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan secara masif mejadi satu usaha yang cukup membantu dalam mengembalikan keperkasaan Pancasila. Dengan demikian harapannya warga negara tetap mampu mmenjadikan Pancasila sebagai acuan hidup bernegara, dan harapannya hal ini dapat terjadi di seluruh wilayah Indoonesia bahkan di pelosok-pelosok desa, sehingga mampu meminimalisir isu perpecahan yang terjadi di daerah-daerah terluar Indonesia.

Upaya memasifkan penerpan Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan menjadi perhatian penting bagi pemerintah, dapat dilihat dari berbagai regulasi yang sudah diterapkan, seperti memasukkan semua mata pelajaran PPKn di semua tingkatan sekolah dan perguruan tinggi agar PPKn dipahami secara mendalam dan mampu dijiwai seutuhnya oleh generasi penerus bangsa. Upaya ini tidak selamanya berjalan dengan lancar, banyak faktor penghambat dalam pelaksanaannya, namun upaya ini di harapkan setidaknya mampu meminimalisir resiko-resiko yang tidak diharapkan terjadi dan mampu memupuk pemahaman generasi bangsa terkait Pancasila sejak dini hingga menginjak dewasa. Pelaksanaan upaya ini juga tidak dapat berjalan sendiri, namun harus juga melibatkan seluruh elemen masyarakat baik masyarakat menengah atas maupun menegah ke bawah. Suntikan partisipasi dari seluru elemen menjadi faktor yang sangat mendukung bagi keberlangsungan pelaksanaan upaya memasifkan Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan serta pemupukan pemahaman terkait Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang harus dijaga dan selalu diperkuat.

Semua upaya tersebut tidak bisa dilakukan secara instan, namun memerlukan segala bentuk partisipasi dan demokratisasi dari seluruh rakyat dan pemerintah yang ada di Indonesia. Untuk menciptakan masyarakat yang demokratis dan partisipatif tentu negara sebagai instrumen yang mengakomodir segala bentuk kepentingan masyarakatnya harus hadir menjadi penyeimbang serta *check and balances* dengan wewenang yang disandarkan pada pundak pemerintah. Pemerintah menngunakan peran sertanya dengan menghasilkan *decision making* yang tepat sesuai dengan kebutuhan rakyat. Kepentingan yang dimaksud lebih mengkhususkan pada peran serta negara dalam menyadarkan rakyatnya betapa penting memahami dan mengerti Paancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan penelitian studi pustaka (*Library research*). Penelitian studi

pustakaan adalah penelitian yang menggunakan sumber dari kajian pustaka (kepustakaan) untuk memperoleh data dalam penelitian. Penelitian studi pustaka berusaha untuk menganalisis, mendeskripsikan serta mengidentifikasi tentang Pancasila sebagai dasar negara serta manifestasi kebangsaan Indonesia. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini meliputi studi pustaka dari berbagai hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini serta melakukan dokumentasi. Sumber data yang dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, berbagai artikel ilmiah, laporan penelitian ilmiah, jurnal serta sumber-sumber yang relevan dengan penelitian ini. Peneliti akan mengidentifikasi kajian dari bahan-bahan yang diperoleh dalam penelitian ini, yang terkait dengan topik penelitian. Analisis dalam penelitian menggunakan analisis isi. Analisis isi dilakukan dengan melakukan komparasi antara kajian yang satu dengan kajian yang lain sesuai dengan topik dalam penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pancasila Sebagai Dasar Negara**

Pembahasan tentang Pancasila tidak habis-habisnya dalam ruang-ruang kajian akademik maupun non akademik. Bagaimana tidak, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesian sesuai konsensus bersama para pendiri bangsa ini memang menjadi titik perhatian yang sangat krusial. Di tengah berbagai polemik yang silih berganti melanda negeri ini, Pancasila tetap hadir sebagai mediator paling akhir guna menjawab segala permasalahan. Berbagai diskusi dan kajian juga ada yang berpendapat bahwa Pancasila sudah selesai, dan tidak ada yang harus dibahas lagi, namun realita di lapangan, Pancasila belum sepenuhnya dipahami oleh semua masyarakat baik di kalangan awam maupun di kalangan terdidik. Dapat dilihat dengan masih rawannya terjadi berbagai polemik hanya karena sedikit gesekan antar perbedaan dalam masyarakat.

Sebagai dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa, Pancasila seringkali diklaim gagal merepresentasikan dirinya sebagai puncak acuan hidup berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, perlu adanya rekonstruksi baru agar mendapatkan pemikiran yang lebih jernih dalam mengamalkan nilai-nilai

Pancasila. Selama ini Pancasila sebagai pandangan hidup mulai ditinggalkan, oleh karena itu perlu adanya re-interpretasi Pancasila dengan semangat reformasi agar dapat diterima lebih leluasa sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia (Siswanto, 2019). Maka dari itu rekonstruksi berpikir perlu dilakukan agar mendapatkan paradigma baru yang lebih kontekstual dan kontemporer dengan keadaan, situasi serta kondisi yang berlaku.

Peran serta Pancasila sebagai dasar negara sebenarnya tidak hanya muncul setelah disahkannya Pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945, namun jauh sebelum itu. Dalam banyak uraian terdahulu, Pancasila menjadi sumber hukum tertinggi bagi negara Indonesia sekaligus sebagai filsafat negara, bahwa Pancasila terdapat dalam hukum dasar negara kita yang tertinggi, yaitu pembukaan UUD 1945 yang merupakan naskah penjelmaan dari pada Proklamasi kemerdekaan kita. Pancasila disebut sebagai dasar filsafat negara tentu saja ketika ditetapkan dalam pembukaan UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945, akan tetapi asal mula dari hal tersebut jauh lebih tua (Notonegoro, 1995). Dengan demikian, asumsi bahwa Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung didalamnya secara tidak langsung terpatahkan, bahwa Pancasila adalah hasil dari kearifan asli bangsa Indonesia yang oleh para *founding father* kita digali sedalam-dalamnya hingga menghasilkan dasar negara Pancasila.

Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang oleh Bung Karno di sebut sebagai *filosofic grondslag* atau pandangan hidup bangsa Indonesai. Pancasila adalah isi kandungan atau sari patih hidup dan kehidupan bangsa Indonesia (Latif, 2013). Sari patih adalah dasar dari segala kehidupan, awal mula dari segala yang tercipta hingga menjadi sebuah karya cipta yang sempurna. Pancasila dikatakan sebagai sari patih kehidupan bangsa karena isi kandungannya memuat berbagai aspek yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila memang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, namun nilai-nilai yang ada dalam pancasila sudah ada bahkan sebelum di namakannya Pancasila.

Dalam sturuktur Bahasa, Pancasila terdiri dari dua suku kata yaitu Panca dan Sila. Panca berarti 5 sedangkan Sila berarti dasar. Istilah Pancasila sendiri diambil dari kitab negarakertagama yang dikarang oleh Mpu Prapanca dan

diambil dari bahasa Sanskerta. Pandangan hidup bangsa Indonesia bernama Pancasila ini langsung menjadi pondasi hebat sejak diusulkan oleh Soekarno pertama kali sampai dengan diproklamasikannya pada hari kemerdekaan Indonesia.

Pancasila mengandung lima nilai penting di dalam sila-silanya, yaitu religius, humanis, persatuan, kerakyatan serta keadilan sehingga sangat diterapkan di Indonesia yang notabene negara yang plural, memiliki banyak suku, ras dan agama. Adanya nilai religius menandakan bahwa orang Indonesia adalah bertuhan. Adanya nilai humanis menandakan Indonesia adalah negara yang peduli terhadap kemanusiaan. Adanya nilai persatuan menandakan Indonesia adalah negara yang menghargai perbedaan. Adanya nilai kerakyatan menandakan bahwa Indonesia adalah negara yang rakyatnya berdaulat. Adanya nilai keadilan menandakan bahwa Indonesia adalah negara yang peduli terhadap kesejahteraan warganegaraanya. Kelima nilai pokok tersebut oleh Notonegoro (1995) disebut sebagai Eka-Pancasila, yaitu negara Indonesia memiliki satu dasar yang susunannya tidak tunggal, namun majemuk tunggal. Maksudnya adalah dasar negara Indonesia hanya ada satu dan memiliki lima bagian lainnya yang saling berkaitan.

Dalam perjalanan bangsa Indonesia, banyak perdebatan, apakah Pancasila mampu menjadi satu-satunya dasar bagi Indonesia atau justru hanya bertahan sebentar saja. Tak heran, sebelum terjadinya Proklamasi, terjadi banyak pergolakan yang dialami oleh Pancasila. Mulai dari diusulkannya oleh Bung Karno dengan urutan yang berbeda. Di samping itu, Bung Karno selain mengusulkan lima sila dari Pancasila, ia juga memberi alternatif memerasnya menjadi Tri-sila dan Eka-sila.

Usulan tersebut mendapat banyak tanggapan dan sanggahan dari berbagai elemen, terutama dari kaum Islam yang pada saat itu bersikukuh ingin memasukkan Islam dalam Pancasila, mengingat mereka adalah agama yang mendominasi. Hal ini biasa dikenal dengan peristiwa tujuh kata. Hal inilah yang mengawali terbentuknya Piagam Jakarta yang di dalamnya terdapat Tujuh Kata tersebut. Dengan berbagai pertimbangan, akhirnya semua elemen masyarakat

yang mewakili dalam sidang BPUPK menyetujui penghapusan Tujuh Kata agar tidak terjadi diskriminasi antar kaum beragama. Tak heran bahwa Pancasila dikatakan sebagai sari patih Indonesia.

Indonesia terbentuk dari berbagai wilayah di Indonesia, dari berbagai pulau, serta dari berbagai suku Bangsa yang ada di Indonesia yang dinamakan sebagai Pancasila (Riyanto, 2015). Tak salah jika Pancasila menjadi dasar falsafah bangsa Indonesia yang mampu menjadi acuan bagi bangsa Indonesia dari zaman ke zaman dan tetap sesuai dengan keadaan bangsanya.

Pancasila menjadi patokan hidup, menjadi acuan dalam pemerintah serta menjadi sumber hukum tertinggi bagi negara Indonesia. Hal ini juga didukung dengan kelima isi kandungan dari Pancasila yang merupakan sari patih kehidupan bangsa Indonesia, bahkan sebelum Indonesia merdeka sampai sekarang.

### **Pancasila Sebagai Manifestasi Kebangsaan**

Manusia merupakan satu entitas dinamis dan paling produktif dalam struktur makhluk hidup di muka bumi. Manusia merupakan makhluk dengan progresifitas tinggi, mereka mampu membentuk populasi atau kelompok-kelompok sosial yang sesuai dengan pemahaman dan penilaiannya terhadap lingkungannya. Manusia tumbuh membentuk kelompok sosial, membentuk komunitas, lalu berkembang ke tingkat paling tinggi yaitu mendirikan suatu negara. berdasarkan anggapan tersebut bahwa suku bangsa (*ethnic group*) itu merupakan sekumpulan manusia yang ditandai dengan empat poin (Budhisantosa, 2002), yaitu :

1. Berkembang biak dalam kelompok yang eksklusif
2. Mendukung seperangkan nilai-nilai fundamental yang tercermin dalam kesatuan kebudayaan yang nyata
3. Menciptakan arena komunikasi interaksi sosial yang intensif
4. Mempunyai keanggotaan berdasarkan pengakuan diri dan pengakuan orang lain.

Tidak berbeda dengan negara Indonesia, bahwa negara ini juga terbentuk dari kerja kolektif masyarakatnya. Mulai dari tahap penjajahan oleh negara asing sampai pada usaha merebut kemerdekaan, semua dilakukan dengan kerja kolektif.

Sesuai dengan sub bab yang telah dijelaskan, dikatakan bahwa Pancasila merupakan manifestasi atau perwujudan kebangsaan Indonesia. Hal ini tak terlepas dari bagaimana proses munculnya dan dirumuskannya Pancasila sebagai dasar negara. Hasil kerja kolektif para *founding father* menjadi satu tanda bahwa Pancasila dihasilkan bersama, sesuai dengan paparan kesukuan sebelumnya yang meneangkan empat poit yang menandai manusia sebagai entitas yang bersuku dan berbangsa.

Adapun sila-sila yang merupakan Pancasila itu bukan hanya hasil ciptaan belaka, namun di temukan pada bangsa Indonesia itu sendiri. Seperti yang dirumuskan oleh Senat Universitas Gajah Mada pada tahun 1951, yaitu Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang dalam dan penelitian cipta yang seksama atas dasar pengetahuan dan pengalaman hidup yang luas. Dengan demikian Pancasila sebagai akar dari kehidupan bangsa sangat tepat dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, namun perlu rekonstruksi berpikir yang lebih rasional untuk memahami Pancasila secara lebih kontekstual, dengan tidak meninggalkan asal mula muncul dan dimunculkannya Pancasila.

Kearifan lokal merupakan roh dari nilai-nilai Pancasila yang mengejawhanta dalam hidup masyarakat Indonesia. Bahwa kearifan lokal bangsa ini adalah akar nilai-nilai Pancasila tetapi sekaligus juga pohon yang kokoh rimbun penuh dengan dahan-dahan dan dedaunan lebat yang didalamnya berlindung kupu-kupu indah dan aneka burung rupawan (Riyanto, dkk, 2015). Dari paparan tersebut menggambarkan betapa sebuah dasar negara yang bernama Pancasila terjadi dari kearifan lokal (*Local Wisdom*) dari bangsa Indonesia itu sendiri sehingga Pancasila dapat menjadi tepat berteduh dan berlindung bagi siapa saja (warga negara) yang ada di dalamnya. Selain itu juga dapat menjadi wadah atau tempat bagi segala perbedaan yang ada. Pancasila memang benar-benar menjadi Pandangan hidup yang digali dari sari patih kehidupan bangsa Indonesia terdahulu yang memiliki nilai-nilai luhur dan sesuai dengan etika dan estetika yang berlaku di masyarakat.

## **Upaya Mengembalikan Pancasila**

Pancasila tidak pernah beranjak, apalagi pergi dari benjak bangsa Indonesia. Pancasila selalu dalam benak, hati dan sanubari bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila selalu terpancar dan tercermin dalam setiap interaksi kehidupan sosial bangsa Indonesia. Namun Pancasila telah hilang, hilang dalam arti yang luas, yaitu kehilangan nilai luhur sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa Indonesia terhadap bangsanya sendiri. Banyak warga negara (Bangsa) Indonesia kekurangan wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan yang luas menandakan tingkat intelektualitas dalam hal memahami Pancasila cukup mumpuni. Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara pada dasarnya dapat merupakan instrumen utama dalam menumbuh kembangkan wawasan kebangsaan Indonesia. Sebagai instrumen, Pancasila akan selalu melekat sepanjang masa sejalan dengan keberadaan dan gerak pasang surut bangsa dan negara Indonesia (Martodirodjo & haryo, 2008).

Ungkapan Pancasila telah hilang adalah bentuk representasi dari kondisi terkini masyarakat Indonesia yang semakin lama semakin apatis akan keadaan bangsa. Rasa apatis dan skeptis ini juga salah satunya didasari pada kurangnya pengetahuan dan wawasan kebangsaan masyarakat, terkhusus terhadap pengetahuan tentang Pancasila. Kondisi ini menunjukkan Indonesia sedang mengalaih krisis besar-besaran, terutama terhadap Pancasila, sebagai dasar negara, pandangan hidup serta ideologi tunggal yang dilegalkan di Indonesia. Menciptakan masyarakat yang demokratis menjadi penting untuk mengembalikan Pancasila. Burtonwood (2003) menafsirkan kewarganegaraan yang baik dalam pandangannya adalah proyek yang dilakukan dengan baik oleh negara dan paling baik jika dikembangkan di sekolah umum. Sejalan dengan itu, sekolah umum memang menjadi tempat efektif untuk membentuk warga negara sekaligus juga dalam rangka mengembalikan Pancasila dengan jalan mendemokratiskan masyarakat sehingga sadar akan posisinya sebagai warga negara yang berada di bawah rimbunnya pohon Pancasila.

Sikap apatis dan skeptis dari warga negara tidak hanya berimbas pada Pancasila secara umum, namun juga berimbas pada proses serta kontestasi

politik. Warga negara Indonesia sudah tidak lagi peduli dengan hal-hal politik dalam negeri, padahal peran warga negara yang demokratis sangat berpengaruh dalam setiap perjalanan roda organisasi kenegaraan. Warga negara perlu mendapatkan pengetahuan serta pemahaman bahkan pencerahan terkait persoalan politik yang terjadi (Darmawan & Masytuh, 2018). Pendapat tersebut juga akan berdampak pada kembali atau tidaknya Pancasila dalam setiap sikap dan perilaku bangsa Indonesia. Sikap apatis masyarakat terhadap kegiatan politik bukan tanpa alasan, namun karena beberapa faktor, mulai dari kesibukan individu, pekerjaan serta yang paling utama adalah keperluan ekonomi (Arianto, 2011). Namun di samping itu, walaupun dengan alasan apapun ketika warga negara sudah tidak peduli lagi terhadap proses politik negara, maka secara logis akan menggambarkan bahwa warga negara tersebut tidak paham dan tidak mengerti apa itu Pancasila, karena secara teoritik dan pragmatik, politik adalah bagian penting dalam Pancasila, yaitu menjadi satu bagian demokrasi dalam sebuah negara.

Individu adalah warga negara ketika mereka mempraktikkan kebajikan sipil dan kewarganegaraan yang baik, menikmati tetapi tidak mengeksploitasi hak sipil dan politik mereka, berkontribusi dan menerima manfaat sosial dan ekonomi, tidak mengizinkan rasa identitas nasional apa pun untuk membenarkan diskriminasi atau stereotip orang lain, mengalami indera kewarganegaraan ganda non-eksklusif, dan, dengan contoh mereka, mengajarkan kewarganegaraan kepada orang lain (Davies, 1998). Ini adalah salah satu bentuk kewarganegaraan yang ideal yang diterapkan di Eropa. Hal semacam ini di mungkinkan terjadi dimanapun, termasuk juga di Indonesia, namun dengan edukasi yang cukup mumpuni dan di dukung distem yang mumpuni pula.

Ada beberapa cara yang penulis usulkan untuk meembalikan Pancasila pada posisi yang seharusnya, yaitu :

1. Memasifkan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan disetiap elemen pendidikan.

Pendidikan memang tidak melulu harus formal, namun sangat perlu. Formal dan informal sama-sama dibutuhkan, namun dengan ruang dan waktu

yang berbeda. Pengetahuan, nilai-nilai, disposisi dan keterampilan warga negara juga diperoleh dalam bidang non-formal dan informal, pertahanan kami terhadap peran seni dalam pendidikan kewarganegaraan akan fokus terutama pada sekolah formal (Enslin & Carmen, 2013). Dengan demikian semua sudut pendidikan memiliki peran penting.

Dengan memasifkan pendidikan kewarganegaraan disemua sudut pendidikan, maka semakin besar kemungkinan seluruh elemen masyarakat memahami apa dan bagaimana negara, wawasan kebangsaannya luas serta pemahaman Pancasila semakin bertambah. Konsepsi wawasan kebangsaan sendiri sangat penting untuk terus direalisasikan di kalangan masyarakat luas, yaitu dengan memasifkan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Setiawa (2017) menitikberatkan perhatiannya pada mahasiswa sebagai penerus bangsa. Menurutnya, melalui konsep wawasan nusantara, sikap nasionalisme di kalangan mahasiswa ditumbuhkembangkan dalam menjaga integritas dan keutuhan bangsa serta dalam membentuk karakter kebangsaan. Lagi-lagi penulis menganjurkan bahwa memasifkan PPKn adalah salah satu cara efektif.

Di Jepang pendidikan diharuskan mengarah pada pengembangan penuh kepribadian seseorang, berjuang untuk memelihara orang-orang, membuat mereka sehat dalam pikiran dan tubuh, dan menunjukkan kepada mereka bagaimana mencintai kebenaran dan keadilan. Menghargai nilai-nilai individu, menghormati para pekerja, memiliki rasa tanggung jawab yang mendalam, dan diilhami dengan semangat independen, sebagai pembangun negara dan masyarakat yang damai (Davies, Mizuyama & Tompson, 2010). Penerapan pendidikan kewarganegaraan semacam ini cukup kompleks, namun tetap dibutuhkan kedisiplinan tinggi. Di Indonesia pun bisa diterapkan namun harus dengan sistem dan kebijakan yang tepat.

Dengan demikian dapat penulis gambarkan bahwa memasifkan pendidikan kewarganegaraan memiliki pengaruh yang cukup signifikan guna memahamkan warganegara terkait negara itu sendiri. Perihal dasar negara, dalam hal ini Pancasila tentu ikut serta dalam pengaruh yang signifikan

tersebut akibat kedisiplinan negara dalam mengawal pematangan pendidikan kewarganegaraan dalam setiap tingkatan pendidikan. Dengan demikian, upaya mengembalikan Pancasila dapat dilakukan secara kolektif dengan kebijakan yang dihasilkan pemerintah dan apresiasi serta dorongan dari masyarakat luas.

## 2. Memperluas wawasan kebangsaan

Wawasan kebangsaan atau pengetahuan luas tentang bangsa dan negara ditandai dengan pemahaman yang cemerlang terhadap praktik-praktik kehidupan bernegara yang sejalan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945. Kesadaran kebangsaan yang mengkilap yang lahir dari rasa senasib dan sepenanggungan, akibat penjajahan telah berhasil membentuk wawasan kebangsaan Indonesia seperti yang tertuang dalam Sumpah Pemuda pada 1928, yaitu tekad bertanah air, berbangsa dan berbahasa Indonesia (Suryatni, 2018). Rasa senasib dan sepenanggungan itu memang perlu antar warganegara. Hal demikian akan menjalin ikatan yang erat antar warganegara, sehingga, antarwarga negara akan berbagi wawasan tentang kebangsaan secara luas. Tanpa harus memandang siapa yang harus dan tidak harus diajak untuk berinteraksi.

Dalam pembahasan wawasan kebangsaan, tetap tidak boleh mengesampingkan Pancasila sebagai dasar negara baik secara luas maupun sempit. Urgensi Pancasila bagi keberlangsungan kehidupan bangsa Indonesia harus benar-benar diperhatikan berikut juga dalam peningkatan wawasan kebangsaan sebagai upaya mengembalikan Pancasila. Suharno (2019) mengemukakan urgensi revitalisasi Pancasila sebagai dasar negara, bahwa Pancasila harus diletakkan dalam keutuhannya dengan Pembukaan UUD 1945, kemudian dieksplorasi dimensi-dimensi yang melekat padanya, yaitu realitasnya, idealitasnya dan fleksibilitasnya. Dengan demikian, dapat kita pahami bahwa, revitalisasi Pancasila secara primer memang berada di tangan pemerintah, namun secara subsidi rakyat atau masyarakat harus menjadi bagian dari agenda revitalisasi itu.

### 3. Menerapkan pendidikan moral dan karakter (teori dan praktik)

Pada era globalisasi saat ini atau sampai pada era revolusi industri 4.0, tidak cukup dengan wawasan dan pengetahuan kita mampu menjaga bangsa kita, terutama Pancasila. Diberlakukannya pendidikan moral dan karakter akan memantu membuat Pancasila lebih berwibawa, karena memang dalam isi kandungan Pancasila memuat moral dan karakter tingkat tinggi dan disiplin. Pada tahun 1961, Soekarno sudah menghimbau bahwa akan ada gelombang peradaban besar yang tidak terhindarkan di masa depan, itu adalah petikan isi pidatonya dalam konferensi negara-negara non-blok I di Beograd. Dan betul, saat ini terjadi, yaitu globalisasi yang bergerak begitu cepat dan signifikan.

Ideologi Pancasila secara historis merupakan kekuatan pemersatu yang sangat mantap sebagai *common platform* bagi negara-bangsa seperti Indonesia. Keberadaan Pancasila perlu ditampilkan kembali sebagai wacana publik yang terbuka bagi pemaknaan kontemporer sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Subekti (2000) mengatakan bahwa pemaknaan humanisme Pancasila diperlukan dalam rangka penguatan bangsa dalam menghadapi tantangan globalisasi. Humanisme memang jadi pilar penting dalam tubuh Pancasila. Pada bagian humanisme, tidak akan lengkap bila tidak di bumbui dengan pendidikan moral dan etika sehingga nilai humanisme betul-betul dapat dirasakan tidak hanya secara teoritis namun juga praktis.

Pada era globalisasi seperti sekarang ini, eksistensi Pancasila semakin memburuk. Globalisasi memberi permasalahan yang kompleks. Banyaknya tindakan menyimpang, kriminalitas, asusila, serta berbagai macam tindakan kekerasan yang mirisnya banyak terjadi di kalangan generasi muda. Rendahnya tingkat religiusitas yang diharapkan meningkat dan harusnya faktor agama mampu mengatasi permasalahan yang ada. Penerapan nilai-nilai Pancasila adalah solusi etis untuk menghadapi globalisasi. Dengan menerapkan nilai Pancasila kita mampu bersikap bijak dalam mengatasi berbagai pengaruh dan diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan globalisasi. Pancasila adalah kristalisasi moralitas, etika, dan ajaran agama karena Pancasila mewujudkan nilai-nilai Islam, siapapun dan kelompok

manapun yang dengan sendirinya menentang harus di anggap sebagai penjahat (Iskandar, 2016). Maka perlu moral dan etika untuk mampu memahami Pancasila secara teori maupun praktik.

Di Selandia Baru, Pendidikan Kewarganegaraan dianggap berhasil di beberapa bidang kewarganegaraan, hal ini dapat tercapai karena warga negara selandia baru memiliki cukup informasi karena memiliki cukup buku di perpustakaan (Hugh, 1998). Namun denngan kondisi itu, Selandia Baru hanya perlu menyiapkan pengajar yang mumpuni tanpa harus menggunakan buku text dalam Pendidikan Kewarganegaraan, yang semua informsi tersampaikan dengan baik. Ini juga merupakan pendidikan moral dan etika yang terbukti efektif, mengingat Selandia Baru adalah salah satu negara dengann pendidikan terbaik di dunia.

Untuk mengembalikan Pancasila, memang tidak semudah mebalikkan telapak tngan. Selalu ada potensi kekerasan yang terjadi di dalam proses pengetahuan. Orang dengan pendidikan tinggi berada pada kenyataan bahwa individu yang berpendidikan lebih cenderung melakukan tindakan kekerasan karena mereka memiliki keterampilan, akses ke sumber daya, dan bahkan kemampuan pidato untuk memobilisasi keduanya. Potensi penindasan secara psikologis itu terjadi ketika memahami Pancasila hanya sebbagai teks tanpa menyertakan moral dan etika di dalamnya (Davies & Waghid, 2016).

Dalam upaya pengembalian Pancasila melalui pendidikan moral dan etika, persamaan adalah satu hal yang perlu diperhatikan. Dalam pandangan hukum ada istilah *equality before the law* yaitu persamaan dimata hukum yang mengharuskan semua warganegara memiliki hak yang sama dimata hukum, terkhusus di Indonesia. Maka dari itu Banks (2008) menyatakan bahwa kebijakan dan praktik dalam kelompok harus mengalami persamaan dan pengakuan kewarganegaraan yang samma. Hal tersebut dimaksudkan agar moral dan etika dalam setiap proses kewarganegaraan terdistribusi dengan baik dann sempurna.

Oleh karena itu dalam upaya pengembalian Pancasila pada posisi yang seutuhnya, harus melalui tiga tahapan diatas yaitu memsifkan pendidikan

kewarganegaraan, memperluas wawasan kebangsaan serta menerapkan pendidikan moral dan etika dalam upaya pelaksanaannya. Hal ini dimungkinkan agar Pancasila dapat benar-benar berada dalam posisi yang semestinya.

Pancasila sebagai pandangan hidup, agar tidak ditinggalkan, harus ada re-interpretasi terhadap Pancasila itu sendiri dengan pola pikir yang berbeda yaitu harus ada perubahan kerangka berpikir dalam memahami Pancasila agar dapat diterima lebih leluasa sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Banyak asumsi yang mengatakan bahwa Pancasila hanya buatan belaka, namun tetap harus memahami lebih dalam terkait asal mula hadirnya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sejak ditetapkan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945, Pancasila dengan sendirinya, menjadi dasar filsafat negara, dan menjadi sumber hukum bagi seluruh regulasi yang ada dalam badan hukum Indonesia. Pemahaman terkait Pancasila harus secara holistik dan parsial dipahami, agar tidak gagal paham dalam menginterpretasi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia.

Pancasila adalah dasar negara Indonesia, dan isi kandungan dari Pancasila memuat seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia. Walaupun Pancasila dan nilai-nilainya mulai di tinggalkan, namun tetap saja tidak dapat dipungkiri bahwa Pancasila adalah benar berasal dari sari patih kehidupan bangsa Indonesia. Maka harus terus digaungkan dan diamalkan sampai kapanpun. Semua nilai-nilai Pancasila saling berkaitan satu sama lainnya dan tidak bisa dipisahkan. Hal inilah yang membuat Pancasila sangat kokoh sebagai dasar negara Indonesia dan menjadi satu-satunya serta tak tergantikan sampai kapanpun. Maka pengamalan Pancasila haruslah menyentuh kompleksitas agar tidak terjadi interpretasi liar dan menyebabkan anomali terhadap pengamalan Pancasila.

Dengan kondisi geografis dan pluralisme yang ada di Indonesia, maka penerapan Pancasila haruslah benar-benar diperhatikan dengan seksama. Dengan demikian persatuan ditengah keadaan geografis dan pluralis tetap mampu terjaga dengan baik. Selain itu, wawasan kebangsaan harus luas terkait Pancasila dan ke Indonesiaan agar Pancasila dapat menjadi instrumen yang tepat sebagai acuan hidup berbangsa dan bernegara. Pancasila akan selalu melekat sepanjang masa

sejalan dengan keberadaan dan gerak pasang surut bangsa dan negara Indonesia. Namun harus ada peran pemerintah dalam penanaman nilai-nilai Pancasila di dalamnya, yaitu salah satunya dengan memasifkan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di dalam pendidikan formal maupun non-formal. Dengan begitu pemahaman serta wawasan kebangsaan warga negara Indonesia terkait ke Indonesiaan dan Pancasila menjadi lebih luas.

Belakangan terjadi banyak masalah dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah munculnya sikap apatis masyarakat terhadap negara dan dinamikannya. Untuk meminimalisir hal tersebut, perlu diberikan pemahaman mendalam terkait Pancasila dan kewarganegaraan agar masyarakat Indonesia menjadi partisipatif dan pesimis akan perkembangan Indonesia kedepan. Walaupun banyak faktor yang menyebabkan sikap apatis dan skeptis terjadi, namun dengan pemahaman mendalam terkait Pancasila akan membantu meminimalisir hal tersebut. Untuk mencapai hal tersebut, perlu adanya warga negara yang sadar akan kewajibannya sebagai orang yang memiliki wawasan yang lebih luas untuk mengajarkan dan mencontohkan bagaimana kewarganegaraan seharusnya diterapkan di Indonesia.

Selain pendidikan formal, pendidikan non-formal juga berperan penting dalam perkembangan pengetahuan tentang nilai-nilai Pancasila. Sehingga harus terus diamalkan dengan cara apapun, seni adalah salah satu cara mengamalkan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Dalam hal ini, mahasiswa juga punya peran penting, selaku masyarakat elit dalam struktur masyarakat. Sebagai penerus bangsa mahasiswa harus memiliki konsep wawasan nusantara sehingga akan tetap terpri rasa nasionalis dan keutuhan berbangsa dan bernegara. Disamping itu juga harus tetap menghargai nilai-nilai individu, hal ini diperlukan agar tercipta kehangatan berwarga negara dan tercipta masyarakat yang damai.

Kesadaran kebangsaan harus terus ditumbuhkembangkan agar menjadi satu entitas yang tercermin dalam kehidupan bermasyarakat. Hal semacam ini diperlukan agar dominasi dalam hidup bermasyarakat berorientasi pada kesadaran kebangsaan dan pemahaman tentang Pancasila. Dengan demikian sangat penting adanya revitalisasi Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila

harus diletakan dalam posisi yang semestinya yang kemudian mampu dieksplorasikan dalam dimensi-dimensi yang melekat di dalamnya. Dalam hal ini humanisme harus terselip di dalamnya, agar ada rasa kemanusiaan sehingga serbuan arus globalisasi yang begitu kencang dapat dilalui dengan tidak meninggalkan nilai luhur yang ada dalam Pancasila. Selain itu, Pancasila sangat kental dengan Islam, maka jangan sekali-bersebrangan dengan Pancasila.

Pemahaman terkait Pancasila tidak datang begitu saja dengan instan, namun perlu usaha yang harus ditempuh. Contohnya di Selandia Baru, sebagai negara yang terkenal dengan Pendidikan terbaik, Pancasila harus menirunya dengan meningkatkan literasi terkait Pancasila dan dinamika global yang ada di dunia. Namun selain itu juga dalam konteks pengetahuan, orang yang lebih terdidik cenderung akan menindas secara terdidik pula orang yang pendidikannya lebih rendah. Hal ini perlu diperhatikan dengan detail dan harus diselipkan nilai-nilai luhur Pancasila secara teratur dan masif agar tidak muncul masalah seperti di atas. Dengan demikian, seluruh proses pengembalian Pancasila ke dalam nilai luhurnya juga harus disertakan dengan kebijakan yang tepat serta praktik yang relevan dengan situasi dan kondisi yang sesuai. Serta kebijakan tersebut harus tetap berpegang pada prinsip persamaan agar tidak terjadi *Chaos* di antara warga negara yang satu dan yang lain.

## **SIMPULAN**

Dalam merespon Pancasila sebagai dasar negara dan manifestasi kebangsaan Indonesia haruslah betul-betul diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Pancasila sebagai dasar negara harus hadir sebagai mediator segala permasalahan. Pancasila adalah solusi dari setiap permasalahan yang ada di Indonesia. Dengan demikian sifat fundamental yang dimiliki Pancasila harus tetap digaungkan dan diamalkan dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran serta seluruh elemen masyarakat, pemerintah, mahasiswa dan semuanya perlu diperhatikan agar Pancasila mampu menjadi dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa yang ideal bagi bangsa Indonesia. Sebagai pandangan hidup dan dasar negara, Pancasila secara sederhana diartikan sebagai manifestasi kebangsaan Indonesia. Betapa tidak, hal ini berani digaungkan karena

Pancasila memang berasal dari sari patih kehidupan bangsa Indonesia. Nilai-nilai Pancasila bahkan sudah ada sejak lama, bahkan sejak sebelum disahkannya Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Dengan demikian benalah kalau Pancasila dikatakan sebagai manifestasi kebangsaan Indonesia, dan diharapkan menjadi tempat kembalinya seluruh warga Indonesia dari berbagai permasalahan yang dihadapi.

Dengan melihat banyak polemik yang terjadi di Indonesia sekaraang, Pancasila sudah mulai ditinggalkan nilai-nilainya. Untuk menanggulangi hal tersebut, perlu adanya formulasi untuk mengupayakan pengembalian Pancasila kepada nilai-nilai luhurnya, sehingga Pancasila dapat kembali terlihat perkasa dengan pemahaman dan wawasan luas dari warga negara Indonesia yang begitu memahami Pancasila secara menyeluruh. Ada tiga poin penting yang harus dilakukan dalam mengembalikan Pancasila, yang pertama, memasifkan kembali Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di dalam ruang-ruang pendidikan, kedua, meningkatkan wawasan kebangsaan warga negara Indonesia tentang pancasila dan literasi sosial lainnya, ketiga, menerapkan pendidikan moral dan etika untuk menetralsir pemahaman-pemahaman serta praktek yang menyimpang dalam penerapan Pancasila.

## **REFERENSI**

- Arianto, B. (2011). Analisis penyebab masyarakat tidak memilih dalam pemilu. *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 51-60.
- Asmaroni, A, P. (2017). Menjaga eksistensi pancasila dan penerapannya bagi masyarakat di era globalisasi. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*. 1 (2), 50-63.
- Banks, J, A. (2008). Diversity, group identity, and citizenship education in a global age. *Educational Researcher*, Vol. 37, No. 3, pp. 129–139
- Budhisantoso. (2002). Pancasila dan kebangsaan dalam masyarakat majemuk dengan keanekaragaman kebudayaan. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 7(2), 15-37.
- Burtonwood, N. (2003). Isaiah Berlin, diversity liberalism, and education. *Educational Review*, 55(3), 323–331.

- Davies, I. (1998). Citizenship education in Eropa. *Jurnal Pendidikan Sosial dan Ekonomi Anak*. 3(3), 127-145
- Davies, I. Mizuyama, M. Tomphson, G, H. (2010). Citizenship education in Japan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Sosial dan Ekonomi*. 9(3), 170-178.
- Davies, N. & Waghid, Y. (2016). Higher education as a pedagogical site for citizenship education. *Education, Citizenship and Social Justice*. 11(1), 34-43.
- Enslin, P. & Carmen, R. (2013). Artistic education and the for citizenship education. *Jurnal Citizenship, Social and Economics Education*, 12 (2), 62-70.
- Hariyanti, H., Darmawan, C., & Masyitoh, I. S. (2018). Peran partai politik dalam meningkatkan partisipasi politik kader perempuan melalui pendidikan politik. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 15(1), 74-85.
- Haryo, S. & Martodirdjo. (2008). Implementasi pancasila dalam menumbuhkembangkan wawasan kebangsaan. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 13(2), 1-14
- Hugh, B. (1998). Citizenship Education without a text books. *Children's Social And Economics Education*, 3(1), 28-35.
- Iskandar, P. (2016). Khayalan Pancasila. *Jurnal Kontemporer Asia*. 1(1), 1-13.
- Latif, Y. (2013). *Negara paripurna*. Yogyakarta: PT Gramedia
- Notonegoro. (1995). *Pancasila secara ilmiah populer*. Cetakan 9. Jakarta: Bumi Aksara
- Riyanto, A. (2015). *Kearifan lokal Pancasila*. Yogyakarta: Kanisius
- Setiawan, D. (2017). Kontribusi tingkat pemahaman konsepsi wawasan nusantara terhadap sikap nasionalisme dan wawasan kebangsaan. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*. 9(1), 24-33.
- Siswanto. (2019). Pancasila as guard of nation solidarity. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 9(1).109-124.
- Subekti, S. (2013). Pemaknaan humanisme Pancasila dalam rangka penguatan karakter bangsa menghadapi globalisasi. *HUMANIKA*, 17(1).
- Suharno. (2019). Urgensi revitalisasi Pancasila dalam membangun karakter kebangsaan. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. 5(1), 23-33.

- Suryatni, L. (2018). Wawasan kebangsaan sebagai pencerminan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. *Jurnal Ilmiah Widya Non-Eksakta*, 1(1), 46-55.
- Widiuseno, I. (2014). Azaz filosofos Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. *Humanika*, 20(2), 62-66.
- Zabda, S. (2016). Analisis nilai-nilai Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan implementasinya dalam pembangunan karakter bangsa. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 26(2), 106-114.

# **Etika Aktor Politik dan Birokrasi Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Indonesia**

**Anjulin Yonathan Kamlasi**

[anjulinyonathan.2019@student.uny.ac.id](mailto:anjulinyonathan.2019@student.uny.ac.id)

## **Abstrak**

Dalam proses politik berbagai cara digunakan untuk memperoleh kekuasaan sehingga diperlukan sebuah etika untuk menjadi landasan dalam berpolitik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan etika aktor politik dan birokrasi pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan bentuk studi pustaka (*Library research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumentasi dan studi pustaka dari hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini yaitu artikel ilmiah, laporan penelitian ilmiah, buku, dan sumber-sumber yang relevan. Analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis isi yakni dengan cara membandingkan antara satu kajian dengan kajian yang lain. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan kegiatan politik seorang aktor politik memerlukan sebuah etika agar menjadi kontrol sehingga praktek politik dapat mencapai posisi ideal guna menciptakan sebuah kehidupan yang bermartabat. Sementara etika birokrasi pemerintahan memiliki makna sebagai seperangkat nilai yang dapat dijadikan acuan atau penuntun bagi tindakan pelaku administrasi negara sebagai organisasi dalam menyelenggarakan pemerintah dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.

**Kata kunci:** Etika, Aktor Politik, Birokrasi Pemerintahan.

## **PENDAHULUAN**

Politik merupakan sebuah usaha atau cara yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan kekuasaan. Budiardjo (2005) menyatakan bahwa Politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu. Politik selalu menyangkut tujuan dari seluruh masyarakat, dan bukan tujuan pribadi seseorang. Politik juga menyangkut kegiatan berbagai-bagai kelompok termasuk partai politik dan kegiatan orang seorang.

Dalam kegiatan politik, seseorang yang berusaha untuk mendapatkan apa yang menjadi tujuan akhirnya selalu menggunakan berbagai cara bahkan cara-cara yang tidak baikpun selalu digunakan sehingga seringkali kita temui begitu banyak pelanggaran yang terjadi yang dilakukan oleh para politisi misalkan politik uang, kampanye hitam, janji palsu, dan lainnya. Keterpurukan tersebut terkadang dimaknai sebagai bagian dari strategi politik untuk mencapai target. Sehingga

segala cara dilakukan tanpa mengindahkan nilai-nilai dasar yang telah dianut masyarakat Indonesia. Perlu dipahami bahwa hal ini sangat menciderai hati nurani dan prinsip demokrasi masyarakat Indonesia yang khas dengan kearifan lokal sebagai bangsa yang bermartabat (Firnas, 2016).

Ketidajelasan secara etis berbagai tindakan politik di negeri ini membuat keadaban publik saat ini mengalami kehancuran. Fungsi pelindung rakyat tidak berjalan sesuai komitmen. Keadaban publik yang hancur inilah yang seringkali merusak wajah politik, hukum, budaya, pendidikan, dan agama. Rusaknya sendi-sendi ini membuat wajah masa depan bangsa ini kabur. Sebuah kekaburan yang disebabkan karena etika tidak dijadikan acuan dalam kehidupan politik.

Perilaku para politisi seringkali menunjukkan sebuah tindakan yang tidak sesuai dengan etika dalam berpolitik. Merosotnya etika para aktor politik membuat masyarakat gelisah dalam menggapai kemakmuran dan kesejahteraan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh para pendiri republik. Pelaku politik cenderung hanya berbicara kepentingan praktis. Padahal dalam setiap ruang dan waktu terdapat batasan perilaku manusia yang dirumuskan dalam sebuah tata nilai kehidupan (Hasanah, 2019).

Tamin (2004) menyatakan bahwa etika pejabat publik sangat penting karena menjadi dasar dan landasan baginya untuk mencapai tujuan dalam kegiatannya. Biar bagaimanapun juga, praktek politik tidak pernah mencapai posisi ideal jika melupakan prinsip-prinsip etika. Etika yang mengarahkan ke arah yang lebih baik karena etika berperan sebagai pengendali setiap gerak langkah. Akibat dari keterpurukan etika yang sudah menyatu dengan pentas perpolitikan, membuat masyarakat terkadang menilai politik itu kotor, politik itu memanipulasi kekuasaan, politik itu rekayasa kebaikan, politik itu praktek pembodohan. Anggapan seperti ini sering keluar dari mulut masyarakat yang sudah muak melihat atmosfer politik.

Thompson (2005) menyatakan bahwa skandal etika ini memang semakin meluas, tidak saja disebabkan oleh semakin banyak aturan yang membatasi moral pejabat tetapi juga oleh semakin banyak tuntutan publik agar pejabat publik harus mengikuti nilai-nilai dasar yang mereka tuntut. Etika bagi para pejabat mesti

menghasilkan makna moral dari tugasnya dalam memegang jabatan publik tertentu, dan mesti dapat merubah cara berpikir dan bertindak para pejabat. Dengan demikian esensi etika politik bagi para pejabat dapat benar-benar berjalan secara efektif dan efisien. Hal ini muncul dalam tataran praktik bukan dalam tataran konsep. Keterpurukan etika para politisi atau aktor politik dapat berimbas pada pelayanan publik, birokrasi pemerintahan, dan segala bentuk kegiatan dilingkungan pemerintahan itu sendiri.

Birokrasi pemerintahan baik itu pemerintah Pusat dan Daerah sebagai garda terdepan dalam memberikan layanan publik ternyata masih memperlihatkan indikasi yang kurang optimal di dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya, hal ini tentu saja bukan tanpa penyebab, karena sedang faktor penyebab telah mendorong birokrasi pemerintah mengalami perkembangan yang sangat lamban di dalam implementasi agenda kegiatan perubahan yang sesungguhnya telah dituntut sejak lama oleh public (Pramuka, 2010). Faktor-faktor tersebut seperti sejarah masa lalu terutama orde baru dengan sistem pemerintahan yang sentralistik disertai pengaruh partai penguasa yang amat kuat ternyata telah membangun rezim yang korup, marginalisasi kompetensi dalam seleksi pimpinan birokrasi pemerintahan baik pusat dan daerah, politisasi birokrasi, etika publik yang belum menjadi budaya organisasi telah memperparah proses pelayanan publik (Sumahdumin, 2015).

Aminulloh, et. al. (2014) menyatakan bahwa terdapat berbagai persoalan yang terjadi dalam tubuh pemerintahan seperti korupsi, pelayanan publik yang tidak tepat sasaran, serta sikap arogansi. Tingginya korupsi di Indonesia yang hampir semuanya melibatkan para aparat negara menunjukkan sebuah kondisi yang memprihatinkan. Dari berbagai persoalan tersebut, masalah birokratis diduga sebagai penyebab permasalahan utama. Kehidupan birokratis akhirnya mempengaruhi perilaku komunikasi sehingga mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat.

Banyak ahli telah berikhtiar mengartikan batasan tentang komunikasi antara penguasa dengan rakyatnya sebagai bentuk komunikasi politik (Blumler & Kavanah, 2007). Secara sederhana misalnya, komunikasi politik diartikan sebagai

semua bentuk komunikasi yang terjadi diantara aktor-aktor sosial politik terhadap persoalan politik. Dahlan (1990) mendefinisikan komunikasi politik sebagai bidang atau disiplin yang menelaah perilaku politik dan kegiatan komunikasi yang bersifat politik, mempunyai akibat politik dan berpengaruh terhadap perilaku politik.

Akibat dari perilaku komunikasi yang mempengaruhi pelayanan kepada masyarakat maka sering kita jumpai beberapa hal yang tidak sesuai dengan mekanisme pelayanan kepada masyarakat. Pertama, banyaknya pemerintah daerah yang memiliki presentase belanja operasional untuk kebutuhan internal pemerintah lebih besar dari belanja publik. Kondisi seperti ini membatasi pemerintah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kedua, tingkat korupsi yang tinggi. Hal ini terlihat dari adanya sejumlah kepala daerah yang ditangkap oleh KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT), yang diduga karena menjual promosi jabatan, proyek, gratifikasi, dan sebagainya. Ketiga, inefektifitas dan inefisien. Banyak perencanaan pembangunan yang dilakukan secara serampangan, memanipulasi data, tidak fokus pada *outcome* yang ingin dicapai. Keempat, kualitas pelayanan publik yang belum memenuhi harapan (Sundry, 2013).

Berbagai pelanggaran yang terjadi di dalam penyelenggaraan pemerintah merupakan bentuk nyata bobroknya birokrasi Indonesia. Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) kerap kali menjadi permasalahan bagi para birokrat, padahal perbuatan ini tidak dibenarkan sama sekali dan hanya akan memberikan kerugian bagi negara dan masyarakat (Zulyani & Meiwanda, 2020). Kehidupan politik saat ini, aktor politik yang berasal dari pemerintah dan birokrasi, tengah berada pada titik terendah baik menyangkut kredibilitas, etos dan kapabilitas di mata publik. Hal ini diperparah dengan rendahnya kepentingan publik terakomodir dengan baik. Dengan perkataan lain komunikasi, sikap arogansi, etika aparat pemerintah berhubungan dengan kualitas pelayanan. Persoalan-persoalan seperti ini yang kita jumpai terjadi dalam birokrasi pemerintahan kita dikarenakan tidak diterapkannya etika dalam melayani publik atau masyarakat.

Karena itulah, di samping aturan legal formal berupa konstitusi, politik dalam praktiknya perlu pula dibatasi dengan etika. Etika politik digunakan untuk membatasi, meregulasi, melarang, dan memerintahkan tindakan mana yang diperlukan dan mana yang di jauhi. Sebagai masyarakat yang modern, untuk mengetahui pentingnya etika dalam pelaksanaan sistem pemerintahan di Indonesia adalah suatu keharusan yang tidak boleh terabaikan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah deskriptif kualitatif dengan bentuk studi pustaka (*library research*). Studi pustaka (*library research*) merupakan penelitian yang menggunakan sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitian. Penelitian dengan studi pustaka (*library research*) berusaha untuk menganalisis dan mendeskripsikan tentang etika aktor politik dan birokrasi pemerintahan. Teknik pengumpulan data serta informasi yang mendukung penelitian ini meliputi studi dokumentasi serta studi pustaka dari hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data dari berbagai artikel ilmiah, laporan penelitian ilmiah, buku, jurnal, dan sumber-sumber yang relevan dengan topik dari artikel ini. Peneliti mendata kajian dari bahan-bahan ilmiah yang terkait dengan penelitian ini. Analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis isi. Analisis isi digunakan dengan cara membandingkan antara satu kajian dengan kajian yang lain dalam topik yang sesuai dengan artikel ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Etika Aktor Politik**

Etika senantiasa dibicarakan, dipelajari, sebagai ilmu maka akan muncul berbagai rumusan definisi etika. Rumusan definisi etika sebagaimana yang disampaikan oleh Wisok (2009) antara lain *pertama*, etika adalah studi tentang yang benar dan yang salah, artinya bahwa yang dimaksud adalah benar atau salahnya tindakan manusia. Etika dalam studi ini masih terlalu sempit karena terlalu legalistik atau etika hanya memperhatikan benar atau salahnya tindakan manusia menurut peraturan yang berlaku. *Kedua*, Etika adalah studi tentang

pandangan moral dan tindakan manusia. Definisi secara tepat menunjukkan objek material etika. Adapun secara objek formal etika bersama-sama ilmu yang lainnya seperti sosiologis dan antropologi memberi pembatasan terhadap pandangan moral. *Ketiga*, Etika bukanlah studi tentang apa yang ada melainkan tentang apa yang seharusnya.

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa Etika merupakan sebuah ilmu yang membicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan atau tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana menurut Widjaya (1994) yang menyatakan bahwa etika adalah ajaran tentang norma tingkah laku, yang berlaku dalam kehidupan manusia. Etika berkenaan dengan sikap dan kepribadian manusia, tingkah laku yang baik dan benar, sikap, semangat, mental dan batin yang memancar dalam kepribadian. Etika membicarakan perbuatan, tingkah laku manusia, maka sejatinya setiap kita sebagai manusia yang luhur dan beradab dalam kehidupan ini wajib memiliki etika yang baik sebagai dasar dalam beraktifitas disegala bidang kehidupan.

Aktor politik merupakan individu-individu yang bercita-cita, melalui sarana institusi dan organisasi, berkeinginan untuk mempengaruhi proses pembuatan keputusan. Mereka berupaya melakukannya dengan cara mendapatkan kekuasaan politik kelembagaan, baik lembaga eksekutif maupun legislatif, dimana kebijakan-kebijakan yang terpilih bisa diimplementasikan (McNair, 2003). Melalui pemilihan umum orang-orang melegitimasi kekuasaan aktor utama, mewakili kekuasaannya dan akhirnya kehilangan kekuasaan mereka. Dalam beberapa cara, hubungan antara politikus tradisional dan rakyat biasa mungkin dapat dibandingkan dengan aktor panggung dan penonton (Prillettensky & Fox, 2005).

Dalam melaksanakan kegiatan perpolitikan untuk mencapai setiap tujuan tertentu maka seorang politisi atau aktor akan berusaha untuk melakukan dengan segala bentuk strategi, cara, dan usaha untuk mewujudkannya (Mayrudin & Wawan, 2020). Dalam melakukan hal tersebut maka aktor politik harus mendasarinya dengan sebuah etika agar supaya apapun yang menjadi tujuannya dapat tercapai dan tidak menyimpang dari jalur yang sebenarnya. Hal ini

ditegaskan oleh Suseno (1988) bahwa etika politik dapat memberikan patokan-patokan, orientasi dan pegangan normatif bagi mereka yang memang ingin menilai kualitas tatanan dan kehidupan politik dengan tolak ukur martabat manusia.

Menurut Widodo (2014) bahwa fungsi etika bagi aktor politik adalah sebagai berikut. *Pertama*, etika diperlukan dalam hubungannya antara politik dan kekuasaan. Karena kekuasaan cenderung disalah gunakan maka etika sebagai prinsip normatif/etika normatif, etika sebagai sebuah keharusan. Dengan memahami etika maka pejabat politik/aktor politik tidak akan menyalahgunakan kekuasaannya. *Kedua*, etika bertujuan untuk memberdayakan mekanisme kontrol masyarakat terhadap pengambilan terhadap pengambilan kebijakan para pejabat politik/aktor politik agar tidak menyalahi etika. Masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan para pejabat namun dalam tataran tertentu keduanya berbeda. *Ketiga*, pejabat politik atau aktor politik dapat bertanggung jawab atas berbagai keputusan yang dibuatnya selama menduduki posisi tertentu, kebijakan tersebut harus atas kesepakatan bersama dan didasari dengan etika.

Dinamika politik kebangsaan baik politik lokal maupun politik nasional hampir melupakan nilai-nilai fundamental masyarakat Indonesia. Padahal Indonesia merupakan negara hukum, negara religius, dan negara yang memiliki keanekaragaman adat dan budaya. Keterkaitan etika dan politik sangat erat karena politik tanpa etika tentunya akan melahirkan dampak negatif yang tersistematis. Perlu kita cermati fakta yang terjadi di lapangan bahwa beberapa kasus politik disebabkan oleh hilangnya ruh etika pada diri seorang aktor politik (Baka, 2020). Keterpurukan etika inilah menyebabkan maraknya kecurangan seperti politik uang, kampanye negatif, pembohongan masyarakat, janji kepalsuan dan perang kata-kata.

Penafsiran politik itu baik atau buruk sangat tergantung pada aktor (pelaku) politik itu sendiri. Akan mengarah ke hal yang positif jika pelakunya memiliki kesadaran sebuah prinsip moral dan mengarah ke hal negatif jika mengabaikan prinsip tersebut. Pada dasarnya politisilah yang memiliki peran penting dalam mengendalikan praktek politik itu sendiri. Penilaian bahwa politik

itu suatu perjuangan, politik itu suatu ibadah, politik itu suatu kebajikan yang perlu dicapai bersama-sama. Hal ini hanyalah sekedar hayalan apabila elemen masyarakat menjadi penonton sejati atas rekayasa yang dilakukan oleh politisi.

Prajarto (2011) menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hati nurani yang menjadi filter sebelum melakukan tindakan. Naluri inilah yang menjadi pengontrol dalam berpolitik sehingga dapat melakukan perbuatan yang baik atau buruk. Tindakan pada dasarnya dikelompokkan menjadi dua yakni baik atau buruk. Dalam pengelompokkan tersebut memberikan batasan bagi setiap manusia agar tidak melakukan apa yang ingin dilakukan melainkan tindakan itu harus disesuaikan dengan norma-norma yang berlaku.

Oleh karena itu bagi setiap orang yang memilih jalur politik sebagai wadah atau tempat perjuangannya harus menegakan etika politik demi mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermartabat, memelihara dan mengembangkan perilaku politik yang cerdas, bersih, toleran, dan santun demi kesejahteraan manusia (Hans, 2002).

a) Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku aktor politik

Surbakti (2010) menyatakan bentuk perilaku meliputi ada yang memerintah, ada yang menaati pemerintah; yang satu mempengaruhi, yang lain menentang dan hasilnya berkompromi; yang satu menjanjikan, yang lain kecewa karena janji tidak dipenuhi; berunding dan tawar menawar, yang satu memaksakan putusan berhadapan dengan pihak lain yang mewakili kepentingan rakyat yang berusaha membebaskan; yang satu menutupi kenyataan yang sebenarnya (yang merugikan masyarakat atau yang mempermalukan), pihak lain berupaya memaparkan kenyataan yang sesungguhnya, dan mengajukan tuntutan, memperjuangkan kepentingan dan mencemaskan apa yang terjadi, semuanya adalah bentuk perilaku politik.

Kajian terhadap perilaku politik sering kali dijelaskan dari sudut psikologis di samping pendekatan struktural fungsional dan struktural konflik. Berikut ini diuraikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik seorang aktor politik menurut Surbakti (2010). *Pertama*, lingkungan sosial politik tak langsung seperti sistem politik, sistem ekonomi,

sistem budaya dan media masa. *Kedua*, lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian aktor, seperti keluarga, agama, sekolah, dan kelompok pergaulan. Dari lingkungan sosial politik langsung seorang aktor mengalami sosialisasi dan internalisasi nilai dan norma masyarakat, termasuk nilai dan norma kehidupan berbangsa dan bernegara, dan pengalaman-pengalaman hidup pada umumnya. *Ketiga*, struktur kepribadian yang tercermin dalam sikap individu.

### **Birokrasi Pemerintahan**

Birokrasi selalu menjadi perhatian dari seluruh masyarakat. Setiap kali mendengar tentang kata birokrasi, masyarakat langsung berpikir tentang segala urusan yang kerap kali mandek dan memiliki berbagai prosedur serta formalitas yang kaku. Masyarakat sering memandang birokrasi sebagai sebuah sistem dan alat manajemen pemerintahan yang sangat buruk. Hal ini terjadi karena berbagai pengalaman dan pengamatan dari masyarakat terhadap praktek-praktek aparat birokrat yang melenceng dari proses penyelenggaraan tugas-tugasnya.

Perilaku aparat birokrasi (birokrat) yang terjadi saat masyarakat berhubungan untuk sesuatu urusan tertentu justru menimbulkan ketidakpuasan dari masyarakat terhadap pemerintah. Sehingga dapat dijustifikasi bahwa pelayanan yang diberikan oleh aparat di birokrasi tidak berkualitas. Kesan yang timbul di masyarakat selama ini bukanlah produk pelayanan yang sepenuh hati atau dengan kata lain hanya sekedar melepas kewajiban sebagai abdi negara. Hal ini akhirnya menimbulkan berbagai keluhan dari masyarakat, yang di satu sisi masyarakat berharap banyak pada aparatur pemerintah dengan kualitas pelayanan yang memuaskan, atau pada sisi lain kadar pelayanan yang diberikan belum optimal (Rivai, 2013).

Birokrasi pemerintahan yang selalu menunjukkan kesan negatif dan kurang maksimal merespon keinginan masyarakat menyebabkan setiap kerja dari pemerintah sulit untuk diterima oleh masyarakat sendiri (Adnan, 2013). Kondisi pelayanan yang sering dipolitisasi dan lebih mementingkan kepentingan individu dan kelompok terus dilakukan. Hal ini sesuai dengan pendapat Martini (2010) bahwa politisasi birokrasi di Indonesia masih banyak terjadi yang datang dari

legislatif maupun eksekutif. Tetapi mempunyai kepentingan yang sama yakni melanggengkan kekuasaan.

Di Indonesia sendiri, kondisi pemerintahan yang bervariasi antara desentralisasi dan sentralisasi dalam kurun tertentu. Peralihan setiap waktu itu memberikan pengaruh pada *performance* atau kinerja birokrasi pemerintahan dalam pembangunan. Desentralisasi cenderung menampung aspirasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, yang hasilnya lebih diarahkan pada pemenuhan aspirasi rakyat. Sedangkan sentralisasi lebih mengarah pada penyeragaman di bawah kendali pemerintah pusat. Dalam masyarakat yang majemuk, bentuk sentralisasi tentu saja tidak menggambarkan kenyataan yang ada sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpuasan masyarakat, bahkan dalam proses penyelenggaraan birokrasi pemerintahan yang cenderung menimbulkan gejala pemberontakan pemerintah daerah yang mengarah pada disintegrasi bangsa (Setiawan, 2014; Wijaya, Atika, Sutikno, et. al, 2020).

Dengan demikian maka apabila melihat kondisi birokrasi pemerintahan yang terjadi, kita dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa sampai saat ini masih terjadi atau masih ada kecenderungan praktek birokrasi yang tidak profesional dan menimbulkan praktek-praktek yang berujung pada Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sehingga dampaknya adalah masyarakat kurang mendapat pelayanan yang baik. Hal ini juga berefek pada penyelenggaraan pemerintahan yang tidak sesuai dengan prosedural dan perundang-undangan yang berlaku. Akibat dari penyelenggaraan pemerintahan yang tidak sesuai ini, menunjukkan bahwa birokrasi dan perilaku birokrat tidak adanya bentuk integritas.

Berdasarkan persoalan yang terjadi maka terdapat tiga pendekatan dasar dalam merumuskan tingkah laku etika kita yang dikemukakan oleh Labolo (2016) yaitu *pertama, Utilitarian Approach*, setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya. Oleh karena itu dalam bertindak seseorang seharusnya mengikuti cara-cara yang dapat memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat, dengan cara yang tidak membahayakan dan dengan biaya yang serendah-rendahnya. *Kedua, Individuals Right Approach*, setiap orang dalam tindakan dan kelakuannya memiliki hak dasar yang harus dihormati. Namun tindakan ataupun

tingkah laku tersebut harus dihindari apabila diperkirakan akan terjadi benturan dengan hak orang lain. *Ketiga, Justice Approach*, para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama, dan bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan baik secara perseorangan ataupun secara berkelompok.

Dengan demikian maka fungsi etika untuk membina kehidupan yang baik berdasarkan nilai-nilai moral tertentu yang berlaku akan memberikan dampak positif bagi pelayanan pemerintahan di Indonesia. Kehidupan manusia bersifat multidimensi meliputi berbagai bidang sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, yang semuanya memerlukan etika termasuk di dalamnya kehidupan birokrasi di lingkungan pemerintahan agar prosedur yang ada dapat berjalan dengan baik.

Di Indonesia sendiri tampaknya masalah penerapan fungsi etika birokrasi yang lebih intensif masih belum dilakukan dan digerakan secara nyata. Praktek penerapan etika birokrasi yang paling sering kita jumpai hanya sering diwujudkan dalam bentuk buku saku "*code of conducts*" atau kode etik di masing-masing instansi. Hal ini barulah tahap awal dari praktek etika birokrasi yang mengkodifikasikan nilai-nilai yang terkandung dalam etika birokrasi bersama-sama *corporate-culture* atau budaya kerja sama ke dalam suatu bentuk pernyataan tertulis dari pemerintah untuk dilakukan (Labolo, 2016).

### **Etika Birokrasi Pemerintahan dalam Harapan**

Sesungguhnya etika birokrasi pemerintahan sangat berhubungan *doing the right things* bagi rakyat, bukan bagi pejabat atau aparatnya saja. Dalam perkembangan masyarakat modern antara etika birokrasi dan etika administrasi publik adalah saling belajar dan saling mempengaruhi. Dalam etika birokrasi pemerintahan, mulai berbicara tentang *public policy approach* (pendekatan kebijakan publik) dalam hubungan antara pemerintahan dengan masyarakat. Etika administrasi publik yang sedang melakukan *reinventing the government* dengan menerapkan jurus-jurus dalam menjalankan birokrasi, mau tidak mau semakin rentan pula terhadap persoalan-persoalan yang biasanya muncul dalam etika birokrasi (Labolo, 2016).

Keberhasilan pemerintah untuk mensejahterakan rakyat ditentukan oleh kemampuan manajerial pemerintah dalam memanfaatkan seluruh potensi secara optimal. Etika birokrasi pemerintah dituntut untuk mengembangkan pemikiran kreatif dan inovatif untuk menyusun kebijakan program dan pelayanan kepada masyarakat serta memberdayakan aset produktifnya (SDM) dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dituntut untuk merumuskan berbagai kebijakan kreatif dalam rangka merespon dan mengantisipasi tuntutan masyarakat yang terus berubah, perkembangan lingkungan yang secara kontinyu terus berubah, dan juga persiapan memasuki globalisasi dengan persaingan yang ketat.

Labolo (2016) menyatakan bahwa etika birokrasi dalam harapan Indonesia yang dikenal sebagai negara yang ramah dan sopan harus lebih menggerakkan penerapan etika birokrasi secara intensif terutama setelah mengalami berbagai tragedi, bencana dan krisis ekonomi, ini sebagai teguran untuk menyadarkan bangsa. Sayangnya bangsa ini mudah lupa dan mudah pula memberikan maaf kepada suatu kesalahan yang menyebabkan bencana nasional, sehingga penyebab krisis tidak terselesaikan secara tuntas dan tidak berdasarkan suatu pola yang mendasar. Sesungguhnya penyebab utama krisis ini, dari sisi korporasi, adalah tidak berfungsinya praktek etika birokrasi secara benar, konsisten dan konsekwen. Harapan masyarakat untuk memiliki pemerintahan yang baik, peduli, melayani, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, masih jauh dari realitas.

Sinclair (1993) menyatakan bahwa sebuah birokrasi merupakan suatu sistem administrasi yang dioperasikan oleh banyak pegawai mengikuti aturan-aturan dan prosedur-prosedur. Selanjutnya bahwa dalam etika birokrasi publik, setidaknya terdapat tiga perhatian penting yakni (a) pelayanan publik yang berkualitas dan relevan; (b) dimensi normatif dan dimensi reflektif (bagaimana bertindak) menciptakan suatu institusi yang adil; dan (c) modalitas etika, menjembatani agar norma moral bisa menjadi tindakan nyata (sistem, prosedur, sarana yang memudahkan tindakan etika).

Dalam konteks birokrasi, etika birokrat digambarkan sebagai suatu panduan norma bagi aparat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan kepada

masyarakat. Etika harus diarahkan pada pilihan-pilihan kebijakan yang benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat luas (Sedarmayanti, 2012). Oleh karena itu etika birokrasi memiliki makna sebagai seperangkat nilai yang dapat dijadikan acuan atau penuntun bagi tindakan pelaku administrasi negara sebagai organisasi dalam menyelenggarakan pemerintah dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di Indonesia.

### **Etika Aparatur dalam Pelayanan Publik**

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya Negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak hak sipil setiap warga Negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Undang Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada negara untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara demi kesejahteraan, sehingga efektifitas suatu system pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pun secara tegas menyatakan bahwa salah satu tujuan didirikan Negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan publik dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Wahyudi, 2011).

Menurut Maani (2010) bahwa birokrasi penyelenggaraan pelayanan publik tidak mungkin bisa dilepaskan dari nilai etika. Etika berkaitan dengan soal kebaikan dan keburukan di dalam hidup manusia, maka tugas-tugas birokrasi pelayanan publikpun tidak bisa terlepas dari hal-hal yang baik dan buruk. Dalam praktek pelayanan publik saat ini di Indonesia kita menginginkan birokrasi publik yang terdiri dari manusia-manusia yang berkarakter, yang dilandasi sifat-sifat kebajikan, yang harus ditunjukkan bukan hanya menghayati nilai-nilai kebenaran, kebaikan, dan kebebasan yang mendasar tetapi juga nilai kejuangan. Birokrasi pelayanan publik harus menempatkan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan semangat kejuangan seorang birokrat akan sanggup bertahan dari berbagai godaan untuk tidak berbuat yang bertentangan dengan nilai-nilai kebenaran, kebaikan, keindahan, persamaan dan keadilan.

Yulianto (2009) menyatakan bahwa apapun yang dilakukan oleh aktor politik adalah sebuah pesan komunikasi yang berada dalam bingkai kepentingan

publik sebagai komunikator akan bertanggung jawab terhadap apa yang disampaikan dan dilakukan termasuk efek yang ditimbulkan. Lebih jauh komunikasi bertujuan merealisasikan pesan-pesan politik dalam rangka mendekatkan apa yang ideal dan apa yang nyata. Dengan demikian maka, model komunikasi yang efektif dan aspiratif dari aktor politik dalam birokrat akan berdampak pada pembangunan dan kebijakan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Standar etika pelayanan publik yang yang diperlukan adalah pemenuhan atau perwujudan nilai-nilai atau norma-norma sikap dan perilaku birokrasi publik dalam setiap tindakan dan pelayanannya, yang dapat diterima oleh masyarakat luas. Hal ini berarti bahwa dalam pelayanan birokrasi publik itu sendiri dimensi pelaksanaan etika sangat diperlukan, karena etika merupakan unsur penting yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah (Nuraeni, 2020).

Perry (1989) menyatakan bahawa etika pelayanan publik dalam arti luas, konsep pelayanan publik (*public service*) identik dengan administrasi publik (*public administration*) yaitu berkorban atas nama orang lain dalam mencapai kepentingan publik. Dalam konteks ini pelayanan publik lebih dititikberatkan kepada elemen-elemen administrasi publik seperti *policy making*, desain organisasi, dan proses manajemen dimanfaatkan untuk mensukseskan pemberian pelayanan publik, dimana pemerintah merupakan pihak *provider* yang diberi tanggungjawab.

Sementara etika pelayanan publik dalam erti sempit, adalah suatu tindakan pemberian barang dan jasa oleh pemerintah kepada masyarakat dalam raangka tanggungjawabnya kepada publik, baik diberikan secara langsung maupun melalui kemitraan dengan swasta dan masyarakat, berdasarkan jenis dan intensitas kebutuhan masyarakat, kemampuan masyarakat dan pasar. Konsep ini lebih menekankan bagaimana pelayanan publik diberikan melalui suatu *delivery system* yang sehat. Pelayanan publik ini dapat dilihat sehari-hari di bidang administrasi, keamanan, kesehatan, pendidikan, perumahan, air bersih, telekomunikasi, transportasi, bank, dan sebagainya (Kurniawan, 2013).

Dengan demikian maka sebuah konsep etika pelayanan publik yang diharapkan adalah suatu praktek administrasi publik dan atau pemberian layanan publik (*delivery system*) yang didasarkan atas serangkaian tuntutan perilaku (*rule of conduct*) atau kode etik yang mengatur, sehingga hal-hal yang baik yang harus dilakukan atau sebaliknya yang tidak baik agar dihindari.

## **SIMPULAN**

Ada beberapa manfaat etika politik bagi para aktor politik atau pejabat politik. *Pertama*, etika diperlukan dalam hubungannya dengan relasi antara politik dan kekuasaan. *Kedua*, etika politik bertujuan untuk memberdayakan mekanisme kontrol masyarakat terhadap pengambilan kebijakan para aktor politik agar tidak menyalahi etika. *Ketiga*, para aktor politik dapat bertanggung jawab atas berbagai keputusan/kebijakan yang dibuatnya baik selama menduduki posisi tertentu maupun setelah meninggalkan jabatannya. Akibat dari keterpurukan etika yang sudah menyatu dengan pentas perpolitikan, sehingga masyarakat terkadang menilai politik itu kotor, politik itu memanipulasi kekuasaan, politik itu rekayasa kebaikan, politik itu praktek pembodohan. Anggapan seperti ini sering keluar dari mulut masyarakat yang sudah muak melihat atmosfir politik.

Dalam praktek pelayanan publik saat ini di Indonesia, para pemberi pelayanan publik harus mempelajari norma-norma etika yang bersifat universal, karena dapat digunakan sebagai penuntun tingkah lakunya. Etika sangat diperlukan guna memberdayakan para birokrat dalam menjalankan berbagai tugas di birokrasi pemerintahan. Masyarakat sangat membutuhkan sebuah pelayanan yang etis dan bermartabat tanpa adanya berbagai diskriminasi dan KKN sehingga pemerintah sendiri diharapkan memiliki etika dan moralitas yang tinggi dalam menjalankan kewenangan pemerintahannya, juga memiliki akuntabilitas dan sebuah penghormatan yang tinggi pula terhadap tuntutan aspirasi dan kepentingan publik atau masyarakat yang dilayaninya.

## **REFERENSI**

Adnan, M. F. (2013). Reformasi birokrasi pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan pelayanan publik. *Humanis*, 12(2), Hal. 196-203.

- Aminulloh, et. al. (2014). Model komunikasi, sifat arogansi, dan etika komunikasi pemerintah menuju pelayanan publik prima. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 12(2), Hal. 98-108.
- Baka, A. (2020). Membangun birokrasi berbasis budaya lokal. *JURNAL SIPATOKKONG BPSDM SULSEL*, 1(3), 244-251.
- Blumler, J. & Kavanah, D. (2007). The third age of political communication in ralp negrine and james stanyer, *The Political Communication Reader*, London: Routledge.
- Budiardjo, M. (2005). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Dahlan, A. (1990). *Perkembangan komunikasi politik sebagai bidang kajian*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Firnas, M. A. (2016). Politik dan birokrasi: masalah netralitas birokrasi di Indonesia era reformasi. *Jurnal Review Politik*, 6(01), 160-194.
- Hans, K. (2002). *Etika global*. Qalam. Yogyakarta.
- Hasanah, D. I. (2019). Moral dan etika birokrasi dalam Pelayanan publik. *JISIPOL Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(1), 48-58.
- Ismail. (2017). *Etika pemerintahan: norma, konsep, dan praktik etika pemerintahan bagi penyelenggaraan pelayanan pemerintah*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Kurniawan, R., C. (2013). Reformasi pelayanan birokrasi. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 4(2), 118-125.
- Labolo, M. (2016). *Etika pemerintahan*. Institut Pemertintahan Dalam Negeri.
- Maani, K. (2010). Etika pelayanan publik. *Demokrasi*, 9(1), Hal. 61-70.
- Martini, R. (2010). Politisasi birokrasi di Indonesia. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 1(1), Hal. 67-74.
- Mayrudin, Y. M., & Wawan. (2020). Etika pejabat publik dan kualitas pelayanan publik di lingkungan pemerintahan Kabupaten Tangerang. *Journal of Social Politics and Governance*, 2(1), 1-17. Retrieved from <https://jurnal.amikom.ac.id/index.php/jspg/article/view/192>.
- McNair, B. (2003). *An introduction to political communication*. London and New York: Routledge.
- Nuraini, S. (2020). Penerapan etika administrasi publik sebagai upaya dalam mewujudkan good governance. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi*, 14(1). <http://jurnal.unnur.ac.id/index.php/jimia/article/view/352>.

- Perry, J. L. (1989). *Handbook of Public Administration*. San Fransisca, CA: Jossey-Bass Limited.
- Prajarto, N. (2011). Etika: Keamanan Berpolitik dan Ber-New Media. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 14(3), Hal. 349-368, ISSN 1410-4946.
- Pramuka, G. (2010). Masalah birokrasi sebagai pelayan publik. *Masyarakat Kebudayaan & Politik*, 20(1), 23-34.
- Prilleltensky, I. & Fox, D. (2005). *Psikologi kritis*. Jakarta: Teraju
- Rahmaniyah, I. (2010). *Pendidikan etika*. Malang: UIN Maliki Press
- Rivai, A. (2013). Budaya kerja birokrasi pemerintah dalam pelayanan publik. *Jurnal Academia*, 5(1), Hal. 949-956.
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance & Good Corporate Governance*. Bandung: Cv. Mandar Maju
- Sinclair, J. (1993). *Personnal: the management of people at work*. New York: Macmillan Publishing Co., Inc.
- Sumahdumin, D. (2015). Etika publik dan reformasi birokrasi vs korupsi. *Jurnal Inspirasi*, 6(2), Hal. 26-31.
- Sunday, R. I. (2013). Pelaksanaan etika birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah di Indonesia. *SCIENTICA*, 1(1), Hal. 25-34.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami ilmu politik*. Jakarta: Grasindo
- Suseno, F., M. (1988). *Etika politik*. Gramedia: Jakarta.
- Tamin, F. (2004). *Reformasi birokrasi: analisis pendayagunaan aparatur negara*. Jakarta: Blantika.
- Thompson, F.D. 2005. *Restoring Responsibility: Ethics in Government, Business and Healthcare*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Wahyudi, H. A. (2011). Peran strategis birokrasi dalam menentukan pelayanan publik. *Jurnal Konstitusi*, 1(1), Hal. 61-74.
- Widodo, W. (2014). Mewujudkan budaya politik santun, bersih dan beretika. *Humanika*, 19(1), Hal. 114-129, ISSN 1412-9418.
- Wijaya, S. S., Atika, Z. R., Sutikno, C. et. al. (2020). Desentralisasi pelayanan publik di Kabupaten Wonosobo. *Public Policy and Management Inquiry*, 1(1), 100-115. DOI: <https://doi.org/10.20884/ppmi.v4i1.3219>.
- Yulianto, M. (2009). Grapevine demokrasi dan komunikasi politik dalam pilkada. *Jurnal Komunikator*, 1(1).

Zulyani, E. P., & Meiwanda, G. (2020). Agile government dalam mewujudkan birokrasi yang berkelas dunia. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 15(1), 78-86.

# Urgensi Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Penguatan Keterampilan Berpikir Kritis

Arum Putri Pertiwi, Sunarso

[arum63pasca.2019@student.uny.ac.id](mailto:arum63pasca.2019@student.uny.ac.id)<sup>1</sup>, [sunarso@uny.ac.id](mailto:sunarso@uny.ac.id)<sup>2</sup>

## Abstrak

Penyebaran berita *hoax* begitu cepat dan ramai di kalangan peserta didik, penyebaran berita *hoax* dijadikan sebagai topik utama pada masa sekarang. Peserta didik harus memiliki keterampilan yang mampu mengatasi penyebaran *hoax*, maka keterampilan berpikir kritis dijadikan sebagai salah satu keterampilan untuk mengatasi penyebaran berita *hoax* di kalangan peserta didik. Artikel ini membahas tentang urgensi mata pelajaran PPKn dalam penguatan keterampilan berpikir kritis. Artikel ini bertujuan untuk pentingnya mata pelajaran PPKn dalam penguatan keterampilan berpikir kritis. Metode yang digunakan adalah *study literatur* yang terdiri dari kajian-kajian tentang urgensi mata pelajaran PPKn dan penguatan keterampilan berpikir kritis. Adapun hasil dari kajian literasi urgensi mata pelajaran PPKn sebagai berikut. *Pertama*, mata pelajaran PPKn merupakan mata pelajaran dasar yang bertujuan untuk pembentukan peserta didik memiliki komponen pengetahuan, keterampilan, dan karakter kewarganegaraan. *Kedua*, keterampilan berpikir kritis termasuk dalam keterampilan kewarganegaraan pada mata pelajaran PPKn. *Ketiga*, cara mata pelajaran PPKn dalam penguatan keterampilan berpikir kritis.

**Kata kunci:** Keterampilan berpikir kritis, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Penguatan.

## PENDAHULUAN

Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) mencakup *tiga* komponen yaitu komponen pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*), dan karakter kewarganegaraan (*civic disposition*). Proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di kelas harus lebih banyak peserta didik yang terlibat dalam pembelajaran. Namun, pada proses pembelajaran mata pelajaran PPKn masih hanya membahas tentang teori saja. Proses pembelajaran mata pelajaran PPKn di kelas belum sepenuhnya menerapkan keterampilan dan karakter kewarganegaraan untuk peserta didik.

Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) berfokus pada pembentukan warga negara yang mampu memahami, melaksanakan hak-hak, kewajiban sebagai warga negara yang cerdas, terampil, berkarakter sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 (Baihaqi, 2017). Tujuan mata

pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) adalah pembentukan pemikiran secara kritis agar berlandaskan pada transformasi sosial dan dapat menyelesaikan permasalahan di lingkungan sekitar (Swalwell & Payne, 2019). Peserta didik belajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mampu memberikan penguatan keterampilan berpikir kritis pada peserta didik.

Keterampilan berpikir kritis adalah salah satu bagian dari keterampilan analitik dalam kognitif Bloom yang terdiri dari ingatan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Keterampilan berpikir kritis merupakan keterampilan yang bertujuan untuk penganalisisan ide-ide secara spesifik, pembedaan secara komperhensif, pemilihan, pengidentifikasian, penilaian dan pengembangan menjadi cara yang sempurna (Tarunasena, 2012). Pertiwi & Rizal (2020) mengatakan pembelajaran pada abad 21 harus memuat keterampilan 4 C yaitu komunikasi (*communication*), kolaborasi (*collaboration*), kreativitas (*creativity*), dan berpikir kritis (*critical thinking*). Keterampilan berpikir kritis merupakan komponen dalam keterampilan kewarganegaraan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Proses Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan selalu berkaitan dengan guru. Guru akan gagal jika guru tidak menerapkan pembelajaran sepanjang hayat (Rusman, 2016). Guru berperan untuk menumbuhkan pemikiran kritis dan kemandirian pada peserta didik (Reichert & Purta, 2019). Adapun faktor yang mendukung proses penerapan keterampilan berpikir kritis pada peserta didik yaitu keaktifan peserta didik, partisipasi guru dalam penerapan keterampilan berpikir kritis, penggunaan media pembelajaran yang tepat, desain pembelajaran yang tepat, dan metode pembelajaran yang tepat (Terblanche & Clercq, 2019). Jadi, penguatan keterampilan berpikir kritis sangat penting pada pembelajaran PPKn dan perlu didukung dengan peran seorang guru.

Keterampilan berpikir kritis belum seutuhnya dimiliki oleh peserta didik (Mohseni, Seifoori, & Ahangari, 2020). Hal ini diperkuat oleh Trisnowati & Firmadani (2020) bahwa peningkatan keterampilan berpikir kritis peserta didik harus didukung dengan pemilihan metode pembelajaran yang tepat agar

keterampilan berpikir kritis peserta didik dapat meningkat secara signifikan. Namun, penguatan keterampilan berpikir kritis peserta didik tidak didukung oleh proses pembelajaran pada pendidikan yang berlangsung (Erikson & Erikson, 2018). Proses pendidikan lebih mengutamakan pada hasil pembelajaran yang telah dilalui oleh peserta didik. Peserta didik tidak diberikan kesadaran untuk penguatan keterampilan berpikir kritis pada proses pembelajaran di kelas. Proses penguatan keterampilan berpikir kritis termasuk pada proses pembelajaran di kelas, sehingga penguatan keterampilan berpikir kritis harus diterapkan secara terus-menerus pada proses pembelajaran berlangsung.

Pengajaran keterampilan berpikir kritis masih sulit diterapkan dengan menggunakan metode inovatif (Alsaleh, 2020). Seorang guru harus dapat memberikan contoh tentang penerapan berpikir kritis kepada peserta didik (Palavan & Özcan, 2020). Keterampilan berpikir kritis dapat disebut dengan keterampilan kewarganegaraan yang didasarkan pada pengetahuan kewarganegaraan. Proses berpikir kritis merupakan pengidentifikasian masalah secara besar kecil, penghargaan wawasan yang dimiliki, dan pencarian solusi yang terbaik (Swalwell & Payne, 2019). Tujuan metakognitif dalam berpikir kritis merupakan setiap individu harus dapat memantau kualitas berpikir, mengoreksi diri, memperbaiki kekurangan dalam beragumen, memiliki strategi pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan (Bermudesz, 2015).

Keterampilan berpikir kritis peserta didik merupakan cerminan dari keseluruhan proses pembelajaran yang telah dilalui oleh peserta didik (Liu, Shaw, Gu, et al., 2018). Keterampilan berpikir kritis dapat mengembangkan kemampuan pengetahuan berpikir individu untuk dapat menyaring sumber berita. Namun, adanya penyebaran berita *hoax* di lingkungan masyarakat secara cepat, maka setiap individu mudah terbawa berita *hoax* yang ada di lingkungan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran berita *hoax* begitu cepat dan perlu adanya cara untuk mengatasi penyebaran berita *hoax*, maka penulis memberikan solusi untuk permasalahan ini yaitu penguatan keterampilan berpikir kritis. Penulis memaparkan tentang pentingnya mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan

Kewarganegaraan (PPKn) dalam penguatan keterampilan berpikir kritis guna mengatasi penyebaran berita *hoax*.

Penulisan artikel ini membahas tentang pentingnya mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk penguatan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik dapat menguatkan keterampilan berpikir kritis guna pemecahan solusi. Peserta didik memerlukan keterampilan berpikir kritis melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kebaharuan dalam artikel ini yaitu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan perlu dioptimalkan pada proses pembelajaran agar peserta didik memiliki penguatan dalam berpikir kritis.

## **METODE**

Penulisan artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat studi pustaka (*library research*). Data diperoleh dengan studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dari berbagai material yang ada di perpustakaan seperti tulisan-tulisan meliputi buku, jurnal, dan literatur hasil penelitian. Sumber yang dimaksud dalam penulisan artikel ini adalah urgensi mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam penguatan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, maka teknik analisis yang digunakan adalah teknik deskriptif dengan cara analisis isi. Teknik ini sejalan dengan tujuan artikel ini yaitu urgensi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam penguatan berpikir kritis peserta didik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.**

Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan (PPKn) merupakan mata pelajaran yang terdiri dari dua konteks yaitu Pancasila dan Kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila dijadikan untuk pembinaan peserta didik agar menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila yang dijadikan sebagai pengaktualisasian diri sebagai makhluk Tuhan, makhluk individu, dan makhluk

sosial. Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk pengaktualisasian diri sebagai makhluk sosial dan makhluk individu. Pendidikan Kewarganegaraan bukan hanya memberikan pemahaman sebagai warga negara di suatu negara saja, melainkan juga memberikan pemahaman tentang peranan sebagai warga negara dan warga global (Yamanto, Budimansyah, & Bestari, 2014). Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) termasuk dalam salah satu mata pelajaran wajib yang ditempuh oleh peserta didik. Berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, dan muatan lokal. Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan diwajibkan oleh seluruh peserta didik dan mahasiswa.

Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk persiapan kaum muda untuk dapat menjadi manusia yang dapat hidup di lingkungan keluarga, masyarakat, negara dan global (Balogum & Yusuf, 2019). Pendidikan kewarganegaraan di lingkungan keluarga merupakan proses pendidikan kewarganegaraan pada tahap awal tentang pengenalan kewarganegaraan dan hanya melibatkan pihak keluarga seperti ayah, ibu, kakak atau adik, dan keluarga besar. Pendidikan kewarganegaraan di lingkungan sekolah merupakan proses pendidikan kewarganegaraan pada tahap kedua yang melibatkan pihak sekolah untuk memerankan peran penting sebagai orang dewasa yang dapat mencontohkan peserta didik untuk perwujudan konsep kewarganegaraan di sekolah. Pendidikan kewarganegaraan di lingkungan masyarakat merupakan proses pendidikan kewarganegaraan pada tahap ketiga yang melibatkan masyarakat untuk dapat memberikan peran setiap individu agar dapat terlibat sebagai warga masyarakat yang bertujuan untuk memajukan konsep kewarganegaraan di lingkungan masyarakat.

Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk persiapan individu untuk dapat hidup di lingkungan masyarakat yang beranekaragaman dan mampu

bersikap toleransi (Veugelers, 2019). Proses pembelajaran PPKn dapat dikembangkan untuk penanaman keterampilan-keterampilan kewarganegaraan. Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan harus lebih mengarahkan pada peserta didik secara aktif, bukan hanya penyampaian materi seperti yang ada di buku tetapi guru juga harus dapat menyampaikan nilai-nilai dan penerapan nilai-nilai disetiap materi (Abrar & Sundara, 2017). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan praktis dapat dijadikan sebagai suatu usaha dalam peneguhan masyarakat multikultural yang damai. Proses pembelajaran di kelas, peserta didik mempersiapkan diri agar dapat bersikap toleransi. Bentuk dari toleransi yaitu proses pemahaman, penerimaan, dan penghormatan terhadap perbedaan-perbedaan dari setiap budaya yang ada, sehingga pendidikan kewarganegaraan terdiri dari muatan nilai-nilai multikultural di Indonesia (Tolak, 2018). Pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk pembentukan peserta didik agar dapat menjadi warga negara yang siap bersaing pada lingkungan nasional dan global yang memiliki karakter-karakter kewarganegaraan.

Proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan harus didukung dengan partisipasi peserta didik pada pembelajaran di kelas. Partisipasi peserta didik harus diberikan keterampilan kewarganegaraan salah satunya adalah berpikir kritis (Davies, 2020). Pendidikan kewarganegaraan berfungsi untuk penumbuhan sikap mental peserta didik yang cerdas, tanggung jawab, beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghayati nilai-nilai falsafah bangsa, berbudi pekerti luhur, bersikap rasional, dinamis, sadar hak kewajiban sebagai warga negara, aktif memanfaatkan ilmu, teknologi, seni untuk kepentingan kemanusiaan disiplin di lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara. Peserta didik dapat memahami, menganalisis, menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, bangsa, dan negara secara cepat, rasional, konsisten, berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan nasional (Sunarso, Dwikusrahmadi, & Sutarini, 2008). Proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan harus melibatkan peserta didik secara aktif agar peserta didik memahami konsep, peran warga negara, warga global, dan peserta didik dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis melalui keterampilan kewarganegaraan.

Pendidikan Pancasila merupakan pendidikan yang menginternalisasi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat dijadikan sebagai pedoman untuk pembinaan karakter setiap peserta didik (Nurdin, 2015). Pancasila dijadikan sebagai pedoman berbangsa dan bernegara oleh bangsa Indonesia. Pendidikan Pancasila termuat di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran dasar di sekolah yang bertujuan untuk persiapan kaum muda untuk menjadi warga negara yang berperan aktif dalam masyarakat, bangsa, negara, dan global (Cogan, 1999). Kennedy (2012) mengatakan pendidikan kewarganegaraan di setiap negara memiliki bentuk dan cara penerapan yang berbeda-beda, namun komponen dan tujuan tetap sama. Setiap negara memiliki mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan bertujuan untuk pembentukan warga negara yang sesuai dengan ideologi dan mematuhi aturan yang telah ada.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan mata pelajaran wajib yang ditempuh oleh individu dari jenjang dasar sampai perguruan tinggi. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memuat nilai-nilai dasar seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial sebagai ideologi negara yang harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, negara, dan global dengan tujuan pembentukan individu yang baik sesuai dengan ideologi Pancasila. Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolah dasar dan menengah bertujuan untuk persiapan untuk pembentukan peserta didik agar dapat menjadi warga negara yang siap berkontribusi untuk bangsa dan negara. Proses pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di kelas harus menitikberatkan peserta didik berperan aktif pada pembelajaran.

#### **Keterampilan Berpikir Kritis.**

Menurut Zubaidah (2018) ada empat aspek keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik pada abad 21 yaitu keterampilan berpikir kritis (*critical thinking skill*), keterampilan berpikir kreatif (*creative thinking skill*), keterampilan berkomunikasi (*communication skill*), dan berkolaborasi (*collaboration skill*).

*Pertama*, keterampilan berpikir kritis (*critical thinking skill*) merupakan keterampilan dasar dalam pemecahan masalah. Peserta didik harus dapat menemukan sumber dari setiap masalah sampai peserta didik mampu memecahkan solusi. *Kedua*, keterampilan berpikir kreatif (*creative thinking skill*) merupakan keterampilan yang berhubungan dengan keterampilan tentang penemuan hal-hal baru. *Ketiga*, keterampilan berkomunikasi (*communication skill*) merupakan keterampilan yang berkaitan dengan cara individu dalam menyampaikan argumen secara lisan dan tertulis. Keterampilan berkomunikasi mencakup keterampilan mendengarkan, menulis, dan berbicara didepan umum. *Keempat*, berkolaborasi (*collaboration skill*) merupakan keterampilan yang berkaitan dengan bekerja sama secara efektif yang bertujuan untuk pembuatan keputusan untuk tujuan bersama. Jadi, keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap individu pada abad 21 yaitu keterampilan berpikir kritis, keterampilan berpikir kreatif, keterampilan berkomunikasi, dan keterampilan berkolaborasi.

Berpikir kritis adalah komponen dasar yang berkaitan dengan proses berpikir seperti percaya diri, perspektif kontekstual, kreativitas, fleksibilitas, rasa ingin tahu, integritas intelektual, intuisi, berpikiran terbuka, tekun, dan refleksi. Keterampilan berpikir kritis terdiri dari tiga komponen yaitu keterampilan penalaran secara kritis (proses penilaian yang benar), keterampilan disposisi terhadap sikap kritis (kemampuan pengajuan pertanyaan atau penyelidikan suatu permasalahan) dan orientasi moral yang mengarah pada pemikiran kritis dan mempraktekan pemikiran kritis dengan benar (Zhang, 2016). Indikator keterampilan berpikir kritis yaitu penganalisis argumen, tanya jawab, pengobservasi dan pertimbangan observasi, pembuat hasil deduksi, pembuat nilai keputusan dan pembuat keputusan tindakan, dan berinteraksi dengan orang lain (Fuadi, Hamdu, & Natalina, 2016). Adapun tujuan dari keterampilan berpikir kritis sebagai berikut. *Pertama*, diagnosis tingkat kemampuan berpikir kritis merupakan guru dapat memutuskan dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran. *Kedua*, umpan balik terhadap peserta didik tentang kemampuan berpikir kritis merupakan sarana untuk mendiagnosis kemampuan keterampilan berpikir kritis. *Ketiga*, memotivasi peserta didik untuk menjadi

pemikir kritis merupakan cara guru agar peserta didik dapat terbiasa untuk berpikir kritis. *Keempat*, masukan untuk guru tentang keberhasilan dalam pengajaran berpikir kritis kepada peserta didik merupakan sarana agar guru dapat memperbaiki strategi pembelajaran (Zubaidah, 2018). Faktor penghambat keterampilan berpikir kritis peserta didik sebagai berikut. *Pertama*, guru terlalu monoton menggunakan metode ceramah dalam proses pembelajaran. *Kedua*, guru memandang siswa kurang minat dalam mempraktekan kemampuan berpikir kritis. *Ketiga*, guru kurang memiliki kemampuan dasar dalam berpikir kritis yang terlepas dari latar belakang pendidikan seorang guru (Khalid, 2014). Keterampilan berpikir kritis bermula dari menganalisis argumen, tanya jawab, mengobservasi dan mempertimbangkan observasi, membuat hasil deduksi, membuat nilai keputusan, membuat keputusan tindakan dan berinteraksi.

Tujuan keterampilan berpikir kritis untuk melatih keterampilan kognitif dalam menganalisis, menerapkan standar, membedakan, mencari informasi, memberi alasan logis, memperkirakan, dan mengubah pengetahuan (Rubenfeld & Scheffer, 2007). *Pertama*, melatih keterampilan kognitif dalam menganalisis merupakan keterampilan tahap awal dalam berpikir kritis yang bertujuan untuk menganalisis dari setiap input yang diperoleh dan pengetahuan dasar yang dimiliki oleh peserta didik. *Kedua*, menerapkan standar merupakan keterampilan kognitif dalam berpikir kritis pada tahap kedua agar peserta didik memiliki standarisasi untuk melihat suatu permasalahan yang ada dengan pengetahuan dasar yang dimiliki. *Ketiga*, membedakan informasi merupakan keterampilan tahap ketiga dalam berpikir kritis yang bertujuan untuk membedakan setiap informasi yang diperoleh dan pencegahan penerimaan informasi. *Keempat*, mencari informasi merupakan keterampilan tahap keempat dalam berpikir kritis yang bertujuan untuk mencari informasi secara holistik dan melatih untuk berpikir terbuka. *Kelima*, memberi alasan logis merupakan keterampilan tahap kelima dalam berpikir kritis yang bertujuan untuk memberi alasan logis terhadap fenomena-fenomena yang berkembang. *Keenam* memperkirakan pengetahuan merupakan keterampilan tahap keenam dalam berpikir kritis yang bertujuan untuk cara memperkirakan/menghipotesis kenyataan yang ada dengan pengetahuan yang

dimiliki, sehingga memperkirakan dijadikan sebagai hipotesis. *Ketujuh*, mengubah pengetahuan merupakan keterampilan kognitif dalam berpikir kritis pada tahap ketujuh agar peserta didik memiliki sikap secara tepat terkait pengetahuan yang dimiliki dengan kenyataan yang ada. Proses berpikir setiap individu harus runtun agar dapat terbiasa untuk berpikir kritis. Ketika ada suatu permasalahan, keterampilan berpikir kritis berperan penting untuk menemukan solusi yang tepat pada permasalahan yang ada. Berpikir kritis harus didahului dengan berpikir secara runtun yang bertujuan untuk memecahkan masalah.

Keterampilan berpikir kritis merupakan keterampilan yang termasuk dalam pengembangan pengetahuan setiap individu. Keterampilan berpikir kritis melatih setiap individu untuk memecahkan masalah yang ada di lingkungan sekitar. Keterampilan berpikir kritis terdiri dari menganalisis, menerapkan standar, membedakan, mencari informasi, memberi alasan logis, memperkirakan pengetahuan, dan mengubah pengetahuan. Keterampilan berpikir kritis harus perlu dikuatkan melalui mata pelajaran. Hal ini bertujuan untuk penguatan keterampilan berpikir kritis peserta didik.

### **Urgensi Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Penguatan Keterampilan Berpikir Kritis.**

Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dapat menguatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Substansi pendidikan kewarganegaraan yaitu mengeksplorasi tentang kehidupan berkelanjutan seorang warga negara, sikap empati dan toleransi, penguatan keterampilan berpikir kritis, komunikasi, dan pengetahuan tentang kehidupan di lingkungan sosial, budaya, dan politik (Matos & Pfeifer, 2020). Proses pembelajaran di kelas harus ada pengungkapan pendapat peserta didik dan kemampuan pemecahan masalah yang berpengaruh terhadap *civic knowledge* peserta didik (Alivernini & Mannganellii, 2011). Model pembelajaran yang dapat digunakan untuk penguatan keterampilan berpikir kritis peserta didik adalah model *blended learning* (Hasanah & Malik, 2020). Model pembelajaran ini dapat melatih keterampilan berpikir kritis peserta didik. Penguatan keterampilan berpikir kritis dapat dilihat dari hasil belajar peserta didik

melalui evaluasi yang dilakukan oleh guru kepada peserta didik (Harahap, Ristanto, & Komala, 2020).

Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan-kemampuan sebagai berikut. *Pertama*, peserta didik dapat memiliki kemampuan berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam isu-isu kewarganegaraan. *Kedua*, peserta didik dapat berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, bersikap anti korupsi bertindak secara cerdas di lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara. *Ketiga*, peserta didik dapat berkembang secara positif dan demokratis untuk pembentukan diri yang terdapat nilai-nilai karakter yang baik. *Keempat*, peserta didik dapat berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam konsep warga negara global baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (Wahab & Sapriya, 2011; 315).

Urgensi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam penguatan berpikir kritis peserta didik sangat penting. Hal ini bertujuan untuk penguatan berpikir kritis harus didukung dengan mata pelajaran yaitu mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Adapun urgensi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam penguatan keterampilan berpikir kritis sebagai berikut. *Pertama*, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran dasar yang bertujuan untuk pembentukan peserta didik yang memiliki komponen pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, dan karakter kewarganegaraan. *Kedua*, keterampilan berpikir kritis termasuk dalam keterampilan pengetahuan kewarganegaraan dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan (PPKn). *Ketiga*, penguatan keterampilan berpikir kritis melalui mata pelajaran PPKn dengan cara menerima informasi, mencari konsep, menganalisis, membedakan informasi, pengambilan sikap, dan menentukan solusi.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan pada kajian tentang urgensi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang telah dikaji, maka mata pelajaran pendidikan Pancasila begitu penting untuk penguatan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terdiri dari komponen kewarganegaraan yaitu pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, dan karakter kewarganegaraan. Adapun melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dapat mengaktualisasikan diri sebagai warga negara sebagai berikut. *Pertama*, peserta didik dapat memiliki kemampuan berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam isu-isu kewarganegaraan. *Kedua*, peserta didik dapat berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, bersikap anti korupsi bertindak secara cerdas di lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara. *Ketiga*, peserta didik dapat berkembang secara positif dan demokratis untuk pembentukan diri yang terdapat nilai-nilai karakter yang baik. *Keempat*, peserta didik dapat berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam konsep warga negara global baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Urgensi mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) sebagai berikut. *Pertama*, mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran dasar yang bertujuan untuk pembentukan peserta didik yang memiliki komponen pengetahuan kewarganegaraan, keterampilan kewarganegaraan, dan karakter kewarganegaraan. *Kedua*, keterampilan berpikir kritis termasuk dalam keterampilan pengetahuan kewarganegaraan dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). *Ketiga*, penguatan keterampilan berpikir kritis melalui mata pelajaran PPKn dengan cara menerima informasi, mencari konsep, menganalisis, membedakan informasi, pengambilan sikap, dan menentukan solusi.

## **REFERENSI**

Abrar, & Sundara, K. (2017). Peranan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam menanamkan sikap nasionalisme pada siswa di SMP Darul Hikmah

Mataram. *Civicus: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2), 40-47.

Alivernini, F., & Manganellii, S. (2011). Is there a relationship between openness in classroom discussion and student's knowledge in civic and citizenship education. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 15, 3441-3445. Doi: 10.1016/j.sbspro.2011.04.315.

Alsaleh, N. J. (2020). Teaching critical thinking skills: Literature review. *TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology*, 19(1), 21-39.

Baihaqi, M, I. (2017). Penerapan model pembelajaran berbasis masalah (*problem based learning*) untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis mata pelajaran pkn dengan materi sistem politik pada siswa kelas x semester 2 tahun pelajaran 2016/2017 di SMK Islam Solorejo Kabupaten Blitar. *Konstruktivisme*, 9(2), 217-227.

Balogum, I, N., & Yusuf, A. (2019). Teaching civic education to learners through best practices. *Anatolian Journal of Education*, 4(1), 39-48.

Bermudesz, A. (2015). Four tools for critical inquiry in history, social studies, and civic education. *Revista de Estudios Socialis*, (52), 102-118. Doi: 10.7440/res52. 2015.07.

Cogan, J. J. (1999). *Developing the civic society: the role of civic education*. Bandung: CISED.

Davies, I. (2020). Civic and citizenship education in volatile times. Preparing students for citizenship in the 21st century. *British Journal of Educational Studies*, 68(1), 1-3.

Erikson, M. G., & Erikson, M. (2018). Learning outcomes and critical thinking-good intentions in conflict. *Studies in Higher education*, 44(12), 1-11.

Fuadi, F, N., Hamdu, G., & Natalina, D. M. (2016). Analisis strategi pembelajaran guru dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa sekolah dasar. *Pedadidaktika*, 3(1), 65-73.

Harahap, L. J., Ristanto, R. H., Komala, R. (2020). Evoking 21st-century skills: developing instrument of critical thinking skills and mastery of ecosystem concepts. *Tadris: jurnal keguruan dan Ilmu Tarbiyah*, 5(1), 27-41.

Hasanah, H., & Malik, M. N. (2020). Blended learning in improving students' critical thinking and communication skills at University. *Cypriot journal of Educational Sciences*, 15(5), 1295-1306.

Kennedy, K. J. (2012). Global trends in civic and citizenship education: What are the lessons for nation states?. *Education Sciences*, 2(4), 121-135.

- Khalid, K. (2014). Islamic teachers' perceptions of improving critical thinking skills in Saudi Arabian elementary schools. *Journal of Education and Learning*, 3(4), 37-48.
- Liu, O. L., Shaw, A., Gu, L., et al. (2018). Assessing college critical thinking: preliminary results from the Chinese heightened critical thinking assessment. *Higher Education Research & Development*, 37(5), 999-1014.
- Matos, A. G., & Pfeifer, S. M. (2020). Art matters in languages and intercultural citizenship education. *Language and Intercultural Communication*, 20(4), 289-299.
- Mohseni, F., Seifoori, Z., & Ahangari, S. (2020). The impact of metacognitive strategy training and critical thinking awareness-raising on reading comprehension. *Cogent Education*, 7(1), 1-22. DOI: <https://doi.org/10.1080/2331186X.2020.1720946>.
- Nurdin, E. S. (2015). The policies on civic education in developing national character in Indonesia. *Canadian Center of Science and Education*, 8(8), 199-207.
- Palavan, & Özcan. (2020). The effect of critical thinking education on the critical thinking skills and the critical thinking dispositions of preservice teachers. *Educational Research and Reviews*, 15(10), 606-627.
- Pertiwi, A. A., & Rizal, F. (2020). Pengaruh model pembelajaran problem based instruction berbasis collaboration, communication, creativity and critical thinking terhadap hasil belajar rangkaian elektronika. *INVOTEK*, 20(1), 61-68.
- Reichert, F., & Purta, T. (2019). A cross-national comparison of teachers' beliefs about the aims of civic education in 12 countries: a person-centered analysis. *Teaching and Teacher Education*, 77: 112-125. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2018.09.005>.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang No 20, Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional*
- Rubinfeld, M. G., & Scheffer, B. K. (2007). *Berpikir kritis dalam keperawatan*. Jakarta: EGC
- Rusman. (2016). *Model-model pembelajaran*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sunarso, Dwikusrahmadi, S., & Sutarini, Y. C. N. (2008). *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: UNY Press.
- Swalwell, K., & Payne, K. A. (2019). Critical civic education for young children. *Multicultural Perspectives*, 21(2), 127-132.

- Tarunasena. (2012). Blended learning model implementation to improve critical thinking in history learning. *HISTORIA: International Journal of History Education*, 13(2), 153-176.
- Terblanche, E. A. J., & Clercq, B. D. (2019). Factors to consider for effective critical thinking development in auditing students. *South African Journal of Accounting Research*, 34(2), 1-9.
- Tolak, T. (2018). Peneguhan masyarakat multikultural Indonesia meallauai aktualisasi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 21-30.
- Trisnowati, E., & Firmadani, F. (2020). Increasing critical thinking skills and communication skills in science: Blended learning project. *Indonesian Journal of Science and Education*, 4(2), 125-131.
- Veugelers, W. (Ed.). (2019). *Education for democratic intercultural citizenship (Vol. 15)*. Leiden: Brill Sense.
- Wahab, A. A., & Sapriya. (2011). *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganeagraan*. Bandung: Alfabeta.
- Yamanto, R., Budimansyah, D., & Bestari, P. (2014). Civic education role for devolved student awareness as a global citizen. *Jurnal Civicus*, 15(1), 23-31.
- Zhang, T. (2016). Why do Chinese postgraduates struggle with critical thinking? some clues from the higher education curriculum in China. *Journal of further and Higher Education*, 41(6), 1-15. Doi: 10.1080/0309877x.2016.1206857.
- Zubaidah, S. (2018). Mengenal 4C: learning and innovation skills untuk menghadapi era revolusi industri 4.0<sup>1</sup>. *Science Education National Conference*, 1-18. [https://www.researchgate.net/publication/332469989\\_mengenal\\_4c\\_learning\\_and\\_innovation\\_skills\\_untuk\\_menghadapi\\_era\\_revolusi\\_industri\\_40\\_1](https://www.researchgate.net/publication/332469989_mengenal_4c_learning_and_innovation_skills_untuk_menghadapi_era_revolusi_industri_40_1).

# **Prinsip-Prinsip Dasar Demokrasi Politik dan Ekonomi dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pengembangannya dalam Sistem Politik Indonesia**

**Awang Nakulanang**

[awangnakulanang.2017@student.uny.ac.id](mailto:awangnakulanang.2017@student.uny.ac.id)

## **Abstrak**

Penelitian ini membahas beberapa masalah: 1) Bagaimana Prinsip-Prinsip Dasar Demokrasi Politik dalam Undang-Undang Dasar 1945? 2) Bagaimana Prinsip-Prinsip Dasar Demokrasi Ekonomi dalam Undang-Undang Dasar 1945? 3) Bagaimana Pengembangan Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi dalam Sistem Politik Indonesia?. Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*), pengumpulan data dilakukan dengan menelaah jurnal ilmiah, buku, dokumen serta sumber data dan literatur lainnya yang dianggap berkaitan dengan kajian ini. Prinsip-prinsip dasar demokrasi politik dan ekonomi yang tertuang dalam Pembukaan dan Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan hasil dari perundingan pemikiran-pemikiran luar biasa pendiri bangsa Indonesia. Praktik berdemokrasi di Indonesia tidak hanya mengembangkan demokrasi barat saja, melainkan juga mengembangkan terhadap aspek-aspek demokrasi ekonomi agar menjadi sistem politik demokrasi yang mensejahterakan. Sistem politik demokrasi yang dianut bangsa Indonesia dikenal dengan Demokrasi Pancasila. Prinsip dasar demokrasi politik dan ekonomi tersebut dikembangkan dalam sistem politik Indonesia untuk mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945.

**Kata Kunci:** Demokrasi Politik; Demokrasi Ekonomi; UUD 1945.

## **PENDAHULUAN**

Bangsa Indonesia telah mendeklarasikan kemerdekaannya berpuluh-puluh tahun silam. Tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 para pendiri bangsa bersepakat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia yang bertahun-tahun dalam hegemoni penjajahan kolonial dan balatentara Jepang. Berada dalam cengkraman penjajahan bangsa lain merupakan mimpi buruk yang harus disudahi setiap negara. Sebab kemerdekaan merupakan hak segala bangsa tanpa terkecuali. Kemerdekaan yang diidam-idamkan bangsa Indonesia akhirnya terwujud yang ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta saat itu. Sebelum mendeklarrasikan kemerdekaannya kepada dunia, bangsa Indonesia telah mempersiapkan syarat-syarat untuk kemerdekaan Indonesia ke depan. Diantara syarat-syarat tersebut, naskah konstitusi Indonesia merdeka yakni Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan dokumen yang krusial bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara nantinya. Naskah UUD 1945 ini pertama kali dipersiapkan oleh suatu badan bentukan pemerintah balatentara Jepang yang

diberi nama *Dokuritzu Zyunnbi Tyoosakai* yang dalam bahasa Indonesia disebut “Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia” (BPUPKI) (Asshiddiqie, 2017: 32).

Hukum dasar (UUD 1945) yang disahkan tersebut berasal dari rancangan hukum dasar yang diajukan oleh panitia perancang hukum dasar yang diketuai oleh Soekarno (Syahuri, 2004: 113). Panitia ini kemudian membentuk Panitia Kecil yang diketuai oleh Prof. Dr. Soepomo, dengan anggota yang terdiri atas 7 orang anggota termasuk ketua (Asshiddiqie, 2017: 33). Pembahasan-pembahasan dalam persidangan BPUPKI tersebut salah satu agendanya adalah membahas rancangan hukum dasar untuk Indonesia merdeka. Dalam hukum dasar tersebutlah akan diletakkan aturan-aturan pokok bernegara termasuk sistem politik serta prinsip-prinsip dasar demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Indonesia memang memiliki ciri khas apabila dibandingkan dengan praktik demokrasi di negara-negara lain. Hal tersebut tentunya dipengaruhi oleh pandangan hidup yang dianut bangsa Indonesia yakni Ideologi Pancasila. Selain sebagai ideologi dan pandangan hidup, Pancasila juga dipilih bangsa Indonesia untuk konsep sistem politik demokrasinya yang diberi nama Demokrasi Pancasila. Sebab demokrasi merupakan sesuatu yang penting, karena nilai-nilai yang dikandungnya sangat diperlukan sebagai acuan untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik (Cholisin, 2016: 19). Keberadaan prinsip-prinsip dasar demokrasi ini harus ditata sedemikian rupa agar bangsa Indonesia mempunyai alat yang dapat digunakan untuk dasar penyelenggaraan dan pengembangannya dalam sistem politik Indonesia.

Agar pelaksanaan praktik berdemokrasi bangsa Indonesia tidak menyimpang terhadap prinsip-prinsip dasar yang dituangkan dalam UUD 1945, serta selaras terhadap pengembangannya dalam sistem politik Indonesia, maka warga negara perlu dicerdaskan pemahamannya terhadap permasalahan tersebut. Berdasarkan alasan-alasan yang telah dipaparkan di atas, penulis bermaksud membuat tulisan ilmiah yang berjudul Prinsip-Prinsip Dasar Demokrasi Politik dan Ekonomi dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pengembangannya dalam Sistem Politik Indonesia. Penulisan ini menjelaskan secara lengkap aspek-aspek

serta prinsip-prinsip demokrasi secara lengkap baik demokrasi politik maupun ekonomi dalam bingkai Demokrasi Pancasila. Selain sebagai wahana memperluas wawasan pengetahuan, hal ini sebagai wujud kehidupan berdemokrasi yang kritis dan analitis yang juga harus dikembangkan oleh setiap warga negara.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam mengerjakan jurnal ini adalah studi pustaka. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada (Sugiyono, 2005: 83). Dapat dikatakan bahwa studi pustaka dapat memengaruhi kredibilitas hasil penelitian yang dilakukan. Dalam mencari data yang mendukung penulisan jurnal ini kami menggunakan metode studi pustaka dengan mengumpulkan data data yang relevan terhadap topik dengan mempelajari buku-buku, jurnal ilmiah, informasi yang terkait dengan topik penulisan kali ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Prinsip-Prinsip Dasar Demokrasi Politik dalam UUD 1945**

#### **1. Konsep Demokrasi Politik**

Konsep demokrasi semula lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum di Yunani Kuno dan dipraktikkan dalam hidup bernegara antara abad ke empat sebelum masehi sampai abad ke enam masehi (Mahfud, 1993: 20). Kata demokrasi atau *democracy* dalam bahasa Inggris diadaptasi dari kata *democratie* dalam bahasa Perancis pada abad ke enam belas. Namun, asal kata sebenarnya berasal dari bahasa Yunani *demokratia*, yang diambil dari kata *demos* berarti rakyat, *kratos/kratein* berarti kekuasaan/berkuasa (memerintah) (Huda, 2017: 200). Demokrasi dipahami sebagai salah satu bentuk pemerintahan yang berakar pada klasifikasi Aristoteles yang di buat berdasarkan jumlah dan sifat pemegang kekuasaan negara. Demokrasi merupakan sesuatu yang penting, karena nilai-nilai yang dikandungnya sangat

diperlukan sebagai acuan untuk menata kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik (Cholisin, 2016: 19).

Hogerwerf (Cholisin, 2016: 22) mengutarakan bahwa sejak istilah demokrasi dibentuk dalam abad ke lima sebelum masehi, sampai sekitar abad yang lalu, demokrasi digunakan sebagai suatu gagasan politik. Di samping itu, Schumpeter (Cholisin, 2016: 22) juga menjelaskan bahwa sistem demokrasi ini pada dasarnya ialah mencapai suatu keputusan hal kepraajaan (*political decision*), dengan memilih suatu badan perwakilan rakyat (*through the election*) agar dengan jalan ini masyarakat (*ensemble*) menentukan kehendak rakyat. Dalam konteks kehendak rakyat ini di Indonesia selalu dikaitkan dengan konsep kedulatan yang dianutnya. Konsep tersebut dituangkan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (pra amandemen).

Schumpeter (Sorenson, 2003; Habib, 1997: 22) mengartikan demokrasi sebagai kompetisi memperoleh dukungan rakyat. Pengertian pada esensi itu merupakan pengertian “minimalis” dan disebut “demokrasi elektoral” atau “demokrasi formal”. Demokrasi merupakan sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik. Selain itu, UNESCO dalam Miriam Budiardjo (2015: 105) mengemukakan bahwa mungkin pertama kali dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh. Dalam perkembangannya, demokrasi sebagai pemerintahan oleh rakyat secara sepenuhnya hanya mungkin terjadi pada negara yang wilayahnya sangat kecil, seperti negara kota (*polis*) pada masa Yunani Kuno (Gaffar, 2013: 1). Moh. Mahfud MD (Gaffar, 2013:25) menyatakan bahwa demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan keputusan dalam masalah-masalah pokok kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara, karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat.

## 2. Demokrasi Politik dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Baik sebelum ataupun sesudah perubahan UUD 1945, kehidupan bernegara bangsa Indonesia dikonsepsikan menganut paham kedaulatan rakyat. Hal tersebut dibuktikan dengan dinormakannya ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang bunyinya “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”. Sebelum dilakukannya perubahan terhadap konstitusi tersebut Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 juga menegaskan bahwa “*Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat*”. Kedua rumusan tersebut pada hakikatnya menegaskan bahwa paham kedaulatan yang dianut bangsa Indonesia adalah kedaulatan rakyat, hanya terdapat perbedaan dalam pelaksanaannya.

Perubahan ketentuan Pasal 1 ayat (2) itu dimaksudkan untuk mengoptimalkan dan meneguhkan paham kedaulatan rakyat yang dianut negara Indonesia karena pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak lagi dijalankan sepenuhnya oleh MPR, tetapi melalui cara-cara dan oleh berbagai lembaga yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (MPR RI, 2018: 65). Kata kedaulatan berasal dari kata *sovereignty* (bahasa Inggris). Terkait dengan demokrasi politik ini konsep demokrasilah yang memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia. Demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang kemudian dikenal dengan prinsip kedaulatan rakyat (Asshiddiqie, 2015: 200). Kedaulatan rakyat dimaksudkan kekuasaan rakyat sebagai tandingan atau imbalan terhadap kekuasaan penguasa tunggal atau yang berkuasa (Huda, 2017: 188).

Cita-cita kedaulatan rakyat (demokrasi) memiliki jangkar yang kuat dalam sejarah politik Indonesia. Setimulusnya bersumber dari tradisi musyawarah desa, semangat kesederajatan, persaudaraan, permusyawaratan Islam, gagasan emansipasi, dan sosial-demokrasi Barat. Semangatnya dikobarkan oleh kehendak untuk membebaskan diri dari represi politik dan ekonomi kolonialisme-kapitalisme (Latif, 2017: 486).

Prinsip-prinsip demokrasi dalam suatu negara hendaknya mengembangkan persamaan dan kebebasan atau kemerdekaan. Kedua prinsip tersebut antara lain juga dijamin dalam UUD 1945 dan UUD NRI Tahun 1945 (pasca amandemen). Prinsip persamaan antara lain adalah persamaan politik, di muka hukum, kesempatan, ekonomi, dan sosial atau hak (Cholisin, 2016: 25). Dalam UUD 1945 (baik pra amandemen maupun pasca amandemen) Pasal 27 ayat (1) menegaskan prinsip persamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan. Di samping itu, persamaan dalam bidang ekonomi antara lain adalah dijaminnya hak dasar kehidupan seperti jaminan Pasal 28H UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan*”. Selain prinsip persamaan, dalam negara demokratis harus dikembangkan prinsip kebebasan. Prinsip-prinsip tersebut dijamin dalam UUD 1945. Prinsip kebebasan dalam UUD 1945 diatur dalam Pasal 28 “*kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang*”, sedangkan pasca amandemen kebebasan tersebut tetap dipertahankan rumusannya. Namun, pasca amandemen ditambah dalam Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan “*Setiap Orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat*”. Diantara dua prinsip tersebut terdapat satu syarat untuk dapat ditegakkannya demokrasi dalam suatu negara. Toleransi sebagai unsur utama. Toleransi itu merupakan inti yang mendasar dari demokrasi. Toleransi harus ditegakkan atau demokrasi tidak dapat bekerja (Cholisin, 2016: 27-28).

Pelaksanaan kedaulatan rakyat secara implisit diatur juga prinsip-prinsipnya dalam UUD 1945. Pasca amandemen pelaksanaan kedaulatan rakyat salah satunya adalah diselenggarakannya pemilihan umum. Ketentuan Pasal 22E mengatur prinsip-prinsip pemilihan umum berikut peserta dan penyelenggaraanya. Demokrasi politik dalam UUD 1945 dapat disimpulkan diatur sendi-sendi dasarnya, oleh karena itu pelaksanaan yang sesuai

seharusnya dapat berjalan dengan baik, dimana seluruh prinsip-prinsip tersebut dipenuhi tanpa terkecuali.

### **Prinsip-Prinsip Dasar Demokrasi Ekonomi dalam UUD 1945**

#### 1. Konsep Demokrasi Ekonomi.

Dalam negara Indonesia kehidupan berdemokrasi terdapat perbedaan gagasan dan konsep demokrasinya yang tidak hanya menganut demokrasi politik tetapi juga demokrasi sosial dan demokrasi ekonomi. Demokrasi ekonomi lah yang dekat kaitannya dengan kesejahteraan rakyat. Maka, dalam demokrasi juga dikenal persamaan dalam bidang ekonomi, persamaan ini dapat berarti setiap individu dalam suatu masyarakat harus memiliki tingkat pendapatan yang sama (Cholisin, 2012: 86).

Demokrasi ekonomi, merupakan suatu demokrasi yang tujuan kebijaksanaan primernya ialah pembagian kembali kekayaan dan perataan kesempatan ekonomi. Dalam artian mengandaikan demokrasi politik sebagai umpan balik terakhir suatu bentuk demokrasi pemerintahan (Cholisin, 2016: 31). Konsep demokrasi ekonomi mulai hangat dibahas dan diperbincangkan setelah Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) menyusun konsep Demokrasi Ekonomi pada tahun 1990. Konsep demokrasi ekonomi yang diformulasikan ISEI secara garis besar terdiri atas dua bagian yaitu (1) penjabaran demokrasi ekonomi sebagai dasar sistem ekonomi nasional, dan (2) penjabaran demokrasi ekonomi dalam format program-program pelaksanaannya (Abas & Manan, 2005: 431).

Sistem Ekonomi Indonesia merupakan sistem ekonomi campuran (*mixed economy*) yang memiliki unsur-unsur sistem ekonomi kapitalistik (mekanisme pasar) dan unsur-unsur sistem ekonomi terpusat (pengaturan oleh negara). Sebagai sistem ekonomi campuran, sistem ekonomi nasional berada di kisaran mekanisme pasar dan kontrol oleh negara sebagai stabilisator, dinamisator dan regulator. Sistem ekonomi nasional disamping ditafsirkan sebagai Sistem Ekonomi Campuran juga ditafsirkan sebagai Sistem Ekonomi Pancasila. Mubyarto menggali landasan filosofis dari sistem ekonomi nasional dan kemudian menyimpulkan bahwa, Sistem Ekonomi Indonesia adalah

sistem ekonomi yang berdasarkan Pancasila sebagai landasan filosofisnya. Selanjutnya Mubyarto menamakan sistem ekonomi nasional dengan sebutan Sistem Ekonomi Pancasila (Abas & Manan, 2005: 434).

Jauh sebelum Mubyarto, Bersama Hatta, Soekarno pernah menyatakan penolakannya pada demokrasi liberal (pluralisme) seperti yang hidup di Eropa Barat. Hal ini terlihat dari pernyataan mereka tentang demokrasi dalam bidang sosial dan ekonomi. Menurut keduanya, demokrasi liberal seperti di Eropa Barat hanyalah demokrasi politik yang dibidang sosial dan ekonomi merugikan rakyat (Mahfud, 1993: 35). Mohammad Hatta sendiri memang melihat bahwa demokrasi ekonomi ini harus diwujudkan karena dengan adanya demokrasi ekonomi barulah dapat dijamin adanya keadilan sosial yang menjadi tiang kelima dari pada Negara Republik Indonesia. Keadilan sosial menghendaki kemakmuran yang merata ke seluruh rakyat, yang melaksanakan cita-cita kemerdekaan yang keempat dari almarhum Roosevelt: "*freedom from want* yaitu bebas dari kesengsaraan hidup (Nasrullah, 2016: 24).

## 2. Demokrasi Ekonomi dalam UUD 1945

Sejarah perumusan dari Pasal 33 UUD 1945 yang tercatat secara sederhana sampai saat ini adalah bahwa BPUPKI di dalam rapatnya tanggal 11 Juli 1945, membentuk tiga panitia yang salah satunya disebut Panitia Keuangan dan Perekonomian. Mengenai keanggotaan dari panitia ini antara lain ialah Surachman, Margino, Sutarjo, Surjo Atmodjo, Dewantara, Kusuma Atmodjo, Oei Tiong Hauw, Asikin, Yamin, Baswedan, Abdul Fatah Hasan, Oei Tiang Tjoei, Suwandi, serta Tokojami Kakka yang berasal dari Pemerintahan Jepang. Panitia Keuangan dan Perekonomian itu diketuai oleh Moh. Hatta. Akan tetapi apa dan bagaimana jalannya rapat panitia itu tidaklah ada dokumentasinya yang lengkap, yang jelas pada tanggal 13 Juli 1945 (2 hari setelah terbentuknya panitia itu) Mr. Soepomo memberikan laporan mengenai Rancangan Undang-Undang Dasar, dan salah satu pasalnya yakni yang diajukan adalah Pasal 32 memuat rumusan yang menjadi Pasal 33 UUD 1945 saat ini (Hermanto, 2018: 17-18).

Ketentuan mengenai prinsip-prinsip demokrasi ekonomi di Indonesia ditemukan dalam pasal-pasal undang-undang dasar. Pasal 33 UUD 1945 (pra amanden dan pasca amandemen) menjadi pijakan melaksanakan perekonomian nasional yang berdasar demokrasi ekonomi Pancasila. Sebelum dilakukan perubahan, ketentuan Pasal 33 UUD 1945 berbunyi (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Setelah dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945, ketentuan Pasal 33 ditambah dua ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5). Ayat-ayat tersebut sifatnya melengkapi prinsip demokrasi ekonomi dalam perekonomian nasional. Pasal 33 ayat (4) menyatakan bahwa “*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.*”

Adanya ketentuan baru dalam Pasal 33 ini terutama dimaksudkan untuk melengkapi “asas kekeluargaan” yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (1) dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (MPR RI, 2018: 197).

Namun, harus diingat kembali bahwa sistem perekonomian Indonesia bukan sistem kapitalisme, tetapi demokrasi ekonomi dan ekonomi pasar sosial demi mencapai kesejahteraan rakyat. Maka negara juga dapat melakukan pengaturan dan atau pembatasan tertentu sebagai pelaksanaan konsep *welfare state* dan sistem perekonomian nasional berdasarkan UUD 1945 (Asshiddiqie, 2015: 136). Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 merupakan dasar demokrasi ekonomi yang membedakan sistem perekonomian nasional dengan sistem kapitalisme liberal maupun sistem etatisme (Asshiddiqie, 2015: 137). Karena itu, pelaksanaan Pasal 33 UUD harus tetap berjalan, agar tidak banyak kerugian

dan kerusakan yang kita alami, ketika kita meninggalkan prinsip-prinsip ekonomi yang telah diletakkan oleh para pendiri negara. Kepentingan nasional harus diletakkan di atas kepentingan neoliberalisme dan kapitalisme asing agar sejarah demokrasi ekonomi kita tidak berakhir hanya karena pengaruh asing (Narullah, 2016: 28).

Demokrasi Ekonomi yang ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 (setelah amandemen) tersebut dilaksanakan dengan prinsip ke-bersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Hanya sangat disayangkan bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak memberikan pengertian tentang maksud prinsip-prinsip tersebut. Ketentuan ayat (5) menegaskan bahwa, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal ini diatur dalam undang-undang. Hal ini bisa saja menimbulkan arti yang berbeda-beda (persepsi), khususnya menyangkut pengertian prinsip-prinsip tersebut (Narullah, 2016: 26).

Ketentuan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 juga mengundang tafsir yang beragam mengenai pengertian “dikuasai oleh negara”. Seorang pakar Hukum Tata Negara Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa konsepsi penguasaan oleh negara yang merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, baik dibidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Dalam paham kedaulatan rakyat, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik, dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara. Dalam pengertian kekuasaan tertinggi tersebut, tercakup pula pengertian kepemilikan publik oleh rakyat secara kolektif (Asshiddiqie, 2015: 140).

Perkataan “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-

sumber kekayaan. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat berupa wewenang kepada negara sebagai pemegang kedaulatan rakyat untuk (i) membuat kebijakan, (ii) tindakan pengurusan, (iii) pengaturan, (iv) pengelolaan, dan (v) pengawasan. Di samping itu perlu dipahami bahwa ketentuan Pasal 33 UUD 1945 tidaklah menolak privatisasi, sepanjang privatisasi itu tidak meniadakan penguasaan negara untuk menjadi penentu utama kebijakan usaha dalam cabang produksi yang penting bagi negara yaitu menguasai hajat hidup orang banyak (Assiddiqie, 2015: 140-142).

### **Pengembangan Demokrasi Politik dan Demokrasi Ekonomi dalam Sistem Politik Indonesia**

Praktik berdemokrasi di negara-negara dunia harus diakui terdapat perbedaan-perbedaan terhadap konsep yang dianut. Perbedaan-perbedaan tersebut tidak mengurangi prinsip-prinsip demokrasi yang dianutnya, dengan kata lain apapun jenis demokrasi yang dianut oleh suatu negara maka negara tersebut tetap disebut sebagai negara demokrasi. Di Indonesia terdapat ciri khas terhadap konsep demokrasi yang dianutnya, bangsa Indonesia tidak secara spesifik menganut demokrasi liberal dan demokrasi komunis sosialis, namun demokrasi Pancasila dipilih sebagai jalan tengah untuk mewujudkan negara demokratis Indonesia. Demokrasi Pancasila ini kemudian dikembangkan dalam sistem politik Indonesia menurut UUD 1945.

Membahas sistem politik Indonesia, Maksudi dan Beddy Irawan menjelaskan hasil analisisnya terhadap pemikiran Easton, bahwa sistem politik terdiri dari sejumlah lembaga-lembaga dan aktivitas politik dalam masyarakat yang berfungsi mengubah tuntutan-tuntutan (*demands*), dukungan-dukungan (*supports*), dan sumber-sumber (*resources*) menjadi keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan yang bersifat otoritatif dan mengikat bagi seluruh anggota masyarakat. Dengan formulasi lain, sistem politik terdiri atas beberapa komponen. Pertama, subsistem masukan (*inputs*), yang terdiri dari tuntutan-tuntutan, dukungan-dukungan, dan sumber-sumber. Kedua, subsistem proses (*input*), yang mencakup proses mengubah masukan menjadi keluaran, atau juga proses konversi

atau kotak hitam. Ketiga, subsistem keluaran (*output*), yakni hasil atau produk dari proses konversi yang berupa keputusan atau kebijakan. Keempat, subsistem lingkungan (*environment*), yaitu faktor-faktor dari luar yang mempengaruhi sistem politik seperti sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, keamanan, geografis, dan seterusnya. Kelima, subsistem umpan balik (*feedback*), yaitu dampak dari pelaksanaan keputusan atau kebijakan, baik yang positif ataupun negatif, yang dapat dimanfaatkan oleh sebuah sistem politik (Komara, 2015: 120).

Pengalaman selama masa orde lama dan orde baru cukup memberikan kesan yang mendalam dalam sistem politik Indonesia. Peran elit yang terlalu dominan membuat masyarakat tidak berdaya untuk membangun dirinya dan terlibat dalam menciptakan sistem politik yang stabil, malah sebaliknya timbul beberapa persoalan yang tidak terselesaikan. Masyarakat atau rakyat merupakan penentu berjalannya suatu sistem politik, karena masyarakat dianggap sebagai subjek dan objek dari sistem politik yang ada (Komara, 2015: 122). Masyarakat Indonesia yang merupakan penentu berjalannya suatu sistem politik pasca reformasi hak konstitusionalnya lebih dijamin. Bukan saja masyarakat, Politik juga dijamin secara implisit dalam pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945.

Suprastruktur Politik Indonesia adalah lembaga-lembaga tinggi pemerintahan, jadi ketika infrastruktur politik seperti partai politik memenangkan pemilihan umum maka dia akan masuk ke dalam kelompok suprastruktur politik, seperti legislatif atau eksekutif seperti presiden dan lain-lain (Syafie, 2010: 311). Dalam sistem politik Indonesia menurut UUD 1945 sebelum perubahan sudah terdapat beberapa lembaga yang termasuk dalam pengertian suprastruktur politik. Pasca amandemen UUD 1945 terdapat lembaga yang dihapus namun muncul beberapa lembaga sebagai anak kandung reformasi. Termasuk dalam suprastruktur politik menurut Undang-Undang Dasar 1945 antara lain, Majelis Permusyawaratan Rakyat (Pasal 2 UUD NRI Tahun 1945), Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 4 UUD NRI Tahun 1945), Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 19 UUD NRI Tahun 1945), Dewan Perwakilan Daerah (Pasal 22C UUD NRI Tahun 1945), Badan Pemeriksa Keuangan (Pasal 23E UUD NRI Tahun 1945), dan

Kekuasaan Kehakiman (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi) Pasal 24 UUD NRI Tahun 1945.

Apabila menganalisis sistem politik Indonesia yang berdasarkan pada Demokrasi Pancasila, seperti pandangan Notonagoro (dalam Cholisin dan Nasiwan, 2012: 103) ahli terkemuka filsafat Pancasila. Notonagoro mengemukakan demokrasi Pancasila adalah Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkepribadian sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dardji Darmodihardjo mempunyai pendapat lain bahwa demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber kepada kepribadian dan falsafah hidup bangsa Indonesia, yang perwujudannya seperti dalam ketentuan-ketentuan pembukaan UUD 1945.

Menganalisis kedua pengertian ahli tersebut penulis hendak memberi simpulan bahwa demokrasi Indonesia menganut demokrasi Perwakilan. Prinsip demokrasi Perwakilan dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 dimana aspirasi-aspirasi rakyat diwakilkan oleh anggota dewan yang dipilih melalui pemilihan umum secara langsung. Perwakilan rakyat tersebutlah yang duduk dalam salah satu suprastruktur politik yakni Dewan Perwakilan Rakyat. Di dalam dewan inilah aspirasi rakyat akan diolah dan disuarakan.

Subsistem lain dalam sistem politik Indonesia yakni Infrastruktur politik. Pengertian Infrastruktur Politik secara singkat infrastruktur memang diartikan sebagai pembangunan, namun dalam dunia politik makna ini diartikan sebagai suatu lembaga pada masyarakat tertentu di suatu negara yang terdiri atas lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau organisasi masyarakat (Ormas), partai politik, media massa, *interest group*, tokoh politik dan lain-lain yang bergerak secara independen. Adapun pengertian dari infrastruktur politik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang dalam aktivitasnya dapat mempengaruhi, baik langsung atau tidak langsung lembaga-lembaga negara dalam menjalankan fungsi serta kekuasaannya masing-masing.

Keberadaan infrastruktur politik berkembang pesat pasca reformasi. Jaminan kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat dengan lisan dan tulisan UUD NRI Tahun 1945 menjadi payung hukum bagi terbentuknya berbagai organisasi kemasyarakatan dan partai politik. Salah satu infrastruktur politik yang memegang peranan sentral dalam suatu sistem politik adalah partai politik disamping kelompok kepentingan dan kelompok penekan. Jauh sebelum proklamasi kemerdekaan, masalah yang menyangkut partai serta kehidupannya sudah menjadi salah satu pembicaraan utama dikalangan para politisi Indonesia (Sanit, 2015: 19). Ciri utama partai politik yang membedakan dengan kelompok penekan ada pada tujuan yang hendak diraih. Kelompok kepentingan adalah setiap organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijakan pemerintah, tanpa pada waktu yang sama, berkehendak memperoleh jabatan publik. Sebaliknya partai politik benar-benar bertujuan untuk menguasai jabatan publik, yaitu jabatan politik maupun pemerintahan, walaupun mungkin dalam beberapa hal partai revolusioner bertujuan untuk pembentukan jabatan publik baru (Cholisin, 2012: 122-123).

Dilihat dari konteks UUD NRI Tahun 1945, keberadaan partai politik sangatlah sentral dalam mengisi jabatan-jabatan politik tanah air. Prinsip tersebut antara lain ditunjukkan oleh Pasal 6A dan Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945. Artinya, apabila dilihat dari sudut pandang aturan konstitusional, maka pengembangan sistem politik Indonesia sebenarnya telah dijamin oleh UUD 1945 baik sebelum maupun sesudah perubahan. Oleh karena itu, keberadaan suprastruktur dan infrastruktur politik menjadi sangat penting atau elemen pokok pengembangan sistem politik Indonesia.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan keputusan dalam masalah-masalah pokok kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara, karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Baik sebelum

ataupun sesudah perubahan UUD 1945, kehidupan bernegara bangsa Indonesia dikonsepsikan menganut paham kedaulatan rakyat. Hal tersebut dibuktikan dengan dinormakannya ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang bunyinya *“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”*. Sebelum dilakukannya perubahan terhadap konstitusi tersebut Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 juga menegaskan bahwa *“Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”*. Kedua rumusan tersebut pada hakikatnya menegaskan bahwa paham kedaulatan yang dianut bangsa Indonesia adalah kedaulatan rakyat, hanya terdapat perbedaan dalam pelaksanaannya.

Ketentuan mengenai prinsip-prinsip demokrasi ekonomi di Indonesia ditemukan dalam pasal-pasal undang-undang dasar. Pasal 33 UUD 1945 (pra amanden dan pasca amandemen) menjadi pijakan melaksanakan perekonomian nasional yang berdasar demokrasi ekonomi Pancasila. Sebelum dilakukan perubahan, ketentuan Pasal 33 UUD 1945 berbunyi (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Setelah dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945, ketentuan Pasal 33 ditambah dua ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5). Ayat-ayat tersebut sifatnya melengkapi prinsip demokrasi ekonomi dalam perekonomian nasional. Pasal 33 ayat (4) menyatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Serta kedua demokrasi tersebut (politik dan ekonomi) dikembangkan dalam sistem politik Indonesia dengan penyempurnaan-penyempurnaan di dalamnya agar benar-benar terwujud sistem politik Demokrasi Pancasila yang demokratis.

## REFERENSI

- Asshiddiqie, J. (2015). *Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Budiardjo, M. (2015). *Dasar-dasar ilmu politik edisi revisi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Cholisin. (2016). *Ilmu kewarganegaraan*. Yogyakarta: Ombak.
- Cholisin., & Nasiwan. (2012). *Dasar-dasar ilmu politik*. Yogyakarta: Ombak.
- Gaffar, J. M. (2013). *Demokrasi dan pemilu di Indonesia*. Jakarta: KONPRESS.
- Latif, Y. (2017). *Negara Paripurna*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mahfud, M. D. (1993). *Demokrasi dan konstitusi di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- MPR RI. (2018). *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Risnawan, W. (2017). Peran dan fungsi infrastruktur politik dalam pembentukan kebijakan publik. *Jurnal Unigal*.
- Syafiie, I. K. (2010). *Ilmu politik edisi revisi*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sanit, A. (2015). *Sistem politik Indonesia: Kestabilan, peta kekuatan politik, dan pembangunan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

## **Inovasi Media Pembelajaran Berbasis Komik dalam Menanamkan Nilai-Nilai Pancasila**

**Awang Nakulanang, Elly Nur Rahmawati, dan Muhammad Abdul Aziz**  
[awangnakulanang.2017@student.uny.ac.id](mailto:awangnakulanang.2017@student.uny.ac.id)  
[elly.nur2016@student.uny.ac.id](mailto:elly.nur2016@student.uny.ac.id)  
[muhhammad.abdul2016@student.uny.ac.id](mailto:muhhammad.abdul2016@student.uny.ac.id)

### **Abstrak**

Realitas persatuan saat ini berbeda dengan apa yang dirumuskan oleh *founding fathers* Indonesia. Saat ini masyarakat Indonesia sudah mulai terkotak-kotak pada identitas masing-masing golongan atau kelompok. Lingkungan sekolah yang seharusnya menjadi tempat menimba ilmu dan menanamkan nilai Pancasila justru ditemukan institusi pendidikan yang mencederai hal itu, terdapat institusi pendidikan yang kurang memegang nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman. Perlunya sebuah media yang komunikatif dan dapat diterima oleh semua kelompok menjadikan pentingnya pengembangan sebuah media gambar untuk mengakomodasi ketertarikan peserta didik dalam rentang usia sekolah menengah pertama. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menciptakan media pembelajaran yang komunikatif dan informatif dalam media gambar yang berupa Komik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pengembangan (RnD) dengan pengembangan berupa 4-D. Penelitian ini berhasil menciptakan media pembelajaran berupa komik yang inovatif dan informatif serta memiliki kelayakan untuk digunakan dalam penanaman nilai-nilai Pancasila.

**Kata Kunci:** Pendidikan Pancasila; Media Pembelajaran; Komik.

### **PENDAHULUAN**

Tantangan dunia pendidikan saat ini adalah mewujudkan manusia Indonesia yang inklusif yakni mereka yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam setiap sendi kehidupan. Ditengah keragaman Indonesia yang merupakan negara dengan tingkat keragaman yang sangat tinggi. Keragaman itu tersebar dengan indah di seluruh bumi pertiwi ini. Keberagaman Indonesia terlihat dari suku, ras, ataupun agamanya. Keberagaman agama di Indonesia menjadi kebanggaan beberapa tahun belakangan karena terdapat 6 agama yang secara resmi diakui keberadaannya di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Konghuchu yang hidup berdampingan dengan damai. Keberagaman itu perlu dirawat, sebab nilai-nilai persatuan dalam falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila menempatkan persatuan sebagai salah satu *grundnorm* atau norma dasar bangsa Indonesia.

Realitas persatuan saat ini berbeda dengan apa yang dirumuskan oleh *founding fathers* Indonesia. Saat ini masyarakat Indonesia sudah mulai terkotak-kotak pada identitas masing-masing golongan atau kelompok. Ditengah

keragaman Indonesia yang sangat beragam sekarang ini justru muncul sebuah kelompok eksklusif. Kelompok eksklusif yakni sebuah kelompok yang memiliki resistensi tinggi terhadap kelompok lain diluar kelompok mereka. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari mereka cenderung bersosialisasi hanya dengan kelompok mereka. Memudarnya nilai-nilai Pancasila dalam diri masyarakat terutama generasi mudanya memudahkan paham serta perilaku yang tidak sesuai dengan ideologi bangsa menjadi membudaya dan berkembang dengan menargetkan masyarakat pada usia muda. Lingkungan sekolah yang seharusnya menjadi tempat menimba ilmu dan menanamkan nilai Pancasila justru ditemukan institusi pendidikan yang mencederai hal itu, terdapat institusi pendidikan yang kurang memegang nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman.

Data BBC (Lestari, 2016) menyebutkan 25% siswa dan 21% guru menyatakan Pancasila tidak relevan lagi. Sementara 84,8% siswa dan 76,2% guru setuju dengan penerapan Syariat Islam di Indonesia. Jumlah yang menyatakan setuju dengan kekerasan untuk solidaritas agama mencapai 52,3% siswa dan 14,2% membenarkan serangan bom. Data tersebut sangat mengkhawatirkan terhadap eksistensi Pancasila dalam kehidupan masyarakat karena generasi penerus bangsa yang masih berada dalam bangku pendidikan sudah meragukan kerelevanan Pancasila sebagai landasan filosofis mereka. Peran guru dalam menginteralisasikan nilai-nilai Pancasila perlu dipertanyakan karena angka tersebut sudah terlampau tinggi dan mengancam nilai-nilai Pancasila yang sudah menjadi dasar negara Indonesia sejak dahulu.

Perlunya sebuah media yang komunikatif dan dapat diterima oleh semua kelompok menjadikan pentingnya pengembangan sebuah media gambar untuk mengakomodasi ketertarikan peserta didik dalam rentang usia sekolah menengah pertama. Oleh karena itu peneliti berinovasi untuk membuat media pembelajaran berbasis pada komik. Pemilihan media pembelajaran berbasis komik ini didasarkan kepada beberapa penelitian terdahulu yang mengungkapkan bahwa komik memiliki tingkat efektifitas tinggi dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu antusiasme peserta didik dalam membaca media komik sangat tinggi sehingga hal tersebut dapat memotivasi peserta didik untuk belajar (Hidayah, dkk., 2017: 45).

Komik menurut Daryanto (2013: 127) didefinisikan sebagai bentuk kartun yang mengungkapkan karakter dan menerapkan suatu cerita dalam urutan yang erat hubungannya dengan gambar dan dirancang untuk memberikan hiburan kepada pembaca. Pada awalnya komik diciptakan bukan untuk kegiatan pembelajaran, namun untuk kepentingan hiburan semata.

KOMPAS atau Komik Pancasila menjadi media yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila terhadap peserta didik dan dapat diterima oleh semua kelompok peserta didik sekolah menengah pertama. Penanaman Pancasila melalui alam bawah sadar lebih efektif daripada melalui indoktrinasi karena peluang resistensi dari peserta didik jauh lebih rendah. Media ini juga merupakan sebuah upaya preventif yang nyata untuk menekan paham-paham yang kurang selaras dengan falsafah bangsa Indonesia yakni Pancasila.

## **METODE**

Penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian pengembangan (*research and development*), yang berdasarkan model 4-D. Model ini terdiri dari 4 tahap pengembangan yaitu *define, design, develop, dan disseminate* (Thiagarajan, dkk. 1974) atau diadaptasikan menjadi model 4-P, yaitu pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan penyebaran (Rusdi, 2008). Perangkat yang dikembangkan berdasarkan model 4-D ini adalah sebuah Komik Pancasila (KOMPAS). Hasil dari pengembangan perangkat pembelajaran disampaikan secara deskriptif. Subjek penelitian yaitu siswa kelas VIII B SMP Negeri 1 Imogiri. Ujicoba dilakukan untuk mendapatkan respon siswa terhadap Komik Pancasila. Data yang terkumpul adalah data hasil penilaian berupa tanggapan dan komentar para ahli pengembangan media pembelajaran, guru mitra pada ujicoba lapangan, dan uji coba respon peserta didik. Nasoetion, dkk. (2000) menjelaskan bahwa analisis validitas dilakukan terhadap buku siswa, panduan guru dan panduan siswa dihitung dengan menggunakan rumus:

$$n \text{ kevalidan} = \frac{\text{Jumlah Skor Perolehan}}{n \times \text{Bobot tertinggi}} \times 100\%$$

Pemberian makna dan pengambilan keputusan menggunakan ketetapan seperti pada tabel berikut.

Tabel 1. Konversi Tingkat Pencapaian

Tingkat Ketercapaian	Kualifikasi	Keterangan
85% - 100%	Baik Sekali	Tidak perlu direvisi
75% - 84%	Baik	Tidak perlu direvisi
65% - 74%	Cukup Baik	Direvisi
55% - 64%	Kurang Baik	Direvisi
0% - 54%	Sangat Kurang	Direvisi

(Sumber: Adaptasi Arikunto, 2003)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian pengembangan ini telah menghasilkan produk berupa Komik Pancasila yang telah melewati validasi untuk mengetahui kelayakan. Desain dari Komik Pancasila adalah sebagai berikut.



<p><b>P</b>uji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga buku KOMPAS "Komik Pancasila" ini dapat terselesaikan peserta didik.</p> <p>KOMPAS ini berisi materi Pancasila sebagai dasar negara yang didalamnya menjelaskan tentang Sejarah Pancasila, Pancasila sebagai <i>Silaisfundamentalnorm</i> dan Pengamalan Nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya KOMPAS ini diharapkan peserta didik tidak merasa bosan dan menjadi tertarik terhadap Pancasila serta dapat mengamalkan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari.</p> <p>Kepada semua pihak yang terlibat dalam pembuatan komik ini kami ucapkan terima kasih. Semoga komik ini dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya.</p> <p style="text-align: right;">Penyusun</p> <p>Kata Pengantar</p>	<h2>Daftar Isi</h2> 
<p style="text-align: center;">Kata Pengantar</p>	<p style="text-align: center;">Pembatas Daftar Isi</p>
<p>Halaman Judul</p> <p>Kata Pengantar</p> <p>Daftar Isi</p> <p>Apa itu KOMPAS?</p> <p>Tokoh Kita</p> <p>Sejarah Pancasila Pancasila</p> <p>Pancasila sebagai <i>Silaisfundamentalnorm</i></p> <p>Pengamalan Pancasila</p> <p>Aku Indonesia, Aku Pancasila</p> <p>Daftar Pustaka</p> <p>Daftar Isi</p>	<h2>Apa KOMPAS Itu?</h2> <p>“KOMPAS merupakan media pembelajaran PKn dengan bentuk buku komik inovatif dalam menunjang pembelajaran PKn peserta didik Sekolah Menengah Pertama. Komik yang dirancang disesuaikan dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran PKn tingkat sekolah menengah pertama agar pembelajaran terasa menyenangkan dan efektif. Bahasa materi dalam komik sederhana namun memberikan gambaran pencapaian-pencapaian oleh tokoh-tokoh KOMPAS untuk mewujudkan suasana belajar yang serius namun menyenangkan.”</p>
<p style="text-align: center;">Daftar Isi</p>	<p style="text-align: center;">Apa Kompas Itu?</p>
 <p style="text-align: center;">Tokoh Kita</p>	 <p style="text-align: center;">SEJARAH PANCASILA</p>
<p style="text-align: center;">Tokoh Kita</p>	<p style="text-align: center;">Pembatas Cerita 1</p>

Setelah media dinyatakan layak oleh validator produk ini kemudian diujicobakan kepada peserta didik kelas VIII B SMPN 1 Imogiri untuk mengetahui respon peserta didik terhadap produk hasil penelitian. Data penilaian ahli materi terhadap media pembelajaran KOMPAS diperoleh melalui angket. Validasi pertama berupa komentar dari ahli materi, yaitu materi dalam KOMPAS ini sudah cukup baik. Berdasarkan penilaian dan komentar ahli materi, peneliti kemudian melakukan revisi. Masukan dan saran untuk materi dalam media

KOMPAS yang dikembangkan secara umum ada pada perumusan kata pengantar yaitu kurang mengantarkan pembaca dalam memahami KOMPAS tersebut. Berdasarkan hasil penghitungan dengan menggunakan rumus presentase tingkat pencapaian untuk isi dan tujuan sebesar 66% dan untuk pembelajaran juga 63,16% dengan rata-rata 64,58% presentase ini menunjukkan kategori layak dengan revisi untuk mematangkan materi dalam KOMPAS.

Data yang diperoleh dari ahli media pembelajaran berupa data kualitatif dalam bentuk komentar dan saran terhadap media pembelajaran KOMPAS. Hasil validasi oleh ahli media pembelajaran dengan skor setiap pernyataan serta memberi komentar dan saran secara tertulis maupun tidak tertulis terhadap KOMPAS. Hasil penilaian dari ahli media terhadap KOMPAS adalah desain karakter yang kurang sama dan alur komik dalam KOMPAS harus jelas. Hasil presentase validasi ini diperoleh skor 75% untuk media dan 75% untuk tampilan media dengan rata-rata 75%. Skor 75% setelah dikonversi dengan tabel skala penilaian dinyatakan bahwa media ini layak.

Setelah peneliti melakukan revisi media versi pertama yang berdasarkan masukan dari validator kemudian peneliti melakukan validasi tahap kedua untuk memvalidasi kelayakan media KOMPAS. Data validasi tahap kedua dari ahli materi memperoleh presentase 88% untuk kualitas isi dan tujuan serta 97,37% untuk pembelajaran dengan rata-rata 92,68% setelah dikonversikan pada tabel konversi mendapatkan kualifikasi sangat layak tanpa revisi. Data validasi tahap kedua dari ahli media memperoleh presentase 91% untuk media dan 97,92% untuk tampilan media dengan rata-rata 94,51% setelah dikonversikan pada tabel konversi mendapatkan kualifikasi sangat layak tanpa revisi.

Hasil revisi produk penelitian berupa KOMPAS ini menghasilkan produk yang siap untuk diuji coba kepada peserta didik. Subjek dari uji coba ini adalah siswa kelas VIII B SMP N 1 Imogiri. Data hasil respon peserta didik dapat dilihat dalam tabel 2 berikut.

Tabel 2. Data Respon Siswa

		<b>Statistics</b>			
		Materi Mudah Dipahami	Materi Sesuai Tujuan Pembelajaran	Mempermudah Pemahaman	Mengenalkan Detail Pancasila
N	Valid	18	18	18	18
	Missing	0	0	0	0
Mean		4.22	4.22	4.33	3.94
Std. Error of Mean		.152	.152	.198	.189
Median		4.00	4.00	4.50	4.00
Mode		4	4	5	4
Std. Deviation		.647	.647	.840	.802
Variance		.418	.418	.706	.644
Range		2	2	3	2
Minimum		3	3	2	3
Maximum		5	5	5	5

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa rata-rata peserta didik memberikan skor (4,22), (4,22), (4,33) dan (3,94) untuk kesesuaian dari aspek materi. *Range* dari data hasil penelitian tidak memiliki rentang yang sangat jauh hanya pada kisaran 2-3. Std. Deviasi dari data diatas juga tidak memiliki rentang yang jauh, berdasarkan data diatas Std. Deviasi hanya berkisar antara 0,647-0,840 artinya bahwa sebaran data antar individu tidak berbeda sekali atau tidak ada kesenjangan yang terlalu jauh dalam data tersebut.

Selanjutnya adalah data respon siswa mengenai media KOMPAS dapat dilihat dalam tabel 3.

Tabel 3. Data Respon Siswa

		<b>Statistics</b>			
		MudahDigunakan	DapatDigunakan Mandiri	BahasaMudahDip ahami	AksesibitasMudah
N	Valid	18	18	18	18
	Missing	0	0	0	0
Mean		4.11	4.00	4.39	4.22
Std. Error of Mean		.137	.181	.118	.152
Median		4.00	4.00	4.00	4.00
Mode		4	4	4	4
Std. Deviation		.583	.767	.502	.647
Range		2	2	1	2
Minimum		3	3	4	3
Maximum		5	5	5	5

Berdasarkan data pada tabel 3 dapat dilihat bahwa rata-rata peserta didik memberikan skor (4,11), (4,00), (4,39) dan (4,22) untuk penilaian aspek media. *Range* dari data hasil penelitian tidak memiliki rentang yang sangat jauh hanya pada kisaran 1-2. Std. Deviasi dari data diatas juga tidak memiliki rentang yang jauh, berdasatkan data diatas Std. Deviasi hanya berkisar antara 0,502-0,767 artinya bahwa sebaran data antar individu tidak berbeda sekali atau tidak ada kesenjangan yang terlalu jauh dalam data tersebut.

Setelah diuji cobakan pada siswa dan guru secara umum menghasilkan hal yang positif, berdasarkan hasil analisis respon siswa terhadap media pembelajaran KOMPAS diketahui bahwa respon siswa dan guru sangat baik terhadap media pembelajaran ini.

Berdasarkan tahapan pengembangan yang dilakukan dengan menggunakan model 4-D, dari dari hasil analisis data yang diperoleh melalui uji validasi, uji perorangan, maupun uji lapangan dapat disimpulkan bahwa perangkat pembelajaran yang dikembangkan merupakan perangkat pembelajaran yang valid dan dapat digunakan dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik.

## **SIMPULAN**

Telah dihasilkan media pembelajaran nilai-nilai Pancasila dalam bentuk komik yang valid dan layak untuk digunakan dengan model pengembangan 4-D pada siswa kelas VIII B SMPN 1 Imogiri. Hal ini diperoleh berdasarkan hasil uji ahli materi, presentase media pembelajaran memperoleh presentase 88% untuk kualitas isi dan tujuan serta 97,37% untuk pembelajaran dengan rata-rata 92,68% setelah dikonversikan pada tabel konversi mendapatkan kualifikasi sangat layak tanpa revisi. Hasil uji coba untuk ahli media memperoleh presentase 91% untuk media dan 97,92% untuk tampilan media dengan rata-rata 94,51% setelah dikonversikan pada tabel konversi mendapatkan kualifikasi sangat layak tanpa revisi. Maka dapat dikatakan bahwa media pembelajaran KOMPAS atau Komik Pancasila yang dikembangkan merupakan media pembelajaran yang valid dan layak untuk digunakan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila.

## **REFERENSI**

- Andi, R. (2008). *Perangkat pembelajaran*. Surabaya: Rajawali Pers.
- Arikunto, S. (2003). *Dasar-dasar evaluasi pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Daryanto. (2013). *Media pembelajaran*. Yogyakarta: Gava Media.
- Hidayah, dkk. (2017). Pengembangan media pembelajaran berbasis komik pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas IV Mi Nurul Hidayah Roworejo Negerikaton Pesawaran. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*, 4(1), 34-46.
- Lestari, S. (2016). *Ketika paham radikal masuk ke ruang kelas sekolah - BBC News Indonesia*.  
[https://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/2016/05/160519\\_indonesia\\_lapsus\\_radikalisme\\_anakmuda\\_sekolah](https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/05/160519_indonesia_lapsus_radikalisme_anakmuda_sekolah) (Diakses pada 20 Oktober 2018).
- Nasution, S. (2000). *Berbagai pendekatan dalam proses belajar mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Thiagarajan, S., Semmel, D. S., & Semmel, M. I. (1974). *Instructional development for training teachers of exceptional children*. minneapolis, minnesota: Leadership Training Institute/Social Education. University of Minnesota.

# Penguatan Masyarakat Difabel dalam Partisipasi Politik Pencalonan Legislatif

Billy Andiefyura, S.Pd.

[billyandiefyura.2018@student.uny.ac.id](mailto:billyandiefyura.2018@student.uny.ac.id)

## Abstrak

Penelitian ini membahas tentang keterwakilan kelompok disabilitas dalam pemilu di Indonesia, dalam penelitian ini juga akan melihat masalah isu disabilitas pemilu di Indonesia serta kebijakan-kebijakan yang dapat dilakukan untuk mendorong keterwakilan kelompok disabilitas dalam pemilu di Indonesia Metode yang digunakan dalam kajian ini ialah metode kajian pustaka. Penulis mengkaji masalah yang diangkat dalam dengan berbagai literatur yang tersedia, baik itu buku jurnal yang relevan mengenai masalah yang diangkat, yakni penguatan masyarakat difabel dalam partisipasi politik. Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa hambatan dan tantangan dalam implementasi kebijakan dalam penguatan partisipasi warganegara difabel. Kebijakan-kebijakan berbagai negara yang relevan dalam kebijakan yang diterapkan di Indonesia.

**Kata kunci:** Difabel, Partisipasi Politik, Pemilu

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara demokrasi. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sila keempat Pancasila merupakan penceminan dari asas demokrasi di Indonesia. Menurut Fathoni & Mulyono (2019) Pancasila sebagai alat politik dalam menentukan arah kebijakan dan distribusi suatu Negara, dengan hal ini Pancasila pada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dapat mempengaruhi aspek kehidupan masyarakat terutama yang ditujukan dalam hal pemilihan umum daerah di Indonesia yang demokratis.

Pemilu adalah mekanisme pemerintahan yang demokratis, karena wewenang pemerintahan hanya diperoleh atas persetujuan dari warga negara yang memilihnya. Secara universal pemilihan umum adalah lembaga sekaligus praktik politik yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (*representative government*) yang menurut Dahl, merupakan gambaran ideal dan maksimal bagi suatu pemerintahan demokrasi di zaman modern (Robert A Dahl, 1992).

Pemilu memberikan otoritas yang *legitimate* kepada mereka legislator terpilih untuk menentukan corak negara hukum akan dibentuk melalui penciptaan

ikatan-ikatan baru antara sesama warga negara, warga negara kepada negara, antar aparaturnegara, serta negara dengan negara lain melalui entitas yang disebut sebagai hukum positif. Demikianlah, Pemilu mempunyai posisi strategis dalam mewujudkan dua prinsip pokok demokrasi, yaitu *popular control* (peran *demos* dalam penentuan bagaimana *kratia* menjalankan kekuasaan dan kewenangannya) dan *political equality* (prinsip kesetaraan dalam rangka mewujudkan dan menerapkan *popular control*) (Muktiono, 2009)

Pemilu merupakan pelaksanaan hak politik warga negara (Robert, 2001). Negara menjamin bahwa setiap warga negara yang telah memenuhi syarat dapat berpartisipasi dalam pemilu, baik itu memilih ataupun dipilih. Setiap warga negara berkedudukan sama di hadapan hukum serta berhak menjalankan haknya tanpa adanya diskriminasi terlepas dari kondisi apapun. Hal ini dijamin dalam konstitusi Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga secara tegas menyatakan bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak terkecuali”

Warga negara Indonesia terlahir dengan beragam kondisi. Tidak semua warga negara Indonesia hidup dengan keadaan sempurna, sebagian dari warga negara Indonesia membutuhkan kebutuhan khusus baik itu secara fisik ataupun psikis ataupun gabungan dari keduanya. Penggunaan istilah “cacat/penyandang cacat” dianggap menstigmatisasi, karena kata “penyandang” dimaknai orang yang mengalami kecacataan pada sebagian tubuhnya dianggap memiliki kecacatan itu pada keseluruhan pribadinya (*whole person*). Nuning Suryatiningsih dari *Center for Improving Qualified Activity of People With Disabilities (CIQAL)* menggunakan istilah pengganti yang lebih baik yakni disabilitas. Disabilitas bukan dilihat dari perspektif medisnya, melainkan dari perspektif hubungan sosialnya. Oleh karenanya, kita menyebutnya disabilitas, bukan cacat. Cacat adalah istilah medis. (Satria, 2020)

Selain kelahiran ada berbagai faktor lain yang menyebabkan disabilitas di Indonesia bertambah. Diantaranya faktor keamanan baik karena konflik ataupun bencana alam. Indonesia adalah negara yang rentan terhadap berbagai kasus

konflik seperti konflik bersenjata yang terjadi di Aceh dan Papua, konflik horizontal disebabkan pelanggaran adat, perebutan lahan, pekerjaan, kesenjangan sosial-ekonomi, ataupun kesalah paham di berbagai wilayah. Selain itu kondisi geografis Indonesia yang dilalui oleh jalur gunung merapi serta kerusakan alam yang terjadi membuat Indonesia sering dilanda oleh berbagai macam bencana alam seperti tanah longsor, gempa bumi, banjir, tsunami, gunung meletus, angin puting beliung, serta bencana alam lainnya. Kondisi ini diperburuk oleh rendahnya keselamatan lalu lintas, keselamatan kerja serta tingginya kasus tindakan kriminalitas dengan kekerasan.

Kesehatan menjadi faktor lain penyebab terjadinya disabilitas dalam masyarakat. Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat menyebabkan keluarga-keluarga tidak dapat mengakses informasi kesehatan, pendidikan dan konsumsi makanan bergizi. Seperti hukum sebab akibat, permasalahan ini memicu timbulnya masalah baru yang lebih kompleks, seperti halnya gizi buruk yang berimplikasi pada mudahnya anak-anak terserang polio dan lepra, tingginya insiden stroke, serta buruknya keselamatan pasien (*patient safety*) dalam praktek kedokteran.

Berdasarkan data departemen kesehatan (2008) Polio dan lumpuh layu yang telah ada vaksinya masih mempunyai prevalensi sekitar 4/100.000 penduduk. Penyakit Lepra, misalnya masih mempunyai prevalensi 0.76/10.000 penduduk pada tahun 2008. Hipertensi yang dapat mengakibatkan stroke menjangkiti 31.7% (tiga puluh satu koma tujuh perseratus) dari penduduk berusia 18 (delapan belas) tahun ke atas (Depkes RI, 2008) Sedangkan stroke sendiri prevalensinya diperkirakan 8.3/1000 penduduk (Risksdas 2007).

UNCRPD (Pasal 1) menyatakan bahwa “Orang dengan disabilitas termasuk mereka yang memiliki gangguan jangka panjang secara fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka di dalam masyarakat atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya”. Derajat kondisi fisik penyandang disabilitas berbeda-beda. Bagi sebagian penyandang disabilitas, kekurangan fisik atau mental yang dimiliki berdampak besar sehingga memerlukan dukungan dan

bantuan dari orang lain. Akan tetapi untuk Sebagian lainnya kondisi yang dimilikinya hanya sedikit berdampak pada kemampuannya beraktifitas sehingga dapat berpartisipasi di tengah masyarakat.

Daulay (2013) menyatakan bahwa dalam konteks pemilu, pemberdayaan dan peningkatan peran para penyandang disabilitas dalam pembangunan nasional perlu mendapat perhatian dan pendayagunaan yang khusus. *Fathoni dan Mulyono mengungkapkan jumlah suara* penyandang disabilitas layak diperhitungkan oleh partai politik dan calon legislatif. Didasarkan pada beberapa survey dengan asumsi satu kursi di DPR-RI pada Pemilu 2014 setara dengan 223.000, lalu suara, 75% (2.250.000) dari jumlah pemilih penyandang disabilitas secara kasar tercatat adalah 3.000.000 jiwa. Maka suara penyandang disabilitas setara dengan 10 kursi DPR.

Pemerintahan Indonesia dalam penyelenggaraannya masih belum optimal untuk malayani kebutuhan-kebutuhan khusus warga negara difable. Hal ini seperti kutipan wawancara April Syar, Pelaksana Pusat Pemilihan Umum Akses (PPUA) Penyandang Disabilitas dalam situs [tirto.id](http://tirto.id) bahwa meski Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas sudah disahkan, implementasinya masih jauh dari harapan. Atas dasar itulah para penyandang disabilitas dinilai perlu turun ke kancah politik/ keterlibatan para penyandang disabilitas sebagai bentuk perjuangan pemenuhan hak-hak yang abai terwujud. Legislator difabel yang terpilih memiliki tugas legislasi untuk usulan rancangan peraturan pemerintah (RPP), ada delapan RPP (Rancangan Peraturan Pemerintah) yang sedang diperjuangkan belum semuanya disahkan. (Abdi, 2019)

Keterwakilan warga negara rentan dalam politik Indonesia merupakan upaya dalam pendewasaan sistem demokrasi Indonesia. Pemilihan umum merupakan kesempatan bagi kelompok-kelompok rentan untuk memperjuangkan kesetaraan. Representasi kaum disabilitas untuk mendapatkan pengakuan dan kesetaraan dalam kehidupan berdemokrasi menjadi isu penting sehingga penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan untuk melakukan proses keterwakilan dan perjuangan untuk melakukan tindakan politik dengan mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota kelompok yang memiliki

kesamaan dan karakteristik. (Fitri :2019) Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Hak ini menyangkut hak untuk menyelidiki/ menjajaki alternatif yang ada dan hak untuk berpartisipasi dalam memutuskan siapa yang akan dipilih.

Hal ini seiring terdapat pergeseran paradigma didasarkan pada Konvensi PBB mengenai hak-hak penyandang disabilitas (UNCRPD, 2007). Konvensi ini memuat instrumen kebijakan hak asasi manusia dan pembangunan. Ruang lingkup konvensi ini lintas jenis disabilitas, lintas sektoral dan mengikat secara hukum. Tujuannya adalah untuk melindungi dan memastikan para penyandang disabilitas dapat menikmati secara penuh dan setara semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental serta mensosialisasikan penghargaan terhadap harkat dan martabat mereka.

Penyandang disabilitas tidak dipandang sebagai obyek kegiatan amal, perlakuan medis, dan perlindungan sosial, namun dilihat sebagai manusia yang memiliki hak yang mampu mendapatkan hak-hak itu serta membuat keputusan terhadap hidup mereka sesuai dengan keinginan dan ijin yang mereka berikan seperti halnya anggota masyarakat lainnya. Gerakan disabilitas untuk mendapatkan pengakuan dan kesetaraan harus diperjuangkan dan diberikan kesempatan.

Melalui aturan-aturan tersebut perlu ditekankan untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas karena di sini paradigma yang baru lebih memandang penyandang disabilitas sebagai subjek bukan objek lagi. Kemudian tidak dilihat juga sebagai individu yang cacat, namun sebagai individu yang bisa mengambil keputusan untuk dirinya sendiri secara penuh dan mempunyai hak, kewajiban yang setara dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan demikian, penyandang disabilitas sebagai warga negara lainnya berhak untuk untuk berpartisipasi dalam pembangunan pembentukan keputusan-keputusan berkenaan dengan disabilitas di lingkungannya.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam kajian ini ialah metode kajian pustaka. Penulis mengkaji masalah yang diangkat dalam dengan berbagai literatur

yang tersedia, baik itu buku jurnal yang relevan mengenai masalah yang diangkat, yakni penguatan masyarakat difabel dalam partisipasi politik.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kondisi keterwakilan dan gerakan difabel di Indonesia**

Gerakan disabilitas untuk mendapatkan pengakuan dan kesetaraan harus diperjuangkan dan diberikan kesempatan. Keterwakilan warga negara rentan dalam politik Indonesia merupakan upaya dalam pendewasaan sistem demokrasi Indonesia. Paradigma masyarakat selama ini masih menganggap bahwa kaum disabilitas memiliki keterbatasan dan perlu merasa dikasihani harus dirubah. Warga negara difabel harus dipandang setara dan memiliki kompetensi yang sama dengan warga negara lainnya. Kini saatnya beralih dari pendekatan difabel sebagai objek kebijakan menjadi difabel menjadi subjek kebijakan (aktor). Perlibatan warga negara difabel dalam penentu kebijakan menjadi penting dimana warga negara difabel menjadi representasi dari golongan rentan dan marjinal. Pitkin representasi ini dapat dipahami sebagai relasi antara seorang wakil dengan yang diwakili, berbasiskan kepentingan-kepentingan (baik wakil maupun yang terwakili), di dalam konteks politik tertentu (Marijan, 2011:41)

Sejarah mencatat di Indonesia pernah dipimpin oleh seorang presiden dengan kebutuhan khusus yaitu K.H Abdurrahman Wahid atau yang dikenal Gus Dur. Beliau merupakan tokoh yang cukup dipertimbangkan dalam hal mensosialisasikan ide pluralisme agama. Gus Dur merupakan salah satu tokoh yang cukup berpengaruh. Ia menjadi pondasi pelindung atas berbagai ketidakadilan setidaknya begitulah anggapan banyak orang yang pernah mengenal sosok Gus Dur atas kiprah dan perjuangannya membela hak minoritas dan berbagai ketimpangan sosial lainnya di negeri ini. (Barton, 2008:243)

Salah satu tokoh disable Angkie Yudistia, perempuan yang aktif berkegiatan di Yayasan Tunarungu Sehjira sejak 2009 itu kemudian mendirikan sebuah perusahaan bernama Thisable Enterprise. Angkie mendirikan lembaga tersebut dengan tujuan untuk memberdayakan kelompok disabilitas Indonesia agar memiliki kemampuan dan keterampilan, dan menyalurkannya ke dunia kerja, terutama dalam industri ekonomi kreatif. Melalui perusahaan-perusahaan tersebut,

Angkie menyediakan pelatihan bagi SDM disabilitas agar dapat bekerja secara vokasional dan profesional. Pada 2017 lalu, perusahaan tersebut menggandeng Go-Jek sebagai mitra bisnis, di mana para penyandang disabilitas di bawah naungan Thisable Enterprise disalurkan untuk menjadi tenaga pekerja pada sejumlah layanan Go-Jek, seperti Go-Massage, Go-Clean, Go-auto, maupun Go-Glam, disesuaikan dengan kemampuan masing-masing disabilitas. Pada 2019 ia menjadi salah satu anggota Staf Khusus Presiden. Angki membantu Jokowi mewujudkan misi menuju Indonesia inklusif yang lebih ramah disabilitas.

Sebagai staf khusus Angki memberikan masukan kepada presiden dan kami berkolaborasi dengan kementerian-kementerian. Ada tiga program presiden yang dijelaskan Angki yakni: Bonus yang sama untuk atlet difabel dan non-difabel. Kedua berkenaan Kuota lapangan kerja bagi difabel ini merupakan wewenang 2 kementerian yakni Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kementerian Tenaga Kerja. Hasilnya adalah penanada tanganan memorandum yang isinya peluang bagi difabel untuk mengikuti seleksi CPNS Badan Usana Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dengan kuota 2 persen oleh Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ketiga pembangunan desa inklusi, ini merupakan program Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Pemerintah (desa) melalui dana desa dapat membuat program guna mengayomi penyandang disabilitas di desa. (tempo.co)

Perlibatan warga negara disabilitas dalam pemerintahan menjadi penting. Pemberian kesempatan pada warga negara disabilitas seperti terhadap Angkie Yudistia, ataupun Presiden Gus Dur menjadi pembuktian bahwa warga negara difable mampu memegang amanah untuk ada dalam jabatan tersebut dan memberi kontribusi yang baik dalam pembentukan kebijakan pemerintah khususnya mengenai inklusifitas. Sayangnya kesempatan tersebut tidak berlaku pada keterwakilan dalam parlemen. menurut data PPDI, dari ratusan calon legislator disabilitas yang mengikut pemilu legislatif 2014, hanya ada satu di antaranya yang lolos ke Senayan untuk periode 2014-2019. Pada pemilu 2019 Sebanyak 35 penyandang disabilitas atau difabel maju sebagai calon anggota Legislatif dalam

Pemilu 2019. Mereka maju melalui beragam partai politik dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

### **Masalah disabilitas dalam pemilu di Indonesia**

Selama ini partai politik belum ada yang memberikan perhatian khusus kepada disabilitas khusus peluang untuk menduduki posisi jabatan di kepartaian maupun dalam pemilu legislatif. Padahal Untuk mendapat keterwakilan di lembaga legislatif, disabilitas harus aktif dan masuk ke partai politik. Melalui pencalonan dari partai politik pada saat pemilu, disabilitas bisa duduk di kursi legislatif. (Hidayatullah, Nasih & Andriyani)

Hal ini dapat dilihat dalam peraturan partai politik baik yang tertulis di AD/ART belum secara spesifik membahas terkait dengan perekrutan disabilitas untuk menjadi pengurus di level cabang sampai pusat. Disisi lain undang-undang tentang kepartaian maupun pemilu belum ada pasal yang membahas secara spesifik keterwakilan disabilitas di partai baik dalam jajaran kepengurusan dan kuota khusus saat pemilu legislatif. Padahal Untuk mendapat keterwakilan di lembaga legislatif, disabilitas harus aktif dan masuk ke partai politik. (Hidayatullah, Nasih & Andriyani) Representasi kaum disabilitas untuk mendapatkan pengakuan dan kesetaraan dalam kehidupan berdemokrasi menjadi isu penting sehingga penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan untuk melakukan proses keterwakilan dan perjuangan untuk melakukan tindakan politik dengan mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota kelompok yang memiliki kesamaan dan karakteristik. (Fitria)

Pengakaderan disabilitas merupakan proses awal. melibatkan kaum disabilitas dalam partai politik dapat ditempuh dengan cara, pertama inisiatif kaum disabilitas untuk bergabung ataupun sebaliknya partai politik mencari orang-orang yang berpotensi untuk dijadikan kader. Menurut Waltz & Schippers (2020) Partai politik memberikan pendampingan kepemimpinan pada mereka yang terpilih sehingga mereka bisa berkembang lebih baik sebagai politisi. (Waltz & Schippers, 2020) . Pemberian pendampingan kepemimpinan merupakan bagian dari bentuk Pendidikan politik partai politik terhadap masyarakat termasuk didalamnya kader partai. Peningkatan kapabilitas kader sangat penting dilakukan

partai politik khususnya dalam mendorong keterwakilan disabilitas menjadi calon legislatif. melatih diri dan belajar dalam keorganisasian, dimana mereka belajar bekerja tim, jajak pendapat dan berargumentasi membahas isu seputar disabilitas, mengambil keputusan, kepemimpinan, advokasi dan lainnya. Lalu menjalankan fungsinya lebih luas dan lebih dikenal lagi baik dalam partai maupun di luar partai sehingga lebih dikenal oleh publik.

Hidayatullah, Fajri, Nasi, Mohammad & Andriyani, Lusi (2020) dalam penelitiannya mendapatkan beberapa faktor yang menyebabkan kekalahan caleg disabilitas. Faktor yang pertama Konsolidasi caleg belum erat, pencalegan tidak hanya sebatas menang kalah lebih utama pada jaringan yang dibangun oleh disabilitas dengan parpol. Sehingga suatu saat jika ada keterwakilan anggota legislatif dari parpol tersebut bisa menyuarakan hak-hak disabilitas di DPR RI. Kedua adalah kurang kesiapan, persepsi masyarakat negatif, persaaan tidak percaya dengan kemampuan perlu diluruskan meningkatkan intensitas sosialisasi caleg disabilitas pada masa kampanye pemilu. Hal ini juga dapat digunakan mendengarkan mengenali daerah pilihan, konstituen, berdialog mendengarkan aspirasi konstituen di dapil tersebut. Hal ini membangun jaringan yang luas antara calon legislatif dengan masyarakat, dan hal ini membutuhkan persiapan yang matang dan Panjang. Ketiga Pengalaman dalam bidang politik, pengalaman dalam hal ini adalah salah satu pengalaman yang penting adalah menjadi kepengurusan di partai politik. Keempat finansial merupakan hal penting proses pemilu membutuhkan biaya operasional, biaya alat peraga kampanye, kampanye langsung maupun tidak langsung membutuhkan dana yang besar. Kelima Jaringan/modal sosial Karena dengan memiliki jaringan sosial maka caleg dapat meningkatkan elektabilitasnya secara cepat karena dibantu dengan jaringan sosial. Selain jaringan sosial, seharusnya jaringan partai dari pusat ke ranting harus dimanfaatkan untuk kemenangan caleg dari partai tersebut. Namun kenyataannya pada pemilu 2014 lalu, kekuatan pengurus dari pusat hingga keranting kurang solid untuk memenangkan calegnya.

Masalah lain dalam pencalonan difabel dalam pemilu adalah berkenaan posisi nomor urut calon legislator yang berasal dari warga negara difabel selama

ini cenderung nomor urut belakang yaitu diatas urutan lima. Hal ini tentu akan memperkecil peluang terpilihnya calon-calon legislator dari kalangan difabel. (Gufroni dalam Rahardian, 2017) Pemberian nomor urut terakhir oleh partai politik dalam tahap penjaringan warga negara difabel sebagai calon legislator, menunjukkan belum adanya keseriusan dalam mendorong perwakilan difabel untuk dapat terpilih. Penelitian Hidayatullah, Mohammad Nasih & Lusi Andriyani (2020) mendapatkan pertimbangan pemberian nomor urut pertama diberikan kepada caleg bukan karena ia sebagai penyandang disabilitas melainkan sebagai mantan penyabat negara. Jika dibandingkan dengan nomor urut yang lain, nomor urut pertama punya peluang lebih besar untuk dipilih oleh konstituen. Hal ini juga di dukung dari hasil penelitian Mais dan Yaum (2019) yang menyebutkan partai politik belum mengakomodir secara sungguh-sungguh keberadaan calon legislator dari warga negara difabel. Keberadaanya hanya sebagai penggembira dalam ajang kontes pemilu.

Sebagai kandidat dalam Pemilu yang demokratis merupakan peluang sekaligus tantangan dan hambatan bagi Kelompok Rentan. Undang-undang terkait pemilu (eksekutif dan legislatif) dengan prinsip keadilannya yang relative naif terkait dengan hak-hak Kelompok Rentan masih menempatkan asas persamaan antar semua warga negara dengan tanpa adanya ketentuan khusus bagi Kelompok Rentan jika ingin mencalonkan dirinya baik menjadi anggota legislatif maupun eksekutif. Asas persamaan tersebut dalam satu sisi memberikan peluang bagi Kelompok Rentan dengan tidak adanya ketentuan hambatan secara normatif bagi semua orang, termasuk mereka, untuk menjadi kandidat dalam pemilu. Akan tetapi, merupakan sebuah tantangan dan hambatan ketika dari pencalonan tersebut memberikan persyaratan-persyaratan (administratif dan lainnya) bagi semua kandidat baik yang rentan maupun yang kuat untuk secara sama memenuhinya. Hal tersebut tidak berhenti pada proses pencalonan diri saja melainkan berlanjut pada tahap vote gathering (pendulungan suara) bagi semua kandidat oleh mana akan membutuhkan usaha dan biaya yang tidak sedikit dan murah. Salain itu untuk dalam proses seleksi syarat- syarat yang ditetapkan pada calon legislator

difabel dan non difabel harus dibedakan, agar calon legislator difabel dapat bersaing dengan kompetitor lain. (Rahadian, 2017).

Implementasi pemilu yang inklusif masih terganjal kendala, berupa kendala struktural dan kendala kultural. Kendala struktural terjadi karena tingkat pemahaman yang belum sama di antara para penyelenggara pemilu yang tentunya tidak bersifat disengaja dan sering dilakukan oleh oknum, selain itu juga bisa disebabkan oleh beberapa kebijakan yang masih bersifat diskriminatif. Sedangkan kendala kultural disebabkan oleh kultur, budaya persepsi dan paradigma baik oleh kultur, budaya persepsi dan paradigma baik oleh masyarakat maupun penyandang disabilitas sendiri dalam menyikapi kondisi kedisabilitasan dikaitkan dengan perannya dalam politik dan pembangunan bangsa.

Kasus rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilu juga terjadi di Kulon progo seperti berita di [harianjogja.com](http://harianjogja.com), Hidayatut Thoyyibah mengungkapkan bahwa meskipun capaian tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu secara umum melampaui target, namun, partisipasi pemilih dari difabel menyisakan pekerjaan rumah bagi KPU Kulonprogo. Pasalnya, capaian partisipasi masyarakat di kalangan difabel masih terbilang rendah. KPU Kulonprogo mencatat, ada 2.281 orang difabel yang masuk daftar pemilih. Namun yang datang ke TPS untuk memilih hanya sampai 42%. (Burhan, 2019)

### **Pandangan kebijakan mendorong keterwakilan disabilitas di Indonesia dan di Luar Negeri**

Peningkatan keterwakilan calon legislator dari disabilitas dalam penjaminan kesetaraannya. Untuk mewujudkan itu perlu adanya sebuah rekayasa social program mendorong partisipasi calon legislator difabel. Hal ini dapat dimulai pada proses perekrutan. Partai politik dapat berperan dalam menemukan (merekrut) orang-orang potensial dari kalangan difabel, lalu memberikan pendampingan kepemimpinan pada mereka yang terpilih sehingga mereka bisa berkembang lebih baik sebagai politisi. Waltz & Schippers (2020) Jika cara perekrutan ini dilaksanakan dengan baik akan sangat berperan guna mendorong dan mengembangkan politisi penyandang disabilitas di masa depan.

Peningkatan ketgerpolihan dsabilitas debagai calon legi Partai politik berperan penting dalam penetapan daerah pilihan yang tepat yang mememunkinkan banyak simpatisan partai berada di daerah tesebut sertas penetapan nomor urut menjadi penting. Jika dibandingkan dengan nomor urut yang lain, nomor urut pertama punya peluang lebih besar untuk dipilih oleh konstituen. Penetapan nomor urut lima teratas memungkinkan calon legislator dari difabel untuk terpilih lebih tinggi

Disabilitas menghadapi masalah yang cukup kompleks dalam aksesibilitas. Aksesibilitas ruang dan aktivitas politik perlu dipermudah agar para penyandang disabilitas perlu menjangkau komunitas dan melibatkan lebih banyak penyandang disabilitas. (Waltz & Schippers, 2020) Dengan begitu membuat para penyandang disabilitas terlihat oleh publik dan dapat dikenal lebih luas. Selain itu, masalah aksesibilitas sehari-hari, seperti akses ke transportasi umum atau kendaraan yang disesuaikan, juga akan memengaruhi partisipasi. Ketersediaan penerjemah bahasa isyarat untuk penyandang tunarungu, dan pembaca layar atau terjemahan Braille untuk penyandang tunanetra, juga penting. Aksesibiltas yang baik juga sangat menunjang berinteraksi dengan orang lain pada kemampuan mereka untuk bergerak, mengambil inisiatif, dan mengekspresikan diri.

Di negara Inggris, negara menyediakan dana hibah untuk mengkompensasi kandidat penyandang disabilitas untuk biaya terkait disabilitas selama kampanye politik. dana *Access to Elected Office* senilai £ 2,6 juta. Dana dapat digunakan untuk menutupi biaya-biaya seperti terjemahan Braille, interpretasi bahasa isyarat, dan transportasi spesialis. Namun dana yang diberikan tidak ada dana untuk asisten pribadi (komunikasi pribadi) (Booth, 2018). Program ini terbukti mampu mendorong partisipasi calon legislator di Inggris. Program hibah khusus ini dapat diimitasi di Indonesia dalam mendorong aksesibilitas para calon legislator dari warga negara difabel. Di sisi lain kultur Indonesia memungkinkan adanya dukungan berupa modal sosial. Modal sosial masyarakat dalam mendorong keterwakilan difabel. Sistem jaringan sosial yang saling bekerja sama secara cepat membantu dan mendorong meningkatkan elektabilitasnya. Menurut Fukuyama (2018) gerakan sosial yang muncul ditengah masyarakat yang

siap untuk berpikir dalam hal identitas, dan lembaga-lembaga yang mewadahi masyarakat untuk meningkatkan pengakuan yang mengaktualisasikan potensi setiap individu.

Di Belgia, ada proses seperti berbagi pekerjaan yang memberikan pejabat terpilih yang cacat di tingkat lokal dan provinsi hak untuk memilih seorang *vertrouwenspersoon* (penasihat rahasia) untuk membantu mereka dengan tugas mereka. (Bestuur, 2018). Ini lebih dari sekadar menyediakan layanan asisten pribadi, karena dapat mencakup diskusi tentang kebijakan, tetapi orang penasihat rahasia tidak dapat bertindak sebagai pemilih pengganti untuk pejabat terpilih. (Waltz & Schippers, 2020)

Negara bisa membuat sebuah *affirmative action*, sebagaimana yang diberikan pada keterwakilan perempuan untuk meningkatkan keterwakilan kaum minoritas seperti penyandang disabilitas untuk dapat diperhatikan oleh partai politik untuk merekrut dan mencalonkan anggota disabilitas. Hal ini guna menjamin keterwakilan kelompok difabel terakomodasi.

## **SIMPULAN**

Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Pemilu merupakan pelaksanaan hak politik warga negara. Negara menjamin bahwa setiap warga negara yang telah memenuhi syarat dapat berpartisipasi dalam pemilu, baik itu memilih ataupun dipilih. Setiap warga negara berkedudukan sama di hadapan hukum serta berhak menjalankan haknya tanpa adanya diskriminasi terlepas dari kondisi apapun.

Pelaksanaan pemilu yang inklusif untuk menciptakan partisipasi yang baik. Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia universal.

## REFERENSI

- Abdi, Alfian Putra. (2019). *Masyarakat Adat & Difabel: Perjuangkan Hak, Kursi DPR Perlu Diraih*. <https://tirto.id/dfPi> (diakses 16 November 2019)
- Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan. (2012). *Situasi Penyandang Disabilitas Indonesia*.
- Barton, G. (2008). *Biografi Gus Dur, the Authorized Biography of Abdurrahman Wahid*. Yogyakarta: LKIS.
- Bestuur, Agentschap Binnenlandse. (2018). *Bijstand Vertrouwenspersoon*. <https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/mandatarissen/andere-aspecten-van-het-statuut/bijstand-vertrouwenspersoon>
- Booth, R. (2018). Disabled Candidates Grant Scheme to Return for 2019 Elections. *The Guardian*, 3 December. <https://www.theguardian.com/politics/2018/dec/03/disabled-candidatesgrant-scheme-to-return-for-2019-local-elections>.
- Burhan, Fahmi Ahmad (2019) *Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Masih Rendah*. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2019/05/06/514/989994/partisipasi-pemilih-penyandang-disabilitas-masih-rendah>
- CRPD (2006), "Convention on the Right of Persons with Dissabilities" New York: CRPD press.
- Dahl, Robert A. (1992). *Demokrasi dan para pengritiknya*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.
- Diono Agus.(2014). *Program Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Pergeseran Paradigma Penanganan Penyandang Disabilitas*. Bulletin Jendela Data Informasi Dan Kesehatan. Kementerian Kesehatan RI: Jakarta. <https://jmp.sh/5B2DufU>
- Fitri, Adelia (2019). Representasi kelompok disabilitas dalam pencalegan tahun 2019. *Jurnal Transformative, Vol. 5, 37-51*
- Fukuyama Francis.(2018). *Identity the demand for dignity and the politics of resentment*. New York Times
- Hansen, Camilla. (2015). Ability in disability enacted in the National Parliament of South Africa. *Scandinavian Journal of Disability Research*. 17(3), 258–271, <http://dx.doi.org/10.1080/15017419.2013.859177>
- Hidayatullah, Fajri, Nasi, Mohammad h & Andriyani, Lusi. (2020). Faktor – Faktor Kekalahan Disabilitas Netra Calon Anggota DPR-RI. *INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia Dan Global*

Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Jakarta1 (1), 1-12

Mais, Asrorul dan Yaum Lailil Aflahkul. Aksesibilitas dan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*. 2(2) DOI: <https://doi.org/10.31539/kaganga.v2i2.83078>

Marijan, Kacung. (2011). *Sistem politik Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Mitzi Waltz & Alice Schippers. (2020): Politically disabled: barriers and facilitating factors affecting people with disabilities in political life within the European Union, *Disability & Society*, DOI: 10.1080/09687599.2020.1751075

Muktiono. (2009). Penegakan Hak Atas Demokrasi Kelompok Rentan dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia dalam Sudut Pandang Hak Asasi Manusia. 2(1), 8-28

Rahadian, Lalu. (2017). Anggota DPR dari Kaum Disabilitas Diharapkan Capai 15 Persen. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170224191831-32-196051/anggota-dpr-dari-kaum-disabilitas-diharapkan-capai-15-persen>. (diakses 16 November 2019)

*Undang-Undang Dasar 1945.*

Waltz M., Schippers A. (2020). Politically disabled: barriers and facilitating factors affecting people with disabilities in political life within the European Union. *Disability and Society*. DOI: 10.1080/09687599.2020.1751075.

**Pengembangan Antiperundungan *Pocket Book*  
sebagai Media Pembelajaran Pendidikan Karakter  
Berbasis Kearifan Lokal *Tepo Seliro***

**Daffa Fakhri Maulana, Awang Nakulanang, Yohana Suryana, Anis  
Samchati, dan Heri Cahyono**

[daffafakhri.2018@student.uny.ac.id](mailto:daffafakhri.2018@student.uny.ac.id)

[awangnakulanang.2017@student.uny.ac.id](mailto:awangnakulanang.2017@student.uny.ac.id)

[yohanasuryana.2018@student.uny.ac.id](mailto:yohanasuryana.2018@student.uny.ac.id)

[anissamchati.2018@student.uny.ac.id](mailto:anissamchati.2018@student.uny.ac.id)

[Hericahyono.2017@student.uny.ac.id](mailto:Hericahyono.2017@student.uny.ac.id)

**Abstrak**

Kasus perundungan (*bullying*) marak terjadi di usia anak-anak dan kebanyakan terjadi di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang seharusnya menjadi tempat penanaman pendidikan karakter justru menjadi tempat yang sering terjadi perundungan (*bullying*). Perlunya sebuah media yang komunikatif dan dapat diterima oleh semua kelompok menjadikan pentingnya pengembangan sebuah media gambar untuk mengakomodasi ketertarikan peserta didik dalam rentang usia sekolah menengah pertama. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menciptakan media pembelajaran yang komunikatif dan informatif dalam media gambar yang berupa *Pocket book*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian penembangan (RnD) dengan pengembangan berupa 4-D. Penelitian ini berhasil menciptakan media pembelajaran berupa *pocket book* yang inovatif dan informatif serta memiliki kelayakan untuk digunakan dalam penanaman nilai-nilai karakter *tepo seliro*.

**Kata Kunci:** Anti Perundungan; Pendidikan Karakter; *Tepo Seliro*.

## **PENDAHULUAN**

Perundungan (*bullying*) dari waktu ke waktu semakin marak terjadi di Indonesia, terutama pada usia anak-anak yang sering terjadi di lingkungan sekolah. Hal ini dibuktikan dengan data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak, dari 2011 sampai 2019, ada 37.381 pengaduan kekerasan terhadap anak. Untuk *Bullying* baik di pendidikan maupun sosial media, angkanya mencapai 2.473 laporan dan trennya terus meningkat (KPAI, 2020). Biasanya perundungan yang terjadi di sekolah adalah adanya senioritas atau intimidasi dari kakak kelas kepada adik kelasnya baik secara fisik maupun non fisik. Perundungan (*bullying*) dapat mengubah kegiatan di sekolah yang awalnya menyenangkan, belajar sambil berteman, menjadi menakutkan bahkan mimpi buruk dan membawa cita rasa yang tidak menyenangkan pada kesan kehidupan sekolah.

Menurut hasil penelitian Azwar & Sari (2017) bahwa bentuk perundungan dapat berupa fisik, verbal, dan elektronik. Perundungan secara fisik mengacu pada penyerangan bagian tubuh seperti memukul, menendang, menampar, mencekik, mencakar, meludahi, dan aktivitas lain yang menyebabkan korbannya terluka secara fisik. Perundungan secara verbal mengacu pada kegiatan mencela, memfitnah, mengkritik secara tajam, menghina, mengintimidasi, sedangkan perundungan elektronik mengacu pada perundungan yang dilakukan melalui sarana elektronik seperti handphone, internet, website dan sarana elektronik lain.

Dilansir dari Kompas.com terdapat beberapa contoh fenomena perundungan di sekolah yang terjadi sepanjang tahun 2019 sampai 2020, diantaranya adanya siswi SMA di Pekanbaru yang mengalami perundungan secara fisik sampai mengakibatkan patahnya tulang hidung korban, seorang siswi SMP di Malang, Jawa Timur yang mengalami perundungan sampai pada kekerasan fisik dan menyebabkan 2 jari tangannya diamputasi, adanya siswa Sekolah Dasar di Grobogan, Jawa Tengah yang mengalami perundungan verbal sampai menyebabkan depresi berat yang menyebabkan korbannya takut untuk ke sekolah. Beberapa fenomena merupakan sebagian contoh kecil dari maraknya perundungan yang terjadi dalam lingkup sekolah.

Kasus perundungan (*bullying*) di sekolah sudah menjadi permasalahan mendunia, tidak hanya di Indonesia saja tetapi juga di negara-negara maju seperti Amerika dan Jepang. Namun, kasus ini masih kurang mendapat perhatian karena dianggap menjadi hal yang sudah biasa terjadi di sekolah. Perundungan (*bullying*) dapat menyebabkan dampak bagi korban, mulai dari gangguan psikologis, trauma, bahkan tidak mau bergaul dan bahkan yang paling parah adalah kasus bunuh diri. Penyebab kasus pelaku perundungan (*bullying*) disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah kurang perhatian dari orang tua yang menunjukkan kemampuan dirinya dalam jalan kekerasan, keinginan berkuasa karena merasa dirinya kuat dan anggapan orang lemah pantas di-*bully*. Menurut penelitian Wiyani (2012), menunjukkan siswa yang menjadi korban akan mengalami kesulitan dalam bergaul, merasa takut datang ke sekolah sehingga absensi mereka tinggi dan tertinggal pelajaran, mengalami kesulitan berkonsentrasi dalam mengikuti

pelajaran, dan kesehatan mental maupun fisik mereka terpengaruh baik itu dalam jangka pendek maupun panjang. Perundungan yang kerap terjadi dalam lingkup sekolah juga mengakibatkan dampak jangka panjang yang sangat menakutkan yakni terjadinya masalah emosional dan tingkah laku korban sampai pada taraf korbannya bunuh diri, hal ini sejalan dengan hasil penelitian Prasetyo (2011) yang menyebutkan bahwa korban *bullying* dapat menderita stress atau depresi sampai pada bunuh diri. Dengan kata lain, perundungan (*bullying*) di sekolah merupakan gejala yang berdampak buruk pada pelajar yang terlibat.

Penguatan pendidikan karakter tentunya sangat perlu dilakukan guna meminimisir kasus perundungan terutama yang terjadi di lingkungan sekolah. Dengan adanya penguatan pendidikan karakter, diharapkan para siswa menyadari bahaya dari perundungan (*bullying*) yang marak terjadi di lingkungan sekolah. Pendidikan karakter memuat banyak nilai-nilai yang patut untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah nilai dari pendidikan karakter berbasis kearifan lokal yaitu *tepo seliro*. *Tepo seliro* adalah sikap menghargai, menghormati satu sama lain yang diambil dari bahasa Jawa.

Perlunya sebuah media yang komunikatif dan dapat diterima oleh semua kelompok menjadikan pentingnya pengembangan sebuah media gambar untuk mengakomodasi ketertarikan peserta didik dalam rentang usia sekolah menengah pertama. Anti Perundungan *Pocket Book* (ANPOOK) menjadi media yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter berbasis kearifan lokal *tepo seliro* terhadap peserta didik dan dapat diterima oleh semua kelompok peserta didik sekolah menengah pertama. Media ini juga merupakan sebuah upaya preventif yang nyata untuk menekan nilai pendidikan karakter berbasis kearifan lokal *tepo seliro*.

## **METODE**

Penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian pengembangan (*research and development*), yang berdasarkan model 4-D. Model ini terdiri dari 4 tahap pengembangan yaitu *define, design, develop, dan disseminate* atau diadaptasikan menjadi model 4-P, yaitu pendefinisian, perancangan, pengembangan, dan

penyebaran (Thiagarajan, dkk. 1974: 5). Perangkat yang dikembangkan berdasarkan model 4-D ini adalah sebuah Anti Perundungan *Pocket book* (ANPOOK). Hasil dari pengembangan perangkat pembelajaran disampaikan secara deskriptif. Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini yakni : (1) Observasi Pada tahap ini dilakukan observasi di SMP N 6 Yogyakarta. Pada saat observasi tim peneliti juga melakukan wawancara bersama dengan Kepala Sekolah dan Guru PPKn yang bertugas di sekolah tersebut (2) Angket (*cuisionare*), angket yang digunakan dalam proses pengumpulan data adalah angket untuk ahli media dan ahli materi, (3) Studi Literatur Studi literatur dalam pengumpulan data untuk penelitian ini dimaksudkan sebagai data untuk mengembangkan *pocket book* (buku saku) sebagai media pembelajaran antiperundungan yang bertujuan untuk bahan penunjang internalisasi pendidikan karakter berbasis kearifan lokal tepo seliro. Studi literatur dapat berasal dari buku-buku terkait kearifan lokal, Hak Asasi Manusia (HAM) dan perundungan, jurnal ilmiah ataupun artikel ilmiah terkait, serta dokumen-dokumen lain yang relevan.

Data pada penelitian ini dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif yaitu dengan pendekatan deskriptif dan untuk analisis kuantitatif hasil uji coba menggunakan teknik analisis *Sign Test*. Uji Tanda digunakan untuk menguji hipotesis dengan dua komparatif dan datanya berbentuk data ordinal, sedangkan teknik analisis data angket ini dihitung dengan menggunakan skala likert dengan 5 skala. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata antara lain: Sangat setuju, Setuju, Ragu-ragu, Tidak setuju, Sangat tidak setuju, Selalu, Sering, Kadang-kadang, Tidak pernah (Sugiyono, 2015: 165). Dalam penelitian ini skala likert menggunakan 5 skala yakni: sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Persentase penilaian sebagai berikut (Riduwan, 2011).

Subjek penelitian yaitu kelas VIII SMP Negeri 6 Yogyakarta. Uji coba dilakukan untuk mendapatkan respon siswa terhadap Anti Perundungan *Pocket book*. Data yang terkumpul adalah data hasil penilaian berupa tanggapan dan komentar para ahli pengembangan media pembelajaran, guru mitra pada ujicoba

lapangan, dan uji coba respon peserta didik. Nasoetion, dkk. (2007) menjelaskan bahwa analisis validitas dilakukan terhadap buku siswa, panduan guru dan panduan siswa dihitung dengan menggunakan rumus:

$$n \text{ kevalidan} = \frac{\text{Jumlah Skor Perolehan}}{n \times \text{Bobot ztertinggi}} \times 100\%$$

Pemberian makna dan pengambilan keputusan menggunakan ketetapan seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Konversi Tingkat Pencapaian

Tingkat Ketercapaian	Kualifikasi	Keterangan
85% - 100%	Baik Sekali	Tidak perlu direvisi
75% - 84%	Baik	Tidak perlu direvisi
65% - 74%	Cukup Baik	Direvisi
55% - 64%	Kurang Baik	Direvisi
0% - 54%	Sangat Kurang	Direvisi

(Sumber: Adaptasi Arikunto, 2003)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

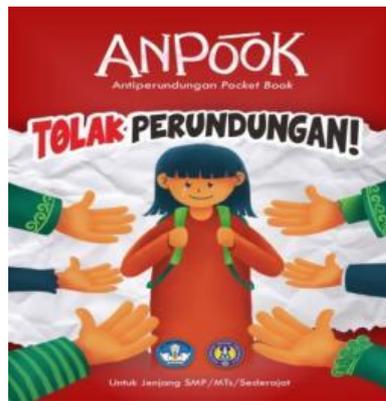
Tahap pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tahap Pendefinisian. Pada tahap ini dilakukan observasi di SMP N 6 Yogyakarta. Pada saat observasi tim peneliti juga melakukan wawancara bersama dengan Kepala Sekolah dan Guru PPKn yang bertugas di sekolah tersebut. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diperoleh informasi sebagai berikut:

1. SMP N 6 Yogyakarta menerapkan pendidikan karakter dalam proses pembelajaran di sekolah.
2. Sejauh ini pembelajaran PPKn khususnya bahasan tentang pendidikan karakter dalam materi Hak dan Kewajiban warga negara dijelaskan menggunakan buku teks PPKn dan materi ajar dari guru mata pelajaran. Sekolah belum menggunakan media pembelajaran mengenai topik-topik pendidikan karakter dalam pembelajaran.

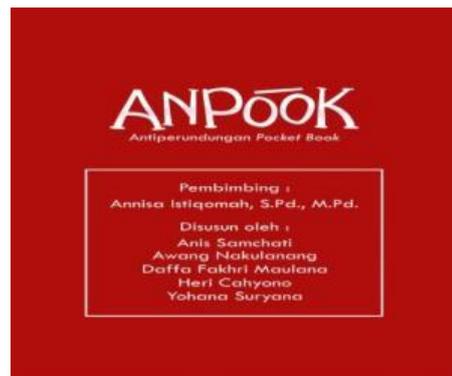
3. Pada saat pembelajaran PPKn sebagai pendidikan karakter siswa cenderung mengantuk dan bosan karena guru lebih mendominasi memberikan materi walaupun sudah diterapkan kurikulum 2013.
4. Materi mengenai Perundungan (*bullying*) dapat dikembangkan pada pembelajaran PPKn tingkat SMP/MTs sederajat.
5. Pemberian materi wawasan mengenai pendidikan karakter antiperundungan dapat diberikan disaat pembelajaran PPKn berlangsung atau oleh kegiatan non-pembelajaran yang diselenggarakan di sekolah.
6. Jawaban siswa kelas VIII ketika ditanya tentang nilai-nilai antiperundungan (*anti-bullying*) mereka menjawab sudah mengerti karena banyak sekali kasus yang mereka ketahui dari fenomena tersebut. Selanjutnya untuk pertanyaan apakah materi nilai-nilai antiperundungan telah diberikan dalam pembelajaran sebagian menjawab belum dan sebagian sudah tetapi tidak berasal dari mata pelajaran PPKn. Kemudian untuk pertanyaan apakah perundungan boleh dilakukan para siswa menjawab tidak boleh. Selanjutnya pertanyaan mengenai apakah materi pendidikan karakter antiperundungan selama ini memotivasi siswa untuk menjauhi tindakan tersebut para siswa banyak menjawab belum. Berdasarkan hasil tersebut maka disusun analisis kebutuhan atas permasalahan yang dihadapi oleh guru yakni untuk memberikan pemahaman nilai-nilai karakter antiperundungan berbasis nilai kearifan lokal melalui PPKn sebagai pendidikan karakter dalam kehidupan sehari-hari.

Setelah melalui tahap pendefinisian kemudian dilakukan perancangan. Pada tahap ini dilakukan perancangan media pembelajaran dengan mengacu pada tahap *define* (pendefinisian). Peneliti merumuskan media pembelajaran akan dirancang dengan desain *pocket book* (buku saku) yang diberi nama ANPOOK (Anti perundungan *Pocket Book*). Pemilihan desain buku saku ini merupakan inovasi dalam pembelajaran pendidikan karakter persekolahan melalui mata pelajaran PPKn sebagai salah satu mata pelajaran yang mengusung visi pendidikan karakter agar peserta didik lebih tertarik dalam mempelajari pendidikan karakter berbasis nilai kearifan lokal. Adapun kelebihan buku saku menurut Susilana sebagaimana dikutip Anjelita R, dkk (2018) adalah: (1) dapat

menyajikan pesan atau informasi dalam jumlah yang banyak, (2) pesan atau informasi dapat dipelajari oleh siswa sesuai dengan kebutuhan minat dan kecepatan masing-masing, (3) dapat dipelajari kapan dan dimana saja karena mudah dibawa, (4) akan lebih menarik apabila dilengkapi dengan gambar dan warna, (5) perbaikan/revisi mudah dilakukan.



Cover depan ANPOOK



Perancang ANPOOK

**DAFTAR ISI**  
ANPOOK

Apa itu Perundungan? .....	1
Pengertian Perundungan .....	2
Jenis-jenis Perundungan .....	3
Kasus Kekerasan oleh Anak di Institusi Pendidikan .....	8
Kasus Kekerasan oleh Anak Berdasar Jenjang Pendidikan .....	9
Nilai Kearifan Tepas Setiro dan Perundungan .....	10
Hubungan Perundungan dengan Nilai Tepas Setiro .....	11
Kenapa Aksi Perundungan Berbahaya? .....	12
Langkah Mencegah dari Perundungan .....	20
Cara Cerdas untuk Kamu .....	22
Lapor Perundungan .....	25

Daftar Isi ANPOOK

**Apa itu Perundungan?**

**PENGENALAN**

**HALO** teman-teman warga negara yang baik, kali ini kita akan membahas salah satu fenomena yang sedang banyak terjadi di masyarakat terutama lingkungan sekolah. Tahu kah kalian bahwa aksi perundungan (*bullying*) di Indonesia dalam kondisi yang memprihatinkan?

Semua ini harus segera kita lawan, salah satunya dengan memahami dengan baik apa sih itu perundungan, bagaimana bahayanya, dan bagaimana cara mencegahnya, nah itu semua akan dikupas dalam buku saku ini.

Ayo kita ikuti dan pahami seluruh isi buku ini ya, dengan tujuan kita memahami secara utuh mengenai perundungan, karena perlu kita ketahui bahwa perundungan merupakan fenomena kekerasan yang menyebabkan perpecahan persahabatan diantara kita semua disertai dampak yang membahayakan bahkan sampai memecah belah persatuan bangsa.

1

Bagian Pengenalan ANPOOK

### PENGERTIAN PERUNDUNGAN (BULLYING)

Perundungan atau yang lebih kita kenal dengan *bullying* oleh beberapa orang merupakan tindakan yang tidak baik untuk dilakukan karena dapat menyakiti seseorang baik secara fisik maupun psikis.

Perundungan ini dikatakan sebagai tindakan kekerasan dari mereka yang merasa memiliki kekuatan atau kekuasaan kepada mereka yang dianggap lemah.

Perundungan bisa terjadi dimana saja, termasuk di lingkungan pendidikan seperti sekolah sekalipun.

Nah perundungan ini juga memiliki banyak bentuk, ada yang sifatnya fisik, verbal, relasional, dan ada juga yang sifatnya *cyber bullying* dan pelecehan seksual.

2

Bagian Isi ANPOOK

### YUK KENALI JENIS-JENIS BULLYING



#### 1 Perundungan Fisik

Perundungan Fisik dapat berupa pukulan, tendangan, ataupun tindakan lain yang melukai secara fisik.

Bagian Isi ANPOOK

### YUK KENALI JENIS-JENIS BULLYING



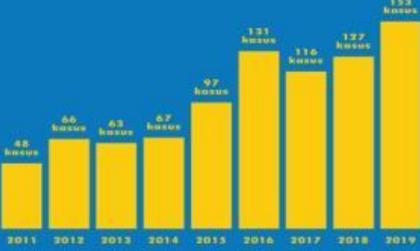
#### 3 Perundungan Relasional

Perundungan Relasional dapat berupa pengabaian, cibiran, pengucilan, dan tindakan lain yang bertujuan untuk memisahkan seseorang dari komunitasnya.

5

Bagian Isi ANPOOK

### JUMLAH KASUS KEKERASAN OLEH ANAK DI INSTITUSI PENDIDIKAN, 2011-2019

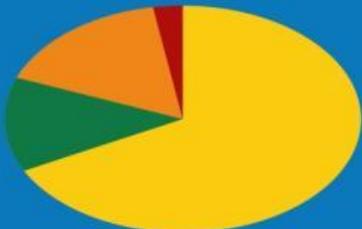


Tahun	Jumlah Kasus
2011	48 kasus
2012	46 kasus
2013	63 kasus
2014	67 kasus
2015	97 kasus
2016	131 kasus
2017	116 kasus
2018	127 kasus
2019	153 kasus

Berdasarkan laporan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) diatas, bahwa dari tahun 2011-2019 menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan di institusi pendidikan yang meliputi perundungan (*bullying*) dalam berbagai bentuk mengalami kenaikan setiap tahunnya, meskipun pada tahun 2017 mengalami penurunan akan tetapi di tahun berikutnya kembali meningkat.

Bagian Isi ANPOOK

### JUMLAH KASUS KEKERASAN OLEH ANAK BERDASAR JENJANG PENDIDIKAN



Jenjang Pendidikan	Jumlah Kasus	Persentase
SD/MI/Sederajat	25 kasus	67,3%
SMP/MTs/Sederajat	5 kasus	13,5%
SMA/MA/Sederajat	6 kasus	16,3%
Perguruan Tinggi	1 kasus	2,7%

Berdasarkan jenjang pendidikan, mayoritas terjadi di jenjang SD/MI/Sederajat yaitu sebanyak 25 kasus atau mencapai 67,3% jenjang SMP/MTs/Sederajat sebanyak 5 kasus atau 13,5%, jenjang SMA/MA/Sederajat sebanyak 6 kasus atau 16,3% dan jenjang perguruan tinggi sebanyak 1 kasus atau 2,7%.

Bagian Isi ANPOOK

### KENAPA AKSI PERUNDUNGAN BERBAHAYA?

**Perundungan Menimbulkan Ketakutan dan Gangguan Psikologis**

Tahukah kalian tindakan perundungan dapat menyebabkan efek negatif pada kejiwaan sahabat ataupun teman kita, mereka akan merasa ketakutan atau dapat mengalami trauma, bahkan terdapat beberapa kasus yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.

**INFO**

Penelitian *National Association of School Psychologist* menyampaikan bahwa setiap hari di Amerika Serikat ada 160.000 murid yang bolos sekolah karena takut dirundung oleh temannya.

Wah, bahaya sekali ya dampak yang ditimbulkan dari perilaku perundungan.

Yuk mari berperilaku baik kepada siapapun. Mulai sekarang kita budayakan peduli dan menghargai sesama ya 😊

1

Bagian Isi ANPOOK

■ **Perundungan Menimbulkan Korban Jiwa**  
Perundungan yang marak dilakukan terhadap teman kalian itu sangat berbahaya loh, tahukah kalian perundungan dapat menyebabkan nyawa seseorang melayang. Memilukan sekali bukan? Yukk **STOP** perundungan dan jangan sampai kalian menyebabkan seseorang mengalami masa kesulitan akibat perundungan. Yukk **STOP** perundungan dan perbanyak berbuat kebaikan 😊

■ **Perundungan Memecah Belah Persatuan Bangsa**  
Tahukah teman-teman, bahwa menjadi warga negara Indonesia yang baik kita diharuskan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, baik dalam lingkungan keluarga atau sekolah. Di lingkungan sekolah apabila kita menjaga hubungan dengan teman agar tetap baik maka sebenarnya kita telah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dimulai dari hal-hal yang kecil. Namun, apabila kita merundung teman-teman, artinya apa yang kita berbuat sebenarnya berbahaya sekaligus mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Bagian Isi ANPOOK

■ **Perundungan tidak Mencerminkan Warga Negara yang Baik**  
**Perundungan dilarang oleh Norma Hukum**  
Halo sahabat warga negara yang baik, tahukah kalian bahwa tindakan perundungan atau *bullying* itu dilarang oleh norma hukum? Kita ikuti ya materi dibawah ini.

**1. Pasal 54 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**  
Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau/ pihak lain.

**2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan**  
Dalam peraturan ini penjelasannya lebih lengkap lagi, mulai dari upaya pencegahan, penanggulangan, sampai dengan sanksi.

Bagian Isi ANPOOK

Tindakan Kekerasan termasuk aksi perundungan yang dilakukan oleh pendidik atau guru, tenaga kependidikan (karyawan di lingkungan sekolah), sesama peserta didik, dan pihak lain adalah tindakan yang **DILARANG** untuk dilakukan, perlu diketahui bahwa setiap anak **WAJIB** mendapatkan perlindungan dari satuan pendidikan (misalnya sekolah Anda) terhadap segala bentuk kekerasan.

Tahukah kalian, kekerasan apa saja yang dapat terjadi di lingkungan sekolah?

- 1 **Kekerasan Fisik**
- 2 **Kekerasan Psikis**
- 3 **Kejahatan Seksual**
- 4 **Kejahatan Lainnya**

Bagian Isi ANPOOK

Nah Sahabat Warga Negara yang Baik, perlindungan yang harus dilakukan oleh setiap sekolah tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang **PERLINDUNGAN ANAK**.

Tahukah kalian, bahwa budaya empati yang ada dalam nilai *Tepo Seliro* merupakan bentuk sikap yang dapat mencegah aksi perundungan yang dapat membahayakan kita. Jangan berhenti untuk saling menghargai dan berempati ya...

Bagian Isi ANPOOK

Nah... setelah kita mengikuti pembahasan di atas mengenai berbagai peraturan hukum yang melarang adanya aksi perundungan maka kita menjadi lebih tahu dan paham terhadap hukum yang berlaku di Indonesia.

Sebagai warga negara yang baik perilaku sadar dan patuh hukum merupakan sikap yang wajib kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, memahami aturan hukum akan membuat kita lebih berhati-hati dalam bertindak, termasuk dalam mencegah perilaku perundungan atau *bullying*.

Ayo saling mengingatkan untuk tetap berteman dengan baik ya. Agar kita dapat belajar dengan aman dan nyaman.

**LAWAN DAN TOLAK PERUNDUNGAN DENGAN NILAI *TEPO SELIRO***

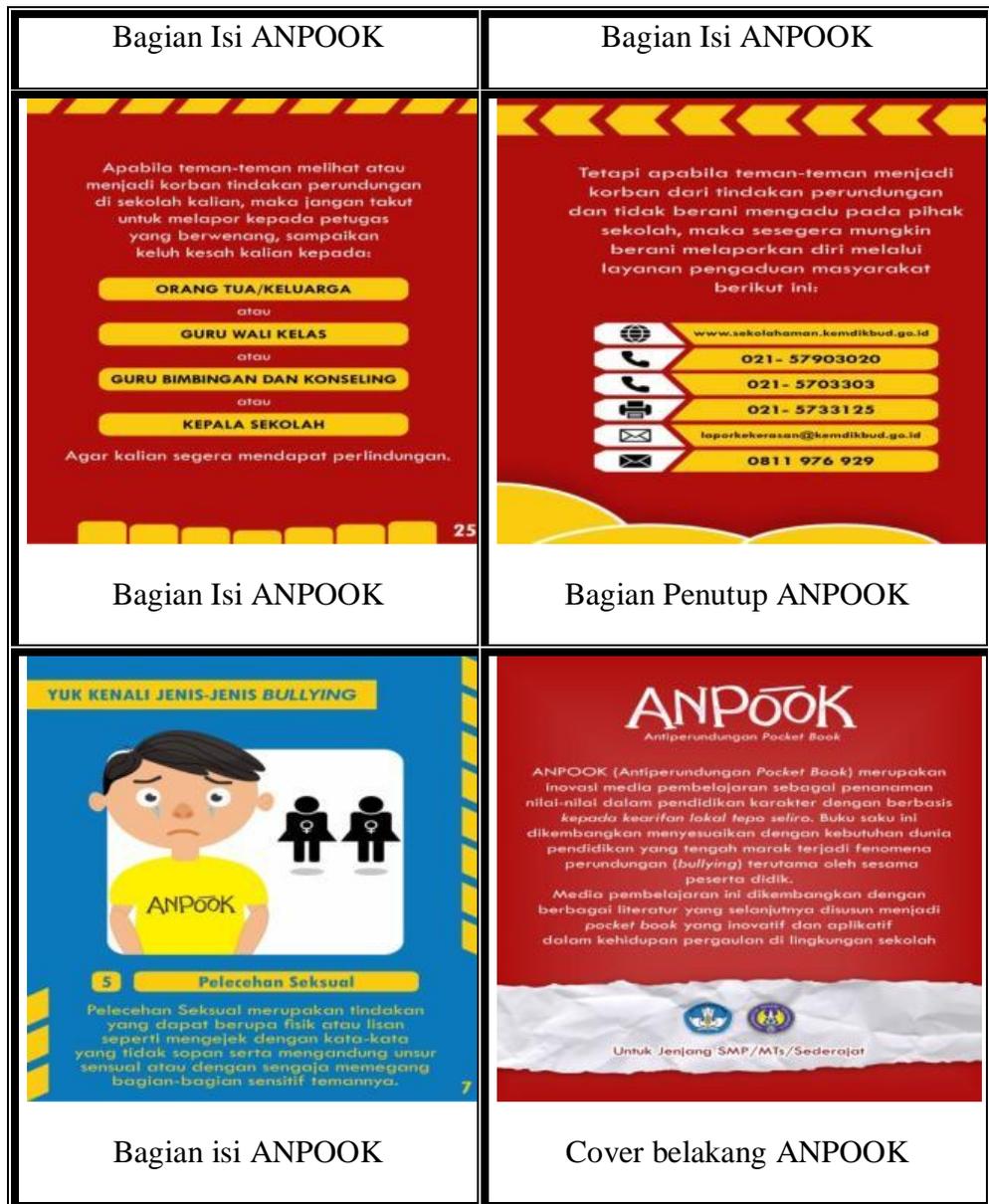
**BUDAYAKAN EMPATI !!!  
STOP PERUNDUNGAN !!!**

Ayo bersama-sama untuk menanamkan nilai *Tepo Seliro* dan berempati dengan orang lain, mari saling menghargai dan menjaga sesama ya.

Semoga kamu termasuk orang-orang baik yang selalu menebar kebaikan 😊

**"MENJAGA DIRI SENDIRI, MENJAGA SESAMA"**

<p>Bagian Isi ANPOOK</p>	<p>Bagian Isi ANPOOK</p>
<p>Selain dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, pada tahun 2015 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Mendikbud) sebagai Lembaga yang membawahi sekolah-sekolah di seluruh Indonesia juga menerbitkan suatu norma hukum untuk mengatasi aksi perundungan dan kekerasan di sekolah.</p> <p>Mendikbud menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Perlu kita ketahui bahwa Peraturan Mendikbud ini lebih luas dalam melakukan pengaturan mengenai tindak kekerasan yang dilakukan di lingkungan pendidikan. Antara lain:</p>  <p>19</p>	<p><b>6 Langkah Cegah Kamu dari Perundungan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Tetap percaya diri dan hadapi tindakan <i>bullying</i> dengan berani.</li> <li>2 Simpan semua bukti <i>bullying</i> yang bisa kamu laporkan kepada orang yang dekat dan kan percaya, seperti guru, orang tua, ataupun langsung kepada pihak Kepolisian (khususnya <i>cyber bullying</i>).</li> <li>3 Berani berbicara dan berani melaporkan.</li> <li>4 Berbaurlah dengan teman yang membuat kamu percaya diri dan selalu berpikir positif.</li> <li>5 Tetap berfikir positif. Tidak ada yang salah deng dirimu, selama kamu tidak merugikan orang lain. Tetaplah jadi diri sendiri dan lawan rasa takutmu dengan percaya diri.</li> <li>6 Implementasikan Nilai Kearifan <i>Tepo Seliro</i> sebagai wujud menjadi warga negara yang baik.</li> </ol> <p>* Sumber poin 1-5, KPAI</p>
<p>Bagian Isi ANPOOK</p>	<p>Bagian Isi ANPOOK</p>
<p>Tindakan perundungan sudah jelas dilarang oleh norma hukum kita ya dan sebagai warga negara yang baik kita harus patuh terhadapnya, maka dari itu jadilah siswa yang menebarkan nilai-nilai positif bagi yang lain untuk menghentikan tindakan perundungan, salah satunya dengan berteman yang baik, saling memberikan nilai-nilai positif satu sama lain.</p> <p>Yukk kita mulai dari diri kita sendiri 😊</p>	<p><b>CARA CERDAS UNTUK KAMU</b></p> <p><b>A. CEGAH PERUNDUNGAN</b></p> <p>Tahukan kalian bahwa setiap manusia yang dilahirkan di bumi ini memiliki hak untuk merdeka atas apa yang kamu yang ingin lakukan namun kalian tidak boleh lupa yaa bahwa kebebasanmu itu juga dibatasi oleh kebebasan orang lain. Kita juga memiliki kebebasan untuk mengekspresikan apa yang kita sukai, namun lagi-lagi jangan sampai merenggut kesenangan orang lain yaa.</p> <p>Ayo mulai menghargai orang lain agar kita juga dihargai, jangan menyakiti apabila kita tidak ingin disakiti, mari saling berempati dengan sesama kita, budayakan untuk saling menjaga sesama 😊</p> <p>2</p>
<p><b>B. Berteman dengan Sehat Cermat Menjadi Warga Negara yang Baik</b></p> <p><b>Langkah Berteman Sehat</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Saling menasehati</b> Teman yang baik harus saling menasehati yaa dan saling memberikan energi positif. Apabila temanmu tertimpa masalah berikan solusi terbaik menurut versimu yaa, ajak dia bangkit dan beri dukungan yang baik. Namun apabila temanmu memberikan pengaruh yang negatif kamu harus bisa menolak.</li> <li>2. <b>Bisa diajak kerja sama</b> Pilihlah teman yang mampu untuk diajak kerja sama, memiliki semangat dan minat yang sama untuk bersama-sama dalam kebaikan. Kalau kalian memiliki teman yang demikian pasti masalah-masalah yang kamu miliki akan terasa mudah diselesaikan.</li> </ol> <p>2</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. <b>Menerimamu apa adanya</b> Teman yang baik akan menerima segala kekurangan dan kelebihanmu, ia tidak akan menuntut dirimu menjadi orang lain.</li> <li>4. <b>Tidak suka berkata-kata kasar</b> Yukk kenali temanmu dari apa yang sering ia katakan, karena orang yang baik akan cenderung menggunakan kata-kata yang baik, dan sebaliknya, orang yang kurang baik akan sering menggunakan kata-kata kotor. Dari bahasanya kamu bisa mengeseperti apa karakter temanmu.</li> <li>5. <b>Jujur</b> Kejujuran adalah karakter terpenting yang harus dimiliki seseorang dimanapun ia berada dan bersah dengan siapapun dia. Dalam berteman kita harus membiasakan bersikap jujur dan saling terbuka, karena apabila kita melakukan kebohongan maka akan bisa menimbulkan konflik yang bisa berujung pada tindakan perundungan.</li> </ol> <p>* Sumber KPAI</p>



Penelitian pengembangan ini telah menghasilkan produk berupa Anti Perundungan *Pocket book* yang telah melewati validasi untuk mengetahui kelayakan. Setelah media dinyatakan layak oleh *validator* produk ini kemudian diujicobakan kepada peserta didik kelas VIII SMPN 6 Yogyakarta untuk mengetahui respon peserta didik terhadap produk hasil penelitian.

Data penilaian ahli materi terhadap media pembelajaran ANPOOK diperoleh melalui angket. Validasi pertama berupa komentar dari ahli materi, yaitu materi dalam ANPOOK ini sudah cukup baik. Berdasarkan penilaian dan

komentar ahli materi, peneliti kemudian melakukan revisi. Berdasarkan hasil penghitungan dengan menggunakan rumus presentase tingkat pencapaian untuk isi dan tujuan sebesar 83% dan untuk pembelajaran juga 82% dengan rata rata 83% presentase ini menunjukkan kategori layak dengan revisi untuk mematangkan materi dalam ANPOOK.

Data yang diperoleh dari ahli media pembelajaran berupa data kualitatif dalam bentuk komentar dan saran terhadap media pembelajaran ANPOOK. Hasil validasi oleh ahli media pembelajaran dengan skor setiap pernyataan serta memberi komentar dan saran secara tertulis maupun tidak tertulis terhadap ANPOOK. Hasil penilaian dari ahli media terhadap ANPOOK adalah sumber-sumber belum dituliskan baik sumber gambar atau data, komposisi warna terlalu cerah sehingga harus seimbang. Hasil presentase validasi ini diperoleh skor 60% untuk media dan 71% untuk tampilan media dengan rata-rata 65%. Skor 65% setelah dikonversi dengan tabel skala penilaian dinyatakan bahwa media ini layak.

Setelah peneliti melakukan revisi media versi pertama yang berdasarkan masukan dari validator kemudian peneliti melakukan validasi tahap kedua untuk memvalidasi kelayakan media ANPOOK. Data validasi tahap kedua dari ahli materi memperoleh presentase 92% untuk kualitas isi dan tujuan serta 83% untuk pembelajaran dengan rata-rata 87% setelah dikonversikan pada tabel konversi mendapatkan kualifikasi sangat layak tanpa revisi. Data validasi tahap kedua dari ahli media memperoleh presentase 85% untuk media dan 92% untuk tampilan media dengan rata-rata 88% setelah dikonversikan pada tabel konversi mendapatkan kualifikasi sangat layak tanpa revisi.

Hasil revisi produk penelitian berupa ANPOOK ini menghasilkan produk yang siap untuk diuji coba kan kepada peserta didik. Subjek dari uji coba ini adalah siswa kelas VIII SMP N 6 Yogyakarta. Data hasil respon peserta didik dapat dilihat dalam tabel 2 berikut.

Tabel 2. Data Respon Siswa

Statistics							
		Media_mudah_ digunakan	Media_dapat _digunakan_ mandiri	bahasa_mud ah_dipahami	media_dapat _digunakan_ dimana_saja	tampilan_ media_m enarik	karakter_yang_digunakan _sesuai
N	Valid	28	28	28	28	28	28
	Missing	0	0	0	0	0	0
Mean		3,64	3,75	3,57	3,50	3,54	3,64
Std. Error of Mean		,138	,083	,108	,131	,096	,106
Median		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Mode		4	4	4	4	4	4
Std. Deviation		,731	,441	,573	,694	,508	,559
Variance		,534	,194	,328	,481	,258	,312
Range		3	1	2	2	1	2
Minimum		1	3	2	2	3	2
Maximum		4	4	4	4	4	4

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa rata-rata peserta didik memberikan skor (3,64), (3,75), (3,57), (3,50), (3,54), dan (3,64) untuk kesesuaian dari aspek materi. *Range* dari data hasil penelitian tidak memiliki rentang yang sangat jauh hanya pada kisaran 2-3. Std. Deviasi dari data diatas juga tidak memiliki rentang yang jauh, berdasatkan data diatas Std. Deviasi hanya berkisar antara 0,441-0,731 artinya bahwa sebaran data antar individu tidak berbeda sekali atau tidak ada kesenjangan yang terlalu jauh dalam data tersebut.

Selanjutnya adalah data respon siswa mengenai media ANPOOK dapat dilihat dalam tabel 3.

Tabel 3. Data Respon Siswa

Statistics							
		Media_mu dah_digun akan	Media_da pat_digun akan_man diri	bahasa_m udah_dipa hami	media_da pat_digun akan_dima na_saja	tampilan_ media_me narik	karakter_y ang_digun akan_sesu ai
N	Valid	28	28	28	28	28	28
	Missin g	0	0	0	0	0	0
Mean		3,64	3,75	3,57	3,50	3,54	3,64
Std. Error of Mean		,138	,083	,108	,131	,096	,106
Median		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Mode		4	4	4	4	4	4
Std. Deviation		,731	,441	,573	,694	,508	,559
Variance		,534	,194	,328	,481	,258	,312
Range		3	1	2	2	1	2
Minimum		1	3	2	2	3	2
Maximum		4	4	4	4	4	4

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa rata-rata peserta didik memberikan skor (3,64), (4,75), (4,57) , (3,50), (3,54), (3,64) untuk penilaian aspek media. *Range* dari data hasil penelitian tidak memiliki rentang yang sangat jauh hanya pada kisaran 1-2. Std. Deviasi dari data diatas juga tidak memiliki rentang yang jauh, berdasarkan data diatas Std. Deviasi hanya berkisar antara 0,083 – 0,138 artinya bahwa sebaran data antar individu tidak berbeda sekali atau tidak ada kesenjangan yang terlalu jauh dalam data tersebut. Setelah diuji cobakan pada siswa dan guru secara umum menghasilkan hal yang positif, berdasarkan hasil analisis respon siswa terhadap media pembelajaran ANPOOK diketahui bahwa respon siswa dan guru sangat baik terhadap media pembelajaran ini.

Berdasarkan tahapan pengembangan yang dilakukan dengan menggunakan model 4-D, dari dari hasil analisis data yang diperoleh melalui uji validasi, uji perorangan, maupun uji lapangan dapat disimpulkan bahwa perangkat pembelajaran yang dikembangkan merupakan perangkat pembelajaran yang valid dan dapat digunakan dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik.

## SIMPULAN

Telah dihasilkan media pembelajaran anti perundungan berbasis kearifan lokal dalam bentuk komik yang valid dan layak untuk digunakan dengan model pengembangan 4-D pada siswa kelas VIII SMPN 6 Yogyakarta. Hal ini diperoleh berdasarkan hasil uji ahli materi, presentase media pembelajaran memperoleh presentase 92% untuk kualitas isi dan tujuan serta 8% untuk pembelajaran dengan rata-rata 87% setelah dikonversikan pada tabel konversi mendapatkan kualifikasi sangat layak tanpa revisi. Hasil uji coba untuk ahli media memperoleh presentase 85% untuk media dan 92% untuk tampilan media dengan rata-rata 88% setelah dikonversikan pada tabel konversi mendapatkan kualifikasi sangat layak tanpa revisi. Maka dapat dikatakan bahwa media pembelajaran ANPOOK atau Anti Perundungan *Pocket book* yang dikembangkan merupakan media pembelajaran yang valid dan layak untuk digunakan untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter berbasis kearifan lokal *tepo seliro*.

## REFERENSI

- Adilla, N. (2009). Pengaruh kontrol sosial terhadap perilaku bullying pelajar di Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Krimonologi Indonesia*, 5(1), 56-66.
- Anjelita, R., Syamswisna, & Ariyati, E. (2018). Pembuatan buku saku sebagai media pembelajaran pada materi jamur Kelas X SMA. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 7(7), 1-8, e-ISSN: 2715-2723.
- Arikunto, S. (2003). *Dasar-dasar evaluasi pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Azwar, W., & Permata, S. Y. (2017). Fenomena bullying siswa: studi tentang motif perilaku bullying siswa di SMP Negeri 01 Painan, Sumatera Barat. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10(2), 333-367.
- Eko, P. A. B. (2011). Bullying di sekolah dan dampaknya bagi masa depan anak. *Jurnal Pendidikan Islam: El-Tarbawi*, 9(1), 19-26.
- KPAI. (2020). Sejumlah kasus bullying sudah warnai catatan masalah anak di Awal 2020, begini kata komisioner KPAI. Diakses dari <https://www.kpai.go.id/berita/sejumlah-kasus-bullying-sudah-warnai-catatan-masalah-anak-di-awal-2020-begini-kata-komisioner-kpai> (Diakses pada 1 November 2020).
- Puthut, D. P. N. (2020). 4 kasus bullying di sejumlah daerah, dibanting di paving, amputasi hingga korban depresi.

<https://regional.kompas.com/read/2020/02/08/06060014/4-kasus-bullyingdi-sejumlah-daerah-dibanting-ke-paving-amputasi-hingga?page=all#page2> (diakses pada 25 November 2020 pukul 13.00 WIB).

- Riduwan. (2011). *Skala pengukuran variabel-variabel penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metodologi penelitian dan pengembangan (Research and Development/R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Thiagarajan, S., Semmel, D. S., & Semmel, M. I. (1974). *Instructional development for training teachers of exceptional children*. Minneapolis. Minnesota: Leadership Training Institute/Special Education, University of Minnesota.
- Tim Sejiwa. (2008). *Bullying: panduan bagi orang tua dan guru mengatasi kekerasan di sekolah dan lingkungan*. Jakarta: Grasindo.
- Wiyani, N. A. (2012). *Save our children from school bullying*. Yogyakarta: AR-RUZZ Media.
- Yamin, A., Shalahudini, I., Rosidin, U., & Somantri, I. (2011). *Pencegahan perilaku bullying pada siswa-siswi SMPN 2 Tarogong Kidul Kabupaten Garut*. Sumedang: Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran.
- Yusuf, H., & Fahrudin, A. (2012). Perilaku bullying: assessment multidimensi dan intervensi sosial. *Jurnal Psikologi Undip*, 11(2).
- Zakiah & Santoso. (2017). Faktor yang mempengaruhi remaja dalam melakukan bullying. Sumedang. *Jurnal Penelitian & PPM*, 1(2), 40-41.

# Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan di Era Disrupsi

Delfiyan Widiyanto<sup>1</sup>, Annisa Istiqomah<sup>2</sup>

[delfiyanwidiyanto@untidar.ac.id](mailto:delfiyanwidiyanto@untidar.ac.id)<sup>1</sup>, [annisa.istiqomah@uny.ac.id](mailto:annisa.istiqomah@uny.ac.id)<sup>2</sup>

## Abstrak

Tujuan Penulisan artikel ini adalah menjelaskan tantangan pendidikan kewarganegaraan di Era disrupsi. Era disrupsi ini hasil dari revolusi industri tahap keempat, adanya fenomena awalnya dilakukan di dunia nyata beralih ke dunia maya. Digitalisasi dan internet telah membawa perubahan yang signifikan dari peradaban dunia saat ini. Rendahnya kesadaran warga negara telah terbawa budaya berkembang, sesuatu yang hangat diperbincangkan dalam media sosial akan diikuti oleh masyarakat tanpa adanya literasi. Hal tersebutlah yang menyebabkan bergesernya budaya yang terjadi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi literatur. Pada perspektif Pendidikan Kewarganegaraan dalam menghadapi tantangan era disrupsi diperlukan adanya pengembangan nilai-nilai dasar. Hakikat dari Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pembentuk karakter dan jati diri bangsa dapat terwujud. Perlunya mengembangkan nilai-nilai dasar pada Pendidikan Kewarganegaraan, berupa ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan sosial, kompetisi, menghormati orang lain, kemerdekaan dan perdamaian serta berpegang teguh pada Pancasila sebagai jati diri bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

**Kata kunci:** Tantangan; Disrupsi; Pendidikan Kewarganegaraan.

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan telah membawa dampak dalam kehidupan manusia. Hampir seluruh lapisan masyarakat sudah mengenal dan menggunakan teknologi dan ilmu pengetahuan. Awal perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan dipengaruhi lahirnya revolusi industri di Inggris. Awal perkembangannya revolusi industri fase pertama dengan penemuan ke mekanisme produksi, kemudian berkembang ke arah produksi massal dan terintegrasi, fase ketiga memasuki keseragaman secara massal bertumpu pada komputerasi. Pada tahap keempat atau saat ini munculnya digitalisasi dan optimalisasi internet.

Era disrupsi ini hasil dari revolusi industri tahap keempat, adanya fenomena awalnya dilakukan di dunia nyata beralih ke dunia maya. Digitalisasi dan internet telah membawa perubahan yang signifikan dari peradaban dunia saat ini. Muncul *market place*, ojek *online*, media sosial dan layanan administrasi *online* sampai pada pembelajaran virtual. Dampak dari adanya era disrupsi menyasar dari beberapa sektor kehidupan bernegara, yaitu politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Batasan antara negara tidak tampak lagi untuk

saat ini sehingga membentuk warga negara global. Masyarakat tidak lagi secara wilayah, namun juga kita mengenal dengan sebutan warga *net*. Banyak juga yang menyebutkan netizen. Informasi, barang, dan jasa mudah berpindah dari antarnegara, sehingga kehidupan semakin terasa sempit.

Kemajuan sistem teknologi informasi dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap perubahan global dan signifikan bagi pola hidup masyarakat. Tantangan era disrupsi ini terjadi pada kalangan muda. Remaja atau warga negara muda yang menggunakan teknologi dan sosial media akan memiliki risiko tinggi terhadap perubahan global dan signifikan bagi pola pikir. Perubahan global dan teknologi telah membawa pola pikir masyarakat dan budaya yang berkembang. Berkembangnya budaya interaksi di dunia maya, dan mengurangi interaksi sosial dengan lingkungan nyata.

Perlu diwaspadai berbagai ancaman yang muncul dari era disrupsi secara fisik dan non fisik. Era industrialisasi mempengaruhi sistem sosial masyarakat. Komunitas masyarakat tidak lagi dilihat dalam satu proses kebudayaan yang sederhana, melainkan komunitas masyarakat dengan tingkat budaya yang kompleks. Media masa memiliki peran untuk membentuk keragaman budaya yang dihasilkan sebagai salah satu akibat pengaruh media terhadap sistem nilai, piker, dan tindakan manusia (Setiawati, 2008: 50). Fenomena *prank* yang kebablasan dan ibadah dijadikan lelucon dalam media sosial saat ini memberikan tanda-tanda lemahnya karakter bangsa dan jati diri. Masih ingatkan kalian dengan Ferdian Pelaka? topik ini ramai dibicarakan oleh warga net, menjadi *top news* di berbagai media televisi. Bisa kita lihat dari sudut pandang dampak perkembangan digitalisasi mampu merubah pola pikir (*mind set*) seseorang dalam berperilaku. Selain itu, kasus pelecehan agama yang berkembang saat ini memberikan cerminan hilangnya budaya dan kecerdasan seseorang dalam berperilaku. Berduyun-duyun pelaku meminta maaf melalui media sosial atas perbuatan yang dilakukan, namun ada yang menghilang. Situasi seperti ini yang saat ini dialami bangsa Indonesia, warga negara muda mengalami disorientasi dalam menuju masa depan.

Bangsa yang dapat berkembang untuk maju dapat dilihat dari warga negara muda. Rendahnya kesadaran warga negara telah terbawa budaya *trend*, sesuatu yang hangat diperbincangkan dalam media social akan diikuti oleh masyarakat tanpa adanya literasi. Banyak orang yang kurang memahami inti atau maksud dari perilaku yang dilakukan. Fakta yang menarik bahwa individual muncul dari adanya perkembangan era disrupsi dengan banyak orang yang asyik bermain gawai dibandingkan berinteraksi secara langsung kepada orang lain. Hal ini yang menyebabkan bergesernya budaya yang terjadi di Indonesia. Berbagai keadaan yang terjadi di Indonesia akibat dari adanya perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan menjadi tantangan bangsa Indonesia.

Fenomena disrupsi awalnya terjadi pada dunia ekonomi dan khusus di bidang bisnis. Disrupsi merupakan kondisi ketika sebuah bisnis dituntut untuk terus berkembang untuk menyesuaikan kebutuhan yang akan datang. Namun, Pada kondisi hari ini disrupsi tidak hanya berkaitan dengan dunia bisnis. Fenomena disrupsi memberikan dampak perubahan yang besar dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari struktur biaya, budaya, bahkan dapat ideologi (Prasetyo & Umi, 2018: 23). Perubahan sektor budaya terdisrupsi, yaitu perkembangan media sosial yang masif, merekonstruksi struktur budaya masyarakat. Hubungan sosial lebih terbangun dari dunia maya, sehingga menyingkirkan interaksi dunia nyata.

Tantangan globalisasi terhadap pembinaan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air di sekolah ialah globalisasi menantang kekuatan penerapan unsur jati diri bangsa Indonesia melalui agen budaya luar sekolah terutama media massa, dan beberapa kompetensi yang penting sebagai indikator seorang warga negara yang cerdas dan baik adalah memiliki kemampuan untuk melihat dan mendekati masalah sebagai warga negara global (Budimansyah, 2010: 12). Dampak dari tantangan globalisasi menjadi tantangan mata pelajaran atau mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah untuk membekali warga negara muda untuk menjadi warga negara yang baik. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjelaskan tantangan dan alternatif solusi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di era disrupsi.

## **METODE**

Metode yang digunakan adalah studi literatur. Metode literatur berupa metode dengan mengumpulkan berbagai referensi yang terkait dan relevan dengan permasalahan yang dikaji. Referensi diperoleh dari sumber primer dan sumber sekunder jurnal, buku, artikel, laporan penelitian, dan berbagai jenis informasi yang didapatkan dari situs-situs internet. Studi literatur dilakukan untuk memperkuat permasalahan yang dikaji dan menjadi dasar dalam memberikan berbagai argumen mengenai tantangan Pendidikan Kewarganegaraan di era disrupsi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pendidikan Kewarganegaraan Bagian dari Upaya Bela Negara.**

Bela negara menjadi kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia. Landasan keikutsertaan warga negara dalam bela negara terdapat pada pasal 27 ayat (3) UUD 1945 bahwa setiap warga negara diberikan hak dan kewajiban warga dalam upaya membela negara. Selain itu, ketentuan lain yang mengatur bela negara pada pasal 9 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2002 berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:

1. Pendidikan kewarganegaraan
2. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib
3. Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela dan secara wajib
4. Pengabdian secara profesi

Sikap dan perilaku warga negara yang mencintai negara kesatuan republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjalin hidup bangsa dan negara adalah sebagai upaya bela negara (Tim edukasi perpajakan direktorat Jenderal pajak, 2016: 199). Upaya bela negara berupa kehormatan bagi warga negara yang melaksanakan dengan kesadaran, tanggungjawab, dan mengabdikan kepada negara. Kesadaran bela negara menjadi modal dasar sekaligus

kekuatan bangsa dalam menjaga keutuhan, kedaulatan, serta kelangsungan hidup bangsa (Siahaan, 2016: 10).

Kesetiaan terhadap negara ditunjukkan dengan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dan budaya di Indonesia. Bela negara dimaknai secara menyeluruh bela negara meliputi membela dan mempertahankan wilayah dan kebudayaan yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan (Budiyono, 2017: 62). Mempertahankan budaya dan bahasa daerah termasuk dalam keikutsertaan warga negara dalam menjaga negara Indonesia. Kebudayaan dan nilai yang terdapat di Indonesia bermacam-macam ragamnya, dengan adanya pergeseran budaya dan masuknya ilmu pengetahuan dan teknologi dapat berdampak pada kehidupan masyarakat. Budaya dan nilai yang kuat pada warga negara dapat memperkuat identitas nasional dan karakter nasional.

### **Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pembentuk Karakter dan Jati Diri Siswa.**

Pendidikan kewarganegaraan menjadi wahana pembentuk warga negara muda untuk memiliki jati diri dan karakter bangsa. Terdapat *adagium* bahwa Pendidikan Kewarganegaraan menjadi gawang dari bangsa dan negara, hal ini tidak terlepas dari tanggung jawab besar pembentukan jati diri dan karakter bangsa diemban mata pelajaran ini. Mata pelajaran ini diajarkan dari jenjang sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Cogan (Winataputra & Dasim, 2007) mengartikan *civic education* adalah mata pelajaran dasar di sekolah digunakan untuk mempersiapkan warga negara muda, agar kelak dewasa dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Partisipasi aktif warga negara dapat dilakukan dari berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai upaya memperkenalkan bangsa dan negara kepada siswa. Menurut Bakry (2014: 3) bahwa mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan digunakan untuk mempersiapkan warga negara muda dalam mengembangkan kecintaan, kesetiaan, keberanian, untuk berkorban demi tanah air Indonesia. Memiliki pengetahuan mengenai bangsa dan negara, sebagai proses pengenalan bangsa dan negara. Karakteristik warga negara terbentuk melalui

Pendidikan Kewarganegaraan. Menurut Cogan dan Derricot (Wahab: 2011) melalui Pendidikan Kewarganegaraan dapat memberikan kontribusi pendukung perkembangan karakteristik warga negara. Kebiasaan, watak, dan budaya luhur digunakan untuk mendukung pembentukan karakteristik warga negara Indonesia. Wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke memiliki adat istiadat, budaya, dan bahasa yang berbeda, dari masing-masing daerah memiliki kontribusi terhadap bangsa dan negara yang menyebabkan lahirnya karakteristik warga negara Indonesia.

Karakteristik bangsa Indonesia selalu bercirikan pada Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan Kewarganegaraan menopang pengetahuan yang mendukung karakter siswa sesuai dengan karakteristik Pancasila dan UUD 1945. Menurut Sunarso dkk (2006: 5); Hakim (2014: 9) bahwa Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana membentuk warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, jati diri bangsa, dan pedoman hidup perlu direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pengetahuan yang berkenaan Pancasila dan keterampilan warga negara termuat dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Pembentukan karakter bangsa berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, terdapat watak tokoh pahlawan yang berkaitan dengan sikap terhadap negara dijadikan teladan dan materi dalam mata pelajaran ini. Soekarno pernah mengatakan bahwa jangan melupakan sejarah, slogan ini bukan hanya omong kosong. Perlu adanya keteladanan warga negara terhadap para pahlawan yang telah berjasa pada negara. Semakin memahami bangsa dan negara Indonesia, maka akan menumbuhkan sikap nasionalisme dan bela negara.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana membangun jiwa sosial warga negara untuk memiliki humanisasi. Menurut Murdiono (2012:47) bahwa dasar tujuan Pendidikan Kewarganegaraan menjadikan warga negara yang efektif adalah warga negara yang cakap dan memiliki kepedulian. Pembentukan warga negara selain berdasarkan pada pancasila dan UUD 1945 juga membentuk warga negara yang mampu memiliki moral atau kepedulian terhadap sesama. Rasa kebersamaan dan memiliki menjadikan persatuan dan keutuhan bangsa, namun

juga warga negara harus cakap pada keadaan sosial sekitar. Adanya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tujuan untuk mengembangkan kemampuan berfikir secara rasional, kritis, dan kreatif, keterampilan intelektual dan keterampilan berpartisipasi, dan memiliki watak dalam kehidupan bermasyarakat Soemantri (2001: 166). Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan pada jenjang sekolah dasar dan menengah adalah sikap kewarganegaraan termasuk keteguhan, komitmen, dan tanggung jawab kewarganegaraan, pengetahuan kewarganegaraan, dan keterampilan kewarganegaraan (Suyato & Iqbal, 2018: 28).

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki kontribusi besar dalam pembentukan karakter dan jati diri bangsa. Dasar pembentukan karakter dan jati diri bangsa didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Pendidikan Kewarganegaraan berupaya untuk membentuk warga negara cerdas, terampil, dan memiliki karakter sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan adalah sikap kewarganegaraan, pengetahuan kewarganegaraan, dan keterampilan kewarganegaraan.

### **Pendidikan Kewarganegaraan Di Era Disrupsi**

Era disrupsi berkembang bersamaan dengan globalisasi dan perkembangan teknologi informasi dan komputer. Pada masa saat ini mudah dalam mengakses informasi dan pengetahuan melalui teknologi telepon pintar dan internet. Koneksi internet saat ini menjadi candu dalam kehidupan masyarakat, hal ini terlihat dari banyaknya penggunaan internet dalam kehidupan sehari-hari. Beragam sosial media seperti *twitter*, *facebook*, *instagram*, *youtube*, *whatsapp*, dan kanal media sosial lainnya. Internet memberikan manfaat dalam pertukaran informasi dan ide-ide antara pemerintah dan warga negara (Kim dkk, 2011: 809). Selain itu, internet dapat memberikan pertukaran informasi dan ide-ide antara warga negara secara global.

Dampak positif dari pertukaran informasi dan ide-ide dapat memberikan wawasan pengetahuan dan peningkatan taraf kehidupan warga negara. Namun, tidak dipungkiri dapat membawa dampak negatif dalam kehidupan warga negara. Kesalahan yang terjadi adanya budaya latah yang muncul pada saat ini, seperti gaya hidup pada negara berkembang mengikuti negara maju. Perlahan-lahan

budaya barat mencemari budaya luhur bangsa-bangsa timur yang terkenal santun dan gotong royong. Pola hidup konsumerisme, hedonisme, liberalisme, dan individualisme telah berkembang di Indonesia. Liberalisme menekankan pada kebebasan individu dalam bertindak dan memilih cara hidup tanpa adanya intervensi dari luar, namun menimbulkan keegoisan, individual, dan menghilangkan rasa solidaritas (Ahida, 2005: 102).

Era globalisasi memiliki hubungan erat dengan era disrupsi, keduanya tidak dapat terpisahkan. Globalisasi terbawa dari perkembangan teknologi informasi dan komputer, sebelum perkembangan internet secara pesat. Semakin berkembangnya internet secara pesat dan digitalisasi, dampaknya semakin menjadi. Kita ambil contoh budaya viral yang berkembang di negara maju, masih ingatkan dengan budaya *selfie*, saat itu kebiasaan orang untuk *selfie* mendapatkan respons dari masyarakat Indonesia dengan baik. Sisi negatifnya banyak orang yang berlomba-lomba untuk *selfie* yang terkadang mengancam keselamatan. Berikut hanya salah satu contoh yang pernah berkembang dan booming di Indonesia, masih ada yang lain seperti prank dll. Sejatinnya globalisasi mempengaruhi setiap aspek kehidupan masyarakat, termasuk keyakinan, norma, nilai-nilai, dan perilaku, ekonomi, dan perdagangan. (Banks, 2008: 132). Apabila diamati bahwa industri film Korea dengan sebutan drakor, membawa dampak dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Karsten dkk. (1998:94) bahwa tujuh kecenderungan global yang perlu diantisipasi, yaitu kesenjangan ekonomi, informasi teknologi mengurangi privasi individu, perbedaan signifikan orang yang bisa akses dengan orang tidak bisa akses teknologi informasi, biaya tinggi untuk mendapatkan air bersih, penggundulan hutan, dan banyaknya kemiskinan. Tantangan tersebut yang perlu diantisipasi oleh warga negara dan negara pada era globalisasi.

Permasalahan global menjadi tantangan bagi negara-negara di seluruh dunia. Menurut Cogan (1998: 7) permasalahan global utama yang dihadapi, yaitu berkembangnya ekonomi global, pesatnya teknologi dan komunikasi, dan meningkatnya populasi penduduk dunia yang berimbas pada kerusakan lingkungan. Tantangan yang menonjol di era disrupsi adalah pesatnya teknologi

dan informasi, di samping itu kerusakan lingkungan menyebar di berbagai wilayah. Indonesia sendiri permasalahan sampah masih membelenggu dan mengkhawatirkan. Beberapa kota besar di Indonesia kesulitan menangani sampah, sehingga sampah menggunung, mencemari lingkungan, dan banjir. Semakin banyak jumlah penduduk, beriringan dengan meningkatnya kerusakan lingkungan. Maka diperlukan perspektif baru dalam mengembangkan budaya yang sekarang biasa dikenal dengan “*transnational civil society*” (Parker dkk, 1999: 130).

Pada perspektif Pendidikan Kewarganegaraan dalam menghadapi tantangan era disrupsi diperlukan adanya pengembangan nilai-nilai dasar. Hakikat dari Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pembentuk karakter dan jati diri bangsa dapat terwujud. Pendidikan Kewarganegaraan global di Indonesia perlu mengembangkan nilai-nilai dasar, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan sosial, kompetisi, menghormati orang lain, kemerdekaan dan perdamaian serta berpegang teguh pada Pancasila sebagai jati diri bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Murdiono, 2014: 354). Selain itu, nilai-nilai konstitusional perlu direalisasikan dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila dan nilai-nilai konstitusi menjadi karakter dan jati diri bangsa yang luhur, sebagai dasar budaya bangsa Indonesia. Penguatan karakter dan jati diri bangsa pada siswa atau mahasiswa dapat dikembangkan melalui materi Pendidikan Kewarganegaraan, tahapan kegiatan pembelajaran, penggunaan metode, media dan sumber pembelajaran (Dianti, 2016: 68).

## **SIMPULAN**

Globalisasi mempengaruhi setiap aspek kehidupan masyarakat, termasuk keyakinan, norma, nilai-nilai, perilaku, ekonomi, dan perdagangan. Terdapat tujuh kecenderungan global yang perlu diantisipasi, yaitu kesenjangan ekonomi, informasi teknologi mengurangi privasi individu, perbedaan signifikan orang yang bisa akses dengan orang tidak bisa akses teknologi informasi, biaya tinggi untuk mendapatkan air bersih, penggundulan hutan, dan banyaknya kemiskinan. Pada perspektif Pendidikan Kewarganegaraan dalam menghadapi tantangan era disrupsi

diperlukan adanya pengembangan nilai-nilai dasar. Hakikat dari Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pembentuk karakter dan jati diri bangsa dapat terwujud. Perlunya mengembangkan nilai-nilai dasar pada Pendidikan Kewarganegaraan, berupa ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan sosial, kompetisi, menghormati orang lain, kemerdekaan dan perdamaian serta berpegang teguh pada Pancasila sebagai jati diri bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

## REFERENSI

- Ahida, R. (2005). Liberalisme dan komunitarianisme: konsep tentang individu dan komunitas. *Jurnal Demokrasi*, 4(2). <http://103.216.87.80/index.php/jd/article/view/1063>.
- Bakry, M. (2014). *Pendidikan kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Banks, J. A. (2008). "Diversity, group identity, and citizenship education in a global age". *Educational Researcher*, 37(3), 129-139.
- Bourke, L., Bamber, P., & Lyons, M. (2012). "Global citizens: who are they?". *Education, Citizenship and Social Justice*, 7(2), 161-174.
- Budimansyah, D. (2010). Tantangan globalisasi terhadap pembinaan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 11(1), 7-13.
- Budiyono. (2017). Memperkokoh ideologi negara Pancasila melalui bela negara. *Citizenship Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), 55-63.
- Cogan, J. J. (1998). "Citizenship education for the 21st century: setting the context", dalam Cogan, J.J dan Derricot, R. (eds.), *Citizenship for the 21st century: an international perspective on education*. London: Kogan Page Limited.
- Dianti, P. (2016). Integrasi pendidikan karakter dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan untuk mengembangkan karakter siswa. *JURNAL PENDIDIKANILMU SOSIAL*. <https://doi.org/10.17509/jpis.v23i1.2062>.
- Hakim, A. S. (2014). *Pendidikan kewarganegaraan dalam konteks Indonesia*. Malang: Madani.
- Karsten, S., et al. (1998). "Challenges facing the 21st century citizen: views of policy makers", dalam Cogan, J.J dan Derricot, R. (eds.), *citizenship for the 21st century: an international perspective on education*. London: Kogan Page Limited.

- Kim, B. J., Kavanaugh, A. L., & Hult, K. M. (2011). "Civic engagement and internet use in local governance: hierarchial linear models for understanding the role of local community groups". *Administration & Society*, 43(7), 807-835.
- Murdiono, M. (2012). *Kewarganegaraan berbasis portofolio*. Yogyakarta: Penerbit ombak.
- Murdiono, M. (2014). Pendidikan kewarganegaraan untuk membangun wawasan global warga negara muda. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*. <https://doi.org/10.21831/cp.v3i3.2379>
- Parker, W.C., Ninomiya, A., & Cogan, J. (1999). "Educating world citizens: toward Multinational curriculum development", *American Educational Research Journal*, 36(2), 117-145.
- Prasetyo, B., & Umi, T. (2018). Revolusi industri 4.0 dan tantangan perubahan sosial. *Prosiding SEMATEKSOS 3 "Strategi Pembangunan Nasional Menghadapi Revolusi Industri 4.0"*, 5, 22-27.
- Setiawati, I. (2008). Peran komunikasi massa dalam perubahan budaya dan perilaku masyarakat. *Fokus Ekonomi*, 3(2), 44-55.
- Siahaan, T. (2016). Bela negara dan kebijakan pertahanan. *Wira. Majalah Wira*. Jakarta: Puskom Publik Kemhan.
- Soemantri, M. N. (2001). *Menggagas pembaharuan pendidikan IPS*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sunarso, dkk. (2002). *Pendidikan kewarganegaraan untuk perguruan tinggi*. Yogyakarta: UNY press.
- Suyato & Iqbal, A. (2018). *Penilaian pembelajaran pendidikan kewarganegaraan*. Yogyakarta: UNY Press.
- Tim Edukasi Perpajakan Direktorat Jendral Pajak. (2016). *Materi terbuka kesadaran pajak untuk perguruan tinggi*. Jakarta: Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Wahab, A. A. (2013). *Pendidikan kewarganegaraan dalam ilmu dan aplikasi pendidikan*. Bandung: Pedagogian Pers.
- Winataputra, U. S., & Dasim, B. (2007). *Civic education: konteks, landasan, bahan ajar dan kultur kelas*. Bandung: Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan.

# **Implementasi Kebijakan Penegakan Displin Protokol Kesehatan dalam Meningkatkan Kedisiplinan Masyarakat di Kabupaten Ponorogo**

**Della puspita, Sujud Tri Fajar Pamungkas, dan Ardhana Januar Mahardhani. M. KP.**  
[puspidadella728@gmail.com](mailto:puspidadella728@gmail.com)

## **Abstrak**

Penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut; (1) Bagaimana implementasi penegakan protokol kesehatan dalam meningkatkan kedisiplinan masyarakat di Kabupaten Ponorogo?; (2) Bagaimana dampak adanya penegakan protokol kesehatan dalam meningkatkan kedisiplinan masyarakat di Kabupaten Ponorogo?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yaitu melakukan penelitian dengan menekankan pemahaman dan penafsiran dari hasil pengumpulan data yang diperoleh sesuai dengan peristiwa dan kejadian secara nyata. Hasil penelitian ini adalah implementasi kebijakan penegakan disiplin protokol kesehatan di kabupaten Ponorogo dilaksanakan secara efektif di berbagai kecamatan di kabupaten Ponorogo melalui edukasi, operasi yustisi. Hal ini berdampak pada penurunan jumlah pelanggaran disiplin protokol kesehatan di Kabupaten Ponorogo akan tetapi jumlah kasus positif Covid-19 di Kabupaten Ponorogo bertambah, hal ini menjadi tantangan pemerintah untuk menertibkan pentingnya disiplin protokol kesehatan agar masyarakat sepenuhnya dapat berpartisipasi menekan penyebaran Covid-19.

**Kata kunci:** Covid-19; Penegakan disiplin; Protokol kesehatan.

## **PENDAHUUAN**

Permasalahan dan tantangan yang dihadapi dunia bukan hanya soal aspek ekonomi, politik, sosial, maupun lainnya namun saat ini pemerintahan melakukan berbagai upaya dalam mencegah percepatan penanganan pandemi Covid-19. Covid-19 *Coronavirus Disease-2019* ialah suatu jenis penyakit baru yang ditularkan dari hewan ke manusia. Penularan pandemi covid-19 ditularkan melalui percikan ketika batuk maupun bersin. Pandemi Covid-19 ini menjadi permasalahan kesehatan bagi seluruh negara di dunia. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi hal ini yaitu dengan melakukan karantina atau isolasi diri. Pemerintah Indonesia melakukan beberapa upaya atau langkah-langkah dalam penanganan covid-19 yang dirumuskan melalui kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Salah satunya yaitu memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk melaksanakan *sosial distancing* atau menjaga jarak minimal dua meter. Pandemi covid-19 bukan hanya berdampak pada kesehatan namun juga berdampak pada bidang ekonomi, sosial oleh sebab itu pemerintahan harus bersiap atas segala kemungkinan yang terjadi.

Upaya demi upaya dilakukan dalam mengatasi dampak yang timbul dari bidang ekonomi, sosial, politik, pertahanan, keamanan, budaya, dan kesejahteraan maupun kemamkmuran seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian dalam hal ini bukan hanya pemerintah saja yang ikut serta dalam melakukan beberpa upaya namun keterlibatan masyarakat sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan. Penyebaran pandemi Covid-19 telah menyebabkan banyaknya korban jiwa diseluruh penjuru dunia yang terkonfirmasi kasus positif Covid-19. Salah satu negara yang mengalami dampak akibat pandemi Covid-19 adalah negara Indonesia. Saat ini kasus terkonfirmasi Covid-19 di Indonesia mengalami penambahan dalam setiap harinya yaitu 4.000 jiwa dengan total keseluruhan mencapai 226.000 dan angka kematian berjumlah 10.105 jiwa (Kompas, 2020). Berbagai upaya dan kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam rangka mencegah percepatan penyebaran pandemi Covid-19.

Pemerintah membentuk satuan tugas percepatan dan penanganan Covid-19 dengan segala peraturan dan kebijakan yang tetapkan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19. Penanganan yang dilaksanakan pemerintah yaitu dengan menetapkan PSBB, karantina, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak yang bertujuan untuk menekan angka pernambahan kasus Covid-19. Banyaknya korban jiwa dan kasus terkonfirmasi semakin tinggi menandakan bahwa tingkat kesadaran dan kedisiplinan masyarakat masih cenderung rendah. Dalam mengatasi permasalahan Covid-19 ini harus bersinergi antara pemerintah dan masyarakat dengan cara berkerjama, disiplin, menaati segala peraturan yang ada.

Instruksi Presiden Nomer 6 Tahun 2020 dengan mengimplementasikan kepada seluruh warga tanpa terkecuali agar semua pihak disiplin dan mematuhi peraturan. Pelaksanaan percepatan dan pencegahan Covid-19 yang dibentuk atas dasar Instruksi Presiden (Inpres Nomor 6 tahun 2020 pasal 7) dan Perbu No. 109 Tahun 2020 tentang penerapan disiplin protokol kesehatan ditetapkan untuk menekan penambahan kasus baru Covid-19. Pemerintah Kabupaten Ponorogo

yang menerapkan kebijakan yang menjadi kawasan wajib penggunaan masker. Kebijakan tersebut diterapkan karena tingkat kesadaran dan kedisiplinan masyarakat cenderung rendah. Kesulitan tersebut dihadapi dilapangan karena minimnya pemakaian masker dalam rangka memutus mata rantai penyebarluasan Covid-19.

Data terkonfirmasi Covid-19 di Ponorogo semakin bertambah, total kasus terkonfirmasi 3030 dengan penambahan 20 kasus. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintahan dalam rangka mengimplemantasikan setiap kegiatan dalam bentuk kebijakan yang ditetapkan yaitu kebijakan protokol kesehatan di kehidupan masyarakat agar tingkat kesadaran masyarakat dalam disiplin protokol kesehatan lebih baik untuk menekan penyebarluasan Covid-19. Kebijakan tersebut di Implementasikan bertujuan untuk memberikan dampak positif kepada masyarakat untuk senantiasa bekerja sama dengan pemerintahan dalam memerangi pandemi Covid-19 dengan terus memberikan upaya dan menekankan kedisiplinan warga sekitar edukasi dan pelaksanaan 4M dan operasi yuridis. Implementasi protokol kesehatan dapat memberikan dampak kesadaran masyarakat untuk tetap melaksanakan aturan yang telah ditetapkan guna menjaga masyarakat dari penyebaran pandemi Covid-19 bagaimana Implementasi penegakan disiplin protokol kesehatan dalam meningkatkan kedisiplinan masyarakat di Kabupaten Ponoroo, dan bagaimana dampak adanya penegakan disiplin protokol kesehatan dalam meningkatkan kedisiplinan masyarakat di Kabupaten Ponorogo Akan tetapi kurangnya kesadaran masyarakat yang rendah dan cenderung mengabaikan penegakan disiplin protokol kesehatan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Creswell (2008: 10-11) mengatakan bahwa penelitian kualitatif memiliki ciri ciri adalah sebagai berikut: (1) Segala bentuk yang berlangsung secara alamiah dengan latar belakang tempat dan kegiatan manusia, (2) Adanya suatu teori, (3) Pengumpulan data merupakan instrumen utama dalam penelitian, (4) Data hasil penelitian bersifat deskriptif dalam pengolahan kata-kata, (5) Penelitian difokuskan pada

arah persepsi dan pengalaman, (6) Proses dalam penelitian lebih diarahkan kepada proses suatu peristiwa, (7) Pemahaman dan penafsiran secara ideologis, (8). Penelitian dapat dilakukan dengan menafsirkan dengan berbagai sumber data dari manusia yang dapat memunculkan desain, (9) Data tidak memiliki nilai dan ukuran. Kebenaran suatu data diutamakan dan kepercayaan diperoleh melalui wawasan dan manfaat. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menafsirkan dan memperoleh informasi sesuai dengan fakta yang ada tentang pelaksanaan penegakan protokol kesehatan kepada masyarakat dan dampak yang diperoleh dari kebijakan tersebut. Informasi diperoleh melalui pengambilan data secara langsung terhadap beberapa sumber dalam proses melaksanakan kebijakan protokol kesehatan dan dampak kedisiplinan masyarakat di Kabupaten Ponorogo. Penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus yaitu melakukan penelitian dengan menekankan pemahaman dan penafsiran dari hasil pengumpulan data yang diperoleh sesuai dengan peristiwa dan kejadian secara nyata. Penelitian ini harus mampu memunculkan sebuah desain dari data atau sumber yang diperoleh melalui data berupa foto, dokumen, rekaman atau suara, dan perlengkapan yang mendukung lainnya.

Penelitian ini berada di Kabupaten Ponorogo dengan subjek penelitian yaitu Kapolres Ponorogo, Satpol PP, dan pemuda Pancasila. Pengembangan instrumen penelitian ada beberapa tahapan yaitu konstruk, variabel, karakteristik jenis pengukuran, jenis instrumen pengukuran, validitas, dan reabilitas. Menyajikan data pada saat penelitian ini adalah menggunakan teknik analisis menurut Miles dan Huberman (2009) mengatakan bahwa langkah-langkah yang digunakan dalam analisis data ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penegakan disiplin protokol kesehatan ialah upaya yang dilakukan pemerintahan dengan memberikan arahan, edukasi kepada masyarakat pentingnya menjaga pola hidup sehat dengan mematuhi aturan dalam rangka untuk kebaikan bersama. Penggunaan masker dapat mencegah virus secara efektif hal ini

merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan seluruh masyarakat. Upaya pemerintah dalam melaksanakan pencegahan Covid-19 yaitu pelaksanaan disiplin protokol kesehatan, dengan sosialisasi dan edukasi 4M (mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, dan menghindari kerumunan). Sanksi pelanggar protokol kesehatan berupa teguran lisan, tertulis. Inpres No. 6 Tahun 2020 mendorong Kabupaten/ Kota seluruh Indonesia untuk menyusun dan membentuk aturan dasar hukum dalam peningkatan kedisiplinan dan kesadaran masyarakat. Kedisiplinan dan kepatuhan merupakan kunci pulihnya kehidupan akibat dari dampak Covid-19. Kabupaten Ponorogo di dalam mempersiapkan kehidupan baru atau *new normal* sebagai tatanan penyesuaian kehidupan baru dengan melibatkan seluruh elemen dalam pencegahan Covid-19 di Ponorogo. Kerjasama dan kontribusi dari semua pihak memberikan presentasi kesemubuhan dan pengurangan Covid-19 di Kabupaten Ponorogo melalui edukasi, pencegahan, kebijakan yang diterapkan dalam mencegah penyebaran rantai Covid-19 semakin luas.

Penegakan peraturan di Indonesia dilakukan dengan konsep bagaimana implementasi kebijakan dilakukan secara efektif dan dipatuhi oleh semua elemen negara tanpa terkecuali. Peraturan dibuat dengan tujuan mesejahterakan masyarakat dan menjamin kebahagiaan bagi seluruh warga. Pemberlakuan keadaan *new normal* ini dengan membiasakan diri bagi seluruh masyarakat untuk menerpakan perilaku dan pola kehidupan yang sehat dan bersih. Protokol kesehatan diterapkan oleh semua sektor kehidupan di Indonesia menjadi sebuah strategi guna menciptakan kemanan individu masyarakat pada saat pandemi. Protokol kesehatan memiliki visi dan misi dalam melindungi, membangun kehidupan sosial masyarakat. Kebijakan protokol kesehatan pada *new normal* ini perlunya kontribusi yang efektif dari lembaga pemerintah dan partisipasi masyarakat untuk menciptakan suatu kebijakan secara adil. Setiap aktivitas masyarakat yang dijalani saat ini harus mempersiapkan masyarakat dan beradaptasi melalui penerapakan kebijakan protokol kesehatan dengan tujuan mendorong kembali kemajuan dan pertemuan dalam bidang ekonomi, sosial, dan lainnya yang mengalami dampak akibat Covid-19.

Pada tanggal 28 Agustus 2020 jumlah kasus terkonfirmasi mencapai 261 jiwa. Hal ini Pemerintah Kabupaten Ponorogo memberlakukan aturan wajib masker sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2020 tentang penegakan disiplin protokol kesehatan. Terdapat 2 jenis sanksi jika tidak menggunakan masker yaitu akan mendapat teguran lisan, tertulis, sanksi kerja maupun denda administrasi (denda uang). Subjek wajib melaksanakan peraturan tersebut adalah seluruh warga baik melanggar perorangan, pelaku usaha, dan lainnya yang tidak mematuhi peraturan. Implementasi Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 di Ponorogo yaitu membentuk satgas pelaksanaan penegakan hukum dan peningkatan kedisiplinan sejak tanggal 11 Agustus - 9 September 2020. Satgas pelaksanaan terdapat subsatgas pengawasan, patroli, gakkum, komunikasi dan publikasi, dan subsatgas pembinaan. Subsatgas pengawasan bertugas melakukan pengawasan dan evaluasi kepada masyarakat, subsatgas patroli bertugas melaksanakan patroli kesehatan bersama instansi terkait, subsatgas gakkum bertugas menegakan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan, subsatgas komunikasi dan publikasi bertugas untuk melaksanakan himbauan, pelaksanaan di media sosial, dan subsatgas pembinaan bertugas melaksanakan pembinaan kepada masyarakat untuk meningkatkan kedisiplinan dan penerapan protokol kesehatan.

### **Kedisiplinan masyarakat Kabupaten Ponorogo**

Disiplin merupakan suatu proses terciptanya suatu kondisi perilaku manusia yang mengakibatkan kepatuhan, keteraturan, ketaatan, dan ketertiban. Perilaku disebabkan karena proses dalam kehidupan pendidikan, keluarga, maupun pengalaman (Priyodarminto, 1994). Perilaku dan sikap dapat diciptakan melalui pendidikan keluarga, pengalaman maupun lingkungan sekitarnya. Nilai disiplin dapat membuat manusia mengetahui dan mampu membedakan hal-hal yang harus dilakukan, hal-hal yang diperbolehkan, maupun hal-hal yang dilarang dilakukan (Priyodarminto, 1994). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang memiliki sistem suatu kebudayaan atau tradisi dengan menaati aturan hukum yang wajib untuk ditaati. Masyarakat terdiri atas pembuat kebijakan dan pelaksanaan kebijakan yang dipersatukan dalam satu kesatuan yang utuh. Kehidupan yang dijalani

sesuai dengan hukum yang berlaku dimasyarakat dengan tujuan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2020 menjadikan dasar hukum dalam penegakan kedisiplinan masyarakat di Kabupaten Ponorogo. Sikap yang tercermin dalam perbuatan individu, kelompok di dalam masyarakat. Kepatuhan, etika, norma, yang berlaku di dalam masyarakat wajib di patuhi dan memeberikan pengaruh positif terhadap pola kelangsungan kehidupan. Disiplin pada tingkah laku masyarakat yaitu adanya kesadaran atau keinginan untuk melaksanakan sepenuhnya segala aturan yang berlaku, adanya suatu pengaruh yang dikendalikan. Faktor yang mempengaruhi kedisipinan yaitu karena tindakan dan perbuatan yang didasari atas kemauan sendiri, faktor keluarga, dan pergaulan dilikungan sekitar. Perilaku dan kesadaran masyarakat tercipta karena pengaruh kepatuhan terhadap aturan dan kebijakan yang ditetapkan pemerintah. Kedisiplinan masyarakat Kabupaaten Ponorogo cenderung rendah karena fakta dilapangan puluhan masyarakat yang melanggar protokol kesehatan dengan tidak memakai masker di tempat umum.

Ponorogo merupakan Kabupaten yang menerapkan aturan wajib masker untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Ponorogo. Upaya peningkatan disiplin protokol kesahatan adalah dengan melakukan operasi yutisi di Kabupaten Ponorogo yang dilaksanakan diberbagai Kecamatan di Ponorogo namun banyak didapati masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Permasalahan yang dihadapi saat ini diperlukannya kerjasama antara pemerintah dan seluruh warga negara. Solusi yang diupayakan pemerintah adalah dengan menerapkan peraturan yang tegas dalam setiap tindakan. Penanganan pertama yang dilakukan adalah dengan memberikan edukasi atau sosialisasi terhadap masyarakat yang tidak menerpakan kebijakan dan pentingnya merepakan kebijakan. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah agar masyarakat memahami secara jelas pentingnya membiasakan diri untuk menjaga pola hidup yang sehat pada kehidupan *new normal* saat ini. Kesedaran dan kedisiplinan membutuhkan kerjasama oleh seluruh tatanan kehidupan masyarakat untuk senantiasa melawan pandemi Covid-19. Kegiatan sosialisasi di Kabupaten Ponorogo yaitu dengan pemberian masker

kepada masyarakat, mensosialisasikan untuk selalu mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak, dan menggunakan masker.

### **Implementasi Disiplin Protokol Kesehatan**

Dasar hukum penegakan disiplin protokol kesehatan ini diperkuat dengan peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2020. Kemudian jika terdapat masyarakat yang tidak menggunakan masker di tempat umum dikenai sanksi seperti sanksi tertulis, tidak tertulis, kerja bakti, sanksi administrasi maupun dengan melanggar perbup yaitu melakukan penutupan agar tidak beroperasi. Adapun Pelaksanaan Protokol Kesehatan di kabupaten Ponorogo adalah:

1. Pelaksanaan edukasi, pengawasan, dan pemeriksaan.

Implementasi adalah pelaksanaan dari setiap keputusan yang mempengaruhi kebijakan di dalam masyarakat. Kebijakan merupakan pengambilan keputusan dimulai dari proses tahapan pengambilan keputusan dengan menitikberatkan pada kepentingan rencana untuk mencapai tujuan. Kebijakan suatu aturan yang dibuat oleh orang yang bertanggung jawab atas kepentingan bersama dengan mengalokasikan kepada program sesuai dengan keputusan yang telah dibuat. Proses pelaksanaan kebijakan tidak hanya merubah perilaku masyarakat namun siapa yang bertanggung jawab atas program yang dilaksanakan. Program yang dilaksanakan tentunya menimbulkan kedisiplinan atau ketaatan pada individu, kelompok secara langsung maupun tidak langsung dengan menetapkan dan merealisasikan suatu kebijakan atau aturan pemerintah kepada masyarakat secara umum. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan ditentukan dari ketaatan dan kedisiplinan semua pihak tanpa terkecuali untuk menaati peraturan yang telah ditetapkan. Pemerintah Indonesia melaksanakan langkah edukasi dalam penerapan kehidupan sehari-hari yaitu dengan prinsip protokol kesehatan mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan di masyarakat, meningkatkan pola hidup sehat.

Pelaksanaan penegakan protokol kesehatan di Kabupaten Ponorogo dalam upaya menegakan kesadaran dan partisipasi aktif guna menekankan tingkat kedisiplinan masyarakat yaitu dengan cara sosialisasi. Sosialisasi

merupakan upaya yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk mendorong, mengajarkan nilai-nilai, peran-peran apa saja yang dapat dilakukan kepada masyarakat agar interkasi tersebut menjadi suatu konsep pengetahuan yang belum diketahui oleh khalayak umum. Sosialisasi dalam rangka pencegahan Covid-19 ini yaitu dengan 4M secara langsung maupun tidak langsung (melalui poster maupun media cetak yang lainnya. Kunci pencegahan Virus Pandemi Covid-19 dengan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat, pelaksanaan dan penegakan kedisiplinan masyarakat untuk senantiasa menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

Pada tanggal 11 Agustus sampai 23 Agustus satgas percepatan dan penanganan Covid-19 di Kabupaten Ponorogo mengadakan edukasi, pembinaan pentingnya menjaga jarak, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menghindari kerumunan untuk memutus penyebaran pandemi Covid-19 kepada seluruh masyarakat. Tahap pertama dalam menegakan disiplin protokol kesehatan diwilayah Ponorogo dimulai pada 24 Agustus-31 Agustus 2020 secara terpadu, tahap kedua dilakukan pada tanggal 1 September dan seterusnya. Penegakan hukum Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 adalah dengan teguran lisan/tertulis, denda administrasi, kerja sosial, penutupan/pemberhentian tempat usaha.



**Gambar 1.** Sidang Pelanggaran disiplin protokol kesehatan (sumber: ponorogo.go.id)

Pelaksanaan protokol kesehatan dalam penyelenggaraannya di Kabupaten Ponorogo sudah cukup maksimal dimana tempat dan fasilitas umum disediakan dengan baik untuk mencegah penyebaran Covid-119.

Tempat dan fasilitas umum diantara lain tempat usaha seperti pasar tradisional/pertokoan/mall, kegiatan olahraga, sarana transportasi seperti pada lokasi stasiun, terminal, pelabuhan, dan kegiatan keagamaan sudah melaksanakan dan memuat perlindungan kesehatan seperti menyediakan alat untuk mencuci tangan, wajib menggunakan masker, dan menjaga jarak. Masyarakat yang terdapat melanggar protokol kesehatan tentu saja menjalankan sidang ditempat setiap keputusan dan hukuman pelanggaran secara langsung diputuskan oleh hakim. Penegakan operasi tersebut dilakukan oleh pihak polri, saltop pp yang menindaklanjut masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan seperti tidak memakai masker jika berada diluar rumah.

## 2. Operasi Yustisi

Operasi yustisi bertujuan untuk mencegah penyebarluasan Covid-19 di Ponorogo. Pada tanggal 24 September 2020 petugas gabungan tim operasi yustisi mendapatkan puluhan masyarakat yang tidak memakai masker dan melanggar protokol kesehatan. Sanksi berupa teguran maupun denda admistrasi. Kapolres Ponorogo AKBP Muhammad Nur Aziz menghimbau untuk menjaga pola kesehatan dan mengutamakan menggunakan masker saat tidak berada di dalam rumah atau berpergian. Sasaran dari operasi tersebut adalah masyarakat yang tidak membawa masker saat tidak berada di dalam rumah, memakai masker dengan cara yang tidak tepat, dan pada tempat usaha yaitu selalu menerapkan disiplin protokol kesehatan dengan menyediakan tempat cuci tangan, menjaga jarak, pemeriksaan suhu dan pembatasan jumlah konsumen.

WILAYAH / KAWASAN	WAKTU	LOKASI
1. Kecamatan Bantur	08.00 - 12.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
2. Kecamatan Bantur	13.00 - 17.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
3. Kecamatan Bantur	18.00 - 22.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
4. Kecamatan Bantur	08.00 - 12.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
5. Kecamatan Bantur	13.00 - 17.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
6. Kecamatan Bantur	18.00 - 22.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
7. Kecamatan Bantur	08.00 - 12.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
8. Kecamatan Bantur	13.00 - 17.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
9. Kecamatan Bantur	18.00 - 22.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
10. Kecamatan Bantur	08.00 - 12.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
11. Kecamatan Bantur	13.00 - 17.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
12. Kecamatan Bantur	18.00 - 22.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
13. Kecamatan Bantur	08.00 - 12.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
14. Kecamatan Bantur	13.00 - 17.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
15. Kecamatan Bantur	18.00 - 22.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
16. Kecamatan Bantur	08.00 - 12.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
17. Kecamatan Bantur	13.00 - 17.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
18. Kecamatan Bantur	18.00 - 22.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
19. Kecamatan Bantur	08.00 - 12.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
20. Kecamatan Bantur	13.00 - 17.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
21. Kecamatan Bantur	18.00 - 22.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
22. Kecamatan Bantur	08.00 - 12.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
23. Kecamatan Bantur	13.00 - 17.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
24. Kecamatan Bantur	18.00 - 22.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
25. Kecamatan Bantur	08.00 - 12.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
26. Kecamatan Bantur	13.00 - 17.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
27. Kecamatan Bantur	18.00 - 22.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
28. Kecamatan Bantur	08.00 - 12.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
29. Kecamatan Bantur	13.00 - 17.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
30. Kecamatan Bantur	18.00 - 22.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
31. Kecamatan Bantur	08.00 - 12.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
32. Kecamatan Bantur	13.00 - 17.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
33. Kecamatan Bantur	18.00 - 22.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
34. Kecamatan Bantur	08.00 - 12.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
35. Kecamatan Bantur	13.00 - 17.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
36. Kecamatan Bantur	18.00 - 22.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
37. Kecamatan Bantur	08.00 - 12.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
38. Kecamatan Bantur	13.00 - 17.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
39. Kecamatan Bantur	18.00 - 22.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
40. Kecamatan Bantur	08.00 - 12.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
41. Kecamatan Bantur	13.00 - 17.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
42. Kecamatan Bantur	18.00 - 22.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
43. Kecamatan Bantur	08.00 - 12.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
44. Kecamatan Bantur	13.00 - 17.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
45. Kecamatan Bantur	18.00 - 22.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
46. Kecamatan Bantur	08.00 - 12.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
47. Kecamatan Bantur	13.00 - 17.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
48. Kecamatan Bantur	18.00 - 22.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
49. Kecamatan Bantur	08.00 - 12.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
50. Kecamatan Bantur	13.00 - 17.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
51. Kecamatan Bantur	18.00 - 22.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
52. Kecamatan Bantur	08.00 - 12.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
53. Kecamatan Bantur	13.00 - 17.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
54. Kecamatan Bantur	18.00 - 22.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
55. Kecamatan Bantur	08.00 - 12.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
56. Kecamatan Bantur	13.00 - 17.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
57. Kecamatan Bantur	18.00 - 22.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
58. Kecamatan Bantur	08.00 - 12.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
59. Kecamatan Bantur	13.00 - 17.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
60. Kecamatan Bantur	18.00 - 22.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
61. Kecamatan Bantur	08.00 - 12.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
62. Kecamatan Bantur	13.00 - 17.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
63. Kecamatan Bantur	18.00 - 22.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
64. Kecamatan Bantur	08.00 - 12.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
65. Kecamatan Bantur	13.00 - 17.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
66. Kecamatan Bantur	18.00 - 22.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
67. Kecamatan Bantur	08.00 - 12.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
68. Kecamatan Bantur	13.00 - 17.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
69. Kecamatan Bantur	18.00 - 22.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
70. Kecamatan Bantur	08.00 - 12.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
71. Kecamatan Bantur	13.00 - 17.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
72. Kecamatan Bantur	18.00 - 22.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
73. Kecamatan Bantur	08.00 - 12.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
74. Kecamatan Bantur	13.00 - 17.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
75. Kecamatan Bantur	18.00 - 22.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
76. Kecamatan Bantur	08.00 - 12.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
77. Kecamatan Bantur	13.00 - 17.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
78. Kecamatan Bantur	18.00 - 22.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
79. Kecamatan Bantur	08.00 - 12.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
80. Kecamatan Bantur	13.00 - 17.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
81. Kecamatan Bantur	18.00 - 22.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
82. Kecamatan Bantur	08.00 - 12.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
83. Kecamatan Bantur	13.00 - 17.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
84. Kecamatan Bantur	18.00 - 22.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
85. Kecamatan Bantur	08.00 - 12.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
86. Kecamatan Bantur	13.00 - 17.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
87. Kecamatan Bantur	18.00 - 22.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
88. Kecamatan Bantur	08.00 - 12.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
89. Kecamatan Bantur	13.00 - 17.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
90. Kecamatan Bantur	18.00 - 22.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
91. Kecamatan Bantur	08.00 - 12.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
92. Kecamatan Bantur	13.00 - 17.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
93. Kecamatan Bantur	18.00 - 22.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
94. Kecamatan Bantur	08.00 - 12.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
95. Kecamatan Bantur	13.00 - 17.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
96. Kecamatan Bantur	18.00 - 22.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
97. Kecamatan Bantur	08.00 - 12.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
98. Kecamatan Bantur	13.00 - 17.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
99. Kecamatan Bantur	18.00 - 22.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur
100. Kecamatan Bantur	08.00 - 12.00 WIB	Rahmatullah Bantur Bantur

Gambar 2. Jadwal operasi yutisi di Kabupaten Ponorogo

Pelaksanaan operasi yutisi di Kabupaten Ponorogo dilaksnakan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang sudah disediakan sesuai aturan. Pemerintahan Kabupaten Ponorogo memperluas jaringan dan sasaran operasi yustisi untuk menegakan protokol kesehatan dalam mencegah penyebarluasan pandemi Covid-19. Penegakan operasi yustisi yang hanya dilakukan dijalan utama daerah di Ponorogo tetapi pada ketentuan saat ini operasi Yustisi diperluas hingga sampai keperdesaan. Pada kenyataanya operasi dilaksanakan namun terdapat masyarakat di perdesaan yang tidak mematuhi protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker di tempat umum. Jadwal lokasi sudah ditentukan oleh pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam operasi penegakan protokol kesehatan. Operasi wajib penggunaan masker memberikan dampak yang positif bagi masyarakat untuk mematuhi peraturan sesuai dengan edukasi 4M. Operasi yustisi diberlakukan bukan hanya dijalan umum maupun jalan perdesaan namun dilaksanakan di tempat umum seperti pertokoan, pasar, caffe atau tempat nongkrong, dan pelayanan publik lainnya.

### Dampak Implementasi Penegakan Displin Protokol Kesehatan

Penerapan kebijakan disiplin protokol kesehatan salah satunya adalah di Kabupaten Ponorogo merupakan suatu hal positif di dalam aktivitas masyarakat. Penegakan kebijakan tersebut merupakan upaya pemerintah kepada masyarakat dengan memberikan edukasi pentingnya menjaga pola hidup sehat dan mematuhi peraturan dengan tujuan kepentingan bersama. Salah satunya adalah untuk

memutus penyebaran rantai pandemi Covid-19. Dampak memberikan suatu pengaruh positif maupun negatif di dalam setiap keputusan yang diambil. Dampak positif adalah kesadaran diri atau keinginan, keyakinan. Dampak ialah proses di dalam pelaksanaan kegiatan berupa pengawasan, pendedukasian agar seseorang dapat melaksanakan kegiatan melalui pengaruh orang yang berkepentingan. Dampak positif mengutamakan kegiatan dan usaha-usaha secara pasti, kreatif, dan tegas dengan penuh kegembiraan. Berfikir positif merupakan usaha sadar dan tidak berperilaku buruk dengan optimis dan tanpa kesedihan. Dampak negatif merupakan cara berfikir yang dipengaruhi berfikir dan kebiasaan buruk. Dampak adalah suatu peristiwa yang terjadi dalam masyarakat yang menghasilkan suatu perubahan dalam kehidupan yang bersifat positif maupun negatif hal ini tentunya mempengaruhi kelangsungan hidup manusia.

Penegakan yang dilaksanakan pemerintahan tidak hanya fokus pada sanksi saja namun edukasi untuk melaksanakan penerapan protokol kesehatan. Dampak implementasi pelaksanaan disiplin protokol kesehatan bagi masyarakat yaitu dapat meningkatkan kedisiplinan dan partisipasi aktif masyarakat untuk selalu mementingkan kesehatan, mengendalikan penyebaran munculnya kasus baru di masyarakat sekitar dari kegiatan masyarakat. Kedisiplinan dapat mempengaruhi tantangan masyarakat yang selalui mematuhi peraturan pemerintahan hal ini dapat mempengaruhi pemulihan kehidupan agar lebih produktif secara aman dalam aspek ekonomi, sosial, dan aspek lainya yang berpengaruh karena akibat Covid-19. Penegakan disiplin protokol kesehatan diimplementasikan pada setiap sektor kegiatan masyarakat yaitu pelayanan publik, transportasi, kesehatan, adat agama, sosial, seni budaya, dan pertanian. Denda dalam pelanggaran disiplin protokol kesehatan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk upaya penanganan Covid-19. Perkembangan kasus Covid-19 pada 23 September adalah 20 kasus baru hingga total kasus 385.

Pada pelaksanaan operasi yustisi terdapat 52 pelanggaran yaitu 28 sidang ditempat dengan denda Rp 50.000 dan 24 pelanggaran lainnya diberi hukuman sosial. Pelaksanaan penegakan protokol kesehatan setiap hari mengalami penurunan pada tanggal 1-24 September 2020 sesuai laporan operasi yustisi ada

40-50 orang. Perkembangan ini menjadi dampak bagaimana pelaksanaan dan keefektifan dari penegakan protokol kesehatan oleh tim satgas kabupaten untuk memberikan dampak yang positif bagi masyarakat senantiasa untuk tetap waspada terhadap Covid-19 dengan menerapkan kedisiplinan dalam setiap aturan yang dilaksanakan pemerintahan.

## **SIMPULAN**

Pemerintahan Kabupaten Ponorogo dan beberapa instansi terkait berupaya untuk menekan angka penyebaran Covid-19 yaitu dengan pembagian masker, pembagian handsanitizer, dan sosialisasi maupun edukasi kepada masyarakat. Tim satgas dan polres Ponorogo melaksanakan operasi yustisi yang menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 dalam rangka peningkatan disiplin protokol kesehatan. Kedisiplinan masyarakat merupakan kunci dari segala keberhasilan dari peraturan yang telah diterapkan. Kegiatan dalam bentuk penegakan protokol kesehatan tentunya mendapatkan beberapa kendala terdapat respon positif maupun negatif yang ditunjukkan masyarakat namun secara keseluruhan implementasi penegakan protokol kesehatan berjalan lancar. Penegakan sekaligus sosialisasi dalam penerapan protokol kesehatan dengan memberikan pengetahuan bagaimana menggunakan masker dengan baik dan benar di antara lain yaitu, masker ditempatkan untuk menutupi mulut, hidung serta diikat dengan nyaman untuk menutupi adanya celah, hindari tangan menyentuh masker, saat melepaskan masker hendaknya menyentuh tali pengikat belakang, segera ganti saat masker lembab dan digantikan dengan masker yang bersih atau baru, jangan menggunakan berkali-kali masker dan segera untuk dibuang jika sudah terpakai.

Pemerintah menekankan pentingnya pelaksanaan protokol kesehatan di kehidupan sehari-hari karena kedisiplinan masyarakat berpengaruh pada tingkat jumlah kasus positif Covid-19. Pemerintahan berupaya untuk mengedukasi pentingnya mematuhi protokol kesehatan dimulai dari dirinya sendiri dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker sehingga dapat melindungi keluarga dan lingkungan sekitar dari penularan Covid-19. Kebijakan penegakan

protokol kesehatan melalui operasi yustisi dapat memberikan pola kedisiplinan masyarakat untuk tetap menaati aturan dapat dilihat dari data bahwa pelanggaran di Kecamatan Ponorogo mengalami penurunan. Hal ini dibuktikan dari jumlah pelanggaran setiap harinya mengalami penurunan namun penambahan kasus Positif di Ponorogo bertambah hal ini tentunya pelaksanaan protokol kesehatan tidak sepenuhnya dilaksanakan di dalam setiap kegiatan oleh sebab itu menjadi tantangan bagi pemerintahan untuk lebih meningkatkan kesadaran kepada masyarakat untuk tetap disiplin di setiap kondisi atau keadaan.

## REFERENSI

- Creswell. (2013). *Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- KanalPonorogo.com. (2020). *Impelementasi Inpres No. 6 Tahun 2020, Polres Ponorogo gelar Apel Bersama. 24 Agustus 2020*. <http://kanalponorogo.com/implementasi-inpres-no-6-th-2020-polres-ponorogo-gelar-apel-bersama/>.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)*.
- Martono, N. (2010). *Metode penelitian kualitatif*. Jakarta: PT Raya Grafindo persada
- Miles, H. (2009). *Analisis data kualitatif buku sumber tentang metode-metode baru*. Jakarta: UI Press.
- Mujani, S., & Irvani, D. (2020). Sikap dan perilaku warga terhadap kebijakan penanganan wabah Covid-19. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 11(2), 219-238.
- Ningrum, et al. (2020). *Sosialisasi gerakan masyarakat cerdas menggunakan masker dimasa pandemi guna mencegah penyebaran virus covid*. <http://org/10.31004/abdidas.v1i5>).
- Ponorogo.go.id. (2020). 53 Pelanggar Protokol Kesehatan Sidang diTempat. 14 September- 2020. <https://ponorogo.go.id/2020/09/14/53-pelanggaran-protokol-kesehatam-sidang-ditempat->.
- Prijodarminto. (1994). *Displin kiat menuju sukses*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Tim BPS. (2020). *Hasil survei perilaku masyarakat di masa pandemi Covid-19 (17-14 Sepetember 2020)*.

# **Pendidikan Pancasila dengan Strategi *FAST (Family Based Education)* sebagai Solusi di Tengah Pandemi Covid-19**

**Erlinda Ika Mawarti**  
[erlinda03ika@gmail.com](mailto:erlinda03ika@gmail.com)

## **Abstrak**

Fenomena munculnya virus Covid 19 yang berawal dari Wuhan, China hingga menyebar di negara lain akibat aktivitas sosial sehingga berakibat pada terjadinya pandemi. Pandemi Covid 19 berdampak pada berbagai sektor, yakni ekonomi, politik, sosial, budaya, pariwisata terutama bidang Pendidikan. Pendidikan Pancasila tidak sebatas pada ranah kognitif dengan menghafal namun mampu mengaplikasikan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Tujuan dari penelitian ini adalah menemukan solusi paling efektif dalam penanaman nilai-nilai Pancasila siswa usia remaja. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan dokumentasi. Pendidikan Pancasila dengan strategi *FAST (Family and Social Based Education)* sebagai solusi di tengah pandemi. Pemaksimalan peran keluarga dalam mendampingi siswa belajar di rumah agar mampu tumbuh menjadi calon pemimpin bangsa yang nasional dan berkepribadian Pancasila.

**Kata kunci:** Pendidikan Pancasila; Keluarga; Nilai.

## **PENDAHULUAN**

Fenomena munculnya virus Covid-19 yang pada awalnya melanda masyarakat Wuhan, China. Virus ini kemudian mulai menjangkit masyarakat dunia dikarenakan aktivitas sosial dan interaksi yang dilakukan oleh orang-orang yang memasuki area terjangkit virus. Melakukan perjalanan ke luar negeri melintasi berbagai negara dan benua menyebabkan meningkatnya jumlah penderita Covid-19 karena terjadi penularan antara individu. Sehingga semakin banyaknya penderita terinfeksi Covid-19 menyebabkan potensi pandemi. Pada tanggal 30 Januari 2020, mengikuti rekomendasi dari Komite Darurat, Direktur Jenderal WHO menyatakan bahwa wabah tersebut merupakan Darurat Kesehatan Masyarakat Internasional atau *Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)*. Berikut data yang menyajikan jumlah terinfeksi Covid-19



Sumber: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia>  
Gambar 1. Jumlah Penderita Covid 19 di Seluruh Dunia

Pandemi Covid-19 yang melanda negara di berbagai belahan dunia berdampak pada berbagai sektor yakni ekonomi, politik, sosial, budaya, pariwisata terutama bidang pendidikan. Indonesia sebagai salah satu negara di dunia juga turut terdampak pandemi Covid-19 yang mempengaruhi berbagai sektor. Pertama, sektor bidang ekonomi dan pariwisata. Pandemi Covid-19 menyebabkan sebagian besar kegiatan ekonomi lumpuh. Menurunnya permintaan atas barang menyebabkan negara mengalami masa krisis ekonomi. Bidang yang paling banyak merasakan dampaknya adalah sektor wirausaha. Banyak karyawan pabrik yang dirumahkan, pedagang pasar yang minus penghasilan, dan angka kriminalitas yang tinggi. Semakin sulitnya mendapatkan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga terlebih pada awal masa *social distancing* serta minimnya bantuan pemerintah. Menurunnya profit dari jasa pariwisata yang mana berdampak pada PHK karyawan. Korupsi yang dilakukan oleh pejabat juga turut menyulut kemarahan rakyat. Kejadian ini harusnya dapat dicegah. Novitasari (2019), pencegahan terhadap terjadinya tindakan korupsi tidak dapat dilakukan hanya oleh lembaga-lembaga formal yang memiliki kewenangan tetapi juga harus melibatkan masyarakat karena korupsi bukan hanya dilakukan oleh individu melainkan sistemik. Menurut pendapat Alfaqi, dkk (2017) diperlukan upaya pemberantasan korupsi yang efektif dan komprehensif membutuhkan partisipasi banyak pihak, tidak terkecuali pemuda sebagai generasi penerus bangsa.

Kedua, sektor politik atau bidang politik yangmana sebentar lagi Indonesia akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berdampak pada pembatasan jumlah partisipan saat menggelar kampanye untuk menekan potensi penularan. Sehingga penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak sempat menuai kontroversi.

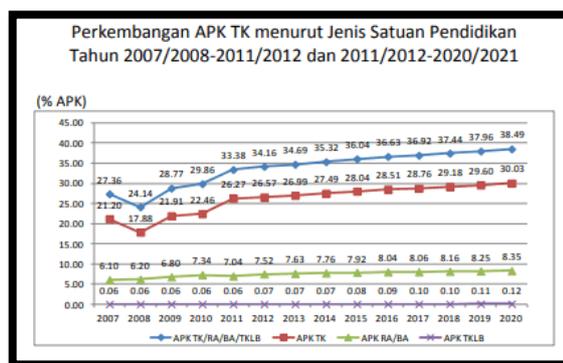
Ketiga, sektor sosial atau bidang sosial. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jelas berdampak pada perubahan pola interaksi sosial masyarakat. Interakssi sosial masyarakat berubah, yangmana perubahan tersebut terjadi dari pola interaksi langsung menjadi tidak langsung. Masyarakat lebih banyak memanfaatkan teknologi digital untuk berinteraksi dengan teman-temannya. Berbagai aplikasi yang dimanfaatkan oleh masyarakat seperti *zoom*, *google meet*, *BBB*, *video call WA*, *live Instagram*, *live YouTube*, dan sebagainya. Pola interaksi yang baru ini juga mempengaruhi tingkat kedekatan personal yang didapatkan tidak setinggi jika berinteraksi langsung. Namun, dampak positif yang dihasilkan adalah keefektifan dan keefisienan waktu untuk beriteraksi dengan teman-teman. Seminar yang sebelumnya diselenggarakan secara langsung dan peserta harus hadir di tempat kini peserta dapat hadir dimanapun berada dengan adanya webinar.

Keempat, sektor budaya. Setiap orang kini bisa mempelajari suatu kebudayaan yang letaknya jauh tanpa harus datang di tempat. Seperti yang dilakukan oleh Keraton Yogyakarta dengan menyelenggarakan webinar, membuat *podcast*, bahkan menyangkan secara *live* prosesi adat-keraton juga pameran temporer “Sang Adiwara” secara *online* yang dapat diikuti oleh umum.

Kelima sektor Pendidikan. Sektor pendidikan yang diselenggarakan secara langsung (tatap muka), siswa hadir ke sekolah, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, organisasi siswa, kompetisi siswa (lomba-lomba), serta berbagai kegiatan yang dirancang untuk menghasilkan siswa-siswi yang unggul dan berkarakter. Namun, sejak pandemi Covid-19 kegiatan belajar dan mengajar dilakukan secara daring. Kondisi ini berdampak pada kualitas pendidikan yang diperoleh siswa. Berbagai kendala juga ditemukan antara lain, tidak tersedianya

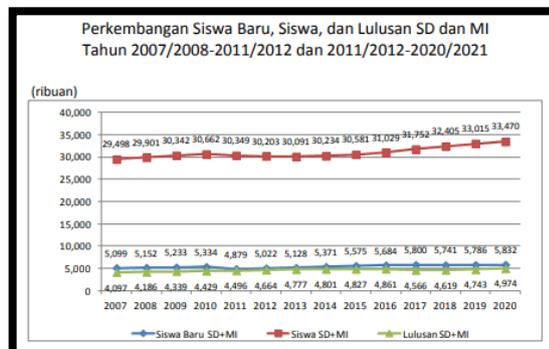
cukup fasilitas bagi siswa yang kurang mampu, kendala jaringan bagi siswa yang tinggal di daerah pinggiran terutama yang berada di dataran tinggi, kurangnya kreativitas guru dalam mendesain pembelajaran yang tidak memberatkan siswa, guru dominan memberikan tugas daripada menjelaskan materi pelajaran yang berdampak pada meningkatnya tingkat stress siswa akibat tidak kuat menanggung beban tugas sekolah, dan lain sebagainya.

Berdasarkan kelima sektor yang telah dijelaskan, sektor pendidikan sebagai salah satu sektor yang belum menemukan solusi tepat dalam menyelenggarakan pembelajaran yang berkualitas. Jika dilihat dari dampaknya maka sektor pendidikan akan sangat mempengaruhi masa depan suatu negara. Keadaan ekonomi, politik, sosial budaya dapat membaik jika terselenggara pendidikan yang berkualitas untuk setiap anak. Indonesia dengan bonus demografi yang dimiliki menjadi tokoh utama dalam peran memajukan bangsa. Berikut akan disajikan data mengenai kenaikan jumlah siswa setiap jenjang:



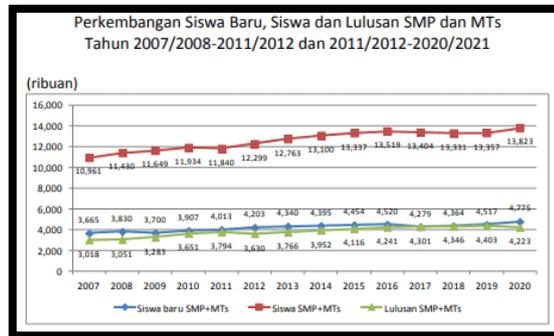
Sumber: <http://publikasi.data.kemdikbud.go.id/>

Grafik 2. Perkembangan Jumlah Siswa TK dan RA di Indonesia

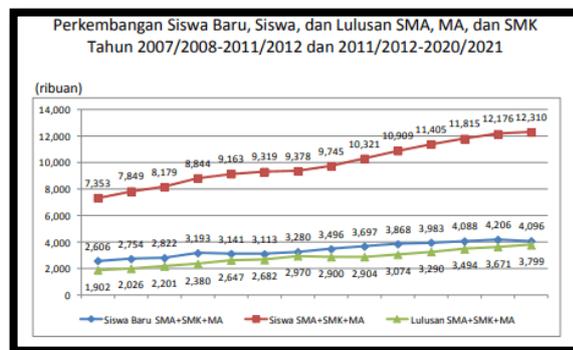


Sumber: <http://publikasi.data.kemdikbud.go.id/>

Grafik 3. Perkembangan Jumlah Siswa SD di Indonesia



Sumber: <http://publikasi.data.kemdikbud.go.id/>  
 Grafik 4. Perkembangan Jumlah Siswa SMP dan MTs di Indonesia



Sumber: <http://publikasi.data.kemdikbud.go.id/>  
 Grafik 5. Perkembangan Jumlah Siswa SMA, MA, dan SMK di Indonesia

Berdasarkan perkembangan jumlah siswa tingkat TK, SD, SMP, dan SMA yang ditunjukkan dengan naiknya garis pada grafik diatas maka potensi pembangunan Indonesia kedepan mampu mewujudkan generasi emas 2045. Keadaan tersebut dipengaruhi oleh bonus demografi yang harus dimanfaatkan dan diberdayakan dengan peningkatan kualitas pendidikan. Jika kita mampu bertahan menghadapi permasalahan pandemi Covid-19 ini, maka dapat dipastikan generasi emas 2045 dapat terwujud untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju dengan kualitas sumber daya manusia yang mumpuni.

Kualitas SDM tidak hanya semata-mata ditentukan oleh kecerdasan intelektual namun juga kecerdasan emosional dan spiritual. Kemampuan diri beradaptasi dengan lingkungan, kualitas kepribadian, serta kemampuan diri untuk menguatkan mental spiritual. Kecerdasan intelektual atau *Intelligence Quotient*

(IQ). Hakikat inteligensi adalah kemampuan untuk menetapkan dan mempertahankan suatu tujuan, untuk mengadakan penyesuaian dalam rangka mencapai tujuan itu, dan untuk menilai keadaan diri secara kritis dan objektif (Winkel, 1997: 529). Sedangkan kecerdasan emosional atau *Emotional Quotient* (EQ) dalam teori Daniel Goleman dengan judul buku yaitu memberikan definisi baru terhadap kata cerdas. Walaupun EQ merupakan hal yang relatif baru dibandingkan IQ, namun beberapa penelitian telah mengisyaratkan bahwa kecerdasan emosional tidak kalah penting dengan IQ (Goleman, 2000: 44). Menurut pendapat Khanif Maksun, Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Agama Alma Ata Yogyakarta (2013), kecerdasan emosional dalam belajar biasanya berkaitan dengan kestabilan emosi untuk bisa tekun konsentrasi, tenang, teliti, dan sabar dalam memahami materi yang dipelajari. Berbeda lagi dengan *Spiritual Quotient* (SQ). Spiritual berasal dari bahasa Latin *spiritus* yang bermakna prinsip yang memvitalisasi suatu organisme. Sedangkan, spiritual dalam SQ berarti *sapientia* (*sophia*) dalam bahasa Yunani yang bermakna kearifan. Sedangkan menurut Zihar & Marshal (2001:4), kecerdasan spiritual didefinisikan sebagai kecerdasan untuk menghadapi persoalan makna atau value, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku hidup kita dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya, kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan yang lain. SQ adalah landasan yang diperlukan untuk memfungsikan IQ dan EQ secara efektif. Bahkan SQ merupakan kecerdasan tertinggi kita.

Menurut pendapat Zohar & Marshall (2001: 4) Kecerdasan spiritual (SQ) adalah landasan yang diperlukan untuk memfungsikan IQ dan EQ secara efektif, bahkan SQ merupakan kecerdasan tertinggi seseorang. Sehingga dapat dilihat bahwa begitu pentingnya peranan kecerdasan spiritual atau Spiritual Quotient (SQ) dalam pendidikan nasional, oleh karena itu diharapkan lembaga pendidikan formal yaitu sekolah, mampu mengembangkan kecerdasan spiritual peserta didik di tengah pandemi. Hal ini sekaligus akan sangat berpengaruh terhadap pengembangan kepribadian siswa yang religius.

Kolaborasi kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual dalam pembelajaran mampu mencetak generasi unggul Indonesia yang siap memimpin

di masa depan. Pendidikan berbasis karakter harus diimplementasikan dalam proses pembelajaran di tengah pandemi. Melihat kedudukan keluarga sebagai bagian mendasar dari sebuah masyarakat di dalam suatu negara seperti yang tertuang dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa “Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.” Menjadi warga negara yang unggul, berdaya saing tinggi, serta berkepribadian Indonesia diperlukan strategi yang tepat. Sehingga diperlukan suatu pendidikan Pancasila dengan strategi *FAST (Family and Social Based Education)* sebagai solusi di tengah pandemi. Pendidikan Pancasila dengan strategi *FAST (Family and Social Based Education)* merupakan suatu solusi pendidikan kepribadian yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila dengan memaksimalkan peran keluarga dan masyarakat sekitar. Menurut Sulton (2016), wajah asli masyarakat Indonesia yang bermoral, berkarakter, dan berbudaya sebenarnya bukanlah cerita dan legenda masa lalu, melainkan realitas yang berkembang kuat di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Karena itu, dalam perspektif pendidikan karakter, tidak ada perilaku anak yang tidak bebas dari nilai (Kesuma, dkk., 2011:2). Penanaman nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari penting dilakukan. Pertama, pembentukan karakter anak dapat dilakukan melalui dua strategi, yaitu internal sekolah dan eksternal sekolah (Maunah, 2015). Menurut pendapat Susanti (2016), bahwa peran sekolah dan guru sebagai institusi pendidikan formal sebagai posisi yang tertantang dalam menghadapi fenomena yang berkaitan dengan globalisasi dan degradasi moral.

Pembinaan karakter manusia selaku generasi muda dapat ditempuh dengan berbagai upaya, termasuk melalui pendidikan yang dilakukan secara terprogram, bertahap, dan berkesinambungan (Hasan, 2010: 6). Pendidikan karakter memilah budaya bangsa sendiri dan menyaring budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan karakter bangsa yang bermartabat (Zubaidi, 2011: 18). Menurut pendapat Fatkhruddin (2014), pendidikan nilai merupakan langkah konkrit untuk mengatasi kemungkinan terjadinya dehumanisasi yang diakibatkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Strategi pembelajarn yang serupa juga digagas oleh Wuri Wuryandani (Dosen PGSD FIP UNY) namun yang membedakan dengan penelitian saya adalah obyek penelitiannya. Penelitian yang dilakukan oleh Wuri Wuryandani berjudul Peranan Keluarga dalam Menanamkan Nilai Moral pada Anak Usia Dini berfokus pada anak usia dini. Selain itu juga gagasan skripsi yang dibawakan oleh Febrilia Mutia Syifa tentang Pengaruh Kecerdasan Emosioanl, Kecerdasan Intelektual, dan Kecerdasan Spiritual terhadap Perilaku Etis Siswa Pada Proses Pembelajaran IPS yang berfokus pada mata pelajaran IPS jenjang SMP. Tulisan dari Suprpti tentang Internalisasi Nilai-nilai Pancasila dalam Rumah Tangga dan Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Karakter Generasi Muda yang berfokus pada pola perilaku bercerai pasangan suami sitri akibat tidak memahami nilai Pancasila. Penelitian yang juga hampir mirip juga dilakukan oleh Farah Ariani yang berasal dari Kemneterian Pendidikan dan Kebudayaan RI dengan judul Orang Tua Sebagai Penanam Nilai Pancasila Untuk Anak Usia Dini Di Era Digital yang juga berfokus pada anak usia dini. Keterbaruan penelitian ini adalah sasaran atau objek penelitian yaitu remaja SMA dengan rentang usia 15-18 tahun. Penelitian sebelumnya adalah berfokus pada anak usia PAUD, SD, dan SMP.

## **METODE**

Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara penelitian (Muhadjir, 2016). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Suryabrata (1998) penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian ini memusatkan perhatian pada strategi pembelajaran pendidikan Pancasila sebagai pendidikan karakter dengan strategi kolaborasi pendidikan sekolah dengan pendidikan berbasis keluarga dengan wawancara dan studi kepustakaan atau *library research*, yakni penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah dengan objek penelitian bersifat kepustakaan yaitu melalui buku teks, jurnal ilmiah, referensi statistik, hasil penelitian dalam bentuk jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan berbagai sumber lainnya baik dari internet. Teknik pengumpulan

data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan menggali informasi kepada narasumber. Narasumber dalam penelitian ini adalah konselor keluarga. Dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah buku-buku, catatan-catatan, jurnal internet, atau berbagai jurnal penelitian yang dilakukan sebelumnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (proses, cara, perbuatan mendidik). Menurut pendapat Mutia (2018), pendidikan pada dasarnya adalah untuk mengembangkan kualitas manusia, dalam proses pendidikan diperlukan berbagai komponen untuk menunjang prosesnya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan Pendidikan merupakan hak dasar manusia yang dilindungi konstitusi. Sedangkan pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Sehingga tujuan pendidikan adalah mengembangkan segala potensi siswa yang ada dalam dirinya tidak terkecuali, baik potensi bidang akademik, non akademik, serta mengasah kepribadian. Harapan lahirnya generasi penerus bangsa yang mumpuni dan berkarakter. Generasi pemimpin yang mampu membawa kemajuan untuk Indonesia. Mewujudkan cita-cita nasional Indonesia yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sebagai generasi penerus bangsa, setiap anak harus di didik berkarakter Pancasila. Menurut Latif (2015), Pancasila dapat dikatakan sebagai dasar (falsafah) negara, pandangan hidup, ideologi nasional, dan *ligature* (pemersatu) dalam perikehidupan kebangsaan dan kenegaraan Indonesia. Pancasila merupakan kristalisasi dari nilai nilai luhur yang

digali dari kehidupan bangsa Indonesia. Tujuh puluh lima tahun kemerdekaan Indonesia membuktikan bahwa Pancasila mampu mengatasi dinamisnya permasalahan negeri. Sejak memproklamasikan kemerdekaan PPKI sebagai wakil rakyat memilih, menetapkan dan mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara/ideologi negara, pandangan /pegangan hidup bangsa, jiwa dan kepribadian bangsa serta sumber dari segala sumber tertib hukum di Indonesia. Pancasila dengan berbagai fungsinya yang nilainya dijadikan sebagai landasan dasar bagi setiap aspek kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Siswa perlu dikenalkan dengan Pancasila sebagai karakter individu yang harus dibentuk. Pembentukan karakter ini dibutuhkan kerjasama sekolah, keluarga, dan masyarakat. Sekolah sebagai penyelenggara utama pendidikan formal tidak mampu menopang secara penuh tanggungjawab sebagai pendidik yang terjun berhadapan langsung dengan siswa selama pandemi terlebih sekolah yang memiliki program *boarding school* (siswa asrama) hampir 24 jam penuh mengawal jalannya pendidikan sehari-hari siswa. Namun, semenjak pandemi dan siswa dipulangkan ke rumah masing-masing, pengawasan, pengawalan kegiatan belajar mengajar maupun pendidikan kepribadian yang sebelumnya didapatkan di lingkungan sekolah juga asrama beralih peran di keluarga dan masyarakat. Pendidikan kepribadian di keluarga merupakan upaya untuk mendukung perkembangan sosial. Berdasarkan hasil wawancara dengan Shinta yang berperan sebagai salah satu konselor psikologi di Rumah Keluarga Indonesia (RKI) tentang urgensi pendidikan keluarga bahwa:

...keluarga bukanlah sesuatu yang mati, orang-orang dalam anggota keluarga bertumbuh, berkembang yang berbeda tiap fasenya. Nilai-nilai spiritual, nilai moral, budaya, dan komunikasi antar anggota keluarga (11/11/2020)

Perkembangan sosial atau kepribadian pada masa remaja merupakan proses untuk mencapai kematangan diri dalam berbagai aspek hingga mencapai tingkat kedewasaan. Menurut Hurlock (2011: 250), perkembangan sosial adalah perolehan perilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Perkembangan sosial merupakan perubahan dalam berhubungan dengan orang lain, keluarga, teman atau kelompok masyarakat. Proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap

norma-norma kelompok, moral, dan tradisi yang ada di masyarakat. Kematangan sosial pada diri anak sangat dipengaruhi oleh peran orang tua dalam membimbing dan mengenalkan mengenai kehidupan sosial, baik norma-norma kehidupan bermasyarakat ataupun fenomena lain seputar lingkungan sekitar. Kedudukan keluarga sebagai bagian mendasar dari sebuah masyarakat di dalam suatu negara seperti yang tertuang dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa “Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.” Peran keluarga yang besar dalam menciptakan *good citizenship*. Berdasarkan pendapat Suprapti (2014):

Mencermati nilai-nilai perkawinan dalam UU perkawinan sepiantas nampak berat untuk dilaksanakan karena membutuhkan berbagai pengorbanan yang berat dan terus menerus, apalagi ditengah-tengah kehidupan yang semakin kompleks, modern dan cenderung semakin individualistis materialistis akibat pengaruh gadget.

Kondisi di tengah pandemi Covid-19 dengan pembelajaran jarak jauh berdampak pada perubahan pola belajar siswa. Pembelajaran tatap muka yang biasa dilakukan oleh siswa dilakukan secara daring. Berbagai tantangan juga ditemukan dengan pembelajaran sistem daring, antara lain kurang terkontrolnya situs yang diakses oleh siswa, dampak berbahaya terlalu lama menatap layar gadget, atau justru bagi siswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu akan mengalami kesulitan ketersediaan fasilitas. Namun hal tersebut dapat diatasi dengan menerapkan metode pembelajaran yang efektif dan efisien yaitu dengan strategi *FAST (Family and Social Based Education)* sebagai solusi di tengah pandemi. Pendidikan Pancasila dengan strategi *FAST (Family and Social Based Education)* merupakan pemaksimalan peran orangtua sebagai sendi dasar susunan masyarakat sekaligus pendidik pertama dalam pertumbuhan anak.

Pembelajaran Pancasila terutama siswa SMA yang mana dikenal sebagai masa pencarian jati diri sangat membutuhkan dukungan keluarga. Adapun yang dimaksud dengan pencarian identitas diri adalah proses menjadi seseorang yang unik dengan peran yang penting dalam hidup Elikson dalam (Papalia & Olds, 2001). Menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai jati diri siswa akan

menumbuhkan sikap nasionalisme, patriotisme, serta tidak terpengaruh hal-hal negatif yang sering muncul di lingkungan sekitarnya. Menurut Muhadjir (2019) berdasarkan hasil evaluasi, selama ini guru lebih fokus pada memberikan materi berupa pengetahuan. "Kita ingin pendidikan Pancasila, penekanannya lebih kepada penanaman nilai. Berarti harus lebih banyak pembentukan sikap. Pembentukan karakter insan Pancasila".

Strategi FAST akan lebih efektif karena melibatkan komponen inti keluarga di kehidupan sehari-hari. Pendidikan Pancasila dengan strategi FAST bertujuan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dalam rangka membentuk kepribadian nasionalis para siswa sebagai calon pemimpin di masa depan. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila:

Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila yang merupakan sumber dari sila-sila dibawahnya menegaskan bahwa penanaman aspek spiritual dalam pribadi seorang diri adalah hal yang utama. Kecerdasan spiritual atau *spiritual quotient (sq)* adalah kecerdasan siswa dalam mengelola diri terutama terkait dengan kedekatannya dengan Tuhan. Kecerdasan spiritual dapat dipupuk dengan penanaman keimanan dalam diri seorang anak di dalam keluarga dengan pembiasaan beribadah. Kesadaran akan kebutuhan spiritual merupakan salah satu indikator kedewasaan. Pembiasaan yang dilakukan oleh orangtua kepada anak-anaknya dalam kehidupan sehari-hari di dalam rumah. Strategi yang dilakukan adalah dengan membuat lembar ibadah bersama keluarga untuk digunakan dalam memantau ketercapaian target ibadah sehari-hari di rumah. Hal ini juga didukung dengan pendapat Shinta sebagai konselor Rumah Keluarga Indonesia:

“Menanamkan spiritual ke dalam anak apalagi kondisi sekarang ini di masa Pandemi. Orangtua bisa menanamkan kesyukuran nikmat sehat, mengajarkan ketauhidan atau keimanan, memaknai pandemi sebagai momentum yang baik dalam menghadapi wabah tentang bagaimana Rasulullah melarang untuk pergi ke suatu tempat sumber wabah begitupun sebaliknya penghuni tempat sumber wabah tidak keluar dari daerahnya untuk mencegah penularan”. (11/11/2020)

Nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Sila kedua Pancasila yang merupakan sumber dari nilai-nilai kemanusiaan yaitu hak untuk hidup, welas asih, penghargaan terhadap sesama, nilai-nilai keadilan, dan adab sebagai bagian

terpenting dalam kehidupan. Kecerdasan emosional atau *emotional quotient (eq)* yang dicontohkan orang tua kepada anak melalui penghargaan hak asasi antar anggota keluarga, proyek keluarga dengan memberi bantuan warga terdampak pandemi, serta diterapkannya sopan santun dalam berinteraksi antar anggota keluarga. Berikut tentang upaya dari pendidikan keluarga oleh Shinta sebagai konselor Rumah Keluarga Indonesia:

“Menumbuhkan kepekaan terhadap hak-hak dasar manusia, memberikan perhatian keadilan dengan kontribusi secara nyata, didorong mulai memberikan perhatian kepada praktik keadilan”. (11/11/2020)

Nilai Persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila yang mengandung nilai-nilai kesatuan, menghargai perbedaan, mengutamakan solusi bersama tanpa memberatkan salah satu pihak. Tenggang rasa dan toleransi terhadap perbedaan karakteristik antar anggota keluarga merupakan implementasi nyata dari sila ketiga Pancasila. Keberagaman dapat ditemukan dalam interaksi sehari-hari anggota keluarga mulai dari perbedaan selera makanan, perbedaan *fashion stylist*, perbedaan kepribadian, dan sebagainya. Berikut tentang upaya dari pendidikan keluarga oleh Ika sebagai relawan Rumah Keluarga Indonesia

“Bagaimana menghargai perbedaan-perbedaan yang muncul sehingga rasa saling memiliki satu sama lain antar anggota keluarga menjadi sangat bermakna. Keutuhan keluarga senantiasa diupayakan seluruh anggota keluarga”. (13/11/2020)

Nilai Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. Sila keempat Pancasila yang mengandung nilai-nilai keutamaan musyawarah untuk mencapai mufakat serta adanya fungsi kepemimpinan kepala keluarga sebagai wakil utama dalam keluarga di masyarakat. Pembiasaan musyawarah dalam menentukan keputusan yang dibuat baik dalam menentukan jadwal piket kebersihan di rumah, mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran di rumah, menghargai pendapat setiap anggota keluarga, memposisikan ayah sebagai pemimpin dalam keluarga sekaligus wakil utama keluarga di masyarakat, dan sebagainya.

Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila mengandung nilai tentang kepekaan sosial yang dapat ditanamkan oleh orang tua

kepada anak-anak dirumah. Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang meluas di segala aspek kehidupan masyarakat. Pemutusan hubungan kerja para karyawan perusahaan bahkan hilangnya omset para pekerja harian yang menggantungkan hidupnya dengan pendapatan yang diperolehnya sehari-hari. Kepekaan sosial ini yang diasah di dalam keluarga dengan memberikan bantuan kepada tetangga terdampak Covid-19 yang harus melakukan karantina mandiri sehingga tidak bisa menjalankan tugas mencari nafkah, tetangga korban PHK, atau menyalurkan bantuan kemanusiaan terdampak musibah di lembaga yang membuka *open donation*. Hal ini juga saya praktikkan dalam pembelajarn PPKn di SMA IT Abu Bakar Yogyakarta dengan bentuk *social project* pada masa awal pandemi. Salah satu tujuan pendidikan adalah memperoleh keterampilan untuk kerja modern (Silberman, 2001). Menurut pendapat asmorojati (2017), pendidikan formal yang di dapat di sekolah selama ini lebih dominan mengembangkan pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi, padahal sekolah harus diorientasikan pada tataran moral *action*, agar peserta didik tidak hanya berhenti pada kompetensi (*competence*) saja, tetapi sampai memiliki kemauan (*will*) dan kebiasaan (*habits*) dalam mewujudkan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari.

Kelima nilai dasar dalam Pancasila diatas dapat disusun oleh guru sekolah dengan memberikan tabel penerapan sila-sila Pancasila oleh keluarga atau dibuat mandiri oleh keluarga tersebut. Keluarga sebagai komponen dasar dalam tatanan sosial masyarakat menjadi kunci utama dan pertama untuk memperbaiki kehidupan suatu bangsa. Orang tua sebagai *role model* penanaman nilai-nilai Pancasila. Menurut Wuryandani (2010), perilaku orang tua di rumah harus senantiasa menunjukkan perilaku yang positif dari sisi nilai moral. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam keluarga tetap harus dilakukan terlebih pada masa remaja usia SMA yaitu (15-18 tahun).

## **SIMPULAN**

Fenomena munculnya virus Covid-19 yang berawal dari Wuhan, China hingga menyebar di negara lain akibat aktivitas sosial sehingga berakibat pada terjadinya pandemi. Pandemi Covid-19 berdampak pada berbagai sektor, yakni

ekonomi, politik, sosial, budaya, pariwisata terutama bidang pendidikan. Pendidikan Pancasila tidak sebatas pada ranah kognitif dengan menghafal namun mampu mengaplikasikan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Pembentukan karakter ini dibutuhkan kerjasama sekolah, keluarga, dan masyarakat. Sejak pandemi diberlakukan pembelajaran jarak jauh atau siswa belajar dari rumah masing-masing. Kegiatan belajar mengajar maupun pendidikan kepribadian yang sebelumnya didapatkan di lingkungan sekolah atau asrama beralih peran di keluarga dan masyarakat. Kedudukan keluarga sebagai bagian mendasar dari sebuah masyarakat di dalam suatu negara berperan menciptakan *good citizenship*. Berbagai tantangan juga ditemui dengan pembelajaran sistem daring, antara lain kurang terkontrolnya situs yang diakses oleh siswa, dampak berbahaya terlalu lama menatap layar gadget, atau justru bagi siswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu akan mengalami kesulitan ketersediaan fasilitas. Namun, hal tersebut dapat diatasi dengan menerapkan metode pembelajaran yang efektif dan efisien yaitu dengan strategi *FAST (Family and Social Based Education)* sebagai solusi di tengah pandemi. Pendidikan Pancasila dengan strategi *FAST (Family and Social Based Education)* merupakan pemaksimalan peran orangtua sebagai sendi dasar susunan masyarakat sekaligus pendidik pertama dalam pertumbuhan anak.

Pembelajaran Pancasila terutama siswa SMA yang mana dikenal sebagai masa pencarian jati diri sangat membutuhkan dukungan keluarga dalam membentuk kepribadian nasionalis para siswa sebagai calon pemimpin di masa depan. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila: Pertama, nilai ketuhanan yang maha esa. Strategi yang dilakukan adalah dengan membuat lembar ibadah bersama keluarga untuk digunakan dalam memantau ketercapaian target ibadah sehari-hari di rumah. Kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Tindakan yang dicontohkan orang tua kepada anak melalui penghargaan hak asasi antar anggota keluarga, proyek keluarga dengan memberi bantuan warga terdampak pandemi, serta diterapkannya sopan santun dalam berinteraksi antar anggota keluarga. Ketiga, nilai persatuan Indonesia, dengan tindakan menghargai perbedaan, mengutamakan solusi bersama tanpa memberatkan salah satu pihak. Keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan

dalam permusyawaratan perwakilan. Pembiasaan musyawarah dalam menentukan keputusan yang dibuat baik dalam menentukan jadwal piket kebersihan di rumah, mengevaluasi pelaksanaan pembelajaran di rumah, menghargai pendapat setiap anggota keluarga, memposisikan ayah sebagai pemimpin dalam keluarga sekaligus wakil utama keluarga di masyarakat, dan sebagainya. Kelima, nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Kepekaan sosial ini yang diasah di dalam keluarga dengan memberikan bantuan kepada tetangga terdampak Covid-19 yang harus melakukan karantina mandiri sehingga tidak bisa menjalankan tugas mencari nafkah, tetangga korban PHK, atau menyalurkan bantuan kemanusiaan terdampak musibah di lembaga yang membuka *open donation*. Hal ini juga saya praktikkan dalam pembelajarn PPKn di SMA IT Abu Bakar Yogyakarta dengan bentuk *social project* pada masa awal pandemik.

## REFERENSI

- Alfaqi, M. Z., Habibi, M. M., & Rapita, D. D. (2017). Peran pemuda dalam upaya pencegahan korupsi dan implikasinya terhadap ketahanan wilayah. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(3), 320-337.
- Ariani, F. (2019). Orang tua sebagai penanam nilai Pancasila untuk anak usia dini di era digital. *Journal of Early Childhood Education (JECE)*, 1(2), 60-68.
- Asmorojati, A. W. (2017). Urgensi pendidikan anti korupsi dan kpk dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. *URECOL*, 491-498.
- Danah, Z., & Ian, M. S. Q. (2001). *Memfaatkan kecerdasan spiritual dalam berfikir integralistik dan holistic untuk memaknai kehidupan*. Bandung: Pustaka Mizan.
- Fakhrudin, A. (2014). Urgensi pendidikan nilai untuk memecahkan problematika nilai dalam konteks pendidikan persekolahan. *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 12(1), 79. [http://jurnal.upi.edu/file/07 -  
\\_Urgensi Pendidikan Nilai - Agus F.pdf](http://jurnal.upi.edu/file/07_-_Urgensi_Pendidikan_Nilai_-_Agus_F.pdf).
- Goleman, D. (2000). *Working with emotional intelligence (terjemahan)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hasan. (2010). *Pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa*. Jakarta: Litbang Puskur.
- Kesuma, dkk. (2011). *Pendidikan karakter: kajian teori dan praktik di sekolah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

- Maunah, B. (2015). Implementasi pendidikan karakter dalam pembentukan kepribadian holistik siswa. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 5(1), 90-101. DOI: <https://doi.org/10.21831/jpk.v0i1.8615>.
- Maksum, K. (2013). *Hubungan Kecerdasan Emosional Dan Motivasi Dengan Tingkat Prestasi Belajar Siswa Kelas V Madrasah Ibtidaiyah Negeri (Min) Jejeran Bantul Pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia*.
- Mutia, F. S. (2018). Pengaruh kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual terhadap perilaku etis siswa pada saat proses pembelajaran IPS di Dua Mei Ciputat (Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah). <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/42888>.
- Novitasari, N. (2019). Upaya menciptakan budaya anti korupsi melalui tradisi banjar. *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 5(1), 1-20. [ejournal.umm.ac.id/index.php/sospol/article/view/6827](http://ejournal.umm.ac.id/index.php/sospol/article/view/6827).
- Samani, M., & Hariyanto. (2011). *Konsep dan model pendidikan karakter*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suprapti, S. (2016). Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam rumah tangga dan pengaruhnya terhadap pembentukan karakter generasi muda. *Jurnal Manajemen Dirgantara*, 7. <https://www.jurnal.sttkd.ac.id/index.php/jmd/article/view/100>.
- Susanti, S. (2016). Membangun peradaban bangsa dengan pendidikan karakter. *Istawa: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 138-159.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Winkel. (1997). *Psikologi pendidikan dan evaluasi belajar*. Jakarta: Gramedia.
- Wuryandani, W. (2010). Menanamkan nilai moral pada anak usia dini berfokus pada anak usia dini. *DiKLUS: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 14(1), 76-85.
- Zubaedi. (2011). *Desain pendidikan karakter konsepsi dan aplikasinya dalam lembaga pendidikan*. Jakarta: Prenada Media Group.

# Semangat Gotong Royong dan Kepatuhan Masyarakat dalam Menghadapi Pandemi COVID-19

Farid Fadillah & Mukhamad Murdiono

[faridfadillah.2019@student.uny.ac.id](mailto:faridfadillah.2019@student.uny.ac.id), [mukhamad\\_murdiono@uny.ac.id](mailto:mukhamad_murdiono@uny.ac.id)

## Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menjelaskan kepatuhan masyarakat serta semangat gotong royong yang merupakan bagian dari nilai-nilai Pancasila, masyarakat Indonesia dalam menghadapi pandemi virus COVID-19 yang terjadi saat ini. Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu mencari data mengenai variabel yang berupa buku, makalah, artikel, jurnal, dan lain sebagainya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi. Analisis ini digunakan untuk mendapatkan inferensi yang valid dan dapat diteliti ulang berdasarkan konteksnya. Hasil penelitian aktualisasi dalam semangat gotong royong menghadapi pandemi COVID-19 oleh masyarakat dilakukan secara beragam mulai dari anak-anak sekolah yang mengumpulkan uang sakunya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, aksi sosial yang dilakukan seperti bagi-bagi masker, memberi paket bantuan sembako, memberikan semangat motivasi moral untuk tenaga kesehatan. Hikmah dari pandemi COVID-19 ini benar-benar menjadi refleksi semangat gotong royong yang telah lama menjadi cikal bakal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Kata kunci:** Gotong royong; Kepatuhan Masyarakat; Pandemi COVID-19.

## PENDAHULUAN

Dunia saat ini sedang disibukkan melawan pandemi, tidak terkecuali Indonesia. Pada Desember 2019, kasus pneumonia misterius pertama kali dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei, China (Rothan & Byrareddy, 2020). Tanggal 18 Desember hingga 29 Desember 2019, terdapat lima pasien yang dirawat dengan *Acute Respiratory Distress Syndrome* (Ren, et al, 2020). Hingga 3 Januari 2020 kasus ini meningkat pesat, ditandai dengan dilaporkannya sebanyak 44 kasus. Belum sampai sebulan, penyakit ini telah menyebar di berbagai provinsi lain di China, Thailand, Jepang, dan Korea Selatan (Huang, et al, 2020). Sampel yang diteliti menunjukkan etiologi corona virus baru. Awalnya, penyakit ini dinamakan sementara sebagai 2019 novel coronavirus (2019-nCoV), kemudian WHO mengumumkan nama baru pada 11 Februari 2020 yaitu coronavirus disease (COVID-19) yang disebabkan oleh virus Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus (SARS-CoV-2), (World Health Organization, 2020). Virus ini dapat ditularkan dari manusia ke manusia dan telah menyebar secara luas di China dan lebih dari 190 negara dan teritori lainnya (World Health Organization, 2020).

Pada 12 Maret 2020, WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemik (World Health Organization, 2020). Hingga tanggal 29 Maret 2020, terdapat 634.835 kasus dan 33.106 jumlah kematian di seluruh dunia (World Health Organization, 2020). Sementara itu di Indonesia sudah ditetapkan 1.528 kasus dengan positif COVID-19 dan 136 kasus kematian.

Tak hanya dari sisi kesehatan, wabah COVID-19 ini juga memberikan dampak bagi masyarakat Indonesia khususnya dari sisi ekonomi dan sosial. Menurut studi yang dilakukan oleh Suryahadi, et. al. (2020) yang memprediksi tingkat kemiskinan rata-rata Indonesia akan meningkat di akhir tahun 2020 sehingga peningkatan tersebut akan menyebabkan sekitar 8 juta penduduk Indonesia akan mengalami kemiskinan baru akibat wabah ini. Data estimasi ini didapatkan berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) bulan Maret dan September 2019. Selain itu terdapat data tingkat kemiskinan pada tahun 2006 dan 2007 untuk melihat pola yang ada, karena di tahun tersebut terjadi lonjakan kemiskinan dikarenakan naiknya harga minyak dunia. Sehingga diprediksi akhir tahun nanti tingkat kemiskinan rata-rata Indonesia akan mencapai 9.7% yang sebelumnya pada September 2019 mencapai 9,22%. Prediksi peningkatan persentase kemiskinan juga berdasarkan pertumbuhan ekonomi, jika pertumbuhan ekonomi menurun 1% maka setidaknya akan menambah sekitar 1,4% persentase kemiskinan. Tak hanya berdasarkan data estimasi, keadaan di lapanganpun juga digambarkan demikian. Sekitar 2,8 juta orang telah kehilangan pekerjaan, dan proyeksi yang ada menunjukkan setidaknya 5,2 juta penduduk lainnya akan kehilangan pekerjaan saat pandemi menyebar. Oleh karena itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) meminta pemerintah mengambil langkah tegas dan terukur mengenai hal ini.

Pemerintah merencanakan pencairan dana sebesar 405 triliun rupiah untuk bantuan tunai, makanan, bantuan di bidang kesehatan, sosial dan juga pengembangan bisnis. Melihat krisis ini, Australia memandang perlu memberi bantuan kepada Indonesia, setidaknya memberikan pinjaman tanpa bunga karena walaupun Indonesia berhasil melewati krisis di tahun-tahun sebelumnya namun nampaknya keadaan kali ini cukup serius (Emma & Natalia, 2020). Salah satu

contoh kasus dari profesi yang terdampak adalah pengemudi ojek dan angkot dengan penurunan penghasil sebesar 44%. Oleh karena itu pemerintah menyiapkan bantuan sosial kepada warga yang terdampak. Di sisi lain, dengan ditutupnya toko dan kantor tentu berdampak pada pihak yang menjual barang dan makanan. Terjadi penurunan pembelian karena orang lebih memilih untuk berbelanja secara online. Oleh karena itu, bisa saja mereka, pihak yang minim pendapatan meninggalkan Jakarta namun mereka juga beresiko menyebarkan virus ke seluruh Indonesia (Asia News Monitor, 2020). Pemerintah pun akhirnya membuat kebijakan Kartu Pra-Kerja untuk mengadakan pelatihan gratis dengan memprioritaskan bagi 3,7 pengangguran muda umur 18-24 tahun. Jadi pelatihan kerja ini berbasis digital dengan mengadakan kerja sama dengan perusahaan startup digital unicorn di Indonesia seperti Buka lapak, Mau belajar apa, Pintaria, Ruang guru, Sekolahmu, Tokopedia, Pijar Mahir, dan Sisnaker. Hal ini dilakukan karena 90% dari total pencari kerja muda belum pernah mengikuti pelatihan sertifikasi dengan sebagian besar lulusan SMA. Distribusi kartu pra-kerja diharapkan dapat meningkatkan kompetensi, daya saing, dan produktivitas mereka di tengah wabah COVID-19 ini. Sehingga diharapkan ini menjadi salah satu solusi mengenai banyaknya pengangguran akibat dari dampak pandemi ini (Asia News Monitor, 2020).

Tak hanya itu, perempuan mengalami peran ganda, disaat bekerja di rumah perempuan juga sekaligus mengurus anak. Seperti yang dialami salah satu guru di Cianjur, Jawa Barat. Ia harus pintar berbagi waktu antara menjaga anak dan mengajar di rumah. Kondisi pandemi seperti ini juga terjadi ketimpangan gender yang semakin timpang. Menurut Komnas Perempuan, beban yang dialami perempuan berlipat ganda pada perempuan yang berkeluarga dan bekerja. Jadi persoalan pekerjaan rumah tangga dibebankan pada perempuan sekaligus saat perempuan bekerja di rumah yang banyak dikeluhkan saat ini. Sehingga, perlu adanya anjuran budaya yaitu bagaimana sebuah keluarga membagi tugas dan bekerja sama untuk mengelola kehidupan yang harus di rumah (BBC, 2020). Jadi dapat disimpulkan dampak sosial ekonomi tak hanya seputar peningkatan kemiskinan akibat banyak yang kehilangan pekerjaan, kesulitan akses kesehatan,

namun termasuk juga ranah budaya dimana terjadi ketimpangan gender yang semakin timpang yang banyak dikeluhkan oleh pihak perempuan.

Situasi seperti ini mengharuskan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah bersatu padu untuk mengendalikan keadaan. Solidaritas masyarakat di masa pandemi COVID-19 menguat dalam beragam bentuk partisipasi publik untuk membantu tenaga medis maupun masyarakat yang terdampak (Agustina, 2020). Nilai-nilai Pancasila terejawantahkan secara aktual di masa pandemi ketika masyarakat secara sukarela bergotong royong untuk meringankan beban saudara-saudaranya yang kesulitan. Gotong royong antar sesama adalah salah satu hal yang sangat penting untuk dikedepankan. Meski banyak juga masyarakat yang egois dan tidak memperdulikan orang yang ada di sekitarnya, namun kelompok masyarakat yang peduli terhadap sesamanya masih mendominasi. Contoh-contoh faktual yang terjadi ketika masyarakat saling bahu membahu untuk mengatasi ragam kesulitan yang menerpa ketika pandemi ini terjadi. Dalam situasi dan kondisi seperti ini, bahkan menjaga diri dan tetap di rumah merupakan bagian penting dari kontribusi untuk menahan laju peningkatan dan penyebaran pandemi virus COVID-19, disisi lain masyarakat bahu membahu membantu memberikan bantuan sesama masyarakat seperti memberikan nasi bungkus gratis, kebutuhan pokok sembako secara gratis dan masih banyak lagi yang menunjukkan semangat gotong royong yang menjadi bagian dari nilai-nilai Pancasila.

Inisiatif lokal di berbagai penjuru negeri juga menjadi potret baik tentang kehebatan negeri ini dalam upaya menghadapi pandemi virus COVID-19 yang terjadi saat ini. Kapital sosial masyarakat yang senang guyub rukun masih tercermin di penjuru negeri ini. Tak salah jika Bung Karno menyatakan bahwa sari dari Pancasila adalah gotong royong. Dalam pidatonya Bung Karno mengatakan “Jikalau saya peras, yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya katakan dengan satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan gotong royong. Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong, alangkah hebatnya! Negara Gotong Royong” (Driyarkara, 2006). Pidato Bung Karno kala itu sangatlah relevan dengan konteks kekinian.

Pandemi virus COVID-19 mengajarkan kembali kepada bangsa ini untuk terus bersatu dan bergotong royong untuk mengatasi beragam masalah yang terjadi.

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menjelaskan kepatuhan masyarakat dan semangat gotong royong yang merupakan bagian dari nilai-nilai Pancasila, masyarakat Indonesia dalam menghadapi pandemi virus COVID-19 yang terjadi saat ini. Referensi dari penelitian sebelumnya yaitu, layanan pengetahuan tentang COVID-19 di lembaga Informasi (Nurislaminingsih, 2020) dan pengembangan nilai dan tradisi gotong royong dalam bingkai konservasi nilai budaya (Subagyo, 2012). Manfaat dari penelitian ini yaitu secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai informasi yang bermanfaat serta sebagai tambahan perluasan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis dan pembaca.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode atau pendekatan kepustakaan (*library research*). Menurut Sugiyono (2018) mengatakan bahwa studi kepustakaan berkaitan dengan kajian secara teori melalui referensi-referensi terkait dengan nilai, budaya, dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian (Zed, 2003). Dalam penelitian studi pustaka setidaknya ada empat ciri utama yang penulis perhatikan diantaranya: pertama, bahwa penulis atau peneliti berhadapan langsung dengan teks atau data angka, bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan. Kedua, data pustaka bersifat “siap pakai” artinya peneliti tidak terjun langsung kelapangan karena peneliti berhadapan langsung dengan sumber data yang ada di perpustakaan. Ketiga, bahwa data pustaka umumnya adalah sumber sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh bahan atau data dari tangan kedua dan bukan data orisinal dari data pertama di lapangan. Keempat, bahwa kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu (Zed, 2003).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, makalah, artikel, jurnal, dan lain sebagainya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis isi (*content analysis*). Analisis ini digunakan untuk mendapatkan inferensi yang valid dan dapat diteliti ulang berdasarkan konteksnya. Dalam analisis ini, akan dilakukan proses memilih, membandingkan, menggabungkan, memilah berbagai pengertian, hingga ditemukan data yang relevan. Proses pengkajian untuk mencegah serta mengatasi mis-informasi maka dilakukan pengecekan antar pustaka dan membaca ulang pustaka.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tinjauan Konseptual Tentang Gotong royong**

Kata gotong royong berasal dari bahasa Jawa, yaitu Gotong dan Royong. Gotong artinya pikul atau angkat. Royong artinya bersama-sama. Jadi gotong royong dalam arti harfiahnya adalah mengangkat beban secara bersama-sama agar beban menjadi ringan. Menurut Koentjaraningrat (1987) membagi dua jenis gotong royong yang dikenal oleh masyarakat Indonesia yaitu gotong royong tolong menolong dan gotong royong kerja bakti. Kegiatan gotong royong tolong menolong terjadi pada aktivitas pertanian, kegiatan sekitar rumah tangga, kegiatan pesta, kegiatan perayaan, dan pada peristiwa bencana pandemi COVID-19 yang hari ini melanda dunia dan tak terkecuali Indonesia. Sedangkan kegiatan gotong royong kerja bakti biasanya dilakukan untuk mengerjakan sesuatu hal yang sifatnya untuk kepentingan umum, yang dibedakan antara gotong royong atas inisiatif warga dengan gotong royong yang dipaksakan.

Konsep gotong royong juga dapat dimaknai dalam konteks pemberdayaan masyarakat (Pranadji, 2009), karena bisa menjadi modal sosial untuk membentuk kekuatan kelembagaan di tingkat komunitas, masyarakat negara serta masyarakat lintas bangsa dan negara Indonesia dalam mewujudkan kesejahteraan. Hal tersebut juga dikarenakan di dalam gotong royong terkandung makna *collective action to struggle, self governing, cummon goal, and savereignty*. Dalam pandangan Kropotkin tentang gotong royong pada masyarakat modern

mengungkapkan bahwa kecenderungan gotong royong dalam diri manusia memiliki asal usul di masa lalu yang sangat jauh. Kecenderungan ini pun terjalin sangat erat dengan semua evolusi umat manusia di masa lalu. Karenanya, kecenderungan ini tetap dipertahankan oleh manusia hingga kini di luar semua perubahan yang terjadi dalam sejarah, kecenderungan ini terutama berkembang selama kurun kedamaian dan kemakmuran (Kropotkin, 2006).

Pernyataan Kropotkin tentang gotong royong adalah sebuah keyakinan dirinya bahwa meski terjadi perubahan dalam arena kehidupan manusia, gotong royong tetap ada. Ia mengkritisi ungkapan Herbert Spencer yang mengatakan bahwa manusia primitif dalam berperang satu lawan satu ataupun semua adalah hukum kehidupan. Kropotkin memandang gotong royong dibangun melalui sifat jenius kreatif suku liar dan masa separuh liar selama masa awal klan dalam sejarah manusia. Pranata awal ini menimbulkan pengaruh mendalam pada perkembangan lanjut manusia hingga kini. Tulisan Kropotkin ini menyiratkan betapa pentingnya naluri saling dukung yang diwarisi manusia dari perjalanan evolusinya dalam masyarakat modern kini. Masyarakat modern bersandar pada prinsip setiap orang untuk dirinya sendiri dan negara untuk semua orang. Tetapi kenyataannya prinsip ini tidak pernah berhasil dan membutuhkan naluri saling dukung.

Pada kondisi sekarang saat ini, perilaku gotong royong mengalami banyak perubahan di Indonesia (dinamis), di daerah perkotaan perilaku gotong royong sudah semakin jarang dilakukan, hal ini dikarenakan penduduk kota memiliki kegiatan yang padat sehingga kesulitan menemukan waktu yang pas untuk melakukan gotong royong. Sebaliknya di daerah pedesaan, pinggiran kota, masih banyak ditemukan perilaku gotong royong ditampilkan oleh warganya, baik itu untuk kepentingan umum maupun kepentingan pribadi. Di daerah pedesaan masih mudah ditemukan orang gotong royong pada acara hajatan, selain gotong royong untuk kepentingan umum masyarakat yang lain apalagi bila mana ada musibah atau bencana seperti kondisi hari ini yang melanda dunia termasuk Indonesia yaitu pandemi virus COVID-19. Penelitian yang dilakukan oleh Effendi (2013) dengan judul Budaya Gotong-Royong Masyarakat dalam Perubahan Sosial Saat Ini. Hasil

penelitian memaparkan bahwa gotong royong sebagai modal sosial, gotong royong dapat dijadikan rujukan dan pegangan dalam mencapai kemajuan suatu bangsa. Itu artinya bila masyarakat masih memegang teguh prinsip gotong royong sebagai modal sosial maka lebih mudah dalam mencapai kemajuan bersama.

Berdasarkan falsafah Pancasila, manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mempunyai naluri, akhlak, daya pikir, dan sadar akan keberadaan-Nya yang serba terhubung dengan sesama lingkungan, alam semesta, dan penciptanya. Kesadaran ini menumbuhkan cipta, karsa, dan karya untuk mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidupnya dari generasi ke generasi (Sumarsono, 2007: 132). Persatuan Indonesia bunyi sila ke-tiga dari Pancasila. Nilai nilai yang terkandung dalam sila Pancasila tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kelima sila merupakan suatu kesatuan yang bersifat sistematis.

#### **Pentingnya Kepatuhan Masyarakat dalam Menghadapi Pandemi COVID-19**

Corona virus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis corona virus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Corona virus disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan Sars-CoV-2. Virus corona adalah *zoonosis* (ditularkan antara hewan dan manusia). Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Adapun, hewan yang menjadi sumber penularan COVID-19 ini masih belum diketahui (Kemenkes, 2020)

COVID-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus (World Health Organization, 2020). Data 31 Maret 2020 menunjukkan kasus yang terkonfirmasi berjumlah 1.528 kasus dan 136 kasus kematian (Kemenkes, 2020). Tingkat mortalitas COVID-19 di Indonesia sebesar 8,9%, angka ini merupakan yang tertinggi di Asia Tenggara (World Health Organization, 2020). Per 30 Maret 2020, terdapat 693.224 kasus dan 33.106 kematian di seluruh dunia. Eropa dan Amerika Serikat menduduki peringkat

pertama dengan kasus COVID-19 terbanyak dengan penambahan kasus baru sebanyak 19.332 kasus pada tanggal 30 Maret 2020 disusul oleh Spanyol dengan 6.549 kasus baru. Italia memiliki tingkat mortalitas paling tinggi di dunia, yaitu 11,3% (World Health Organization, 2020).

Berdasarkan bukti ilmiah, COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui percikan batuk/bersin (*Droplet*), tidak melalui udara. Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19 termasuk yang merawat pasien COVID-19. Rekomendasi standar untuk mencegah penyebaran infeksi virus COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan dari pemerintah yaitu cuci tangan secara teratur menggunakan sabun dan air bersih, menerapkan etika batuk dan bersin, *menerapkan social distancing* dan *physical distancing*, menghindari keramaian (Kemenkes, 2020).

Upaya bela Negara diformulasikan secara kokoh dan mendalam mencangkup pada tataran praksis dengan waktu dan berjenjang nyata terhadap aspek di kehidupan. Kekuatan menggapai suatu tujuan yang nasional ketangguhan maupun keuletan atas ketahanan ini yang bernasional bergantung pada kemampuan menciptakan kedinamisan kehidupan nasional dalam mengatasi, menghadang, dan memecahkan dari dalam atau luar hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan. Tujuan ini mencapai serta berintegritas, sesuai keberlangsungan hidupnya suatu Negara serta dapat mencapai tujuannya yaitu kenasionalan bangsa (Kris & Farid, 2018: 444).

Warga masyarakat yang selalu menggegerkan virus corona ini dan berpikir benar-benar menyusun suatu strategi yaitu mengenai solidaritas tinggi yang dibutuhkan antara individu dengan antarbangsa. Upaya masyarakat kini masih dinilai sangat rendah dalam menjalankan kepatuhan maupun himbauan dalam kebijakan pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan, karena masih banyak pelanggaran masyarakat yang tidak patuh. Seperti tidak ada yang memakai masker, selalu pergi berkerumunan ke mall, nekat mudik, pergi makan dll. Contoh kecil saja yaitu upaya kekarantinaan seperti PSBB tidak seefektif bertujuan dalam memutus penyebaran rantai covid ini jika tidak dipatuhi. Upaya penegakkan hukum yang efektif perlu dipahami 9 faktor yang memengaruhi kepatuhan

masyarakat terhadap upaya kekarantinaan: (1) Alasan praktis, (2) Kepatuhan orang tua meningkat jika sekolah diliburkan disamping itu orang-orang yang berupah rendah dan tidak bekerja patuh terhadap upaya kekarantinaan, (3) Sosiokultural: nilai, norma, dan hukum, (4) Pengetahuan tentang wabah dan aturan kekarantinaan konsisten mempengaruhi kepatuhan, (5) Persepsi terhadap keuntungan dengan pengurangan kasus penyakit, (6) Lama karantina, (7) Semakin seseorang merasa berisiko untuk terserang penyakit, semakin tinggi kepatuhan, (8) Kepercayaan terhadap sistem kesehatan, dan (9) Kepercayaan terhadap pemerintah.

Sefriani (2018: 414) menjelaskan bahwa faktor yang mendorong Negara dapat taat pada pemerintah dan hukum adalah adanya segala kekhawatiran yang muncul dalam negara itu sendiri yang dipandang bangsa tidak baik, kekhawatiran yang dianggap ancaman bagi negara dan gangguan terhadap dunia. Ketaatan dapat muncul bila bangsa mempunyai kepentingan berdasarkan pemikiran Negara untuk taat kepada pemerintah. Contoh upaya bela Negara masyarakat dalam ikut serta ketahanan nasional, yakni: (1) Masyarakat dihimbau agar rajin mencuci tangan dengan sabun bahkan ketika batuk atau bersin disarankan untuk menutup mulut dan hidung pakai tissue, saputangan, atau lipatan siku, (2) menghindari *kerumunan (social distancing)*, (3) menggunakan masker saat sakit, (4) melakukan penyemprotan desinfektan ke tempat yang sering dikunjungi, (5) berusaha supaya tidak berpergian keluar rumah walau tidak ada kepentingan yang amat mendesak atau penting. Semakin masyarakat mengetahui karakteristik dan pola penyebaran virus yang terpenting adalah kerja sama dari berbagai pihak seperti kekuatan untuk saling percaya dan bersinergi atau berintegrasi karena inilah yang dapat memperbesar peluang masyarakat terbebas dari virus tersebut. Dengan berbasis ke Gotong royongan di dalam lingkungan masyarakat diharapkan mampu memperketat keamanan lingkungan guna mencegah terjadinya konflik dibalik pandemi COVID-19.

Poespowardojo (1989: 89) mengutarakan Ketahanan nasional merujuk pada sifat integrasi atau bisa disebut persatuan aspek secara seimbang, serasi, dan selaras. Negara Indonesia mewujudkan kepribadian nasional dan hakikat

Indonesia yang bersifat nasionalisme, dan memanfaatkan segala daya yang ada pada Negara menjauhi konfrontasi dan antagonisme. Kondisi Negara Indonesia yang dinamis berisi ketangguhan dan keuletan dalam menghadapi ancaman salah satunya yaitu mengatasi COVID-19, konsep penyelenggaraan suatu kesejahteraan dan keamanan diatur dalam UUD 1945 dan Pancasila di kehidupan nasional.

### **Semangat Gotong Royong Dalam Menghadapi Pandemi COVID-19**

Gotong royong merupakan budaya yang telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia sebagai warisan budaya yang telah eksis secara turun-temurun (Kartodijo, 1987). Gotong royong adalah bentuk kerja sama kelompok masyarakat untuk mencapai suatu hasil positif dari tujuan yang ingin dicapai secara mufakat dan musyawarah bersama. Gotong royong muncul atas dorongan keinsyafan, kesadaran dan semangat untuk mengerjakan serta menanggung akibat dari suatu karya, terutama yang benar-benar, secara bersama-sama, serentak dan beramai-ramai, tanpa memikirkan dan mengutamakan keuntungan bagi dirinya sendiri, melainkan selalu untuk kebahagiaan bersama, seperti terkandung dalam istilah “Gotong”. Di dalam membagi hasil karyanya, masing-masing anggota mendapat dan menerima bagian-bagiannya sendiri-sendiri sesuai dengan tempat dan sifat sumbangan karyanya masing-masing, seperti tersimpul dalam istilah “Royong”. Maka setiap individu yang memegang prinsip dan memahami semangat gotong royong secara sadar bersedia melepaskan sifat egois. Gotong royong harus dilandasi dengan semangat keikhlasan, kerelaan, kebersamaan, toleransi dan kepercayaan. Singkatnya, gotong royong lebih bersifat intrinsik yakni interaksi sosial dengan latar belakang kepentingan atau imbalan non-ekonomi.

Gotong royong adalah suatu paham yang dinamis, yang menggambarkan usaha bersama, suatu amal, suatu pekerjaan atau suatu karya bersama suatu perjuangan bantu-membantu. Gotong royong adalah amal dari semua untuk kebahagiaan bersama. Dalam azas gotong royong sudah tersimpul kesadaran bekerja rohaniyah maupun kerja samaniyah dalam usaha atau karya bersama yang terkandung di dalamnya keinsyafan, kesadaran, dan sikap jiwa untuk menempatkan tata kehidupan dan penghidupan Indonesia menurut zaman, gotong

royong yang pada dasarnya adalah suatu azas tata-kehidupan dan penghidupan Indonesia asli dalam lingkungan masyarakat yang serba sederhana mekar menjadi Pancasila. Prinsip gotong royong melekat substansi nilai-nilai ketuhanan, musyawarah dan mufakat, kekeluargaan, keadilan, dan toleransi (perikemanusiaan) yang merupakan basis pandangan hidup atau sebagai landasan filsafat bangsa Indonesia.

Mencermati prinsip yang terkandung dalam gotong royong jelas melekat aspek-aspek yang terkandung dalam modal sosial. Modal sosial secara konseptual bercirikan adanya kerelaan individu untuk mengutamakan kepentingan bersama. Dorongan kerelaan yang dapat menumbuhkan energi kumulatif yang menghasilkan kinerja yang mengandung nilai-nilai modal sosial. Modal sosial adalah suatu konsep yang terdiri dari beberapa batasan dan definisi sesuai perkembangan wacana akademik. Namun, dalam batasan dan definisi unsur yang melekat dalamnya mengandung nilai jaringan sosial. Sejak diterima sebagai konsep akademis, modal sosial telah dimanfaatkan sebagai konsep penting dalam memahami persoalan dan masalah pembangunan yang dihadapi masyarakat dan komunitas kontemporer. Konsep yang mendasari modal sosial sudah lama dibahas dalam kalangan para akademisi. Awalnya konsep modal sosial menjadi wacana dalam kalangan para filsuf ilmu sosial terutama mereka yang berusaha menjelaskan hubungan antara kehidupan masyarakat pluralistik dan demokrasi, terutama ini berkembang di Amerika Serikat.

Ruang pendidikan masih merupakan arena strategis bagi penguatan nilai-nilai Pancasila. Secara normatif internalisasi nilai-nilai Pancasila diberikan melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ruangnya terbuka lebar apalagi di setiap jenjang pendidikan bahkan sampai pendidikan tinggi pelajaran atau mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Pancasila, ataupun Pendidikan Kewarganegaraan selalu diberikan. Meskipun yang menjadi keterbatasan adalah betapa materi yang diberikan masih sangat berbasis akademik. Padahal dalam konteks internalisasi nilai-nilai Pancasila, muatan pengetahuan saja tidaklah cukup dan membutuhkan aktualisasi dalam praktik keseharian.

Pancasila dalam perbuatan, demikian Latif (2014) menyebutnya, sebagai laku yang nampak dalam kehidupan sehari-hari. Maka beragam strategi perlu dilakukan agar anak-anak tidak sekadar tahu dan bisa menyebutkan sila satu sampai lima. Secara akademik tentu diskursus tentang sejarah Pancasila penting, tetapi yang lebih penting adalah aktualisasi dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran bahwa negeri ini didirikan untuk semua, dalam istilah Bung Karno “semua untuk semua”, yang artinya tidak eksklusif bagi kelompok tertentu menjadi utama. Sehingga setiap anak bangsa memahami pentingnya saling bekerja sama, bahu membahu, dan memiliki rasa solidaritas tinggi meskipun bangsa terdiri dari ragam suku bangsa, bahasa, agama, ataupun kelas sosial.

Momen ini merupakan titik yang tepat untuk dunia pendidikan merefleksikan diri bahwa tujuan pendidikan bukan semata untuk menggapai berbagai capaian akademik. Namun yang paling penting adalah agar anak-anak dapat diajak untuk merefleksikan diri akan pentingnya nilai-nilai, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sosial yang merupakan hal pokok dari Pancasila. Perwujudan dari semua nilai-nilai tersebut secara aktual menjadi hal yang sangat krusial dan perlu dikokohkan sejak dini. Strategi yang perlu dilakukan tentu sangat bergantung pada jenjang pendidikan.

Meskipun dalam pembelajaran jarak jauh yang dilakukan kurang lebih selama dua bulan penuh ini semua proses pendidikan menjadi lebih terbatas, tetapi momen refleksi menjadi relatif lebih mudah dilakukan. Anak-anak dapat melihat realitas keseharian di lingkungan sekitarnya. Mereka akan lebih mengenali lingkungan disekitar rumahnya. Ajak mereka menengok berbagai upaya apa yang bisa dilakukan untuk membantu masyarakat yang kesulitan atau apa yang sudah dilakukan oleh lingkungan sekitar. Upaya kolektif yang dilakukan masyarakat sekita mereka tentu merupakan contoh nyata dalam praktik nilai-nilai Pancasila yang sesungguhnya yaitu semangat gotong royong.

Beragam kisah aktual tentang kehebatan para siswa yang berbagi di situasi sulit saat ini. Di Kulon Progo siswa MA Al-Falah mengajak para siswa untuk menyisihkan sebagian uang jajan untuk diinfakan kepada warga yang kurang beruntung (Harianjogja, 2020). SMA Marsudirini Muntilan juga berbagi kepada

penduduk jompo (lansia) yang kesulitan selama melalui masa pandemi (Kartyadi, 2020). Di media sosial sekolah-sekolah di banyak tempat di Indonesia juga banyak diwartakan peduli sosial yang dilakukan sekolah. Anak-anak muda harapan bangsa ini membuat berbagai media visual untuk menyemangati para tenaga medis yang berjuang di garda terdepan juga mengkampanyekan pentingnya berdiam di rumah, menaati *physical distancing* serta memperhatikan protokol kesehatan selama pandemi berlangsung. Tanpa label manusia Pancasila, apa yang anak-anak lakukan tersebut adalah aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang sesungguhnya yaitu laku memanusiakan manusia lain dalam wujud sebaik-baiknya.

Ruang aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam konteks kekinian tentu sangat berbeda dengan di masa lampau. Ketika orang-orang enggan menyebut dan membicarakan Pancasila, gotong royong dapat dijadikan maskot dalam revitalisasi Pancasila. Persatuan dalam pandangan Romo Driyarkara memiliki substansi “ada bersama dengan cinta” sebagai cinta kasih pemersatu sila-sila lainnya. Pada masa revolusi kemerdekaan semangat gotong royong dipupuk oleh para tokoh lintas bangsa, etnis, agama, dari kalangan sipil maupun militer (Latif, 2014).

## **SIMPULAN**

Dalam situasi kondisi seperti ini nilai-nilai Pancasila khususnya semangat gotong royong sangat di harapkan diresapi dan diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Indonesia. Aktualisasi dalam semangat gotong royong menghadapi pandemi COVID-19 oleh masyarakat dilakukan secara beragam mulai dari anak-anak sekolah yang mengumpulkan uang sakunya untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, belum lagi aksi sosial yang dilakukan seperti bagi-bagi masker, memberi paket bantuan sembako, memberikan semangat motivasi moral untuk tenaga kesehatan. Hikmah dari pandemi COVID-19 ini benar-benar menjadi refleksi semangat gotong royong yang telah lama menjadi cikal bakal berdirinya negara Kesatuan Republik Indonesia.

## REFERENSI

- Agustina, S. S. (2020). *Menjaga solidaritas mencegah konflik akibat COVID-19*. <https://kompas.id/baca/riset/2020/05/19/menjaga-solidaritas-mencegah-konflik-akibat-COVID-19/>.
- Asia News Monitor. (2020). *Indonesia: pre-employment cards disbursed to cushion economy from COVID-19 impact*.
- Asia News Monitor. (2020). *Indonesia: COVID-19 to impact and Sumatera Ojek drivers' socio- economic existence*.
- BBC News Indonesia. (2020). *Dampak sosial virus corona: beban 'berlipat ganda' bagi perempuan di masa pandemi Covid-19*. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52323527>.
- Effendi, T. N. (2013). Budaya gotong-royong masyarakat dalam perubahan sosial saat ini. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*. 2(1), 1-18.
- Emma,. & Natalia. (2020). *Fears rise of social unrest in Indonesia: dangerous phase*. Melbourne: The Australian Financial Review.
- Harianjogja. (2020). *Ada pandemi corona sekolah di kulon progo ini ajarkan siswanya berbagi*. <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/05/15/514/1039220/ada-pandemi-corona-sekolah-di-kulonprogo-ini-ajarkan-siswanya-berbagi>.
- Huang C, Wang Y, Li X, Ren L, Zhao J, Hu Y, et al. (2020). *Clinical features of patents infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China*. *Lancet*. 497-506.
- Kartodijo, S. (1987). *“Gotong -royong: saling menolong dalam pembangunan masyarakat indonesia, dalam callette, nat.j dan kayam, umar (ed), kebudayaan dan pembangunan: sebuah pendekatan terhadap antropologi terapan di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Kartyadi, T. (2020). *SMA Marsudirini Muntilan Berbagi Sembako kepada Warga Dampak COVID-19*. <https://bernasnews.com/sma-marsudirini-muntilan-berbagi-sembako-kepada-warga-dampak-COVID-19/>.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Info Infeksi Emerging Kementerian Kesehatan RI*. <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/>
- Koentjaraningrat. (1987). *Ciri-ciri kehidupan masyarakat pedesaan di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kris, S. W., & Farid, M. (2018). Konsep bela negara dalam perspektif ketahanan nasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*. 48(3), 436-456.

- Kropotkin, P. (2006). *Gotong royong kunci kesejahteraan sosial: Tumbangnya Darwinisme sosial*. Depok: Pustaka Jaya.
- Latif, Y. (2014). *Mata air keteladanan: Pancasila dalam perbuatan*. Bandung: Mizan.
- Nurislaminingsih, R. (2020). Layanan pengetahuan tentang covid-19 di lembaga informasi. *Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi*. 4(1), 20-37.
- Pranadji, T. (2009). Penguatan kelembagaan gotong-royong dalam perspektif sosio budaya bangsa: Suatu revitalisasi adat istiadat dalam penyelenggaraan pemerintahan. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. 27(1), 61-27.
- Ren L-L, Wang Y-M, Wu Z-Q, Xiang Z-C, Guo L, Xu T, et al. (2020). *Identfcaton of a novel coronavirus causing severe pneumonia in human: a descriptve study*. DOI:10.1097/CM9.0000000000000722.
- Rothan H. A., & Byrareddy S. N. (2020). *The epidemiology and pathogenesis of coronavirus disease (COVID-19) outbreak*. DOI:10.1016/j.jaut.2020.102433.
- Sefriani. (2011). Ketaatan masyarakat internasional terhadap hukum internasional dalam perspektif filsafat hukum. *Jurnal Hukum*. 18(3), 405-427.
- Soerjanto, P. (1989). *Filsafat Pancasila Sebuah Pendekatan Sosio Budaya*. Jakarta: Gramedia,.
- Subagyo. (2012). Pengembangan nilai dan tradisi gotong royong dalam bingkai konservasi nilai budaya. *Indonesian Journal of Conservation*. 1(1), 61-68.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsono. (2007). *Pendidikan kewarganegaraan*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Suryahadi, et. al. (2020). *The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia*. Jakarta: The SMERU Research Institute.
- World Health Organizaton. (2020). Novel Coronavirus (2019-nCoV) Situaton Report - 54 [Internet]. WHO; 2020 [updated 2020 March 15; cited 2020 March30]. [https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situaton-reports/20200314-sitrep-54-covid-19.pdf?sfvrsn=dcd46351\\_2](https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situaton-reports/20200314-sitrep-54-covid-19.pdf?sfvrsn=dcd46351_2).
- World Health Organizaton. (2020). Situaton Report – 42 [Internet]. 2020 [updated 2020 March 02; cited 2020 March15]. [https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200302-sitrep-42-covid-19.pdf?sfvrsn=224c1add\\_2](https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200302-sitrep-42-covid-19.pdf?sfvrsn=224c1add_2).

- World Health Organizational. (2020). Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that causes it [Internet]. Geneva: World Health Organization; [cited 2020 March 29]. [https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-\(covid-2019\)-and-the-virus-that-causes-it](https://www.who.int/emergencies/diseases/novelcoronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it).
- World Health Organization. (2020) Coronavirus disease 2019 (COVID-19) Situation Report – 70 [Internet]. WHO; 2020 [updated 2020 March 30; cited 2020 March 31]. [https://www.who.int/docs/default-source/coronavirus/situation-reports/20200330-sitrep-70-covid-19.pdf?sfvrsn=7e0fe3f8\\_2](https://www.who.int/docs/default-source/coronavirus/situation-reports/20200330-sitrep-70-covid-19.pdf?sfvrsn=7e0fe3f8_2).
- Zed, M. (2003). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

# Pergulatan Pancasila dalam Kontestasi Politik 4 Pilar MPR RI

Hastangka

[hastangka@gmail.com](mailto:hastangka@gmail.com)

## Abstrak

Kajian ini akan membahas dan menganalisis tentang dinamika pergulatan dan perdebatan tentang Pancasila dalam kontestasi politik 4 Pilar MPR RI yang menerjemahkan Pancasila menjadi pilar. Istilah 4 Pilar MPR RI telah menimbulkan polemik pengistilahan serta perdebatan di kalangan masyarakat dan akademisi di Indonesia. Gagasan yang dirumuskan oleh MPR RI dengan mengkategorikan Pancasila menjadi varian atau kategori pilar bersama dengan UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika mendapat kritik yang cukup tajam di kalangan pendidik dan masyarakat. Tulisan ini akan menguraikan pergulatan Pancasila tersebut dalam kontestasi politik yang dibuat oleh MPR RI. Kajian ini merupakan kajian teoritis dan empirik. Data yang digunakan diambil dari sumber bacaan dan fenomena yang terjadi terkait dengan 4 Pilar MPR RI. Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode induktif-deduktif dalam menganalisis data yang diperoleh melalui studi pustaka dan kajian empirik. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa politik 4 Pilar MPR RI yang meletakkan Pancasila menjadi salah satu pilar menjadi salah bentuk pereduksian makna atas Pancasila sebagai dasar Negara dan menjadi bagian dari alat politik yang dimainkan para elit politik paska reformasi. Aktivis masyarakat menunjukkan bentuk kritik terhadap 4 pilar ini dengan membuat kegiatan Pancasila adalah dasar NKRI dan bukan pilar.

**Kata kunci:** Pancasila; Pergulatan; Dasar Negara; Masyarakat; Politik 4 Pilar.

## PENDAHULUAN

Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Penjelasan dan argumentasi bahwa Pancasila merupakan dasar Negara Republik Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai sumber otentik sejarah proses perumusan dan pembentukan dasar Negara. Namun dalam perkembangannya Pancasila kemudian digeser dan dimaknai menjadi pilar oleh lembaga Negara. MPR RI sebagai lembaga Negara melakukan kegiatan sosialisasi 4 Pilar MPR RI dengan mengkategorikan Pancasila sebagai pilar, UUD 1945 sebagai pilar, NKRI sebagai pilar, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai Pilar. Kegiatan ini telah membawa polemik di masyarakat dan kalangan akademisi dalam memahami Pancasila. Pancasila dasar atau pilar? Menjadi polemik dalam memahami Pancasila.

Pergulatan Pancasila sebagai dasar Negara sejak dirumuskan kembali lagi dipersoalkan dan diterjemahkan ulang. Pada era reformasi menjadi titik tolak penting masyarakat dan elit politik membaca ulang Pancasila. Pancasila dalam aspek sejarah dimaknai sebagai dasar Negara, kemudian dimaknai sebagai alat politik atau rezim orde baru untuk menundukkan warga Negara pada era reformasi memunculkan sentimen terhadap Pancasila untuk ditolak kehadirannya. Dalam

perkembangannya, Pancasila dihadirkan kembali dengan bentuk yang berbeda dan istilah yang baru dilakukan oleh MPR RI sejak tahun 2010 dengan menyebut bagian dari pilar atau 4 Pilar. Pada tahun 2012, MPR RI menerbitkan buku berjudul “Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara” buku ini terdiri atas 6 Bab dan menjabarkan empat pilar yang terdiri atas Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika pada setiap babnya (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012).

Penggunaan 4 Pilar MPR RI menjadi kontestasi baru dalam pemahaman Pancasila pada periode sekarang ini. Pancasila menjadi klaim lembaga politik yaitu MPR RI dengan diberi label pilar dan di sisi lain, Pancasila tidak dikenal sebagai pilar dalam sejarah bangsa Indonesia. Klaim penguasa ini telah membawa konflik sosiologis dan akademis tentang cara paham dan menalar tentang Pancasila pada era pasca reformasi. Negara sebagai lembaga memiliki otoritas dan kekuasaan untuk merumuskan dan melegitimasi gagasan Negara dan bangsa dan dasar Negara tetapi dalam aspek ini Negara melalui lembaga MPR RI justru membangun konsepsi Pancasila yang berbeda dari sejarah awal.

Ruang publik menjadi media kontestasi politik yang banyak dimainkan oleh para elit politik pada era pasca reformasi. Upaya pencitraan, membangun popularitas, menciptakan monopoli kebenaran dan pengetahuan kepada masyarakat, dan melaksanakan agenda program kerja. Ruang publik hari ini berkembang pada dua ranah yaitu ruang publik yang bersifat fisik dan ruang publik yang bersifat virtual. Ruang publik menjadi kontestasi para elit politik untuk mendapatkan perhatian dan simpati terhadap program program yang ditawarkan, bahkan program yang tidak bermanfaat pun menjadi daya tawar untuk dilakukan oleh para elit politik agar mendapatkan dukungan dan massa. Eksistensi diri menjadi kebutuhan para elit politik hari ini untuk menjalankan agenda program yang ditawarkan. Ruang publik menjadi alat untuk mendapatkan simpati dan pendukung. Program 4 Pilar yang dilakukan oleh MPR RI menjadi bagian dari kontestasi politik yang dibuat oleh MPR RI di ruang publik. Kontestasi politik ini terjadi di antara para elit politik dan masyarakat sebagai pihak yang menerima program tersebut apakah masuk akal, bisa diterima, bisa dipahami,

dengan tujuan apa, dan untuk apa diberikan kepada masyarakat, serta apa dampak bagi masyarakat. Kajian tentang pergulatan Pancasila dalam kontestasi politik 4 Pilar MPR RI ini menarik untuk diteliti karena polemik ini telah membawa potret peran elit politik dan masyarakat dalam memahami Pancasila mengalami gap atau kesenjangan yang cukup tajam. Kajian ini akan menganalisis pada sisi sosiologis terkait dengan reaksi masyarakat dalam menyikapi kegiatan MPR RI yang menyebut Pancasila sebagai pilar melalui program 4 Pilar MPR RI.

## **METODE**

Metode dalam kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif jenis penelitian fenomenologis. Kajian fenomenologis ini meletakkan pada realitas dan fenomena sosial dan politik yang berkembang di masyarakat atau di lingkungan sekitarnya terkait topik yang dibahas. Metode analisis yang digunakan menggunakan metode induktif deduktif. Adapun sumber data yang digunakan dalam kajian ini melalui studi pustaka, studi empirik melalui pengamatan, dan wawancara. Data yang digunakan dalam studi pustaka ialah buku, jurnal, dan media yang terpercaya seperti opini pada surat kabar *online* maupun *offline*.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

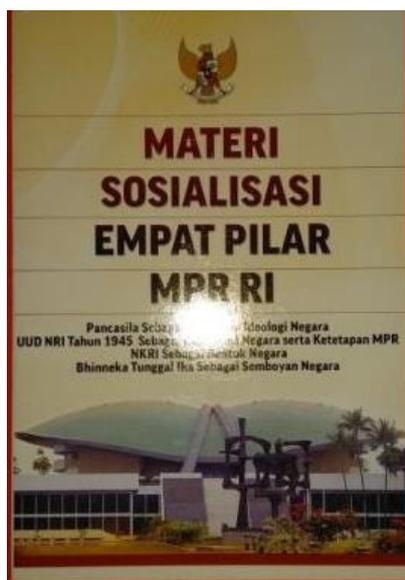
### **Konsepsi dan Pemahaman MPR RI tentang Pancasila**

Konsepsi dan pemahaman MPR RI tentang Pancasila sejak pasca reformasi menyebut bahwa Pancasila adalah pilar. Gagasan ini mulai muncul sejak awal tahun 2010 dengan sebutan 4 Pilar Berbangsa dan Bernegara yang terdiri atas Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian istilah ini digunakan untuk menjadi program sosialisasi MPR RI di berbagai daerah kepada seluruh masyarakat, penyelenggara Negara terkait, sampai hari ini MPR RI menggunakan istilah 4 Pilar MPR RI untuk melakukan program sosialisasi sebagaimana gambar di bawah ini:



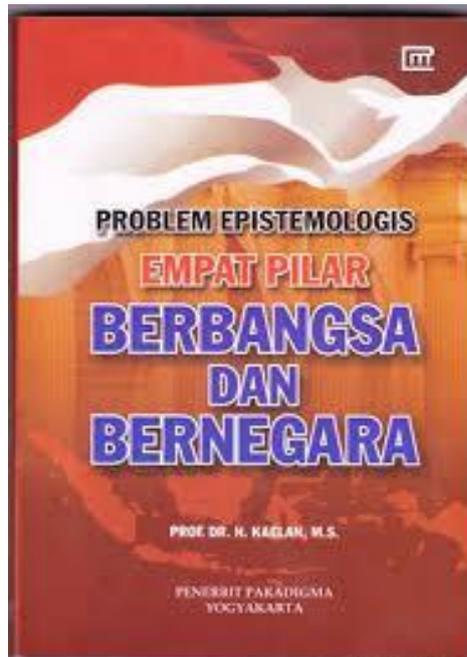
Gambar.1 salah satu anggota MPR RI melakukan sosialisasi 4 Pilar MPR RI pada pelaku UKM dan Pekerja Seni, 28 September 2020, foto diambil dari website/google.

Konsepsi dan pemahaman MPR RI tentang Pancasila yang menyebut pilar atau salah satu bagian dari kelompok 4 Pilar dengan UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika telah membawa dampak dalam proses pemahaman masyarakat tentang Pancasila. Pancasila dasar atau pilar?. Dalam buku yang diterbitkan MPR RI menunjukkan bahwa materi di dalam judul buku tersebut komponen 4 Pilar MPR RI yang dimaksud salah satunya terdapat Pancasila. Berikut di bawah ini buku 4 Pilar MPR RI yang biasa dibagikan kepada peserta sosialisasi.



Gambar.2. Buku dan Tas 4 Pilar MPR RI, foto diambil dari website/google.

Konsepsi lembaga Negara ini dalam merumuskan dan mendefinisikan Pancasila menjadi bagian 4 Pilar MPR RI berasal dari gagasan Taufik Kiemas ketika menjadi Ketua MPR RI periode 2009-2014 dalam memberikan nama program untuk sosialisasi MPR RI tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian program ini memasukan dan memberikan istilah 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang terdiri atas Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian MPR RI dikenal sebagai lembaga yang melakukan sosialisasi 4 Pilar sampai hari ini. Pada tahun 2014, pernah ada putusan MK Nomor 100/PUU-XI/2013 yang telah membatalkan frasa empat pilar karena bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hasil Putusan MK tersebut membawa konsekuensi pada penggunaan istilah 4 Pilar kebangsaan. Kemudian istilah tersebut diganti sampai sekarang menjadi 4 Pilar MPR RI. Konsepsi MPR RI dalam merumuskan Pancasila menjadi pilar telah membawa konsekuensi pada pemahaman tentang Pancasila. Pancasila mengalami dualisme pemahaman disatu sisi lembaga Negara MPR RI membuat rumusan dan konsep pilar. Pada sisi lain, akademisi dan masyarakat berpedoman pada sejarah perumusan Pancasila yang menyebut bahwa Pancasila adalah dasar Negara. Perbedaan ini telah menimbulkan polemik di kalangan akademisi kemudian muncul buku pada tahun 2012 yang ditulis akademisi atau pakar Pancasila bahwa terdapat persoalan epistemologis dalam penggunaan istilah 4 Pilar sebagai berikut.



Gambar 3. Buku Problem Epistemologis Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara,2012.

Buku di atas sebagai buku untuk pertama kalinya terbit dalam mengkritisi tentang keberadaan istilah 4 Pilar Berbangsa dan Bernegara yang digunakan oleh MPR RI. Isi dari buku tersebut menguraikan dengan komprehensif dan mendasar tentang persoalan epistemologis karena menyebut Pancasila sebagai pilar, NKRI sebagai pilar, UUD 1945 sebagai pilar, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pilar. Pokok kritik yang muncul dalam buku tersebut menunjukkan bahwa 4 Pilar telah membawa *logical fallacy* dan *epistemological mistake* dalam memahami Pancasila. Meskipun terdapat kritik sampai hari ini MPR RI masih berpedoman pada pemahaman dan konsepsinya bahwa Pancasila adalah pilar, UUD 1945 adalah pilar, NKRI adalah pilar, dan Bhinneka Tunggal Ika adalah pilar. Secara historis, filosofis, yuridis, dan sosiologis 4 Pilar MPR RI tidak dikenal dalam memori kolektif bangsa Indonesia. Kritik tentang 4 Pilar berlanjut pada ruang sosial dan masyarakat. Setelah secara yuridis dibatalkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013, kemudian secara akademik mendapatkan kritik dari kalangan akademisi, pendidik, dan guru. Kemudian dari masyarakat. Aspek sosiologis ini dapat dipotret dari gerakan masyarakat menolak penggunaan istilah 4 Pilar.

### **Gerakan Masyarakat Kritik Atas 4 Pilar**

Proses kritik atas penggunaan istilah 4 Pilar MPR RI yang memasukkan Pancasila menjadi pilar atau salah satu bagian dari pilar berlanjut karena ditemukan bahwa kegiatan sosialisasi 4 Pilar MPR RI yang diselenggarakan oleh MPR RI dengan menggunakan metode pendekatan ekonomis dan partisipatif. Metode yang selama ini dilakukan dengan seminar-seminar melibatkan berbagai elemen sebagai peserta dengan memberikan sejumlah uang transport sebesar antara Rp 100.000-125.000, mendapatkan fasilitas sertifikat, tas 4 Pilar MPR RI, buku 4 Pilar MPR RI, dan fasilitas makan siang dan *snack* gratis selama mengikuti seminar dengan jumlah peserta rata-rata 100 orang peserta setiap seminar. Sedangkan kegiatan bentuk camp 4 Pilar MPR juga diberikan uang transport, fasilitas hotel menginap selama camp, dan berbagai perlengkapan pendukung (Wawancara dengan responden 1 yang pernah mengikuti kegiatan sosialisasi 4 Pilar MPR RI, Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 29 Oktober 2020, Pkl.09:00-10:00). Kegiatan seminar sosialisasi 4 Pilar MPR periode 2017-2020 juga diakui oleh salah satu peserta kegiatan bahwa kegiatan ini mendapatkan seminar kit berupa tas, buku, sertifikat, uang konsumsi Rp.40.000 dan uang transport sebesar Rp.110.000 (Wawancara dengan responden 2 yang pernah mengikuti kegiatan sosialisasi 4 Pilar MPR RI sejak 2017 sampai dengan 2020, wawancara dilakukan pada hari Kamis, 29 Oktober 2020 pkl.10.30). Kegiatan ini diminati oleh masyarakat karena salah satunya mendapatkan tas dan mendapatkan uang transport yang diberikan pada akhir acara. Sosialisasi 4 Pilar MPR RI telah membawa dampak terhadap perubahan pemahaman di masyarakat dan elit masyarakat dalam memahami Pancasila berbeda dengan sejarah Pancasila. Pancasila hari ini dimaknai sebagai pilar dari bagian dari 4 Pilar yang terdiri atas UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Berikut ini salah satu elit atau perangkat dusun yang memahami Pancasila sebagai bagian dari pilar dengan membuat tugu batu yang diletakkan di pintu masuk menuju dusun di wilayah Sleman. Tugu ini dibuat oleh salah satu ketua RT setempat yang mendapatkan informasi dan pengetahuan di berita dan media bahwa Pancasila bagian dari Pilar

atau 4 Pilar MPR RI. Berikut ini tugu batu Empat Pilar yang mengkategorikan menjadi salah satu pilar dari pilar yang lain:



Gambar 4. dokumen pribadi dari penulis, diambil tahun 2019 di Sleman.

Gambar di atas menunjukkan fakta empiris bahwa masyarakat secara khusus elit masyarakat memahami Pancasila sebagai bagian dari pilar. Pemahaman ini sangat berbeda dengan apa yang terdapat dalam buku sejarah tentang Pancasila yang disebut sebagai dasar Negara. Realitas ini telah membawa keprihatinan dan kesadaran masyarakat untuk melakukan penyadaran kepada masyarakat yang lain dan komunitas yang selama ini telah mengalami distorsi pemahaman yang telah dilakukan oleh MPR RI. Salah Satu gerakan yang dilakukan oleh masyarakat melakukan edukasi dan meluruskan pemahaman secara konsisten dilakukan oleh masyarakat dengan membuat surat terbuka pada tanggal 3 Juli 2020 perihal “Persoalan sosialisasi 4 Pilar MPR RI (yang menyebut atau mengkategorikan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi Pilar atau satu kelompok Pilar)”, surat ini ditulis oleh warga masyarakat kepada 10 lembaga Negara (Presiden RI, Ketua MPR RI, Ketua DPR, Ketua BPK, Ketua KPK, Kepala BPIP, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Pimpinan Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia, dan Kepala Daerah dan Gubernur di seluruh Indonesia). di Indonesia dan pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menghentikan kegiatan sosialisasi 4 Pilar MPR RI yang dinilai dan dianggap sebagai bentuk pembodohan kepada masyarakat. Namun surat tersebut tidak ditanggapi oleh lembaga Negara termasuk MPR RI

dan DPR RI. Salah satu lembaga Negara yang menjawab surat terbuka tersebut ialah KPK. KPK menjawab surat terbuka tersebut pada tanggal 7 September 2020 yang berisi atas nama pimpinan kami menyampaikan apresiasi atas partisipasi Saudara dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Tertanda a.n Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat Harry Maryanto.

Kemudian masyarakat ini melakukan rilis terbuka di harian Kompas untuk memberikan tanggapan atas berita di harian Kompas sebelumnya terkait MPR RI melakukan sosialisasi 4 Pilar. Rilis opini tersebut menjelaskan bahwa kegiatan dan penggunaan 4 Pilar MPR RI cukup banyak merugikan masyarakat dan generasi menjadi korban atas penyimpangan sejarah tentang Pancasila dengan menyebut pilar dan warga masyarakat tidak setuju dengan istilah empat pilar MPR yang terdiri atas Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika (dimuat di Koran Kompas pada tanggal 7 September 2020, hal.7). Pada tahun 2018, juga pernah ada surat yang dibuat oleh M. Widodo, salah satu warga masyarakat yang ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Pengingkaran atas Amar Putusan MK tentang Pencabutan Frasa Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara. Isi surat tersebut menjelaskan tentang permintaan klarifikasi terhadap MK apakah benar MK memberikan saran kepada MPR RI untuk mengganti istilah sosialisasi dari 4 Pilar Berbangsa dan Bernegara menjadi empat pilar MPR RI. Program dan penamaan empat pilar pada dasarnya sudah bermasalah. Namun MPR RI sampai sekarang belum memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara untuk membuat program yang meresahkan tersebut diganti. Fakta sosial lainnya muncul terkait dengan penolakan terhadap 4 Pilar MPR RI karena menyebut Pancasila sebagai pilar, UUD 1945 sebagai pilar, NKRI sebagai pilar, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pilar. Berikut ini gambar dari aktivitas masyarakat yang tidak sepekat dengan apa yang dilakukan oleh politisi di MPR RI dalam melakukan sosialisasi 4 Pilar MPR RI yang dianggap salah dan berpotensi pada pembodohan kepada generasi anak bangsa dan masyarakat.



Gambar 5. Di kadipaten Pura Mangkunegara Solo bersama Bapak Kepala Desa di daerah Wonosobo dan pengurus makam. Dokumen pribadi KRAP Eri diambil Kamis, 22 Oktober 2020.

Upaya yang dilakukan masyarakat untuk melakukan edukasi dan pemahaman ulang atas proses penyimpangan yang dilakukan oleh MPR RI dengan melakukan sosialisasi 4 Pilar MPR RI (mengkategorikan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pilar), sudah sejak lama ketika MPR RI mulai memperkenalkan istilah 4 Pilar yang dianggap tidak lazim dan bertentangan dengan nalar sejarah oleh masyarakat. Berbagai kritik dan masukan sudah pernah disampaikan oleh MPR RI, namun sampai sekarang MPR RI tidak pernah menjawab masukan tersebut dan tetap melakukan kegiatan sosialisasi 4 Pilar sebagai bentuk kebenaran. Kegiatan meluruskan 4 Pilar sudah dilakukan oleh kelompok masyarakat seperti yang telah dilakukan salah satu warga masyarakat KRAP Eri Ratmanto yang berjuang untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang Pancasila sebagai dasar Negara dan bukan pilar, menjelaskan perbedaan dasar dan pilar. Kegiatan ini telah dilakukan oleh KRAP Eri Ratmanto sejak MPR RI melakukan sosialisasi 4 Pilar pada tahun 2010.

Kesadaran masyarakat dalam melihat program sosialisasi 4 Pilar dianggap bertentangan dengan kebenaran sejarah Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika karena masyarakat pernah mendapatkan pendidikan yang dikenal dengan P4 dan Pendidikan Moral Pancasila, sebagian masyarakat juga pernah menjadi manggala sebagai bagian dari proses pembentukan pengetahuan

tentang Pancasila. Dalam pidato Soekarno 1 Juni 1945, Lahirnya Pancasila juga menjelaskan bahwa usulan dari Soekarno tentang Pancasila ialah sebagai dasar Negara, *philosophische grondslag* (dasar filsafat Negara). Soekarno dalam uraiannya pada 1 Juni 1945 tidak pernah menyebut dan mengatakan Pancasila sebagai pilar Negara atau pilar MPR RI karena pada waktu itu MPR juga belum ada dan belum dibentuk. Pembukaan UUD 1945 pada alenia keempat menjelaskan bahwa susunan pemerintahan yang akan dibentuk berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta mewujudkan Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Istilah berdasar tidak dapat disamakan dengan berpilar sebagaimana gagasan dan konsep MPR RI menyebut Pancasila menjadi pilar berbangsa atau pilar MPR RI. Ketika masuk pada periode pemerintahan Soeharto dan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) diperkenalkan kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk pemberian pemahaman kepada masyarakat tentang Pancasila sebagai dasar Negara dan pandangan hidup bangsa. Terbitnya TAP MPR RI No.II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) dalam TAP MPR RI ini dijelaskan bahwa Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar Negara Republik Indonesia yang perlu dihayati dan diamalkan secara nyata untuk menjaga kelestarian dan keampuhannya demi terwujudnya tujuan nasional serta cita cita Bangsa seperti tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang dasar 1945 (klausul Menimbang, TAP MPR RI No.II/MPR/1978). Pada aspek historis dan yuridis menunjukkan bahwa pengertian Pancasila adalah dasar Negara. Dalam penelusuran sejarah, Pancasila tidak pernah dikatakan sebagai pilar kecuali dalam era MPR RI paska reformasi yang menjelaskan dan memberikan judul 4 Pilar MPR RI dalam program sosialisasinya. Dalam Pasal 36A UUD 1945 menyebutkan bahwa “Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika”. Kata atau istilah Bhinneka Tunggal Ika dalam Pasal ini disebut sebagai semboyan dan bukan pilar. Darmodiharjo juga menjelaskan bahwa Pancasila diadakan atau dirumuskan dengan tujuan untuk dipakai sebagai

Dasar Negara Indonesia Merdeka. Bukti sejarah yang menyatakan Pancasila adalah dasar Negara Republik Indonesia dapat ditemukan dalam: 1. Pembukaan Sidang BPUPK, Radjiman Wedodiningrat untuk meminta setiap anggota sidang menyampaikan dasar negara merdeka. 2. Yamin, 29 Mei dalam pidatonya menyatakan menyelidiki bahan-bahan menjadi dasar dan susunan negara yang akan terbentuk dalam suasana kemerdekaan. 3. R.P Soeroso, ketika memberikan peringatan kepada Yamin mengatakan: “sebagai diterangkan oleh tuan Ketua, tuan Rajiman yang tadi dibicarakan ialah dasar-dasarnya Indonesia Merdeka. 4. Soepomo dalam pidato sidang BPUPK 31 Mei 1945 mengatakan bahwa “soal yang akan kita bicarakan ialah bagaimana akan dasar-dasarnya Negara Indonesia merdeka”. 5. Pidato Soekarno, 1 Juni 1945 mengemukakan dasar Indonesia merdeka yakni filosofische grondslag dari Indonesia merdeka. 6. Dalam pembukaan UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI 18 Agustus 1945 tercantum kalimat “...maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar...” (Darmodiharjo, 1979:15-16). Latif menyatakan bahwa Pancasila sebagai lima nilai fundamental yang diidealisasikan sebagai konsepsi tentang dasar (filsafat) negara, pandangan dunia, dan ideologi negara bangsa Indonesia (Latif, 2020:26-27). Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan hirarkhi peraturan perundang-undangan di Indonesia tersusun sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan UU No 12/2011 yang telah dijelaskan, tidak disebutkan bahwa UUD 1945 merupakan pilar atau bagian dari pilar-pilar MPR RI yang

selama ini disebutkan oleh MPR RI melalui sosialisasi 4 Pilar. Dengan demikian, materi muatan 4 Pilar MPR RI yang menyebut Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika telah bertentangan dengan hirarkhi peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Narmoatmojo menjelaskan bahwa sudah terdapat justifikasi tentang Pancasila sebagai dasar negara mulai dari justifikasi historis dan yuridis (Narmoatmojo,2014). Justifikasi historis terdapat dalam sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara dan justifikasi yuridis terdapat di dalam pembukaan UUD 1945 dan produk peraturan perundang undangan yang lainnya. Terbitnya Ketetapan MPR RI Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 Tentang Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (*Ekaprasetia Pancakarsa*) Dan Penetapan Tentang Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara telah menegaskan kembali bahwa Pancasila merupakan dasar negara republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara memiliki fungsi sebagai dasar berdiri/membentuk dan tegaknya negara Indonesia, dasar mengatur kegiatan penyelenggaraan negara, dasar partisipasi warga negara, dasar pergaulan antara warga negara, dan dasar sumber hukum nasional (Bo'a, 2017:14). Penjabaran tentang Pancasila sebagai dasar negara ini dimaknai berbeda oleh MPR yang justru menyebut sebagai pilar. Penjabaran ini menjadi polemik di masyarakat sampai sekarang dan terjadi berbagai bentuk ekspresi masyarakat untuk menolak cara paham yang dimiliki oleh MPR RI. Gambar di bawah ini sebagai salah satu bentuk dari ekspresi masyarakat menegaskan kembali Pancasila sebagai dasar negara dan bukan pilar.



Gambar 6. Sejumlah masyarakat menyampaikan aspirasinya di depan Kantor Kepala Desa Sendangarum Menegaskan Pancasila Dasar NKRI bukan Pilar, dokumen foto pribadi KRAP Eri, 20 Oktober 2020.

Bentuk yang dilakukan oleh masyarakat dalam melakukan penyadaran kembali tentang pemahaman Pancasila sebagai dasar bukan pilar semakin intensif dilakukan berkaitan dengan kegiatan MPR RI yang juga semakin intensif melakukan sosialisasi 4 Pilar MPR RI ke berbagai masyarakat atau kelompok masyarakat yang lain. Kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara bergerilya menjelaskan pengertian dasar Negara dan pilar, menemui berbagai elemen masyarakat setiap saat dari penjual mie ayam, penjual angkringan, pedagang, pekerja seni, budayawan, raja raja nusantara, penjaga makam dimana pun dan kapan pun. Kemudian menemui berbagai akademisi, birokrat, dan melalui media menyampaikan gagasan dan aspirasi untuk meluruskan Pancasila dasar Negara bukan pilar.



Gambar 7. Generasi Muda menyampaikan aspirasi dan menegaskan Pancasila Dasar NKRI Bukan Pilar, dokumen pribadi KRAP Eri diambil 18 Oktober 2020.

Kegiatan untuk meluruskan Pancasila disebut pilar juga dilakukan ke kalangan generasi muda ketika mereka nanti akan mendapatkan informasi tentang sosialisasi 4 Pilar dengan menyebut Pancasila menjadi salah satu pilar sudah dapat memberikan argumen bahwa penyebutan tersebut adalah Salah atau tidak tepat. Begitu juga sebaliknya, jika generasi muda ini sudah pernah mendapatkan program sosialisasi 4 Pilar MPR RI dapat kembali ke jalan yang benar dan pemahaman mereka sesuai dengan sejarah bangsa bahwa Pancasila adalah dasar Negara bukan pilar. Harapannya generasi muda ini juga akan menyampaikan kepada teman teman sebayanya untuk memberikan pemahaman yang sama tentang makna dan pengertian yang benar tentang Pancasila adalah dasar Negara bukan pilar. Sama hal ketika menyebut UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika bukan pilar tetapi sesuai dengan makna dan fungsi. UUD 1945 adalah norma dasar Negara Republik Indonesia tidak bisa disebut pilar. NKRI adalah bentuk Negara, bukan pilar. Serta Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan Negara bukan pilar. Warsito menjelaskan bahwa kedudukan dan fungsi Pancasila dikaji secara ilmiah antara lain sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai ideologi bangsa dan negara, dan sebagai kepribadian bangsa (Warsito, 2016:1). Berdasarkan dari konsep dan kajian ilmiah Warsito menunjukkan bahwa Pancasila memang tidak dikenal dalam kategori ilmiah disebut sebagai pilar. Oleh karena itu, dapat terlihat bahwa kegiatan yang dilakukan oleh MPR RI dengan

menyebut Pancasila sebagai pilar menjadi salah satu bentuk ketidakilmiahan yang dilakukan oleh elit politik kepada warga negaranya. Mahfud MD menjelaskan bahwa Pancasila merupakan dasar negara harus menjadi sumber dari segala sumber hukum yang dasar dasarnya dituangkan di dalam Undang Undang Dasar (UUD) atau konstitusi dan peraturan perundang undangan (Mahfud, 2017:6). Pancasila kedudukan dan fungsi tetap diletakkan sebagai dasar negara dan sumber dari pembentukan peraturan perundangan-undangan. Upaya yang dilakukan oleh MPR RI dengan melakukan sosialisasi MPR RI menjadi salah satu bentuk politisasi terhadap Pancasila ke ranah publik yang berpotensi pada kebohongan publik antara kenyataan dengan seharusnya tidak konsisten dan sejalan dengan data data sejarah ketika MPR RI menyebut Pancasila sebagai pilar atau bagian dari 4 pilar MPR RI.



Gambar 8. Ekspresi masyarakat menyatakan pandangan Pancasila Dasar NKRI bukan Pilar di depan kegiatan masyarakat dokumen pribadi KRAP Eri pada tanggal 18 Oktober 2020.



Gambar 9. Stiker tentang Pancasila Dasar NKRI bukan Pilar



Gambar 10. Salah satu masyarakat menolak Pilar, istilah yang digunakan oleh MPR RI untuk Pancasila

Gambar di atas merupakan salah satu bentuk ekspresi dari masyarakat yang berupaya membuat alat peraga untuk memberikan pemahaman ulang kepada masyarakat tentang Pancasila adalah dasar NKRI dan bukan Pilar. Gambar tersebut dibuat oleh relawan dan masyarakat yang memiliki kesadaran tentang Pancasila yang benar bahwa Pancasila adalah dasar NKRI bukan Pilar sebagaimana yang telah dilakukan oleh MPR RI yang melakukan sosialisasi 4 Pilar MPR RI yang terdiri atas Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Cara masyarakat melakukan edukasi atas ketidakpahaman yang dilakukan oleh elit politik di MPR RI menarik dan fakta sosiologis ini menunjukkan semakin banyak masyarakat mulai sadar dan mengerti bahwa mengkategorikan Pancasila sebagai pilar merupakan hal yang tidak tepat dan bertentangan dengan sejarah Pancasila.



Gambar 11. Stiker yang tersebar di masyarakat Pancasila Dasar NKRI bukan Pilar

Berbagai bentuk visualisasi dan alat peraga di atas merupakan ekspresi masyarakat dan fakta sosiologis bahwa penerimaan atas kegiatan sosialisasi 4 Pilar MPR RI yang dilakukan MPR RI dinilai tidak mendidik masyarakat dan hanya sekedar tujuan menghabiskan anggaran rakyat. Kegiatan kritik yang dilakukan masyarakat ini juga tidak didengar oleh MPR RI. Dokumen tersebut dapat ditemukan di berbagai media elektronik atau internet. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran elit politik dalam memahami sejarah bangsa masih lemah dan kurang baik. Aspirasi rakyat dalam meluruskan dan memberikan penjelasan kepada elit politik tidak diperhatikan dengan baik oleh para elit politik. Kesadaran kepatuhan pada hukum dan UUD 1945 juga diabaikan oleh para elit politik paska reformasi.

## **SIMPULAN**

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa konsepsi dan pemahaman Pancasila yang dirumuskan oleh elit politik secara khusus lembaga Negara MPR RI telah menuai berbagai macam kritik dan tanggapan. Kritik yang ditujukan oleh MPR RI ialah menempatkan dan memosisikan Pancasila menjadi pilar adalah kesalahan dan bentuk sesat pikir dalam memahami Pancasila sebagai dasar Negara. Hasil dari fakta sosiologis menunjukkan ekspresi yang dilakukan oleh masyarakat dalam memberikan edukasi dan meluruskan sejarah Pancasila dengan melakukan dan membuat alat peraga seperti spanduk, stiker, dan media sosial lainnya untuk

memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang pemahaman yang benar terkait Pancasila. Pada dasarnya, cara-cara yang dilakukan pemerintah dalam melakukan sosialisasi Pancasila menjadi penting ketika kegiatan yang dilakukan MPR RI dapat didukung dengan data dan kajian yang memadai dan sesuai dengan konteks sejarah tentang Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam tulisan ini menunjukkan bahwa masyarakat memandang berbeda dengan cara yang dilakukan oleh MPR RI mengkategorikan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai varian yang sama sebagai pilar. Sehingga berdampak pada reaksi dari masyarakat ingin meluruskan program sosialisasi 4 Pilar MPR RI.

## **REFERENSI**

- Bo'a, F. Y. (2017). *Pancasila dalam sistem hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darmodiharjo, D. (1979). *Pancasila suatu Orientasi Singkat*. Cetakan ketujuh, Jakarta: Balai Pustaka.
- Latif, Y. (2020). *Wawasan Pancasila*, Jakarta: Mizan.
- Mahfud, M. D. (2017). *Prolog Pancasila sebagai pijakan politik dan ketatanegaraan. Pancasila dalam Pancasila dalam pusaran globalisasi*, (editor Al Khanif, Mirza Satria Buana, dan Manunggal Kusuma Wardaya), Yogyakarta: LKis.hal.1-14.
- Narmoatmojo, W. (2014). *Pancasila & UUD NRI 1945*. Yogyakarta: Ombak.
- Soekarno. (1945). *Lahirnya Pancasila, Dokumen Risalah Sidang BPUPK 1945*.
- Ratmanto, K.R.A.P., & Eri. (2020). *Pancasila Dasar Negara. Surat Kepada Redaksi*, Koran Kompas, 7 September 2020, hal.7.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (1978). *Ketetapan MPR RI Nomor.II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa)*.
- Republik Indonesia. (1998). *Ketetapan MPR RI Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 Tentang Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) Dan Penetapan Tentang Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara*

- Republik Indonesia. (2011). Undang Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Republik Indonesia. (2013). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013.
- Sekretariat Jenderal MPR RI. (2012). *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: MPR RI.
- Warsito. (2016). *Pendidikan Pancasila era reformasi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Wawancara dengan responden 1 yang pernah mengikuti kegiatan sosialisasi 4 Pilar MPR RI, Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 29 Oktober 2020, Pkl.09:00-10:00.
- Wawancara dengan responden 2 yang pernah mengikuti kegiatan sosialisasi 4 Pilar MPR RI sejak 2017 sampai dengan 2020, wawancara dilakukan pada hari Kamis, 29 Oktober 2020 pkl.10.30.
- Wawancara dengan responden 2 (KRAP Eri), 30 Oktober 2020, pkl.10.00-11.00.

# Implementasi Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Herman Hendrik

Pusat Penelitian Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
[herman.hendrik2003@gmail.com](mailto:herman.hendrik2003@gmail.com)

## Abstrak

Meski dikecualikan dari kategori agama, Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (selanjutnya disebut Kepercayaan) telah diakui oleh negara Indonesia sejak awal kemerdekaan. Para penghayat, atau penganut Kepercayaan, pun memiliki beberapa hak sipil yang berkaitan dengan agama; misalnya: terdaftar sebagai penganut Kepercayaan dalam basis data kependudukan, melakukan upacara pernikahan berdasarkan Kepercayaan, melakukan pemakaman berdasarkan Kepercayaan, dan mendapatkan pendidikan Kepercayaan di sekolah sebagai pengganti pendidikan agama. Pelaksanaan pendidikan Kepercayaan dirintis pada tahun 2017, setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016. Pendidikan Kepercayaan terus berjalan meskipun belum ada buku teks resmi dan guru yang tersertifikasi. Banyak kajian tentang Kepercayaan telah dilakukan, tetapi kajian tentang implementasi pendidikan Kepercayaan masih jarang. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi pendidikan Kepercayaan. Berdasarkan pada suatu penelitian kualitatif, dengan studi dokumen dan wawancara sebagai metode utama pengumpulan data, artikel ini menunjukkan bahwa penghayat memiliki peran penting dalam implementasi pendidikan Kepercayaan. Peran penting tersebut berupa kemauan mereka untuk mengajar secara sukarela serta melobi pemerintah daerah dan sekolah agar bersedia menyelenggarakan pendidikan Kepercayaan.

**Kata kunci:** agama asli; agama lokal; pendidikan agama; kebijakan pendidikan.

## PENDAHULUAN

Selain enam agama resmi, pemerintah Indonesia juga mengakui Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (selanjutnya disebut Kepercayaan). Agama resmi di Indonesia yaitu Islam, Katolik, Kristen, Budha, Hindu, dan Konghucu. Sementara itu, Kepercayaan terdiri dari berbagai agama asli, agama lokal, serta macam-macam aliran Kepercayaan.<sup>1</sup> Oleh karena itu, Kepercayaan merupakan suatu istilah yang digunakan untuk merujuk pada berbagai agama (asli dan lokal) serta Kepercayaan yang dikecualikan dari kategori agama (resmi) (Bawono, 2016; Rofiq, 2014). Dalam hal kebijakan, agama-agama (resmi) dinaungi oleh Kementerian Agama melalui satuan-satuan kerja yang sesuai; sementara Kepercayaan ditangani oleh Kementerian Pendidikan dan

---

<sup>1</sup> Untuk keterangan lebih lanjut mengenai Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, termasuk tentang eksistensi dan kebijakan terhadapnya sejak masa awal kemerdekaan Indonesia, lihat Damami (2010).

Kebudayaan,<sup>2</sup> khususnya oleh Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat—salah satu direktorat yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan.<sup>3</sup>

Jumlah pasti penganut Kepercayaan belum dapat dipastikan. Hal itu diduga berhubungan dengan kurangnya keberanian dan kepercayaan diri di antara sebagian penganut Kepercayaan untuk mengungkapkan jatidiri mereka; mengingat adanya kekhawatiran bahwa mereka akan mendapatkan perlakuan diskriminatif sehubungan dengan keyakinan mereka yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Lebih jauh lagi, secara hukum—sebelum berkembangnya kebijakan yang menjamin hak-hak sipil penghayat Kepercayaan—tidak ada ruang bagi mereka untuk terdaftar sebagai penganut Kepercayaan. Namun, pendekatan lain dapat digunakan untuk menunjukkan keberadaan penganut Kepercayaan. Itu adalah data organisasi Kepercayaan yang terdaftar, yang dirilis oleh Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi (mulai sekarang dan seterusnya, istilah "Direktorat Kepercayaan" akan digunakan untuk keringkasan). Menurut data tersebut, terdapat 187 organisasi di tingkat pusat dengan 1.047 organisasi di tingkat cabang di seluruh Indonesia per Juli 2017 (Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi, 2017a). Data mengenai jumlah organisasi penghayat itu dapat disimak pada Tabel 1.

---

<sup>2</sup> Pada awalnya, urusan Kepercayaan juga dipegang oleh Departemen Agama, tetapi kemudian dialihkan ke instansi yang mengurus kebudayaan. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai hal tersebut, dapat dibaca hasil penelitian oleh Damami (2010).

<sup>3</sup> Nama direktorat tersebut telah beberapa kali berubah, sebelumnya pernah dinamakan Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi. Lebih jauh lagi, direktorat tersebut pernah berpindah-pindah instansi mengikuti satuan kerja yang mengurus kebijakan kebudayaan; di antara yaitu Direktorat Jenderal Nilai Budaya, Seni dan Film, Kementerian (Departemen) Kebudayaan dan Pariwisata.

Tabel 1. Jumlah organisasi penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di tingkat pusat berdasarkan provinsi (per Juli 2017)

No.	Provinsi	Jumlah Organisasi Penghayat
1	Sumatera Utara	12
2	Lampung	5
3	DKI Jakarta	4
4	Banten	1
5	Jawa Barat	7
6	Jawa Tengah	53
7	DI Yogyakarta	25
8	Jawa Timur	50
9	Bali	8
10	Nusa Tenggara Barat	2
11	Nusa Tenggara Timur	5
12	Sulawesi Utara	4
13	Riau	1
<b>Total</b>		<b>187</b>

*Sumber: Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi (2017a).*

Terlepas dari ketidakpastian tentang jumlah penganutnya, pengakuan terhadap eksistensi Kepercayaan di Indonesia diikuti dengan pemenuhan hak-hak sipil para penganutnya. Sejalan dengan itu, hak-hak sipil tersebut telah menjadi isu dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Hak-hak sipil berupa pelayanan administrasi organisasi penghayat Kepercayaan, penyelenggaraan pemakaman umum, dan penyediaan sasana sarasehan—atau sarana peribadatan didasarkan pada dan dijamin oleh Peraturan Bersama Menteri Kebudayaan dan Pariwisata dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 43 dan 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan bagi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (PBM No. 43 dan 41/2009). Pelayanan Catatan Sipil Penghayat Kepercayaan diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pelayanan administrasi perkawinan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi, 2016). Sementara itu, layanan Pendidikan Kepercayaan di lembaga pendidikan formal diamanatkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Nomor 27 tahun 2016 (Permendikbud No. 27/2016) (Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi, 2017c).

Namun, implementasi layanan untuk penghayat Kepercayaan masih mengalami kendala. Masalah tersebut terungkap dari sebuah dokumen yang dirilis oleh Direktorat Kepercayaan. Dalam dokumen tersebut tertera beberapa masalah dalam penyediaan layanan bagi penghayat Kepercayaan, mulai dari layanan administrasi organisasi hingga layanan pendidikan (Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi, 2016). Rincian permasalahan tersebut yaitu masalah dalam bidang administrasi organisasi kepercayaan, pelayanan pemakaman, penyediaan sarana sarasehan (tempat ibadah), administrasi pencatatan kependudukan, administrasi pencatatan perkawinan, dan pelayanan pendidikan (Hendrik, 2019).

Data dari Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi (2016) yang kemudian dielaborasi oleh Hendrik (2019) menunjukkan bahwa pelayanan pendidikan bagi penghayat Kepercayaan di sekolah belum memiliki payung hukum, dalam konteks sebelum lahirnya Permendikbud No. 27/2016. Dalam kekosongan dasar hukum seperti itu, penyelenggaraan pendidikan Kepercayaan di satuan pendidikan formal dapat dikatakan tidak mungkin dilakukan. Konsekuensi dari hal tersebut yaitu (1) adanya siswa penghayat yang tidak mengikuti pendidikan agama (resmi) yang disediakan oleh sekolah dan (2) adanya siswa penghayat yang terpaksa mengikuti pendidikan agama salah satu agama (resmi) yang disediakan sekolah. Permasalahan timbul ketika siswa penghayat tidak bersedia untuk mengikuti pendidikan agama (resmi) yang disediakan oleh sekolah; yang dicontohkan dengan adanya kasus siswa penghayat yang tidak bisa naik kelas karena tidak mempunyai nilai mata pelajaran pendidikan agama pada rapotnya. Namun, masalah dalam pelayanan pendidikan itu terjadi sebelum Permendikbud No. 27/2016 diterbitkan. Sehubungan dengan itu, menarik untuk mengetahui layanan pendidikan bagi penghayat Kepercayaan pasca lahirnya peraturan menteri tersebut.

Kajian tentang Kepercayaan telah banyak dilakukan oleh para peneliti. Namun, kebanyakan di antaranya lebih berfokus pada aspek-aspek atau gambaran tentang berbagai aliran atau organisasi Kepercayaan.<sup>4</sup> Adapun kajian tentang implementasi kebijakan terkait Kepercayaan atau penyampaian layanan bagi penghayat Kepercayaan masih relatif sedikit. Di antara yang sedikit itu, ada studi oleh Schiller (1996), Handes (2011), Rofiq (2014), Budijanto (2016), dan Hendrik (2019). Khusus mengenai implementasi pendidikan Kepercayaan, ada hasil penelitian oleh Zakiyah (2018) serta Maulana dan Setyowati (2019).

Schiller (1996) mengemukakan bahwa kebijakan agama pada masa Orde Baru telah mendorong adanya pengidentifikasian agama asli sebagai agama resmi dalam beberapa aspek agar kepentingan mereka diakomodasi oleh pemerintah. Adapun Handes (2011) mengungkapkan bahwa pengawasan berbagai aliran Kepercayaan oleh kejaksaan masih mengalami kendala. Sementara itu, Rofiq (2014) menemukan bahwa kebijakan daerah yang suportif mengarah pada peningkatan keberanian sebagian penganut Kepercayaan untuk mengekspresikan identitas mereka secara bebas. Ketiga studi tersebut telah memberikan wawasan tentang hubungan antara negara dan Kepercayaan, tetapi tidak mengekspos pemberian layanan untuk para penghayat Kepercayaan.

Hasil kajian oleh Budijanto (2016) mengemukakan bahwa pelayanan bagi para penghayat Kepercayaan mengalami kendala karena regulasi yang kurang detail. Sementara itu, Hendrik (2019) mengungkapkan bahwa permasalahan dalam pelayanan kepada penghayat Kepercayaan berkaitan dengan paradigma kebijakan kebudayaan di Indonesia yang banyak menekankan pada komodifikasi serta tujuan yang lebih ekonomis-pragmatis. Studi-studi tersebut sebetulnya telah memberikan sedikit bayangan tentang implementasi layanan untuk para penghayat Kepercayaan. Namun, studi tersebut belum membahas implementasi pendidikan Kepercayaan.

Literatur yang secara khusus membahas tentang implementasi pendidikan Kepercayaan di sekolah yaitu oleh Zakiyah (2018) serta Maulana dan Setyowati

---

<sup>4</sup> Misalnya kajian tentang konsep ke-Tuhan-an dalam Kepercayaan (Setiawan, 2016; Wiyono, 2017) dan praktik ritual penghayat Kepercayaan (Nginayah, 2014).

(2019). Zakiyah (2018) mengemukakan bahwa Pemerintah Kabupaten Cilacap telah memberikan pelayanan pendidikan kepercayaan—meskipun masih banyak keterbatasan—dan itu merupakan sebuah upaya pemenuhan hak asasi manusia. Sementara itu, Maulana dan Setyowati (2019) mengungkapkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya telah memenuhi hak peserta didik penghayat kepercayaan dengan menyelenggarakan pendidikan kepercayaan meskipun implementasinya masih belum maksimal. Kedua kajian itu telah memberi gambaran tentang implementasi pendidikan Kepercayaan di sekolah. Namun, kedua tulisan itu baru mengangkat kasus yang didasarkan pada penelitian di sebuah kota. Sehubungan dengan itu, artikel ini akan berupaya untuk memaparkan tentang pelaksanaan pendidikan Kepercayaan di satuan pendidikan formal dalam konteks wilayah yang lebih luas.

## **METODE**

Artikel ini didasarkan pada sebuah penelitian kualitatif, dengan studi dokumen dan wawancara sebagai teknik utama pengumpulan data. Dokumen yang dipelajari dalam penelitian ini adalah buku pedomanan pelaksanaan pendidikan Kepercayaan, naskah laporan peningkatan kompetensi penyuluh Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tingkat terampil, berita dari media massa yang tersedia secara online, dan hasil penelitian terdahulu. Sementara itu, wawancara dilakukan terhadap: (1) seorang penghayat Kepercayaan—yang juga Sekretaris Jenderal Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (MLKI, sebuah asosiasi yang menaungi organisasi-organisasi Kepercayaan yang ada di Indonesia), seorang asesor Kepercayaan, serta seorang guru pendidikan Kepercayaan di beberapa sekolah di Kota Depok (Jawa Barat) dan di sebuah sekolah di Brebes (Jawa Tengah)—dan (2) dua orang staf Direktorat Kepercayaan. Pengumpulan data dilakukan pada bulan September dan Oktober 2018, yang ditambah dengan data dari wawancara pada bulan Oktober 2020.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penyelenggaraan pendidikan Kepercayaan di satuan pendidikan formal merupakan amanat Permendikbud No. 27/2016. Pendidikan Kepercayaan menggantikan, atau berfungsi sebagai, pendidikan agama bagi siswa penghayat

Kepercayaan. Ia diperlukan mengingat pendidikan agama adalah wajib bagi setiap siswa, berdasarkan amanat dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) (Taylor, 2017); sementara penghayat Kepercayaan bukanlah (selalu) penganut enam agama resmi Indonesia. Pelaksanaan pendidikan Kepercayaan menjadikan buku pedoman pelaksanaan pendidikan Kepercayaan sebagai panduan. Buku panduan tersebut merupakan penjelasan dari Permendikbud 27/2016 (Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, 2017c).

Sebelum hadirnya Permendikbud No. 27/2016, sebenarnya beberapa sekolah sudah menerapkan pendidikan Kepercayaan. Salah satu contohnya yaitu SMPN 3 Depok, Jawa Barat. Inisiatif untuk penyelenggaraan pendidikan Kepercayaan di sekolah itu datang dari seorang siswanya yang merupakan penghayat Kepercayaan. Siswa tersebut terpaksa untuk mengikuti mata pelajaran pendidikan agama salah satu agama resmi yang disediakan oleh sekolahnya, tetapi ia mengalami kesulitan dalam memahaminya. Di samping itu, ia juga ingin mempelajari Kepercayaannya sendiri daripada mempelajari agama orang lain. Oleh karena itu, orang tua siswa dimaksud berkonsultasi dengan MLKI. Akhirnya, MLKI berhasil melobi sekolah dan siswa tersebut bisa mendapatkan pendidikan Kepercayaan di sekolahnya. Pada saat itu, setiap aspek penyelenggaraan pendidikan—dari mulai kurikulum, sumber belajar, pengajar, hingga penilaian—diserahkan kepada organisasi penghayat di mana siswa tersebut bernaung. Sekolah hanya menuntut nilai akhir yang dibutuhkan untuk mengisi laporan dan untuk menentukan prestasi pendidikan siswa tersebut.

Lahirnya Permendikbud No. 27/2016 memberi ruang bagi penyelenggaraan pendidikan Kepercayaan—sebagai pengganti pendidikan agama bagi siswa penghayat—secara resmi. Penerapan pendidikan Kepercayaan pun terdokumentasikan dalam beberapa pemberitaan media massa. Pemberitaan tersebut umumnya mencakup permasalahan atau keterbatasan dalam pelaksanaan pendidikan Kepercayaan. Beberapa hal yang terungkap dalam pemberitaan media massa (daring) yaitu dari aspek pengajar atau guru, sumber belajar atau buku,

tempat belajar, dan waktu belajar. Berbagai temuan dalam keempat aspek itu tertuang dalam Tabel 2.

Tabel 2. Implementasi pendidikan Kepercayaan berdasarkan pemberitaan media massa

<b>Aspek</b>	<b>Temuan</b>
<b>Pengajar</b>	Ditunjuk oleh MLKI, bukan guru profesional, tidak ada gaji/honor
<b>Sumber belajar</b>	Belum ada buku teks (materi dari MLKI)
<b>Tempat belajar</b>	Bukan di kelas (ruang UKS, perpustakaan, aula, laboratorium)
<b>Waktu belajar</b>	Tidak ada jam pelajaran khusus (pada jam mata pelajaran agama atau setelah KBM reguler selesai)

*Sumber: Hasil olah data dari media massa.*

Tabel 2 menunjukkan bahwa pengajar mata pelajaran pendidikan Kepercayaan bukanlah guru yang tersertifikasi untuk mengajar mata pelajaran yang bersangkutan. Para pengajar itu merupakan para penyuluh Kepercayaan yang secara sukarela—berdasarkan penugasan dari MLKI masing-masing wilayah—mengajar pendidikan Kepercayaan. Dengan kata lain, mereka bukanlah guru profesional. Selain itu, mereka juga tidak digaji atau tidak mendapatkan honor sehubungan dengan kegiatan mereka mengajar pendidikan Kepercayaan (Liputan6, 2017; Tribun Jateng, 2018a, 2018c). Tabel 2 juga mengungkapkan bahwa implementasi pendidikan kepercayaan belum menggunakan buku teks, hanya memanfaatkan materi yang disusun oleh MLKI (Liputan6, 2018). Dalam hal tempat belajar, Tabel 2 mengungkapkan bahwa pembelajaran pendidikan Kepercayaan umumnya tidak dilaksanakan di kelas; tetapi di ruang UKS, perpustakaan, aula, atau laboratorium (Liputan6, 2017; Tribun Jateng, 2018b). Hal lain yang dipaparkan oleh Tabel 2 yaitu bahwa waktu pembelajaran pendidikan Kepercayaan bersifat fleksibel—menyesuaikan konteks masing-masing sekolah—misalnya pada waktu siswa beragama lain melaksanakan pembelajaran pendidikan agama atau bahkan di luar jam sekolah berakhir (Liputan6, 2017, 2018).

Hasil penelitian terdahulu tentang pendidikan Kepercayaan juga memuat temuan tentang implementasi pendidikan Kepercayaan di beberapa sekolah. Tulisan Zakiyah (2018) serta Maulana dan Setyowati (2019) setidaknya dapat menjadi gambaran. Temuan mereka dapat dikelompokkan berdasarkan klasifikasi pengajar, sumber belajar, tempat belajar, dan waktu belajar. Klasifikasi tersebut dapat disimak dalam Tabel 3.

Tabel 3. Implementasi pendidikan Kepercayaan berdasarkan hasil penelitian terdahulu

<b>Aspek</b>	<b>Temuan</b>
<b>Pengajar</b>	Ditunjuk oleh MLKI, bukan guru, diberi insentif
<b>Sumber belajar</b>	Disediakan oleh MLKI, bukan buku paket, materi berlaku untuk semua aliran kepercayaan
<b>Tempat belajar</b>	Aula, perpustakaan, laboratorium
<b>Waktu belajar</b>	Jam mata pelajaran agama lain, waktu salat Jumat

*Sumber: hasil olah data dari Zakiyah (2018) dan Maulana dan Setyowati (2019).*

Dalam artikelnya, Zakiyah (2018) mengemukakan temuannya bahwa dari segi waktu, penyelenggaraan pendidikan Kepercayaan di beberapa sekolah di Cilacap mengambil waktu jam mata pelajaran pendidikan agama. Tempat yang biasa digunakan yaitu aula dan perpustakaan. Pengajarnya yaitu penyuluh Kepercayaan yang ditugaskan oleh MLKI. Sumber belajarnya yaitu materi yang disediakan oleh MLKI. Hal yang menarik yaitu bahwa para pengajar pendidikan Kepercayaan di Cilacap mendapatkan kompensasi berupa uang transport.

Maulana & Setyowati (2019) dalam artikelnya mengemukakan bahwa kegiatan pembelajaran pendidikan Kepercayaan di SMAN 9 Surabaya biasa dilakukan di laboratorium atau perpustakaan, sehingga sarana dan prasarana kurang memadai. Waktunya biasanya yaitu pada waktu siswa beragama Islam melaksanakan ibadah salat Jumat, berarti sekitar pukul 12.00 hingga 13.00 setiap hari Jumat. Pengajarnya yaitu penyuluh Kepercayaan yang ditugaskan oleh MLKI. Sumber belajar yang digunakan yaitu materi dari MLKI, yang mana ditujukan untuk semua siswa yang berasal dari berbagai aliran Kepercayaan.

Berdasarkan wawancara dengan seorang petinggi MLKI dan dua orang staf Direktorat Kepercayaan pada akhir tahun 2018—dan sedikit tambahan dari wawancara tahun 2020, terungkap bahwa pasca kelahiran Permendikbud No. 27/2016 implementasi pendidikan Kepercayaan di sekolah-sekolah telah berjalan dengan lebih baik karena telah memiliki dasar hukum. Meskipun demikian, masih ada tantangan yang harus dihadapi. Tantang pertama yaitu keberanian atau kepercayaan diri penghayat Kepercayaan untuk menunjukkan jati dirinya; mengesampingkan kekhawatiran akan stereotipe dan diskriminasi. Penyelenggaraan pendidikan Kepercayaan sejauh ini banyak bertumpu pada prakarsa setiap pemeluk Kepercayaan. Hal pertama yang harus dilakukan untuk mendapatkan pendidikan Kepercayaan di sekolah yaitu mengklaim bahwa seorang siswa adalah penganut Kepercayaan pada waktu mengisi formulir penerimaan peserta didik baru (PPDB). Dengan mengklaim demikian, berarti siswa penghayat meminta sekolah untuk menyediakan pendidikan Kepercayaan. Setelah sekolah setuju untuk melaksanakan pendidikan Kepercayaan, siswa penghayat harus berkonsultasi dengan organisasi Kepercayaan di mana dia bernaung untuk bantuan lebih lanjut, terutama dalam hal penyediaan guru. Tanpa keberanian atau kepercayaan diri seorang siswa penghayat atau keluarganya untuk menyatakan jati dirinya sebagai penghayat Kepercayaan, suatu sekolah kemungkinan besar tidak tahu dan tidak akan menyediakan mata pelajaran pendidikan Kepercayaan.

Setelah seorang siswa penghayat diberi kesempatan untuk mendapatkan pendidikan Kepercayaan di sekolahnya, tantangan berikutnya yaitu dari aspek teknis penyelenggaraan suatu mata pelajaran; yang meliputi aspek pengajar, sumber belajar, waktu belajar, tempat belajar. Selama guru resmi tidak tersedia, maka pendidikan Kepercayaan di sekolah disampaikan oleh penyuluh Kepercayaan. Ketersediaan penyuluh yang memenuhi syarat merupakan prasyarat dalam melaksanakan pendidikan Kepercayaan. Oleh karena itu, dalam mempersiapkan penyelenggaraan pendidikan Kepercayaan, Direktorat Kepercayaan menyelenggarakan lokakarya bagi para penyuluh Kepercayaan.

Sejak tahun 2016 hingga 2018, Direktorat Kepercayaan telah melakukan lokakarya di empat kota berbeda di Indonesia; yaitu Semarang, Solo, Medan, dan

Surabaya. Lokakarya tersebut melatih sebanyak 184 penyuluh dari berbagai organisasi Kepercayaan di seluruh Indonesia. Materi yang dipaparkan dalam lokakarya ini adalah tentang Tuhan Yang Maha Esa, tata krama sebagai penganut Kepercayaan, sejarah Kepercayaan, dan martabat spiritual. Setelah dilatih dalam lokakarya tersebut, para penyuluh diharapkan memahami proses pembelajaran pendidikan Kepercayaan; menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai penyuluh; memahami dasar-dasar penyuluhan; membangun materi penyuluhan; membangun dan mempraktikkan instrumen evaluasi; dan untuk menyampaikan sesi penyuluhan (Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi, 2017b).

Sementara itu, per tahun 2020, jumlah penyuluh Kepercayaan yang mengikuti lokakarya yaitu sebanyak 326 orang. Jumlah tersebut tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Rinciannya yaitu penyuluh Kepercayaan di Provinsi Aceh berjumlah 2 orang, di Provinsi Sumatera Utara berjumlah 64 orang, di Provinsi Riau berjumlah 11 orang, di Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 7 orang, di Provinsi Lampung berjumlah 5 orang, di Provinsi Sulawesi Utara berjumlah 10 orang, di Provinsi Sulawesi Barat 59 orang, di Provinsi Kalimantan Selatan berjumlah 8 orang, di Provinsi Nusa Tenggara Timur berjumlah 37 orang, di Provinsi DKI Jakarta berjumlah 3 orang, di Provinsi Banten berjumlah 4 orang, di Provinsi Jawa Barat berjumlah 24 orang, di Provinsi Jawa Tengah berjumlah 61 orang, di Provinsi Jawa Timur berjumlah 26 orang, dan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berjumlah 6 orang (Lastani, 2020).

Pada tahap awal pelaksanaannya, pendidikan Kepercayaan menggunakan empat modul yang diterbitkan oleh Direktorat Kepercayaan, yang merupakan modul yang sama yang digunakan dalam lokakarya. Kemudian, Direktorat Kepercayaan menyusun buku teks pendidikan Kepercayaan untuk semua jenjang pendidikan, yang kemudian terbit pada tahun 2019. Para pengajar pendidikan Kepercayaan di seluruh Indonesia telah menggunakan draf buku teks tersebut dalam menyampaikan pendidikan Kepercayaan. Topik yang dibahas dalam buku teks sama dengan empat modul yang digunakan dalam lokakarya; yakni tentang Tuhan Yang Maha Esa, tata krama sebagai penganut Kepercayaan, sejarah

Kepercayaan, dan martabat spiritual. Perbedaannya terletak pada tingkat kerumitannya. Modul lebih kompleks karena disiapkan sebagai pedoman bagi pengajar, serta bahan bacaan dalam lokakarya; lebih seperti buku teks untuk mahasiswa. Sementara buku teks yang disiapkan untuk pendidikan Kepercayaan di sekolah tidak terlalu rumit karena dirancang untuk siswa dan telah disesuaikan untuk jenjang pendidikan yang berbeda. Draf buku teks tersebut dinilai sangat membantu para penyuluh Kepercayaan karena kepraktisannya.

Siswa dari organisasi Kepercayaan yang berbeda-beda dapat diajar oleh satu orang penyuluh, terlepas dari perbedaan aliran Kepercayaan antara sang penyuluh dan para siswanya. Para siswa juga menggunakan buku teks yang sama. Hal itu karena penyuluh dilatih untuk mengajarkan aspek universal dari Kepercayaan kepada para siswa penghayat dengan latar belakang aliran Kepercayaan yang berbeda-beda. Di samping itu, buku teks juga dirancang untuk mencakup aspek universal dari berbagai aliran Kepercayaan yang ada di Indonesia. Sehubungan dengan itu, penyuluh Kepercayaan didorong untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang aliran Kepercayaan selain yang dianutnya.

Penyelenggaraan pendidikan Kepercayaan di sekolah bersifat fleksibel dari segi waktu dan tempat. Dari segi waktu, kegiatan belajar mengajar lebih banyak dilakukan pada akhir pekan. Sedangkan dari segi tempat, pendidikan Kepercayaan dilakukan di rumah pengajar atau di sanggar mereka. Hal tersebut mengingat banyak di antara para penyuluh memiliki pekerjaan profesional yang tidak terkait dengan peran mereka sebagai penyuluh Kepercayaan, sehingga memiliki jam kerja masing-masing. Para penyuluh Kepercayaan itu mengajar pendidikan Kepercayaan secara sukarela. Mereka bukanlah guru profesional (resmi) yang harus mencurahkan seluruh waktunya untuk kegiatan yang berhubungan dengan pengajaran. Oleh karena itu, kegiatan belajar mengajar pendidikan Kepercayaan perlu disesuaikan dengan jadwal pengajarnya.

Karena ini adalah kebijakan yang baru diimplementasikan, pendidikan Kepercayaan menghadapi beberapa kendala. Kendala pertama terkait dengan

kompetensi teknis pengajar. Mereka masih mengalami kesulitan dalam membuat perencanaan pelaksanaan pembelajaran, silabus, dan materi ujian (soal atau pertanyaan ujian). Hal tersebut dikarenakan latar belakang profesionalitas para pengajar yang sebagian besar tidak memiliki kualifikasi sebagai pengajar (baca: tidak bergelar sarjana pendidikan). Kendala kedua adalah beberapa dinas pendidikan dan sekolah di beberapa daerah yang meragukan legalitas pendidikan Kepercayaan dan para pengajarnya. Kendala ketiga terkait dengan kendala kedua yaitu legalitas penyuluh Kepercayaan. Prosedur bagi penyuluh Kepercayaan untuk mendapatkan surat keputusan (SK)—atau dokumen apa pun yang menyatakan legalitas mereka sebagai guru pendidikan Kepercayaan—cukup rumit. Untuk mendapatkan SK yang dikeluarkan oleh Direktorat Kepercayaan, penyuluh Kepercayaan harus memiliki dokumen yang menyatakan bahwa mereka telah mengajar mata pelajaran pendidikan Kepercayaan di sekolah—kurang lebih seperti surat keterangan bekerja. Sedangkan untuk mendapatkan surat keterangan bekerja, penyuluh harus memiliki surat keputusan.

Penilaian dalam pendidikan Kepercayaan pada dasarnya mengadopsi sistem penilaian yang umumnya diterapkan di Indonesia. Penilaian tersebut meliputi penilaian harian, ujian tengah semester, ujian semester akhir, dan ujian sekolah berstandar nasional atau USBN. Asesmen harian dilakukan di tempat-tempat kegiatan belajar mengajar pendidikan Kepercayaan berlangsung. Sedangkan ujian semester tengah dan akhir serta USBN dilakukan di sekolah masing-masing. Materi penilaian atau ujian berupa daftar soal atau pertanyaan disiapkan oleh masing-masing penyuluh Kepercayaan yang mengajar di suatu sekolah, berdasarkan buku pedoman dan buku teks. Dalam kasus USBN, MLKI menyiapkan 25% dari pertanyaan atau soal, dan sisanya disiapkan oleh penyuluh Kepercayaan masing-masing yang mengajar, sebagaimana diatur oleh sistem USBN.

Kendala yang dihadapi penyuluh Kepercayaan dalam penilaian pendidikan Kepercayaan adalah kurangnya kompetensi dalam membuat materi ujian atau soal. Pasalnya, sebagian besar dari mereka tidak memiliki pengalaman atau belum terlatih sebagai guru profesional. Lebih lanjut, implementasi pendidikan

Kepercayaan, termasuk penilaiannya, merupakan kebijakan yang baru dilaksanakan. Perlu waktu bagi para pemangku kepentingan, terutama para guru, untuk memahami dan mendalami masalah tersebut. Meskipun demikian, para penyuluh masih dapat mengatasi hal tersebut. Salah satunya yaitu karena adanya pertukaran materi ujian di antara para penyuluh Kepercayaan di seluruh Indonesia, yang difasilitasi oleh MLKI. Secara umum, nilai para siswa penghayat dalam asesmen pendidikan Kepercayaan memuaskan bagi para pengajar. Namun, ada topik di mana banyak siswa penghayat mendapatkan nilai lebih rendah, yaitu materi tentang sejarah Kepercayaan.

Implementasi pendidikan Kepercayaan melibatkan peran beberapa pihak. Mereka adalah Direktorat Kepercayaan, organisasi Kepercayaan, asosiasi organisasi Kepercayaan (MLKI), sekolah, dan dinas pendidikan. Para pihak tersebut memainkan peran masing-masing. Direktorat Kepercayaan berperan dalam pengambilan kebijakan tentang layanan pendidikan Kepercayaan; termasuk mengadakan *workshop*, mengeluarkan keputusan, dan menerbitkan buku panduan. Organisasi kepercayaan memiliki peran dalam menyediakan calon penyuluh untuk dilatih dan melaporkan kebutuhan dalam pelaksanaan pendidikan Kepercayaan kepada MLKI. Adapun MLKI berperan dalam memfasilitasi setiap kebutuhan penganutnya yang terkait dengan pendidikan Kepercayaan dan menjadi perantara antara penganut Kepercayaan dan pemangku kepentingan lainnya.

Uraian yang telah dijelaskan, mengungkapkan beberapa poin. *Pertama*, pendidikan Kepercayaan telah menjadi kebutuhan para penganut Kepercayaan; dan sudah diselenggarakan sebelum keluarnya Permendikbud No. 27/2016. *Kedua*, ada universalitas dalam ajaran organisasi Kepercayaan yang berbeda-beda. Siswa yang berasal dari berbagai organisasi Kepercayaan dapat diajar oleh penyuluh Kepercayaan apa pun terlepas dari organisasi Kepercayaan penyuluh tersebut. Para siswa juga berbagi buku teks yang sama. *Ketiga*, peran penganut Kepercayaan sangat penting. Mereka harus berinisiatif untuk mendapatkan pendidikan Kepercayaan di sekolah-sekolah dengan mengklaim sebagai penganut Kepercayaan; karena itu berarti menuntut sekolah untuk memberikan pendidikan

Kepercayaan. Mereka juga secara sukarela mengajar dan menyediakan tempat untuk kegiatan belajar mengajar. Selain itu, mereka juga melobi pemerintah daerah dan sekolah untuk melaksanakan pendidikan Kepercayaan. *Keempat*, penilaian dalam pendidikan Kepercayaan mengikuti sistem penilaian nasional. Perbedaannya terletak pada tata cara menilai atau memeriksa ritual khusus yang ada dalam aliran Kepercayaan tertentu yang dianut siswa. Dalam hal ini, penyuluh meminta organisasi Kepercayaan masing-masing siswa untuk membuat penilaian ujian dan mengirimkan hasil atau skornya kembali kepada penyuluh. *Kelima*, kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pendidikan Kepercayaan terutama terkait dengan kurangnya kompetensi teknis pengajar. Itu karena banyak dari mereka bukan guru (resmi dan profesional) atau tidak memiliki pengalaman mengajar.

Hasil wawancara yang telah diuraikan, tampaknya masih berkesesuaian dengan pemberitaan media massa dan hasil penelitian terdahulu tentang implementasi pendidikan Kepercayaan di sekolah. Temuan-temuan yang ada mengkonfirmasi bahwa dari aspek pengajar, pendidikan Kepercayaan mengandalkan penyuluh Kepercayaan; dari aspek tempat belajar, pendidikan Kepercayaan umumnya tidak dilakukan di kelas; dan dari aspek waktu belajar, pendidikan Kepercayaan umumnya fleksibel sesuai dengan konteks pengajar dan siswa penghayat di suatu sekolah. Adapun untuk sumber belajar, sudah ada perkembangan, yaitu diterbitkan buku teks mata pelajaran pendidikan Kepercayaan untuk semua jenjang pendidikan pada tahun 2019.

Pelaksanaan pendidikan Kepercayaan telah berjalan, meskipun dengan beberapa tantangan dan kekurangan. Hal tersebut mengimplikasikan bahwa temuan berbagai penelitian sebelumnya tentang pelayanan bagi penghayat Kepercayaan masih sejalan dengan temuan kajian yang hasilnya dituangkan dalam tulisan ini. Sebagai contoh, yaitu kajian oleh Hendrik (2019) yang mengidentifikasi permasalahan seputar pelayanan hak-hak penghayat Kepercayaan; serta kajian oleh Zakiyah (2018) serta Maulana dan Setyowati (2019) yang menggambarkan adanya keterbatasan dalam penyelenggaraan pendidikan Kepercayaan.

Meskipun demikian, argumen studi Budijanto (2016) tidak berlaku dalam hal pelayanan pendidikan bagi penganut Kepercayaan. Dalam kajian Budijanto, masalah pelayanan yang dihadapi adalah penyediaan tempat pemakaman umum dan akar permasalahannya adalah kurangnya detail peraturan daerah mengenai hal itu. Sebenarnya, pendidikan Kepercayaan juga pada awalnya belum memiliki peraturan khusus dan rinci tersebut, mengingat penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia merupakan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Sejauh ini, belum ada peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan Kepercayaan. Salah satu penjelasan yang mungkin dari permasalahan tersebut yaitu dalam hal penyelenggaraan pemakaman umum, banyak pihak yang terlibat dan berkepentingan, yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat disuatu daerah. Sedangkan di bidang pendidikan, pemangku kepentingan dibatasi pada tiga pihak. Yang pertama adalah mereka yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan, yaitu lembaga pendidikan. Yang kedua adalah regulator, Direktorat Kepercayaan. Yang ketiga adalah mereka yang memiliki kepentingan untuk mendapatkan pendidikan Kepercayaan, yaitu penganut Kepercayaan.

## **SIMPULAN**

Artikel ini telah menggambarkan beberapa poin penting dalam implementasi pendidikan Kepercayaan. Dengan tidak adanya guru resmi dan tidak tersedianya buku teks, penyuluh bertindak sebagai guru dan menggunakan bahan lokakarya dan draf buku teks bahan ajar. Seorang penyuluh Kepercayaan dari aliran apapun memenuhi syarat untuk mengajar siswa dari organisasi Kepercayaan yang berbeda-beda. Modul dan draf buku teks juga berlaku untuk siswa dari berbagai organisasi Kepercayaan. Kegiatan belajar mengajar dalam pendidikan Kepercayaan bersifat fleksibel dari segi waktu dan tempat. Biasanya itu dilakukan di rumah penyuluh atau fasilitas ibadah organisasi. Secara umum, kendala dalam melaksanakan pendidikan Kepercayaan terutama terkait dengan fakta bahwa banyak dari para penyuluh Kepercayaan yang bukan guru. Mereka harus belajar, bahkan dari nol, untuk mengajar siswa secara formal. Penganut Kepercayaan sendiri telah memainkan peran penting dalam melaksanakan pendidikan

Kepercayaan di sekolah. Peran penting tersebut terlihat dari kemauan mereka untuk mengajar secara sukarela dan melobi pemerintah daerah dan sekolah untuk melaksanakan pendidikan Kepercayaan. Dalam hal penilaian, pendidikan Kepercayaan pada dasarnya mengikuti apa yang diatur oleh sistem pendidikan nasional. Keunikan penilaian dalam pendidikan Kepercayaan adalah bahwa, bila diperlukan, seorang penyuluh dapat berkonsultasi dengan organisasi Kepercayaan tertentu untuk menilai kompetensi ritual siswa yang berasal dari organisasi Kepercayaan berbeda dari organisasi Kepercayaannya sendiri.

Berdasarkan temuan-temuan yang telah diuraikan, artikel ini merekomendasikan empat poin yang terbagi dalam dua kategori. Yang pertama adalah rekomendasi terkait kebijakan pendidikan Kepercayaan. Direkomendasikan agar Direktorat Kepercayaan atau MLKI menyelenggarakan *workshop* atau pelatihan untuk meningkatkan kompetensi teknis dan pedagogik para penyuluh Kepercayaan. Terkait hal itu, sebaiknya MLKI membentuk organ yang bertanggung jawab membuat bank soal untuk penilaian hasil belajar atau ujian. Selain itu, perlu adanya regulasi yang mewajibkan sekolah untuk aktif mendaftar siswa penghayat yang ada di sekolahnya. Kedua, rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut. Disarankan agar dilakukan penelitian lebih lanjut tentang keberlanjutan pendidikan Kepercayaan, mengingat banyak aspek pelaksanaannya sangat bergantung pada kesukarelaan penganutnya. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat membantu membuat kebijakan yang lebih komprehensif tentang pendidikan Kepercayaan.

## **REFERENSI**

- Bawono, H. (2016). Archival institution as agent of representation of religious plurality in Indonesia. *Proceeding of The Asian Conference on Literature, Librarianship & Archival Science 2016*, 183–198. <https://papers.iafor.org/proceedings/issn-2186-2281-the-asian-conference-on-literature-and-librarianship-2016-official-conference-proceedings/>
- Budijanto, O. W. (2016). Penghormatan hak asasi manusia bagi penghayat kepercayaan di Kota Bandung. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 7(1), 35–44.
- Damami, M. (2010). *Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 1973-1983*. Unpublished doctorate dissertation at Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

- Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi. (2016). *Evaluasi permasalahan pelayanan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME*.
- Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi. (2017a). *Kebijakan Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi tentang pengelolaan kelembagaan*. Presentasi oleh Direktur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang pada tanggal 17 Agustus 2017.
- Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi. (2017b). *Laporan peningkatan kompetensi penyuluh kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tingkat terampil*.
- Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi. (2017c). *Pedoman implementasi layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada satuan pendidikan*. Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi.
- Handes, A. D. D. (2011). *Peranan kejaksaan dalam pengawasan aliran kepercayaan dan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama ditinjau dari perspektif penegakan hukum pidana*. Tesis magister pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, tidak diterbitkan.
- Hendrik, H. (2019). Permasalahan dalam pelayanan kepada penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. *Inovasi*, 16(1), 37–45.
- Lastani, E. R. (2020). *Implementasi pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di satuan pendidikan dan pengaruh kebijakan zonasi PPDB*. Presentasi Sekjen MLKI dalam FGD Puslitjak Kemdikbud.
- Liputan6. (2017). *Cara siswa penghayat Kepercayaan di Cilacap belajar agama*. liputan6.com. <https://www.liputan6.com/regional/read/3157607/cara-siswa-penghayat-kepercayaan-di-cilacap-belajar-agama>
- Liputan6. (2018). *Perjuangan panjang siswa penghayat Kepercayaan ikuti USBN*. liputan6.com. <https://www.liputan6.com/regional/read/3427077/perjuangan-panjang-siswa-penghayat-kepercayaan-ikuti-usbn>
- Maulana, B., & Setyowati, N. (2019). Pemenuhan hak warga negara oleh negara (Studi akses pendidikan kepercayaan bagi peserta didik sekolah menengah atas penghayat Kerokhanian Sapta Darma Cabang Surabaya). *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 7(1), 196–210. <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-kewarganegaraan/article/view/27601>
- Nginayah, I. (2014). Keberadaan Himpunan Penganut Kepercayaan (HPK) sebagai penganut Kejawen di Desa Pekuncen Kecamatan Kroya

Kabupaten Cilacap. *Wahana Akademika*, 1(2), 289–310.

- Rofiq, A. C. (2014). Kebijakan pemerintah terkait hak sipil penghayat kepercayaan dan implikasinya terhadap perkembangan penghayat kepercayaan di Ponorogo. *Kodifikasia*, 8(1), 1–22.
- Schiller, A. (1996). An “old” religion in “new order” Indonesia: Notes on ethnicity and religious affiliation. *Sociology of Religion*, 57(4), 409–417.
- Setiawan, I. G. M. B. (2016). *Paguyuban Perguruan Budaya Tirta Padepokan Segara Gunung, konversi dan adhesi: Mencari tuhan tanpa batas agama*. Unpublished doctorate dissertation at Universitas Indonesia.
- Taylor, G. S. (2017). *Umat Hindu keluhkan minimnya guru agama di Jakarta ke Anies*. [cnnindonesia.com.  
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171105144624-20-253586/umat-hindu-keluhkan-minimnya-guru-agama-di-jakarta-ke-anies](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171105144624-20-253586/umat-hindu-keluhkan-minimnya-guru-agama-di-jakarta-ke-anies)
- Tribun Jateng. (2018a). *Kerikil tajam penghayat Kepercayaan Cilacap di dunia pendidikan*. [jateng.tribunnews.com.  
https://jateng.tribunnews.com/2018/04/24/kerikil-tajam-penghayat-kepercayaan-cilacap-di-dunia-pendidikan?page=2](https://jateng.tribunnews.com/2018/04/24/kerikil-tajam-penghayat-kepercayaan-cilacap-di-dunia-pendidikan?page=2)
- Tribun Jateng. (2018b). *Kerikil tajam penghayat Kepercayaan Cilacap di dunia pendidikan*. [jateng.tribunnews.com.  
https://jateng.tribunnews.com/2018/04/24/kerikil-tajam-penghayat-kepercayaan-cilacap-di-dunia-pendidikan?page=4](https://jateng.tribunnews.com/2018/04/24/kerikil-tajam-penghayat-kepercayaan-cilacap-di-dunia-pendidikan?page=4)
- Tribun Jateng. (2018c). *Perjuangan guru penghayat Kepercayaan rela mengajar meski tak dibayar*. [jateng.tribunnews.com.  
https://jateng.tribunnews.com/2018/05/03/perjuangan-guru-penghayat-kepercayaan-rela-mengajar-meski-tak-dibayar](https://jateng.tribunnews.com/2018/05/03/perjuangan-guru-penghayat-kepercayaan-rela-mengajar-meski-tak-dibayar)
- Wiyono, H. D. (2017). *Pemaknaan ketuhanan pada penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Kaweruh Hak 101 Cilacap*. Undergraduate thesis at Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
- Zakiyah. (2018). Pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa: Pemenuhan hak siswa penghayat di sekolah. *Penamas Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, 31(2), 397–418. <https://doi.org/10.31330/penamas.v31i2.232>

# **Eksistensi Paguyuban Sendang Mataram dalam Menjaga Budaya sebagai Penguatan Identitas Nasional**

**Ikhtiyar Setiawan**

[ikhtiyarsetiawan.2019@student.uny.ac.id](mailto:ikhtiyarsetiawan.2019@student.uny.ac.id)

## **Abstrak**

Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan peran paguyuban di Yogyakarta dalam menjaga budaya sebagai penguatan identitas nasional. Pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian yaitu fenomenologi. Data dikumpulkan dengan teknik observasi, teknik wawancara, dan teknik dokumentasi. Penelitian ini menemukan bahwa paguyuban Sendang Mataram aktif dalam menjaga nilai-nilai budaya leluhur di Yogyakarta. Upaya dalam melestarikan dan memperkenalkan budaya dilakukan dengan mengikuti atau berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Yogyakarta. Secara umum, mereka telah berpartisipasi dalam menjaga nilai-nilai budaya yang merupakan sebagai sebuah identitas nasional bangsa Indonesia. Namun Paguyuban Sendang Mataram tetap harus berkembang mengikuti perubahan zaman di era global ini agar tetap dapat menjaga dan melestarikan serta memperkuat budaya sebagai identitas nasional bangsa.

**Kata Kunci:** Paguyuban; Budaya; Identitas Nasional.

## **PENDAHULUAN**

Negara Indonesia adalah salah satu negara multikultur terbesar di dunia, hal ini dapat terlihat dari kondisi sosiokultural maupun geografis Indonesia yang begitu kompleks, beragam, dan luas. “Indonesia terdiri atas sejumlah besar kelompok etnis, budaya, agama, dan lain-lain yang masing-masing plural (jamak) dan sekaligus juga heterogen “aneka ragam” (Kusumohamidjojo, 2000:45). Keberagaman tersebut dapat menjadi ancaman yang nyata bagi Indonesia jika tidak adanya jiwa nasionalisme disetiap warga negara. Akan muncul konflik-konflik kepentingan yang menjadi permasalahan baru di Indonesia. Ada masyarakat yang merasa sebagai ras yang unggul yang memandang ras lain rendah dari ras kelompoknya. Munculnya isu-isu seperti itu justru melibatkan masyarakat adat yang dijadikan alat propaganda oleh kelompok tertentu untuk memanaskan susana yang kondusif di tengah keberagaman ras dan suku yang ada di Indonesia. Semangat persatuan yang disimbolkan oleh selogan Bhinneka Tunggal Ika telah mengalami keputaran. Banyak konflik-konflik yang terjadi di masyarakat yang disebabkan gesekan antar ras atau suku yang dianggap berbeda budaya dengan mereka. Keragaman masyarakat multikultural sebagai kekayaan bangsa di sisi lain sangat rawan memicu konflik dan perpecahan. Sebagaimana

yang dikemukakan oleh Nasikun (2008: 33) bahwa kemajemukan masyarakat Indonesia paling tidak dapat dilihat dari dua cirinya yang unik, pertama secara horizontal, yang ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat, serta perbedaan kedaerahan, dan kedua secara vertikal ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam.

Dalam menjaga keberagaman budaya dan kesatuan sosial dalam masyarakat, peran paguyuban perlu dilestariakan guna membangun solidaritas antar budaya yang majemuk di tengah masyarakat. Paguyuban difungsikan untuk melestariakan budaya-budaya lokal yang diajarkan secara luas kepada masyarakat dan anak-anak pada lingkup kelompok masyarakat. Dengan kata lain, bahwa terbentuknya paguyuban atau kelompok sosial tentu memiliki suatu tujuan, terutama demi mendukung keberhasilan suatu cita-cita bersama. Yogyakarta merupakan daerah yang masih sangat kental dengan kebudayaannya, tidak heran banyak paguyuban-paguyuban yang eksis di wilayah Yogyakarta. Sebagai contohnya Paguyuban Sendang Mataram yang berasal dari Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman.

Paguyuban Sendang Mataram sendiri didirikan pada akhir tahun 2016 oleh kelompok masyarakat yang peduli dan prihatin dengan memudarnya kebudayaan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Paguyuban Sendang Mataram sendiri sangat kreatif dan produktif serta banyak melakukan pembaruan-pembaruan dalam hal bentuk pertunjukan. Paguyuban Sendang Mataram merupakan paguyuban yang berdiri atas dasar kesamaan ideologi atau jiwa dan pikiran yang dimiliki oleh anggota-anggotanya atau bisa disebut dengan *gemeinschaft of mind* (Soekanto, 2012: 18). Saat ini anggota Paguyuban Sendang Mataram mulai bertambah dan berkembang. Paguyuban tersebut tidak menutup kemungkinan bertambahnya anggota dari luar komunitas masyarakat tersebut, ada juga kalangan mahasiswa yang ikut bergabung karena tempat tinggalnya berada di wilayah paguyuban tersebut. Dengan banyaknya anggota paguyuban berarti semakin beragam etnis atau suku setiap anggota di dalam paguyuban tersebut. Pemerintah daerah sangat mendukung adanya paguyuban tersebut. Dukungan itu diwujudkan

melalui diadakannya pertunjukan budaya antar paguyuban yang ada di wilayah Kabupaten Sleman dan bisa juga dari luar Sleman.

Paguyuban Sendang Mataram memiliki prestasi yang lumayan membanggakan. Mereka selalu ikut berpartisipasi pada acara-acara besar yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah Yogyakarta dan selalu masuk dalam kelas juara. Selain itu, Paguyuban Sendang Mataram dapat dijadikan sebagai simbol kesukubangsaan yang menampung berbagai anggota dari berbagai ras tertentu. Stereotip terhadap anggota paguyuban yang berbeda kesukuan jika tidak diimbangi dengan sikap pluralisme yang tinggi maka yang terjadi yaitu pengikisan rasa nasionalisme dan memudarnya identitas nasional terhadap bangsa Indonesia.

Peristiwa-peristiwa yang menunjukkan keberagaman identitas keetnisan di dalam Paguyuban Sendang Mataram menarik untuk dikaji lebih mendalam. Munculnya persatuan dari setiap kegiatan-kegiatan yang dijalankan menunjukkan kesatuan keberagaman etnis atau ras di Indonesia yang dibalut dalam wadah Paguyuban Sendang Mataram yang ada di Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman. Kebaruan penelitian ini dilakukan di sekretariat Paguyuban Sendang Mataram yang berada di Pogung Kidul, Sinduadi, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman. Peneliti memfokuskan pada kebanggaan dan perawatan etnis yang dilakukan kelompok Paguyuban Sendang Mataram serta sikap nasionalisme dalam penguatan identitas nasional.

## **METODE**

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis yaitu kualitatif dengan tipe fenomenologi. Penelitian ini dilaksanakan di sekretariat atau sanggar Paguyuban Sendang Mataram yang terletak di Pogung Kidul, Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman. Penelitian dilakukan bulan April tahun 2020. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara, teknik observasi, dan teknik dokumentasi. Subjek penelitian diambil dari perwakilan beberapa anggota paguyuban. Triangulasi sumber dan triangulasi teknik digunakan untuk memvalidasi data penelitian. Data dianalisis dengan tahap pengumpulan data; reduksi data; penyajian data; dan simpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kebanggaan Paguyuban Sendang Mataram dalam Menjaga Budaya**

Kebanggaan terhadap budaya merupakan suatu primordialisme dan merupakan suatu penghargaan warga negara terhadap identitas bangsanya. Menurut Kun (2014: 17) primordialisme merupakan ikatan-ikatan seseorang dalam kehidupan sosial yang berpegang teguh pada suatu hal yang sudah ada sejak lahir, berupa: ras, suku, kepercayaan, adat-istiadat, tempat kelahiran, dan sebagainya. Sikap primordialisme sangat mempengaruhi pola perilaku seorang individu dalam hubungan sosial.

Anggota Paguyuban Sendang Mataram memiliki kebanggaan tersendiri dalam menjadi anggota di dalam Paguyuban tersebut. Munculnya sikap tersebut disebabkan karena setiap anggota selalu merasa ikut berpartisipasi dalam menjaga warisan leluhur mereka dan tetap menjunjung tinggi kebudayaan yang dimiliki meskipun mereka berada jauh dari kampung halaman dan sekaligus menjadi kelompok baru dalam lingkungan di tempat lain. Inilah yang dimaksud Weber, Hiers, & Flesken (2016: 2-3) bahwa etnis berarti persepsi asal yang sama, berdasarkan seperangkat atribut umum, seperti: bahasa, budaya, sejarah, lokalitas, dan fisik penampilan.

Berikut kegiatan seni dan budaya yang di lakukan oleh Paguyuban Sendang Mataram. Sebagai bukti bahwa mereka sangat mencintai budaya dan seni (pawai pembangunan tahun 2019), dapat dilihat pada gambar 1.



**Gambar 1.** Pawai kebudayaan dan seni  
*Sumber: Dokumentasi Paguyuban Sendang Mataram*

Meskipun anggota Paguyuban Sendang Mataram memiliki anggota yang lumayan cukup banyak, namun tidak memiliki sikap primordial yang tinggi. Mereka masih menunjukkan interaksi dan bisa berbaur dengan paguyuban dari berbagai wilayah lain. Berdasarkan hasil wawancara, anggota Paguyuban Sendang Mataram juga selalu ikut berpartisipasi jika ada kegiatan di wilayah lain. Sikap tersebut menunjukkan bahwa mereka menghargai adanya etnis dan kebudayaan lain. Menurut Jenkins (2008: 14) etnisitas merupakan masalah diferensiasi budaya, meskipun untuk mengulangi argumen, telah menjelajahi secara detail di tempat lain, identifikasi selalu melibatkan interaksi dialektis antara kesamaan dan perbedaan.

Paguyuban Sendang Mataram juga sering hadir ketika pemerintah daerah mengadakan kegiatan terkait kebudayaan. Undangan tersebut disambut dengan senang hati oleh anggota paguyuban tersebut. Mereka mampu berbaur dengan kebudayaan masyarakat dari daerah lain. Mereka mencoba untuk menyeimbangkan diri dengan budaya lain yang berbeda dengan budaya mereka sebagai sesama masyarakat Yogyakarta.

Kemauan untuk berbaur tersebut menunjukkan bahwa tidak ada prasangka buruk atau sikap tidak peduli dengan kebudayaan lain dari Paguyuban Sendang

Mataram. Alhasil tidak ditemukan konflik-konflik antar Paguyuban dengan Paguyuban seni lainnya meskipun paguyuban mereka kadang berdampingan. Mereka mampu berjalan seiringan di atas perbedaan budaya. Sikap pluralitas tersebut sesuai dengan konsep Haba (2012: 4) mengenai etnisitas merupakan hasil pengembangan pola pikir yang bertujuan untuk membangun kesadaran diri baik terhadap individu maupun kelompok dari pada individu dan kelompok yang lain.

Interaksi yang dilakukan oleh anggota Paguyuban Sendang Mataram dengan masyarakat sekitar menunjukkan sebuah proses menuju integrasi nasional. Suatu kelompok dalam masyarakat bisa mencapai persatuan apabila ada unsur persamaan identitas kelompok. Anggota kesukuan memutuskan untuk meninggalkan identitas kesukuan dengan mewujudkan identitas yang lebih besar yaitu identitas nasional (Irianto, 2013: 4).

### **Fungsi Paguyuban Sendang Mataram di Yogyakarta**

Beberapa hal yang dilakukan Paguyuban Sendang Mataram agar dapat berfungsi secara maksimal, yang pertama ialah *adaptation* atau adaptasi. Sendang Mataram selaku paguyuban yang menaungi salah satu kegiatan budaya dan seni di Kabupaten Sleman selalu menjaga kegiatan budaya dan seni, bertujuan untuk melestarikan peninggalan kebudayaan nenek moyang supaya tetap ada dalam masyarakat yang memiliki kebudayaan tersebut. Salah satu fungsi dalam melestarikan kegiatan seni dan budaya dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti: pagelaran budaya, mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan pagelaran budaya dan kesenian.

Tujuan didirikannya Paguyuban tentu saja untuk melestarikan budaya-budaya dan kesenian yang telah diwariskan oleh leluhur bangsa ini. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan cara ikut berpartisipasi dan berperan dalam memperkenalkan keragaman budaya dan kesenian dalam acara-acara yang diadakan di Yogyakarta. Seperti yang di katakan Raho (2007) bahwa perangkat peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki individu maupun kelompok sosial karena menduduki status sosial tertentu. Berdasarkan hasil wawancara, anggota Paguyuban selama tiga tahun berturut-turut menang dalam lomba kebudayaan festival di tingkat kecamatan di

Yogyakarta. Berikut salah satu bukti piala penghargaan yang diterima Paguyuban Sendang Mataram dapat dilihat pada gambar 2.



**Gambar 2.** Piala Penghargaan Paguyuban Sendang Mataram

*Sumber: Dokumentasi Paguyuban Sendang Mataram*

Kesuksesan yang diraih oleh Paguyuban Sendang Mataram didukung oleh kekompakan setiap lapisan anggota masyarakat dan didukung oleh pejabat setempat. Bentuk dukungan pejabat setempat adalah selalu hadir jika diundang untuk hadir dalam acara-acara seremoni atau ulang tahun Paguyuban Sendang Mataram.

Paguyuban menjadi sebuah simbol dari keberagaman budaya bagi mereka yang bersatu dalam sebuah komunitas dengan tujuan atau cita-cita yang sama dari masyarakat yang tinggal di wilayah Pogung Kidul, Yogyakarta. Keberagaman bangsa berlangsung selama berabad-abad lamanya, sehingga Indonesia tumbuh dalam suatu keragaman yang kompleks. (Mahfud, 2006: 10) berpandangan bahwa pada hakikatnya sejak awal para *founding fathers* bangsa Indonesia telah menyadari akan keberagaman bangsa, budaya, agama, suku, dan etnis kita. Dengan keberagaman etnis, suku, agama dalam satu paguyuban, mereka tidak akan kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia yang beragam. Berkaitan dengan hal tersebut, Sujanto (2007: 9) memaparkan bahwa “bangunan wawasan ke Indonesiaan adalah perwujudan dari keinginan bersama untuk dapat mewujudkan kesatuan/kesan, manunggalnya keberagaman menjadi satu-kesatuan yang disepakati yaitu Indonesia”. Keberagaman budaya pada masyarakat yang

majemuk merupakan sebuah kekuatan bangsa dalam menjaga nasionalitas dan identitas nasional. Berkaitan dengan hal tersebut, Amirsyah (2012: 51) menjelaskan bahwa kemajemukan masyarakat sebagaimana yang ada di Indonesia adalah suatu keniscayaan yang tidak mungkin disangkal. Tidak ada cara lain bagi bangsa ini kecuali dengan berkomitmen kuat merawat keragaman menjadi sebuah kemungkinan dan tidak mentolelir segala bentuk tindakan yang dapat menghancurkan tatanan masyarakat majemuk.

Anggota Paguyuban Sendang Mataram menggunakan sanggar paguyuban sebagai simbol keberadaan dan eksistensi mereka serta sekaligus sebagai ruang pengembangan budaya mereka di tengah-tengah budaya globalisasi yang berkembang di masyarakat Yogyakarta. Selain itu, pemerintah daerah Kota Yogyakarta juga memberikan ruang khusus bagi suku atau etnis lain di seluruh Indonesia untuk mengembangkan serta memperkenalkan budayanya di Kota Yogyakarta melalui acara-acara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Yogyakarta. Kerjasama yang baik tersebut akan semakin memperkuat integrasi nasional dan identitas nasional bangsa Indonesia. Menurut Singha (2017: 2) etnisitas adalah keadaan milik kolektif, yang didasarkan pada keturunan bersama, budaya, bahasa, agama, ras, dll; sedangkan kebangsaan membawa etnisitas dan kenegaraan bersama-sama.

### **Paguyuban Sendang Mataram dalam Penguatan Identitas Nasional**

Anggota Paguyuban Sendang Mataram mayoritas dari kalangan etnis Jawa, namun juga terdapat etnis lain. Etnis yang beragam menjadikan Paguyuban Sendang Mataram menjadi wadah yang toleran buat anggota yang ingin bergabung dengan lebih mengenal budaya asli Jawa. Zoebazary (2017: 08) mengatakan bahwa etnisitas menjadi konsep kunci dalam pengkajian dan pengembangan budaya karena setiap etnis tidak akan pernah berhenti memproduksi simbol-simbol *culture* untuk bertahan hidup dan memperoleh pengakuan atas eksistensinya.

Yogyakarta merupakan daerah yang masih memegang erat budaya-budaya peninggalan leluhur di tanah Jawa yang memiliki keanekaragaman budaya yang sangat baik. Wisata budaya menjadi komoditas utama selain pariwisata alam yang

indah yang dimiliki Yogyakarta. Salah satu kebanggaan masyarakat Yogyakarta yaitu bahwa daerah Yogyakarta menjadi salah satu daerah istimewa di Indonesia. Paguyuban Sendang Mataram selalu aktif dalam kegiatan yang bernuansakan seni dan kebudayaan, ini merupakan cara eksistensi mereka dalam melestarikan seni dan kebudayaan-kebudayaan. Salah satu contoh eksistensi mereka yaitu selalu berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan budaya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Itu merupakan salah satu contoh dalam sikap mempertahankan dan penguatan terhadap identitas nasional. Sikap ini sudah tercermin pada kelompok Paguyuban Sendang Mataram. Upaya-upaya untuk melestarikan kebudayaan suku Jawa yaitu mereka sering berpartisipasi pada acara-acara yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang bertujuan menjadi titik kumpul dari semua perkumpulan paguyuban yang ada di Yogyakarta. Identitas nasional pada bangsa Indonesia yang multikultural dapat dikategorikan sebagai indikator dalam memahami nilai-nilai, budaya, kebiasaan dan ciri khas yang terdapat di dalam suatu negara atau bangsa. Seperti yang dijelaskan oleh Azra (2006: 62) bahwa masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri dari beberapa macam komunitas budaya dengan segala kelebihannya, dengan sedikit perbedaan konsepsi mengenai dunia, suatu sistem arti, nilai, bentuk organisasi sosial, sejarah, adat, serta kebiasaan.

Stahl (2017: 7) menyatakan bahwa bangsa merupakan suatu komunitas yang memiliki budaya, simbol, sistem ide, perkumpulan, cara bersikap atau tingkah laku dan komunikasi sama yang terikat dengan rasa persaudaraan dalam lingkup kebangsaan. Bahasa Indonesia menjadi simbol dan cara berkomunikasi sama yang didukung semboyan Bhinneka Tunggal Ika sehingga dapat membentuk persatuan bangsa Indonesia. Penduduk Indonesia yang beragam bahasa, suku, ras, agama, budaya dapat dipersatukan melalui bahasa Indonesia. Upaya untuk menjaga keanekaragaman tersebut melalui silaturahmi antar paguyuban supaya saling mengenal satu sama lain. Dengan demikian, Paguyuban Sendang Mataram telah menunjukkan pemahaman tentang bangsa Indonesia selaras dengan definisi pendapat Stahl.

Kaelan (2007) mengatakan bahwa identitas nasional pada hakikatnya adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan satu bangsa (*nation*) dengan ciri-ciri khas, dan dengan ciri-ciri yang khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Dalam hal ini adalah bangsa Indonesia dengan berbagai macam nilai luhur budayanya. Nilai-nilai budaya yang berada dalam sebagian besar masyarakat dalam suatu negara dan tercermin di dalam identitas nasional bukanlah barang jadi yang sudah selesai dalam kebakuan normatif dan dogmatis, melainkan sesuatu yang terbuka yang cenderung terus menerus berkembang. Pengurus Paguyuban Sendang Mataram berharap pada pemerintah pusat atau pemerintah daerah supaya bisa merangkul seluruh suku bangsa yang ada dan menjaga budaya nasional guna mempertahankan identitas bangsa Indonesia dan menjadi suatu kebanggaan bagi bangsa Indonesia atas identitas nasional yang dimiliki. Sejalan dengan hal tersebut, (Winataputra, 2012:6) mengemukakan bahwa “pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara kebangsaan Indonesia, yaitu Pancasila, UUD RI Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI perlu ditransformasikan secara fungsional dalam berbagai ranah kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Pada era revolusi industri 4.0 seperti sekarang ini, identitas nasional berdampingan dengan berbagai aspek kehidupan dalam lingkungan masyarakat, mulai dari bidang ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan politik. Hal tersebut dipengaruhi oleh semakin majunya ilmu dan teknologi yang digunakan manusia. Oleh sebab itu peran paguyuban dalam menjaga budaya sebagai identitas nasional sangat berpengaruh guna menjaga agar tidak tergerus zaman di era revolusi industri 4.0 atau era global saat ini.

## **SIMPULAN**

Fungsi paguyuban adalah menjaga keberagaman budaya dan kesatuan sosial dalam masyarakat, peran paguyuban perlu dilestariakn guna membangun solidaritas antar budaya yang majemuk ditengah masyarakat. Paguyuban difungsikan untuk melestariakn budaya-budaya lokal, Paguyuban Sendang Mataram menggunakan sanggar paguyuban sebagai simbol keberadaan dan

eksistensi mereka serta sekaligus sebagai ruang pengembangan budaya mereka di tengah-tengah budaya globalisasi yang berkembang di masyarakat Yogyakarta. Eksistensi Paguyuban Sendang Mataram ditunjukkan melalui kegiatan yang bernuansakan seni dan kebudayaan, ini merupakan cara mereka dalam melestarikan seni dan kebudayaan-kebudayaan. Salah satu contoh eksistensi mereka yaitu selalu ikut dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan budaya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Rasa identitas nasional ditunjukkan oleh Paguyuban Sendang Mataram melalui salah satu contoh mereka yaitu mereka sering berpartisipasi pada event-event yang diselenggarakan pemerintah yang bertujuan menjadi titik kumpul dari semua perkumpulan Paguyuban yang ada di Yogyakarta. Dalam sikap mempertahankan dan penguatan terhadap identitas nasional.

Penulis menyarankan Paguyuban Sendang Mataram perlu menyadari pentingnya kemajuan zaman guna menyelaraskan paguyuban dalam menjaga nilai-nilai penguatan identitas nasional untuk menjaga keberagaman budaya yang ada di wilayah Yogyakarta. Selain itu, perhatian pemerintah harus ditingkatkan lagi guna mendukung keberlangsungan paguyuban dalam menjaga nilai-nilai budaya tradisional yang ada di tengah-tengah masyarakat supaya tidak memudar di era globalisasi yang dapat menggerus nilai identitas nasional bangsa Indonesia.

## **REFERENSI**

- Amirsyah. (2012). *Meluruskan salah paham terhadap deradikalisasi: pemikiran, konsep, dan strategi pelaksanaan*. Jakarta: Penerbit Grafindo Khazanah Ilmu.
- Azra, A. (2006). *Pancasila dan identitas nasional Indonesia: perspektif multikulturalisme. dalam restorasi Pancasila: mendamaikan politik identitas dan modernitas*. Bogor: Brighten Press. Jakarta: Rineka Cipta.
- Haba, J. (2012). Etnisitas, hubungan sosial dan konflik di Kalimantan Barat. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 14(1), 31-52.
- Irianto, A. M. (2013). Integrasi nasional sebagai penangkal etnosentrisme di Indonesia. *HUMANIKA*, 18(2), 1-9.
- Jenkins, R. (2008). *Rethinking Ethnicity (2nd ed)*. Los Angeles: Sage Publication.
- Kaelan, H. & Zubaidi, A. (2007). *Pendidikan kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma.

- Kusumohamidjojo, B. (2000). *Kebhinnekaan masyarakat di Indonesia: suatu problema filsafat kebudayaan*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Kun, M. (2014). *Sosiologi*. Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Mahfud, C. (2006). *Pendidikan multikultural*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasikun. (2008). *Sistem sosial Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Raho, B. (2007). *Teori sosiologi modern*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Singha, K. (2018). Ethnicity-based movements and state's response in Assam. *Journal Asian Ethnicity*, 19(3), 365-382.
- Soekanto, S. (2012). *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- Stahl, D. J. (2017). *An analysis of ernest gellner's nations and nationalism*. London: CRC Press.
- Sujanto, B. (2007). *Pemahaman kembali makna Bhinneka Tunggal Ika: persaudaraan dalam kemajemukan*. Jakarta: Sagung Seto.
- Weber, A., Hiers, W., & Flesken, A. (2016). *Politicized ethnicity: A comparative perspective*. Springer.
- Winataputra, U. S. (2012). *Transformasi nilai-nilai kebangsaan untuk memperkokoh jatidiri bangsa Indonesia: suatu pendekatan pendidikan kewarganegaraan dalam transformasi empat pilar kebangsaan dalam mengatasi fenomena konflik dan kekerasan: peran pendidikan kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia.
- Zoebazary, M. I. (2017). *Orang pendalungan: penganyam kebudayaan di Tapal Kuda*. Jember: Paguyupan Pandhalungan Jember.

## Kajian Konflik dalam Lintas Pendidikan Multikultural

Izuddinsyah Siregar<sup>1</sup>, Cipto Duwi Priyono<sup>2</sup>  
[izzuregar@gmail.com](mailto:izzuregar@gmail.com)<sup>1</sup>, [cipto.dp48@gmail.com](mailto:cipto.dp48@gmail.com)<sup>2</sup>

### Abstrak

Artikel ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang kajian konflik dalam lintas pendidikan multikultural. Metode yang digunakan dalam mendukung penulisan artikel ini adalah studi kepustakaan. Poin penting dalam artikel ini menjelaskan bahwa sepanjang sejarah manusia konflik merupakan bagian dari kehidupan yang tidak dapat diatasi dan dihilangkan dari muka bumi. Manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang yang berbeda. Dalam waktu yang bersamaan masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kadang-kadang orang dapat melakukan hal yang sama tetapi untuk tujuan yang berbeda-beda, sehingga akan mendatangkan konflik sosial di masyarakat. Namun, dengan mewujudkan transformasi pendidikan dengan perspektif pendidikan multikultural pada dasarnya adalah untuk merespon fenomena konflik di tengah-tengah masyarakat yang berwajah multikultural. Melalui transformasi pendidikan selayaknya juga mampu memberikan tawaran yang mencerdaskan, antara lain dengan cara mendesain materi, metode, hingga kurikulum yang mampu menyadarkan masyarakat akan pentingnya sikap saling toleran, menghormati perbedaan suku, agama, ras, etnis dan budaya.

**Kata kunci:** konflik; pendidikan multikultural; pendidikan kewarganegaraan.

### PENDAHULUAN

Banyak kontroversi dan konflik yang terjadi dalam keberagaman identitas di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perbedaan budaya, agama, etnis, ras dan golongan lainnya juga berpotensi menimbulkan konflik yang dapat mengancam integrasi bangsa, menimbulkan pertikaian yang bersifat sangat sensitif dan rapuh terhadap suatu keadaan yang menjurus ke arah perpecahan. Konflik yang sering muncul dan mencuat dalam berbagai kejadian yang memprihatinkan dewasa ini bukanlah konflik yang muncul begitu saja. Tetapi merupakan akumulasi dari ketimpangan–ketimpangan dalam menempatkan hak dan kewajiban yang cenderung tidak terpenuhi dengan baik.

Konflik ini bisa disebabkan gesekan yang terjadi antara dua kubu atau lebih yang disebabkan adanya perbedaan nilai, status, kekuasaan, kelangkaan sumber daya, serta distribusi yang tidak merata, yang dapat menimbulkan perpecahan di masyarakat. Konflik akan selalu ada dalam kehidupan manusia atau kehidupan masyarakat sebab untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia melakukan berbagai usaha yang dalam pelaksanaannya selalu dihadapkan pada sejumlah hak dan kewajiban. Jika hak dan kewajiban tidak dapat terpenuhi dengan baik maka besar kemungkinan konflik terjadi.

Melalui Pendidikan multikultural batas keberagaman yang memicu individu dalam mengedepankan ego bisa dikendalikan. Pendidikan multikultural mengarahkan publik agar menghargai perbedaan. Pendidikan multikultural terdiri atas berbagai dimensi antara *lain right to culture* sebagai manifestasi tantangan peradaban, rekonstruksi sosial sebagai pandangan keberagaman social, dan tentunya sebagai perwujudan visi bangsa Indonesia, masa depan serta etika berbangsa. Sehingga Pendidikan multikultural menjadi alternatif pemecah konflik social budaya bangsa.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Teori Konflik dalam Multikultural**

Lahirnya konflik perlu dikaji dari aspek perspektif masyarakat multikultural dan dari perspektif pendidikan. Penting untuk dikaji atas dasar pertimbangan bahwa konflik dalam masyarakat Indonesia sudah bukan sekedar fenomena atau gejala lagi, tetapi sudah menjadi realitas dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bartos dan Wehr, menyatakan bahwa konflik sesungguhnya situasi di mana terjadinya suatu pertentangan dan permusuhan di antara para aktor dalam mencapai suatu tujuan tertentu, yaitu: kepentingan. Menurutny, ada kriteria situasi konflik, yakni: pertentangan (*incompatibility*), permusuhan (*hostility*), dan perilaku konflik (*conflict behavior*). (Bartos dan Wehr, 2002).

Pruitt dan Rubin, mendefinisikan konflik sebagai sebuah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*). Lebih lanjut disebut sebagai konflik kepentingan. Yang dimaksud dengan kepentingan (*interest*) dalam konteks ini adalah sebuah pertentangan atau perbedaan keinginan atau tujuan yang sesungguhnya diinginkan. Kepentingan dapat berwujud keinginan akan rasa aman dari ancaman (*threat*), keinginan mendapatkan kekuasaan (*power*) dan hidup yang lebih baik (*survive*). Konflik kepentingan beragam dimensi dan manifestasinya, bisa berwujud dalam bentuk pertarungan nilai-nilai, kekuasaan dan sumber-sumber langka. (Pruitt dan Rubin, 2004).

Gurr berpendapat bahwa setidaknya ada empat persyaratan agar dapat dikategorikan konflik dalam masyarakat, yaitu: (1) terdapat dua atau lebih pihak (individu atau kelompok) yang terlibat, (2) mereka terlibat dalam tindakan-tindakan yang saling memusuhi, (3) mereka menggunakan perlakuan-perlakuan kekerasan yang bertujuan untuk menghancurkan, melukai, dan menghalang-halangi lawannya, dan (4) reaksi pertentangan ini bersifat terbuka sehingga dapat dideteksi dengan mudah oleh orang lain (*observer*). (Gurr, 1980).

Dahrendoef menunjukkan ciri-ciri penyebab terjadinya konflik, yaitu: karena tidak tercapainya kepentingan dari individu maupun kelompok (*party*), keinginan memperbaharui kepentingan, dan adanya rasa cemburu, ketidaksenangan kesuksesan pada kelompok komunitas tertentu. (Dahrendoerf, 1986). Pandangan Dahrendoef, tampaknya sejalan dengan Aamodt M.G., yang menjelaskan bahwa konflik adalah sebagai reaksi psikologis dan perilaku (*behavioral*) atas suatu persepsi bahwa individu lain menghalangi anda untuk mencapai suatu tujuan, menjauhkan hak anda untuk bertindak dalam suatu cara tertentu atau mengacaukan pengharapan dari suatu hubungan. (Aamodt M.G, 2007).

Hoker & Wilmot mendefinisikan konflik sebagai sebuah perjuangan yang diungkapkan antara sedikitnya dua pihak saling tergantung yang dirasakan tidak sesuai tujuannya, *rewards*, dan langka perjuangannya dan ada gangguan dari pihak lain dalam mencapai tujuan mereka. (Hoker & W. Wilmot, 1985).

Joel A. Di Girolamo mengungkapkan bahwa konflik adalah sebuah proses yang dimulai ketika seorang individu atau kelompok memandang perbedaan dan pertentangan antara dirinya sendiri dan individu lain atau kelompok tentang kepentingan dan sumber daya, keyakinan, nilai, atau praktek yang penting bagi mereka. (Digirolamo, 2008).

Kirk Blackard dan James W. Gibson juga menjelaskan bahwa konflik adalah sebuah proses dinamis yang mencerminkan interaksi dari dua atau lebih yang memiliki *interde* pihak independen tingkat yang sama perbedaan atau ketidakcocokan di antara mereka. (Blackard & Gibson, 2002).

Menurut Paul Collier, konflik yang berlangsung terus-menerus, dan tidak menemukan solusinya yang tepat, melahirkan dua perspektif, yaitu: *greed* dan *grievance*. Menurutnya, konflik bisa diartikan dari dua pandangan perspektif tersebut. Dalam perspektif *greed*, konflik adalah sesuatu agenda yang menguntungkan karena adanya peluang melakukan eksploitasi masyarakat melalui propaganda politik untuk mendatangkan keuntungan, seperti melakukan mobilisasi masa dan manipulasi fakta dalam mendiskreditkan lawan-lawan politiknya. Sementara dalam perspektif *grievance* konflik dipandang sebagai ketidakadilan karena dapat merugikan, terzalimi serta dapat mengancam eksistensinya. Dari perspektif *grievance* akan melahirkan tindakan *emergency* sebagai bentuk ketidakadilan dan rasa kekecewaan yang mendalam. Untuk menyelamatkan diri dari berbagai ancaman, mau tidak mau harus melakukan perlawanan dengan segala strategi dan resiko (Collier, 2003).

Dalam teori konflik dibangun atas dasar paradigma fakta sosial. Konflik dalam pandangan Karl Marx (Ritzer, 2012) melihat masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai oleh pertentangan secara terus menerus. Marx, berpendapat bahwa perubahan dalam masyarakat bertitik tolak dari hadirnya revolusi dalam kehidupan mereka. Menurut Marx, konflik dibangun atas dasar paradigma fakta sosial. Konflik dalam pandangan Marx, melihat bahwa masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai oleh pertentangan secara terus menerus. Marx, juga berpendapat bahwa perubahan dalam masyarakat bertitik tolak dari hadirnya revolusi dalam kehidupan mereka.

Bagi Marx, dalam mengembangkan model dari revolusi konflik antar kelas dan perubahan sosial memulai kajiannya dari hal yang sederhana dan asumsi yang realitas yang umum, organisasi ekonomi, secara khusus pada pemilikan modal, determinasi organisasi dalam kepentingan organisasi. Struktur kelas dan bangunan keorganisasian, layaknya nilai budaya, kepercayaan, dogma agama, dan ide-ide sistematis lain, secara keseluruhan dari realitas yang ada menempati tingkatan tertinggi pada refleksi ekonomi bersandar kepada realitas sosial.

Pada masyarakat multikultural terdapat suatu kecenderungan eksklusivisme dan fanatisme etnis dan agama yang dapat menyebabkan konflik

secara potensial dalam masyarakat multi etnik baik yang disebabkan oleh *stereotype* maupun prasangka-prasangka lainnya. Prasangka sosial sebagai suatu keadaan yang berkaitan dengan sikap-sikap dan keyakinan-keyakinan dengan perasaan negatif, penunjukan sikap bermusuhan atau perilaku diskriminatif terhadap anggota kelompok lain dan bersumber dari dorongan sosio-psikologis, proses-proses kognitif, dan pengaruh keadaan sosio-kultural terhadap individu dan kelompoknya yang mengakibatkan terjadinya konflik.

### **Pendidikan Multikultural**

Pembelajaran sebagai salah satu komponen pendidikan melihat bagaimana kondisi pluralitas multikultural dimulai dari adanya sebuah proses pembelajaran yang lebih mengarah pada upaya menghargai perbedaan di antara sesama manusia, sehingga terwujud ketenangan dan ketentraman tatanan dalam kehidupan masyarakat. Sebagai konsekuensi logis dalam kehidupan di era plural kenyataan multikulturalisme tidak dapat dihindarkan. Karena itu, pendidikan yang terkait dengan multikultural adalah keharusan.

Pendidikan multikultural adalah sebuah proses pendidikan yang lebih mengarah pada upaya menghargai perbedaan diantara sesama manusia agar terwujud ketenangan dan ketentraman dalam tatanan kehidupan masyarakat. Melihat kenyataan bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang plural, tentu tidak dapat dihindarkan. Karena itu, pendidikan multikultural adalah penting.

Pendidikan multikultural dapat diuraikan dalam tiga sub nilai sebagaimana konsep Blum (2001), (1) penegasan identitas kultural seseorang. Identitas kultural seseorang merupakan entitas fundamental dalam kehidupannya, dan itulah yang membedakannya dengan orang-orang diluar dirinya, (2) penghormatan dan keinginan untuk memahami dan belajar dari kebudayaan-kebudayaan selain kebudayaannya, dan (3) perasaan senang dengan perbedaan kebudayaan itu sendiri. Perbedaan adalah rahmat yang diberikan Tuhan kepada umat manusia dengan tujuan berkompetisi meraih kebaikan.

Banks (1997) mengatakan bahwa pendidikan multikultural merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa seluruh peserta didik tanpa memperhatikan

dari kelompok mana mereka berasal, seperti gender, etnik, ras, budaya, kelas sosial, agama, dan lain-lain diharapkan dapat memperoleh pengalaman pendidikan yang sama di sekolah atau lembaga pendidikan. Terkait terjadinya konflik dalam masyarakat multikultural, tentu pendidikan multikultural mempunyai peranan yang sangat penting sebagai proses penanaman cara hidup menghormati, tulus, dan toleransi terhadap keragaman yang hidup di tengah masyarakat multikultural.

Budimansyah & Suryadi (2008) menegaskan bahwa konsep multikultural berarti seseorang tersebut harus mampu menegaskan identitasnya sendiri, mau menghormati dan memahami kebudayaan orang lain, dan mampu menilai serta merasa senang atas kebudayaan sendiri maupun orang lain sebagai kebaikan positif. Sesuai dengan konsep multikultural tersebut menjadi hakikat untuk mewujudkan kesadaran, toleransi, pemahaman, dan pengetahuan yang mempertimbangkan perbedaan kultural melalui pendidikan formal dan informal.

*National Association for Multicultural Education* sebagaimana dikemukakan Azra (2002) terdapat tiga perspektif pengertian pendidikan multikultural. *Pertama*, pendidikan multikultural sebagai konsep filosofis yang berlandaskan pada ide kemerdekaan, keadilan, kesamaan, hak kekayaan, dan martabat kemanusiaan. *Kedua*, pendidikan multikultural sebagai proses yang meliputi semua aspek praktek sekolah, kebijakan dan organisasi sebagai alat untuk memastikan tingkat prestasi akademis para siswa. *Ketiga*, pendidikan multikultural memperkuat keyakinan bahwa semua peserta didik, riwayat hidup dan pengalamannya harus ditempatkan sebagai pusat dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan pembelajaran harus didasarkan pada konteks yang dekat (terbiasa) dengan peserta didik dan menunjukkan berbagai cara berpikir.

Banks (1997) mengidentifikasi lima dimensi pendidikan multikultural, yaitu: (1) *content integration*, mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep mendasar, generalisasi dan teori dalam mata pelajaran/disiplin ilmu, (2) *the knowledge construction process*, membawa siswa untuk memahami implikasi budaya ke dalam sebuah mata pelajaran (disiplin), (3) *an equity pedagogy*, menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik siswa yang beragam baik dari segi

ras, budaya ataupun social, (4) *prejudice reduction*, mengidentifikasi karakteristik ras siswa dan menentukan metode pengajaran mereka, dan (5) *empowering school culture*, melatih kelompok untuk berpartisipasi, berinteraksi dengan seluruh staf dan siswa yang berbeda etnis dan ras dalam upaya menciptakan budaya akademik.

Dari dimensi pendidikan multikultural di atas, selanjutnya muncul tiga model pendidikan multikultural yaitu: (1) *content-oriented programs*, (2) *student-oriented programs*, dan (3) *socially-oriented programs*. *Pertama, content-oriented programs* (program-program yang memfokuskan pada konten) merupakan jenis yang paling umum dalam pendidikan hubungan antaretnik dan multikultural. *Kedua, student-oriented programs* (program-program yang memfokuskan bagaimana siswa belajar) mencoba memunculkan karakteristik-karakteristik ataupun adat-istiadat yang dimiliki oleh masing-masing etnik minoritas tradisional, minoritas maju, maupun etnik-etnik besar. *Ketiga, socially-oriented programs* (program-program yang memfokuskan pada orientasi sosial) merupakan program yang berusaha mereformasi sekolah dan budaya dan konteks politik sekolah, yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pencapaian akademik atau bukan untuk meningkatkan pengetahuan multikultural, tetapi untuk memiliki dampak yang jauh lebih luas sebagai peningkatan toleransi budaya dan ras dalam mengurangi bias. (Burnett dalam Budimansyah dan Suryadi, 2008).

Untuk menjawab fenomena konflik, maka pendidikan multikultural di Indonesia dituntut memiliki kepekaan dalam membangun rasa persatuan dan kesatuan serta nasionalisme sekaligus menjawab beberapa masalah kemajemukan tersebut. Karena dengan pendidikan multikultural tersebut dirumuskan sebagai wujud kesadaran tentang keanekaragaman kultural untuk mengembangkan kesadaran atas kebanggaan seseorang terhadap bangsanya.

Pendidikan multikultural juga merupakan alat untuk menanamkan kemampuan bersikap, bertingkah laku dalam mengajarkan keterampilan dan ilmu pengetahuan untuk bisa memainkan peranan sosial secara menyeluruh. Pemahaman akan wawasan multikultural merupakan suatu kajian terpadu yang berasal dari suatu kemajemukan masyarakat untuk saling memahami, dan

menghormati budaya, etnis, dan agama seseorang untuk terciptanya suatu kerukunan dalam masyarakat.

Program-program multikultural senantiasa diarahkan untuk menumbuhkan pemahaman dan partisipasi dari kelompok-kelompok masyarakat agar tumbuh simpati dan tidak terjadi konflik yang mengarah kepada diskriminasi dan disintegrasi di berbagai daerah Indonesia. Perkembangan multikultural yang didorong oleh keterbukaan kehidupan manusia karena didorong oleh globalisasi akan kemajuan teknologi komunikasi yang semakin terbuka dan menyatu sehingga munculnya rasa persaudaraan yang dimungkinkan oleh hubungan global yang semakin erat.

Dunia pendidikan mempunyai paradigma yang berkaitan dengan pendidikan demokrasi yang mengakui adanya pluralitas budaya dan agama yang berguna untuk memperkuat rasa persatuan negara dan bangsa. Pendidikan multikultural dalam kajian masalah-masalah antar etnis dan agama sangat diperlukan suatu pemahaman yang dalam untuk memperluas kesadaran masyarakat agar terciptanya kerukunan, saling menghormati, atas realitas yang beragam baik itu latar belakang maupun basis sosial budaya dan agama yang melingkupinya.

### **Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Pendidikan Multikultural**

Euforia teknologi digital sebagai bagian dari Revolusi Industri 4.0 yang mulai merasuki zaman dan lapisan masyarakat menghadirkan berbagai macam gejala baik dan buruk untuk kehidupan. Dalam Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), terkadang kita tidak sadar bahwa jejak digital yang telah kita tinggalkan ternyata dapat menimbulkan beragam efek bagi generasi mendatang, seperti misalnya konflik. Totalitas warga negara yang sudah aktif dalam media sosial pun sudah sampai kepada tahap hiperkoneksi.

Teknologi digital memang telah membawa banyak perubahan yang baik sebagai dampak positif yang bisa digunakan sebaik-baiknya. Namun dalam waktu yang bersamaan, era teknologi digital juga membawa banyak dampak negatif, sehingga menjadi tantangan baru dalam kehidupan manusia di era ini. Tantangan

ini pun telah pula masuk ke dalam berbagai bidang, tak terkecuali dalam bidang sosial, agama, dan budaya.

Untuk mengatasi berbagai tantangan dan permasalahan pendidikan di Indonesia era Revolusi Industri 4.0, pengintegrasian pendidikan multikultural dapat dilakukan dengan cara berikut ini:

1. Integrasi pendidikan multikultural dengan berbasis *local wisdom* dalam desain kurikulum. Maka pendekatan multikultural untuk kurikulum diartikan sebagai suatu prinsip yang menggunakan keragaman kebudayaan peserta didik dalam mengembangkan filosofi, misi, tujuan, dan komponen kurikulum, serta lingkungan belajar sehingga siswa dapat menggunakan kebudayaan pribadinya untuk memahami dan mengembangkan berbagai wawasan, konsep, keterampilan, nilai, sikap, dan moral yang diharapkan. Teori belajar dalam kurikulum multikultural yang memperhatikan keragaman sosial, budaya, ekonomi, dan politik tidak boleh lagi hanya mendasarkan diri pada teori psikologi belajar yang bersifat individualistik dan menempatkan siswa dalam suatu kondisi *value free*, tetapi harus pula didasarkan pada teori belajar yang menempatkan siswa sebagai makhluk sosial, budaya, politik, dan hidup sebagai anggota aktif masyarakat, bangsa, dan dunia.
2. Optimalisasi pendidikan kewarganegaraan dalam upayanya memperkuat identitas nasional dengan berlandaskan multikultural dan *local wisdom* yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.
3. Penempatan pendidikan multikultural sebagai filosofi pendidikan, pendekatan pendidikan, bidang kajian dan bidang studi. Penempatan pendidikan multikultural sebagai falsafah pendidikan memiliki arti bahwa pandangan terhadap kekayaan keberagaman budaya Indonesia hendaknya dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mengembangkan dan meningkatkan sistem pendidikan dan kegiatan belajar-mengajar di Indonesia. Pendidikan multikultural sebagai pendekatan pendidikan berarti penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan yang kontekstual dan memperhatikan keragaman budaya Indonesia. Pendidikan multikultural sebagai bidang kajian dan bidang studi berarti disiplin ilmu yang dibantu oleh sosiologi dan antropologi pendidikan untuk menelaah dan

mengkaji aspek-aspek kebudayaan, terutama nilai-nilai budaya dan perwujudannya untuk atau dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan. (Ari Setiarsih, 2017)

Tentunya melalui penanaman nilai-nilai pendidikan multikultural yang benar, ada secercah harapan yang diharapkan kepada generasi muda Indonesia sebagai penerus bangsa yang mampu menjawab berbagai tantangan pendidikan di era Revolusi Industri 4.0. Membentuk generasi muda yang baik dan cerdas dalam upaya menuju masyarakat madani yang demokratis, menjunjung tinggi toleransi sesuai dengan nilai-nilai identitas nasional sebagai bangsa Indonesia dengan segala keanekaragaman budayanya.

### **Pendidikan Multikultural dalam Bingkai Pendidikan Kewarganegaraan**

Perkembangan multikultural yang didorong oleh keterbukaan kehidupan manusia karena di dorong oleh globalisasi akan kemajuan teknologi komunikasi yang semakin terbuka dan menyatu sehingga muncullah rasa persaudaraan dan juga rasa permusuhan yang dimungkinkan oleh hubungan global yang semakin erat. Pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia dalam kehidupan global adalah bagian daripada proses demokrasi yang sedang berjalan dengan pesatnya sejalan dengan keterbukaan kehidupan manusia karena kemajuan teknologi informasi.

Melihat bangsa yang heterogen, pendidikan multikultural menjadi sangat penting dikembangkan. Program-program multikultural senantiasa diarahkan untuk menumbuhkan pemahaman dan partisipasi dari kelompok-kelompok masyarakat agar tumbuh simpati dan tidak terjadi konflik yang mengarah kepada diskriminasi dan disintegrasi di berbagai daerah Indonesia.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu instrumen fundamental dalam bingkai pendidikan nasional bagi pembentukan karakter bangsa di tengah heterogenitas dan pluralitas yang menjadi karakteristik utama bangsa Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan dalam menjalankan fungsinya mendidik warga negara yang menguasai pengetahuan kewarganegaraan yang berasal dari konsep dan teori berbagai disiplin ilmu, meyakini, mentransformasikan dan mengamalkan nilai-nilai kebenaran yang menjadi pandangan hidup bangsa dan negara.

Multikultural dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan melihat bagaimana peran yang besar terhadap keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai potensi bangsa. Terwujudnya masyarakat multikultural tidak semata-mata masyarakat mayoritas menyerap budaya minoritas, pengakuan negara bagi warga negara yang dikembangkan dalam bentuk pendidikan yang dialogis. Dengan kekuatan jati diri seseorang akan mendukung kepada kecakapan dialogis yang tidak bisa bersifat diskriminatif terhadap budaya lain.

Fokus utama dalam Pendidikan Kewarganegaraan adalah pembentukan warga negara yang baik dan cerdas dalam upaya menuju masyarakat madani yang demokratis. Kemajemukan bangsa Indonesia yang langka dimiliki bangsa lain dalam konteks interaksi sosial baik secara vertikal dan horizontal dalam realitas pluralitas tersebut dibutuhkan instrumen pendidikan yang berkarakter terbuka, toleran dan pluralitas.

Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan mengembangkan kompetensi-kompetensi dasar dari warga negara untuk dapat berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan sebagai warga negara. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan multikultural berperan untuk mempersatukan budaya bangsa yang meliputi sebuah pemahaman, penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang dan sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain, juga berkenaan dengan permasalahan ideologi, politik, demokrasi, keadilan, penegakan hukum, hak asasi manusia, hak budaya komunitas, dan golongan minoritas adalah suatu hal yang sangat ditekankan untuk penyadaran dalam membentuk sikap demokrasi yang berkeadaban bagi warga negara.

Melalui Pendidikan Kewarganegaraan, maka pendidikan multikultural di Indonesia tentunya menggali nilai-nilai agama, etnis, suku, dan kebudayaan sebagai keyakinan mereka yang mengajarkan bahwa perbedaan adalah fitrah Tuhan. Dalam segala perbedaan, rasa cinta dan kasih sayang sesama manusia merupakan hal yang harus terus ditumbuhkan. Dengan konsep ini, pendidikan mampu menciptakan toleransi, tindakan saling menolong, kedamaian, dan meningkatkan kualitas kemanusiaan dengan pola pembelajaran yang memiliki visi dan tindakan habituasi atau pembiasaan di semua satuan pendidikan.

## **Plural dan Kesadaran Multikultural**

Pada kenyataannya bangsa Indonesia kaya akan masyarakat yang begitu beragam pada tingkatan agama, suku, ras, dan golongan. Namun hal tersebut bukanlah menjadi suatu alasan untuk menyebabkan konflik yang dapat mengancam integrasi dan perpecahan. Justru dengan keberagaman tersebut merupakan cerminan dari jati diri bangsa dalam kehidupan manusia untuk hidup rukun sebagai penentu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang penduduknya terdiri dari berbagai etnis, bahasa, dan budaya merupakan suatu kekuatan yang dapat membangun bangsa ini, dan setiap etnis mempunyai kekuatan masing-masing di setiap daerahnya.

Kenyataan pluralis yang ada di Indonesia dibingkai dalam Pancasila yakni Persatuan Indonesia yang diwujudkan dalam semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* mengandung arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan tersebut menggambarkan gagasan dasar yaitu dalam mempersatukan antar suku, bahasa, budaya, adat-istiadat, dan agama yang berbeda menjadi kesatuan besar di Indonesia. Untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia maka diperlukan kesadaran individu dan kesadaran kolektif sebagai wujud kesetiaan kepada negara.

Dalam bidang ilmu psikoanalisa, Freud menyebut kesadaran merupakan satu-satunya tingkat kehidupan mental yang secara langsung tersedia bagi kita. Kesadaran itu terbentuk dari pikiran-pikiran yang datang dari dua arah yang berbeda. *Pertama*, persepsi yang ditangkap melalui panca indra bila tidak terlalu mengancam akan memasuki kesadaran. *Kedua*, pikiran-pikiran yang tidak mengancam dari alam pra sadar dan pikiran-pikiran yang tersamarkan dengan baik dari ketidaksadaran (Mauliansyah, 2016).

Kesadaran kolektif bermula dari kesadaran individu. Menurut Georg Simmel sosiolog asal Jerman, kesadaran individu dan kesadaran kolektif adalah kesadaran kreatif. Simmel melihat para individu atau kelompok individu yang sadar, yang saling berinteraksi karena bermacam motif, maksud, dan kepentingan. Kreativitas itu kemudian menjadi bentuk interaksi yang bermacam-macam dan tidak dapat disangkal memunculkan para aktor yang menciptakan struktur sosial,

dan juga efek-efek yang dimiliki struktur-struktur itu pada kreativitas individu (Ritzer, 2012).

Lain halnya dengan definisi yang dikemukakan oleh Emile Durkheim, sosiolog yang pada awalnya mengembangkan konsep tentang kesadaran kolektif untuk memahami moralitas dalam masyarakat. Durkheim berpendapat bahwa kesadaran kolektif adalah seluruh kepercayaan dan perasaan bersama orang kebanyakan dalam sebuah masyarakat akan membentuk suatu sistem yang tetap yang punya kehidupan sendiri (Ritzer & Goodman, 2013).

Dari kedua pendapat tersebut, dapat ditelaah bahwa kesadaran individual yang berarti mencoba mencari dan merumuskan kesepakatan-kesepakatan sosial tanpa harus kehilangan jati diri dan karakteristik masing-masing. Sedangkan kesadaran kolektif memandang konflik sosial sebagai hasil dari perbedaan kepentingan sosial, ekonomi, politik, dan agama yang berdampak pada pelanggaran hak-hak sekelompok orang oleh kelompok orang yang lainnya. Dengan kesadaran perbedaan ini kemudian diteruskan melalui dialog dan interaksi sosial yang dapat saling memberi dan saling menerima dalam setiap persamaan dan perbedaan.

Pengembangan pembelajaran multikultural bukan sekedar transfer pengetahuan. Tetapi, pembelajaran multikultural adalah proses membangun kesadaran multikultural (*multicultural awareness*) dan kompetensi multikultural (*multicultural competence*). Pada akhirnya adalah transformasi diri dan lingkungan sosial. Pendidikan yang bersifat transformatif merupakan proses dimana guru dan siswa adalah subjek belajar, guru dan siswa sama pemilik terhadap belajar. Karena itu, guru dan siswa bersama-sama membangun pengetahuan melalui reflektif yang dimulai dari proses mengenali identitas diri dan melihat kelebihan dan kekurangan dalam konteks hubungan dengan orang lain yang berbeda, kemudian memperbaiki kekurangan, dan melakukan perubahan. (Moeis, 2014).

Wink (2000) mengungkapkan kekhasan pendidikan transformatif dalam dua hal. Pertama dirancang agar siswa membangun pengetahuannya secara konstruktif dan menggunakan pengetahuan itu untuk perubahan diri dan

lingkungan sosial. Kedua, kegiatan pembelajaran dirancang dalam prinsip demokratis. Dari proses pembelajaran dengan pendekatan kritis, siswa dan guru bersama-sama membangun kesadaran dan kompetensi multikultural yang berkaitan dengan diri (perubahan sikap dan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip multikultural) dan berkaitan dengan orang lain (perubahan cara-cara memperlakukan orang lain dengan lebih empati) atau dapat disebut dengan kecerdasan sosial.

Cerminan kepribadian yang dewasa adalah target pendidikan multikultural. Bagaimana rancangan pendidikan bergerak dalam upaya kesadaran multikultural (*multicultural awareness*) dan kompetensi multikultural (*multicultural competence*) dari pendidik dan anak didik. Kesadaran adalah awal dari pembentukan kemampuan. Untuk ini pendidikan multikultural tidak cukup sekedar selebrasi budaya yang beragam tetapi perlu adanya dialog yang mendalam dan kritis dalam pendidikan untuk menggali sistem keyakinan yang melandasi cara-cara memperlakukan orang lain (Moeis, 2014).

## **SIMPULAN**

Kebijakan pendidikan seharusnya bersifat akomodatif terhadap aspirasi masyarakatnya sebagai konsekuensi Indonesia yang heterogen dan multikultural. Dengan diberlakukan desentralisasi yang termasuk di dalamnya desentralisasi bidang pendidikan, maka kebijakan pendidikan yang multikultural telah mendapat wadah pengejawantahannya secara jelas. Dalam konteks kepentingan demi untuk mewujudkan transformasi pendidikan dan masyarakat bangsa perlu kebijakan dan peran pendidikan yang berorientasikan pada pendekatan multikultural dan pemerataannya di daerah. Secara operasional, transformasi pendidikan dengan perspektif multikultural pada dasarnya adalah untuk merespon fenomena konflik di tengah-tengah masyarakat yang berwajah multikultural.

Transformasi pendidikan selayaknya juga mampu memberikan tawaran yang mencerdaskan, antara lain dengan cara mendesain materi, metode, hingga kurikulum yang mampu menyadarkan masyarakat akan pentingnya sikap saling toleran, menghormati perbedaan suku, agama, ras, etnis dan budaya. Indonesia

yang dikenal dengan muatan yang sarat kemajemukan, maka peran transformasi pendidikan yang berperspektif multikultural menjadi sangat strategis untuk dapat mengelola kemajemukan secara kreatif, sehingga konflik yang muncul sebagai dampak dari transformasi dan reformasi sosial dapat dikelola secara cerdas dan menjadi bagian dari pencerahan kehidupan bangsa Indonesia ke depan.

## REFERENSI

- Aamodt, M. G. (2007). *Industrial organizational psychology: an applied approach*, 5th edition. California: Thomson Wadsworth.
- Azra, A. (2002). *Pendidikan kewargaan dan demokrasi di Indonesia*, dalam Ikhwanuddin Syarif & Domodo Murtadlo (eds), *Pendidikan untuk masyarakat Indonesia baru: 70 Tahun Prof. Dr. HAR Tilaar MscEd*. Jakarta: Grasindo.
- Banks, J. (1997). *Educating citizens in a multicultural society*. New York and London: Teachers College Columbia University.
- Bartos J., Otomar, & Wehr. (2002). *Using conflict theory*. Cambridge University Press.
- Blackard, Kirk & Gibson W. James. (2002). *Capitalizing of conflict: strategies and practices for turning conflict into synergy in organizations*. (200)2. California: Davies-black Publishing Palo Alto.
- Blum, L. A. (2001). *Antirasisme, multikulturalisme, dan komunitas Antarras, tiga nilai yang bersifat mendidik bagi sebuah masyarakat multikultural*, dalam Larry May, dan Shari Colins- Chobanian, *etika terapan: sebuah pendekatan multikultural*. Alih Bahasa: Sinta Carolina dan Dadang Rusbiantoro. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Budimansyah, D dan Suryadi, Karim. (2008). *PKn dan masyarakat multikultural*, Bandung: Program Studi PKn SPs UPI.
- Collier, P. (2003). *Breaking the conflict trap: civil war and development policy*. Washington D.C.: The World Bank.
- Dahrendorf. R. (1986). *Konflik dan konflik dalam masyarakat industri: sebuah analisa kritik*. Jakarta: Rajawali.
- Gurr R. T. (1980). *Handbook of political conflict: theory and research* (New York: The Free Press, A Division of Macmillan Publishing Co., Inc.
- Hocker L. J. & Wilmot, W. (1985) *Interpersonal conflict*, 2nd ed. rev., Dubuque, Iowa: Wm. C. Brown Publishers.

- Masudi. (2015). Akar-akar teori konflik: dialektika konflik; core perubahan sosial dalam pandangan Karl Marx dan George Simmel. *Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*. 3(1), 177-200. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/fikrah/article/view/1832>.
- Mauliansyah, F. (2016). Menelusuri jejak kesadaran dan tindakan kolektif massa. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2), 1-12. <https://doi.org/10.35308/source.v2i2.404>.
- Moeis, I. (2014). *Pendidikan multikultural transformatif, integritas moral, dialogis, dan adil*. UNP Press. Padang.
- Pruitt, G. D. & Rubin, Z. J. (2004). *Teori konflik sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ritzer, G. & Goodman, J. D. (2013). *Teori sosiologi dari teori sosiologi klasik sampai perkembangan mutakhir teori sosial postmodern*. Terjemahan dari Nurhadi. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Ritzer, G. (2012). *Teori sosiologi dari sosiologi klasik sampai perkembangan terakhir postmodern ed. VIII*. Terjemahan dari Saut Pasaribu, Rh. Widada, Eka Adinugraha. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Setiarsih, A. (2017). Penguatan identitas nasional melalui pendidikan multikultural berbasis kearifan lokal. Yogyakarta: *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 1-12 <http://repository.upy.ac.id/id/eprint/1242>.
- Wink, Joan. (2000). *Critical pedagogy, Note from the World*. New York: Longman.

# **Eksistensi Pancasila sebagai Ideologi Negara dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0 dan *Society* 5.0**

**Maqrifa Wahyu Perdana**  
[maqrifawahyu.2019@student.uny.ac.id](mailto:maqrifawahyu.2019@student.uny.ac.id)

## **Abstrak**

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara dalam menghadapi segala tantangan di era revolusi industri 4.0 dan *society* 5.0. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur melalui pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil kajian dari beberapa artikel ilmiah dan buku dapat disimpulkan bahwa perlu adanya peningkatan eksistensi Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara guna menjadi tameng masyarakat Indonesia dalam menyikapi era tersebut. Agar eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara dalam memasuki era revolusi industri 4.0 dan *society* 5.0 tetap terjaga dapat dilakukan dengan penguatan dalam memahami atau internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai dari kelima sila Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Harus disadari bahwa dengan keberadaan Pancasila maka seluruh elemen bangsa yang sangat beragam akan dapat disatukan, termasuk ketika semakin akrab dalam penggunaan teknologi pada kehidupan era revolusi industri 4.0 dan *society* 5.0.

**Kata kunci:** Pancasila; Ideologi; Revolusi Industri 4.0; Society 5.0.

## **PENDAHULUAN**

Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia sekaligus ideologi yang dianut di Indonesia, sehingga dijadikan sebagai acuan dalam berbangsa dan bernegara. Ideologi Pancasila tidak lahir dalam ruang hampa, ideologi Pancasila lahir karena perasaan senasib dan sepenanggungan bangsa Indonesia untuk merdeka. Ideologi sebagai kerangka idealitas, dasar negara sebagai kerangka yuridis bagi terselenggaranya sistem ketatanegaraan untuk berjalannya kehidupan bangsa dan negara (Widiuseno, 2014: 64). Kedudukan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara ibarat dua sisi dari satu mata uang yang sama, masing-masing menempati kedudukannya sendiri tetapi keduanya dalam kesatuan fungsi praktik ketatanegaraan. Pancasila sebagai ideologi nasional menjadi pemersatu masyarakat Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, dan sebagai arah dalam pembangunan nasional untuk mencapai tujuan nasional.

Pancasila dibentuk agar dapat menjawab semua isu-isu kontemporer yang terus berkembang hingga saat ini yang mana dapat dilihat dari nilai-nilai yang dituangkan dalam lima sila tersebut, dikarenakan Pancasila dijadikan pandangan hidup dan falsafah bangsa Indonesia. Pancasila harus diamalkan pada

pembangunan nasional dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan dan teknologi informasi. Seiring berjalannya waktu dan pergantian zaman Pancasila tetap memiliki eksistensi di setiap zamannya, seperti yang terjadi saat ini yang masuk pada era revolusi industri 4.0 dan *society 5.0*.

Di tengah pertarungan antarideologi yang berkecamuk di Indonesia, harus ada upaya bagaimana memposisikan Pancasila dalam konteks berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sejatinya, keprihatinan terhadap Pancasila dan realitas kebangsaan saat ini sudah banyak didiskusikan. Beberapa di antaranya menganggap bahwa problem Pancasila adalah terlalu surplus ucapan dan terlalu minus tindakan, dan inilah yang menimbulkan keraguan banyak orang akan kesaktian nilai-nilai Pancasila dalam kenyataan sehari-hari (Latif, 2014). Karena dirundung keraguan inilah, maka terdapat permasalahan bagaimana memperdalam pemahaman, penghayatan, dan kepercayaan akan keutamaan nilai-nilai yang terkandung pada setiap sila Pancasila dan keterkaitannya satu sama lain, untuk kemudian diamalkan secara konsisten di segala lapis dan bidang kehidupan berbangsa dan bernegara (Latif, 2012: 47).

Pada Indonesia, arus globalisasi sudah tidak terbendung lagi. Disertai dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, dunia kini memasuki era revolusi industri 4.0 yang menekankan pada pola *digital economy*, *artificial intelligence*, *big data*, *robotic*, dan lain sebagainya atau dikenal dengan fenomena *disruptive innovation*. Sehubungan dengan hal tersebut sebagai pengembangan dari revolusi industri 4.0 maka lahirlah konsep *society 5.0* atau masyarakat 5.0 yang merupakan penyempurnaan dari konsep-konsep sebelumnya. Konsep ini hadir untuk dapat menjawab masalah revolusi industri 4.0 dan untuk mengintegrasikan dunia maya dan dunia nyata dengan bantuan teknologi seperti AI, robot, IoT dan lainnya dalam melayani kebutuhan manusia sehingga masyarakat dapat merasa nyaman dan menikmati hidup (Suherman et al, 2020: 5)

Menghadapi tantangan tersebut, maka di sinilah letak peran Pancasila sebagai tameng bagi masyarakat Indonesia terutama generasi penerus bangsa dalam memasuki dan menghadapi segala tantangan dari era tersebut. Revolusi industri 4.0 dapat mengubah ekonomi, pekerjaan dan bahkan masyarakat itu

sendiri. Di bawah pengertian apa itu industri 4.0, banyak teknologi fisik dan digital yang digabungkan melalui analitik, kecerdasan buatan, teknologi kognitif, dan *Internet of Things* (IoT) untuk menciptakan perusahaan digital yang saling terkait dan mampu menghasilkan keputusan yang lebih tepat. Secara singkat, revolusi ini menanamkan teknologi yang cerdas dan terhubung tidak hanya di dalam perusahaan, tetapi juga kehidupan sehari-hari.

Masuk pada era revolusi industri 4.0 dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan suatu negara, namun juga dapat memberikan dampak negatif bagi kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Hadirnya berbagai kecanggihan dan kecerdasan teknologi di era ini dapat mempengaruhi sikap masyarakat di kehidupan dengan sesamanya. Menurut Widisuseno & Susanto (2019) dampak yang terlihat dari hadirnya kecanggihan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dari revolusi industri 4.0 dapat ditemui dalam keberlangsungan hubungan kemanusiaan. Relasi kemanusiaan terdegradasi oleh sistem digital yang mengatur proses komunikasi antar personal. Fenomena semacam ini pertanda terjadinya gejala semakin merendahnya derajat manusia (dehumanisasi) yang dijauhkan dari nilai-nilai etik, moral dan agama. Maka dari itu diperlukan adanya eksistensi Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia dalam menghadapi revolusi industri 4.0 dan *society* 5.0.

## **METODE**

Pada penulisan artikel ini menggunakan metode studi kepustakaan atau *literatur review*. Penulisan artikel ini dilakukan dengan meneliti dan menelaah bahan-bahan berupa buku dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan konteks yang dikaji yaitu eksistensi Pancasila dalam menghadapi segala tantangan di era revolusi industri 4.0 dan *society* 5.0. Analisis data dilakukan berdasarkan logika dan argumentasi yang bersifat ilmiah. Langkah-langkah yang meliputi studi literatur atau studi kepustakaan objek-objek studi banding berdasarkan objek dan pendekatan tema yang sama untuk mendapatkan data-data yang berhubungan dengan objek.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pancasila sebagai Ideologi Negara yang Reformatif, Dinamis dan Terbuka**

Menurut Latif (2014) ideologi memiliki tiga dimensi yang mana harus mampu memadukan tiga unsur: keyakinan, pengetahuan, dan tindakan. *Pertama*, ideologi mengandung seperangkat keyakinan berisi tuntunan normatif-preskriptif yang menjadi pedoman hidup. *Kedua*, ideologi mengandung semacam paradigma pengetahuan berisi seperangkat prinsip, doktrin dan teori yang menyediakan kerangka interpretasi dalam memahami realitas. *Ketiga*, ideologi mengandung dimensi tindakan yang merupakan level operasional dari keyakinan dan pengetahuan dalam realitas konkrit. Ball (2013: 5) menggambarkan ideologi dengan cukup menarik yaitu, *“an ideology is a fairly coherent and comprehensive set of ideas that explains and evaluates social conditions, helps people understand their place in society, and provides a program for social and political action. An ideology, more precisely, performs four functions for people who hold it: the (1) explanatory, (2) evaluative, (3) orientative, and (4) programmatic functions.*

Sementara itu gagasan bahwa Pancasila sebagai ideologi negara adalah gagasan yang cukup menarik. Salah satu argumentasinya adalah wacana Pancasila sebagai konsepsi politik atau ideologi negara pada dasarnya sudah merangkum maksud dan tujuan. Menurut Hakim (2016: 158) ketika menjadi konsepsi politik atau ideologi negara, Pancasila dengan sendirinya merupakan kontrak sosial secara langsung juga sebagai ideologi bangsa ala Mochtar Pabottinggi atau *common platform* sebagaimana pendapat Azyumardi Azra. Pancasila sebagai ideologi negara, maka Pancasila memiliki fungsi sebagai visi bangsa dan negara.

Taufik (2015: 54) menjelaskan bahwa negara mengenal dua tipe ideologi yaitu; a) Tipe tertutup, yaitu ideologi tidak lahir dari kehendak masyarakat tertentu, tapi dari kelompok tertentu yang bertujuan memperbarui dan mengubah masyarakat tersebut sehingga kebenaran nilai-nilai sudah pasti dan harus diterima oleh seluruh lapisan masyarakat dalam negara karena isinya dogmatis dan apriori. b) Tipe terbuka, yaitu ideologi lahir dan digali dari nilai-nilai yang lahir dari masyarakat itu sendiri yang bukan dipaksakan dari luar dan juga bukan dari kehendak kelompok tertentu. Berdasarkan kriteria dua tipe di atas Pancasila

merupakan ideologi terbuka. Hal ini dikarenakan Pancasila sebagai ideologi digali dan ditemukan dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat bangsa Indonesia itu sendiri yang memiliki sifat tanggap terhadap dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara. Ideologi Pancasila mengakui dan melindungi hak individu maupun hak masyarakat baik dibidang ekonomi maupun politik.

Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya, namun mengeksplisitkan wawasannya secara lebih konkret, sehingga memiliki kemampuan yang reformatif untuk memecahkan masalah-masalah aktual yang senantiasa berkembang seiring dengan aspirasi rakyat. Pancasila sebagai suatu ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat reformatif, dinamis dan terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila adalah bersifat aktual, dinamis, antisipatif dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Dalam ideologi Pancasila terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi tolak ukur sikap dan perilaku bermoral bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur inilah yang menjadi suatu tolak ukur kebaikan yang berkenaan dengan hal-hal yang bersifat mendasar dan abadi dalam hidup manusia, seperti cita-cita yang hendak dicapainya dalam hidup manusia (Kaelan, 2014).

Peran ideologi negara bukan hanya terletak pada aspek legal formal, melainkan juga harus hadir dalam kehidupan konkret masyarakat itu sendiri. Menurut Agus (2016: 231) beberapa peran konkret Pancasila sebagai ideologi meliputi hal-hal sebagai berikut: a) Ideologi negara sebagai penuntun warga negara, artinya setiap perilaku warga negara harus didasarkan pada preskripsi moral. Contohnya, kasus narkoba yang merebak dikalangan generasi muda menunjukkan bahwa preskripsi moral ideologi belum disadari kehadirannya. Oleh karena itu, diperlukan norma-norma penuntut yang lebih jelas, baik dalam bentuk persuasif, imbauan maupun penjabaran nilai-nilai Pancasila ke dalam produk hukum yang memberikan rambu yang jelas dan hukuman yang setimpal bagi pelanggarnya, b) Ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan sila-sila Pancasila. Contohnya, kasus terorisme yang terjadi

dalam bentuk pemaksaan kehendak melalui kekerasan. Hal ini bertentangan nilai toleransi berkeyakinan, hak-hak asasi manusia, dan semangat persatuan.

Pancasila sebagai ideologi nasional mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa, dan agama. Sehingga semboyan ‘Bhinneka Tungga Ika’ diterapkan bagi segala masyarakat Indonesia dalam kesatuan yang utuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pancasila sebagai ideologi nasional berupaya meletakkan kepentingan bangsa dan Negara Indonesia ditempatkan dalam kedudukan utama di atas kepentingan yang lainnya (Asmaroini, 2017: 55). Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah keseluruhan pandangan, cita-cita, keyakinan, dan nilai-nilai bangsa Indonesia yang harus diimplementasikan dalam kehidupan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

#### **Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0**

Istilah revolusi industri 4.0 secara resmi lahir di Jerman saat diadakan *Hannover Fair* pada 2011. Program tersebut sebenarnya merupakan rencana pembangunan negara Jerman yang diberi nama *High-Tech Strategy 2020*. Kebijakan tersebut dipilih supaya Jerman selalu menjadi terdepan dalam hal manufaktur (Prasetyo & Sutopo, 2018). Sedangkan konsep *society 5.0* diprakarsai oleh Jepang dengan program menjadikan manusia sebagai pusat pengendali teknologi. Manusia bukan objek yang terancam atau tergilas oleh revolusi industri 4.0, justru malah menjadi subjek utama dalam mengendalikan kemajuan ilmu dan teknologi (Rouf, 2019: 44). Revolusi industri 4.0 dan *society 5.0* dijelaskan oleh Rojko (2017:80) sebagai gerakan nyata terhadap perkembangan informasi dan teknologi yang semakin canggih. Kedua revolusi tersebut sebenarnya memiliki esensi yang berbeda, akan tetapi dengan inti yang sama yaitu teknologi.

Revolusi industri 4.0 telah menghadirkan berbagai ragam perkembangan teknologi untuk mempermudah segala kegiatan. Sedangkan *society 5.0* menjanjikan berbagai macam kemudahan bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Hal ini disebutkan oleh Mumtaha & Khoiri (2019) yang terlihat jelas pada masyarakat Indonesia yaitu kehadiran berbagai perusahaan yang menyediakan layanan barang dan jasa berbasis online telah menyebar luas di Indonesia. Salah satu contoh adalah kehadiran GO-JEK yang bermula sebagai

penyedia layanan jasa transformasi online telah menggeser tukang ojek yang menyediakan layanan jasa konvensional. Masyarakat 5.0 ditekankan pada kesiapan untuk lebih berpikir kritis, mengembangkan kreativitas. Puspita, et al (2020) menyebutkan bahwa memang perlu dan penting masyarakat menyiapkan diri dalam menyambut dan menjalankan pendidikan revolusi industri 5.0 dengan cara berpikir yang harus selalu dikenalkan dan dibiasakan adalah cara berpikir untuk beradaptasi di masa depan, yaitu analitis, kritis, dan kreatif.

Menurut Suherman, et. al. (2020:23) masyarakat model ini memiliki tipikalitas cerdas, kritis serta berliterasi tinggi dalam menghayati dimensi-dimensi kehidupan. Pada kondisi masyarakat tersebut beranggapan bahwa martabat manusia harus menjadi pertimbangan nomor satu dan terutama (*humanity is the first and ultimate consideration*). Penghargaan bijak terhadap manusia sebagai *maker* dan *user* dibangun atas dasar prinsip: Manusia tidak boleh menjadi korban dari perkembangan yang dibuatnya, termasuk teknologi. Manusia dan alam lingkungan mesti dihargai secara seimbang dan setara. Tujuan dari konsep ini sendiri adalah mewujudkan masyarakat dimana manusia-manusia di dalamnya benar-benar menikmati hidup dan merasa nyaman. *Society 5.0* sendiri baru diresmikan pada 21 Januari 2019 dan dibuat sebagai solusi atas revolusi industri 4.0 yang ditakutkan akan mendegradasi umat manusia.

*Society 5.0* yang sebenarnya juga tidak lepas dari perkembangan teknologi, akan tetapi dalam revolusi ini lebih mengarah pada tatanan kehidupan bermasyarakat, dimana setiap tantangan yang ada dapat diselesaikan melalui perpaduan inovasi dari berbagai unsur yang terdapat pada revolusi industri 4.0. Melalui *society 5.0*, kecerdasan buatan yang memperhatikan sisi kemanusiaan akan mentransformasi jutaan data yang dikumpulkan melalui internet pada segala bidang kehidupan (Raharja, 2019: 13). Tentu saja diharapkan, akan menjadi suatu kearifan baru dalam tatanan bermasyarakat. Tidak dapat dipungkiri, transformasi ini akan membantu manusia untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna. Dalam *Society 5.0*, juga ditekankan perlunya keseimbangan pencapaian ekonomi dengan penyelesaian problem sosial.

Menurut Agustini (2018: 6) revolusi industri 4.0 juga disebut sebagai revolusi industri yang akan mengubah pola dan relasi antara manusia dengan mesin. Kondisi ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi negara-negara di dunia. Pada satu sisi kondisi ini dapat menjadi keuntungan, namun disisi lain dapat menjadi ancaman bilamana masyarakat dalam suatu negara belum siap menerima perubahan. Dengan kata lain, era revolusi 4.0 berdampak pada semakin berkembangnya teknologi dan semakin berkurangnya intensitas pertemuan manusia yang berimplikasi pada semakin berkurangnya intensitas komunikasi. Bahkan mengubah gaya hidup dan sikap masyarakat ke arah individualis karena produk dari revolusi industri ini dapat dilihat penggunaannya di kehidupan sehari-hari. Masyarakat lebih sering bersosialisasi menggunakan *smartphone*, sehingga silaturahmi dan komunikasi melalui dunia maya menjadi pilihan. Brata dan Wartha (2017) menyebutkan bahwa sikap individualis ini bertentangan dengan budaya bangsa Indonesia yaitu gotong royong, kebersamaan, dan saling menghormati.

Negara Indonesia harus dapat menunjukkan eksistensinya di era 4.0 namun tetap pada komitmen kebangsaan dengan nilai dan karakter khas bangsa Indonesia. Di Indonesia acuan tersebut adalah Pancasila. Pancasila harus dapat diimplementasikan sebagai nilai-nilai dasar yang melandasi setiap sikap dan tindakan warga negara dalam segala aspek kehidupannya. Pancasila sebagai pondasi utama karakter dan jati diri bangsa Indonesia (Mardawani & Veronika, 2019: 136). Sikap yang paling bijak dalam menghadapi kemajuan teknologi era revolusi industri 4.0 dan *society* 5.0 adalah dengan mempersiapkan diri dan memanfaatkan peluang yang ada. Dalam hal ini, pendidikan merupakan pangkal persiapan untuk mencetak sumber daya manusia yang siap mengarungi zaman terutama untuk Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang berperan untuk mempersiapkan dan menguatkan karakter kewarganegaraan dalam menghadapi *society* 5.0.

## **Eksistensi Pancasila dalam Menghadapi Tantangan Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0**

Revolusi industri 4.0 membawa perubahan-perubahan dalam tatanan dunia internasional yang pengaruhnya langsung terhadap perubahan-perubahan di berbagai Negara. Salah satu dampak dari perubahan-perubahan tersebut adanya kecenderungan memudarnya nasionalisme bangsa Indonesia (Asmaroini, 2016:447). Maka dari itu bangsa Indonesia wajib meningkatkan kewaspadaan nasional dan ketahanan mental dan ideologi bangsa Indonesia. Kemampuan menghadapi tantangan yang amat dasar akan melanda kehidupan sosial, politik bahkan mental dan bangsa, maka benteng yang terakhir ialah keyakinan nasional atas dasar Negara Pancasila sebagai benteng dalam menghadapi tantangan pada era revolusi industri 4.0 yang semakin berkembang pada saat ini. Menurut Ismail (2018: 9) menjelaskan bahwa revolusi industri 4.0 Indonesia akan mendorong 10 prioritas nasional dalam inisiatif *making Indonesia 4.0* yang bersifat lintas sektoral yaitu: (1) Perbaikan alur aliran barang dan material, (2) Desain ulang zona industri, (3) Mengakomodasi standar-standar berkelanjutan, (4) Memberdayakan UMKM, (5) Membangun infrastruktur digital nasional, (6) Menarik minat investasi asing, (7) Peningkatan kualitas SDM, (8) Pembangunan ekosistem inovasi, (9) Insentif untuk investasi teknologi, (10) Harmonisasi aturan kebijakan.

Menurut Buhr (2015) industri 4.0 saat ini lebih merupakan visi daripada kenyataan, tetapi sudah siap untuk mengubah tidak hanya cara kita melakukan bisnis, tetapi interaksi sosial kita secara umum. Revolusi Industri 4.0 merupakan sebuah persoalan yang akan menjadi tantangan besar bagi Negara Indonesia agar dapat bersaing dengan negara-negara luar, sehingga Negara Indonesia menjadi negara yang kuat yang berasaskan kepada Ideologi Pancasila. Dalam menghadapi tantangan revolusi 4.0 bangsa Indonesia harus menanamkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan dan kerakyatan, serta berasaskan kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila hendaknya juga mampu menyaring dampak dari revolusi industri 4.0 yang mampu membawa perubahan pada tatanan dunia khususnya bagi masyarakat Indonesia. Dengan berpegang teguh pada

Pancasila maka masyarakat Indonesia mampu mewujudkan nasionalisme Indonesia.

Pancasila yang pada hakikatnya merupakan produk asli Indonesia dan lahir dari banyaknya perbedaan seharusnya menjadi nilai dasar yang senantiasa dijunjung oleh segenap masyarakat Indonesia. Tetapi saat ini banyak tantangan dan juga ancaman yang harus dihadapi oleh Pancasila terutama di era saat ini masyarakat Indonesia semakin maju dalam peradabannya terutama dalam penggunaan teknologi. Teknologi pada dasarnya memang diciptakan untuk membantu manusia dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Meskipun demikian, teknologi juga bisa menjadi alat yang mampu membahayakan kehidupan manusia apabila tidak digunakan secara bijaksana (Fadilah, 2019: 74). Tantangan Pancasila di era saat ini bisa mengancam eksistensi kepribadian bangsa, dan kini mau tidak mau, suka tidak suka, bangsa Indonesia berada di pusaran arus globalisasi dunia. Tetapi harus diingat bahwa bangsa dan negara Indonesia tidak seharusnya kehilangan jati diri, karena hidup di antara pergaulan dunia.

Pada era revolusi industri 4.0 Pancasila dengan segenap nilai yang melekat padanya harus berhadapan dengan perkembangan sains dan teknologi beserta paradigma berpikir masyarakat Indonesia. Sains dan teknologi secara stimultan telah berevolusi menjadi suatu ideologi dengan menawarkan kemudahan dan kecanggihan kepada manusia, dan mengubah pola berpikirnya secara signifikan. Sehingga, dapat dikatakan eksistensi Pancasila sebagai ideologi sangat terancam posisinya apabila revolusi industri 4.0 tidak disikapi oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia secara hikmat penuh kebijaksanaan (Safi'i, 2019: 17).

Pancasila dapat berpotensi kehilangan eksistensinya sebagai ideologi di gelombang revolusi industri 4.0. Hal tersebut bisa saja terjadi apabila pemerintah selaku penyelenggara negara dan masyarakat pada umumnya tidak bekerja sama untuk saling menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya nilai-nilai Pancasila bagi kehidupan bersama dimasa yang akan datang. Menurut Siswoyo (2016) Pancasila dapat berperan memberikan beberapa prinsip etis kepada ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagai berikut: a) Martabat manusia sebagai pribadi, sebagai subjek tidak boleh diperalat untuk kepentingan iptek, riset. b) Prinsip

“tidak merugikan”, harus dihindari kerusakan yang mengancam kemanusiaan. c) IPTEK harus sedapat mungkin membantu manusia melepaskan dari kesulitan-kesulitan hidupnya. d) Harus dihindari adanya monopoli iptek. e) Diharuskan adanya kesamaan pemahaman antara ilmuwan dan agamawan, yaitu bahwa iman memancar dalam ilmu sebagai usaha memahami “sunnatullah”, dan ilmu menerangi jalan yang telah ditunjukkan oleh iman.

Revolusi industri 4.0 secara fundamental telah mengubah cara beraktivitas manusia dan memberikan pengaruh yang besar terhadap dunia kerja. Pengaruh positif revolusi industri 4.0 berupa efektifitas dan efisiensi sumber daya dan biaya produksi meskipun berdampak pada pengurangan lapangan pekerjaan. Sedangkan pada kondisi *society* 5.0 membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dalam literasi digital, literasi teknologi, dan literasi manusia karena pada masyarakat ini disiapkan untuk lebih berpikir kritis dan mengembangkan kreativitas (Fadilah, 2019:71). Namun, di samping adanya pengaruh positif juga tampak ditemui pengaruh negatifnya. Semakin banyaknya penggunaan teknologi dalam kehidupan, salah satu hal yang patut diwaspadai adalah penggunaan teknologi yang tidak bertanggungjawab dapat berdampak pada rusaknya persatuan dan kesatuan bangsa ini. Sudah banyak peristiwa yang mengarah ke sana, sebagai contoh: penggunaan sosial media untuk menyebarkan ajaran-ajaran radikal yang berpotensi melukai Kebhineka Tunggal Ika-an bangsa ini, mudahnya seseorang memberikan ujaran kebencian kepada orang lain melalui media sosial, serta tindakan-tindakan ekstrim seperti bom bunuh diri di beberapa tempat ibadah (Karsa, 2019: 13). Maka di sinilah perlu adanya penguatan Pancasila agar eksistensinya sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia tetap terjaga sampai kapanpun.

Demi menjaga eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara di era revolusi industri 4.0 dan *society* 5.0 dapat dilakukan beberapa upaya untuk penguatan, seperti: (1) Membumikan Pancasila dalam perkembangan revolusi 4.0. dengan cara, meningkatkan pemahaman pancasila, mengurangi eksklusivisme sosial, mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan wawasan Pancasila bagi penyelenggara Negara serta menjadikan Pancasila sebagai keteladanan dalam

menghadapi revolusi industri 4.0, (2) Meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, (3) Mempertahankan eksistensi Pancasila sebagai Ideologi Negara Indonesia.

Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia merupakan hasil pemikiran yang dituangkan dalam suatu rumusan rangkaian kalimat dengan mengandung satu pemikiran bermakna untuk dijadikan dasar, azas, pedoman hidup dan kehidupan bersama dalam negara Indonesia merdeka. Dapat dikatakan bahwa tantangan bagi Pancasila dalam menghadapi revolusi industri 4.0 dan *society* 5.0 dibutuhkan peran dari penyelenggara negara dan warga negara dalam mempertahankan eksistensi Pancasila sebagai salah satu ideologi besar di dunia yang digunakan oleh Indonesia sehingga perlunya pembelajaran yang mendalam untuk mempertahankan Pancasila sebagai Ideologi Negara di tengah era ini.

Untuk meningkatkan eksistensi dan pemahaman nilai-nilai Pancasila dalam ranah pendidikan dapat dilakukan melalui kegiatan pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang harus pula mengikuti perkembangan zaman yang sesuai dengan era sekarang. Pancasila sangat diharapkan dapat dipahami dan diterima oleh generasi saat ini yang pada dasarnya merupakan generasi yang sangat jauh dan pastinya tidak terlibat langsung dengan proses-proses pembentukan Pancasila itu sendiri. Pendekatan dan metode pembelajaran yang dapat dilakukan adalah dengan merevitalisasi cara belajar pendidikan Pancasila di tingkat sekolah maupun pendidikan tinggi. Pembelajaran yang dimaksud adalah dengan merubah cara belajar dari konvensional menjadi terpusat kepada siswa ataupun mahasiswa.

Paradigma atau pendekatan dalam metode pembelajaran pendidikan Pancasila harus berubah dari yang *teacher oriented* ke *student oriented*. Guru dan dosen yang terlalu dominan dikelas, serba tahu segalanya, siswa atau mahasiswa dianggap seperti kanvas putih yang bisa dituliskan segala ilmu dan materi pelajaran sudah tidak sesuai lagi dengan siswa dan mahasiswa di era revolusi industri 4.0 saat ini. Pada metode pembelajaran konvensional tersebut, peserta didik seolah-olah mendengarkan guru ataupun dosennya, namun pikiran mereka tidak terpusat dengan materi yang disampaikan oleh guru dan dosen. Maka dari itu, metode

pembelajaran pendidikan Pancasila juga harus dapat mendekatkan diri pada peserta didik sesuai dengan era sekarang ini, era dimana dunia teknologi informasi yang sarat big data. Peserta didik bahkan lebih mahir mengakses informasi dan mencari materi pengetahuan pelajaran dibandingkan guru atau dosennya.

Selain itu, Nurjanah (2017: 103) menyatakan bahwa perlu dilakukan adanya internalisasi nilai-nilai Pancasila pada pelajar yang merupakan generasi muda penerus bangsa dalam penguatan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya mencegah pelajar anti Pancasila. Internalisasi adalah proses memasukkan nilai pada seseorang yang akan membentuk pola pikirnya dalam melihat makna realitas pengalaman. Nilai-nilai tersebut bisa jadi dari berbagai aspek baik agama, budaya, norma sosial dan lain-lain. Pemaknaan atas nilai inilah yang mewarnai pemaknaan dan penyikapan manusia terhadap diri, lingkungan dan kenyataan di sekelilingnya.

Menanamkan nilai-nilai Pancasila pada generasi muda, dalam prakteknya memang tidaklah mudah oleh karena itu sebelum diperkenalkan Pancasila sebagai hal utama yang harus generasi muda ketahui adalah penjabaran nilai-nilai Pancasila. Langkah selanjutnya dalam membentuk jiwa Pancasila pada generasi muda yaitu dengan memperkenalkan sejarah Pancasila, sehingga generasi ini akan tahu seperti apa itu Pancasila dan perkembangannya saat pertama kali digali oleh pendiri Indonesia. Selanjutnya adalah memberi pemahaman bahwa Pancasila adalah ideologi negara yang sila-silanya sesuai dengan ajaran agama yang diakui di Indonesia. Hal tersebut untuk membentengi pelajar agar tidak terpengaruh paham atau aliran anti Pancasila.

Upaya untuk terus menerus mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila pada kehidupan nasional seperti membangun sistem hukum Pancasila dan penguatan pendidikan Pancasila adalah langkah agar eksistensi Pancasila sebagai ideologi yang sarat dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, kebersatuan, deliberatif, gotong royong, dan keadilan sosial terus terjaga. Semua nilai tersebut diharapkan dapat terus mengawal perjalanan bangsa Indonesia dari generasi ke generasi. Langkah ini harus terus dikembangkan lagi, supaya masyarakat Indonesia di era berikutnya

tetap menjadi manusia yang mempunyai sifat cerdas dan kesadaran bukan hanya manusia yang seperti robot yang hanya memiliki kecerdasan.

## **SIMPULAN**

Pancasila merupakan ideologi dari bangsa Indonesia sekaligus juga dasar negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa dijadikan sebagai landasan dan pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam sikap kehidupan sehari-hari termasuk menghadapi dan menerima hadirnya revolusi industri 4.0 dan *society* 5.0 untuk menghadapi segala tantangan dan kemungkinan pengaruh positif maupun negatif yang muncul dari dampak memasuki era tersebut. Maka perlu adanya peningkatan eksistensi Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara guna menjadi tameng masyarakat Indonesia dalam menyikapi era tersebut. Agar eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara dalam memasuki era revolusi industri 4.0 dan *society* 5.0 tetap terjaga dapat dilakukan dengan penguatan dalam memahami atau internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai dari kelima sila Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selain itu, untuk melakukan penguatan pada ideologi Pancasila dapat melalui beberapa cara, yaitu: 1) Penguatan dan penghayatan nilai-nilai Pancasila pada generasi muda melalui pembelajaran PPKn di tingkat pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi, 2) pembuatan suatu kebijakan oleh pemerintah yang mencerminkan nilai Pancasila dan konstitusi untuk mengatur persoalan menyangkut penemuan dan perkembangan sains serta teknologi di Indonesia, 3) Meningkatkan pemahaman Pancasila, mengurangi eksklusivisme sosial, mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan wawasan Pancasila bagi penyelenggara negara, 4) Meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Harus disadari bahwa dengan keberadaan Pancasila maka seluruh elemen bangsa yang sangat beragam akan dapat disatukan, termasuk ketika semakin akrab dalam penggunaan teknologi pada kehidupan era revolusi industri 4.0 dan *society* 5.0.

## REFERENSI

- Agus, A. A. (2016). Relevansi Pancasila sebagai ideologi terbuka di era reformasi. *Jurnal Office*, (2)2, hal. 229-238.
- Agustini, K.L. (2018). Persaingan *Industry 4.0* di ASEAN: Dimana Posisi Indonesia?, Yogyakarta: Forbil Institute.
- Asmaroini, A.P. (2016). Implementasi nilai-nilai Pancasila bagi siswa di era globalisasi. *CITIZENSHIP: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), hal.440-450.
- Asmaroini, A.P. (2017). Menjaga eksistensi Pancasila dan penerapannya bagi masyarakat di era globalisasi. *JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(2), hal. 50-64.
- Ball, T. (2013). *Political ideologies and the democratic ideal*. New Jersey: Perason.
- Brata, I. B., & Wartha, I. B. N. (2017). Lahirnya pancasila sebagai pemersatu bangsa indonesia. *Jurnal Santiaji Pendidikan*, 7(1), 120-132.
- Buhr, D. (2015). *Social innovation policy for industry 4.0*. Tubingen, Germany: Eberhard Karis University of Tubingen.
- Fadilah, N. (2019). Tantangan dan penguatan ideologi Pancasila dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. *Journal of Digital Education, Communication and Arts*, 2(2), hal. 66-78.
- Hakim, M.A. (2016). Repositioning Pancasila dalam pergulatan ideologi-ideologi gerakan di Indonesia pasca-reformasi. *Kontemplasi*, 4(1), hal.131-163.
- Ismail, A. (2018). *Tantangan dan penguatan ideologi Pancasila dalam menghadapi era revolusi industri 4.0*. STMIK Sumedang.
- Kaelan. (2014). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Karsa, T.I. (2019). Harmonisasi hukum dan teknologi di era revolusi industri 4.0 berkaitan dengan Pancasila sebagai fundamnetal norm. *Keadilan: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang*, 17(1), hal. 1-15.
- Latif, Y. (2012). *Negara paripurna: historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*. Jakrarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Latif, Y. (2014). *Mata air keteladanan: Pancasila dalam perbuatan*. Jakarta: Mizan.

- Mardawani., & Veronika, L. (2019). Implementasi nilai luhur pancasila melalui kegiatan bakti mahasiswa untuk memperkuat komitmen kebangsaan pada generasi milenial. *Jurnal PEKAN*, 4(2), 134-148.
- Mumtaha, H. A., & Khoiri, H. A. (2019). Analisis dampak perkembangan revolusi industri 4.0 dan *society* 5.0 pada perilaku masyarakat ekonomi (e-commerce). *PILAR TEKNOLOGI: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Teknik*, 4(2), 55-60. <http://pilar.unmermadiun.ac.id/index.php/pilarteknologi>.
- Nurjanah, S. (2017). Internalisasi nilai-nilai Pancasila pada pelajar (upaya mencegah aliran anti Pancasila di kalangan pelajar). *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 5(1), hal. 93-106.
- Puspita, Y., Fitriani, Y., Astuti, S., & Novianti, S. (2020). Selamat tinggal revolusi industri 4.0, selamat datang revolusi industri 5.0. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang 10 Januari 2020, 122-130.
- Prasetyo, H., & Sutopo, W. (2018). Industri 4.0: telaah klasifikasi aspek dan arah perkembangan riset. *J@ti Undip: Jurnal Teknik Industri*, 13(1), 17-26. DOI: <https://doi.org/10.14710/jati.13.1.17-26>.
- Raharja, H. Y. (2019). Relevansi pancasila era industry 4.0 dan *society* 5.0 di pendidikan tinggi vokasi. *Journal of Digital Education, Communication, and Arts*, 2(1), 11-20. DOI: 10.30871/deca.v2i1.1311.
- Rojko, A. (2017). Industry 4.0 concept: background and overview. *iJIM: International Journal of Interactive Mobile Technologies*, 11(5), 77-90. DOI: <https://doi.org/10.3991/ijim.v11i5.7072>.
- Rouf, A. (2019). Reaktualisasi dan kontekstualisasi kearifan lokal dengan manhaj global: upaya menjawab problematika dan tantangan pendidikan di era *society* 5.0 dan revolusi industri 4.0. *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana UNNES*, 42-46.
- Safi'i, F.M. (2019). Tantangan dan masa depan ideologi Pancasila di era revolusi industri 4.0. *Ilmu Hukum Unsri*. Hal.1-23.
- Siswoyo, D. (2016). *Pancasila sebagai paradigma pembangunan bangsa (Pancasila)*. Yogyakarta: UNY Press.
- Suherman., Musnaini., Wijoyo, H., & Indrawan, I. (2020). *Industry 4.0 vs society 5.0*. Purwokerto: CV. Pena Persada.
- Taufik, A. (2015). Refleksi atas revitalisasi nilai Pancasila sebagai ideologi dalam mengeleminasi kejahatan korupsi. *UNIVERSUM*, 2(1), hal.49-55.

Widiuseno, I. (2014). Azas filosofis Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. *HUMANIKA*, 20(2), hal. 62-66.

Widiseseno, I., & Susanto, H. (2019). *Merajut dan meneguhkan jati diri bangsa*. Bogor: IPB Press.

# Kebijakan Karantina Calon Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Semarang Tahun 2018

Martien Herna Susanti, Setiajid

[martien@mail.unnes.ac.id](mailto:martien@mail.unnes.ac.id), [setiajid@mail.unnes.ac.id](mailto:setiajid@mail.unnes.ac.id)

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kebijakan karantina pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Kabupaten Semarang tahun 2018 sebagai kebijakan baru dan satu-satunya di Provinsi Jawa Tengah. Kebijakan karantina merupakan kesepakatan bersama antara Panitia pemilihan kepala desa (Pilkades) dengan calon kepala desa yang mengikuti kontestasi Pilkades tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan terjadinya dinamika Pilkades sebagai dampak perubahan regulasi yang mengatur persyaratan jumlah calon dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuka peluang bagi seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) untuk mencalonkan diri pada Pilkades di seluruh Indonesia. Kebijakan karantina ini mampu meredam konflik yang muncul dalam Pilkades sebagai ajang pertarungan perebutan kekuasaan, harga diri, kehormatan dan simbol sosial karena kekalahan dalam pilkades akan terekam dan menjadi uji kasus pola kehidupan bersosial masyarakat desa.

**Kata Kunci:** Kebijakan Karantina Desa; Pemilihan Kepala Desa Serentak; UU Desa.

## PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan ajang perebutan kekuasaan politik di tingkat desa yang ditandai mobilisasi berbagai sumber daya, harga diri, kehormatan, dan simbol-simbol sosial (Wasistiono, 1993). Konflik yang umumnya terjadi pada saat Pilkades berlangsung tidak serta merta selesai pasca pelantikan kepala desa terpilih. Mobilisasi penggunaan semua sumber daya kekuasaan baik sosial, kultural, hingga sumber daya ekonomi memiliki andil terjadinya konflik yang dapat memporak-porandakan solidaritas sosial masyarakat desa yang dikenal memiliki hubungan kekeluargaan yang erat. Kondisi tersebut diperparah dengan lunturnya semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan akibat pengaruh budaya individualis dan hedonisme.

Durkheim (Lawang, 1986:181) menyatakan bahwa solidaritas sosial merupakan suatu keadaan hubungan antara individu dan atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama dan diperkuat oleh pengalaman emosional bersama. Berdasarkan bentuknya, solidaritas sosial masyarakat dibedakan menjadi solidaritas sosial mekanik dan solidaritas sosial organik (Lauer, 2001:86). Mengacu pendapat Emile Durkheim, maka tipe solidaritas sosial yang terdapat pada masyarakat desa adalah solidaritas

mekanik. Masyarakat desa belum banyak mengenal diferensiasi dan pembagian kerja, serta mempunyai kepentingan dan kesadaran yang sama. Menurut Durkheim, solidaritas mekanik didasarkan pada suatu "kesadaran kolektif" bersama (*collective consciousness/conscience*), yang menunjuk pada totalitas kepercayaan-kepercayaan dan sentimen-sentimen bersama yang rata-rata ada pada warga masyarakat yang sama (dalam Johnson, 1986:183). Pengikat utamanya adalah kepercayaan bersama, cita-cita, dan komitmen moral.

Ikatan dalam solidaritas tersebut akan peneliti analisis untuk mengetahui latar belakang kebijakan karantina yang dilaksanakan pada Pilkades serentak tahun 2018 di Kabupaten Semarang. Kebijakan karantina adalah kesepakatan yang dibuat panitia Pilkades bersama dengan para calon kepala desa untuk mengkarantina semua calon kepala desa di tempat yang telah disepakati yang bertujuan untuk menjaga kondusivitas keamanan wilayah masing-masing desa selama proses pemungutan suara. Kesepakatan yang dituangkan menjadi kebijakan tersebut tidak terdapat di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) maupun regulasi di bawahnya.

Ketentuan tentang Pilkades serentak terdapat dalam pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang menyebutkan bahwa Pilkades dapat dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang. Selanjutnya pasal 3 menegaskan, Pilkades dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten/Kota. Mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka Pemerintah Kabupaten Semarang menindaklanjuti dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Pilkades sangat erat kaitannya dengan otonomi yang dimiliki desa yaitu otonomi asli, karena masyarakat berpartisipasi secara langsung dalam menentukan pemimpinnya dan telah dilaksanakan semenjak masa penjajahan Belanda atau sebelum Indonesia merdeka. Otonomi asli desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut (Wijaya,2003:166). Dengan demikian pemerintah desa berwenang mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat tersebut.

Saat ini terjadi pergeseran kewenangan desa terkait Pilkades yang ditunjukkan dengan persyaratan jumlah calon minimal dua calon dan maksimal lima calon kepala desa dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuka peluang bagi seluruh WNI untuk mencalonkan diri pada Pilkades di seluruh Indonesia. Perubahan regulasi ini sedikit banyak menyebabkan terjadinya perubahan strategi yang digunakan calon kepala desa atau kandidat dalam memobilisasi sumber-sumber kekuasaan yang dimiliki berupa kemampuan personal, kekayaan, jaringan kekerabatan, hingga *money politic* untuk mencapai kemenangan. Beberapa temuan (Kartodirdjo,1992; Kana, 2001; dan Ratnasari, 2016) menyatakan dalam konteks Pilkades, politik uang sebagai taktik untuk memenangkan kandidat ternyata berkorelasi positif meningkatkan partisipasi publik.

Perubahan regulasi terkait desa tidak selamanya bersifat positif, sebagaimana studi yang dilakukan oleh Hans Antlov (2003) dalam artikel yang berjudul, "*Village and Sub-District Functions in Decentralized Indonesia*" menjelaskan, bahwa otonomi desa merupakan penyimpangan dramatis dari model homogen yang dipaksakan di bawah orde baru ketika otoritas dan struktur desa dimasukkan ke dalam satu struktur administratif yang dirancang oleh pemerintah pusat. Bahkan terdapat kecenderungan ketergantungan kepala desa yang besar atas kekuasaan otoritas yang lebih tinggi dalam hal ini pemerintah kecamatan dan kabupaten. Dengan demikian administrasi desa sebatas miniatur replika dari

kepentingan pemerintah pusat, karena keputusan dan kebijakan telah ditentukan dari atas (Schulte Nordholt, 1981; Husken, 1988; Antlov 1995; Holland, 1999).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan penelitian yaitu: (1) Bagaimana pelaksanaan Pilkades serentak Kabupaten Semarang tahun 2018?; dan (2) Bagaimana pelaksanaan kebijakan karantina pada Pilkades serentak di Kabupaten Semarang tahun 2018?. Tujuan penelitian ini yaitu: (1) Untuk mengetahui pelaksanaan Pilkades Kabupaten Semarang tahun 2018; (2) Mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan karantina pada Pilkades serentak di Kabupaten Semarang tahun 2018.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif yang dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang komprehensif, sistematis, dan mendalam dari kasus yang diteliti (Creswell, 2015), dalam hal ini adalah kebijakan karantina calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa serentak Kabupaten Semarang Tahun 2018. Lokasi penelitian meliputi 4 (empat) desa di Kabupaten Semarang yang melaksanakan Pilkades serentak tahun 2018, yakni Desa Wonoyoso Kecamatan Pringapus, Desa Gondoriyo Kecamatan Bergas, Desa Kalikayen Kecamatan Ungaran Timur, dan Desa Truko Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang. Keempat desa dipilih, karena terdapat fenomena yang menonjol.

Pilkades di Desa Wonoyoso dan Desa Gondoriyo dimenangkan kepala desa baru mengalahkan incumbent. Kepala desa terpilih di Desa Kalikayen menang dengan selisih 3 (tiga) suara. Pilkades Desa Truko dimenangkan oleh *incumbent* dengan selisih suara sebanyak 4 (empat) suara. Fokus penelitian meliputi: (1) pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Semarang tahun 2018; (2) pelaksanaan kebijakan karantina calon kepala desa pada Pilkades serentak di Kabupaten Semarang. Teknik Pengambilan Sampel yakni *purposive sampling* dan *snowball* yaitu kepala desa terpilih yang merupakan *incumbent*, kepala desa terpilih bukan *incumbent*, masyarakat desa yang telah memiliki hak pilih, dan Kepala Bidang Pemerintahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan

dokumentasi. Data yang terkumpul diuji validitasnya dengan menggunakan triangulasi data dan triangulasi metode. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif interaktif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pilkades serentak di Kabupaten Semarang dilaksanakan tanggal 9 Desember 2018 di 140 desa. Dari 411 calon kepala desa, terdapat lima pasangan suami istri, dengan alasan hingga batas akhir pendaftaran tidak ada calon lain yang mendaftar yaitu: (1) Muhammad Mujib dan Esti Robiah (Desa Kenteng, Kecamatan Susukan), (2) HM Niam dan Siti Roqiah (Desa Ketapang, Kecamatan Susukan), (3) Kholil dan Minarsih (Desa Regunung, Kecamatan Tenganan), (4) Tarsono S dan Lestari (Desa Tegalrejo, Kecamatan Tenganan), dan (5) Budi Wahono dan Rejiati (Desa Rejosari, Kecamatan Jambu). Kontestasi yang melibatkan hubungan keluarga yaitu suami istri ini terjadi akibat sulitnya memenuhi persyaratan pendaftar bakal calon kepala desa yang mewajibkan diikuti minimal 2 (dua) orang dan maksimal 5 (lima) orang. Dari hasil Pilkades Kabupaten Semarang tahun 2018, *incumbent* terpilih kembali sebanyak 78 orang dan *incumbent* tidak terpilih sebanyak 37 orang.

Data di lapangan menunjukkan rata-rata kepala desa terpilih baik petahana dan bukan petahana berlatar belakang pendidikan S1 (sarjana) dan D4 (sarjana terapan). Kondisi ini melampaui ketentuan UU Desa pasal 33 ayat (d) yang menyebutkan berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat. Umumnya kepala desa terpilih bukan inkumbent tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan kepala desa sebelumnya. Berdasarkan wawancara dengan kepala desa terpilih bukan *incumbent*, yaitu kepala Desa Wonoyoso, Truko, Kalikayen tidak memiliki persiapan khusus dalam Pilkades serentak tersebut, karena dari sisi administrasi tidak ada perbedaan dengan Pilkades sebelumnya kecuali dari sisi pelaksanaan berupa pemungutan suara berikut penghitungannya dilaksanakan di masing masing dusun, ketentuan calon minimal 2 (dua) orang dan maksimal 5 (lima ) orang, diperbolehkan orang dari

daerah lain mencalonkan diri sebagai kepala desa, dan adanya kebijakan karantina bagi calon kepala desa.

Kepala bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang juga mengakui persiapan yang dilakukan panitia Pilkades serentak baik di tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten berjalan sesuai *time schedule*. Persiapan lebih matang dan terarah, karena koordinasi dan persiapan relatif lebih mudah. Koordinasi yang dimaksud meliputi institusi yang terlibat dalam Pilkades 2018 yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD), panitia desa, panitia kecamatan, panitia kabupaten, Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas), inspektorat, Dispermasdes, kepolisian, dan Perlindungan Masyarakat (Linmas).

### **Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak**

Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Terdapat perubahan yang signifikan terkait persyaratan calon kepala desa pada Pilkades serentak tahun 2018. Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya bernomor 128/PUU-XIII/2015 tegas menyatakan Pasal 33 huruf g UU Desa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mahkamah menilai pemilihan kepala desa secara langsung oleh masyarakat desa dan pengangkatan perangkat desa tanpa mensyaratkan harus berdomisili di desa setempat bersesuaian dengan semangat Pasal 28C ayat (2) UUD 1945.

MK menyatakan bahwa sudah seyogyanya pemilihan '*kepala desa dan perangkat desa*' tidak perlu dibatasi dengan mensyaratkan harus "terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran". Kelebihan dari keputusan ini adalah peluang bagi seluruh WNI untuk mencalonkan diri dalam Pilkades di seluruh Indonesia. Selain itu bagi pemilih, hal ini memberikan banyak pilihan calon kepala desa yang berkualitas, memiliki kapabilitas, dan integritas dalam mewujudkan desa yang lebih baik.

Kelemahannya adalah muncul keraguan akan kapasitas calon kepala desa, karena tidak menguasai dan memahami potensi dan persoalan desa.

Aspinall (2017) dalam artikelnya yang berjudul '*Village Head Elections in Java: Money Politics and Brokerage in The Remaking of Indonesia's Rural Elite*', menyebutkan, bahwa pemilihan kepala desa benar-benar dilakukan secara kompetitif. Para kandidat harus mencurahkan sumber daya jaringan, kreativitas intelektual, upaya fisik dan kekayaan materi untuk menarik dukungan penduduk desa. Terdapat hubungan timbal balik berupa *patron client* yang menguntungkan antara elit desa dengan penguasa yang secara historis adalah produk kolonial yang cenderung lebih berorientasi pada kepentingan majikan daripada masyarakat dan berdampak munculnya oligarkhi, nepotisme, bahkan otoritarianisme pemerintahan desa. Selanjutnya Kevin O'Brien dan Li Lianjiang (2018), "*Rightful Resistance in Rural China*", menggambarkan pemerintahan mandiri desa sebagai upaya untuk bertukar hak demokrasi terbatas untuk kepatuhan rakyat dengan kebijakan negara.

### **Kebijakan Karantina pada Pilkades Serentak Tahun 2018 di Kabupaten Semarang Pilkades Serentak di Kabupaten Semarang**

Kebijakan karantina merupakan kesepakatan yang dibuat oleh panitia Pilkades dengan calon kepala desa yang mengikuti kontestasi Pilkades di tahun 2018. Kebijakan karantina baru dilaksanakan pada Pilkades tahun 2018 atau dengan kata lain belum dilaksanakan pada Pilkades sebelumnya. Kesepakatan ini murni inisiatif dari masyarakat, karena regulasi baik tentang desa maupun Pilkades khususnya tidak mengatur hal tersebut. Kesepakatan ini merupakan bentuk solidaritas yang dibangun oleh masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Semarang untuk mewujudkan Pilkades yang jujur dan adil dengan sedapat mungkin meminimalisir konflik di masyarakat.

Pilkades serentak yang dilaksanakan di tahun 2018 sudah sesuai dengan UU Desa yang mensyaratkan jumlah kandidat minimal 3 (tiga) orang dan maksimal 5 (lima) orang, meskipun hasil di lapangan menunjukkan ketentuan tersebut menyebabkan terjadinya konstestasi semu, yaitu hanya sekedar memenuhi persyaratan administrasi terkait jumlah calon kepala desa. Keikutsertaan suami dan/atau istri dalam Pilkades sebatas menggugurkan

persyaratan, menyebabkan kompetisi sebagai bagian dari pelaksanaan demokrasi tidak berjalan optimal. Terlepas dari kekurangan regulasi yang mengatur tentang hal tersebut, setidaknya ketentuan ini mampu meminimalisir fenomena *bumbung kosong* atau calon tunggal yang terjadi pada Pilkades-Pilkades sebelumnya. Pada Pilkades Kabupaten Semarang tahun 2018, kandidat masih diikuti oleh warga yang bertempat tinggal atau berdomisili di desa masing-masing dan tidak ada kandidat yang berasal dari luar wilayah desa tersebut.

Secara umum dari sisi pelaksanaan Pilkades serentak Kabupaten Semarang tahun 2018 berjalan dengan efisien dan efektif. Hal ini disebabkan dalam sekali proses tahapan Pilkades dapat mengawal pelaksanaan Pilkades lebih banyak desa dengan waktu yang bersamaan dan sesuai dengan *time schedule* dari kabupaten. Keberadaan TPS (Tempat Pemungutan Suara) di wilayah dusun terbukti lebih meningkatkan partisipasi pemilih dengan hasil lebih cepat diketahui, karena penghitungannya dilaksanakan di masing-masing dusun. Lokasi TPS di wilayah dusun juga berhasil mengurangi potensi terjadinya kerusuhan antar pendukung. Seperti terjadi di Desa Kalikayen dan Desa Truko yang selisih perolehan suaranya sangat tipis. Selisih suara antara pemenang calon kepala desa di Desa Kalikayen hanya sebanyak 3 (tiga) suara dan Desa Truko sebanyak 4 (empat) suara. Hal yang perlu diapresiasi dari Pilkades serentak tahun 2018 ini, bahwa pihak calon kepala desa yang kalah dapat menerima kekalahan dengan lapang dada dan sportif, tetap *legowo* walaupun awalnya kurang puas. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat solidaritas, perasaan saling percaya, dan sikap hormat menghormati yang mendorong munculnya rasa tanggungjawab demi kepentingan bersama.

Pilkades serentak di Kabupaten Semarang juga diwarnai dengan fenomena unik yaitu kebijakan karantina bagi calon kepala desa. Panitia pemilihan kepala desa (Pilkades) mengkarantina semua calon kepala desa di tempat yang telah disepakati. Pada Pilkades Kabupaten Semarang tahun 2018, hampir semua calon kepala desa menyepakati tempat karantina adalah balai desa. Kesepakatan ini juga dimaksudkan agar tidak terjadi pengumpulan massa calon

yang berpotensi menimbulkan kerusuhan serta mengurangi fenomena *botoh* dalam mempengaruhi suara pemilih.

Kebijakan karantina bagi calon kepala desa dapat dilaksanakan dengan lancar. Semua calon kepala desa melaksanakan hasil kesepakatan bersama ini secara sukarela. Para calon kepala desa tidak merasa dirugikan, karena panitia Pilkades menjamin penggunaan hak pilih serta kesempatan untuk melaksanakan pemantauan proses pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan pengawasan petugas Linmas. Mereka menyadari kesepakatan ini dibuat agar agar Pilkades terlaksana secara transparan, jujur dan bersih, bermartabat, luber dan jujur.

Kebijakan karantina ini menjadi simbol kekeluargaan dan kegotongroyongan yang masih terpelihara. Terdapat harapan yang disampaikan oleh para calon kepala desa untuk pelaksanaan Pilkades serentak yang akan datang yaitu: (1) perlu waktu dan ruang yang memadai bagi calon untuk menyampaikan visi dan misi kepada masyarakat termasuk menekan praktik terjadinya *money politic*, (2) perlu sosialisasi yang lebih matang kepada calon pemilih agar Pilkades terlaksana secara transparan, jujur dan bersih, bermartabat, luber dan jujur. Kebijakan karantina ini juga mampu meredam konflik yang muncul dalam Pilkades sebagai ajang pertarungan perebutan kekuasaan, harga diri, kehormatan dan simbol sosial karena kekalahan dalam Pilkades akan terekam dan menjadi uji kasus pola kehidupan bersosial di desa.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pilkades wajib diikuti oleh minimal dua calon dan maksimal lima calon. Persyaratan ini berdampak munculnya konstestasi semu dengan melibatkan pasangan suami istri sebagai kandidat selain strategi yang digunakan oleh masing-masing calon dalam memanfaatkan sumber-sumber kekuasaan yang dimiliki berupa kemampuan personal, kekayaan, jaringan kekerabatan, hingga *money politic* yang mewarnai pertarungan perebutan kekuasaan di desa. Keunikan dari Pilkades serentak

Kabupaten Semarang tahun 2018 dan satu-satunya di Indonesia adalah kebijakan karantina calon kepala desa yang terbukti dapat menanggulangi potensi munculnya kerusuhan selama proses pemungutan suara. Karantina ini tidak diatur dalam undang-undang maupun peraturan di bawahnya. Kebijakan karantina berdasarkan kesepakatan panitia pemilihan kepala desa dengan calon kepala desa. Kebijakan karantina tidak menghilangkan hak calon untuk menggunakan hak pilih serta peluang melakukan pemantauan proses pemungutan suara di TPS. Kesepakatan antar calon kepala desa menunjukkan, bahwa ikatan kekeluargaan dan semangat kegotongroyongan masih terpelihara kuat sebagai wujud solidaritas sosial masyarakat desa di Kabupaten Semarang.

## REFERENSI

- Antlov, H. (2003). "Village Government and Rural Development in Indonesia: The New Democratic Framework", *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, vol. 39, No. 2.
- Aspinall, E. & Rohman, N. (2017). Village head elections in Java: Money politics and brokerage in the remaking of Indonesia's rural elite. *Journal of Southeast Asian Studies*. Volume 48, Issue 1. DOI: <https://doi.org/10.1017/S0022463416000461>.
- Bungin, B. (2015). *Penelitian kualitatif edisi kedua*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Creswell, (2015). *Penelitian kualitatif & desain riset memilih di antara lima pendekatan edisi 3*. Terjemahan Ahmad Lintang Lazuardi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haw, W. (2003). Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Jones. (2009). *Pengantar teori- teori sosial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Kana, N. L. (2001). "Management Strategy of Village Elite Political Competition in the District of Suruh: The Case of Election of Village Heads", *Renai Journal Year 1*, No. 2, April-May 2001, p. 5-25.
- Kartodirdjo, S. (1992). *Feast of democracy in the rural: case study of pilkades in Central Java and DIY*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Lauer, R. H. (2001). *Perspektif tentang perubahan sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lawang, R. M.Z. 1985. *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi. Modul 4-6*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Terbuka.

Li, Lianjiang & Kevin J. O'Brien. (2018). *The Struggle Over Village Elections*. Published in Merle Goldman and Roderick MacFarquhar, eds. *The Paradox of China's Post-Mao Reforms*. Cambridge: Harvard University Press, pp.129-44 (text) and pp. 382-89 (notes).

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014, tentang Pemilihan Kepala Desa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 tahun 2017 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa.

Wasistiono, Sadu. (1993). *Kepala Desa dan Dinamika Pemilihannya*. Bandung. Penerbit Mekar Rahayu.

# **Peran Pendidikan Politik terhadap Partisipasi Politik Pemilih Muda dalam Menumbuhkan Sikap Demokrasi terhadap Masyarakat**

**Ikke Widya Kusuma Sari, Sarlly Marlyana, Ardhana Januar Mahardhani**  
[kusumaikkewidya@gmail.com](mailto:kusumaikkewidya@gmail.com)

## **Abstrak**

Politik merupakan sesuatu yang sangat penting sebagai sarana untuk menggapai atau untuk mendapatkan kekuasaan. Kebijakan yang ada dalam suatu negara adalah produk politik yang digunakan dari sekelompok orang, dalam hal ini adalah pemerintah guna untuk mempengaruhi suatu tatanan kehidupan bagi masyarakat. Hal tersebut itu sangat jelas tidak mudah untuk memberi suatu pemahaman kepada masyarakat ataupun kepada kaum muda. Tujuan daripada sebuah penulisan ini adalah sebagai anak muda sebagaimana masyarakat yang memiliki pemahaman mengenai politik. Metode penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah study kepustakaan dan didukung dengan hasil penelitian yang relevan. Melalui sarana sosialisasi, ataupun pengarahan pendidikan politik yang diharapkan bisa meningkatkan partisipasi politik pada generasi muda atau sering disebut sebagai pemilih pemula, sehingga dalam konsep masyarakat yang demokratis dapat terlaksana dengan sangat baik dan tepat sesuai yang diharapkan.

**Kata kunci:** Pendidikan Politik; Partisipasi; Demokrasi

## **PENDAHULUAN**

Partisipasi politik dalam sebuah Negara demokrasi merupakan sesuatu yang sangat penting. Salah satu alasan yang fundamental berhubungan dengan hal tersebut adalah dikarenakan satu indicator, yaitu kualitas, baik buruknya demokrasi ditentukan dari tinggi atau rendahnya dan juga bagaimana partisipasi politik tersebut dijalankan. Partisipasi politik itu sendiri adalah sebuah kegiatan kelompok ataupun seseorang untuk bergabung secara aktif dalam kegiatan politik, misalkan antara lain dengan memilih pemimpin Kabupaten atau Kota baik langsung ataupun tidak langsung yang mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini menjalankan kegiatan berupa, memberi suara dalam sebuah pemilihan umum, menghadiri rapat umum, sampai mengadakan hubungan dengan para petinggi pemerintah. Namun, dengan berkembangnya demokrasi muncul kelompok yang juga ingin mempengaruhi proses pengambilan kebijakan. Salah satu dari kelompok partisipan ialah pemilih muda. Untuk batasan dari pemuda dimulai dari usia 16 tahun mengikuti penetapan umur anak muda yang telah ditetapkan dari Perserikatan Bangsa Bangsa, kemudian untuk batasan umur anak muda yaitu sampai usia 30 tahun berdasar pada UU No. 40 tahun 200 tentang

Kepemudaan pasal 1 tentang pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 tahun sampai 30 tahun. Pemilih muda ini menjadi sebuah kekuatan dalam pemilu, antusias dari kelompok ini sangat tinggi dan sebagian besar mayoritas dari mereka memberi suaranya disetiap kegiatan pemilu.

Pemilih muda sangat rawan untuk dimobilisasi oleh kelompok kepentingan lainnya seperti misalkan: Partai politik, organisasi masyarakat, dan juga tim sukses untuk mendapat banyak suara karena telah melihat karakter daripada pemilih muda lebih lebih senang dengan hal hal sederhana dan juga mudah untuk dimengerti, serta mayoritas dari mereka kurang suka untuk ikut serta dalam sebuah kampanye politik. Kelompok kepentingan itu sendiri adalah sebuah organisasi yang berusaha untuk agar dapat mempengaruhi kebijakan public dalam sebuah bidang penting bagi anggota lainnya. Pengaruh media sosial pada saat era globalisasi saat ini juga dapat bisa mempengaruhi kelompok ini.

Salah satu yang menjadi hal terpenting adalah pendidikan politik yang masih sangat rendah pada kalangan pemuda atau pemilih muda. Maka dapat dikatakan bahwa pendidikan politik itu sangat penting, selain itu fungsi daripada pendidikan politik adalah:

1. Meningkatkan kesadaran hak dan juga kewajiban bagi masyarakat, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Meningkatkan partisipasi politik dan juga inisiatif terutama dari masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Meningkatkan sebuah kemandirian, kedewasaan, dan juga membangun kesatuan bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan negara.

Berdasar pada Peraturan Pemerintah No. 83 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik pasal 10 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan politik adalah untuk memberi pedoman bagi generasi muda Indonesia untuk dapat meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu dengan adanya berlandas pada motivasi untuk dapat mempersiapkan masa depan bangsa dan juga negara guna untuk menjaga agar pemilu ataupun pilkada dapat berjalan dengan sangat baik, serta dapat menghasilkan output pemilu atau pilkada yang mempunyai legitimasi guna memimpin pemerintahan, maka alasan dan juga motivasi keikutsertaan bagi pemilih muda yang berhubungan dengan pendidikan politik itu sangat penting untuk diteliti, dengan hal tersebut sangat diharapkan dapat menghasilkan formulasi yang baik untuk bisa memaksimalkan peran dari pemilih muda pada saat pemilihan umum selanjutnya. Agar dapat melakukan sebuah identifikasi peran dari pendidikan politik itu sendiri, salah satu cara supaya dapat melakukannya adalah, dengan cara melakukan penelitian. Berdasar pada berdasar pada latar belakang tersebut penulis tertarik untuk bisa melakukan penelitian berdasar pada metode penelitian kepustakaan, terkait dengan sebuah pentingnya pendidikan politik terhadap partisipasi politik khususnya bagi anak muda.

Alasan penulis mencoba dan mengambil judul “Peran Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Muda dalam Menumbuhkan Sikap Demokrasi Terhadap Masyarakat”, guna untuk mengetahui peran agen pendidikan politik terhadap sebuah partisipasi pemilih muda. Kemudian selain itu, penelitian ini juga agar bisa dapat mengetahui motivasi dan juga bentuk pendidikan politik dalam sebuah partisipasi politik khususnya untuk pemilih muda.

Kemudian alasan lain mengapa bagi penulis, penelitian ini sangat penting dikarenakan kurangnya sebuah pengetahuan dari pada pemilih muda terhadap partisipasi politik dalam menyongsong Pilkada serentak 2020. Hal tersebut dapat dilihat dari sikap dan juga tingkat pengetahuan dari pemilih muda yang dapat bisa dikatakan masih sangat minim sekali. Hal tersebut diharapkan mampu memberikan pendidikan politik untuk para generasi muda atau pemilih muda dalam ikut serta berpartisipasi politik dalam Pilkada serentak 2020 yang akan datang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan, dimana peneliti sebuah objek penelitiannya adalah melalui artikel, buku, ataupun makalah dan penelitian sejenis yang relevan dengan pembahasan yang menjadi tujuan penelitian atau sumber yang bisa memberikan

sebuah informasi. Dalam sebuah analisis data dimulai dari menganalisa data atau informasi yang telah ada serta dari berbagai sumber tersebut.

Dari penelitian yang telah dijelaskan, penulis dapat bisa menyimpulkan bahwasanya sebuah pendidikan politik masih belum berjalan dengan semestinya atau belum baik pula, sesuai dengan fungsi pokok sebagaimana sosialisasi politik tersebut pada realitanya saat ini pemilih muda masih sangat bersikap acuh dan menganggap bahwa politik itu sudah menjadi sebuah kegiatan yang sangat biasa saja bahkan menganggap, meskipun mereka juga ikut berperan dan berpartisipasi namun tanpa mereka sadari, bahwa sebuah pendidikan politik juga lebih penting untuk mengetahui alasan mengapa mereka ikut berpartisipasi dalam setiap pemilihan umum. Dalam pembahasan kali ini penulis akan mengupas mengenai sebuah permasalahan yang saat ini menjadi sebuah hambatan didunia perpolitikan, terkait lemahnya partisipasi dari anak muda atau pemuda dimana mereka terkesan sangat acuh dan mengabaikan seperti tidak ingin tahu menahu masalah politik dan demokrasi. Dimana mereka berada di negara demokrasi, namun hanya beberapa dari mereka saja yang peduli dengan politik. Diharapkan dengan adanya sosialisasi, atau adanya pendidikan politik seperti diadakannya seminar, pertemuan ataupun rapat kecil yang membahas mengenai politik.

## **METODE**

Dalam penulisan ini penulis mengambil metode penelitian kepustakaan yaitu peninjauan kembali pustaka-pustaka yang berkaitan dengan penelitian (Alviyan, 2020). Menurut Mirzaqon & Purwoko (2017), mengemukakan beberapa definisi penelitian kepustakaan dari beberapa ahli, yaitu penelitian kepustakaan merupakan suatu study yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan, seperti dokumen, buku, majalah ataupun kisah-kisah sejarah. Definisi lain adalah penelitian kepustakaan merupakan studi yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapat landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti.

Sementara Khatibah (2011), mengemukakan penelitian kepustakaan sebagai kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode tertentu untuk mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi melalui penelitian kepustakaan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pendidikan Politik**

Istilah pendidikan politik secara bahasa Inggris yakni *Political socialization*. Jika dilihat dari berbagai literature bahwa pendidikan politik termasuk dari bagian proses sosialisasi politik. Meskipun berbeda dalam penulisan, baik antara sosialisasi politik atau pendidikan politik yang dipergunakan bersama.

Menurut Rusadi Kantaprawira bahwa pendidikan politik itu guna sebagai peningkatan pengetahuan masyarakat agar mereka juga dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sebuah sistem politiknya. Sesuai dengan paham kedaulan rakyat atau demokrasi rakyat harus dapat mampu menjalankan tugas partisipasi. Sedangkan menurut Surono sebagaimana telah dikutip Ramdhan Naning (1982:9). Politik adalah usaha untuk masyarakat politik, dalam arti untuk dapat mencerdaskan kehidupan politik rakyat, untuk meningkatkan kesadaran warga kepada kepekaan dan kesadaran hak kewajiban serta tanggungjawab terhadap bangsa dan negara.

Surbakti (1999:17) berpendapat bahwa sosialisasi politik terbagi menjadi 2 yaitu diantaranya pendidikan politik juga dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan proses dialog di antara pemberi dan juga penerima pesan. Melalui proses ini lah para anggota masyarakat mengenal dan juga mempelajari nilai, norma, dan symbol, politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti misalnya sekolah, pemerintah, serta partai politik.

Menurut Alfian (Ahdiyana, 2009) adalah bentuk usaha sadar untuk mengubah sebuah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka paham dan dapat menghayati nilai yang terkandung dalam sistem politik ideal yang akan

dibangun. Safrudin sebagaimana telah dikutip (Ahdiyana, 2009), menyatakan bahwasanya pendidikan politik adalah sebuah aktivitas yang memiliki tujuan untuk dapat membentuk dan menumbuhkan orientasi politik kepada setiap individu yang mempunyai keyakinan terhadap konsep yang mempunyai muatan politik, loyalitas dan juga perasaan politik, serta pengetahuan dan wawasan politik yang membuat seseorang memiliki kesadaran terhadap persoalan politik dan sikap politik. Disamping tersebut, juga bertujuan untuk agar setiap individu mampu memberi partisipasi politik yang aktif di masyarakat.

Pendidikan politik adalah sebuah proses dialog antara seorang pendidik, misalkan seperti sekolah, pemerintahan, dan juga partai politik hingga sampai kepada peserta didik dengan tujuan untuk pemahaman, pengamatan hingga sampai pada penghayatan norma, nilai, sampai pada symbol politik yang dianggap baik. Contoh misal melalui sebuah kegiatan masyarakat misalnya seperti mengadakan forum pertemuan, partai politik dalam sistem politik demokrasi bisa melakukan fungsi pendidikan politik. Adapun juga melalui media sosial, juga dapat dijadikan sarana untuk memberikan sebuah pendidikan politik kepada masyarakat, dengan kata lain media sosial tersebut harus sangat terbuka dan juga kritis. Melalui dari kritik mereka tersebut, maka masyarakat dapat memahami hal penting yang diambil oleh pemerintah. Adapun untuk tujuan secara mendasar ialah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga pendidikan apapun itu jenisnya, tidak terlepas dari misi tersebut.

Pendidikan politik merupakan sebuah usaha sadar yang dilakukan secara terus menerus dalam sebuah masyarakat yang menjadikan mereka dapat mampu memahami dan juga menghayati sebuah nilai-nilai yang telah terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal sehingga mampu membentuk sebuah kepribadian, kesadaran dan partisipasi politik secara positif. Misalkan yang sudah dijelaskan bahwasanya pendidikan politik bisa juga dipandang sebagai sebuah proses komunikasi, yaitu penyampaian pesan politik terhadap masyarakat ataupun massa yang digunakan untuk menambahkan pengetahuan atau guna merubah sikap-sikap politik tertentu.

Bentuk dan proses sosialisasi pendidikan politik menurut Kavang (1998), terbagi atas 2 jenis yaitu dibawah ini:

1. Bentuk dan proses yang berisifat laten atau tersembunyi dimana kegiatannya berlangsung dalam lembaga sosial dan keagamaan, lingkungan kerja atau sekolah/kampus.
2. Bentuk dan proses bersifat terbuka dimana aktivitas berlangsung dalam lembaga politis tertentu termasuk juga pemilu dan perangkatnya.

Tujuan daripada pendidikan politik adalah memberi pedoman kepada generasi muda Indonesia guna untuk meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara, sedangkan untuk tujuan dari pendidikan politik lainnya adalah untuk menciptakan generasi muda bangsa Indonesia yang sadar kehidupan berbangsa dan bernegara berdasar pada Pancasila dan UUD 1945 sebagai salah satu usaha untuk menciptakan manusia Indonesia yang sesungguhnya.

Media dalam pendidikan politik sebagai *message delivery system*, karena diyakini bahwa media bisa meningkatkan magnet proses komunikasi dalam pendidikan politik tersebut. Namun, penggunaan media dalam konteks bagi pemilih pemula, meski diselaraskan pada pola dan juga karakteristik penggunaan media pemilih pemula. Kecenderungan terhadap pemakaian media menjadi alternative untuk melihat pemakaian media guna berpendidikan politik.

Sebagai pendidikan politik merupakan sebuah bentuk komunikasi politik, bisa terjadi dimana saja, seperti partai politik, baik dilingkungan desa ataupun sekolah dan perguruan tinggi. Para pemilih pemula terbuka dalam menerima pendidikan politik sebagai bentuk dan juga proses komunikasi politik. Posisinya untuk seorang pelajar ataupun mahasiswa serta sebagai pemuda, kita mendapatkan pendidikan politik di sekolah, perguruan tinggi dan organisasi sosial serta kesiswaan dan juga kemahasiswaan. Para pemilih muda tergal oleh sebuah proses sebagai berikut:

- 1) Pemahaman terkait dinamika situasi politik saat ini

Para pemilih pemula sebagai subjek penelitian sangat diragukan jika pendidikan politik yang ada tersebut membuat mereka mampu memahami dinamika situasi politik yang saat ini berkembang. Tentang apa yang telah

mereka terima dari mata pelajaran di sekolah ataupun mata kuliah yang berhubungan dengan persoalan politik tersebut. Namun, dalam proses pendidikan yang diterima tersebut masih jauh dari relevansi kondisi politik yang terjadi terkhusus tentang pemilihan umum, partai politik, elit politik sebagai actor politik serta fenomena politik sebagai transaksional.

2) Peningkatan pengetahuan tentang hak dan sistem politik

Pendidikan politik yang juga berhasil dan bermanfaat mampu memberikan peningkatan pengetahuan terkait kesadaran akan hak politik dan hak kewarganegaraan dalam sistem politik untuk keseluruhan. Misalkan untuk pemilih pemula, apabila kesadaran hak politik ini ada pada mereka, jika menurutnya tidak berasal dari proses pendidikan politik yang ada serta dilakukan oleh lembaga politik, dan pendidikan seperti dari sekolah atau perguruan tinggi serta partai politik. Lembaga negara misalkan KPU (Komisi Pemilihan Umum), Departement Komunikasi dan Informatika, atau yang lain tidak melakukannya dengan tujuan memberi peningkatan tentang kesadaran politik namun sekedar untuk formalitas serta tujuan normative saja.

3) Sikap kritis dan Keterampilan Politik

Sikap kritis dan keterampilan politik adalah merupakan bagian yang penting dari tujuan adanya sebuah pendidikan untuk pemilih pemula. Makna dari pendidikan politik yang ada serta yang bisa dirasakan oleh pemilih pemula, terhadap pendidikan politik yang telah diterimanya serta memberi sebuah kemampuan bersikap kritis dan juga memberi keterampilan politik. Kritis dalam politik sangat diperlukan ketika kekuasaan disalahgunakan jadi mereka tergerak untuk dapat melakukan sebuah aksi dukungan dan tuntutan yang tepat serta bermanfaat. Sedangkan untuk keterampilan politik mempunyai pengertian yang sangat luas misalkan menegosiasi, *lobbying*, demonstrasi, dan juga kampanye. Mereka mempunyai pemahaman dan keterampilan dalam berargumen berdasar pada aturan yang telah ada. Pada kenyataannya para pemilih pemula dalam hal ini meragukan dan merasa tidak memiliki sikap kritis tentang keterampilan politik lewat pendidikan normative dan formal. Sejauh yang telah mereka rasakan yang disebut sebagai

kemampuan sikap kritis terhadap politik yang dirangkai untuk mengkritisi kebijakan politik yang tidak berpihak kepada rakyat. Pemilihan umum itu pun sebagai puncak pendidikan politik rakyat yang justru menjadi sebuah moment bagi terjadinya *politics transactional*.

#### 4) Sumber Informasi Politik

Sebuah informasi yang memadai juga akan berdampak pada bangkitnya sebuah pengetahuan yang akan mendorong pada hadirnya sebuah tindakan. Dalam hal tersebut, identifikasi terhadap sumber informasi politik memberi sebuah gambaran tentang bagaimana pemilih pemula memperoleh dan menggunakan informasi sebagai bahan untuk mengambil keputusan untuk melakukan tindakan politik. Di era perkembangan teknologi informasi saat ini dan komunikasi yang pesat, akses untuk media pendidikan politik sangat gampang dilakukan oleh pemilih pemula. Jarang terjadi, individu dalam masyarakat apalagi untuk generasi pemilih pemula yang hanya sering bergantung pada satu sumber media informasi politik saja. Dari berbagai media yang ada, apakah media lama maupun baru yang saling bersaing dan juga dimanfaatkan untuk kegiatan penyaluran informasi dan kegiatan politik. Media tersebut adalah cerminan dari kekuatan sebuah politik.

#### **Partisipasi politik**

Secara etimologi partisipasi berasal dari kata latin "*pars*" dan "*capere*". Berarti mengambil, ikut serta mengambil bagian. Serta menurut Herbert Mc Closky, sebagaimana disebutkan Budiardjo (2008:367), bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan sukarela dari masyarakat dengan cara mereka mengambil bagian dari sebuah proses pemilihan secara langsung maupun tidak langsung, dalam pembentukan kebijakan umum.

Menurut Budiardjo sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa sebuah partisipasi politik dapat dikatakan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau kelompok untuk ikut serta untuk secara aktif dalam kehidupan politik. Secara literature mengenai pendidikan politik ialah sebuah kegiatan legal masyarakat yang secara langsung atau tidak diajukan guna untuk mempengaruhi pilihan petinggi pemerintahan. (Purwanto, 2010).

Sifat partisipasi politik merupakan sebagaimana telah disebutkan oleh Budiardjo (2008:370), bahwasanya partisipasi politik adalah juga dapat bersifat otonomi dan mobilisasi. Untuk partisipasi politik yang bersifat otonomi sendiri adalah telah didasarkan pada kesadaran politik didasarkan tiap masyarakat untuk menentukan sebuah pilihan. Kemudian, partisipasi politik yang bersifat mobilisasi adalah sebuah partai politik yang dikerahkan oleh pihak lain. Dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik dapat dilakukan berdasar pada kesadaran politik dari setiap masyarakat tanpa adanya sebuah paksaan dari pihak manapun.

Adapun bentuk dari sebuah partisipasi politik menurut Mas'ood dan Adrews (1981), partisipasi politik ternagi menjadi 2 bentuk, yakni secara konvensional dan non konvensional. Hal tersebut adalah :

1. Partisipasi politik secara konvensional adalah sebuah bentuk pemberian suara, bentuk diskusi mengenai politik, bentuk kegiatan kampanye, serta membentuk dan bergabung dalam suatu kelompok kepentingan komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrasi.
2. Partisipasi politik non konvensional adalah sebuah pengajuan petisi dari demonstrasi konfrontasi mogok, sebuah tindakan politik kepada harta benda, tindakan kekerasan politik, kepada manusia seperti misalkan penculikan, perang gerilya dan revolusi sampai dengan pembunuhan.

Faktor yang mempengaruhi partisipasi politik, menurut Milbrath sebagaimana telah dikutip Maran (2001:156-157) menyebutkan 4 faktor utama yang mendorong orang untuk bisa berpartisipasi dalam kehidupan politik :

- 1). Adanya perangsang, jika orang ingin berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam hal tersebut minat untuk berpartisipasi dipengaruhi oleh contoh sering mengikuti diskusi politik melalui diskusi informal.
- 2). Faktor karakteristik pribadi seseorang, orang yang berwatak sosial, serta juga memiliki kepedulian yang besar terhadap masalah sosial, politik ekonomi dan yang lainnya serta mau terlibat dalam aktivitas politik.
- 3). Faktor karakteristik sosial seseorang, karakter sosial juga menyangkut status sosial ekonomi, kelompok ras, etnis dan agama seseorang.

4). Faktor situasi situasi dan lingkungan politik, lingkungan politik yang kondusif membuat orang dengan senang hati serta berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam lingkungan politik yang demokratis, seseorang tersebut merasa lebih bebas serta nyaman untuk terlibat dalam aktivitas politik daripada dalam lingkungan politik yang totaliter. Namun peningkatan jumlah pemberi suara secara dramatis di negara bagian selatan Amerika akhir-akhir ini akibat dari sebuah adanya registrasi yang rapid dan aktivitas pemberian suara pada kalangan golongan rakyat berpenghasilan rendah yang secara tradisional adalah apatis. Berdasarkan hal tersebut maka, bisa disimpulkan menurut mereka faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi politik adalah contoh: Tingkat pendidikan, jenis kelamin, status sosial ekonomi, peran partai politik, aktivitas seperti kampanye, dan juga calon tokoh partai politik yang mempunyai daya tarik pribadi.

### **Pemilih Muda**

Menurut Kurniadi (Kharisma, 2015) generasi muda jika secara umum bisa dipandang sebuah fase dalam siklus pembentukan kepribadian manusia, sebagaimana dalam suatu fase generasi muda yang mempunyai pengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Menurut UU No. 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Bab IV pasal 9 ayat 1 dan 2 serta pasal 20 menyebutkan bahwa pemilih muda atau pemula adalah warga Neagara Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara adalah warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun atau lebih atau sudah pernah kawin yang memiliki hak pilih, dan sebelumnya belum termasuk pemilih karena ketentuan Undang-Undang Pemilu. Kemudian menurut Kurniadi (1991:103) generasi muda secara umum bisa dipandang sebagai suatu fase dalam siklus pembentukan kepribadian manusia, sebagaimana dalam fase lain, maka fase generasi muda ini memiliki cirri sendiri yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan sekitar.

Pendidikan politik adalah faktor yang penting dalam sebuah proses peningkatan partisipasi dari pemilih muda pada saat Pemilu maupun Pilkada. Adanya pendidikan politik bisa meningkatkan sebuah pengetahuan tentang

bagaimana dinamika politik yang sedang berkembang. Agar dapat berjalan sesuai dengan keinginan, maka pendidikan politik perlu dilakukan dengan cara dan juga metode baru serta adanya materi dan kurikulum baru yang disesuaikan dengan karakter, minat dan tingkat pengalaman dan pemahaman mereka terkait dengan politik, serta kebutuhan dan juga kepentingan.

Dalam hal ini penulis akan menyajikan sebuah beberapa data atau hasil penelitian tentang peran pendidikan politik bagi partisipasi kepada pemilih muda atau pemula, sebagaimana partisipasi pendidikan politik kepada anak muda pada pemilu legislatif 2014 di Kota Manado. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan dari penelitian ini ialah untuk dapat mengetahui peran pendidikan politik untuk mempengaruhi partisipasi yang dilakukan pemilih muda yang ada di Kota Manado terkhusus saat diadakannya Pileg tahun 2014 yang lalu. Untuk bisa melihat hal tersebut maka dapat dilihat dari beberapa indikator seperti berikut.

Jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum legislatif di Kota Manado terdapat pada 11 Kecamatan dan juga 87 Kelurahan serta 950 TPS, dengan jumlah laki-laki 170.656 orang, serta jumlah perempuan 173.905. Angka tersebut telah termasuk jumlah pemilih muda didalamnya pada pemilu legislatif 2014. Jumlah pemilih muda didalamnya. Jumlah pemilih muda yang dikategorikan dengan usia 17 tahun sampai dengan 29 tahun ialah 122.980 orang atau 29,05 % dan jumlah keseluruhan usia tersebut. Terdiri dari laki-laki sebanyak 62.941 orang atau 29,6 % serta jumlah perempuan 60.009 orang atau 28,49 %. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk jumlah pemilih muda sangat besar dan bisa menentukan kemenangan partai politik ataupun kandidat tertentu yang berkompetisi dalam sebuah pemilihan umum.

Dalam konstitusi negara Republik Indonesia ada beberapa ketentuan yang menjadi landasan yuridis pengakuan negara untuk melaksanakan partisipasi politik warganegara. Dalam UUD194 dengan hasil amandemen jaminan terhadap pelaksanaan partisipasi politik warganegara termuat pasal 22 E tentang pelaksanaan Pemilu, pasal tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul dan juga mengeluarkan pendapat pasal 28 D tentang kesempatan yang sama bagi warga negara dalam pemerintahan dan juga pasal lainnya.

Akan tetapi untuk saat ini terdapat permasalahan yang terjadi pada era reformasi keikutsertaan warganegara dalam politik menampakkan gejala yang dapat diartikan sebagai penurunan kualitas dan juga kuantitas partisipasi politik dalam pelaksanaan pemilu contohnya. Berdasar pada survey dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada akhir November 2013 menunjukkan bahwa minat politik bagi anak muda khususnya sangat rendah. LIPI menjelaskan 60 persen responden survey yang dilakukan lembaga tersebut yang ada di 31 provinsi dan 1.799 orang responden menyatakan kurang tertarik dan tidak tertarik sama sekali dengan politik, hanya kurang lebih 37% responden survey itu yang menyatakan tertarik atau sangat tertarik terhadap masalah politik atau pemerintahan.

Ada paparan beberapa agen terhadap pelaksanaan pendidikan politik generasi muda, di antaranya adalah :

- a. Keluarga. Menurut Maran (2001:135), tentang agen sosialisasi politik, keluarga merupakan salah satu agen pendidikan politik yang juga sangat penting. Keluarga dapat dikatakan sebagai sumber informasi politik. Didalam keluarga sering terjadi diskusi yang dapat membantu meningkatkan pendidikan politik yang khususnya untuk generasi muda.
- b. Lingkungan tempat beraktifitas. Selain dengan keluarga, lingkungan juga memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap informasi bagi pemilih. Kategori pemilih muda sangat bervariasi. Variasi umum yang ditemukan aktifitas mereka selain di sekolah, kampus juga ada yang sudah bekerja. Lingkungan tersebut ternyata juga membawa dampak yang signifikan.
- c. Lingkungan pergaulan. Lingkungan pergaulan ini juga merupakan agen pendidikan politik yang penting.
- d. Media massa. Masyarakat modern tidak dapat hidup tanpa adanya komunikasi yang cepat, luas dan secara umum menyeragamkan, informasi tentang peristiwa yang terjadi dimana saja yang ada didunia segera menjadi pengetahuan umum bagi mereka secara cepat. Disamping media massa sebagai memberikan informasi mengenai pendidikan politik, media massa juga dapat menyampaikan langsung atau tidak, nilai utama yang dianut massa adalah yang

digambarkan sebagai symbol itu menjadi warna yang yang tersendiri, karena sistem media massa yang terkendali tersebut merupakan sarana kuat dalam membentuk keyakinan politik.

Pendidikan politik adalah faktor yang sangat penting dalam meningkatkan partisipasi politik bagi anak muda atau pemula. Dengan adanya pendidikan politik maka mereka dapat mengetahui dan dapat meningkatkan pengetahuan mengenai dinamika politik yang sedang berkembang. Partisipasi politik di Kota Manado, sesuai dengan temuan hasil penelitian bisa dikatakan bahwa masih dipengaruhi oleh kebiasaan, ataupun dengan sekedar ikut-ikutan saja. Tentu hal ini sangat memperhatikan, mengingat dengan pemilih muda inilah yang sebagai generasi penerus calon pemimpin.

Maka dari itu pendidikan politik sangat baik, khususnya bagi pemilih muda yang masih sangat penting untuk diingatkan. Setiap individu atau kelompok selalu berusaha untuk menyesuaikan pendapatnya dengan yang lainnya. Jadi kelompok tersebut dalam pergaulan dapat mensosialisasikan anggota-anggota dengan cara mendorong mereka untuk menyesuaikan diri terhadap sikap dan perilaku yang dianut oleh kelompok itu.

## **SIMPULAN**

Pendidikan politik adalah suatu upaya yang dilakukan antara pemerintah dan para anggota masyarakat secara terencana, sistematis, dan juga dialogis dalam rangka guna mempelajari berbagai konsep politik dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Pendidikan politik memiliki tujuan untuk mengubah tata perilaku seseorang agar sesuai dengan tujuan politik yang dapat menjadikan setiap individu sebagai partisipan politik yang bertanggungjawab. Pendidikan politik belum terlalu berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi sebagai sosialisasi politik. Pada kebanyakan bahwa pemilih muda atau pemula masih bersikap acuh tak acuh walau mereka tetap ikut dalam proses partisipasi dalam pemilihan legislatif atau eksekutif. Pendidikan politik hanya menjadikan para pemilih muda hanya sekedar ikut-ikutan yang kelemahannya adalah mudah dimobilisasi oleh kelompok tertentu.

## REFERENSI

- Almond, G. & Verba, S. (1984). *Budaya politik (tingkah laku dan demokrasi di lima negara)*. Jakarta: Bina Aksara
- Alfian. (1990). *Masalah dan prospek pembangunan politik di Indonesia: Kumpulan Karangan*. Jakarta: PT. Gramedia
- Alviyan, A., Mahardhani, A. J., & Utami, P. S. (2020). *Peran kelompok teman sebaya dalam upaya pembentukan moral siswa di Kabupaten Ponorogo*. *Civic-Culture : Jurnal Ilmu Pendidikan PKN Dan Sosial Budaya*, 4(2 Extra), 40-50. <https://doi.org/10.31597/ccj.v4i2 Extra.439>
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Kavang, D. 1998. *Political culture*. Bandung: Armico.
- Khatibah, K. 2011. *Penelitian kepustakaan*. *Iqra': Jurnal Perpustakaan dan Informasi*, 5(01), 36-39
- Kharisma, D. (2015). Peran pendidikan politik terhadap partisipasi politik pemilih muda. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 1(7).
- Mas'ood Mochtar & Andrew, C. M. (1991). *Perbandingan sistem politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Maran, R. R. (2001). *Pengantar sosiologi politik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Mirzaqon, T, A & Purwoko, B. (2017). Studi kepustakaan mengenai landasan teori dan praktik konseling expressive writing. *Jurnal BK Unesa*, 8(1).
- Purwanto, T. & Sunardi, B. (2010). *Membangun wawasan kewarganegaraan*. Jakarta: Yudistira.
- Rudini & Hidayah. (1989). *Sistem politik kehidupan generasi muda*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2009 Tentang Kepemudaan.
- Peraturan Pemerintah No. 83 tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

# Upaya Meningkatkan Karakter Disiplin Peserta Didik pada Pembelajaran Daring di Masa Pandemi Covid-19

Maria Alifah, Muhammad Mona Adha, Dayu Rika Perdana, Ahman Tosy  
Hartino, Ahmad Rifai  
[alifahmaria@gmail.com](mailto:alifahmaria@gmail.com)

## Abstrak

Pada masa pandemik Covid-19 ini sekolah melaksanakan pembelajaran daring. Selama pembelajaran daring yang sudah dilakukan, ternyata di lapangan ditemukan beberapa kasus dari peserta didik yang tidak menunjukkan karakter disiplin seperti terlambat bergabung di *Google Meet* dan terlambat mengumpulkan tugas, serta hanya bergabung kelas *online* tetapi tidak memantau/mengikuti dengan seksama selama pembelajaran daring. Sehingga, dalam penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan karakter peserta didik pada pembelajaran daring di masa pandemik Covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Berdasarkan observasi, hasil wawancara, dan data penunjang lainnya yang digunakan pada bahan analisis, maka dalam penelitian ini ditemukan bahwa dengan memberikan *rewards & punishments* kepada peserta didik dapat meningkatkan karakter disiplin mereka dan bertanggung jawab di dalam mengikuti pembelajaran daring.

**Kata Kunci:** Karakter; Disiplin; Pembelajaran Daring; Pandemi Covid-19; Peserta Didik.

## PENDAHULUAN

Menurut Tristiana, dkk. (2012) pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran yang kompleks di mana didalamnya terdapat pembelajaran tentang tingkah laku, norma, sampai pendidikan mengenai ilmu pengetahuan. Pendidikan bertujuan untuk melatih serta mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh individu agar berguna baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Selain itu pendidikan juga bertujuan untuk membentuk watak kepribadian yang positif dalam diri individu. Artinya bahwa pendidikan bukan sekedar memberikan satu arah tujuan melainkan banyak tujuan yang ingin dicapai melalui pendidikan, baik secara pengetahuannya, sikapnya, dan keterampilannya. Maka di atas disebutkan, bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik, agar peserta didik dapat terasah dan mampu memiliki keunikan dalam dirinya tersebut. Proses pendidikan dan pembelajaran di dalam kelas saat ini tidak terlepas dari perkembangan informasi dan teknologi (Adha, 2015). Teknologi sangatlah vital keberadaannya untuk membantu dalam dunia pendidikan kita saat ini, era digital perlu dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk pendidikan.

Senada dengan hal yang telah dijelaskan, Lestari, dkk (2013) menjelaskan bahwa pendidikan mengacu pada berbagai macam aktivitas, mulai dari yang sifatnya produktif-material sampai kreatif-spiritual, mulai dari proses peningkatan kemampuan teknis (*skill*) sampai pada pembentukan kepribadian yang kokoh dan integral. Aktivitas yang mengarah kepada sebuah perubahan dari peserta didik itu sendiri, sebagai wujud bahwa adanya perubahan setelah melakukan pendidikan atau dalam proses pembelajaran yang sudah atau sedang berlangsung, sehingga hasil diakhir berupa kemampuan untuk bersikap sesuai aturan yang berlaku.

Lebih lanjut, Saputro, dkk. (2013) menyebutkan bahwa pendidikan bagi manusia tidak mengenal batas umur, jenis kelamin ras dan agama. Selama manusia masih mempunyai keinginan untuk melanjutkan pendidikan maka tidak ada sebuah permasalahan yang terjadi. Pendidikan tidak mengenal batas-batas pendidikan informal, formal, maupun nonformal dari semua aspek berlangsung sepanjang manusia hidup. Pengaruh dari pendidikan (informal, formal, nonformal) selalu saja membentuk sikap dan perilaku seseorang atau suatu keluarga. Sementara dari pendidika itu sendiri akan membentuk kepribadian manusia yang lebih baim tanpa memandang usia dan lain sebagainya.

Pendidikan merupakan sesuatu yang penting bagi pembentukan karakter sebuah peradaban dan kemajuan yang mengiringinya. Tanpa pendidikan, sebuah bangsa atau masyarakat akan sulit mendapatkan kemajuannya sehingga menjadi bangsa atau masyarakat yang kurang beradab (Adha & Yanzi, 2013). Betapa pentingnya sebuah pendidikan didalam suatu bangsa, demi kemajuan bangsa dan mensejahterakan masyarakat yang ada di dalamnya, karena dengan pendidikan sumber daya manusia akan menjadi lebih baik dan mampu berkembang maju.

Menurut Pratiwi (2013) dengan adanya pendidikan yang memadai dalam suatu bangsa maka kualitas sumber daya manusianya pun akan baik, karena itulah pendidikan sanga tpenting dalam kehidupan agar seseorang dapat mencapai tujuan hidup yang dimilikinya. Sebab bangsa yang akan maju, bisa dilihat dari pendidikan yang ada di dalamnya, pendidikan dengan sistem dan kurikulum yag baik maka akan menjadi pemenang untuk meningkatkan sumber daya manusia.

Senada dengan hal yang telah dijelaskan, menurut Zulyan, dkk. (2014) pendidikan memegang peranan penting yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Manusia dalam kehidupan, setiap harinya selalu belajar sehingga pendidikan tidak bisa dipisahkan karena saling terhubung antara pendidikan dan kehidupan, kehidupan akan berjalan dengan baik ketika kita mengetahui hakikat kehidupan itu sendiri.

Pendidikan dikondisi pandemik Covid-19 tentu membawa sebuah sistem yang berbeda ketika dengan kondisi tatap muka. Banyak yang perlu dibahas mengenai pendidikan dimasa seperti ini, mulai dari kebijakan pembelajaran dari rumah atau daring atau jarak jauh sampai kepada permasalahan peserta didik yang ada di berbagai daerah yang belum tentu kondisinya sama dengan daerah lainnya. Sehingga ini juga membuat suatu titik perhatian, bahwa peserta didik harus kita perhatikan dalam keadaan seperti ini, ada beberapa sekolah yang meminjamkan alat sekolah untuk peserta didik, ada pendidik yang mendatangi peserta didik, semua dilakukan agar pendidikan kita tetap jalan dimasa seperti ini.

Pelaksanaan Kurikulum 2013 dalam dunia pendidikan di Indonesia merupakan ciri terdapat sesuatu yang kurang dalam pendidikan di Indonesia. Kekurangan yang ada perlu diperbaiki oleh elemen pendidikan demi terciptanya kurikulum yang sesuai dengan harapan masyarakat secara luas. Pendidikan karakter merupakan salah satu topik utama yang sangat ditekankan dalam keberhasilan proses pembelajaran di sekolah saat ini (Santoso & Adha: 2019). Artinya bahwa karakter itu penting adanya dalam setiap proses baik pada pendidikan atau yang lainnya.

Pendapat yang telah dijelaskan menegaskan pentingnya pendidikan karakter di dalam proses pembelajaran. Ada beberapa sumber lain yang juga mendukung pendapat di atas yaitu Afandi (2011) menjelaskan bahwa perkembangan karakter teoritis atau empiris atau pendidikan karakter bagi anggota masyarakat bisa dimulai sejak masa kanak-kanak hingga dewasa agar mereka bisa menjadi bagian dari masyarakat yang berpartisipasi aktif melakukan hal baik di lingkungannya.

Menurut Kementerian Pendidikan Nasional (2011) pendidikan karakter bertujuan untuk mengembangkan nilai-nilai yang membentuk karakter bangsa, yaitu Pancasila, meliputi (1) Menumbuhkan potensi siswa untuk berkembang menjadi orang yang memiliki hati, pikiran, dan perilaku yang baik. (2) Membangun negara bercirikan Pancasila. (3) Kembangkan warga negara untuk mengekspresikan rasa percaya diri, bangga dengan negara dan dan mencintai potensi umat manusia.

Sementara itu kita tahu bahwa pelaksanaan pendidikan karakter tidak cukup dilakukan dengan mengajarkan sesuatu yang benar dan salah tetapi juga membentuk kebiasaan berdasarkan contoh-contoh langsung pada peserta didik agar timbul rasa kepedulian, kesadaran, dan pemahaman yang tinggi dalam penerapan di kehidupan sehari-hari (Mulyasa, 2013; Adha, dkk., 2019a; Adha, dkk., 2019b). Praktik langsung dalam kehidupan sehari-hari menjadi kunci dari pendidikan karakter yang akan diajarkan, dari praktek langsung peserta didik akan terangsang baik secara langsung maupun tidak langsung, merasakan apa yang dirasakan dengan orang lain ketika praktiknya kita mengkasihani orang lain.

Menambahkan poin yang dikemukakan oleh Mulyasa (2013), Megawangi (dalam Kesuma, 2018) menjelaskan pentingnya pendidikan karakter yaitu pendidikan yang bertujuan untuk mendidik peserta didik agar dapat mengambil keputusan dan praktik yang tepat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga memberikan kontribusi positif bagi lingkungannya.

Menurut Krisantia, dkk. (2013) lembaga pendidikan tidak hanya berpengaruh pada perkembangan kognitif atau intelektual semata, melainkan berpengaruh pula pada perkembangan kepribadian anak, di mana ia akan bersosialisasi dengan sesama teman, guru, dan lingkungan di dalam lembaga pendidikan yang bersangkutan. Perkembangan anak, bisa dilihat dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan pendidikan. Ketiga elemen tersebut sangat penting demi membentuk kepribadian sang anak.

Peserta didik yang berada pada usia remaja merupakan generasi penerus sebuah bangsa, kader bangsa, kader masyarakat, dan kader keluarga (Aprian, dkk.: 2014). Genrasi yang perlu dijaga dan dirawat dengan pendidikan yang bermutu,

demi tercapainya cita-cita bangsa. Mereka selalu diidentikan dengan perubahan dan berperan dalam membangun bangsa. Membangun dengan bekal pendidikan yang mumpuni, sehingga banyak ilmu yang akan dibawa ke arah perubahan. Perubahan yang memang sesuai hakikatnya.

Menurut Saputra, dkk. (2014) mendefinisikan karakter disiplin dalam belajar merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap peserta didik agar dapat tercapai tujuan belajar di sekolah. Disiplin menjadi sebuah simbol dalam dunia pendidikan, karena sekolah bukan hanya menuntut ilmu semata melainkan sikap yang utama. Oleh karena itu, melalui pendidikan karakter diharapkan peserta didik mampu secara mandiri meningkatkan dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji dan menginternalisasi serta mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak mulia sehingga terwujud dalam perilaku sehari-hari (Adha: 2012). Dari pendidikan karakter itulah nantinya akan memunculkan karakter disiplin peserta didik. Akan tetapi pada situasi seperti saat ini, pembelajaran daring dalam aplikasinya terjadi beberapa hal yang menjadi catatan guru dan elemen lainnya.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hakim, dkk. (2020) menunjukkan bahwa karakter disiplin tetap bisa dibentuk meskipun pembelajaran dilaksanakan secara daring yaitu dengan menerapkan metode pemberian nasehat dan motivasi kepada peserta didik. Hakim, dkk. (2020) meyakini bahwa pendidikan karakter menumbuhkan rutinitas yang berhubungan dengan hal baik sehingga peserta didik memahami dan menggunakan hal baik tersebut dalam kehidupannya sehari-hari.

Mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hakim, dkk. (2020), Santika (2020) menjelaskan bahwa pendidikan karakter dapat diterapkan pada pembelajaran daring dengan menggunakan pendekatan pembelajaran konstruktivistik. Peserta didik secara aktif mengembangkan karakter yang dimiliki disesuaikan dengan kompetensi dasar yang diajarkan dan bagaimana aktualisasinya terutama jika ada kaitan dalam menghadapi Covid-19. Santik (2020) menerapkan strategi implementasi pendidikan karakter melalui *multiple intelligences* berbasis portofolio dengan diintegrasikan pada mata pelajaran. Hal itu

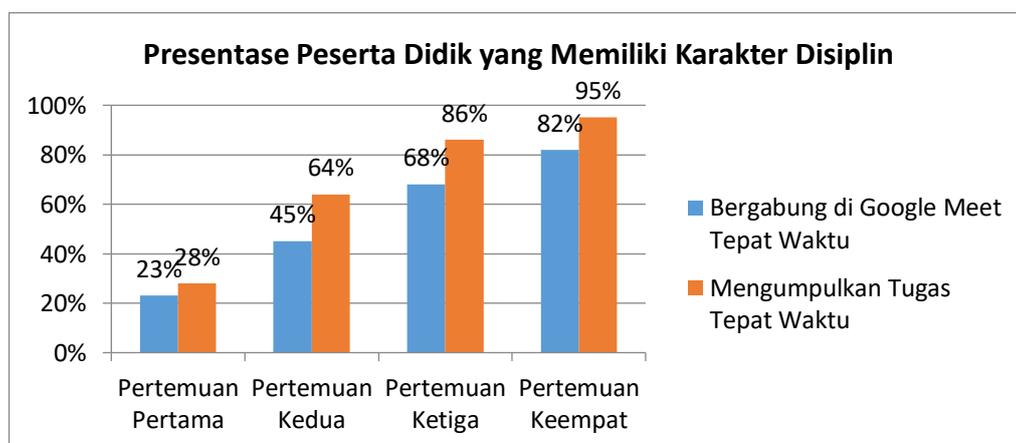
merupakan suatu upaya dalam proses pembelajaran untuk dapat mengembangkan karakter peserta didik.

## METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian fenomenologi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Menurut Watt & Berg (1995) peneliti dalam studi fenomenologi tidak tertarik mengkaji aspek-aspek kausalitas dalam suatu peristiwa, tetapi berupaya untuk menggeledah tentang bagaimana orang melakukan suatu pengalaman beserta makna pengalaman itu bagi dirinya. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif yang datanya diambil dari hasil observasi dan dokumentasi yang dilakukan. Teknik analisis data menggunakan model *Analysis Interactive Model* yang terdiri dari empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah diberikan perlakuan berupa *rewards & punishments* yaitu penambahan nilai bagi peserta didik yang disiplin dan pengurangan nilai bagi peserta didik yang tidak disiplin, ditemukan peningkatan jumlah peserta didik yang menunjukkan karakter disiplin. Hal itu dibuktikan pada grafik di bawah ini.



Gambar 1. Presentase Peserta Didik yang Memiliki Karakter Disiplin  
(Maria Alifah, 2020)

Berdasarkan Gambar 1.1. Presentase Peserta Didik yang Memiliki Karakter Disiplin di atas, terlihat bahwa hanya ada 22% atau 5 peserta didik yang bergabung di Google Meet tepat waktu, dan ada 28% atau 6 peserta didik yang mengumpulkan tugas tepat waktu.

Setelah guru memberikan *rewards & punishment* maka pada pertemuan kedua terlihat ada 45% atau 10 peserta didik yang bergabung di Google Meet tepat waktu dan 64% atau 14 peserta didik yang mengumpulkan tugas tepat waktu. Pada pertemuan ketiga terdapat 68% atau 15 peserta didik yang bergabung di Google Meet tepat waktu dan 86% atau 19 peserta didik yang mengumpulkan tugas tepat waktu. Serta pada pertemuan keempat terdapat 82% atau 18 peserta didik yang bergabung di Google Meet tepat waktu dan 95% atau 21 peserta didik yang mengumpulkan tugas tepat waktu.

Kehidupan sehari-hari kita, tentu harus kita rencanakan dengan matang, agar setiap harinya kita dapat menjalani sesuai dengan apa yang kita rencanakan, hal tersebut termasuk dalam tindakan kita dalam disiplin. Kedisiplinan seseorang akan dapat terlihat ketika seseorang dapat menghargai orang lain dan dapat bersikap sebagaimana mestinya. Disiplin sendiri, diajarkan dibangku pendidikan kepada para peserta didik, dengan tujuan ketika terjun kedalam masyarakat dapat bertindak sesuai norma dan aturan yang berlaku. Sebelum lebih jauh, kita harus mengetahui, apa itu disiplin. Disiplin adalah sesuatu yang berharga, yang penting dan berguna serta menyenangkan dalam kehidupan manusia yang dipengaruhi pengetahuan dan sikap yang ada pada diri atau hati nuraninya (Sumantri: 1993). Sikap itulah yang dilatih agar tertanam dan bisa diamalkan dalam kehidupan setiap peserta didik. Ditanamkan dengan praktek langsung, bukan sekedar teori dalam pembelajaran semata.

Menurut Sobri, dkk. (2019) disiplin merupakan salah satu nilai karakter yang perlu dikembangkan. Dikembangkan untuk kearah yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Karakter disiplin sangat penting dimiliki oleh manusia agar kemudian muncul karakter yang positif lainnya. Karena semakin hari, semakin banyak hal yang perlu dipelajari. Pentingnya penguatan karakter disiplin berdasarkan alasan bahwa sekarang banyak terjadi perilaku menyimpang yang

dilakukan oleh warga masyarakat bertentangan dengan norma kedisiplinan. Dizaman yang semakin modern ini, seakan-akan karakter mulai menurun sehingga perlu dikuatkan kembali untuk menata kehidupan yang lebih baik.

Husdarta (2010) mendefinisikan karakter disiplin yang berarti kontrol penguasaan diri terhadap impuls yang tidak diinginkan atau proses mengarahkan impuls pada suatu cita-cita atau tujuan tertentu untuk mencapai dampak yang lebih besar. Bagaimana kita membatasi diri atas apa yang tidak boleh dilakukan, dan mengarahkan kepada proses yang positif. Disiplin adalah kontrol diri dalam mematuhi aturan baik yang dibuat oleh diri sendiri maupun diluar diri baik keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat, bernegara maupun beragama.

Lebih lanjut, Wuryandani, dkk. (2014) menyebutkan bahwa salah satu kebijakan untuk membentuk karakter disiplin adalah dengan menetapkan aturan sekolah dan aturan kelas. Dalam hal ini, guru berhak membuat peraturan di dalam kelasnya, salah satunya adalah peraturan pemberian *rewards & punishments*. Untuk menciptakan atau membangun karakter kedisiplinan, perlu membangun integrasi sosial masyarakat modern terlebih dahulu mampu menyadari konsep kewarganegaraan yang secara khusus fokus kepada penguatan dan kebijakankebijakan yang ada di dalam masyarakat seperti mengenai agama, etnik, bahasa, dan tradisi-tradisi yang mengarah kepada moral (Adha, 2019). Integrasi sosial dapat mengarahkan masyarakat kepada moral, sedangkan kita tahu bahwa moral erat kaitanya dengan karakter kedisiplinan, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan.

Sehingga, dapat kita simpulkan bahwa disiplin itu penting untuk peserta didik dalam menuntut ilmu. Pendidikan aka dinilai berhasil apabila peserta didik didalamnya secara sikap bagus, pengetahuanya baik, dan keterampilanya terasah. Maka, bisa dikatakan tujuan belajar tercapai dengan baik dan sesuai harapan.

Pandemik Covid-19 membawa dampak besar pada sektor pendidikan kita. Sehingga, mengakibatkan pendidikan kita menjadi merubah sistem dalam penyampain materi. Hal tersebut merupakan sebuah salah satu respon, dari elemen pendidika, untuk meminimalisir dan menataati aturan dari pemerintah pusat maupun daerah.

Sektor pendidikan, yang awalnya pembelajaran dilakukan dengan tatap muka, kini menjadi daring atau belajar dari rumah melalui alat bantu komunikasi. Tentu hal ini, sangat membuat kita harus berubah dan mau tidak mau harus mengikuti perubahan tersebut dengan semampu kita. Kenapa dikatakan semampu kita, sebab tidak semua orang tua dan peserta didik mempunyai pendukung lengkap dalam pembelajaran daring yang digaungkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, kita harus paham betul mengenai konsep dari pembelajaran daring itu sendiri. Menurut Yusuf & Muhammad (2015) pembelajaran daring merupakan program penyelenggaraan kelas pembelajaran dalam jaringan untuk menjangkau kelompok target yang masif dan luas. Dalam jaringan yang dimaksudkan adalah peserta didik menggunakan internet untuk saling terhubung satu sama lain baik antar peserta didik ataupun guru. Sistem pembelajaran daring memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Tentu kelemahan harus kita minimalisir seminimal mungkin, dan kelebihan harus kita pertahankan serta bisa kita tambah dengan kelebihan yang lainnya.

Menurut Michael (2013) *e-learning* adalah pembelajaran yang disusun dengan tujuan menggunakan suatu sistem elektronik atau juga komputer sehingga mampu untuk mendukung suatu proses pembelajaran. Mempermudah peserta didik bagi yang memadai dan bagi yang kurang memadai akan menjadi sebuah permasalahan yang baru. Manfaat dari pembelajaran daring yaitu: (1). Belajar lebih bisa mandiri, artinya peserta didik bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. (2). Lebih fleksibel, artinya bahwa peserta didik tidak harus terpatok dengan tempat, bisa dimana saja belajar daring sesuai kesepakatan antara guru dan peserta didik. (3). Partisipasi, artinya bahwa peserta didik dapat berpartisipasi yang awalnya pendiam bisa untuk menunjukkan kualitas dirinya. Di sisi lain ada kekurangan yang ada di pembelajaran daring, seperti kondisi *signal* yang kurang memadai, wilayah yang tidak selalu sama, kondisi ekonomi untuk membeli paket, dan halangan lain yang sifatnya privat.

Dari penjabaran tersebut, dapat kita pahami dan kita ambil kesimpulan bahwa pembelajaran daring ini merupakan sebuah solusi dikala pandemik tetapi menjadi permasalahan baru juga dikala pandemik untuk peserta didik yang

berbeda dengan peserta didik lainnya, tentu harus ditingkatkan lagi pengawasan terhadap pembelajaran daring. Agar lebih baik lagi, dan ke depan sistem lebih tersusun secara baik dan rapi.

## **SIMPULAN**

Pembelajaran daring yang dilakukan di rumah masing-masing peserta didik membuat mereka tidak disiplin dalam mengikuti proses pembelajaran karena mereka merasa tidak diawasi secara langsung oleh guru. Pemberian *rewards & punishments* dapat meningkatkan karakter disiplin peserta didik pada pembelajaran daring di masa pandemik Covid-19. Pengawasan orang tua dalam hal ini sangat diperlukan sekali, agar suasana tetap kondusif walau peserta didik belajar daring. Karena akan berakibat fatal jika, orang tua tidak mengawasi anaknya, sebab dalam kondisi seperti ini peran orang tua sangat dibutuhkan sekali, menjadi pengganti guru sementara waktu.

## **REFERENSI**

- Adha, M. M., & Yanzi, H. (2013). Model pengembangan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan berbasis multikultur dalam rangka menanamkan nilai-nilai ham dan demokrasi. *Jurnal Media Komunikasi FPIPS*, 12(2), 1-16.
- Adha, M. M. (2019). Warga negara muda era modern pada konteks global national: perbandingan dua negara Jepang dan Inggris. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(1).
- Adha, M. M., Budimansyah, D., Sapriya & Sundawa, D. (2019a). Emerging volunteerism for Indonesia millennial generation: volunteer participation and responsibility. *Journal of Human Behavior in the Social Environment*, 29(4), 467- 483.
- Adha, M.M., Ulpa, E.P., Johnstone, J.M & Cook, B.L. (2019b). Pendidikan moral pada aktivitas kesukarelaan warga negara muda. *Journal of Moral and Civic Education*, 3(1), 28-37.
- Adha, M.M. (2012). Pemahaman dan implementasi nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari. *Media Komunikasi FIS*, 11(3), 216-224.
- Adha, M.M. (2015). Pendidikan kewarganegaraan mengoptimalkan pemahaman perbedaan budaya warga masyarakat Indonesia dalam kajian manifestasi pluralisme di era globalisasi. *Jurnal Ilmiah Mibar Demokrasi*, 14(2).

- Afandi, R. 2011. Integrasi pendidikan karakter dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar. *Pedagogia: Jurnal Pendidikan*, 1(1), 85-98.
- Aprian, F., Pitoewas, B., & Adha, M. M. (2014). Faktor-faktor yang mempengaruhi remaja usia produktif melakukan judi sabung ayam. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 3(8), 1-13.
- Hakim, A. L., Muthohar, H., & Rofi'i, A. 2020. Penerapan pendidikan karakter melalui pembelajaran IPS menggunakan metode pembelajaran daring di MTs NU Miftahul Ulum Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Tahun 2020/2021. *Journal of Social Science Teaching*, 4(2), 132-139.
- Husdarta, H. J. S. (2010). *Manajemen pendidikan jasmani*. Bandung: Alfabeta.
- Kementerian Pendidikan Nasional. (2011). *Panduan Pendidikan Karakter*. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Kebukuan Kemendiknas.
- Kesuma, D. (2018). *Pendidikan karakter*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.
- Krisantia, S., Hasyim, A., & Adha, M. M. (2013). Hubungan pola asuh orang tua dengan disiplin belajar peserta didik. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 2 (4), 1-10.
- Lestari, A. I., Holilullah, & Adha, M. M. (2013). Hubungan persepsi peserta didik tentang urgensi pendidikan karakter dengan motivasi belajar pendidikan kewarganegaraan di SMA Negeri 10 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2012/2013. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 2(1), 1-12.
- Michael, A. (2013). *Michael allen's guide to e-learning*. Canada: John Wiley & Sons.
- Mulyasa, E. (2013). *Manajemen pendidikan karakter*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pratiwi, R. (2013). Pengaruh pemahaman materi hak asasi manusia terhadap sikap kemanusiaan peserta didik kelas VII di SMP Negeri 2 Hulu Sungkai Kabupaten Lampung Utara T.P 2012/2013. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 2(3), 1-14.
- Santika, I. W. E. 2020. Pendidikan karakter pada pembelajaran daring. *Indonesian Values and Character Education Journal*, 3(1), 8-19.
- Santoso, R & Adha, M. M. (2019). *Inovasi pendidikan karakter melalui pembelajaran berbasis lingkungan sosial dan budaya*. Seminar Nasional Pendidikan FKIP Universitas Lampung 2019.
- Saputra, E., Suntoro, I., & Adha, M. M. (2014). Pengaruh penguasaan konsep diri dan penegakan peraturan terhadap tingkat kedisiplinan. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 3(8), 1-14.

- Saputro, D. W., Pitoewas, B., & Adha, M. M. (2013). Pengaruh pendidikan nilai dalam keluarga terhadap sikap tanggung jawab peserta didik. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 2(5), 1-14.
- Sobri, M., Nursaptini, W. A., & Sutisna, D. (2019). Pembentukan karakter disiplin peserta didik melalui kultur sekolah. *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, 6(1), 61-71.
- Sumantri, E. (1993). *Buku materi pokok pembinaan generasi muda*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Tristiana, A., Holilullah., & Adha, M. M. (2012). Analisis perbandingan kinerja guru bersertifikat dan non sertifikat dalam pelaksanaan pembelajaran di SMPN 28 Bandar Lampung. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 1 (4), 1-12.
- Watt, J. H., Berg, S. A. V. (1995). *Research methods for communication science*. Boston: Allyn and Bacon.
- Wuryandani, W., Maftuh, B., Budimansyah, D. (2014). Pendidikan karakter disiplin di sekolah dasar. *Cakrawala Pendidikan*, 33(2), 286-295.
- Zulyan, S.V., Pitoewas, B., & Adha, M. M. (2014). Pengaruh keteladanan guru terhadap sikap belajar peserta didik. *Jurnal Kultur Demokrasi*, 2(2), 1-12.

# Menumbuhkan Kedisiplinan Siswa Selama Pembelajaran Daring Di SMAN 2 Tanah Grogot

Kwartanti Fajriatin<sup>1\*</sup>, Mukhamad Murdiono<sup>2</sup>

[kwartantifajriatin.2019@student.uny.ac.id](mailto:kwartantifajriatin.2019@student.uny.ac.id)<sup>\*</sup>, [mukhammad\\_murdiono@uny.ac.id](mailto:mukhammad_murdiono@uny.ac.id)<sup>2</sup>

## Abstrak

Tujuan dari penelitian ini untuk mengidentifikasi menumbuhkan kedisiplinan siswa selama pembelajaran daring di SMAN 2 Tanah Grogot. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Responden untuk penelitian ini adalah para siswa dan guru. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis interaktif Miles, Huberman & Saldana (2014). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menumbuhkan kedisiplinan siswa, guru membuat aturan, diantaranya: sistem absen yang dimana absen akan tertutup otomatis di jam yang telah ditentukan dan pengerjaan tugas selama satu minggu. Aturan yang dibuat oleh guru tidak meminta pendapat siswa dan tidak ada sanksi yang membebaskan siswa, guru hanya memberikan teguran dan peringatan jika ada siswa yang tidak mematuhi aturan. Ada siswa yang sadar untuk selalu disiplin dengan alasan karena semua nilai didapatkan dari tugas yang diberikan dan dikumpulkan ke guru. Namun, tidak semua siswa bisa disiplin karena ada beberapa hambatan yang dialami siswa selama pembelajaran daring.

**Kata kunci:** kedisiplinan; pembelajaran daring.

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh individu secara sadar dan terencana untuk mewujudkan proses pembelajaran yang efektif dengan tujuan mendidik peserta didik dalam mengembangkan potensi dirinya (Dahlia, 2016). Namun dewasa ini, masih banyak sekali permasalahan-permasalahan di dalam dunia pendidikan yang dapat menghalangi tercapainya tujuan-tujuan yang diharapkan. Permasalahan di dalam pendidikan tersebut merupakan prioritas utama yang harus dipecahkan, salah satunya menyangkut tentang masalah kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan saat ini tengah mengalami tantangan sebagai dampak mewabahnya virus Covid-19.

Saat ini, semua negara yang ada di dunia masih menghadapi pandemi Covid-19. Wabah corona virus disease 2019 (Covid-19) yang telah melanda 215 negara di dunia, memberikan tantangan tersendiri bagi lembaga pendidikan (Sadikin, 2020). Banyak negara yang telah membuat kebijakan di bidang pendidikan, termasuk Indonesia, dengan menutup semua kegiatan pendidikan, mewajibkan pemerintah dan lembaga terkait untuk memberikan alternatif prosedur pendidikan bagi siswa yang tidak dapat menempuh pendidikan di

lembaga pendidikan. Korban wabah Covid-19 mengenyam pendidikan tidak hanya di Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas, tapi juga perguruan tinggi. Semua jenjang pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama Republik Indonesia berdampak negatif karena siswa terpaksa belajar di rumah karena menuntut ilmu, menghilangkan komunikasi tatap muka untuk mencegah sebaran Covid-19 (Purwanto, Pramono, Asbari, et. al, 2020).

Salah satu dampak *social distancing* juga terjadi pada sistem pembelajaran di sekolah. Berdasarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam masa darurat penyebaran virus, Mendikbud menghimbau agar semua lembaga pendidikan tidak melakukan proses belajar mengajar secara langsung atau tatap muka, melainkan harus dilakukan secara tidak langsung atau jarak jauh. Dengan adanya himbauan tersebut membuat semua lembaga pendidikan mengganti metode pembelajaran yang digunakan yaitu menjadi online atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran daring, serta merta menyadarkan kita akan potensi luar biasa internet yang belum dimanfaatkan sepenuhnya dalam berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Tanpa batas ruang dan waktu, kegiatan pendidikan bisa dilakukan kapanpun dan di manapun. Terlebih lagi, di era dimana belum ada kepastian kapan pandemi ini akan berakhir, sehingga pembelajaran daring adalah kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kuntarto (2017) bahwa istilah model pembelajaran daring atau *Online Learning Models*, pada awalnya digunakan untuk mendeskripsikan suatu sistem pembelajaran yang menggunakan teknologi internet berbasis komputer. Dalam perkembangan selanjutnya, fungsi komputer telah digantikan oleh telepon genggam atau perangkat. Di balik setiap aspek positif dari suatu hal pasti ada aspek negatifnya, atau setidaknya kemungkinan terjadinya yang tidak diinginkan. Salah satu dampak pandemi terhadap dunia pendidikan adalah setiap pendidik dan peserta didik memiliki kewajiban untuk memahami kemajuan pembelajaran online. Pada saat yang sama, tidak semua orang mahir dalam teknologi, dan tidak setiap wilayah memiliki

jaringan yang baik untuk pembelajaran online (Anshori & Illiyin, 2020). Padahal, saat pandemi ini menurut Gikas & Grant (2013) pelaksanaan pembelajaran online membutuhkan perangkat pendukung seperti smartphone, laptop atau tablet yang dapat digunakan untuk mengakses informasi kapanpun dan dimanapun.

Pembelajaran daring merupakan sistem pembelajaran yang dilakukan dengan tidak bertatap muka langsung, tetapi menggunakan *platform* yang dapat membantu proses belajar mengajar yang dilakukan meskipun jarak jauh. Tujuan dari adanya pembelajaran daring ialah memberikan layanan pembelajaran bermutu dalam jaringan yang bersifat masif dan terbuka untuk menjangkau peminat ruang belajar agar lebih banyak dan lebih luas (Sofyana & Abdul, 2019). Pendidik dituntut untuk dapat bertatap muka dengan siswa melalui aplikasi yang dapat diakses di Internet. Terdapat beberapa kendala dalam pembelajaran online, dan kendala tersebut melemahkan minat siswa dalam pembelajaran online. Bahkan jika tidak semua siswa terbiasa dengan pembelajaran online. Selain itu, terutama di berbagai daerah, masih banyak guru yang belum mahir menggunakan teknologi internet atau media sosial untuk mengajar. Pembelajaran daring sangat berbeda dengan pembelajaran seperti biasa, menurut Riyana (2019) pembelajaran daring lebih menekankan pada ketelitian dan kejelian peserta didik dalam menerima dan mengolah informasi yang disajikan secara daring.

Dalam situasi saat ini di SMAN 2 Tanah Grogot juga menggunakan pembelajaran daring, setiap peserta didik mengisi absen, mengerjakan tugas dari guru, melaporkan hasil belajar. Guru sebagai komponen pengelola pembelajaran perlu belajar digitalisasi proses pembelajaran. Hal ini butuh kesiapan dan kesigapan pribadi. Jika peralatan tertulis cukup untuk persiapan belajar dalam keadaan normal, maka peralatan belajar tersebut harus memiliki ketrampilan mengoperasikan peralatan digital (termasuk software aplikasi proses pembelajaran), *laptop*, *netbook* dan peralatan digital lainnya. Ini adalah syarat yang diperlukan untuk kelancaran proses pembelajaran *online*.

Para peneliti mulai dapat mengukur dampak Covid-19 terhadap pembelajaran daring. Santaria (2020) meneliti tentang dampak Covid-19 terhadap proses pengajaran bagi guru dan siswa menunjukkan bahwa dampak covid-19

bagi semua pihak (pendidik, peserta didik dan orang tua) sangat besar. Minimnya pengetahuan mengenai penggunaan teknologi dan pengeluaran yang cukup besar menjadi kendala proses pembelajaran berlangsung. Kondisi saat ini membuat guru tidak bisa melakukan proses pembelajaran seperti biasanya. Pada dasarnya belajar merupakan sebuah proses pembelajaran seperti yang dijelaskan Pane & Darwis (2017) mengenai proses pembelajaran, menurutnya proses pembelajaran adalah suatu sistem yang melibatkan satu kesatuan komponen yang saling berkaitan dan saling berinteraksi untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Proses pembelajaran merupakan kegiatan interaksi antara guru dan peserta didik di kelas. Dalam proses pembelajaran melibatkan kegiatan belajar dan mengajar yang dapat menentukan keberhasilan siswa serta untuk mencapai tujuan pendidikan.

Ketika kegiatan pendidikan dilakukan di sekolah, pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dilakukan langsung dari guru. Kegiatan-kegiatan yang mendukung proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan juga bisa dilakukan dengan berbagai teknik pembelajaran yang ada. Komalasari (2013) berpendapat bahwa teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalnya, penggunaan metode ceramah dalam kelas dengan siswa yang relative banyak membutuhkan teknik tersendiri tentunya beda dengan siswa yang relatif sedikit. Dalam hal ini, guru pun dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode yang sama. Akan tetapi saat ini, ketika kegiatan pendidikan dilakukan secara daring, dimana yang terjadi lebih banyak hanyalah proses pembelajaran, atau transfer pengetahuan saja yang diajarkan oleh institusi pendidikan.

Belajar-mengajar pada prinsipnya sangat tergantung pada interaksi antara guru dan siswa. Guru sebagai seorang pendidik dalam mengajar harus memiliki kesabaran, keuletan, kreativitas dalam menyampaikan materi pembelajaran agar terciptanya pembelajaran yang menarik dan tentunya untuk menciptakan situasi belajar-mengajar yang lebih aktif. Siswa dalam proses belajar dituntut untuk adanya semangat dan dorongan untuk belajar. Pendidikan karakter sangat

dibutuhkan oleh siswa di era modern yang dimana aspek moralitas dan perilaku belajar siswa mulai menampakkan kemerosotan. Perilaku belajar siswa di era sekarang sudah bervariasi seiring berkembangnya kemajuan zaman. Perilaku siswa dalam proses pembelajaran dipengaruhi beberapa faktor, seperti kurang menariknya proses pembelajaran, motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran, sikap disiplin siswa saat mengikuti pembelajaran. Disiplin dalam belajar merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap siswa agar dapat tercapai tujuan belajar di sekolah.

Berdasarkan Surat Edaran Mendikbud Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kegiatan Penumbuhan Wawasan Kebangsaan Dalam Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah, Kurikulum 2013 ini pemerintah mengedepankan pendidikan karakter yang nantinya dapat meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan yang mengarah pada pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara seimbang sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan. Ada beberapa nilai pendidikan karakter yang beberapa diantaranya menjadi actual dimasa pandemi Covid-19 ini. Salah satunya disiplin, disiplin yang merujuk pada patuh dan tertibnya peserta didik dalam menaati peraturan. Dalam situasi pembelajaran tatap muka, peserta didik terbiasa untuk mematuhi peraturan dengan memakai seragam sesuai jadwal dan topi saat upacara bendera. Tiba-tiba pada masa pandemi Covid-19 mereka belajar dirumah tanpa memakai seragam. Tentu suasananya berbeda. Disiplin adalah tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan (Mustari, 2014). Nilai karakter disiplin sangat penting dimiliki oleh manusia agar kemudian muncul nilai-nilai karakter yang baik lainnya (Hartini, 2017).

Ada beberapa penelitian yang relevan bagi penulis dalam mengangkat judul “Menumbuhkan Kedisiplinan Siswa selama Pembelajaran Daring di SMAN 2 Tanah Grogot”. Pertama, Sadikin & Hamidah (2020) dalam penelitian yang berjudul *Pembelajaran Daring di Tengah Wabah Covid-19* menunjukkan bahwa (1) mahasiswa telah memiliki fasilitas-fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk mengikuti pembelajaran daring; (2) pembelajaran daring memiliki fleksibilitas dalam pelaksanaannya dan mampu mendorong munculnya kemandirian belajar

dan motivasi untuk lebih aktif dalam belajar; dan (3) pembelajaran jarak jauh mendorong munculnya perilaku social distancing dan meminimalisir munculnya keramaian mahasiswa sehingga dianggap dapat mengurangi potensi penyebaran Covid-19 di lingkungan perguruan tinggi. Lemahnya pengawasan terhadap mahasiswa, kurang kuatnya sinyal di daerah pelosok, dan mahal biaya kuota adalah tantangan tersendiri dalam pembelajaran daring. Meningkatkan kemandirian belajar, minat dan motivasi, keberanian mengemukakan gagasan dan pertanyaan adalah keuntungan lain dari pembelajaran daring.

Kedua, Kusumadewi, Yustiana, & Nasihah (2020) dalam penelitian yang berjudul *Menumbuhkan Kemandirian Siswa selama Pembelajaran Daring sebagai Dampak COVID-19 di SD* menunjukkan bahwa Penanaman karakter mandiri selama pembelajaran daring perlu adanya kerja sama antara guru dengan orang tua atau wali murid. Kegiatan yang dilakukan meliputi membersihkan tempat tidur, mencuci bajunya sendiri, menyiram tanaman, menyapu rumah, mencuci piring dan sebagainya. Pada saat siswa melakukan kegiatannya orang tua mendokumentasikan (foto) lalu mengumumkan kepada guru sebagai tanda bukti bahwa siswa telah mengerjakan tugasnya. Hal tersebut merupakan langkah yang baik dalam penanaman karakter mandiri siswa.

Ketiga, Warmi, Adirakasiwi, & Santoso (2020), dalam penelitian yang berjudul *Motivasi dan Kemandirian Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Matematika di Masa Pandemi COVID-19* menunjukkan bahwa guru sudah mampu melaksanakan pembelajaran daring dengan baik, hasil lain menunjukkan bahwa terdapat perbedaan motivasi kemandirian belajar sebelum dan sesudah pelaksanaan pembelajaran daring pada mata pelajaran matematika di kelas VII B SMPN 3 Karawang.

Keempat, Sobri, Nursaptini, & Novitasari (2020) dalam penelitian yang berjudul *Mewujudkan Kemandirian Belajar melalui Pembelajaran Berbasis Daring di Perguruan Tinggi pada Era Industri 4.0* menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis daring sangat tepat diterapkan di setiap perguruan tinggi guna menjawab tantangan perkembangan zaman pada era industri 4.0. Pembelajaran berbasis daring merupakan salah satu cara mewujudkan

kemandirian belajar dengan prinsip pembelajaran bersifat terbuka, belajar mandiri, belajar tuntas, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, menggunakan teknologi pendidikan lainnya dan/atau pembelajaran terpadu perguruan tinggi.

Beberapa penelitian yang penulis paparkan di atas memang hanya sebagian kecil saja, masih banyak penelitian-penelitian yang terkait dan motivasi belajar peserta didik. Penulis berharap, penelitian ini dapat mengisi kekosongan “gap” terkait literatur persoalan terkait dengan kedisiplinan dan pembelajaran daring. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji penelitian dengan mengangkat judul Menumbuhkan Kedisiplinan Siswa selama Pembelajaran Daring di SMAN 2 Tanah Grogot. Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara yang dilakukan guru agar dapat menumbuhkan kedisiplinan siswa selama pembelajaran daring.

## **METODE**

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya (Darmadi, 2013). Dalam penelitian ini, tujuan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif adalah menggambarkan, mengungkapkan dan menyajikan apa adanya sesuai data, fakta, dan realita mengenai menumbuhkan kedisiplinan siswa selama pembelajaran daring di SMAN 2 Tanah Grogot. Lokasi penelitian ini adalah Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Tanah Grogot yang terletak di Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser. Sumber data penelitian terdiri dari sumber data primer dan data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan siswa kelas X IPS. Data sekunder terdiri dari arsip-arsip dan hasil dokumentasi yang diolah lebih lanjut sehingga peneliti dapat mengetahui menumbuhkan kedisiplinan siswa selama pembelajaran daring di SMAN 2 tanah grogot. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis interaktif Miles, Huberman & Saldana (2014).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Informan dalam penelitian ini adalah guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan siswa Kelas X SMAN 2 Tanah Grogot. Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti. Peneliti mengamati cara guru dalam penerapan disiplin waktu, disiplin menegakkan aturan, dan sikap siswa Kelas X pada semua informan. Pada saat observasi hari Selasa, 8 September 2020 pukul 09.00-10.30, Peneliti mengamati proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, pukul 09.15 AF dan RK terlambat masuk meet. Guru menjelaskan materi pelajaran. Sebelum mengakhiri pembelajaran daring guru mengingatkan siswa yang belum mengerjakan tugas agar segera mengumpulkan tugas dan siswa tersebut di chat melalui chat pribadi. Hari Selasa, 15 September 2020 pukul 09.00-10.30, saat itu guru hanya mengirimkan tugas, pukul 10.30 terlihat hanya 21 siswa yang melihat tugas yang diberikan oleh guru. Selasa 22 September 2020 pukul 09.00-10.30, pembelajaran dimulai seperti biasa. Pada saat guru menjelaskan pembelajaran tidak ada siswa yang bertanya. Peneliti melihat DR sedang keluar dari frame kamera tanpa izin. Setelah selesai menjelaskan karena tidak ada yang bertanya, guru bertanya kepada siswa siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini, salah satu siswa menyimpulkan dan guru memberikan apresiasi dan ucapan selamat karena sudah benar menyimpulkan pembelajaran hari ini. Dan tidak lupa juga guru mengingatkan siswa yang belum mengumpulkan tugas terutama yang sering tidak mengumpulkan tugas tepat waktu yaitu FR, RR, AP, WS dan A. sebelum mengakhiri pembelajaran guru memberikan motivasi kepada siswa. Dari hasil wawancara peneliti kepada semua informan, peneliti melihat bahwa guru sudah menerapkan aturan dan memberikan teguran serta mengingatkan kepada siswa yang melanggar. Jika pelanggaran yang dilakukan siswa berulang-ulang maka guru akan berkomunikasi dengan orang tua/wali siswa.

### **Proses Pembelajaran Daring**

Belajar bukan hanya sekedar *transfer knowledge*, namun belajar merupakan suatu proses yang dialami seseorang untuk dapat memahami apa yang dipelajari. Proses inilah yang sangat penting, di mana ada yang berhasil dan ada

pula yang gagal. Proses belajar yang diberikan kepada siswa agar dapat memahami apa yang kita sampaikan harus membuat siswa senang dan termotivasi untuk belajar.

Pandemi Covid-19 merupakan suatu krisis penyakit yang sangat berbahaya, selain berdampak pada perkeonomian juga berdampak pada pendidikan. Berdasarkan kondisi negara kita yang saat ini sedang dilanda virus Covid-19, peran pembelajaran berbasis online sebagai pendukung proses pembelajaran menjadi sangat signifikan dan perlu. Terutama di era global saat ini, transformasi berjalan sangat cepat. Dampak pada pendidikan itu terjadi salah satunya dirasakan guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan siswa di SMAN 2 Tanah Grogot. Dampak dari Covid-19 dalam lembaga pendidikan disini sangatlah berpengaruh untuk kelangsungan pembelajaran, karena tidak adanya juga persiapan untuk pembelajaran secara daring. Meskipun pemerintah telah memberikan pelatihan tetap saja guru masih merasa tidak maksimal dalam melakukan pembelajaran daring. Pembelajaran daring saat ini memaksa semua guru untuk mengikuti kebijakan saat ini yang dilaksanakan agar pembelajaran tetap berlangsung, dan yang menjadi pilihan yaitu dengan memanfaatkan perkembangan teknologi masa kini. Koesoema (2011: 237) menyatakan bahwa pengertian disiplin yaitu disiplin dikaitkan dengan proses pembelajaran, disiplin memiliki relasi antara guru dan siswa serta lingkungan sebagai sarana interaksinya, seperti peraturan sekolah, tujuan pembelajaran, dan pengembangan siswa dalam pembelajaran melalui bimbingan serta arahan guru.

Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMAN 2 Tanah Grogot melakukan proses pembelajaran daring dengan menggunakan *Microsoft team*. Pada proses pembelajaran daring kegiatan yang dilakukan guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yaitu mengabsen, memberikan materi literasi mandiri dan penugasan yang berhubungan dengan materi. Untuk absen dilakukan dengan form, pemberian materi dan tugas dilakukan dengan pembagian jam perminggu selang-seling, dan pengumpulan tugas bisa dilakukan dengan melampirkan tugas yang dikerjakan lalu dikumpulkan. Hasil penelitian Chandrawati (2010) bahwa pengajar diharapkan dapat menyajikan materi melalui

web yang menarik dan diminati, melayani bimbingan dan komunikasi melalui internet, dan kecakapan lain yang diperlukan. Pembelajaran daring dirasa tidak seefektif kegiatan pembelajaran konvensional (tatap muka langsung), karena beberapa materi harus dijelaskan secara langsung dan lebih lengkap, sehingga menjadikan materi tidak tuntas dan penggunaan media pembelajaran dalam pembelajaran daring juga dirasa tidak maksimal. Proses pembelajaran secara daring hanya efektif untuk memberi penugasan.

Siswa SMAN 2 Tanah Grogot mengikuti pembelajaran pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan secara daring perbedaan yang dirasakan yaitu sulitnya pemahaman pembelajaran yang terkadang susah untuk dimengerti, secara langsung saja pelajaran sulit dimengerti, pertanyaan siswa lambat direspon guru, tidak bisa saling bertukar pendapat dan fikiran bersama siswa lainnya dan metode yang monoton atau hanya pemberian materi saja tanpa ada penjelasan dari guru. Model pembelajaran daring telah memberikan pengalaman baru yang lebih menantang daripada model pembelajaran konvensional (tatap muka). Karena kondisi saat ini, baik guru maupun siswa harus siap menyelenggarakan dan mengikuti pembelajaran daring ini. Proses pembelajaran di kelas memang berbeda dengan pembelajaran daring namun guru dan siswa harus mampu beradaptasi dengan cara pembelajaran yang baru diikuti saat ini (Kuntarto, 2017). Rohani & Rachman (2011) menyatakan mengenai disiplin dapat membantu siswa agar memahami dan menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungannya yang dinamis dan juga pentingnya tentang cara menyelesaikan tuntutan yang ditujukan terhadap lingkungannya serta upaya untuk mengendalikan diri dan sikap mental individu atau masyarakat dalam mengembangkan kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan atau tata tertib berdasarkan dorongan dan kesadaran yang muncul dari dalam hatinya.

### **Menumbuhkan Kedisiplinan Siswa selama Pembelajaran Daring**

Salah satu kendala yang dihadapi guru dalam kegiatan belajar mengajar adalah masalah kedisiplinan peserta didik. Adakalanya guru menghadapi peserta didik yang tidak disiplin dalam hal kedatangan maupun penyelesaian tugas belajar. Hal itu akan menghambat dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Peserta

didik yang memiliki sikap disiplin yang baik dan sudah menjadi karakternya akan sangat mendukung dalam tercapainya tujuan pembelajaran dan mendukung keberhasilan pencapaian kurikulum sekolah. Terdapat 4 dimensi dari disiplin yaitu, disiplin waktu, disiplin menegakkan aturan, disiplin sikap, dan disiplin menegakkan ibadah (Asmani, 2013). Dalam penelitian ini peneliti hanya memfokuskan pada 3 dimensi disiplin yaitu disiplin waktu, disiplin menegakkan aturan, dan disiplin sikap.

Saat ini untuk menumbuhkan kedisiplinan siswa di SMAN 2 Tanah Grogot, guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berupaya semaksimal mungkin berinovasi dan berkreaitivitas dalam proses pembelajaran. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diketahui bahwa guru sudah disiplin dalam menegakkan aturan, waktu dan sikap. Guru membuat aturan sebelum pembelajaran daring berlangsung. Salahudin (2013) mengartikan disiplin sebagai perilaku tertib dan mengikuti berbagai peraturan. Aturan yang dibuat oleh guru diantaranya: pertama sistem absen yang dimana absen akan tertutup otomatis di waktu yang telah ditentukan yaitu sebelum pukul 00.00 malam, dan pengumpulan tugas maksimal 1 hari sebelum proses pembelajaran dimulai kembali atau seminggu masa pengerjaan tugas. Aturan yang dibuat oleh guru tidak meminta pendapat siswa tetapi tetap disampaikan kepada siswa dan disepakati bersama. Aturan yang telah berjalan ini tidak ada sanksi yang membebaskan siswa karena menurut guru dikhawatirkan jika memberikan sanksi siswa akan menjadi malas mengerjakan tugas yang ada, guru hanya memberikan teguran dan peringatan. Tindakan yang konsisten dan aturan yang disepakati sebelum kelas berdampak pada kebiasaan siswa untuk bersikap disiplin. Kebiasaan adalah pikiran yang diciptakan seseorang dalam pikirannya, kemudian terhubung dengan emosi, dan terus mengulanginya hingga pikiran menganggapnya sebagai bagian dari perilaku mereka (Elfiky, 2015). Selain itu, guru juga memberikan contoh kepada siswa dengan memulai pembelajaran tepat waktu, yang artinya guru sudah menerapkan disiplin waktu pada dirinya sendiri. Dan guru sudah menerapkan peraturan yang ada di sekolah dan menjadi contoh yang baik untuk siswa dan berperilaku baik

sesuai dengan aturan dan harus ditaati oleh guru dan siswa. Meskipun terkadang beberapa kali pertanyaan siswa melalui chat lambat dibalas oleh guru.

Hasil dari penerapan aturan dari yang dibuat oleh guru untuk menumbuhkan kedisiplinan siswa yaitu ada siswa yang sadar untuk selalu disiplin dengan alasan karena semua nilai didapatkan dari tugas yang diberikan dan dikumpulkan ke guru. Semua siswa sebenarnya sadar akan kewajibannya namun karena kendala yang dihadapi maka menjadi tidak disiplin. Tidak semua siswa bisa disiplin karena ada beberapa kendala yang dialami siswa selama pembelajaran daring. Kendala tersebut diantaranya: siswa keterbatasan jaringan internet, siswa yang memiliki saudara yang masih bersekolah harus bergantian menggunakan handphone untuk melakukan pembelajaran daring, siswa lupa untuk absen dan mengejakan tugas yang diberikan oleh guru, siswa bekerja untuk membeli kouta internet, siswa tidak aktif saat pembelajaran daring, karena pembelajaran daring siswa susah tidur karena tidak banyak aktivitas yang dilakukan, jika pembelajaran dimulai pukul 09.00 pagi siswa harus bangun pagi dengan kondisi masih mengantuk, siswa merasa malas hanya karena mementingkan kepentingan sendiri atau asik main game, dan ada beberapa alasan siswa lainnya yang membantu orang tua berkebun. Kendala yang sering timbul dari tugas-tugas yang dikerjakan di rumah ini adalah adanya beberapa siswa atau kelompok siswa yang terlambat mengumpulkannya dari batas waktu yang telah ditentukan oleh guru. Bahkan, keterlambatan itu dapat terjadi berulang kali. Ketika guru merancang tugas yang akan dikerjakan oleh siswa, guru telah memperhitungkan berapa kira-kira durasi waktu yang dibutuhkan oleh siswa atau kelompok siswa untuk menyelesaikannya dengan baik. Memberi tambahan waktu dengan asumsi bahwa siswa atau kelompok siswa juga mendapatkan tugas dari guru lain. Selain itu, dalam masa pandemi saat ini banyak siswa yang tidak bisa mengatur jadwal belajar di rumah karena sangat fleksibel dan di sibukan dengan kepentingan lain. Namun juga ada yang bisa mengatur jadwal belajar karena merasa nyaman dan santai belajar di rumah.

Imron (2017) menjelaskan bahwa disiplin dibagi menjadi tiga, yaitu: 1) Disiplin yang dibangun berdasarkan konsep otoritarian. Menurut konsep ini

peserta didik dikatakan memiliki kedisiplinan yang tinggi jika mau duduk tenang sambil memperhatikan penjelasan guru saat guru sedang mengajar. 2) Disiplin yang dibangun berdasarkan konsep permissive. Menurut konsep ini peserta didik haruslah diberikan kebebasan seluasluasnya di dalam kelasnya. Tata tertib atau aturan-aturan di kelas dilonggarkan dan tidak perlu mengikat peserta didik. 3) Disiplin yang dibangun berdasarkan konsep kebebasan terkendali atau kebebasan yang bertanggung jawab. Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam proses pembelajaran daring membuat aturan yang secara mutlak harus ditaati oleh seluruh siswa, namun juga memberikan kesempatan siswa untuk menyampaikan pendapat dan pertanyaannya dengan bebas dan disiplin yang dibangun dengan tanggung jawab juga karena guru memberikan kelonggaran jika ada siswa yang tidak disiplin berupa teguran dan peringatan.

Dalam proses pendidikan terdapat proses mendidik, mengajar dan melatih. Berkaitan dengan kedisiplinan Tu'u (2004) mengemukakan bahwa fungsi disiplin sebagai berikut: 1) Menata kehidupan bersama Disiplin berguna untuk menyadarkan seseorang bahwa dirinya perlu menghargai orang lain dengan cara menaati dan mematuhi peraturan yang berlaku. 2) Membangun kepribadian Kepribadian merupakan keseluruhan sifat, tingkah laku dan pola hidup seseorang yang tercermin dalam penampilan, perkataan dan perbuatan sehari-hari. 3) Melatih kepribadian Sikap, perilaku dan pola kehidupan yang baik dan berdisiplin tidak terbentuk dalam waktu singkat. 4) Pemaksaan Disiplin adalah sikap mental yang mengandung kerelaan mematuhi semua ketentuan, peraturan dan norma yang berlaku dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab. 5) Hukuman Tata tertib sekolah biasanya berisi hal-hal positif yang harus dilakukan oleh siswa. 6) Menciptakan lingkungan kondusif. Dengan adanya aturan yang dibuat oleh guru diharapkan dapat menyadarkan siswa untuk menaati dan mematuhi aturan itu membatasi diri merugikan siapapun, tetapi hubungan antara guru dan siswa menjadi baik dan lancar. Dalam disiplin dapat menumbuhkan kepribadian siswa biasanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan keluarga, pergaulan sesama teman, masyarakat dan sekolah. Disiplin yang diterapkan di masing-masing lingkungan tersebut memberi dampak bagi pertumbuhan kepribadian yang baik. Jadi,

lingkungan yang berdisiplin baik sangat berpengaruh terhadap kepribadian siswa. Latihan yang berulang-ulang diperlukan agar kepribadian berdisiplin yang sudah terbentuk tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang kurang baik. Sebagaimana dijelaskan oleh Samani (2012) bahwa karakter disiplin merupakan sikap dan perilaku yang timbul dari kebiasaan melatih atau mengikuti aturan, peraturan perundang-undangan atau perintah.

### **Solusi dalam Mengatasi Hambatan Menumbuhkan Kedisiplinan Siswa**

Dari berbagai hambatan yang dialami guru dan siswa dalam proses menumbuhkan kedisiplinan selama pembelajaran daring terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan agar proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berjalan maksimal. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Aqib (2011) bahwa disiplin adalah langkah-langkah atau upaya yang perlu guru, kepala sekolah, orang tua dan siswa ikuti untuk pengembangan keberhasilan perilaku siswa secara akademik maupun sosial. Guru dapat melakukan hal-hal berikut.

Pertama, Guru harus menjadi teladan bagi murid-muridnya. Perbuatan dan tindakan kerap kali lebih besar pengaruhnya dibandingkan dengan kata-kata. Karena itu, contoh dan teladan disiplin guru sangat berpengaruh terhadap disiplin para siswa. Mereka lebih mudah meniru apa yang mereka lihat, dibanding apa yang mereka dengar. Misalkan dengan menjawab dengan cepat pertanyaan dari siswa. Guru memberikan kesempatan tanya jawab dengan siswa sehingga mempermudah siswa memahami materi yang disampaikan guru.

Kedua, Guru memberikan keringanan dengan kelonggaran pengumpulan tugas dengan memberikan kesempatan untuk mengerjakan tugas dan mencari jaringan internet bagi yang terkendala jaringan. Guru seringkali memberikan tugas untuk dikerjakan oleh siswa. Tugas ini dapat bervariasi baik dalam hal pengerjaannya, apakah berkelompok atau individual. Tugas bisa juga bervariasi berdasarkan jenisnya, seperti PR (pekerjaan rumah), proyek, ataupun kegiatan eksperimen mandiri yang perlu dibuat laporannya, dan sebagainya. Guru juga dapat mendengarkan kendala siswa dalam mengerjakan tugas maupun dalam mengirimkan tugasnya.

Ketiga, menegur atau mengingatkan siswa jika belum lengkap mengumpulkan tugas. Perlu adanya rekapitulasi nilai terkait tugas yang telah dikumpulkan siswa agar siswa mampu mengingat tugas yang belum dikumpulkan. Menegur membuat siswa memahami konsekuensi dan risiko yang relevan dari tindakannya.

Keempat, ketika melakukan pembelajaran daring guru memberikan motivasi belajar kepada siswa agar para siswa tetap semangat dengan kondisi yang terjadi saat ini, menjaga komunikasi dengan murid, misalnya dengan teguran atau sapaan setiap pagi. Maksud dari aktivitas tersebut adalah untuk menjaga semangat dan mengingatkan kembali bahwa guru selalu memantau dan menjadi teladan bahwa sikap ramah itu sangat penting.

Kelima, guru berkordinasi dengan wali kelas untuk menyampaikan pesan kepada orang tua atau wali siswa. Karena dalam proses belajar daring penting untuk ditambahkan pesan-pesan edukatif kepada orangtua dan peserta didik. Khususnya terkait wabah pandemi dan protokol kesehatan. Untuk mendisiplinkan tanpa paksaan, orangtua harus mulai membiasakan perilaku baru di dalam rumah. Selain dukungan dari orang tua, siswa juga harus selalu diberi nasehat dan diberi motivasi oleh gurunya agar mereka mau belajar dengan disiplin baik di rumah maupun di sekolah.

Kemudian agar kedisiplinan dapat berjalan selama proses pembelajaran daring yang dapat siswa lakukan yaitu; Pertama, siswa berlatih menaati aturan yang telah dibuat. Kesadaran diri sebagai pemahaman diri bahwa disiplin dianggap penting bagi kebaikan dan keberhasilan dirinya. Selain itu, kesadaran diri menjadi motif sangat kuat terwujudnya disiplin. Apalagi seorang siswa yang sedang tumbuh kepribadiannya, tentu lingkungan sekolah yang dimana disini menjadi peran guru untuk selalu memastikan kondisi yang tertib, teratur, tenang, tenteram, sangat berperan dalam membangun kepribadian yang baik. Semua itu terbentuk melalui proses panjang yang disebut latihan. Demikian pula, kepribadian yang tertib, teratur, taat, patuh, perlu dibiasakan dan dilatih.

Kedua, siswa tidak menunda-nunda mengerjakan dan mengirimkan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Hal itu bisa saja karena siswa

memiliki kebiasaan malas-malasan, tahu jika *deadline* tugas masih lama mengakibatkan kamu mengerjakan tugas deadline alias kerja kilat, ditambah lagi melakukan *copy paste*.

Ketiga, siswa aktif dalam proses pembelajaran daring. Siswa dapat bertanya ataupun memberikan tanggapan terhadap materi pelajaran yang sedang berlangsung. Pembelajaran sekarang diharapkan siswa aktif dan secara kolaborasi berproses memahami materi yang disampaikan guru dan guru sebagai fasilitator saja. Proses ini yang akan membekas dan memberikan keterampilan berpikir dan membentuk karakter yang baik pada siswa.

## **SIMPULAN**

Pandemi Covid-19 merupakan suatu krisis penyakit yang sangat berbahaya, selain berdampak pada perekonomian juga berdampak pada pendidikan. Dampak pada pendidikan itu terjadi salah satunya dirasakan guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan siswa di SMAN 2 Tanah Grogot. Dalam proses pembelajaran daring Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan menggunakan *Microsoft team*. Dalam menumbuhkan kedisiplinan siswa, guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berupaya semaksimal mungkin berinovasi dan berkeaktifan dalam proses pembelajaran. Aturan yang dibuat oleh guru diantaranya: pertama sistem absen yang dimana absen akan tertutup otomatis di waktu yang telah ditentukan yaitu sebelum pukul 00.00 malam, dan pengumpulan tugas maksimal 1 hari sebelum proses pembelajaran dimulai kembali atau seminggu masa pengerjaan tugas.

Tidak semua siswa bisa disiplin karena ada beberapa kendala yang dialami siswa selama pembelajaran daring. Kendala tersebut diantaranya: siswa keterbatasan jaringan internet, siswa yang memiliki saudara yang masih bersekolah harus bergantian menggunakan handphone untuk melakukan pembelajaran daring, siswa lupa untuk absen dan mengejakan tugas yang diberikan oleh guru, siswa bekerja untuk membeli kouta internet, siswa tidak aktif saat pembelajaran daring, karena pembelajaran daring siswa susah tidur karena tidak banyak aktivitas yang dilakukan, jika pembelajaran dimulai pukul

09.00 pagi siswa harus bangun pagi dengan kondisi masih mengantuk, siswa merasa malas hanya karena mementingkan kepentingan sendiri atau asik main game, dan ada beberapa alasan siswa lainnya yang membantu orang tua berkecukupan. Selain itu, dalam masa pandemi saat ini banyak siswa yang tidak bisa mengatur jadwal belajar dirumah karena sangat fleksibel dan di sibukan dengan kepentingan lain. Namun juga ada yang bisa mengatur jadwal belajar karena merasa nyaman dan santai belajar dirumah.

Dari berbagai hambatan yang dialami guru dan siswa dalam proses menumbuhkan kedisiplinan selama pembelajaran daring terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan agar proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berjalan maksimal. Guru dapat melakukan hal-hal berikut. Pertama, Guru harus menjadi teladan bagi murid-muridnya. Kedua, Guru memberikan keringanan dengan kelonggaran waktu. Ketiga, menegur atau mengingatkan siswa jika belum lengkap mengumpulkan tugas. Keempat, ketika melakukan pembelajaran daring guru memberikan motivasi belajar kepada siswa. Kelima, guru berkordinasi dengan wali kelas untuk menyampaikan pesan kepada orang tua atau wali siswa. Kemudian agar kedisiplinan dapat berjalan selama proses pembelajaran daring yang dapat siswa lakukan yaitu: Pertama, siswa berlatih menaati aturan yang telah dibuat. Kedua, siswa tidak menunda-nunda mengerjakan dan mengirimkan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ketiga, siswa aktif dalam proses pembelajaran daring.

## **REFERENSI**

- Anshori, I., & Illiyyin, Z. (2020). The impact of covid-19 on the learning process at MTs Al-Ashhar Bungah Gresik. *Islamic Education Management Journal*, 3(2), 181-199. Doi: 10.30868/im.v3i02.803
- Asmani, J.M. (2013). *Tips menjadi guru indpiratif, kreatif, dan inovatif*. Yogyakarta: Diva Press.
- Aqib, Z. (2011). *Pendidikan karakter membangun perilaku positif anak bangsa*. Bandung: Yrama Widya
- Chandrawati, S. R. (2010). The use of e-learning in learning. *Horizon Journal Education*, 8 (2), 172–181., 8(2), 172–181.

- Dahlia, N. N. (2016). Dinamika motivasi belajar pada siswa mandiri di smp 10 banda aceh. *Universitas Syiah Kuala*, 1(2), 73–79.
- Darmadi, H. (2012). *Dimensi-dimensi metode penelitian pendidikan dan sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2003). *Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2003 concerning the national education system*. Jakarta: CV Mitra Karya.
- Gikas, J., & Grant, M. M. (2013). Mobile computing devices in higher education: Student perspectives on learning with cellphones, smartphones & social media. *Internet and Higher Education*. <https://doi.org/10.1016/j.jheduc.2013.06.002>
- Hartini, S. (2017). Pendidikan karakter disiplin siswa di era modern sinergi orang tua dan guru. *AL-ASASIYYA: Journal Basic Of Education*, 02(01), DOI: [10.24269/ajbe.v2i1.882](https://doi.org/10.24269/ajbe.v2i1.882)
- Imron, A. (2012). *Manajemen peserta didik berbasis sekolah*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Komalasari, K. (2013). *Contextual Learning: Concepts and Applications*. Bandung: PT Refika Adiatama.
- Kuntarto, E. (2017). The effectiveness of online learning models in Indonesian language lectures in universities.. *Journal Indonesian Language Education and Literature*, 3(1), 99-110. DOI: <https://dx.doi.org/10.24235/ileal.v3i1.1820>
- Kusumadewi, R. F., Yustiana, S., & Nasihah, K. (2020). Fostering student independence during online learning as a result of covid-19 in elementary school. *Journal of Basic Education Research*, 1(1), 7-11 <http://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/jrpd/article/view/7927/3245>
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis, a methods sourcebook, edition 3*. USA: Sage Publications.
- Pane, A., & Darwis, D. M. (2017). Learning and Learning. *Journal of Islamic Studies*, 3(2), 333–352. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v3i2.945>
- Purwanto, A., Pramono, R., Asbari, M., Santoso, P. B., Wijayanti, L. M., Hyun, C. C., Putri, R. S. (2020). An exploratory study of the impact of the Covid-19 pandemic on the online learning process in primary schools. *Journal of Education, Psychology and Conseling*, 2(1), <https://www.researchgate.net/publication/340661871>

- Riyana, C. (2019). *Production of Online-Based Learning Materials*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Sadikin, A., & Hamidah, A. (2020). Online Learning in the Middle of the Covid-19 Pandemic. *Biology Education Scientific Journal*, 6(2), 214-224. <https://online-journal.unja.ac.id/biodik>
- Santaria, R. (2020). The impact of the Covid-19 pandemic on the learning process for teachers and students. *Journal of Teacher Studies and Learning*, 3(20), <https://e-journal.my.id/jsgp/article/view/293>
- Sobri, M., Nursaptini, N., & Novitasari, S. (2020). Mewujudkan kemandirian belajar melalui pembelajaran berbasis daring diperguruan tinggi pada era industry 4.0. *Jurnal Pendidikan Glasser*, 4(1) 64-71. <http://lonsuit.unismuhluwuk.ac.id/index.php/glasser/article/view/373>
- Sofyana, & Abdul. (2019). Whatsapp-based combination online learning in the class of employees of the Informatics Engineering Study Program, Universitas PGRI Madiun. *National Journal of Informatics Engineering Education*, 8(1), 81-86.
- Surat Edaran Mendikbud No 4 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (Covid- 19),” Pusdiklat Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 24 Maret 2020, <https://pusdiklat.kemdikbud.go.id/surat-edaran-mendikbud-no-4-tahun-2020-tentang-pelaksanaan-kebijakanpendidikan-dalam-masa-darurat-penyebaran-corona-virus-disease-covid-1-9/>
- Tu’u, T. (2004). *Peran disiplin pada perilaku dan prestasi siswa*. Jakarta: Grasindo
- Warmi, A., Adirakasiwi, A., & Santoso, E. (2020). Motivasi dan kemandirian belajar siswa pada mata pelajaran matematika di masa pandemic covid-19. *Jurnal Education and Development*, 8(3), 197-202, <http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/1937>
- Yurianto, Ahmad, & Wibowo, K. P. (2020). *Guidelines for the prevention and control of coronavirus disease (covid-19)*.

# **Gender dan Transformasi Dunia Pendidikan di Era Disrupsi Industri 4.0**

**Mizani Alam Semesta**  
[Mizani Alam Semesta@gmail.com](mailto:Mizani Alam Semesta@gmail.com)

## **Abstrak**

Tujuan dari penelitian Ini adalah melihat lebih jauh seberapa besar potensi gender dalam menggunakan perangkat teknologi sebagai *tools* dalam pemanfaatan pembelajaran di era disrupsi industri 4.0 dan juga sebagai bentuk upaya kontribusi dalam membangun peradaban pendidikan dengan sistem yg modern, efisien dan terintegrasi dengan semua perangkat teknologi yang ada pada saat ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan cara menyampaikan secara verbal dan pendapat dari subjek baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Subjek dari penelitian ini diambil dari para akademisi diantaranya yaitu Mahasiswa dan Dosen. Hasil dalam penelitian ini setidaknya memberikan beberapa point yaitu *Pertama*, dampak Teknologi bagi aspek dunia Pendidikan. *Kedua* Pemahaman tentang penggunaan internet dalam dunia Pendidikan akademik. *Ketiga* Pemahaman terhadap perkembangan Teknologi dan penerapannya dalam ruang Akademik. Pada kesimpulan penelitian ini penulis menjelaskan tentang rekonstruksi model pembelajaran baru pada lingkungan akademisi Perguruan Tinggi.

**Kata kunci:** Gender, Disrupsi Industri 4.0, Pendidikan

## **PENDAHULUAN**

Memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah merupakan tugas yang sangat vital bagi Negara untuk terlibat langsung dalam membangun kemajuan peradaban Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu didalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat 5 bahwasannya Pemerintah memiliki tugas untuk turut serta dalam memajukan Pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi Nilai-nilai Agama dengan tujuan untuk membangun persatuan antar bangsa. Maka seiring perubahan zaman modernitas yang terjadi pada dunia Pendidikan sangatlah dinamis sehingga mau tidak mau Pemerintah harus turut aktif dalam membangun tatanan sistem Pendidikan yang lebih responsif sehingga arus perubahan zaman tersebut justru menjadi titik balik bagi kemajuan Pendidikan dan SDM Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang No 12 Tahun 2012 Pasal 13 Ayat 2 tentang Pendidikan tinggi berisikan bahwa seluruh Mahasiswa secara aktif mampu mengembangkan potensi dalam setiap pembelajaran, mencari kebenaran ilmiah, penguasaan, pengembangan, pengalaman suatu cabang ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk menjadi seorang ilmuan, praktisi, akademisi yang berjiwa dan bernilai kebudayaan. Sehingga akses untuk mendapatkan pengetahuan hanya bisa ditempuh lewat sarana Pendidikan (Lubis, 2016). Sarana Pendidikan adalah alat yang paling vital untuk meningkatkan kualitas pengetahuan (SDM) dalam menunaikan agenda pembangunan suatu bangsa, sebab Pendidikan adalah instrument yang paling utama dalam proses pengembangan (SDM). Pengembangan (SDM) ini bukan hanya tentang kualitas intelektual melainkan bagaimana dapat menjadi manusia yang unggul dan bermoral sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pendidikan sangatlah penting bagi manusia karena dengan Pendidikan manusia akan memiliki visi kehidupan yang jauh lebih terarah khususnya dalam proses pembentukan *mindset* dan pemikiran yang jauh lebih terstruktur. Apalagi kalau kita melihat perintah agama bahwasannya agama kita mengajarkan perintah pentingnya menuntut ilmu sehingga point yang penting dari sebuah Pendidikan adalah melahirkan kualitas kepribadian dan moral bagi manusia itu sendiri. Adapun yang menjadi isu krusial bagi tantangan Pendidikan adalah bagaimana cara mendapatkan Pendidikan di era industri 4.0 dan bagaimana cara mengaplikasikan sistem teknologi kedalam dunia Pendidikan itu sendiri. Adapun kiranya teknologi sekarang ini menjadi kebutuhan vital bagi seluruh umat manusia baik itu dimanfaatkan untuk sarana pekerjaan ataupun sebagai alat pembelajaran. Namun patut diperhatikan khususnya bagi orang awam yang belum melek teknologi jelas mereka akan tertinggal jauh dari lingkungannya sebab kehidupan sekarang ini seluruhnya serba menggunakan perangkat berbasis teknologi. Mahasiswa ataupun dosen mau tidak mau harus segera memiliki kesadaran untuk menguasai seluruh metode atau model pendekatan yang berbasis teknologi seperti sekarang ini karena ini adalah tuntutan zaman dan perkembangan dinamika dunia Pendidikan.

Industri 4.0 belakangan ini sedang menjadi *trend* dalam dunia globalisasi, Maka ketika kita bicara soal Industri 4.0 adapun hal-hal yang perlu kita ketahui tentang ide dasar dari perkembangan Industri 4.0 tersebut adalah munculnya *cyber space*, Kecerdasan buatan (AI), *Big data*, *robotic*, *Internet Of Things* (IOT) dan semuanya itu menggunakan bahan bakar berupa teknologi, dan inovasi tersebut akan mempengaruhi perekonomian Negara, Pendidikan, perindustrian, dan perpolitikan. Revolusi industri 4.0 akan memberikan suatu perubahan besar bagi pola Pendidikan, sehingga kita sangat mudah untuk melakukan akselerasi pola pembelajaran yang berbasis digital dan juga kita dapat membangun networking atau jejaring dengan masyarakat global (L.friedmand, 2004).

Perubahan pengetahuan dan pembelajaran di era industri 4.0 ini juga membawa arus perubahan besar bagi kehidupan para gender yang semakin kompleks. Revolusi industri 4.0 memberikan kemudahan bagi dunia Pendidikan dalam menyajikan sistem Pendidikan yang lebih modern. Sehingga kita dapat melihat dampak yang sangat positif dengan adanya perkembangan dari industri 4.0 yang membuat industri Pendidikan semakin maju (Safitri, 2017). Teknologi sekarang ini merupakan platform yang paling dibutuhkan dalam dunia Pendidikan khususnya ditataran perguruan tinggi, baik itu ketika melakukan pembelajaran secara *offline* ataupun secara daring *online* dengan pembelajaran jarak jauh dan Teknologi yang dimaksud disini adalah internet beserta produk-produknya yang berbasis teknologi. Maka dinamika yang terjadi dalam kehidupan mahasiswa dikampus justru harus mampu memberikan sebuah inovasi dan perubahan yang lebih maju bagi dunia Pendidikan. Jangan sampai justru berkah dari teknologi ini tidak menjadi titik balik bagi perubahan kemajuan industri Pendidikan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim berpendapat bahwa ada beberapa hal yang harus dipersiapkan dalam menghadapi perubahan industri 4.0 diantaranya yaitu adalah:

1. Menyajikan system pembelajaran yang lebih inovatif untuk menghasilkan lulusan yang berkompeten dan unggul. Hal ini mengutamakan aspek literasi pengetahuan, wawasan teknologi, pengetahuan refrensi sejarah bangsa-bangsa.

2. Rekonstruksi kebijakan Pendidikan tinggi yang adaptif dan responsif terhadap perkembangan revolusi industri 4.0 dalam mempersiapkan transformasi Pendidikan sesuai dengan kebutuhan zaman.
3. Menghasilkan (SDM) yang unggul dibidangnya agar mampu berkompetisi didunia pekerjaan.
4. Menyediakan infrastruktur dan sarana bagi pengembangan riset,kegiatan organisasi, dan pengembangan skill untuk meningkatkan kualitas mutu Pendidikan.

Dari pendapat mendikbud bahwa era revolusi Iindustri 4.0 ini bukan suatu fenomena yang perlu dikhawatirkan tetapi ini adalah momentum kebangkitan bagi revolusi industry Pendidikan dan pencapaian bagi pembangunan (SDM). Oleh karenanya perguruan tinggi wajib melaksanakan model pembelajaran berbasis teknologi agar mahasiswa dapat menyerap pengetahuan dengan pendekatan teknologi sehingga dunia Pendidikan Indonesia dapat lebih eksis dikancah internasional demi membawa nama baik bangsa.

Berdasarkan uraian tersebut bahwasannya gender merupakan identitas seseorang berupa laki-laki ataupun perempuan dimana mereka memiliki kesetaraan dalam hal kesempatan maupun peluang yang sama sebagai sumber perkembangan khususnya bidang Pendidikan. Kesetaraan merupakan sepadan ataupun setara tanggung jawab pekerjaan yang harus ditunaikan dalam tujuan melakukan sebuah perubahan dan pembangunan. Kesetaraan gender menjadi perhatian sangat vital dalam rangka pembangunan Pendidikan di Indonesia. Maka dapat kita tinjau dari sudut kemampuan wawasan keilmuan, maka dalam hal ini potensi kemampuan mereka dapat dikategorikan sama, sehingga laki-laki dan perempuan dapat dilihat setara. Kalaupun kita Tarik lebih jauh tentang persoalan yang lain misalnya dalam hal jabatan politik, perusahaan, organisasi mereka dapat bersaing secara ideal dan kompetitif dengan catatan mereka beradu dengan gagasan dan visi misi pengetahuan bukan atas dasar kelayakan fisik dan fisiologi. Atas dasar pemahaman tersebut penulis menjelaskan fenomena yang terjadi dimasyarakat, karenanya perempuan selama ini selalu menjadi buah bibir yang dipandang berada dibawah seorang laki-laki. Maka yang ingin saya tekankan

adalah di zaman informasi yang sangat terbuka ini perempuan tidak lagi harus dipandang lemah tidak memiliki intuisi terhadap hal-hal yang bersifat fundamental.

Menurut data riset yang dikeluarkan oleh UNESCO pada tahun 2017, lemahnya tingkat partisipasi pekerja perempuan dibidang industri merupakan ranah pekerja kaum laki-laki yang melibatkan pekerja fisik dan tidak menarik bagi kaum perempuan. Sedangkan kategori jenjang lulusan dari kalangan perempuan masih sangat banyak yang memperoleh gelar di bidang sains, teknologi, kimia Industri, dan lain-lain yang sangat dimungkinkan sulit untuk mendapatkan porsi pekerjaan di undustri yang notabene didominasi oleh laki-laki. Maka dari sinilah tugas dan tanggung jawab kampus perguruan tinggi sangat dituntut untuk menggali potensi skill dari kaum laki-laki dan perempuan untuk dapat dipersiapkan untuk bersaing pada era industri 4.0. Namun tuntutan perempuan tidak hanya sebatas dalam persaingan kerja namun perempuan juga memiliki peran besar untuk berkontribusi dalam tataran sosial seperti mengajar, menjadi sosial *influencing*, tenaga pendidik yang pada intinya untuk mempersiapkan generasi dimasa depan untuk menjadi bibit yang unggul dan memiliki tingkat moral yang tinggi.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2016) tentang penggunaan internet oleh Dosen berdasar gender dan lintas generasi bahwasanya pemakaian internet tidak berpengaruh pada identitas gender melainkan lebih pada faktor lintas generasi. Dengan pernyataan tersebut membuat semua lintas gender memiliki daya akses teknologi yang sama. Dalam penelitian lain juga ditulis oleh Lubis (2019) beliau menjelaskan bahwa intensitas pengaruh teknologi sangat signifikan bagi kalangan gender mahasiswa. karena kebutuhan teknologi dalam dunia Pendidikan sangat penting gunanya sebagai akses pembelajaran kegiatan dikampus. Seperti mengerjakan tugas kuliah, riset, perkuliahan secara dairing dan lain-lain. Berdasarkan uraian penjelasan dari latar belakang diatas peneliti berasumsi bahwasannya perlu dilakukannya penelitian dengan judul “Transformasi Peran Gender bagi Dunia Pendidikan di Era Disrupsi Industri 4.0”.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologis yang bertujuan untuk menggali kebenaran fakta realita dilapangan ataupun dilokasi tempat dimana penelitian itu dilakukan. Oleh sebab itu penelitian ini difokuskan untuk menganalisa terkiat dengan indikator dari banyaknya para gender (Mahasiswa laki-laki dan perempuan).

Penelitian dilakukan di Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) Fakultas ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surabaya. Teknik yang dipakai untuk mendapatkan data menggunakan observasi, kuisisioner dan wawancara secara personal. Subjek penilitian ini adalah orang-orang yang dianggap mengerti tentang subtansi dari project penelitian ini. Kemudian sumber data dalam penelitian ini adalah mahasiswa dan dekan dari fakultas dan ketua jurusan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berikut ini merupakan narasumber yang tergabung dalam penelitian ini dan telah memberikan keterangan data secara rill.

Tabel 1. Profil Sumber Data

<b>No.</b>	<b>Responden (Nama &amp; Semester)</b>	<b>Gender</b>	<b>Status</b>
1.	Mirtha abshari	Perempuan	Mahasiswi
2.	Dony irawan	Laki-laki	Mahasiswa
3.	Endah hendrawati	Perempuan	Dosen/Dekan

Maka dengan dilakukannya wawancara serta observasi penelitian ini menjelaskan tentang beberapa point diantaranya dampak adanya teknologi bagi dunia Pendidikan, Pemahaman tentang penggunaan internet dalam dunia Pendidikan akademik, dan optimalisasi penerapan kurikulum berbasis IPTEK kedalam seluruh program studi.

## **Globalisasi dan tantangan Teknologi bagi Dunia Pendidikan.**

Menghadapi abad ke 21 UNESCO melalui jurnal “*The International Commission On Education for the twenty First*” Merekomendasikan Pendidikan yang berkelanjutan (*knowlage development goal*) seumur hidup yang dilaksanakan berdasarkan empat pilar proses pembelajaran diantaranya yaitu: *Learning to know* (belajar untuk menguasai pengetahuan), *learning to do* (belajar untuk mengetahui keterampilan), *learning to be* (belajar untuk mngembangkan diri) dan *learning to live together* (belajar untuk hidup bermasyarakat). Untuk dapat mewujudkan empat pilar Pendidikan di era Globalisasi informasi sekarang ini, para dosen atau guru sebagai agen pembelajaran perlu menguasai dan menerapkan Teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran (Jamun, 2018).

Menurut Rosenberg (2001) dengan berkembangnya penggunaan TIK ada beberapa pergeseran dalam proses pembelajaran yaitu:

1. Dari ruang kelas sampai dimana pun kita berada.
2. Dari kertas ke inline atau saluran
3. Dari fasilitas fisik ke fasilitas jaringan kerja.

Pengembangan dan penerapan tekhnologi informasi juga bermanfaat untuk Pendidikan diantara lain:

- 1) Muncuknya media massa khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat Pendidikan seperti jaringan internet, lab.komputer dan lain-lain. Sehingga ada dampak yang sangat positif bagi akselerasi kerja Pendidikan dan sumber-sumber pengetahuan sangat mudan dan banyak sekali untuk kita peroleh. Dampak dari hal lain yaitu dosen atau guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber ilmu pengetahuan sehingga murid tidak harus selalu berpaku pada informasi yang disampaikan oleh guru atau dosen. Maka hal yang paling penting yang harus dilakukan guru/dosen saat ini adalah membukakan jalan bagi mahasiswa untuk meluaskan cakrawala berfikirkan mereka lewat system pembelajaran yang berbasis tekhnologi agar mahasiswa dapat membangun daya *critical thinking* mereka sehingga informasi yang nantinya mereka dapatkan akan jauh lebih kaya.

- 2) Munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan mahasiswa dan dosen dalam proses pembelajaran. Dengan kemajuan Teknologi maka terciptalah metode-metode baru atau saya sebut sebagai “*The New Way Of Learning*” cara-cara kebiasaan baru dalam belajar jadi dengan kehadiran Teknologi saat ini mahasiswa tidak lagi menerapkan model pembelajaran yang lama dia harus mendisrupsi dirinya untuk melakukan lompatan jauh dibanding sebelumnya agar para mahasiswa tidak ketinggalan derasnya perkembangan ilmu pengetahuan (Muhammad Elvandi, 2019).
- 3) Menerapkan gagasan atau kurikulum yang ada di setiap lini jurusan untuk mengkaji setiap perkembangan ilmu Teknologi dan menerapkannya ke jenjang mata kuliah yang ada di setiap program studi. Karena di zaman ini Pendidikan yang tidak respon terhadap perkembangan teknologi maka sistem Pendidikan tersebut lambat laun akan relevan. Makanya mahasiswa dan dosen harus berkolaborasi dalam menggalakkan kegiatan-kegiatan yang bersifat interdisipliner.
- 4) Pemenuhan fasilitas Pendidikan di kampus sebagai sarana pembelajaran jelas menjadi syarat mutlak bagi terciptanya akademisi yang memiliki *skill* dibidangnya. Makanya dalam dunia Pendidikan tentu banyak banyak hal dan bahan yang harus dipersiapkan. Termasuk fasilitas yang harus dipenuhi ruang-ruang kelas kampus.

#### **Pemanfaatan Internet dalam Dunia Akademik.**

Rata-rata narasumber dapat menjelaskan terkait apa dan fungsi dari adanya internet itu sendiri didalam dunia Pendidikan. Pada fungsi internet sebagai alat komunikasi dan informasi untuk menyambungkan dari jarak yang terpisah atau jika meminjam istilah sekarang yaitu “*Study from Home*”. Hal ini menjadi penting bagi kalangan Dosen untuk memahami bahwasannya internet sebagai sarana yang sangat mutakhir di era saat ini karena segmentasi belajar saat ini tidak harus dilakukan di ruang kelas melainkan melalui online jarak jauh kegiatan perkuliahan dapat dengan mudah dilaksanakan.

Salah satu responden yaitu EH yang berprofesi sebagai dosen sekaligus dekan memberikan keterangan yang cukup saintifik mengenai bagaimana sebagai orang yang berkecimpung dalam dunia akademik dapat memanfaatkan kemajuan internet ini semaksimal mungkin, sekarang ini sumber bacaan dan refrensi pengetahuan sangat banyak sekali berserakan didunia maya namun alangkah baiknya dalam memahami hal tersebut tidak simplistik artinya semua rujukan yang kita dapatkan harus divalidasi terlebih dahulu. Faktanya masyarakat masih banyak yang menganggap bahwa apa yang didapat dari internet selalu dianggap informasi yang sebenar-benarnya, pengguna internet jarang sekali mengkonfirmasi mengenai kredibilitas dari informasi tersebut.

Senada dengan apa yang disampaikan responden pertama, responden kedua juga memaparkan waspada akan banyaknya informasi yang berkembang yang sifatnya tidak bertanggungjawab atas informasi yang mereka buat. Memang yang terjadi saat ini apabila melihat batasan benar dan salah hampir sulit membedakannya, makanya kembali pada diri masing-masing untuk mengukur tingkat kebenaran dari setiap informasi yang terima. Hal ini juga berdampak fatal apabila kita melakukan riset, menyusun jurnal, menulis karya ilmiah, bahkan tugas akhir apabila kita memasukkan data yang *invalid* maka penelitian tersebut akan sulit dinilai sebagai proyek ilmiah disebabkan sumber yang dicantumkan adalah data-data yang bukan ilmiah. Oleh karena itu, Perguruan Tinggi termasuk bagi dosen kemajuan teknologi menjadi tantangan yang cukup kompleks terutama dalam meminimalisir data-data yang *invalid* pada saat menyampaikan diruangan perkuliahan. Maka satu-satunya yang perlu ditingkatkan adalah budaya literasi membaca agar paradigma mahasiswa dalam memaknai informasi dapat terstruktur dengan baik sehingga informasi *invalid* dapat di minimalisir sedemikian mungkin. Intinya dengan adanya perkembangan teknologi mahasiswa dan dosen harus tetap relevan atau eksis dalam menguasai ilmu pengetahuan karena jika penggunaan internet tersebut tidak disertai dengan literasi dan wawasan yang cukup apalagi kita sebagai kalangan akademik maka akibatnya keberadaan kita bagaikan buih dilautan yang terombang ambing mengikuti arus dan tanpa arah.

### **Pemahaman terhadap Internet dan penerapannya dalam ruang Akademik.**

Berdasarkan hasil obesrvasi yang didapatkan dilapangan bahwa peneliti melihat bahwa Mahasiswa FKIP secara umum semua rata-rata telah memiliki tingkat pemahaman internet yang baik. Namun dari semua para mahasiswa masih ada yang tidak menguasai cara mengoprasikan fitur-fitur baru yang bermunculan dalam *platform* yang ada dalam android kita saat ini. Hal ini tentu menjadi catatan bagi mahasiswa agar terus *update* agar tidak ketinggalan wawasannya terhadap *platform* yang saat ini berkembang berkembang. Apalagi ditambah dengan kegiatan akademik kampus yang berbasis *online*, misalnya dalam pengumpulan tugas lewat *system E-learning* hal ini merupakan bagian dari pengetahuan teknologi yang perlu difahami oleh seluruh mahasiswa termasuk Dosen karena Dosen nantinya akan aktif dalam mendorong jalannya kegiatan akademik yang menggunakan teknologi sebagai tenaga pendukung yang telah disediakan oleh kampus.

Hasil observasi dan wawancara terhadap gender diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa meluasnya perkembangan teknologi menjadi sebab pengaruh terhadap kadar pemahaman gender sampai saat ini, artinya pemahaman gender terhadap internet memiliki kesetaraan dalam memandang tujuan dari penggunaan internet. Selain itu juga dapat mengubah dan menghapus diskrimasi gender permepuan yang selama ini beranggapan bahwa laki-laki selalu memiliki tingkat potensi wawasan yang lebih namun ditengah pesatnya kemajuan teknologi asumsi tersebut dapat terbantahkan.

### **Peran Gender terhadap pengembangan Teknologi bagi Dunia Akademik**

Perkembangan teknologi digital yang begitu cepat dan masif telah mempengaruhi dan mengubah hampir seluruhnya kedalam aspek kehidupan manusia. Bukan hanya dalam hal pengembangan perangkat atau sistem untuk menjalankan transformasi digital tetapi juga dalam mengelola sumber daya alam, ekonomi, bahkan tata kelola disektor pemerintahan juga berbasis digital sistem (Lipi, 2018). Dalam dunia yang berubah sangat cepat sebagian besar pekerjaan dimasa depan akan bergantung pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pekerjaan yang dikerjakan dengan pola lama akan ditinggalkan

dan menjadi fictim bagi perubahan tersebut jika tidak melakukan disruptsi. Maka sebagai gantinya muncul beragam pekerjaan baru yang berbasis pada TIK (Adriana, 2009) Dukungan perangkat cerdas dan teknologi saat ini menjadi peluang pasar yang sangat luas untuk mendapatkan kesempatan peluang kerja sehingga pekerjaan hari ini sangat fleksibel yaitu pekerjaan dari jarak jauh ataupun yang bisa dilakukan dirumah. Seperti halnya sekarang dimasa pandemi semua pekerjaan hampir seluruhnya dilakukan secara online dairing dirumah masing-masing tanpa harus keluar pergi ketempat kerja. Hal ini jelas perkembangan teknologi membawa impect yang sangat luar biasa bagi kehidupan manusia.

Menurut Utami (2019) dalam UN Women dalam dunia yang maju pesat ini 90% pekerjaan dimasa depan akan menggunakan keterampilan teknologi, informasi, dan komunikasi. Pekerjaan dengan cara lama akan berganti dengan berbasis teknologi informasi. Tidak dapat dipungkiri perempuan memegang peranan yang signifikan dalam era ini. Oleh karena itu ini merupakan sebuah tantangan bagi kampus untuk memperbarui sistem pendidikan yang selama ini diterapkan agar kampus dapat menjadi bagian dari Pusat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang siap untuk bersaing di era disruptsi Industri 4.0, memang hal ini menjadi tantangan yang cukup berat namun mau tidak mau seluruh kampus di Indonesia perlu mendisrupsi dirinya baik dari sisi kualitas SDM ataupun tatanan system pembelajaran yang ada (Megahantara, 2016).

Bagi peran gender tantangan teknologi Industri 4.0 merupakan peran yang sangat strategis untuk mengembangkan SDM dan menciptakan industry Pendidikan yang mengakomodasi seluruh kurikulum berbasis IPTEK secara terstruktur. Sehingga prioritas yang harus dilakukan adalah mengubah *mindset* para mahasiswa untuk memiliki kesadaran dalam membangun literasi digital teknologi, menajamkan *kritical thingking* mahasiswa/I terhadap isu-isu kontemporer, dan menerapkan pembiasaan *riset ilmiah berbasis science* teknologi. Oleh karena itu kesadaran literasi ini memang harus segera dicanangkan melalui system Pendidikan yang mengakar kesemua lini agar sesegera mungkin masyarakat Indonesia kedepannya dapat menghadapi tantangan

diera sekarang ini dengan penuh persiapan yang jauh lebih matang dan berkualitas, karenauforia perbincangan soal industri 4.0 ini tidak hanya menjadi obrolan belaka melainkan menjadi power dan dorongan bagi kita dalam menyikapinya dengan penuh persiapan yang baik.

## **SIMPULAN**

Sebuah Gagasan “Kampus merdeka” tentu ini adalah sebuah konsepsi baru yang diusulkan oleh mendikbud sehingga hal ini menjadi sebuah penegasan bagi kalangan gender agar semakin memiliki kesadaran dalam melihat tantangan yang semakin kompetitif bagi semua sektor baik itu ekonomi, politik, sosial bahkan terkait dengan pendidikan sekalipun. agar gagasan kampus merdeka, Industri 4.0 dan sebagainya ini benar-benar dapat teralisasi dan tidak hanya menjadi sebuah jargon maka yang perlu dilakukan adalah mengubah *mindset* lama yang mungkin selama ini kita masih stagnan dalam proses-proses pembelajaran oleh sebab itu kita perlu yang namanya *shifting* menciptakan pola-pola pembelajaran yang baru agar lebih adaptif terhadap tuntutan zaman.

## **REFERENSI**

- Adriana, I. (2009). Kurikulum berbasis gender (membangun pendidikan yang berkesetaraan). *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1).
- Friedman, T. L. (2014). It’s a Flat World, After All (2005). *The globalization and development reader: perspectives on development and global change*, 263.
- Jamun, Y. M. (2018). Dampak teknologi terhadap pendidikan. *Unikas Paulus*, 3. Retrieved from <http://jurnal.unikastpaulus.ac.id/index.php/jpkm/article/view/54/40>
- Kusuma, R. S. (2016). Penggunaan internet oleh dosen berdasar gender.
- Lipi, A. (2018). *Gender dalam ilmu pengetahuan dan teknologi*. Jln. R.P.Soeroso No 39, Menteng, Jakarta 10350: Lipi Press, Anggota Ikapi.
- Lubis, M. A. (2016). Gender dan revolusi industri 4.0 dalam pendidikan. 2. Retrieved from <file:///C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/jurnal%20gender-1.pdf>

- Megahantara, G. S. (2017). Pengaruh teknologi terhadap pendidikan di abad 21. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Muhammad Elvandi, L. (2019). *Sang pemuda*. Bandung: Muda Press.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012, Tentang Pendidikan Perguruan Tinggi*.
- Rosenberg, M. J. (2001). E-learning: estrategias para transmitir conocimiento en la era digital.
- Utami, S. (2019). Eksistensi perkembangan perekonomian perempuan di era digitalisasi. *AN-NISA: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 12(1), 596-609.

# Pendidikan Karakter Melalui Pembelajaran PKn di Masa Pandemi Covid-19 Demi Masyarakat Taat PSBB

<sup>1</sup>Muhammad Mona Adha, <sup>2</sup>Hario Parakesit, <sup>3</sup>Dayu Rika Perdana, <sup>4</sup>Ahman Tosy Hartino, <sup>5</sup>Eska Prawisudawati Ulpa  
[mohammad.monaadha@fkip.unila.ac.id](mailto:mohammad.monaadha@fkip.unila.ac.id)

## Abstrak

Pandemi Covid-19 memberikan banyak imbas bagi segala aspek kehidupan. Setiap negara dalam seluruh dunia berlomba-lomba mencari jalan tengah untuk menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi. Berbagai kebijakan diterapkan demi menyelamatkan masyarakat namun dengan tidak juga memberikan kerugian bagi negara. Salah satu kebijakan tersebut adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan pemerintah Indonesia. Namun tidak sedikit pula masyarakat yang tidak mau menaati kebijakan tersebut dengan alasan tertentu, oleh sebab itu dibutuhkan Pendidikan karakter melalui pembelajaran PKn yang diharapkan mampu menekan dan mengubah persepsi masyarakat sehingga mau turut berpartisipasi dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Tujuan penelitian ini untuk mencari jalan tengah dan memberikan pemahaman tentang pentingnya Pendidikan karakter dalam masa pandemi melalui pembelajaran PKn demi terwujudnya masyarakat mawas diri yang partisipatif dengan kebijakan PSBB yang digaungkan pemerintah. Metode yang digunakan adalah metode studi literatur dengan pendekatan kepustakaan dimana pengolahan data diperoleh dengan studi kasus sejenis yang kemudian dilakukan perbandingan serta diberikan interpretasi sesuai dengan tema dan topik yang dibahas. Hasilnya terdapat beberapa bahasan seperti mengenai PSBB, urgensi ketaatan, dan peran pendidikan karakter. Kesimpulan yang didapat adalah dengan menamakan Pendidikan karakter melalui pembelajaran PKn baik secara daring maupun secara langsung adalah suatu hal yang sangat penting demi menyelamatkan nasib bangsa Indonesia dari ketidakpedulian terhadap kebijakan pemerintah dan turut mendukung usaha penyelesaian Covid-19 yang menjadi momok menakutkan seluruh bangsa.

**Kata Kunci:** Covid-19; Pendidikan Karakter; Pembelajaran PKn, *Social Distancing*

## PENDAHULUAN

Penyebaran Covid-19 sebagai sebuah penyakit baru yang muncul sejak bulan Desember 2019 mulai menjadi momok menakutkan bagi banyak negara. Sebab penyebarannya sudah dianggap sebagai pandemi akibat jangkauan penyebarannya hampir menyeluruh kepada seluruh negara di dunia. Penyakit ini berawal dari sebuah kota di China yang diduga berasal dari pasar bebas atau pasar alam di Kota Wuhan yang menjual makanan ekstrem dan tidak biasa. Penyakit ini menyerang pernapasan dan telah banyak merenggut korban jiwa bagi para terdampak Covid-19. Hal yang membuat penyebaran Covid-19 ini begitu menakutkan adalah belum tersedianya vaksin untuk mengobati jenis penyakit baru ini, dan juga cara penyebarannya yang tergolong mudah. Covid-19 dapat menyebar melalui droplet, berjabat tangan, bahkan melalui benda mati. Virus

Corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian (Ombudsman, 2020).

Pandemi Covid-19 sudah mulai memasuki dan bahkan telah menyebar pesat di Indonesia dengan tingkat penyebaran dan jumlah pasien terdampak yang semakin hari semakin meningkat. Indonesia juga merupakan negara yang juga memiliki kasus terdampak Covid yang cukup tinggi. Sementara Indonesia berada di peringkat ke-17 dunia dan kedua di Asia (Tribunstyle.com, 2020). Covid-19, membawa dampak pada sektor pendidikan, dimana mengharuskan pembelajaran dilakukan secara daring. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang menggunakan jaringan internet dengan aksesibilitas, konektivitas, fleksibilitas, dan kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran (Ali & Afreni, 2020). Pembelajaran secara daring telah menjadi tuntutan dunia pendidikan sejak beberapa tahun terakhir (He, Xu, & Kruck, 2014). Sehingga, pada keadaan seperti ini menjadi sebuah momentum untuk mengimplementasikan pembelajaran daring tersebut.

Setiap negara memiliki kebijakan masing-masing dalam mengatasi dan menanggulangi Pandemi Covid-19, salah satu negara tersebut adalah Indonesia. Pemerintah menyatakan bahwa Pandemi Covid-19 merupakan bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional. Perjuangan Indonesia dalam melawan Pandemi ini menggunakan usaha modifikasi kebijakan karantina wilayah atau *lockdown* menjadi suatu kebijakan yang sejenis namun berbeda, yakni kebijakan PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar yang diterapkan sesuai dengan wilayah daerah masing-masing dan merupakan kebijakan lokal daerah berdasarkan instrumen dan persetujuan dari Kemenkes selaku pemerintahan pusat dengan menerbitkan Permenkes Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19 yang merupakan kelanjutan dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Mengetahui bahwa penyakit atau wabah ini ternilai cukup mematikan dengan rata-rata kematian sebesar 5% dari total pasien yang tercatat terdampak Covid-19. Kemudian belum terdapatnya vaksin yang terbukti mumpuni untuk menyembuhkan penyakit ini semakin mempersulit penghentian bertambahnya kasus terdampak Covid-19. Satu-satunya jalan terbaik dalam kondisi pandemi ini hanyalah menggunakan cara pencegahan yang diupayakan untuk melindungi setiap orang (Muhyiddin, 2020).

Selain itu, seperti yang telah dipaparkan di atas, Indonesia juga menerapkan sistem Pembatasan Sosial Berskala Besar atau merupakan sistem terapan dari *lockdown* yang dilakukan oleh beberapa negara di dunia. Dengan semakin banyaknya jumlah pasien yang terdampak Covid-19 tentunya akan memaksa PSBB diberlangsungkan semakin lama. Meskipun agenda *New Normal* sudah diterapkan, nyatanya tingkat penularan malah semakin banyak, sehingga tekanan untuk melanggengkan PSBB atau karantina wilayah semakin meningkat. Tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat penyebaran virus Covid-19 tentunya sangat dipengaruhi oleh kepekaan dan kepedulian masyarakat terhadap himbauan yang telah diberikan oleh pemerintah. Karakter disiplin, dalam hal ini sangatlah dibutuhkan sekali. Menurut Sobri, dkk. (2019) disiplin merupakan salah satu nilai karakter yang perlu dikembangkan. Artinya, dikembangkan kepada arah yang lebih baik lagi. Sedangkan, karakter adalah kumpulan fitur dan sifat yang membentuk batin individu yang memengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, tabiat yang dimiliki manusia atau makhluk hidup lainnya (Suradi, 2017). Menurut Gunawan (2012: 30) menyatakan pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi, pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila. Konsentrasi, dalam hal ini bagaimana pendidikan karakter dapat terwujud dengan menaati aturan-aturan yang berlaku sebagai bentuk tanggungjawab warga negara. Sebab, tanggung jawab (*civic responsibility*) merupakan salah satu karakter. Warga negara yang bertanggung jawab berupaya secara maksimal dalam melaksanakan dan

menggunakan hak serta kewajiban sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku (Syaifullah, 2008: 46).

Pada keadaan yang mendesak ini, diperlukan koordinasi dan kerja sama yang baik antara masyarakat dengan pemerintah untuk sama-sama menekan tingkat penyebaran dari virus agar pandemi cepat berakhir. Salah satu hal yang dapat mendorong koordinasi tersebut adalah kesadaran diri masyarakat akan pentingnya menaati prosedur kesehatan yang dianjurkan pemerintah, dan salah satu cara untuk membangkitkan kesadaran tersebut adalah dibutuhkannya Pendidikan dan pola pembelajaran ppkn agar menjadi warga masyarakat yang baik dalam lingkup kehidupan bangsa dan negara. Winataputra dan Budimansyah (2012) memandang ada tiga domain PKn yaitu domain kurikuler, domain sosiokultural, dan domain kajian ilmiah ketiga domain itu saling keterkaitan satu sama lainnya. Melalui pendidikan kewarganegaraan dapat memberikan kemampuan dalam berdemokrasi sekaligus memiliki nilai-nilai yang baik bagi kehidupan sosial warga masyarakat, siswa pada khususnya (Adha, 2015). Artinya, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bersikap demokratis sebagaimana mestinya.

Melihat pentingnya peran masyarakat dalam pelaksanaan PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar demi menekan angka penyebaran virus Covid-19 dan menyelesaikan pandemi dengan cepat (Putri, 2020). Maka tulisan ini akan menguraikan tentang pentingnya pembelajaran PKn terhadap tingkat kesadaran masyarakat dalam menaati himbuan pemerintah terhadap aturan PSBB dan prosedur kesehatan lainnya.

## **METODE**

Metode yang digunakan adalah metode studi literatur dengan pendekatan kepustakaan. Analisis data yang digunakan pada penelitian kali ini adalah analisis diskriptif. Penelitian menggunakan literatur kepustakaan tanpa melakukan penelitian lapangan. Namun didukung dengan bacaan terkait, jurnal serta penelitian sejenis terdahulu. Penelitian kepustakaan dapat diartikan sebagai kegiatan terencana yang berkaitan dengan pengumpulan data yang digunakan

untuk tujuan penelitian dan perpustakaan dengan membaca, mencatat, serta mengelola bahan yang telah disiapkan sebelumnya demi mendukung penelitian yang ingin dilakukan. (Zed, 2004, p. 14). Data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya karena data telah melalui proses penyederhanaan dan tahap penyesuaian klausalitas yang dibutuhkan. Analisis data yang dilakukan dengan induktif. Tahap yang dilakukan adalah reduksi data dan penyajian data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar**

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah sebuah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona virus Disease 2019* (COVID-19). Pembatasan Sosial Berskala Besar atau disingkat PSBB merupakan sebuah bentuk aksi atau tindakan pembatasan kegiatan tertentu bagi penduduk dalam suatu wilayah yang diduga wilayah tersebut ada orang yang terindikasi terinfeksi atau terpapar *Corona Virus Disease 2019* atau yang biasa disebut (COVID-19). Upaya ini dilakukan pemerintah demi mencegah kemungkinan penyebaran virus tersebut kepada orang lain dan mengancam keselamatan warga masyarakat Indonesia. Kebijakan ini berlandaskan pada pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yang berbunyi:

*“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum...”*

Dari penggalan alinea tersebut dapat dimaknai bahwa negara harus melindungi segenap bangsa Indonesia yang mana merupakan warga masyarakat Indonesia melalui penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan alasan keselamatan dan keamanan warga Indonesia dari merebaknya Covid-19 yang telah diakui sebagai Bencana Non Alam di Indonesia dan menjadi pandemi yang meresahkan seluruh negara di dunia.

Pembatasan Sosial Berskala Besar ini dibuat dengan berdasarkan pada beberapa regulasi dasar, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun

1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaa Kesehatan.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984: *“Maksud dan tujuan Undang-Undang ini adalah untuk melindungi penduduk dari malapetaka yang ditimbulkan wabah sedini mungkin, dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat.”* Bunyi dari pasal tersebut dapat dijadikan alasan mendasar dari tujuan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang diberlakukan oleh pemerintah pusat yang mana merupakan dengan tujuan untuk melindungi warga masyarakat dari wabah atau pandemi yang dikategorikan berbahaya dan sudah masuk kategori global ini.

Kemudian pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 yang menyebutkan:

(1) Upaya penanggulangan wabah meliputi:

- a) Penyelidikan epidemiologis;
- b) Pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;
- c) Pencegahan dan pengebalan;
- d) Pemusnahan penyebab penyakit;
- e) Penanganan jenazah akibat wabah;
- f) Penyuluhan kepada masyarakat;
- g) Upaya penanggulangan lainnya.

Berdasarkan beberapa poin tersebut, dapat dijadikan gambaran langkah-langkah yang diupayakan pemerintah dalam program atau tindakan PSBB ini yang telah disesuaikan dengan regulasi terdahulu untuk penanggulangan sebuah wabah.

Untuk tujuan penanggulangan bencana dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a) Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b) Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;

- c) Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- d) Menghargai budaya lokal;
- e) Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f) Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- g) Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pembatasan Sosial Berskala Besar didasarkan dari undang-undang dengan satu tujuan yang sama, yaitu untuk keselamatan masyarakat dari bahaya bencana dan pandemi yang sedang mewabah di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, peraturan tentang adanya PSBB dan mengikuti protokol serta standar kesehatan ini berlaku untuk seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali bagi pemerintah itu sendiri.

Selain Undang-Undang yang telah dipaparkan di atas terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar diatur pula secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Pada penerapannya, PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar ini memiliki beberapa kriteria berikut:

- a. Jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meninggal dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan
- b. Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah sebuah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat melalui Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Pembatasan Sosial Berskala Besar atau disingkat PSBB merupakan sebuah bentuk aksi atau tindakan pembatasan kegiatan tertentu bagi penduduk dalam suatu wilayah yang diduga wilayah tersebut ada orang yang terindikasi terinfeksi atau terpapar *Corona Virus Disease* 2019 atau yang biasa disebut (COVID-19). Upaya ini dilakukan pemerintah demi

mencegah kemungkinan penyebaran virus tersebut kepada orang lain dan mengancam keselamatan warga masyarakat Indonesia. Kebijakan ini berlandaskan pada pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yang berbunyi:

*“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum...”*

Dari penggalan alinea tersebut dapat dimaknai bahwa negara harus melindungi segenap bangsa Indonesia yang mana merupakan warga masyarakat Indonesia melalui penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan alasan keselamatan dan keamanan warga Indonesia dari merebaknya Covid-19 yang telah diakui sebagai Bencana Non Alam di Indonesia dan menjadi pandemi yang meresahkan seluruh negara di dunia.

Pembatasan Sosial Berskala Besar ini dibuat dengan berdasarkan pada beberapa regulasi dasar, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984:

*“Maksud dan tujuan Undang-Undang ini adalah untuk melindungi penduduk dari malapetaka yang ditimbulkan wabah sedini mungkin, dalma rangka meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat”*. Bunyi dari pasal tersebut dapat dijadikan alasan mendasar dari tujuan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang diberlakukan oleh pemerintah pusat yang mana merupakan dengan tujuan untuk melindungi warga masyarakat dari wabah atau pandemi yang dikategorikan berbahaya dan sudah masuk kategori global ini.

Kemudian pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 1984 yang menyebutkan:

(1) Upaya penanggulangan wabah meliputi:

- a. Penyelidikan epidemiologis;
- b. Pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;
- c. Pencegahan dan pengebalan;

- d. Pemusnahan penyebab penyakit;
- e. Penanganan jenazah akibat wabah;
- f. Penyuluhan kepada masyarakat;
- g. Upaya penanggulangan lainnya.

Berdasarkan beberapa poin tersebut, dapat dijadikan gambaran langkah-langkah yang diupayakan pemerintah dalam program atau tindakan PSBB ini yang telah disesuaikan dengan regulasi terdahulu untuk penanggulangan sebuah wabah. Untuk tujuan penanggulangan bencana dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Penanggulangan bencana bertujuan untuk:

- a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- c. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- d. Menghargai budaya lokal;
- e. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. Mendorong semangatgotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- g. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pembatasan Sosial Berskala Besar didasarkan dari Undang-Undang dengan satu tujuan yang sama, yaitu untuk keselamatan masyarakat dari bahaya bencana dan pandemi yang sedang mewabah di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, peraturan tentang adanya PSBB dan mengikuti protokol serta standar kesehatan ini berlaku untuk seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali bagi pemerintah itu sendiri.

Selain Undang-Undang yang telah dipaparkan di atas terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar diatur pula secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Pada

penerapannya, PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar ini memiliki beberapa kriteria berikut:

- a. Jumlah kasus dan/atau jumlah kematian akibat penyakit meninggal dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah; dan
- b. Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.

Pada prakteknya, Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah suatu kebijakan yang cukup tepat untuk diterapkan di Indonesia. Efektifitas ini juga dilakukan oleh pemerintahan Korea Selatan yang juga lebih memilih untuk menerapkan PSBB dibandingkan dengan *lockdown* dan telah melaksanakannya sejak 20 Januari lalu. Berkaca dari negara tersebut, Indonesia mencontoh dengan menerapkan kiat-kiat menjaga jarak setidaknya dua meter saling berjauhan satu sama lain dalam kegiatan apapun. Seperti mengantri, berpapasan atau melakukan aktifitas apapun terlebih di ruangan yang ramai orang, namun urgensi dari penerapan PSBB ini adalah melakukan pembatasan orang yang berada di publik dengan menghindari keramaian, dan membatasi orang lain untuk pergi keluar rumah apabila tidak ada sesuatu yang sangat penting seperti membeli kebutuhan pangan.

Pembatasan Sosial Berskala Besar hampir meliputi seluruh aspek, diantaranya adalah peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan dan atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus yang berbunyi:

*“pembatasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memerhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk”.*

Hal tersebut dimaksudkan ketika pemerintah telah menerapkan kebijakan PSBB, maka pemerintah tidak juga lepas tangan dan tidak memperhatikan masyarakatnya. Sebab dengan diterapkannya PSBB tentu akan memengaruhi tatanan kehidupan masyarakat, terlebih dalam hal perekonomian. Oleh sebab itu,

pemerintah juga memperhatikan untuk tetap melakukan pemenuhan kebutuhan hidup dasar masyarakatnya.

Dengan demikian, untuk memenuhi ketersediaan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakatnya, pemerintah menerapkan enam paket kebijakan yang dapat membantu masyarakat untuk tetap tercukupi kebutuhan hariannya, terlebih bagi masyarakat yang terkena imbas buruk dari adanya penerapan PSBB. Sehingga alasan masyarakat untuk tetap keluar rumah selama pandemi demi mencari dan memenuhi kebutuhan hidup dapat ditekan dan diminimalisir. Diantara keenam kebijakan tersebut antara lain:

- 1) Penerima bantuan Program Keluarga Harapan atau PKH naik dari 9,2 juta menjadi 10 juta keluarga dengan besaran dana yang naik 25%.
- 2) Menaikkan jumlah penerima Kartu Sembako dari 15,2 juta menjadi 20 juta penerima manfaat. Nilai bantuannya juga naik dari Rp 150 ribu menjadi Rp 200 ribu. Kebijakan ini akan diberikan selama sembilan bulan.
- 3) Kebijakan kartu prakerja anggarannya dinaikkan dari Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun, dengan jumlah penerima 5,6 juta orang. Kebijakan diutamakan untuk pekerja informal dan pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak COVID-19. Nilai yang diberikan Rp 650-RP 1 juta perbulan selama empat bulan ke depan.
- 4) Pemerintah menggratiskan listrik untuk pengguna 450 VA yang jumlahnya sampai 24 juta pelanggan. Kebijakan ini berlaku selama tiga bulan ke depan terhitung sejak April-Juni 2020. Sedangkan untuk pelanggan 900 VA yang jumlahnya sekitar tujuh juta pelanggan mendapatkan diskon 50%.
- 5) Pemerintah telah mencadangkan Rp 25 triliun untuk pemenuhan kebutuhan pokok, operasi pasar, dan logistik.
- 6) Pemerintah memastikan keringanan pembayaran kredit bagi pekerja infromal tetap berlaku. Pekerja infromal yang dimaksud seperti ojek daring, sopir taksi, pelaku UMKM, nelayan, dan lain-lain dengan penghasilan harian dan kredit dibawah Rp 10 miliar (Imas Novita Juaningsih, 2020).

### **Urgensi Ketaatan Masyarakat terhadap Pembatasan Sosial Berskala Besar**

Kebijakan PSBB yang diberlakukan oleh pemerintahan pusat dianggap lebih baik daripada menerapkan *lockdown* yang dianggap dapat mematikan berbagai sector ekonomi dan dianggap terlalu berisiko bila diterapkan di Indonesia, sehingga pemerintah pusat lebih memilih untuk menerapkan karantina wilayah sebagai suatu bentuk untuk menekan penyebaran mata rantai virus Covid-19 dengan dibarengi oleh prosedur kesehatan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bagi para pekerja sendiri diberlakukan *Work From Home* yang memaksa para pegawai atau pekerja untuk tetap bekerja di rumah masing-masing. Prosedur pekerjaan mereka disesuaikan dengan instansi masing-masing dan memanfaatkan teknologi yang ada untuk tetap dapat produktif meskipun hanya di rumah saja.

Untuk para pelajar pun tetap menjalankan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran secara daring demi tetap mendapatkan pendidikan selama masa pandemik (Baroroh, 2020; Santika, 2020). Meskipun dianggap kurang efektif namun koordinasi antara tenaga pendidik dengan para pelajar sangat dibutuhkan di sini, agar tidak ada ilmu dan waktu yang terbuang sia-sia selama pandemi masih berlangsung dan menghambat segala aspek kehidupan.

Namun, saat ini kenyataan yang terjadi di lapangan terdapat banyak masyarakat yang tidak mendengarkan anjuran pemerintah. Hal ini bukan tanpa alasan melainkan suatu keadaan yang memaksa mereka untuk tidak berdiam diri di rumah, salah satunya karena di Indonesia sendiri begitu banyak masyarakat yang pekerjaannya tidak menetap di rumah, seperti para pekerja lapangan, pedagang kaki lima, maupun pemilik usaha mikro dan UMKM lainnya. Meskipun pemerintah telah menetapkan 6 paket antisipasi masalah ekonomi, namun hal tersebut masih dirasa kurang dan tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup yang dibutuhkan sehari-hari warga masyarakatnya.

Selain dari segi ekonomi, masyarakat pun kerap melanggar PSBB dengan alasan ingin menjalankan ibadah di rumah ibadah mereka, padahal pemerintah dan Lembaga keagamaan setempat telah menghimbau untuk tetap beribadah di rumah saja sebab hal tersebut lebih baik demi alasan keselamatan dan kesehatan. Tak

terkecuali himbauan MUI dan Kementerian Agama yang mengharuskan ibadah di rumah saja. Namun, anomali pun terjadi, sebagian orang memaksa mengabaikan himbauan pemerintah dan MUI dengan berbagai alasan, termasuk ketika himbauan ibadah tidak dilakukan di masjid. Beberapa lapisan masyarakat menganggap hal tersebut tidak islami.

Salah satu hal yang paling berisiko dari semua problematika yang telah dijabarkan di atas adalah, setelah melewati lebih dari 6 bulan masa-masa karantina wilayah atau PSBB yang diterapkan, masyarakat mulai mempertanyakan eksistensi dari pandemi Covid-19 itu sendiri. Banyak masyarakat yang mulai melakukan propaganda bahwa Covid-19 itu sebetulnya tidak pernah ada dan hanyalah buatan pemerintah demi tujuan tertentu dengan segala teori konspirasi yang beredar dikalangan pengguna sosial media. Dengan memegang kepercayaan atas dalih tersebut, tidak sedikit masyarakat yang mulai meninggalkan kepatuhan mereka atas himbauan pemerintah untuk melaksanakan prosedur kesehatan dan melakukan *social distancing* sebagaimana yang diserukan pemerintah pusat untuk segera mengakhiri pandemi ini.

Dengan ketidaktaatan masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan ini secara tidak langsung makin memperlambat proses penyelesaian dan pemutusan mata rantai Covid-19 itu sendiri. Meskipun pemerintah telah melakukan segala cara dengan harapan dapat mempercepat pulihnya Indonesia dari bencana nonalam Covid-19 namun tanpa adanya partisipasi dari masyarakat maka segala jenis program terbaik pun tentu saja tidak akan berhasil. Dalam hal ini sangat diperlukan kesadaran diri masyarakat dalam menaati segala jenis himbauan yang diberikan oleh pemerintah dan mempercayakan kepada pemerintah dalam mencari solusi perihal masalah-masalah yang timbul selama pandemi ini, tentu saja dengan disertai usaha oleh para warga masyarakat agar koordinasi vertikal antara masyarakat dengan negara dapat terwujud dan terselenggara dengan baik (Ardhana, 2020). Dalam hal ini, nilai-nilai Pancasila sangat berperan penting dalam mengatur masyarakat kita. Hal ini dapat ditunjukkan dengan adanya keharmonisan kehidupan yang dibangun dalam kebersamaan, saling menyayangi, memiliki rasa persaudaraan yang tinggi, dan konsep gotong royong yang tidak

pernah dilupakan dan ditinggalkan oleh masyarakat Indonesia (Adha & Susanto, 2020). Sehingga, harapan kita sama yakni menginginkan masyarakat yang patuh taat atura dalam hal ini PSBB.

Untuk itu dalam hal ini dibutuhkan pembelajaran PKN yang dianggap mampu membentuk karakter dan kepribadian yang baik untuk para warga masyarakat Indonesia agar mau menaati protokol kesehatan dan PSBB yang diterapkan oleh pemerintahan pusat demi menekan angka penyebaran Covid-19. Melalui pendidikan kewarganegaraan dapat memberikan kemampuan dalam berdemokrasi sekaligus memiliki nilai-nilai yang baik bagi kehidupan sosial warga masyarakat, siswa pada khususnya (Adha, 2015). Pendidikan kewarganegaraan bukan sekedar menjadi mata pelajaran saja, melainkan harus memiliki sebuah dampak positif bagi kehidupan, karena menyangkut nilai-nilai bermasyarakat dan menyangkut hak dan kewajiban.

### **Peran Pendidikan Karakter dalam Upaya Pembatasan Sosial Berskala Besar**

Pendidikan karakter adalah suatu hal yang mutlak harus dilaksanakan karena pada dasarnya setiap orang haruslah menjadi pribadi yang berkarakter, dan juga berperilaku baik bagi bangsa dan negaranya. Tidak serta merta pendidikan karakter menjadi tanggungjawab dari pendidikan moral atau budi pekerti dan pendidikan Pancasila saja (Santika, 2019), melainkan menjadi tanggung jawab semua bidang studi.

Oleh karena itu penguatan pendidikan karakter dalam suatu proses pembelajaran, saat ini sangat penting untuk mengatasi kondisi permasalahan krisis moral yang terjadi di negara Indonesia (Zubaedi, 2011:1; Adha& Yunisca, 2016). Artinya bahwa berbagai macam permasalahan yang ada di masyarakat dapat kita atasi dengan pendidikan karakter. Sementara itu, Secara khusus di dalam mata pelajaran PPKn dapat mengaplikasikan project citizen sebagai bentuk memperkuat interaksi dan karakter siswa (Adha et al., 2019), sehingga di dalam bisa saling berkomunikasi dan memahami satu sama lainnya.

Sebab satu bidang studi seperti PKN saja tentu tidak akan seefisien bila semua bidang studi menyisipkan pemahaman tentang menjadi pribadi yang berkarakter dan berintegritas. Terlebih lagi berdasarkan cara pandang dalam

perspektif kajian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, upaya pembentukan seorang warga negara yang berkarakter khususnya sebagai warga negara muda Indonesia adalah sesuatu yang sangat penting (Adha et al., 2017; Adha et al., 2019b). Karakter penting adanya untuk membentuk masyarakat memiliki ciri khas dalam kesehariannya.

Pelaksanaan pendidikan karakter, tidak cukup dilakukan dengan mengajarkan sesuatu yang benar dan salah, tetapi juga membentuk kebiasaan berdasarkan contoh-contoh langsung pada peserta didik, agar timbul rasa kepedulian, kesadaran, dan pemahaman yang tinggi dalam penerapan di kehidupan sehari-hari (Mulyasa, 2013; Adha, et. al., 2019a; Adha, et. al., 2019b). Artinya bahwa pendidikan karakter tidak hanya belajar teori saja melainkan harus ada prakteknya agar peserta didik merasa paham dan tidak bingung.

Pengembangan nilai karakter dan pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari merupakan hal utama yang dikedepankan (Adha, 2020). Sebab, jika nilai karakter hanya berdiam diri saja tidak dikembangkan atau dilaksanakan, maka bisa dipastikan negara tersebut akan tidak bisa mencapai tujuan negaranya yang diharapkan, sebab sumber daya manusianya masih terus diolah dalam hal nilai kehidupan.

Karakter adalah jiwa yang melekat pada watak seseorang, atau ahlak yang diperoleh dari hasil proses internalisasi dengan lingkungannya selama bertahun-tahun hingga akhirnya membentuk kepribadian yang tetap. Karakter seseorang akan menjadi baik apabila didasarkan dengan nilai-nilai moral dan etika yang berlaku, diterima dan disepakati di masyarakat (Terry & Ron, 2007). Menekankan pentingnya tiga komponen karakter yang baik (*components of good character*) terdiri atas, yaitu: *moral knowing* atau pengetahuan tentang moral, *moral feeling* atau perasaan tentang moral, dan *moral action* atau perbuatan moral (Lickona, 1992). Karakter yang baik akan muncul setelah ketiga komponen karakter tersebut bisa terpenuhi.

Dalam pendidikan karakter, terdapat tiga fungsi utama. Diantaranya adalah, pertama, berfungsi sebagai pembentuk dan pengembangan potensi seseorang. Hadirnya Pendidikan karakter akan membentuk potensi seseorang agar

berpikiran positif, berperilaku baik dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai luhur yang lahir dari masyarakat. Kedua, fungsi perbaikan moral dan penguatan diri. Pendidikan karakter dapat memperbaiki juga dapat memperkuat keterikatan dan memaksimalkan peran masyarakat, satuan Pendidikan, keluarga maupun secara perorangan dalam hal partisipasi dan merasa bertanggung jawab dalam pengembangan negara dan pembangunan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mandiri, maju serta sejahtera. Ketiga, adalah fungsi penyaring. Pendidikan karakter berfungsi menyaring dan memilah budaya bangsa lain yang masuk melalui globalisasi dan modernisasi, Hal-hal positif yang masuk tersebut akan disaring dan diterapkan namun hal-hal positif yang tidak bersesuaian dengan kaidah Pancasila harus ditinggalkan demi membentuk suatu karakter bangsa yang bermartabat. (Zuchdi, 2010) Dengan demikian dibutuhkan koordinasi antar komponen pendidikan baik formal, informal dan juga komponen non formal.

Akin (1995) menjelaskan bahwa ada sekitar empat alasan mengapa Indonesia sangat membutuhkan pendidikan karakter, antara lain:

1. Karena banyak keluarga (tradisional maupun non tradisional) yang kurang maksimal dalam memberikan pendidikan karakter;
2. Karena peran sekolah tidak hanya bertujuan membentuk anak yang cerdas, tetapi juga anak yang baik;
3. Kecerdasan seorang anak hanya bermakna manakala dilandasi dengan kebaikan;
4. Karena membentuk anak didik agar berkarakter tangguh bukan hanya sekadar tugas tambahan bagi guru, melainkan tanggung jawab yang melekat pada perannya sebagai guru

Salah satu alasan mengapa masyarakat tidak mau menaati peraturan yang diterapkan pemerintah mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar adalah karena kurangnya kesadaran diri akan pentingnya mematuhi perintah dari pemerintah pusat. Hal ini bisa diselesaikan dengan cara pendalaman pendidikan karakter yang dapat dilakukan melalui pembelajaran PKn.

PKn memberikan pembelajaran mengenai karakter diri dengan melalui berbagai aspek, diantaranya adalah aspek politis dan aspek sosiologis. Dalam hal

ini yang dimaksudkan dengan aspek politis adalah ketika para pelajar usia muda tersebut mau menaati perintah dari atasan mereka yang mana dalam hal ini adalah pemerintah. Baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah sebagai pusat kendali yang memegang unsur politis dalam masyarakat (Kemenkeu, 2020). Dengan mempercayakan diri terhadap pemerintah berarti elemen masyarakat tersebut telah memenuhi Pendidikan karakter lewat aspek politis.

Selain itu adalah aspek sosiologis dimana pendidikan karakter tersebut dibawa melalui pembelajaran dari tenaga pengajar kepada pembelajarnya. Aspek sosiologis lebih mudah diterima dibanding dengan aspek politis karena hubungan vertikal antara pelajar sebagai subjek penelitian di sini tidak terjalin secara langsung dan berpola hingga menjadi kebiasaan yang dapat diterima berdasarkan interaksi sehari-hari seperti pada aspek sosiologis.

Dalam hal ini, meskipun sedang terjadi pandemi yang tidak memungkinkan tenaga pendidik melakukan interaksi secara langsung dengan pelajar, namun tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjalin suatu hubungan yang memungkinkan pendidik tersebut untuk memberikan Pendidikan karakter lewat pembelajaran PKn baik sebagai mata pelajaran dalam tingkat menengah hingga tingkat perguruan tinggi. Oleh sebab itu sangat dibutuhkan motivasi dari para pendidik agar para pelajar mau menaati himbauan PSBB melalui interaksi dengan subjek sosiologi.

Selain dari komponen formal, aspek sosiologis juga melingkupi aspek informal dan aspek non formal. Dalam keluarga misalnya, apabila seseorang dalam keluarga yang memiliki pengaruh besar seperti kepala keluarga mampu mengarahkan anggota keluarganya untuk menaati tata tertib yang dikeluarkan pemerintah untuk menekan angka penularan Covid-19, maka anggota keluarga lainnya akan ikut serta dalam upaya ini, selama kepala keluarga tersebut mampu mencontohkan dengan baik dan benar, hal tersebut juga berlaku dalam ruang lingkup pergaulan sehari-hari. Terlebih dalam media sosial.

Selama masa pandemi ini, tentunya kebanyakan orang akan menghabiskan waktunya menggunakan sosial media. Sosial media adalah salah satu wadah atau tempat yang dapat mengubah persepsi seseorang, oleh sebab itu dibutuhkan

kehati-hatian dalam mengolah informasi dalam sosial media, jangan sampai terbawa arus pemikiran dan terkena arahan tidak benar bahwa Covid-19 ini hanyalah tipu muslihat pemerintah saja.

## **SIMPULAN**

Pandemi Covid-19 seperti sebuah momok menakutkan bagi seluruh negara pada saat ini. Berbagai aspek kehidupan seakan lumpuh dan berubah sebagai bentuk imbas dari Covid-19. Pemerintah baik Indonesia maupun dunia berlomba-lomba memutar otak demi menekan angka penularan virus dan memutus mata rantai wabah. Salah satunya adalah kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PSBB adalah suatu karantina wilayah yang diterapkan di Indonesia dengan tujuan tidak mematikan seluruh aspek namun tetap diberikan batasan-batasan tertentu seperti *Work From Home*, pembelajaran daring, menjaga jarak satu sama lain hingga aturan-aturan penggunaan masker dan himbauan mencuci tangan (Septian, 2020). Namun, tidak sedikit dari masyarakat Indonesia yang tidak taat dengan regulasi tersebut karena berbagai alasan, salah satunya adalah ketidakpercayaan masyarakat atas eksistensi dari Covid-19, khususnya generasi muda. Oleh sebab itu diperlukan pendidikan karakter melalui pembelajaran PKn dalam setiap tingkat dan jenjang pendidikan agar tumbuh perasaan sadar diri dan mau mematuhi aturan yang diterapkan pemerintah

## **REFERENSI**

- Adha, M.M. (2019). Advantegous of volunteerism values for Indonesian community and neighbourhoods. *International Journal of Community Service Learning*, 3(2), 83-100.
- Adha, M. M., Budimansyah, D., Sapriya., & Sundawa, D. (2019). Emerging volunteerism for Indonesia millennial generation: volunteer participation and responsibility. *Journal of Human Behavior in the Social Environment*, 29 (4), 467- 483.
- Adha, M.M., Ulpa, E.P., Johnstone, J.M., & Cook, B.L. (2019). Pendidikan moral pada aktivitas kesukarelaan warga negara muda. *Journal of Moral and Civic Education*, 3(1), 28-37.
- Adha, M. M., Budimansyah, D., Sapriya., & Sundawa, D. (2017). Volunteerism through Festival for Civic Virtue. Proceeding 2nd International Conference on Sociology Education, 5 Oktober 2017, Bandung, Indonesia.

- Adha, M.M. (2015). Pendidikan kewarganegaraan mengoptimalkan pemahaman perbedaan budaya warga masyarakat Indonesia dalam kajian manifestasi pluralisme di era globalisasi. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 14(2), 1-10.
- Adha, M.M. (2020). Pemahaman dan implementasi nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari. *Media Komunikasi FIS*, 11(3), 216-224.
- Adha, M. M., & Nurmalisa, Y. (2016). Peran lembaga sosial terhadap pembinaan moral remaja di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1 (1): 64-71.
- Adha, M.M., & Susanto, E. (2020). Kekuatan nilai-nilai Pancasila dalam membangun kepribadian masyarakat Indonesia. *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan*, 15(01), 121-138.
- Ali, S., & Afreni, H. (2020). Pembelajaran daring di tengah wabah covid-19. *BIODIK: Jurnal Ilmiah Pendidikan Biologi*, 6(02).
- Akin, T., Dunne, G., Palomares, S., & Schilling, D. (1995). *Character education in America School*. California: Innerchoice Publishing.
- Ardhana, J.M. (2020). Menjadi warga negara yang baik pada masa pandemi covid-19: perspektif kenormalan baru. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2).
- Albitar, S.S. (2020). Implementasi pembelajaran daring untuk meningkatkan mutu pendidikan sebagai dampak diterapkannya social distancing. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Metalingua*, 5(1).
- Baroroh, I. (2020). Mengoptimalkan proses pembelajaran dengan media daring pada masa pandemi covid-19. *Jurnal Sipatokkong BPSDM Sulawesi Selatan*, 1(3).
- He, W., Xu, G., & Kruck, S. (2014). Online is education for the 21st Century. *Journal of Information Systems Education*.
- Heri, Gunawan. (2012). *Pendidikan karakter konsep dan implementasi*. Bandung: Alfabeta.
- Juaningsih, I.N. (2020). Penerapan Sanksi Pidana bagi Penimbun Masker di Indonesia Selama Masa Pandemi Covid-19. *'ADALAH*, 4(1), 75-80.

- Kemenkeu Learning Center. (2020). *Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan 2: Aspek Politis*. Diakses dari <https://klc.kemenkeu.go.id/pknstan-urgensi-pendidikan-kewarganegaraan-2-aspek-politis/>, tanggal 10 Oktober 2020.
- Lickona, T. (1992). *Educating for Character, How Our School Can Teach Respect*. New York: Bantam Books.
- Muhyiddin. (2020). Covid-19, new normal dan perencanaan pembangunan di Indonesia. *The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2).
- Mulyasa, E (2013). *Manajemen pendidikan karakter*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ombudsman.go.id. (2020). Pendidikan era revolusi industri 4.0 di tengah covid-19. Diperoleh 8 April 2020 dari <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pendidikan-era-revolusi-industri-40-di-tengah-covid-19>.
- Pradana, A.A., Casman., & Nur'aini. (2020). Pengaruh kebijakan social distancing pada wabah covid-19 terhadap kelompok rentan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 9(2), 61-67.
- Putri, R.K., Sari, R.I., Wahyuningsih, R., & Meikhati, E. (2020). Efek pandemi covid 19: dampak lonjakan angka phk terhadap penurunan perekonomian di Indonesia. *Jurnal Bismak and Responsibility*, 1(1).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- Santika, I. G. N., Kartika, I. M., & Wahyuni, N. W. R. (2019). Pendidikan karakter: studi kasus peranan keluarga terhadap pembentukan karakter anak Ibu Sunah di Tanjung Benoa. *Widya Accarya*, 10(1).
- Santika, I.W.E. (2020). Pendidikan karakter pada pembelajaran daring. *IVCEJ*, 3(1).
- Syaifullah. (2008). *Ilmu kewarganegaraan (Civic)*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan.
- Sobri, M., Nursaptini, Widodo, A., Sutisna, D. (2019). Pembentukan karakter disiplin peserta didik melalui kultur sekolah. *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*. 6 (1), 61-71.
- Suradi. (2017). Pembentukan karakter siswa melalui penerapan disiplin tata tertib sekolah. *BRILIANT: Jurnal Riset dan Konseptual*, 2(4).

- Terry, L. & Ron, T. (2007). *Values education and quality theaching: The Double Helix Effect*. Publising: Australia.
- TribunStyle.com. (2020). *Capai 40 Juta Kasus Covid-19, Simak Update Virus Corona Dunia Hari Ini Senin 19 Oktober 2020*.Diakses dari <https://newsmaker.tribunnews.com/2020/10/19/capai-40-juta-kasus-covid-19-simak-update-virus-corona-dunia-hari-ini-senin-19-oktober-2020>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
- Winataputra, & Budimansyah. 2012. Civic Education: Konteks, Landasan, Bahan Ajar, dan Kultur Kelas. Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan SPS UPI Bandung.
- Zed, M. (2004). *Metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian kepustakaan library*. Jakarta: Yayasan Obor Nasional.
- Zuchdi., Darmiyati., Prasetya, Z.K., & Masruri, M.S. (2010). Pengembangan model pendidikan karakter terintegrasi dalam pembelajaran bidang studi di Sekolah Dasar. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 1-12.
- Zubaedi. (2011). *Desain pendidikan karakter: konsep dan aplikasinya dalam lembaga pendidikan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

# Pengembangan Bahan Ajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Berbentuk *Booklet* Berbasis *QR Barcode*

Muhammad Nasir Salasa

[muhammadnasir.2019@student.uny.ac.id](mailto:muhammadnasir.2019@student.uny.ac.id)

## Abstrak

Kecenderungan guru menggunakan bahan ajar siap ajar menyebabkan peserta didik kurang memiliki gairah untuk belajar. Tujuan penelitian ini adalah pengembangan bahan ajar Pendidikan Kewarganegaraan berbentuk *booklet* berbasis *QR Barcode* yang merupakan sebuah inovasi bahan ajar untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif kualitatif dengan menekankan pada studi pustaka (*library research*). Studi pustaka (*library research*) merupakan penelitian yang menggunakan sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumentasi dan studi pustaka dari hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini yaitu artikel ilmiah, laporan penelitian ilmiah, buku, dan sumber-sumber yang relevan. Analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis isi yakni dengan cara membandingkan antara satu kajian dengan kajian yang lain. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menginovasikan bahan ajar berbentuk *booklet* berbasis *QR Barcode* sangat membantu guru dalam menjelaskan materi, karena bahan ajar berbentuk *booklet* berbasis *QR Barcode* dan menampilkan foto, video dan materi tambahan yang membuat motivasi belajar peserta didik. Kesimpulan yang didapat bahwasannya terdapat Aspek Pendidikan Kewarganegaraan yang dapat dikembangkan dalam bahan ajar berbentuk *booklet* berbasis *QR Barcode* adalah aspek *civic knowledge* dan *civic skill* adapun manfaat bahan ajar berbentuk *booklet* berbasis *QR Barcode* adalah siswa akan lebih memanfaatkan *smartphone* yang mereka miliki dalam proses kegiatan belajar mengajar dikelas dan kendala bahan ajar *booklet* berbasis *QR Barcode* adalah tidak dapat digunakan jika tidak ada koneksi internet.

**Kata kunci:** Pengembangan, Bahan Ajar, PPKn, *Booklet*, *QR Barcode*

## PENDAHULUAN

Pengajaran merupakan proses yang membutuhkan perencanaan yang matang dan sistematis agar guru dapat melaksanakan dengan benar dan realistis segala sesuatu yang dilakukannya sebelum melanjutkan ke proses pembelajaran. Langkah-langkah sistematis dalam proses pengajaran merupakan bagian penting dari implementasi strategi pengajaran guru (Diah, 2006). Pengajaran tradisional yang sering dilakukan oleh guru sekolah adalah dengan hanya mewajibkan siswa untuk mencatat, mendengarkan dan hanya fokus pada bahan ajar yang ada seperti Lembar Kerja Siswa (LKS). Padahal dunia Pendidikan di era saat ini tidak bisa terlepas dari berkembangnya penggunaan teknologi, karena semua aktivitas sudah berbasis pada penggunaan teknologi canggih. Beberapa teknologi yang sudah digunakan pada bidang pendidikan seperti komputer, TV, mesin cetak dan lainnya (Budiman, 2017).

Kemajuan teknologi seperti saat ini seorang guru harus bisa berinovasi dalam pengajaran di kelas. Misalnya siswa mencari bahan ajar melalui internet karena saat ini siswa lebih memilih untuk belajar melalui teknologi, daripada hanya mendengarkan dan merekam apa yang dikatakan guru (Diah,2006). Dengan tidak adanya inovasi yang dilakukan guru dalam mengajar, maka akan menyebabkan motivasi belajar siswa menurun. Pada abad 21 terdapat pergeseran dalam model pendidikan, perubahan ini terdapat di dalam persiapan untuk menumbuhkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) kompetensi yang harus dimiliki peserta didik, yaitu: kemampuan berpikir kritis dan kemampuan untuk menghadirkan pemecahan masalah, kemampuan berkomunikasi dan bekerjasama, kemampuan mencipta dan membarui, kemampuan literasi teknologi informasi dan literasi media (BSNP, 2010). Penggunaan teknologi sebagai penunjang pada proses pendidikan harus terus ditingkatkan. Salah satu aspek dari pendidikan yang harus mengikuti dalam penggunaan teknologi adalah penyusunan sumber belajar, karena penyusunan sumber belajar yang tepat, teruji keefektifan dan keefisienannya serta kemenarikannya akan memberikan dampak positif terhadap minat belajar siswa sehingga pencapaian dari tujuan dari pendidikan bisa didapatkan dengan peluang yang lebih besar.

Menurut Ashfahany, Adi, & Hariyanto (2017) sumber belajar adalah seperangkat bahan, materi, peralatan yang mendukung interaksi guru dan lingkungan, dan bertujuan untuk mendorong proses pembelajaran dan evaluasi kinerja. Salah satu sumber belajar yang berkaitan secara langsung adalah bahan ajar. Bahan ajar merupakan bagian dari sumber belajar dan dapat diartikan mengandung informasi pembelajaran, baik khusus maupun umum, dapat digunakan untuk tujuan pembelajaran (Mulyasa, 2006). Bahan ajar menurut Sugiarti (2013) yaitu seperangkat materi yang disusun dengan sistematis secara tertulis maupun tidak sehingga lingkungan yang memungkinkan siswa untuk belajar bisa tercipta. Penyusunan bahan ajar bukan berarti meniadakan peran utama pengajar didalam kelas (Sri, Irafahmi, & Sulastri, 2012), banyaknya penelitian tentang bahan ajar dengan berbasis yang bermacam-macam bentuk

seperti *microsoft visual basic* (Sri, Irafahmi, & Sulastri, 2012), berbasis masalah (Wardani, 2016), *web* menggunakan *wordpress* (Saluky, 2016), pendekatan saintifik (Setyawan, 2018) serta bahan ajar yang membahas tenis meja (Irwansyah, 2018) dengan banyaknya inovasi yang telah dilakukan dalam pengembangan bahan ajar akan memberikan inovasi dalam pembelajaran di dalam kelas.

Dalam proses pembelajaran di sekolah siswa dan guru wajib memiliki buku pegangan atau bahan ajar, hal ini dikarenakan bahan ajar merupakan alat untuk menyampaikan suatu materi dalam proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Bahan ajar di dalamnya terdapat materi ajar yang akan disampaikan dengan berbagai unsur jenjang sekolah seperti dijenjang SD, SMP, atau SMA. Didalam materi yang diajarkan itu sesuai dengan Kompetensi Inti (KI) maupun Kompetensi Dasar (KD). Bahan ajar merupakan bagian integral dalam proses pembelajaran sehingga untuk mencapai proses pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional adalah ketersediaan sumber belajar yang sesuai dengan standar kurikulum 2013 karena faktor pendukung keberhasilan Kurikulum 2013 adalah ketersediaan buku sebagai bahan ajar dan sumber belajar yang mengintegrasikan teknologi di dalam proses pembelajaran (Nasruddin, 2020).

Terdapat empat hal yang menjadi landasan dalam pengembangan bahan ajar, *pertama* untuk pembentukan kompetensi personal dan sosial, *kedua* kewajiban dan kewenangan bagi pembelajar, *ketiga* perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang harus selalu diikuti dan, *keempat* adanya pengembangan kurikulum yang menuntut pula pengembangan bahan ajar (Nasruddin, 2020). Pemakaian buku cetak sekarang ini belum bisa memfasilitasi semua gaya belajar siswa dan tidak sejalan dengan semangat perkembangan teknologi yang mengarah ke digital dan *paperless*. Dengan demikian, dibutuhkan sebuah inovasi yang bisa digunakan untuk menggandeng semua gaya belajar dan sejalan dengan perkembangan teknologi dan informasi (Prastiyanto, Subandowo, & Rusmawati, 2020)

Menurut Prastiyanto, Subandowo, & Rusmawati, (2020) bahan ajar berbasis *QR barcode* dapat memudahkan seorang guru dalam menyampaikan

materi pada saat proses belajar mengajar di kelas. Karena di dalam bahan ajar berbasis *QR barcode* merupakan bahan ajar yang dapat mempermudah siswa dalam memahami materi yang susah di pahami melalui kata-kata menjadi mudah dipahami melalui tampilan visual yang ada di dalam *QR barcode*, karena teknologi *QR Barcode* dapat digunakan dalam media pembelajaran sebagai penghubung antara buku cetak dengan digital multimedia, hal ini sangat penting guna mengikuti dan menjawab tantangan era yang semakin berkembang. Dalam dunia pendidikan *QR Barcode* telah digunakan untuk menandai aset sekolah (Ariska & Jazman,2016), menentukan validitas dari kartu rencana studi dan kartu hasil studi yang ditulis oleh Rochman, Raharjana, & Taufik (2017).

Melihat belum banyaknya yang memanfaatkan teknologi *QR Barcode* maka penulis tertarik dalam mengembangkan bahan ajar berbentuk *booklet* berbasis *QR barcode* dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Jadi Bahan ajar ini dilengkapi dengan teknologi untuk mengakses informasi melalui *QR Barcode* yang bisa diakses langsung menggunakan *QR Code scanner* pada *Smartphone*. Kebaruan produk yang dikembangkan berupa bahan ajar berbasis *QR Barcode* yang merupakan teknologi yang belum lazim digunakan untuk menunjang proses pembelajaran. Atas dasar asumsi bahwa belum diterapkannya *QR Barcode* di dunia pendidikan terutama dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, maka penulis berupaya untuk mengembangkan bahan ajar berbasis *QR Code* untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif kualitatif dengan menekankan pada studi pustaka (*library research*). Studi pustaka (*library research*) merupakan penelitian yang menggunakan sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitian. Penelitian dengan studi pustaka (*library research*) berusaha untuk menganalisis dan mendeskripsikan tentang bahan ajar berbasis *QR Barode* yang diterapkan dalam mata pelajaran Kewarganegaraan. Teknik pengumpulan data serta informasi yang mendukung penelitian ini meliputi studi

dokumentasi serta studi pustaka dari hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data dari berbagai artikel ilmiah, laporan penelitian ilmiah, buku, jurnal, dan sumber-sumber yang relevan dengan topik dari artikel ini. Peneliti akan mendata kajian dari bahan-bahan ilmiah yang terkait dengan penelitian ini. Analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis isi. Analisis isi digunakan dengan cara membandingkan antara satu kajian dengan kajian yang lain dalam topik yang sesuai dengan artikel ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Bahan Ajar**

Bahan ajar merupakan suatu perangkat pembelajaran harus mencerminkan pendekatan yang akan kita gunakan dan tujuan atau kompetensi apa yang diharapkan. Bahan ajar juga harus mampu dipahami oleh siswa, menimbulkan ketertarikan untuk di baca (Nindiasari, 2011) Menurut Yaummi (2013:246) ada beberapa kedudukan di dalam bahan ajar yaitu

- a) Membantu siswa dalam belajar secara individual
- b) Memberikan keleluasaan dalam penyajian pembelajaran jangka pendek dan panjang
- c) Rancangan bahan ajar bersifat sistematis dan memberikan dampak besar bagi perkembangan sumber daya manusia secara individual
- d) Memudahkan proses belajar mengajar dengan pendekatan sistematis
- e) Memudahkan belajar karena dirancang atas dasar pengetahuan tentang manusia

Dengan adanya bahan ajar maka kemungkinan peserta didik akan bisa mempelajari materi dan kompetensi secara sistematis sehingga akumulatif mampu menguasai semua kompetensi secara utuh. Sebuah bahan ajar yang baik itu mencakup

- a) Petunjuk belajar
- b) Kompetensi yang akan dicapai
- c) informasi pendukung

- d) latihan-latihan
- e) Petunjuk kerja
- f) Evaluasi

Dalam merancang bahan ajar, perlu diperhatikan juga substansi dari bahan ajar. Penanaman konsep pada bahan ajar dapat meningkatkan hasil belajar mahasiswa. Kemampuan pemahaman konsep matematika adalah salah satu tujuan penting dalam pembelajaran. Kemampuan pemahaman konsep memberikan pengertian bahwa materi-materi yang diajarkan bukan hanya sebagai hafalan, namun lebih dari itu dengan pemahaman dapat lebih mengerti akan konsep materi pelajaran itu sendiri (Fatih'adnan & Mardhiyana, 2019) Selain itu penelitian Winayawati (2012) menyatakan bahwa kemampuan pemahaman konsep siswa sangat berpengaruh terhadap tes hasil belajar, kemampuan pemahaman konsep siswa dapat membantu siswa dalam membuat hubungan (koneksi) sehingga siswa dapat dengan mudah melanjutkan materi berikutnya.

Sumber belajar sangat membantu pendidik guna mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Dalam penerapannya, sumber belajar terdiri dari beberapa macam, salah satunya adalah bahan ajar. Prastowo (2015) menyatakan bahan ajar adalah sekumpulan kertas berisi materi dengan susunan lengkap sesuai kompetensi serta dapat diimplementasikan untuk belajar. Karena bahan ajar sangat menolong siswa dalam proses belajar (Nasution2013). Oleh karena itu perlu adanya bahan ajar yang menarik untuk membuat siswa tertarik untuk membacanya. Pertiwi & Rochmawati (2019) menyatakan bahwa memang diperlukan bahan ajar dengan daya tarik tinggi untuk peserta didik tertarik untuk membaca. Maka dari itu perlu adanya upaya untuk memudahkan peserta didik dalam kegiatan belajar, dengan penggunaan bahan ajar berbasis kontekstual (*Contextual Teaching and Learning*).

Menurut Sagala (2012) pendekatan kontekstual adalah konsep pengaitan teori dalam materi dengan lingkungan kehidupan peserta didik. Johnson (2007) menyatakan bahwa dengan pembelajaran kontekstual peserta didik dituntut untuk selalu mencari sebuah makna yang terdapat dalam pengaitan teori pelajaran dengan kondisi nyata lingkungan yang akan memudahkan dalam hal pemahaman

dan pendalaman materi. Bahan ajar berbasis kontekstual dianggap sebagai solusi untuk memacu peserta didik agar tercipta pemikiran yang kreatif melalui kegiatan pengaitan teori dengan kehidupan nyata (Rahmawati & Susanti, 2019). Hasil penelitian Toyib, Martono, & Sawiji (2015) juga mengemukakan bahwa dalam kelas, pengaplikasian bahan ajar kontekstual lebih berhasil dibanding bahan ajar biasa. Oleh karena itu, penjabaran materi dengan kontekstual lebih mempermudah peserta didik memahami dan mendalami materi yang dijelaskan (Widiyawati & Susanti, 2017).

Fenomena diatas menunjang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum serta dapat memudahkan peserta didik maka perlu adanya suatu inovasi, fitur *QR Barcode* bisa digunakan untuk menunjang kegiatan pembelajaran dan membantu peserta didik (Rikala & Kankaaranta, 2012). Dengan adanya fitur QR Barcode dalam bahan ajar maka dapat membantu guru untuk memberikan dan mengarahkan peserta untuk memilih sumber informasi belajar yang relevan dan mudah diakses. Durak, Ozkeskin, dan Ataizi (2016) yang menyatakan dengan memanfaatkan *Handphone*, *QR Code* dapat diakses untuk menghubungkan pengguna pada informasi yang dituju dengan mudah dan cepat.

Wahid, Nova, & Rosana (2018) mengemukakan bahwa adanya pengaruh positif antara buku saku yang memanfaatkan *QR Code* dengan kemampuan berpikir kritis. Seseorang memiliki kemampuan berpikir kritis yang tinggi maka orang tersebut pasti memahami konsep pembelajaran. Dalam penelitian yang dilakuakn Mustakim (2013) bahwa memanfaatkan penggunaan *QR Code* dalam pembelajaran Kimia hasil belajar siswa menjadi lebih baik daripada menggunakan pembelajaran konvensional. Melalui bahan ajar yang dikembangkan dengan menggunakan *QR Barcode* diharapkan adanya peningkatan kemampuan pemahaman peserta didik pada mata pelajaran PPKn sehingga perlu dikembangkan bahan ajar pendidikan kewarganegaraan berbentuk *booklet* berbasis *QR Barcode* untuk meningkatkan kemampuan pemahaman materi. Dalam merancang bahan ajar maka perlu diperhatikan juga substansi dari bahan ajar. Karena menurut Wardani (2016) penanaman konsep pada bahan ajar dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Kemampuan pemahaman materi adalah

salah satu tujuan penting dalam pembelajaran. Kemampuan pemahaman materi memberikan pengertian bahwa materi-materi yang diajarkan bukan hanya sebagai hafalan, namun lebih dari itu dengan pemahaman dapat lebih mengerti akan konsep materi pelajaran itu sendiri. Winayawati (2012) menyatakan bahwa kemampuan pemahaman konsep siswa sangat berpengaruh terhadap tes hasil belajar, kemampuan pemahaman konsep siswa dapat membantu siswa dalam membuat hubungan (koneksi) sehingga siswa dapat dengan mudah melanjutkan materi berikutnya.

### ***QR Barcode***

*Quick Response Code* atau yang biasa disebut dengan *QR Code* merupakan sebuah barcode dua dimensi yang diperkenalkan oleh Perusahaan Jepang *Denso Wave* pada tahun 1994. Jenis barcode ini awalnya digunakan untuk pendataan inventaris produksi suku cadang kendaraan dan sekarang sudah digunakan dalam berbagai bidang layanan bisnis dan jasa untuk aktivitas marketing dan promosi. Pada dasarnya bahwa *QR Code* dikembangkan sebagai suatu kode yang memungkinkan isinya untuk dapat diterjemahkan dengan kecepatan tinggi (Rouillard, 2008). Menurut Ridwan, Santoso, & Agung (2010) *Quick Responce Code* adalah image dua dimensi yang merepresentasikan suatu data, terutama data berbentuk teks. *QR Code* merupakan evolusi dari barcode yang awalnya satu dimensi menjadi dua dimensi. Penggunaan *Quick Responce Code* (*QR Code*) pada pembelajaran di sekolah lebih memperdayakan siswa agar berperan secara aktif dalam kegiatan pembelajaran dikelas.

Lee, Lee, & Kwon (2011) menyatakan bahwa menggunakan kode QR dan *smartphone* yang diterapkan di kelas biologi dapat memberikan keuntungan yang banyak, guru dapat membuat penyesuaian kebutuhan kelas dan buku panduan bergambar untuk situs studi lapangan terpilih yang ada serta mudah digunakan sesuai untuk tingkat siswanya. Berkaitan dengan bidang pendidikan, *QR barcode* k dapat dimanfaatkan juga untuk mendukung proses belajar mengajar dikelas. Mengenai penggunaan *QR Code* dalam proses pembelajaran Saenab (2017) menyimpulkan dari penelitian yang dilakukan olehnya atas dasar penelitian dari Lee yaitu Pemanfaatan *QR Code* dalam bidang pendidikan dapat menjadi sebuah

sarana untuk menyajikan informasi dalam tempat yang terbatas, yang menerapkan *QR Code* dalam pembelajaran studi lapang pada mata pelajaran biologi untuk siswa SMA di Korea Selatan. Hasil yang diperolehnya adalah “*learning via QR-Code-decoding on smartphones may more effectively motivate interest in learning about natural fauna than traditional field studies that use printed field guides.*” Hal ini menunjukkan bahwa *QR Code* dapat menjadi sarana bagi pendidik untuk membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan pada akhirnya dapat memotivasi peserta didik. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan Saleh, Saud, & Asnur (2018) menunjukkan bahwa proses pembelajaran menggunakan *QR Code* memberikan dampak positif dalam peningkatan proses pembelajaran. Melalui *QR Code*, mahasiswa dapat mengevaluasi hasil pekerjaannya dengan baik dan memberikan kemudahan dalam memahami materi yang dipelajari.

### ***Booklet***

*Booklet* adalah sebuah buku kecil yang memiliki paling sedikit lima halama tetapi tidak lebih dari empat puluh delapan halaman di luar hitungan sampul (Satmoko, 2006). Sedangkan menurut Holmes (Mintarti, 2001:24) booklet memuat lembaran-lembaran paling banyak 20 halaman dengan ukuran 20x30 cm yang dijilid dalam satu satuan, dengan berbagai visual yakni: huruf, foto, gambar garis atau lukisan. Jadi *Booklet* merupakan sebuah buku kecil yang dapat digunakan dalam bidang pendidikan dan salah satunya digunakan sebagai bahan ajar.

Tujuan digunakannya sebagai media berbentuk bahan ajar yang dapat memudahkan seorang guru menyampaikan materi pada waktu proses belajar mengajar di kelas. *Booklet* berisikan materi-materi penting dalam pembelajaran dan isi booklet harus tegas, jelas dan mudah dipahami. *Booklet* akan menarik jika ditampilkan gambar dan *QR Barcode* yang langsung terhubung ke video untuk mempermudah peserta didik dalam menjelaskan materi yang susah di visualisasikan menjadi materi yang mudah dipahami.

Penyusunan *Booklet* menurut Prastowo (2015) dalam menyusun sebuah booklet sebagai bahan ajar, booklet setidaknya mencangkup sebagai berikut:

- 1) Judul diturunkan dari KD atau materi pokok sesuai dengan besar kecilnya materi.
- 2) KD/materi pokok yang akan dicapai, diturunkan dari SI dan SKL.
- 3) Informasi pendukung dijelaskan secara jelas, padat, menarik memperhatikan penyajian kalimat yang disesuaikan dengan usia dan pengalaman pembacanya. Untuk siswa SMA upayakan untuk membuat kalimat yang tidak terlalu panjang
- 4) Dalam booklet terdapat lebih banyak gambar dari pada teks, sehingga tidak terkesan monoton.
- 5) Gambar ditampilkan secara nyata yaitu gambar-gambar yang sudah dikenal oleh peserta didik.
- 6) Isi disusun berdasarkan kebutuhan peserta didik.
- 7) Mudah dibawa kemana saja dan dibaca kapan saja, dimana saja.
- 8) Memuat informasi yang lengkap, walau tidak rinci dan berurutan.

### **Inovasi dalam Pengembangan Aspek Kewarganegaraan**

Inovasi yang dilakukan yaitu membuat bahan ajar berbentuk *booklet* berbasis *QR Barcode* dengan mengangkat tema materi Hak Asasi Manusia (HAM) . Dengan materi yang sudah dipilih diharapkan peserta didik akan lebih tertarik dan mudah memahami materi yang akan dijelaskan secara mudah serta akan didukung video yang ada dalam *QR Barcode* dan diharapkan membuat peserta didik tertatik dalam melakukan pembelajaran dikelas karena memanfaatkan *smartphone* yang mereka miliki untuk mendukung kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Menurut Trilling & Fadel (2009: 45-84) ketrampilan yang ada pada abad 21 itu ada 3 yaitu :

- a) *Learning and inovaton skill*
- b) *digital litercy skill dan*
- c) *Carrer and life skill*

Ketiga keterampilan itu menurut Trilling & Fade (2009)l disebut dengan *21st Century knowledge-skills rainbow* atau pelangi pengetahuan abad ke 21. Dengan banyaknya kebutuhan guru pada abad 21 maka guru dituntun untuk lebih berinovasi dan memanfaatkan teknologi yang ada, sepeti menggunakan *QR Barcode* untuk memanfaatkan *smartphone* yang dibawa oleh peserta didik untuk

digunakan didalam proses pembelajaran di kelas. Selain itu peserta didik tidak hanya fokus dalam bahan ajar ajar yang berbentuk buku teks saja tetapi memanfaatkan *smartphone* untuk men *scan QR barcode* untuk mendapatkan materi tambahan berupa gambar, video, artikel untuk melaksanakan aktivitas pembelajaran dikelas.

### **Langkah-Langkah Pemanfaatan *Qr Barcode* Untuk Pengembangan Bahan Ajar**

Untuk langkah pertama dalam menggunakan bahan ajar berbentuk *booklet* berbasis *QR Barcode* adalah

- 1) peserta didik harus mempunyai aplikasi *Scanner* untuk memindai *QR Barcode* yang ada didalam *booklet*.
- 2) jika belum mempunyai aplikasi *Scanner* maka peserta didik segera mengunduh dan memasang di *Smartphone*
- 3) Arahkan scanning dengan mengarahkan kamera *smartphone* ke *QR Barcode* yang tersedia di *Booklet*
- 4) Apabila *scan* berhasil maka video akan muncul dan bisa diputar

Langkah-langkah untuk membuat dan menyusun bahan ajar berbentuk *booklet* berbasis *QR Barcode* adalah sebagai berikut.

- 1) Guru Menganalisis KI (Kompetensi Inti) dan KD (Kompetensi Dasar) 3.1 tentang Menganalisis kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM ) dalam rangka perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan HAM (Kurikulum 2013) kemudian guru menentukan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) yang akan dicapai dalam pembelajaran.
- 2) Guru menyusun materi pada bahan ajar *booklet* sesuai dengan Indikator pencapaian tujuan yang kemudian dikembangkan oleh guru. Penyusunan materi dalam penyajian materi di *booklet* bisa bersumber dari buku, artikel jurnal yang berkaitan dengan materi HAM, tidak hanya itu saja dalam *booklet* juga terdapat *QR Barcode* yang akan terhubung ke video tentang contoh-contoh pelanggaran HAM di Indonesia seperti peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia seperti peristiwa pembunuhan Munir, hilangnya Wiji Thukul, kasus Trisakti, Semanggi I, Semanggi II.

- 3) Penyusunan materi dalam *booklet* dibuat sesederhana mungkin dan jelas agar peserta didik akan lebih memahami materi dan juga disertai dengan gambar-gambar berkaitan dengan materi HAM.
- 4) Guru membuat video ke dalam *QR Barcode* untuk sarana memvisualkan contoh peristiwa pelanggaran Hak Asasi Manusia yang ada dalam bahan ajar.

Cara membuat *QR Barcode* sebagai berikut.

- a) Pastikan Komputer terkoneksi dengan internet
- b) setelah itu masuk ke website: [www.qrstuff.com](http://www.qrstuff.com)



- c) klik sign up
- d) Ikuti prosedur pada proses sign up
- e) masukan email dan password pada proses sign up
- f) kalau sudah selesai maka aplikasi sudah bisa digunakan

Untuk membuat *QR Barcode* berbasis koneksi *Youtube Video* Langkah-langkahnya sebagai berikut.

- a) Masuk ke website: [www.qrstuff.com](http://www.qrstuff.com)
- b) klik pada bundaran *Youtube video* di data type



- c) ketik URL video yang sudah di copy di *Youtube* sebelumnya
- d) Setelah muncul tab baru tampil pilih dan blok nam nama video URL pada website dan setelah di blok klik kanan dan pilih copy
- e) Buka lagi tab awal kemudian klik pada daerah persegi panjang dibawah konten yang bertuliskan video URL selanjutnya klik kanan dan paste URL yang sudah di copy tadi
- f) setelah itu pilih warna *QR Barcode*
- g) selanjutnya download *QR Code*
- h) selesai.

## SIMPULAN

Kecenderungan guru menggunakan bahan ajar siap ajar siap pakai seperti Lembar Kerja Siswa (LKS) menyebabkan seorang siswa kurang memiliki gairah untuk belajar. Penulis menginovasikan bahan ajar berbentuk *booklet* berbasis *QR Barcode* untuk mempermudah dan membantu guru dalam menjelaskan materi yang susah di visualisasikan menjadi mudah dipahami oleh peserta didik melalui bentuk bahan ajar yang menarik dan tidak monoton, cara menggunakan *QR Barcode* adalah menscan barcode yang ada didalam *booklet*. Aspek Pendidikan Kewarganegaraan yang dapat dikembangkan dalam bahan ajar berbentuk *booklet*

berbasis *QR Barcode* adalah aspek *civic knowledge* dan *civic skill*. pada *Civic Knowledge* diharapkan peserta didik dapat memiliki banyak informasi dan sumber yang terpercaya dari materi yang sudah disusun dari sumber-sumber yang terpercaya. Sedangkan pada *civic skill* diharapkan peserta didik memperoleh keterampilan pembelajaran nyata, menyenangkan, dan adaptif terhadap kemajuan zaman di abad 21 ini dan tidak ada lagi stigma negatif terhadap smartphone di kelas, karena digunakan untuk proses pembelajaran dikelas. Manfaat bahan ajar berbentuk booklet berbasis *QR Barcode* adalah siswa akan lebih memanfaatkan smartphone yang mereka miliki dalam proses Kegiatan Belajar Mengajar Dikelas. Kendala bahan ajar booklet berbasis *QR Barcode* adalah tidak dapat digunakan jika tidak ada koneksi internet.

## REFERENSI

- Ariska, J., & Jazman, M. (2016). Sekolah menggunakan teknik labelling qr code ( Studi Kasus : Man 2 Model Pekanbaru ). *Jurnal Rekayasa Dan Manajemen Sistem Informasi*, 2(2), 127–136.
- Ardiansyah, & Fendina, G. P. P. (2016). Pengembangan sistem manajemen presensi rapat berbasis QR Code pada android. *In Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Aplikasinya* (pp. 5–56).
- Ashfahany, F. A., Adi, S., & Hariyanto, E. (2017). Bahan ajar mata pelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan dalam bentuk multimedia interaktif untuk siswa kelas VII. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan*, 2(2), 261–267. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.17977/jp.v2i2.8540>.
- Budiman, H. (2017). Peran Teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan Haris Budiman. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(1), 31–43.
- Badan Standar Nasional Pendidikan. (2010). *Pardigma pendidikan nasional di abad 21*. Jakarta. BSNP.
- Diah, A. W. M. (2006). *Pendekatan sains, lingkungan, teknologi dan masyarakat dalam pembelajaran sistem periodik dan struktur atom*. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kimia. Surabaya.
- Durak, G., Ozkeskin, E., & Ataizi, M. (2016). QR Codes In Education and Communication. *Turkish Online Jurnal of Distance Education*, 17(2), 42-58.

- Guo, D., Cao, J., Wang, X., Fu, Q., & Li, Q. (2016). Combating QR-codebased compromised accounts in mobile social networks. *Sensors (Switzerland)*, 16(9), 1–17. <https://doi.org/10.3390/s16091522>.
- Nindiasari, H. (2011). *Pengembangan bahan ajar dan instrumen untuk meningkatkan berpikir reflektif matematis berbasis pendekatan metakognitif pada siswa sekolah menengah atas (SMA)*. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten ISBN, 978.
- Fatih'Adna, S., & Mardhiyana, D. (2019). Pengembangan bahan ajar statistika penelitian pendidikan berbasis quick response (qr) code sebagai upaya meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematika. *SENATIK*, 6-15.
- Irwansyah. (2018). Pengembangan Buku Ajar Teori Tenis Meja Bagi Mahasiswa Kelas A 2016 Jurusan PJKR. *Jp.jok (Jurnal Pendidikan. Jasmani, Olahraga Dan Kesehatan)*, 1(2), 47–59.
- Johnson, Elaine. B. (2007). *Contextual teaching and learning: menjadikan kegiatan belajar-mengajar menyenangkan dan bermakna*. Bandung: Mizan Learning Center (MLC).
- Lee, J.-K., Lee, I.-S., & Kwon, Y.-J. (2011). *Scan & Learn! Use of Quick Response Codes & Smartphones in a Biology Field Study*. *The American Biology Teacher*, 73, 8, 485-492. doi: 10.1525/abt.2011.73.8.11
- Nasution. (2013). *Berbagai pendekatan dalam proses belajar mengajar*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Nasruddin, N. (2020). Pengembangan bahan ajar sejarah daerah bima berbantu quick response codes kelas X SMA Negeri 1 Woha. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 4(3). DOI: <http://dx.doi.org/10.36312/jisip.v4i3.1142>.
- Pertiwi, D.R., & Rochmawati (2019). Pengembangan bahan ajar akuntansi perbankan dan keuangan mikro berbasis pendekatan saintifik kelas XI perbankan dan keuangan mikro SMK Negeri 1 Jombang. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 7(2), 182-188.
- Prastowo, A. (2015). *Panduan kreatif membuat bahan ajar inovatif*. Jogjakarta: DIVA Press.
- Prastiyanto, E., Subandowo, M., & Rusmawati, R. D. (2020). "Tersembunyi", tapi menarik. *Jurnal education and development*, 8(2), 95-95. DOI: <https://doi.org/10.37081/ed.v8i2.1632>.

- Rahmawati, S., & Susanti (2019). Pengembangan bahan ajar e-book pada mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga berbasis kontekstual untuk SMK. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 7(3), 383-391.
- Rikala, J., & Kankaaranta, M (2012). The Use of Quick Response Codes in the Classroom. Conference: 11th World Conference on Mobile and Contextual Learning. University of Jyvaskyla
- Ridwan, F. Z. Santoso, H., & Agung, W. P. (2010). Mengamankan single identity number (SIN) menggunakan QR code dan sidik jari. *Internet Working Indonesia Journal*, 2(2), 17-20
- Rochman, F. F., Raharjana, I. K., & Taufik, T. (2017). Implementation of QR code and digital signature to determine the validity of KRS and KHS Documents. *Scientific Journal of Informatics*, 4(1), 8. <https://doi.org/10.15294/sji.v4i1.7198>.
- Rouillard, J. (2008). *Contextual QR Codes, Proceedings of the Third International Multi-Conference on Computing in the Global Information Technology*, ICCGI, Athens, Greece.
- Mustakim, Sartika. (2013). Penggunaan QR code dalam pembelajaran pokok bahasan sistem periodik unsur pada kelas X SMA Labschool Untad. *Jurnal Akademika Kimia*. Vol 2, Halaman 215 – 221.
- Mulyasa, E. (2006). *Kurikulum yang disempurnakan*. Bandung: PT: Remaja Rosdakarya.
- Mintarti. (2001). *Penyuluhan Kesehatan Menggunakan Media Booklet Dalam Meningkatkan Pengetahuan dan Sikap Mental Pedagang Makanan Jajanan Tentang Aspek-Aspek Penanganan Makanan Jajanan yang Bersih dan Sehat di Kabupaten Bantul*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Thesis.
- Saenab. (2017). Respon mahasiswa terhadap penggunaan quick respons code. *Jurnal Bionature*, 17(1): 58-62.
- Saleh, N., Saud, S., & Asnur, M. N. A. (2018). Pemanfaatan QR-Code sebagai media pembelajaran Bahasa Asing pada Perguruan Tinggi di Indonesia. In *Seminar Nasional Dies Natalis UNM* (Vol. 57).
- Satmoko. (2006). Pengaruh bahasa booklet pada peningkatan pengetahuan peternak sapi. *Jurnal Penyuluhan*. 2(2).
- Saluky. (2016). Pengembangan bahan ajar matematika berbasis web dengan menggunakan wordpress. *EduMa*, 5(1), 80–90.
- Sagala, S. (2012). *Konsep dan makna pembelajaran*. Bandung: Alfabeta.

- Setyawan, T. (2018). Pengembangan buku ajar pendidikan pendekatan saintifik kelas IV SDN Nguter. *Jp.jok (Jurnal Pendidikan. Jasmani , Olahraga Dan Kesehatan)*, 1(2), 24–46.
- Sugiarti, L. (2013). Pengaruh bahan ajar terhadap kualitas hasil belajar materi konstruksi pola pada prodi PKK Tata Busana. *Fashion and Fashion Education Journal*, 2(1).
- Sri, E., Irafahmi, A. D. T., & Sulastri. (2012). Pengembangan bahan ajar matakuliah praktikum pengantar akuntansi dengan program microsoft visual basic. *JABE (Journal of Accounting and Business Education)*, 1(1), 85–92. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26675/jabe.v1i1.600>.
- Toyib, M., Martono, T., & Sawiji, H. (2015). Pengembangan bahan ajar kewirausahaan dengan pendekatan contextual teaching and learning di Program Studi Pendidikan Akuntansi FKIP Universitas Negeri Palembang Tahun 2014. *Jurnal FKIP UNS*, 1(2)
- Trilling & Fadel. (2009). *21 st century skills learning for life in our times*. San Francisco: Jossey-Bass
- Wardani, A. R. K. (2016). *Pengembangan bahan ajar fisika berbasis masalah kontekstual pada materi fluida statis sebagai peluang membangun kemampuan pemecahan masalah siswa SMA Kelas X*. Universitas Negeri Malang.
- Wahid, Nugroho, & Rosana. (2018). *Pengaruh pembelajaran ipa menggunakan buku saku mobile-learning qr – code berbasis problem based learning materi makhluk hidup dan lingkungan terhadap kemampuan berpikir kritis pada siswa kelas VII SMP N 2 Player*.
- Widiyawati, L., & Susanti (2017). Pengembangan modul administrasi pajak berbasis kontekstual pada materi pajak penghasilan (pph) pasal 21 untuk Siswa Kelas XII Akuntansi SMK Negeri di Surabaya. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*, 5(1), 1-7.
- Winayawati, L. 2012. Implementasi model pembelajaran kooperatif dengan strategi think-talkwrite terhadap kemampuan menulis rangkuman dan pemahaman matematis materi integral. *Journal of Elementary Educationl* 1(1). Universitas Negeri Semarang. Hal, 33,36 <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ujrme>.
- Yaummi, M. (2013). *Desain pembelajaran*. Jakarta: Kencana

# Identitas, Posisi, dan Peran Perempuan Tionghoa dalam Perkawinan dengan Laki-Laki Jawa di Surabaya, Jawa Timur

Putri Fremelia Muli<sup>1</sup>, Irwan Martua Hidayana<sup>2</sup>  
[putri.fremelia@ui.ac.id](mailto:putri.fremelia@ui.ac.id)<sup>1</sup>, [irwan@ui.ac.id](mailto:irwan@ui.ac.id)<sup>2</sup>.

## Abstrak

Berangkat dari pengalaman riil pada beberapa perempuan Tionghoa yang rentan mengalami ketidakadilan dalam perkawinan mereka dengan laki-laki Jawa, penelitian feminis ini bertujuan menjawab permasalahan terkait posisi dan peran perempuan Tionghoa dalam perkawinan beda etnis sebagai kelompok minoritas di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan observasi pada empat perempuan Tionghoa di Surabaya, Jawa Timur, yang menikah dengan laki-laki Jawa. Dengan menggunakan teori interseksionalitas dari Kimberle Crenshaw, studi ini memperlihatkan bahwa para perempuan Tionghoa menempati posisi dan peran yang beragam dalam perkawinannya. Dengan pertemuan dari identitas-identitas yang dimiliki, pada konteks tertentu mereka dapat menjadi pasangan yang setara dan di lain konteks mereka dapat menjadi istri yang tunduk dan melayani. Strategi melawan potensi ketidakadilan tersebut perlu dilakukan dengan pemberdayaan diri oleh para perempuan menggunakan identitasnya dengan pemikiran kritis dan sadar, serta adanya pemahaman dan perlakuan yang adil dan setara dari pihak-pihak terkait.

**Kata kunci:** Perempuan; Tionghoa; Perkawinan; Etnis; Identitas

## PENDAHULUAN

Menikah dengan seseorang yang berasal dari etnis atau suku yang berbeda tidak dapat dihindari oleh generasi saat ini di negara multikultur seperti Indonesia. Berangkat dari pengalaman personal saya yang beberapa waktu lagi akan menikah dengan laki-laki dari etnis yang berbeda. Namun, ada prasangka negatif dari keluarga terhadap perkawinan dengan beberapa etnis termasuk salah satunya etnis dari pasangan saya, yaitu perkawinan beda etnis ini akan berdampak buruk bagi saya sebagai perempuan dalam relasi perkawinan nantinya. Berangkat dari sini, saya mencoba mencari kebenaran atas prasangka tersebut. Saya yakin bahwa tidak hanya saya saja yang mengalaminya tetapi juga banyak perempuan lainnya.

Karena saya tinggal di Surabaya, saya menemukan beberapa teman perempuan dari etnis Tionghoa yang juga menikah beda etnis yaitu dengan etnis Jawa. Padahal, etnis Tionghoa masih menyarankan pernikahan sesama etnis pada perempuan agar dapat menjaga eksistensi keturunannya. Sebagaimana konsep dalam budaya mereka bahwa marga atau keturunan hanya dapat diwariskan melalui anak laki-laki saja (Meij, 2009). Dari cerita mereka, perkawinan yang

berbeda etnis tersebut memberikan beberapa pengalaman tersendiri bagi mereka yang tidak didapatkan oleh perempuan-perempuan lainnya.

Salah satu dari mereka, CTE (nama samaran), seorang perempuan Tionghoa muda dari Surabaya yang menikahi laki-laki Jawa, mengeluh kepada saya:

“Waktu adat *kacar-kucur* itu, narasinya ayahnya RY (nama suami disamarkan) sudah sangat, sangat patriarkis sekali seperti, “Bahwa istri harus mengelola berkat suami sebaik mungkin dan semuanya harus ditujukan untuk kepentingan bersama”. Aku sampai... “ini lagi menyindir atau apa sih?” kesal tahu! “*I will prove I will not using your money...uang anakmu! Aku cari duit sendiri kalau aku mau foya-foya.*” Kesal sekali, aduh, ya ampun!” (Wawancara dengan CTE, 2019)

CTE yang berasal dari budaya dan tradisi yang berbeda dengan suaminya membuatnya mengalami tekanan dari pihak keluarga suami terkait pembagian peran dalam perkawinan mereka yaitu bahwa sebagai seorang istri, ia harus menjadi pihak yang pasif menerima nafkah dari suami dan menjadi pengelola keuangan yang baik. Padahal sebagai seorang Tionghoa profesional yang mandiri, ia juga ingin tetap mencari nafkah meskipun sudah menikah agar tidak menggantungkan diri pada suami.

Sebenarnya, perkawinan antara perempuan Tionghoa dengan lelaki Jawa sudah terjadi sejak berabad-abad yang lalu. Perempuan dari tanah Tiongkok kerap menikahi lelaki di tanah Jawa yang berasal dari golongan elit atau *priyayi* seperti raja, bangsawan istana, dan pejabat daerah untuk kepentingan politis dan bisnis (Ham, 2005; Muljana, 2005; Rustopo, 2007; Sulistiati, Purwaningsih, & Sayekti, 2010). Namun di sisi lain, perkawinan tersebut juga dihindari karena adanya mitos yang beredar seperti usia abu orang Tionghoa yang lebih tua dari orang Jawa, atau kelas orang Tionghoa yang lebih tinggi daripada kelas orang-orang ‘Bumiputera’ (Ham, 2005; Winarni, 2017; Hoon, 2011). Dapat dikatakan bahwa identitas gender, etnis, ekonomi, dan kelas merupakan variabel penting dalam perkawinan. Terjadinya perkawinan dan bagaimana posisi perempuan Tionghoa di dalamnya

dapat dilatarbelakangi oleh identitas mereka sebagai perempuan dari etnis Tionghoa, dari latarbelakang kelas dan ekonomi tertentu.

Walaupun begitu banyak hambatan di dalamnya, perkawinan antara Tionghoa dan Jawa dewasa ini sudah dapat ditemui di banyak kota besar di Indonesia, salah satunya Surabaya sebagai salah satu kota dengan penduduk yang multikultur. Di satu sisi, etnis Jawa sebagai mayoritas saling bertoleransi dan membaur dengan etnis Tionghoa, tetapi juga saling berkonflik karena adanya kesenjangan sosial-ekonomi dan stereotip negatif (Husain, 2015; Majelis Lucu, 2019). Kedua etnis di kota ini juga masih menjunjung budaya dan tradisi meskipun sudah mengalami modernisasi sehingga relasi keduanya dapat berpengaruh pada setiap sendi kehidupan termasuk relasi di dalam perkawinan beda etnis.

Dengan identitas gender sebagai perempuan, mereka rentan mendapatkan ketidakadilan melalui praktik-praktik budaya dalam kedua etnis yang masih tradisional dan patriarkal. Perempuan kerap kali dianggap sebagai 'liyan' dan inferior dalam struktur keluarga Tionghoa (Meij, 2009). Begitu pun dengan keluarga Jawa yang masih menganut budaya tradisional dan patriarkal, yang menempatkan istri ke dalam posisi nomor dua setelah suami dan berperan lebih dominan pada urusan domestik rumah tangga (Geertz, 1985). Saya menduga, perkawinan yang melibatkan kedua budaya ini makin mengukuhkan kerentanan para perempuan Tionghoa untuk mengalami opresi dan ketidakadilan.

Menurut beberapa tokoh feminis, ketika ada konstruksi gender yang menganggap perempuan tidak mampu untuk memimpin sehingga ia dipisahkan dari peran-peran publik yang strategis, dan diletakkan pada peran di sektor domestik rumah tangga, yang berdampak pada terhambatnya kesempatan mengambil peran yang adil dengan laki-laki, maka muncullah ketidakadilan gender berbentuk subordinasi (Fakih, 2012; Fakih, 2016; Mies, 1986; Saptari & Holzner, 1997). Studi dari Letha Scanzoni dan John Scanzoni juga menunjukkan bahwa ada beberapa pola dalam relasi suami istri yang menempatkan istri di bawah kekuasaan suami dan tidak memiliki kebebasan yang setara dan ada pula yang menempatkan istri sebagai pihak yang setara dengan suami (Yulianto dkk, 2016). Merujuk pada pemikiran mereka, saya melihat bahwa perkawinan antara

perempuan Tionghoa dengan laki-laki Jawa dapat menempatkan mereka dalam perlakuan yang adil bahkan juga dapat mengalami ketidakadilan berupa subordinasi.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang telah mengulas tentang permasalahan serupa. Maria Setiawan dalam penelitian feminisnya juga mengungkapkan bahwa selain stereotip atau pelabelan negatif dari masyarakat Indonesia lainnya, ada pengalaman diskriminasi berupa ketidaksetaraan gender yang dialami para perempuan Tionghoa di dalam komunitas etnisnya sendiri (Setiawan, 2012). Menurut Yulianto dalam tesis di bidang psikologi, pada perkawinan yang terjadi di antara perempuan Tionghoa dengan laki-laki Jawa, perbedaan etnis justru merupakan sebuah manifestasi interdependensi antara kedua pihak dalam pernikahannya melalui konsolidasi peleburan identitas (*identity*), penggunaan kuasa (*power*), dan penggunaan sumber daya (*resources*) (Yulianto, 2013). Dalam sebuah penelitian feminis, ditemukan juga bahwa perempuan Tionghoa yang berpindah agama karena perkawinan dilakukan sebagai usaha subyektifitas mereka untuk menyesuaikan eksistensi diri yang sesuai dengan hidupnya (Rizkinanda, 2008).

Penelitian-penelitian terdahulu tersebut telah mengulas isu terkait perempuan Tionghoa dan perkawinan beda etnis antara Tionghoa dan Jawa, tetapi masih ada kekosongan seperti interdependensi dalam perkawinan perempuan Tionghoa dengan laki-laki Jawa hanya dikupas secara psikologi, dan hanya mengupas perkawinan mereka dari sisi identitas agama saja. Saya melihat perlunya sebuah kajian feminis yang mengangkat suara perempuan Tionghoa berdasarkan pengalaman mereka atas identitas yang tidak tunggal di dalam kehidupan perkawinan.

Merujuk pada pemikiran Kimberle Crenshaw yakni teori interseksionalitas, pengalaman tertentu seorang perempuan, termasuk opresi atau ketertindasan, yang membedakannya dengan perempuan lain adalah karena hasil dari pertemuan beragam identitas yang dimilikinya seperti identitas gender, etnis, agama, kelas, dan identitas lainnya (Crenshaw, 1991). Crenshaw juga menyajikan sebuah model analisis secara struktural, yang melihat interseksionalitas dari segi

struktur identitas dalam sebuah sistem yang ditinggali oleh perempuan tersebut. Oleh karena itu penting untuk melihat adanya keberagaman identitas yang bekerja dalam perkawinan para perempuan Tionghoa ini tidak hanya dari sisi identitas agama. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa identitas lain seperti etnis, gender, ekonomi, kelas cukup strategis bermain dan membentuk struktur dalam relasi perkawinannya dengan lelaki Jawa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pertanyaan yang ingin dijawab dalam studi ini adalah: “Bagaimana posisi dan peran perempuan Tionghoa pada ranah pengambilan keputusan, pembagian peran atau kerja, serta akses dan kontrol terhadap sumber daya dalam relasi perkawinannya dengan laki-laki Jawa?”. Dengan menggunakan konsep-konsep seperti subordinasi, relasi suami-istri, identitas, etnis, dan teori interseksionalitas, studi ini memperlihatkan bahwa dengan adanya pertemuan dari identitas-identitas yang dimiliki, perempuan dari etnis Tionghoa berada di posisi dan peran yang mungkin terjadi, apakah sebagai pihak yang setara ataupun sebagai pihak yang ter subordinasi, dalam relasi perkawinannya dengan laki-laki Jawa.

## **METODE**

Metode dalam studi ini menggunakan pendekatan kualitatif berperspektif feminis. Teknis penelitian dilakukan dalam konteks pandemi COVID-19 dengan memperhatikan protokol kesehatan dari pemerintah. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam dengan subyek penelitian yang dilakukan secara jarak jauh dengan telepon dan studi literatur pada literatur terkait yang didapat dari internet. Data yang terkumpul ditampilkan dalam bentuk deskriptif seperti hasil wawancara (transkrip verbatim), tinjauan literatur dan teori yang terkait dengan masalah penelitian.

Setelah data dikumpulkan, tahap koding dan klasifikasi tema dilakukan sehingga pengelompokan data dapat mendeskripsikan topik yang diteliti. Analisis dilakukan dengan mengelaborasi deskripsi data dan beberapa kutipan narasi dari subyek penelitian dengan sebuah teori feminis. Peneliti menarasikan analisis dalam pembahasan sehingga kesimpulan dari penelitian dan saran dapat

disusun sebagai solusi dari masalah. Penelitian ini juga berdasarkan persetujuan oleh pihak terkait dan isu etis yang berlaku di masyarakat.

Subyek utama dari penelitian ini adalah empat perempuan Tionghoa yang menikah dengan laki-laki Jawa. Kriteria dari perempuan tersebut adalah berusia 25-40 tahun, besar dan tinggal di Surabaya (atau daerah sekitarnya), dan telah menikah selama minimal 6 bulan. Aspek keberagaman identitas mereka meliputi hal keturunan (golongan), identifikasi etnis, agama, tingkat ekonomi, dan profesi. Subyek pelengkap adalah empat laki-laki Jawa yang menjadi suami mereka masing-masing, berusia 25-40 tahun, besar dan tinggal di Surabaya (atau daerah sekitarnya), dan memiliki keberagaman proses identifikasi dalam etnisitas, agama, tingkat ekonomi, dan profesi.

Proses menentukan informan dilakukan dengan memilih delapan informan dengan asumsi masing-masing mampu untuk mewakili keberagaman identitas yang diperlukan. Perempuan pertama mengidentifikasi dirinya sebagai Tionghoa totok karena keturunan, kurang tradisional tetapi pribadi yang moderen, Kristen Protestan, seorang manajer perusahaan dengan penghasilan menengah ke bawah, menikah dengan seorang laki-laki Jawa asli, Muslim, seorang operator *broadcast* dengan penghasilan menengah ke bawah. Perempuan kedua adalah Tionghoa peranakan (campuran), individu tradisional, Kristen Protestan, seorang dosen sebuah universitas dengan penghasilan menengah ke bawah, yang menikah dengan laki-laki Jawa asli, Kristen Katolik, seorang dosen juga dengan penghasilan menengah ke bawah. Perempuan ketiga mengidentifikasi dirinya sebagai Indonesia (campuran beragam etnis) daripada Tionghoa, individu yang moderen, Kristen Katolik, seorang pekerja seni dengan penghasilan menengah ke atas, menikahi laki-laki Sunda-Jawa, Muslim, seorang pekerja seni juga dengan penghasilan menengah ke atas. Yang terakhir adalah seorang perempuan Tionghoa peranakan (campuran), individu yang tradisional, Kristen Protestan, seorang 'mom-preneur' dengan penghasilan menengah ke bawah yang menikah dengan seorang laki-laki Jawa, Kristen Protestan, seorang wirausahawan dengan penghasilan menengah ke bawah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perempuan Tionghoa sebagai Partner yang Seimbang dan Melengkapi Suami.

Dari hasil pengamatan, posisi dan peran perempuan Tionghoa di dalam perkawinan dengan laki-laki Jawa bersifat dinamis dan beragam berdasarkan konteks-konteks tertentu. Yang pertama posisi sebagai partner yang seimbang dan melengkapi suami. Berulang kali mereka menggambarkan relasi mereka dengan para suami dengan kata 'partner' dan 'teman'. Di dalam pengambilan keputusan, mereka selalu dilibatkan oleh suami mereka dalam mengambil sebuah keputusan dan memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi penentu akhir sebuah keputusan. Keterlibatan mereka bervariasi mulai dari berkompromi dengan suami sampai berani untuk berkonfrontasi.

Bentuk kompromi dengan suami terlihat dari bagaimana mereka dapat melaksanakan pernikahan dengan suami yang berbeda agama melalui prosesi pernikahan beda agama agar masing-masing pihak tetap mempertahankan agama masing-masing. Selain perbedaan agama, perbedaan etnis juga membuat mereka harus berkompromi dengan melaksanakan pernikahan menggunakan tradisi secara Tionghoa, atau dengan menghadirkan dua tradisi yakni Tionghoa dan Jawa sekaligus, atau bahkan tidak menggunakan sama sekali kedua tradisi dan menggantinya dengan tradisi baru atau umum seperti konsep pernikahan *western*. Sikap berkompromi tersebut diambil karena berbagai faktor seperti keteguhan individu untuk mempertahankan identitasnya, latar belakang identitas kedua keluarga yang beragam, sikap demokratis pasangan dalam menanggapi perbedaan, dan aturan agama tentang konsep pernikahan.

Memasuki kehidupan perkawinan, para perempuan Tionghoa di Surabaya juga masih dapat mengkompromikan praktik-praktik budaya Tionghoa. Mereka masih menggunakan sedikit bahasa Mandarin, merayakan Imlek, menyediakan mie dan telur merah ketika ada yang berulang tahun. Dalam ritual peribadahan, mereka juga merasa tetap dapat menjalaninya dengan baik dan leluasa. Dalam melakukan praktek budaya dan agama tersebut, beberapa juga mengenalkannya kepada pasangan dan melakukannya bersama tanpa paksaan meskipun mereka

berbeda agama. Dalam menentukan keturunan, mereka juga mampu untuk berkompromi dengan pasangan dalam hal jumlah anak, jenis kelamin anak, model pendidikan anak, bahkan kapan waktu yang tepat untuk memiliki anak.

Perempuan Tionghoa juga kerap menunjukkan sikap aktif dan agresif terkait pembuatan keputusan dalam hubungan dengan pasangan. Ini terlihat ketika mereka menuntut kejelasan dari pasangan tentang status hubungan sebelum menikah, menentukan bahasa yang digunakan dalam rumah tangga, serta menentukan konsep acara pernikahan. Mereka bahkan sampai berani berkonfrontasi atau berselisih paham untuk memperjuangkan keyakinannya. Mereka merasa bertindak lebih cepat dan impulsif untuk menentukan keputusan dalam waktu sesegera mungkin dibandingkan dengan suami mereka yang dirasa lambat dan banyak pertimbangan.

Dalam beberapa konteks terkait pembagian peran atau kerja dalam perkawinan, para perempuan Tionghoa sebagai partner memiliki pembagian yang seimbang dan setara dengan suami, tidak ada yang lebih diutamakan atau dikesampingkan. Bersama pasangan, mereka dapat bertukar peran dan kerja secara fleksibel yang meliputi hal mencari nafkah, mengurus pekerjaan rumah, dan mengasuh anak. Keempat perempuan tersebut sama-sama bekerja untuk mencari nafkah dengan sukarela dan untuk saling melengkapi. Peran atas pekerjaan rumah dilakukan oleh mereka bersama-sama dengan para suami dan rata-rata tidak ada peraturan-peraturan khusus dan kaku tapi lebih berdasarkan pada kemampuan, kesukaan, dan kesukarelaan masing-masing pihak. Mengasuh anak juga menjadi pekerjaan yang dilakukan bersama dengan secara bergantian berdasarkan kemampuan masing-masing pihak, atau juga menggunakan bantuan dari pihak lain seperti jasa pengasuh atau *daycare*.

Dalam konteks tertentu, para perempuan Tionghoa di Surabaya juga memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya yang sama besarnya dengan para suami. Mereka bersama suami dapat bersama-sama menggunakan aset yang dimiliki pribadi atau bersama, seperti rumah atau kendaraan. Mereka juga menyimpan surat-surat berharga dan harta di tempat yang dapat diakses dengan mudah. Mereka mengelola keuangan berdasarkan konteks kebutuhan dan potensi

diri, ada yang yang melibatkan suami, atau dipercaya mengelola sendiri keuangan rumah tangga seluruhnya.

### **Karakter Maskulin dan Identitas Perempuan Tionghoa Modern pada Relasi Gender dalam Perkawinan**

Jika merujuk pada konsep relasi suami-istri menurut Letha dan John Scanzoni (Yulianto dkk, 2016), bentuk relasi yang dialami oleh para perempuan Tionghoa di atas dapat disebut dengan relasi partner yang setara (*equal partner*). Dalam hal ini para perempuan Tionghoa memiliki kemampuan yang sama dengan laki-laki Jawa di dalam relasi pada perkawinannya untuk menjadi pengambil keputusan, pencari nafkah utama, dan saling mengisi peran dengan menganggap kedua pihak sama-sama di posisi yang penting.

Dari fakta-fakta yang ada, para perempuan-perempuan Tionghoa tersebut justru memiliki karakter maskulin seperti aktif, agresif, berani, mandiri, terbuka, dan mampu memimpin. Hal ini mendobrak karakter-karakter feminin yang dimiliki oleh perempuan Tionghoa dan Jawa tradisional yaitu sebagai istri hendaknya bersikap feminin, seperti pasif, emosional, menurut pada suami, dan mengasuh (Rudiansyah, 2017; Uyun, 2002). Karakter yang cenderung maskulin tersebut seperti yang telah diulas oleh Sulistiati dan kawan-kawan dalam penelitiannya bahwa perempuan Tionghoa tradisional yang berani melakukan perlawanan terhadap diskriminasi laki-laki dalam perkawinan dianggap sebagai 'pemberontak' (Sulistiati, Purwaningsih, & Sayekti, 2010).

Rudiansyah juga mengungkapkan bahwa perempuan Tionghoa dari golongan peranakan di konteks modern memiliki karakter yang lebih dominan dalam relasi suami-istri di keluarga Tionghoa yang bertujuan untuk menjaga keselarasan di dalam keluarga (Rudiansyah, 2017). Karakter maskulin ini kemudian dapat disinergikan dengan karakter laki-laki Jawa tradisional yang cenderung feminin seperti mudah menerima, sabar, dan *alon-alon asal kelakon*. Sinergi melalui upaya kompromi dan konfrontasi ini lantas menjadi strategi untuk menghindarkan diri dari dominasi suami dan posisi yang dirugikan.

Selain sinergitas karakter, sebagai pasangan yang modern membuat mereka sama-sama menjunjung nilai-nilai seperti demokratis, toleransi,

rasionalitas, produktifitas, dan efisiensi sebagai dasar dari pembagian peran dalam perkawinan, bukan pada jenis kelamin, etnis, agama. Salah satunya terlihat dari bagaimana para perempuan Tionghoa dipercaya mengelola keuangan dan mencari nafkah dengan alasan etnis mereka dikenal memiliki karakter yang ulet dalam mencari uang dan hemat (Basti, 2007). Tingkat ekonomi dan profesi juga menghasilkan posisi yang setara. Ketika kedua pihak sama-sama bekerja dengan penghasilan tidak tetap atau terbiasa mandiri secara finansial, ada kesempatan yang lebih besar untuk keduanya menjadi pencari nafkah utama. Mereka yang mampu untuk membayar jasa pengasuh anak atau *daycare* juga memiliki kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pekerjaan di ranah publik.

Identitas sebagai perempuan yang taat terhadap agamanya juga memengaruhi agama yang dipakai dalam perkawinan. Pernikahan dari pasangan beda agama tetap dapat diusahakan meskipun harus secara beda agama. Mereka juga bebas melakukan ritual dan praktik kehidupan beragama sehari-hari, bahkan pasangan dapat turut terlibat dalam menjalankannya. Sebagai Tionghoa peranakan, mereka juga tidak melupakan budaya Tionghoa tradisional dalam kehidupan perkawinan mereka mulai dari konsep acara pernikahan, praktik dan nilai budaya yang dijalankan dalam kehidupan perkawinan mereka melalui usaha kompromi dan konfrontasi dengan pasangan.

Sejalan dengan argumen atas interseksionalitas identitas, membuktikan bahwa identitas-identitas dari para perempuan Tionghoa tersebut dapat melahirkan pengalaman yang unik yang mungkin tidak dialami oleh individu atau kelompok lain. Dengan interseksionalitas dari identitas-identitas yang dimiliki pada aspek-aspek tertentu, mereka mengalami kesetaraan dalam posisi pada relasi gender dengan laki-laki Jawa di dalam sebuah perkawinan beda etnis sebagai pasangan yang melengkapi dan menghilangkan kesenjangan antara keduanya.

### **Perempuan Tionghoa sebagai Pasangan yang Tunduk dan Melayani Suami**

Relasi para perempuan Tionghoa di Surabaya sebagai istri dari laki-laki Jawa sangat dinamis. Jika sebelumnya kita dapat melihat posisi mereka sebagai partner yang seimbang dan melengkapi, dalam konteks yang lain saya menemukan bahwa ada struktur atau hirarki dalam relasi perkawinan mereka. Rata-rata para

subyek juga menggambarkan dengan menyebut suami sebagai ‘kepala’ dengan istri sebagai ‘leher’, ‘penolong’, atau ‘cambuk’. Di lain sisi, relasi tersebut menggambarkan juga bahwa istri masih memiliki kekuatan tersendiri yaitu untuk mengarahkan, mengingatkan, dan mengangkat martabat suami.

Jika sebelumnya para perempuan Tionghoa bersikap aktif dalam pengambilan keputusan, dalam konteks yang lain ternyata mereka juga dapat bersikap pasif. Pengambilan keputusan kadang dilakukan dengan menerima keinginan dari suami sebagai upaya penyesuaian diri. Beberapa kali, pertimbangan mereka masih diterima meskipun tidak menentukan hasil. Jikapun mereka dapat menentukan keputusan, kewenangan itu didelegasikan oleh suaminya dan terbatas pada urusan domestik rumah tangga.

Dalam menentukan budaya dan agama pada perkawinan, mereka juga terkadang mengikuti pada dominasi budaya dan agama dari pasangan. Mereka memanggil pasangan secara hormat, berkomunikasi dengan bahasa Jawa *krama*, mencium tangan pasangan (*salim*), dan menerima ‘tumpang-tangan doa’ dari pasangan. Selain karena sudah terbiasa di lingkungan keluarga asal yang multikultur, hal itu juga dilakukan sebagai bentuk penghormatan mereka kepada pasangan, baik secara sosial maupun spiritual.

Dalam pembagian peran, ada kalanya istri berperan sebatas pencari nafkah tambahan, sedangkan suami sebagai pencari nafkah utama. Demi fokus mengurus anak, sebagian besar subyek harus berhenti bekerja di luar rumah agar bisa bekerja dari rumah, menngganti jam kerja dari *full-time* menjadi *part-time*, atau bahkan tidak bekerja sama sekali. Mereka sendiri yang memilih untuk menjalankan peran pengasuhan itu secara penuh.

Di dalam menjalankan peran mengerjakan pekerjaan di rumah, ada subyek yang memilih secara sukarela melayani suami tanpa paksaan sebagai ‘bahasa kasih’, seperti menyediakan makanan. Hal ini memperlihatkan peran istri yang mengabdikan kepada suami. Subyek lain juga memahami adanya pembagian peran suami-istri yang kaku dan terstruktur. Suami sebagai pemimpin atau ‘juru kemudi’ bahtera rumah tangga, pengayom keluarga, dan memiliki iman yang tinggi, sedangkan peran istri lebih pada merawat dan mengasuh keluarga. Pemikiran

mereka dilahirkan dari proses mengadopsi nilai-nilai di keluarga dan ajaran agama, serta hasil perjalanan hidup.

Dalam mengakses dan mengontrol sumber daya dalam perkawinan, ada kesenjangan suami dengan istri. Beberapa istri yang hanya bisa bekerja dari rumah tidak bisa mendapatkan penghasilan sebanyak ketika ia bekerja di kantor sehingga presentase untuk mendapatkan persetujuan kredit aset atas namanya juga menjadi lebih kecil. Kontrol pasangan terhadap keuangan juga menjadi masalah tersendiri, yaitu adanya kontrol suami yang tinggi pada keuangan rumah tangga menyebabkan istri lebih susah untuk mengakses kapan saja dan di mana saja karena perlunya ijin terlebih dulu dari suami.

### **Identitas Perempuan Tionghoa Tradisional, Agama, dan Status Ekonomi pada Relasi Gender dalam Perkawinan**

Dari pemaparan di atas dapat dilihat bahwa pada konteks-konteks tertentu, para perempuan Tionghoa di Surabaya secara struktur masih berada di bawah suami dan mendapat domestifikasi peran. Merujuk pada pola relasi suami istri menurut Letha dan John Scanzoni, relasi ini seperti yang terjadi pada relasi *head-complementer* dan *senior-junior partnership* yang menempatkan istri tidak seutama laki-laki dalam pengambilan keputusan dan pembagian peran publik (Yulianto, 2013). Relasi seperti ini juga identik dengan pembagian peran menurut budaya tradisional etnis mereka. Dalam tradisi Tionghoa, perempuan cenderung bersikap feminin yaitu bersikap pasif, emosional, menurut pada suami yang sejak awal telah diatur untuk menjaga keselarasan keluarga (Rudiansyah, 2017). Meskipun mereka rata-rata sudah tergolong Tionghoa peranakan modern, peran-peran gender tradisional ternyata masih dihayati dan dilakukan di dalam perkawinan, seperti hasil penelitian Rudiansyah yakni para perempuan Tionghoa modern di Medan yang masih menjalankan peran tradisional dalam urusan pernikahan (Rudiansyah, 2017).

Peran gender tradisional ini juga mirip dengan budaya Jawa. Perempuan Jawa seorang istri diidentikkan berperilaku tenang, *nrimo* (selalu menerima), mampu mengendalikan diri, mempunyai naluri mengasuh, merawat, dan diayomi oleh suami (Handayani & Novianto, 2004; Uyun, 2002). Sebagai seorang

perempuan Jawa, saya merasa identitas gender tersebut tersebut memang benar adanya dalam didikan dari keluarga saya terkait identitas saya nanti sebagai istri dalam perkawinan. Kontrol dalam hal ekonomi dan pengendalian diri yang sempurna digolongkan ke dalam peran yang feminin dan itu dapat dilakukan baik oleh laki-laki dan perempuan Jawa (Handayani & Novianto, 2004), sehingga identitas feminin dari laki-laki Jawa membuat para suami mereka lebih berkuasa dalam mengontrol dan mengakses sumber daya ekonomi. Ini juga saya lihat sendiri pada karakter beberapa paman saya dari Jawa yang termasuk ketat mengatur keuangan keluarga, bahkan cenderung pelit, sehingga sang istri harus mencukupkan sebarang apapun yang ada.

Identitas agama juga penting dalam membentuk posisi dan peran dalam relasi suami-istri. Beberapa agama yang mayoritas mereka anut seperti Kristen Protestan mengajarkan relasi hierarkis antara suami dan istri. Hal itu juga saya pahami sebagai penganut agama yang sama bahwa saya kerap menemukan ajaran agama saya dalam teks yang cenderung memorduakan perempuan dalam perkawinan, misalnya posisi suami sebagai kepala istri sehingga istri tunduk kepada suami, penolong laki-laki, dan merawat keluarga (Efesus 5:22-24, Kejadian 2:18, Titus 2:4-5, Amsal 31:15 dalam Alkitab). Ketika taat melakukannya, saya akan dihargai sebagai istri yang cakap dan diidamkan oleh para suami jika dapat melakukan hal tersebut (Rumiyati, 2017). Ketika para perempuan Tionghoa tersebut adalah orang yang taat dan absolut terhadap agama, mereka rentan mendapat subordinasi posisi dan domestifikasi peran rentan sesuai ajaran agama atau interpretasinya yang tidak adil gender.

Beberapa perkawinan dari perempuan Tionghoa yang bersuamikan seorang laki-laki muslim juga dipengaruhi oleh ajaran Islam yang dianut suaminya. Dalam Islam, ada beberapa teks dalam ajaran yang mengatur tentang relasi hierarkis, misalnya perempuan sebagai pihak yang dipimpin dan dilindungi laki-laki karena dianggap lebih lemah, diwajibkan memelihara kehormatan (martabat) suami, taat dan hormat kepada suami, dan berhak untuk dihukum (dipukul) ketika bersalah (Quran Surat An-Nisa' [4]:34 dalam Tafsirweb, 2020; Quran Surat Al-Ahzab:33 dalam Tafsirweb, 2020; HR. Abu Dawud 5217 dalam

Syar'i, 2017). Hierarchy dalam masyarakat Islam ini juga saya lihat sendiri dalam anggota keluarga besar saya yang muslim, yaitu bibi-bibi saya yang selalu dididik oleh suami mereka untuk menaati keputusan dan perintah suami, serta selalu mencium tangan suami (salim).

Tingkat ekonomi juga membatasi peran sebagai pencari nafkah utama. Biaya jasa *daycare* dan pengasuh anak di Surabaya tergolong besar bagi para subyek yang hanya berpenghasilan mereka antara dua sampai sepuluh juta rupiah per bulan. Mereka lantas mengasuh anak dengan tangan sendiri dan peran ini rentan mengurangi produktifitas mereka di sektor publik apabila tidak membagi peran dengan suami. Hal ini pun saya rasakan sendiri ketika ibu saya tidak punya uang lagi untuk menyewa pengasuh dan harus rela berhenti bekerja di luar rumah agar fokus mengurus anak.

Temuan studi ini sejalan dengan pemikiran Crenshaw bahwa interseksionalitas dari berbagai identitas-identitas yang perempuan Tionghoa miliki dapat membentuk pengalaman tertentu dalam hal ini adalah pengalaman subordinasi yang terbukti ada di dalam relasi pada perkawinan, baik dalam pengambilan keputusan, pembagian peran, dan akses serta kontrol sumber daya. Namun di lain sisi, mereka dapat mengendalikan kecenderungan subordinasi tersebut dengan melakukan kesadaran dan rasionalitas atas pilihan mereka. Mereka masih 'berkuasa' dalam mengatur dominasi pasangan seperti karakter feminin dari para perempuan Jawa tradisional yang menjadi ratu atau pemimpin (Handayani & Novianto, 2004), melalui sikap kooperatif dan pengendalian diri, sebagai strategi menguasai keputusan strategis di ranah privat dan publik.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan penelitian tersebut, dapat saya simpulkan bahwa para perempuan Tionghoa di Surabaya mengalami posisi dan peran yang beragam dalam relasi pada perkawinan mereka dengan laki-laki Jawa di ranah pengambilan keputusan, pembagian peran, serta akses dan kontrol terhadap sumber daya yang diakibatkan oleh pertemuan dari identitas-identitas yang dimilikinya. Dalam konteks tertentu, mereka dapat menjadi pasangan yang seimbang dan melengkapi suami, tetapi di konteks yang lain mereka juga dapat

menjadi pasangan yang tunduk dan melayani suami. Berdasarkan temuan ini, studi ini dapat mengontribusikan sebuah pengetahuan ilmiah baru yang menggambarkan kondisi dari keadilan begitu juga potensi ketidakadilan yang dihadapi oleh perempuan dalam perkawinan antaretnis, secara khusus Tionghoa dan Jawa. Ini juga merefleksikan bahwa relasi dengan pihak-pihak terkait seperti pasangan, keluarga, dan institusi agama adalah sangat mempengaruhi cara bagaimana mereka diperlakukan dalam perkawinan.

Temuan-temuan ini juga dapat menjadi sebuah pedoman ilmiah untuk penilaian dan evaluasi dari pemahaman dan kebijakan dari pihak-pihak terkait sehingga mereka dapat menjalani perkawinan yang lebih setara. Untuk para perempuan Tionghoa, pengetahuan ini dapat membantu mereka untuk memberdayakan diri. Sebagai contoh, dengan memanfaatkan identitas yang mereka miliki seperti kemampuan pengelolaan keuangan yang baik, karakter feminin dan maskulin, dan ketaatan terhadap ajaran agama, justru dapat membantu mereka mencapai posisi yang setara dan strategis dalam perkawinan, hanya jika mereka berpikir kritis dan melakukan secara sadar. Pasangan mereka, keluarga, kelompok etnis Tionghoa dan Jawa, dan institusi agama sebagai pemberi pengaruh yang kuat dalam masyarakat harus membentuk sebuah pemahaman dan perlakuan yang lebih setara dan adil pada laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan apapun identitasnya. Sebagai contoh, dengan memprioritaskan nilai rasionalitas dan produktivitas individu untuk pembagian peran rumah tangga daripada menggunakan nilai gender, mengembangkan kelas-kelas atau diskusi terkait ajaran dalam pertemuan-pertemuan etnis dan agama yang mempromosikan perkawinan dengan kesetaraan gender.

## REFERENSI

- Basti. (2007). Perilaku prososial etnis Jawa dan etnis Cina. *Psikologika No.23, XII*.
- Crenshaw, K. (1991). Mapping the margins: intersectionality, identity politics, and violence against women of color. *Stanford Law Review*, 1241-1300.
- CTE. (2019, November 18). Pre-Eliminary interview: pernikahan Tionghoa-Jawa. (Putri, Interviewer)
- Fakih, M. (2012). *Analisis gender dan transformasi sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fakih, M. (2016). *Analisis gender dan transformasi sosial*. Yogyakarta: InsistPress.
- Geertz, H. (1985). *Keluarga Jawa*. Jakarta: PT Temprint.
- Ham, O. H. (2005). *Riwayat Tionghoa peranakan di Jawa*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Handayani, C. S., & Novianto, A. (2004). *Kuasa wanita Jawa*. Yogyakarta: LKiS.
- Hoon, C.-Y. (2011). *Chinese Identity in Post-Suharto Indonesia: Culture, Politics, and Media*. Brighton, Portland, Toronto: Sussex Academic Press.
- Husain, S. B. (2015). Chinese Cemeteries as a Symbol of Sacred Space: Control, Conflict, and Negotiation in Surabaya, Indonesia. In S. B. Husain, *Cars, Conduits, and Kampongs* (pp. 323-340). Leiden: Brill.
- Majelis Lucu. (2019, Agustus 12). [MASIH] SENGIT! Jawa vs Tionghoa di Surabaya (PART 2) | BONDO WANI - EPS 2. Diambil dari Youtube: [https://youtu.be/tjAPD\\_ctrN0](https://youtu.be/tjAPD_ctrN0)
- Meij, L. S. (2009). *Ruang sosial baru perempuan Tionghoa: Sebuah kajian pascakolonial*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mies, M. (1986). *Patriarchy and accumulation on a world scale: women in the international division of labour*. London: Zed Books.
- Muljana, S. (2005). *Runtuhnya kerajaan Hindu-Jawa dan timbulnya negara-negara Islam di Nusantara*. Yogyakarta: LKiS.
- Rizkinanda, Y. (2008). *Perempuan keturunan Tionghoa yang menjadi Muslim karena menikah dengan laki-laki Muslim (penghayatan perempuan terhadap kehidupan perkawinan mereka)*. Jakarta: Universitas Indonesia.

- Rohmah, Y. (2020, Juli 25). *Butuh baby sitter di Surabaya? Ini Rekomendasi 10 Yayasan Penyalurnya untuk Anda!* Diambil dari The Asian Parent Indonesia: <https://id.theasianparent.com/penyalur-baby-sitter-surabaya>
- Rudiansyah. (2017). Ketidakadilan gender dalam kehidupan perempuan Tionghoa di Kota Medan. *Jurnal Rupa Vol.2 No.2*, 76-149.
- Rumiyati. (2017). Makna isteri yang cakap menurut Kitab Amsal 31:10-31 . *KERUSSO, VOLUME 2 NUMBER 2*, 31-37.
- Rustopo. (2007). *Menjadi Jawa: orang-orang Tionghoa dan kebudayaan Jawa di Surakarta, 1985-1998*. Yogyakarta: Ombak.
- Saptari, R., & Holzner, B. (1997). *Perempuan Kerja dan perubahan sosial: sebuah pengantar studi perempuan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Setiawan, M. V. (2012). *Identitas diri perempuan Tionghoa Indonesia: studi kasus perempuan Tionghoa peranakan usia 25-40 di Jakarta*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sulistiati, Purwaningsih, & Sayekti, S. (2010). *Perempuan dan perkawinan dalam cerita pendek peranakan Tionghoa periode awal*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Syar'i, M. H. (2017, Mei 31). *Hukum cium tangan*. Diambil dari Muslim.or.id: <https://muslim.or.id/30087-hukum-cium-tangan.html>
- Tafsirweb. (2020). *Quran Surat al-Ahzab*. Diambil dari Tafsirweb.com: <https://tafsirweb.com/37165-quran-surat-al-ahzab.html>
- Tafsirweb. (2020). *Quran Surat an-Nisa*. Diambil dari Tafsirweb.com: <https://tafsirweb.com/37121-quran-surat-an-nisa.html>
- Uyun, Q. (2002). Peran gender dalam budaya Jawa. *Psikologika No.13 tahun VII*, 32-42.
- Winarni, R. (2017). Asimilasi Perkawinan Etnis Cina Dengan Pribumi di Jawa: Fokus Studi di Jember, Situbondo, dan Tulungagung . *Jurnal Patrawidya, Vol. 18, No. 1*, 13 - 28.
- Yayasan Lembaga SABDA. (2020). *Alkitab*. Diambil dari Sabda.org: <https://www.sabda.org/alkitab/tb/?kitab=1>
- Yulianto dkk, J. E. (2016). Studi Fenomenologis Interaksi Kuasa pada Relasi Perkawinan. *INSAN: Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental Vol. 1(2)*, 97-111.
- Yulianto, J. E. (2013). *Dinamika Psikologis Pelaku Perkawinan Antaretnis: Manifestasi dan Dinamika Interdependensi pada Relasi Perkawinan*

*Perempuan Tionghoa dengan Laki-Laki Jawa.* Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.

# Strategi dan Model Pendidikan Nilai di Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Putri Hardina Pratiwi

putri0111pasca.2019@student.uny.ac.id.

## Abstrak

Arus globalisasi yang demikian kuat berpotensi mengikis jati diri bangsa. Nilai-nilai kehidupan yang dipelihara menjadi goyah. Perlunya kerja sama antara keluarga, sekolah dan masyarakat dalam menanamkan pendidikan nilai kepada anak sejak usia dini. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana strategi maupun model pendidikan nilai yang berjalan di sekolah di tingkat sekolah menengah pertama (SMP). Metode yang digunakan dalam artikel ini merupakan hasil dari kajian pustaka yang bertujuan untuk menganalisis strategi dan model pendidikan nilai di sekolah menengah pertama (SMP). Metode pada tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *library research*. Sumber data yang digunakan merupakan sumber data sekunder berupa buku-buku, jurnal, atau dokumen yang berkaitan dengan strategi atau model pendidikan nilai di sekolah. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dengan menelaah buku, jurnal, atau artikel terkait, setelah data terkumpul maka akan dianalisis dengan mereduksi data, kemudian menyimpulkan data yang telah dianalisis. Hasil dari kajian artikel ini menunjukkan bahwa model pendidikan nilai itu sendiri dapat di implementasikan melalui metode dogmatik, deduktif, induktif. Sedangkan strategi pendidikan nilai di sekolah diterapkan melalui cara : Nasihat guru, keteladanan (*modelling*), analisis kasus, pembiasaan & kebudayaan, ekstrakurikuler & pengembangan diri, kerja sama, *punishment*.

**Kata kunci :** Strategi, Model, Pendidikan Nilai.

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi kehidupan serta jembatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Wati, 2017:60). Adanya pendidikan merupakan suatu proses menanamkan dan mengembangkan pengetahuan agar peserta didik mampu menjadi seseorang yang arif, berpengetahuan, dan beretika (Anisah, 2016:1). Pendidikan adalah fundamental kemajuan dan reformasi sosial. Pendidik harus menciptakan pengalaman belajar dengan mendukung nilai-nilai kewarganegaraan dan tanggung jawab sosial (White & Mistry, 2017). Tujuan dari adanya pendidikan itu sendiri untuk mempromosikan pengembangan kecerdasan karakter intelektual, moral, kinerja, bersama dengan karakter sekolah sebagai tempat berpikir (Shields & Light, 2011).

Berdasarkan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwasannya pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Realitasnya konsep pendidikan tersebut baik diselenggarakan

oleh pendidikan formal maupun non formal belum mampu mempersiapkan para peserta didik dapat menghadapi tantangan hidupnya pada masa datang. Hal tersebut disebabkan pendidikan kurang mampu menanggapi arus perubahan yang secara cepat terjadi di masyarakat.

Berdasarkan konteks pendidikan nasional, arti penting pendidikan nilai tidak diragukan lagi. Munculnya upaya pendidikan nilai yang berhasil dirasakan sangat mendesak, apalagi dikaitkan dengan gejala kehidupan saat ini yang sering kondusif bagi masa depan bangsa. Arus globalisasi yang demikian kuat berpotensi mengikis jati diri bangsa. Nilai-nilai kehidupan yang dipelihara menjadi goyah, bahkan berangsur-angsur hilang sehingga peran pendidikan nilai benar-benar menjamin lahirnya generasi yang tangguh secara intelektual dan moral (Zakiyah & Rusdiana, 2014:94). Kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi serta globalisasi sangat berkontribusi pada kompleksitas kehidupan sosial yang mendasari pentingnya moral, nilai, dan etika (Chowdhury, 2016). Persoalan ini menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk keluarga. Keluarga merupakan lembaga masyarakat pertama dan utama yang menjadi wadah tumbuh kembangnya kepribadian dan karakter anak (Purwaningsih, 2010:43).

Urgensi peningkatan intensitas dan pelaksanaan pendidikan nilai pada pendidikan formal mengalami tuntutan dari berbagai pihak. Apalagi dengan melihat bergesernya nilai-nilai, serta moral dan perilaku generasi muda saat ini yang menjadi isu penting dalam dunia pendidikan, dimana periode ini anak tengah mencari dan membangun identitas diri (Wulandari, 2017). Hal ini dapat dilihat dari fenomena sosial yang berkembang di masyarakat, yaitu kekerasan yang ditunjukkan oleh kenakalan remaja, perkelahian massal, perusakan lingkungan hidup, korupsi (Wening, 2012:56). Kenakalan anak yang kini merajalela di berbagai tempat, sering pula tanggung jawabnya di tudingkan kepada guru sepenuhnya. Kedudukan seperti itu sebenarnya guru tidak lagi dipandang sebagai pengajar di kelas, melainkan sebagai teladan di masyarakat (Afifa & Mashuri, 2019:188). Perlunya pendidikan nilai menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi generasi penerus bangsa (Zuchdi, 2010:2).

Terjadinya sebuah degradasi nilai-nilai karakter atau hilangnya sebuah karakter bangsa sudah barang tentu akan menjadi kelambanan perkembangan setiap bangsa, mengingat bahwa karakter setiap bangsa merupakan awal dari sebuah kemajuan bahkan menjadi sebuah pondasi dalam pembangunan (Cahyono, 2016:231). Pendidikan karakter yang semakin hari semakin mendapatkan pengakuan dari masyarakat Indonesia. Terlebih dengan dirasakannya berbagai ketimpangan hasil pendidikan dilihat dari perilaku lulusan pendidikan formal saat ini, semisal kasus korupsi, perkembangan seks bebas pada kalangan remaja, penggunaan narkoba, tawuran pelajar, kebut-kebutan di jalan para pelajar, minuman keras, pembunuhan, rampokan oleh pelajar, dan pengangguran lulusan sekolah menengah atas (Afandi, 2011:85). Terjadi kontradiksi dari realita pendidikan sekarang dengan pengertian pendidikan sendiri.

Krisis yang melanda pelajar mengindikasikan bahwa pendidikan agama dan moral yang didapat di bangku sekolah tidak berdampak terhadap perilaku manusia Indonesia. Demoralisasi terjadi karena proses pembelajaran cenderung mengajarkan pendidikan nilai dan budi pekerti sebatas teks dan kurang mempersiapkan peserta didik untuk menyikapi dan menghadapi kebutuhan dengan segala problematikanya (Akhwan, 2014:61). Senada dengan pernyataan tersebut bahwasannya akar masalah pendidikan terletak pada praktik pendidikan yang terlalu berorientasi kepada penanaman kemampuan intelektual semata dalam rangka pemenuhan tenaga kerja (Fakhrudin, 2014:81). Lembaga pendidikan Islam belum mampu menjadikan dirinya sebagai lembaga pembentuk generasi yang cerdas dan berakhlak mulia melebihi pendidikan umum, atau bahkan lembaga pendidikan islam juga ikut mengalami kemunduran dari segi kualitas pembinaan akhlak peserta didik (Yusuf, 2013:8). Upaya yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kondisi yang ada, utamanya di dalam bidang pendidikan adalah mengoptimalkan pengembangan potensi afektif melalui pendidikan nilai. Rekayasa pendidikan nilai merupakan tanggung jawab semua pihak terutama keluarga, masyarakat serta sekolah (Purwaningsih, 2010:44).

Pendidikan karakter yang utama tidak hanya menjadi tanggung jawab guru di sekolah tetapi harus menjadi perhatian orang tua ketika di rumah (Sikumbang,

Lubis & Hasibuan, 2020). Pendidikan karakter melibatkan banyak disiplin ilmu. Hal ini bertujuan agar dapat membentuk dan mendidik siswa agar lebih berkembang dalam hal persepsi, kecerdasan emosi, hubungan sosial serta moralitas anak (Rasna & Tantra, 2017). Karakter dapat dipahami sebagai konstruksi superordinat yang dijelaskan dengan sifat evaluatif penting dalam suatu hubungan moral (Vincent, Louis, & Lauren, 2017). Pendidikan karakter sebagai proses pelengkap kewarganegaraan, karakter yang baik melibatkan kewarganegaraan yang aktif yang terdiri dari partisipasi individu yang memiliki karakter yang baik (Jennifer, Laura, Amy, et. al, 2019).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wening (2012:56) faktor lingkungan memberikan pengaruh positif yang signifikan pada pembentukan karakter bila pendidikan nilai dari faktor-faktor tersebut di peroleh secara bersama-sama. secara partial keluarga, teman sebaya, dan media massa memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap pembentukan karakter siswa. Hal ini diperkuat dengan penelitian (Komariah, 2011:45-46) menunjukkan bahwa perlunya kerja sama antara keluarga, sekolah dan masyarakat dalam menanamkan pendidikan nilai kepada anak sejak usia dini sehingga dapat dikatakan faktor lingkungan sangatlah berpengaruh terhadap proses penanaman pendidikan nilai.

Senada dengan hasil penelitian di atas bahwasannya pendidikan nilai juga bertujuan untuk membentuk karakter atau akhlak dengan materi yang menyangkut moralitas, nilai-nilai (*values*), tentu memerlukan metode dan strategi khusus. Selama ini orientasi pembelajaran berpusat pada guru (*teacher centered*), artinya pembelajaran asosiatif masih belum mampu memberikan motivasi kepada siswa untuk mengkonstruksi pengetahuannya untuk lebih dari sekedar mengetahui. Materi pembelajaran tidak hanya disusun atas hal-hal yang sederhana yang bersifat hafalan tetapi juga tersusun berdasarkan materi yang kompleks yang memerlukan analisis, aplikasi dan sintesis. Hal ini guru harus terampil dalam menentukan pendekatan, strategi, metode serta teknik belajar yang dapat memfasilitasi siswa sesuai dengan tujuan yang diharapkan. (Anisah, 2016:2). Pembelajaran merupakan proses internalisasi (pembatinan) dan konsistensi (penyadaran) nilai-

nilai sehingga tidak cukup jika hanya “mengetahui” melainkan lebih penting merasakan dan mengalami (Purwaningsih, 2010:46). Pendidikan nilai sangat berdampak terhadap perkembangan intelektual peserta didik (Haldane, 1984:22). Tanpa pendidikan nilai kemungkinan besar suatu bangsa akan hancur carut marut (Nawawi, 2011:120).

Pendidikan nilai bertujuan untuk mengisih celah dan membentuk pikiran anak-anak muda dalam mengurangi arus globalisasi (Muttha, 2012:231). Konteks pendidikan nilai seharusnya seorang guru melaksanakan pendidikan nilai menentukan terlebih dahulu visi, misi dan sasaran yang mengandung muatan holistik. Peserta didik sebagai subjek didik bukan sekedar mengetahui nilai dan sumber nilai melainkan juga perlu dibimbing ke arah nilai-nilai luhur yang harus diaktualisasikan dalam kehidupan pribadinya, di dalam keluarga, masyarakat, negara dan percaturan dunia. Peserta didik juga harus menyadari nilai orang lain, nilai masyarakat nilai agama, serta mampu arif dan bijak dalam perbedaan nilai tersebut sehingga terciptanya kerukunan hidup (Zakiyah & Rusdiana, 2014:73). Hal tersebut merupakan hal yang tidak mudah untuk dilaksanakan karena faktor siswa yang bukan hanya sebagai individu dengan segala keunikannya, akan tetapi mereka juga satu kelompok sosial yang memiliki latar belakang yang berbeda satu sama lain (Rizal, 2017:46).

Pendidikan nilai menempatkan peran sentral guru di sekolah. Guru hendaknya menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa seperti halnya dalam Pancasila secara menyeluruh, karena setiap perilaku yang ditampilkan oleh guru akan ditiru oleh peserta didiknya (Rifai, 2018:9). Sebagai seorang guru juga harus mampu mengklarifikasi nilai yang sudah dimiliki peserta didik. Hal ini bertujuan agar peserta didik mampu memahami ide dan tindakan terhadap lingkungan sekitar (Harsman, 2014:30). Berdasarkan hal yang telah dijelaskan, maka sangat penting apabila guru dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas perlu memahami penerapan strategi maupun model pembelajaran terutama kaitannya dengan pendidikan nilai.

## **METODE**

Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis kepustakaan (*library research*). Peneliti menetapkan topik penelitian, kemudian melakukan kajian teori yang berkaitan dengan topik yang telah ditentukan. Kajian kepustakaan (*library research*), dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan teori sampai diperkirakan cukup memadai dalam kajian kepustakaan tersebut. Studi pustaka meliputi proses umum seperti : mengidentifikasi teori secara sistematis, penemuan pustaka, dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan topik penelitian. Pada tulisan ini kajian kepustakaan (*library research*) berusaha untuk menganalisis strategi dan model pendidikan nilai di sekolah.

Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dan lain sebagainya. Pada tulisan ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi telaah terhadap buku-buku, jurnal, artikel, dan sumber data lainnya yang berkaitan dengan strategi dan model pendidikan nilai di sekolah. Teknik pengumpulan data sangat penting karena berkaitan dengan terkumpulnya data-data yang akan diolah atau dianalisis. Setelah data terkumpul maka akan dianalisis dengan mereduksi data-data dan menggunakan data yang diperlukan dalam menulis kajian ini. Pengolahan data akan menghasilkan data yang akurat dalam tulisan ini, sehingga tulisan mengenai strategi dan model pendidikan nilai di sekolah ini dapat dijadikan acuan atau referensi dalam menulis kajian yang berkaitan. Data yang telah dianalisis akan disimpulkan sehingga dapat diketahui poin penting dalam tulisan ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pendekatan Pendidikan Nilai.**

*Pertama, Evocation*, yaitu pendekatan agar peserta didik diberi kesempatan dan keleluasan untuk secara bebas mengekspresikan respon afektifnya terhadap stimulus yang diterimanya. *Kedua, Inculcation*, yaitu pendekatan agar peserta didik menerima stimulus yang diarahkan menuju kondisi

siap. *Ketiga, Moral reasoning*, yaitu pendekatan agar terjadi transaksi intelektual taksonomi tinggi dalam mencari pemecahan masalah. *Keempat, Value clarification*, yaitu pendekatan melalui stimulus terarah agar siswa diajak mencari kejelasan isi pesan keharusan nilai moral. *Kelima, Value analysis*, yaitu pendekatan agar siswa dirangsang untuk melakukan analisis nilai moral.

*Keenam, Moral awareness*, yaitu pendekatan agar siswa menerima stimulus dan dibangkitkan kesadarannya akan nilai tertentu. *Ketuju, Commitment approach*, yaitu pendekatan agar siswa sejak awal diajak menyepakati adanya suatu pola pikir dalam proses pendidikan nilai. *Kedelapan, Union aproach*, yaitu pendekatan agar peserta didik diarahkan untuk melaksanakan secara *rill* dalam suatu kehidupan (Zakiah & Rusdiana, 2014:71-72) Sedangkan Superka, (1976) mengemukakan lima pendekatan yaitu: (1) Pendekatan penanaman nilai (*inculcation approach*), (2) Pendekatan perkembangan moral kognitif (*cognitive moral development approach*), (3) Pendekatan anal isis ni lai (*values analysis approach*) , (4) Pendekatan klarifikasi nilai (*values clarification approach*), dan (5) Pendekatan pembelajaran berbuat (*action learning approach*).

### **Metode Pendidikan Nilai**

Metode merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Metode pembelajaran adalah cara atau tahapan yang digunakan dalam interaksi antara peserta didik dan pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sesuai dengan materi dan mekanisme metode pembelajaran (Gunarto, 2013:1). Secara garis besar, pendidikan nilai di persekolahan dapat diaktualisasikan melalui metode berikut. *Pertama*, Metode Dogmatik. Metode untuk mengajarkan nilai kepada peserta didik dengan jalan menyajikan keseluruhan nilai yang harus diterima oleh peserta didik apa adanya, tanpa mempersoalkan hakikatnya. *Kedua*, Metode Deduktif adalah proses berpikir dari umum ke khusus, dengan kata lain nilai diajarkan dan diuraikan berawal dari seperangkat kode etik nilai untuk dipahami oleh peserta didik. *Ketiga*, Metode Induktif adalah proses berpikir dari yang khusus ke umum. Artinya, nilai diajarkan kepada siswa bermula dari sejumlah kasus yang terjadi di masyarakat, kemudian ditarik dan diambil kesimpulannya.

## **Strategi Pendidikan Nilai**

Strategi merupakan cara atau seni dalam menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu (Wena, 2010:2). Hal ini juga diperkuat dengan pendapat Salim & Kurniawan (2012:79) strategi merupakan segala cara untuk menghadapi sasaran tertentu dalam kondisi tertentu agar mendapatkan hasil yang diinginkan secara maksimal. Strategi merupakan sebuah kunci utama dalam membantu berbagai kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik di dalam kelas. Pada masalah ini seorang guru memberikan strategi yang menenkankan pada kesulitan belajar (Asri, Hanief, & Sufiyana, 2019:75).

Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama yaitu mendidik, mengajar, mengarahkan, menilai peserta didik melalui jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, pendidikan menengah (Kunandar, 2009). Implementasi strategi pendidikan nilai di sekolah nantinya sangat mempengaruhi tingkat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai itu sendiri, terlebih apabila pengaruh terhadap tingkat kesadaran peserta didik dalam mengamalkan nilai-nilai luhur, baik yang ada dalam lembaga atau di luar lembaga, baik yang bersifat formal maupun non-formal. Penggunaan strategi yang tepat tentunya akan menghasilkan sesuai dengan tujuan yang diinginkan (Rifai, 2018:6). Adapun strategi pendidikan nilai sebagai berikut.

### **1) Nasehat Guru**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Supriyadi, 2014 :652-653) mengungkapkan bahwa strategi pendidikan nilai yang dilakukan kepada peserta didik dengan cara pemberian nasehat disela-sela proses pembelajaran PPKn meliputi berbagai hal yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran peserta didik baik di sekolah, keluarga, masyarakat. Nasehat tersebut berupa kewajiban manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT, sikap anak terhadap orang tua dan guru, serta perilaku terhadap teman sebaya. Contoh di atas merupakan nasehat yang diberikan oleh guru secara umum, adapun nasehat yang secara individual atau khusus seperti halnya pemberian nasehat oleh guru kepada siswa ketika terlambat masuk sekolah. Hal ini

bertujuan agar seorang guru mengetahui apa yang menyebabkan peserta didik sampai terlambat masuk sekolah.

2) Keteladanan (*modelling*).

Slavin (2011:202-203) mengemukakan bahwa pembelajaran manusia tidak dibentuk oleh konsekuensinya tetapi dipelajari dengan lebih efisiensi langsung dari suatu model (peniruan). Peniruan ini melalui empat tahap yakni tahap perhatian, pengingatan, reproduksi, dan motivasi. Strategi peniruan ini sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh Gunawan (2012:19-21) bahwa faktor intern yang mempengaruhi karakter peserta didik adalah adat atau kebiasaan (*habit*). Untuk itu kepala sekolah dan guru sebagai teladan bagi peserta didiknya dalam lingkungan sekolah disamping orang tua di rumah harus menjaga dengan baik perbuatan maupun ucapan sehingga naluri peserta didik yang suka meniru dan mencontoh dengan sendirinya akan turut mengerjakan apa yang disarankan oleh guru. Metode keteladanan merupakan metode yang cukup efektif bagi pendidikan anak, karena dengan metode ini anak akan mengikutinya (Rifai, 2018:7).

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan Murdiono (2010:103) mengungkapkan strategi pendidikan nilai dengan cara keteladanan (*modelling*). Strategi keteladanan ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu keteladanan internal (*internal modelling*) dan keteladanan eksternal (*eksternal modelling*). Keteladanan internal dapat dilakukan melalui pemberian contoh baik guru maupun dosen dalam proses pembelajaran. Sementara keteladanan eksternal dilakukan dengan cara pemberian contoh-contoh oleh para tokoh yang terkenal dan diteladani, baik tokoh nasional maupun internasional. Pendidikan nilai yang bisa diambil dari hasil kajian keteladanan tersebut bisa berupa nilai tanggung jawab, ketaqwaan, keikhlasan, kejujuran. Keteladanan merupakan salah satu strategi yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai baik kepada peserta didik (Sanderse, 2013).

Senada dengan hasil penelitian Murdiono bahwasannya Windrati (2011:5) mengatakan pendidikan nilai bisa dilakukan melalui keteladanan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa konsep

keteladanan dalam pendidikan tekanan utamanya yaitu “ing ngarso sung tulodo”, melalui ing ngarso sung tulodo tersebut akan menampilkan keteladanan dalam bentuk tingkah laku, pembicaraan, cara bergaul, amal ibadah dan lain sebagainya. Diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Suriansyah & Aslamiah (2015) menunjukkan bahwa strategi keteladanan dapat dilakukan dengan cara menunjukkan keteladanan dalam berbudaya bersih. Hal ini dapat dilakukan saat akan memulai pembelajaran guru meminta masing-masing peserta didik melihat kesitar tempat duduk masing-masing untuk melihat sampah, kemudian membuangnya ketempat sampah yang sudah disediakan di dalam kelas.

### 3) Analisis kasus

Strategi yang ketiga dengan analisis kasus atau dalam strategi pembelajaran dikenal sebagai *problem based learning* (PBL). Model analisis kasus ini menjelaskan bahwa seorang dosen memberikan tugas kepada mahasiswa dengan mengkaji salah satu kasus baik melalui media atau artikel lain. setelah mahasiswa sudah mendapatkan sejumlah kasus langkah selanjutnya yaitu dengan menganalisis kasus tersebut. Strategi ini juga dapat dikatakan sebagai klarifikasi nilai (*value clarification*), karena dalam pelaksanaannya mahasiswa dituntut untuk mengklarifikasi terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam analisis kasus yang sudah ditemukan, sehingga nantinya mahasiswa dapat mengambil nilai positif dan negatif dari kasus yang sudah dianalisis.

### 4) Pembiasaan dan Pembudayaan

Strategi yang keempat dilaksanakan melalui pembiasaan. Lingkungan mempunyai peranan penting dalam pembentukan karakter peserta didik. Lingkungan yang baik kemungkinan besar akan memberikan dampak yang positif begitu pula sebaliknya, sehingga diperlukan semua elemen sekolah baik dari guru harus berusaha menciptakan lingkungan kelas maupun sekolah sebaik mungkin dengan membentuk kebiasaan maupun budaya yang memiliki nilai-nilai karakter yang positif bagi peserta didik (Rizal, 2017:50-51). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dalimunthe (2015:105)

mengungkapkan bahwa strategi pendidikan nilai dilakukan melalui pembiasaan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara (1) mengucapkan salam saat mengawali dan mengakhiri belajar mengajar. (2) berdoa sebelum pembelajaran untuk meningkatkan rasa syukur. (3) pembiasaan angkat tangan bila hendak bertanya, menjawab, berpendapat. (4) bersalaman saat bertemu dengan guru. (5) melaksanakan sholat berjamaah di sekolah.

#### 5) Ekstrakurikuler dan Pengembangan Diri

Kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan dan menguatkan nilai-nilai karakter pada peserta didik. Tujuan dari kegiatan ekstrakurikuler itu sendiri memberikan kesempatan kepada peserta didik agar dapat mengembangkan dan mengeksplorasi diri sesuai dengan kebutuhan dan minat serta bakat masing-masing peserta didik. Nilai pendidikan karakter yang berlangsung dalam kegiatan ekstrakurikuler tertuang dalam sebuah proses kegiatan-kegiatan lebih tepatnya tersimpan dalam kurikulum (*hidden curriculum*) yang merepresentasikan pada nilai-nilai karakter (Rizal dkk, 2017:51). Kegiatan ekstrakurikuler antara lain : (1) Pramuka, peserta didik dilatih dan dibina untuk meningkatkan semua nilai karakter baik nilai kejujuran, menghargai waktu, disiplin, tenggang rasa, (2) Palang Merah Remaja (PMR) bertujuan untuk menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama serta melatih kecakapan. Kegiatan ekstrakurikuler merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan untuk mengasah bakat yang dimiliki oleh seorang peserta didik. Selain fokus pada mengasah kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik guru ekstrakurikuler juga menanamkan nilai-nilai karakter pada setiap materi yang diberikan (Wati, 2017:60).

#### 6) Kerja sama

Pendidikan nilai tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada kerja sama yang dibangun oleh guru. Implementasi pendidikan nilai menjalin kerja sama dengan orang tua dan masyarakat. Terjalannya kerja sama dan komunikasi yang baik antara guru dan orang tua bertujuan untuk mengawasi dan mengontrol peserta didik baik di sekolah maupun di luar sekolah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan (Rizal, 2017:52) bentuk kerja

sama berupa : *Pertama*, pertemuan rutin, yaitu ketika pengambilan raport. Guru menyampaikan hasil prestasi peserta didik dan tingkah laku selama disekolah, sehingga dengan adanya kerja sama dengan orang tua melalui pertemuan rutin terwujudnya pendidikan nilai. *Kedua*, kunjungan rumah (*home visit*) bertujuan untuk menjalin komunikasi dan kerja sama dengan orang tua agar selalu membina, mengarahkan pada nilai-nilai yang positif serta keteladanan bagi anak didik selama berada di rumah maupun di luar rumah.

#### 7) *Punishment*

Ajaran atau peraturan tidak akan berlaku, tidak akan dipatuhi melainkan membawa kekacauan jika tidak adanya hukuman bagi pelanggarnya, karena hukuman bagian dari pendidikan. Tanpa menghukum anak bisa dikatakan tidak sedang mendidik bahkan tidak mengasahi anak. Tujuan *punishment* adalah untuk menekankan dan menegakkan peraturan, menyatakan kesalahan, menyadarkan seseorang yang berada di jalan yang salah dan meninggalkan kebenaran (Cahyono, 2016:236). Senada dengan penjelasan tersebut maka Rifai (2018:6) juga mengungkapkan hadiah dan hukuman adalah cara mengajar dimana guru memberikan materi pembelajaran dengan menggunakan hadiah terhadap kebaikan dan hukuman terhadap keburukan agar peserta didik melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan. Hukuman sebenarnya tidak mutlak diperlukan, namun berdasarkan kenyataan yang ada peserta didik tidak sama seluruhnya dalam berbagai hal sehingga, dalam pendidikan perlu adanya hukuman dalam penerapannya bagi peserta didik yang keras dan tidak cukup hanya diberikan teladan dan nasihat. Jika melihat pada sifat peserta didik secara psikologis tidak memiliki karakter yang sama maka, penerapan hukuman bagi peserta didik pada tahap-tahap kewajaran perlu dilakukan karena dengan pendekatan hukuman ini tingkat kebiasaan dan kedisiplinan dapat diterapkan.

Pada prinsipnya, pendidikan afektif atau pendidikan nilai sebenarnya secara praktis sudah ada sejak peradaban (budaya) dan kepercayaan/agama manusia tumbuh, berkembang dan dilestarikan turun temurun. Hanya saja sebagai rekayasa ilmu kependidikan menjadi kajian khusus yang baru. Pada masyarakat

Indonesia pendidikan nilai baru dikenal sekitar tahun 1976-an, bahkan banyak para pakar pendidikan yang kurang yakin akan keberhasilan pencarian sosok pendidikan nilai dan pola pendidikannya (Windrati, 2011:43). Pendidikan nilai adalah pengajaran atau bimbingan kepada siswa agar menyadari nilai kebenaran, kebaikan, keindahan melalui proses pertimbangan nilai yang tepat dan pembiasaan bertindak yang konsisten. Istilah pendidikan nilai disini dimaksudkan untuk mewakili semua konsep dan tindakan pendidikan yang menaruh perhatian besar terhadap pengembangan nilai *humanistic* ataupun *teistik*. Senada dengan pengertian di atas Rifai (2018 : 4) mengungkapkan bahwa pendidikan nilai adalah penanaman nilai-nilai kehidupan melalui teladan dan pembiasaan kepada peserta didik agar peserta didik berkembang kognitif, afektif, dan psikomotoriknya sebagai bekal dalam menjalani kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pendidikan nilai menurut Mulyana (2004) adalah pengajaran atau bimbingan kepada peserta didik agar menyadari kebenaran, kebaikan, dan keindahan melalui proses pertimbangan nilai yang tepat dan pembiasaan bertindak yang konsisten. Pendidikan nilai dimaksudkan untuk membantu peserta didik agar memahami, menyadari, dan mengalami nilai-nilai serta mampu menempatkannya secara integral dalam kehidupan (Sukitman, 2016:86). Rifai (2018:5) menyatakan tujuan pendidikan nilai adalah membantu peserta didik agar memahami, menyadari, dan mengalami nilai-nilai serta menempatkannya secara integral dalam keseluruhan hidupnya. Apabila merujuk dari pendapat yang diberikan oleh Rifai di atas, pendidikan nilai memiliki tujuan agar peserta didik memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mencapai tujuan yang dimaksud maka pendidik harus menampilkan perilaku-perilaku atau membuat kegiatan yang dapat mengakomodir seluruh nilai yang akan diaplikasikan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan memaksimalkan kegiatan intrakurikuler, dan ekstrakurikuler di sekolah.

Tujuan pendidikan nilai sendiri pada dasarnya membantu mengembangkan kemahiran berinteraksi pada tahapan yang lebih tinggi serta meningkatkan kebersamaan dan kekompakan interaksi. Tujuan pendidikan nilai tidak akan

tercapai tanpa aturan-aturan, indoktrinasi, atau pertimbangan prinsip-prinsip belajar. Sebaliknya dorongan moral komponen pembentukan struktur juga sangat penting, oleh karena itu pendidik seharusnya tidak hanya membekali siswa dengan pengetahuan melainkan dengan nilai-nilai yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari (Zakiah & Rusdiana, 2014:62). Pendidikan nilai digunakan sebagai proses untuk membantu peserta didik dalam mengeksplorasi nilai-nilai yang ada melalui pengujian kritis sehingga peserta didik dimungkinkan untuk meningkatkan atau memperbaiki kualitas berpikir serta perasaannya (Purwaningsih, 2010:46). Senada dengan pendapat diatas bahwa tujuan pendidikan nilai itu sendiri untuk membantu generasi muda dalam menafsirkan nilai-nilai yang ditransmisikan oleh media massa, untuk memberikan landasan bagi pengembangan spiritual, membantu remaja dalam mengembangkan kepribadian yang reflektif dan otonom (Lee, 2004:294).

Keterkaitan antara Nilai dan Sikap. Nilai yang dimiliki seseorang dapat mengekspresikan yang lebih disukai dan yang tidak disukai. Dapat dikatakan bahwa nilai menyebabkan sikap. nilai merupakan faktor penentu bagi pembentukan sikap. akan tetapi, sikap seseorang ditentukan oleh jumlah nilai yang dimiliki seseorang. Hal ini dengan mempelajari nilai seseorang akan mengetahui yang harus diperbuatnya. Dengan demikian nilai memiliki dasar pembenaran atau sumber pandangan dari berbagai hal, seperti metafisika, teologi, etika, estetika, dan logika. Sasaran pendidikan nilai adalah penanaman nilai-nilai luhur kepada peserta didik untuk mencapai tujuan dan sasaran yang efektif, berbagai pendekatan model dan metode dapat digunakan dalam proses pendidikan nilai. Hal ini penting untuk memberikan variasi pada proses pendidikan sehingga menarik dan tidak membosankan peserta didik (Zakiah & Rusdiana, 2014:64).

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil kajian dari berbagai sumber yang relevan maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pendidikan nilai merupakan pengajaran atau bimbingan kepada siswa agar menyadari nilai kebenaran, kebaikan, keindahan melalui proses pertimbangan nilai yang tepat dan pembiasaan bertindak yang

konsisten. Serta penanaman nilai-nilai yang berkaitan dengan kehidupan peserta didik baik diperoleh melalui lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat. Tujuan dari pendidikan nilai yaitu untuk membantu peserta didik dalam mengeksplorasi nilai-nilai yang ada melalui pengujian kritis sehingga peserta didik dimungkinkan untuk meningkatkan atau memperbaiki kualitas berpikir serta perasaannya. Strategi atau model pendidikan nilai yang diterapkan di sekolah melalui berbagai macam cara. Model pendidikan nilai itu sendiri dapat diimplementasikan melalui metode dogmatik, deduktif, induktif. Sedangkan strategi pendidikan nilai dapat dilakukan dengan cara berupa nasihat guru, keteladanan (*modelling*), analisis kasus, pembiasaan & pembudayaan, ekstrakurikuler & pengembangan diri, kerja sama, *punishment*.

## REFERENSI

- Afandi, R. (2011). Integrasi pendidikan karakter dalam pembelajaran ips di sekolah dasar. *Jurnal Pedagogia*, 1(1), 85-95.
- Afifa., & Mashuri, I. (2019). strategi guru pendidikan agama islam (pai) dalam menanamkan nilai-nilai karakter pada siswa (studi multi kasus di sdi raudlatul jannah sidoarjo dan sdit ghilmani surabaya. *Tarbiyatuna*, 3(2), 187-201.
- Akhwan, M. (2014). Pendidikan karakter : konsep implementasinya dalam pembelajaran di sekolah/madrasah. *El-Tarbawi*, 7(1), 61-67.
- Anisah, A. S. (2016). Pendekatan pembelajaran analisis nilai untuk meningkatkan pemahaman konsep dan sikap kepedulian sosial siswa pada mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. *Jurnal Pendidikan*, 9(1), 1-8.
- Asri, F. A., Hanief, M., Sufiyana, A. Z. (2020). Strategi guru pendidikan agama islam dalam meningkatkan minat belajar siswa melalui pembelajaran online (daring) kelas xi otomatisasi dan tata kelola perkantoran di sekolah menengah kejuruan ardjuna 01 malang. *VICRATINA*, 5(9), 72-78.
- Cahyono, H. (2016). Pendidikan karakter : strategi pendidikan nilai dalam membentuk karakter religius. *Ri'ayah*, 1(2), 231-240.
- Chowdhury, M. (2016). Emphasizing morals, values, ethics, and character education in science education and science teaching. *The Malaysian Online Journal of Education Science (MOJOS)*, 4(2).

- Dalimunthe, R. A. A. (2015). Strategi dan implementasi pelaksanaan pendidikan karakter di SMPN 9 Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 5(5), 102-111
- Fakhrudin, A. (2014). Urgensi pendidikan nilai untuk memecahkan problematika nilai dalam konteks pendidikan persekolahan. *Pendidikan Agama Islam*, 12(1), 79-96.
- Gunarto. (2013). *Model dan metode pembelajaran di sekolah*. Semarang : Sultan Agung Press.
- Gunawan. H. (2012). *Pendidikan karakter konsep dan implementasi*. Bandung: Alfabeta.
- Haldane, J. J. (1984). Concept-formation and value education. *Educ Phil & Theory*. 16(2). <https://doi.org/10.1111/j.1469-5812.1984.tb00105>.
- Harshman, R. (2014). Value education processes for an environmental education program. *The Journal Of Environmental Education*, 10(2), 30-34. DOI: 10.1080/00958964.1979.10801888
- Jennifer, S., Laura, W. L., Amy, S., et all. (2019). The role of family civic context in character development across childhood and adolescence. *Journal Applied Development Science*, 23(4), 1-13. Doi : <https://doi.org/10.1080/10888691.2019.1683452>.
- Komariah, K. S. (2011). Model pendidikan nilai moral bagi remaja menurut perspektif islam. *Pendidikan Agama Islam*, 9 (1), 45-54.
- Kunandar. (2009). *Gru profesional implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan (ktsp) dan sukses dalam sertifikasi guru*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Lee, W. G. (2004). *Citizenship education in asia and the pacific concepts and issues*. Hongkong : Springer.
- Mulyana, R. (2004). *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*. Bandung : Alfabeta.
- Murdiono, M. (2010). Strategi internalisasi nilai-nilai moral religius dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi. *Cakrawala Pendidikan*, 99-111
- Muttha, S. (2012). Peace, moral and value education-‘Mulyavardhan’; an innovation for social transformation. *International Journal Of Educational Sciences*, 4(3), 232-242. DOI: 10.1080/09751122.2012.11890047 232 242
- Nawawi, A. (2011). Pentingnya pendidikan nilai moral bagi generasi penerus. *Jurnal Insania*, 16(2), 19-133

- Purwaningsih, E. (2010). Keluarga dalam mewujudkan pendidikan nilai sebagai upaya mengatasi degradasi moral. *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*, 1(1), 44-55.
- Rasna, I. W. R., & Tantra, D. K. (2017). Reconstruction of local wisdom for character education throught the indonesia language learning : an ethno-pedagogical methodology. *Theory and Practice in Language Studies*, 7(12), 1229-1235. DOI : <http://dx.doi.org.10.17507/tpls.0712.09>.
- Rifai, A. (2018). Strategi kepala sekolah dalam implementasi pendidikan nilai di sekolah. 1 (1).
- Rizal, S. (2017). Strategi guru kelas dalam menumbuhkan nilai-nilai karakter pada siswa SD/MI. *Jurnal PGMI*, 4(1), 45-60
- Salim, M. H., & Kurniawan, S. (2012). Studi ilmu pendidikan islam. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
- Sanderse. W. (2013). The Meaning of Role Modelling in Moral and Character Education. *Journal of Moral Education*, 42(1), 28-42.
- Shields., & Light, D. (2011). Character as the aim of education. *Journal Phi Delta Kappan*, 92(8), 1-6. Doi : <https://doi.org/10.1177/0031721711109200810>.
- Sikumbang, A. T., Lubis, L., & Hasibuan, E. F. (2020). Teacher's islamic communication strategy in character education throught parenting program at sdit al fityan medan school. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 3(3), 1860-1868. DOI : [doi.org/10.33258/birci.v3i3.1118](https://doi.org/10.33258/birci.v3i3.1118).
- Slavin, R. E. (2011). *Psikologi pendidikan teori dan praktik*. Jakarta: Indeks.
- Sukitman, T. (2016). Internalisasi pendidikan nilai dalam pembelajaran (upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkarakter). *Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar*, 2(2), 85-96.
- Superka, D. P. (1973). A typology of valuing theories and values education approaches. Doctor of Education Dissertation. University of California, Berkeley.
- Supriadi, A. (2014). Internalisasi nilai nasionalisme dalam pembelajaran pkn pada siswa MAN 2 model Banjarmasin. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*. 4(8), 652-653.
- Suriansyah & Aslamiah. (2015). Strategi kepemimpinan kepala sekolah, guru, orang tua dan masyarakat dalam membentuk karakter siswa. *Cakrawala Pendidikan*, 1(2), 234-247

- Vincent, Ng., Louis, T., & Lauren, K. (2017). The development and validation of measure of character : the civic. *The Journal of Positive Psychology, 13*(4). DOI:<http://dx.doi.org/10.1080/17439760.2017.1291850>.
- Wati. (2017). Penanaman nilai nilai religius di sekolah dasar untuk penguatan jiwa profetik siswa. p-ISSN 2598-5973e-ISSN 2599-008X
- Wena, M. (2010). Strategi pembelajaran inovatif kontemporer. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Wening, S. (2012). Pembentukan karakter bangsa melalui pendidikan nilai. *Jurnal Pendidikan Karakter, 2*(1), 55-66
- White, E. S., & Mistry, R. S. (2017). Teacher's civic socialization practices and children's civic engagement. *Journal Applied Developmental Science, 23*(2), 183-202. Doi : <https://doi.org/10.1080/10888691.2017.1377078>.
- Windrati, D.K. (2011). Pendidikan nilai sebagai suatu strategi dalam pembentukan kepribadian siswa. *Jurnal Formatif, 1*(1), 40-47
- Wulandari, Y. (2017). Strategi sekolah dalam penguatan pendidikan karakter bagi siswa dengan memaksimalkan peran orang tua. *JMKSP, 2*(2), 290-302.
- Yusuf.M. (2013). Membentuk karakter melalui pendidikan berbasis nilai. *Jurnal Al-Ulum, 13*(1), 1-24.
- Zakiah., & Rusdiana. (2014). *Pendidikan nilai kajian dan praktik di sekolah*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Zuchdi, D. (2010). Pengembangan model pendidikan karakter terintegrasi dalam pembelajaran bidang studi di SD. *Cakrawala Pendidikan, 1*-12.

# **Revitalisasi Nilai Pancasila Melalui Metode *Project Based Learning* Menggunakan Diary di Kelas II CLC Fantasi Generasi**

**Rahmi Syalfitri Riska**  
rahmisyalfitri@gmail.com.

## **Abstrak**

Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang dilatarbelakangi oleh rendahnya pemahaman peserta didik terhadap Pancasila dan penerapannya, bertujuan melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila dengan menerapkan metode inovatif yaitu memadukan *Project Based Learning (PjBL)* dengan menulis diary. Subjek penelitian adalah siswa kelas 2 CLC Fantasi Generasi yang berjumlah 21 orang. Data dalam penelitian diperoleh melalui dokumentasi, observasi, tes dan hasil penulisan diary. Data dianalisis dengan teknik deskriptif-kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode *Project Based Learning* menggunakan diary yang dilakukan selama 30 hari ini dapat meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap Pancasila dan penerapannya sebagai output dari revitalisasi nilai Pancasila. Diary Pancasila merupakan produk inovatif yang dihasilkan dari penelitian ini, efektif digunakan sebagai media revitalisasi nilai karena fungsinya yang kontekstual dan dekat dengan kehidupan pada peserta didik. Dan metode ini dapat diterapkan pada semua jenjang pendidikan.

**Kata kunci:** Revitalisasi Nilai, Project Based Learning, Diary Pancasila.

## **PENDAHULUAN**

Pancasila yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, pada praktiknya tidak hanya dijadikan sebagai dasar negara oleh bangsa Indonesia. Pancasila juga berfungsi sebagai pandangan hidup bangsa, sumber dari segala sumber hukum, perjanjian luhur, cita-cita, dan tujuan hidup, sebagai jiwa bangsa serta sebagai kepribadian bangsa Indonesia yang terwujud dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Namun pada kenyataannya, masih banyak warga negara Indonesia yang belum memahami Pancasila dan tidak memahami secara kontekstual penerapan sila-silanya. Hal ini juga terjadi di CLC Fantasi Generasi, pada observasi awal yang dilaksanakan pada bulan Februari, ditemukan fakta bahwa peserta didik belum memahami Pancasila dan penerapannya. Hal ini diperkuat dengan diadakannya pretes pada tanggal 12 Maret 2019.

Menjadikan peserta didik sebagai manusia yang Pancasila merupakan tujuan dari muatan mata pelajaran PPKn. Dalam kesehariannya, peserta didik melakukan banyak hal-hal baik, namun sayang sekali mereka tidak memahami dan tidak menyadari bahwa yang mereka lakukan adalah perilaku-perilaku yang memuat nilai-nilai Pancasila. Untuk itu perlu dilakukan sebuah upaya revitalisasi nilai Pancasila yang kreatif dan dekat dengan keseharian peserta didik. Sejauh ini,

penanaman nilai Pancasila telah diterapkan melalui pembelajaran, pembiasaan, ekstrakurikuler (Wadu, dkk, 2020), keteladanan dan pemberian reward (Mulyani, dkk, 2020). Sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Wahid, dkk (2020) dan Ningsih, dkk (2020) bahwa pembiasaan positif seperti berdoa dan pemberian keteladanan merupakan bentuk implementasi pendidikan nilai yang dilaksanakan sekolah secara terpadu. Selain itu, kultur sekolah dan kegiatan masyarakat juga berperan penting dalam pembentukan nilai (Retnasari, 2018). Sementara guru kelas maupun guru mata pelajaran (PPKn) dapat pula menerapkan pendidikan nilai dengan memilih model pembelajaran yang sesuai (Elviana, 2017). Lalu bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk melakukan revitalisasi nilai Pancasila yang kontekstual? Apakah upaya tersebut efektif? Penelitian ini dilakukan untuk menemukan jawaban dari kedua pertanyaan tersebut.

## **METODE**

Penelitian dilaksanakan di kelas 2 Community Learning Center (CLC) Fantasi Generasi. CLC merupakan pusat belajar yang diperuntukkan bagi anak-anak buruh migran Indonesia yang ada di Sabah, Malaysia. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang mengacu pada model yang dikembangkan oleh Kurt Lewin, yaitu: perencanaan (membuat RPP, mempersiapkan fasilitas dari sarana pendukung yang diperlukan dikelas, mempersiapkan instrumen untuk merekam dan menganalisis data mengenai proses dan hasil tindakan), tindakan (melakukan tindakan yang telah dirumuskan dalam RPP, dalam situasi yang aktual, meliputi kegiatan awal, inti dan penutup), pengamatan (mengamati motivasi belajar tiap peserta didik dalam penguasaan materi pembelajaran yang telah dirancang sesuai dengan RPP) dan refleksi (mencatat hasil observasi, mengevaluasi hasil observasi, menganalisis hasil pembelajaran, mencatat kelemahan-kelemahan untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan siklus berikutnya sampai tujuan PTK tercapai). Siklus pertama ini kemudian akan dikembangkan menjadi siklus kedua untuk melengkapi hasil penelitian dan mendapatkan data yang akurat. Data diperoleh melalui dokumentasi, observasi, tes, dan diary Pancasila. Kriteria pemahaman dapat

ditentukan berdasarkan teknik presentase yang didapatkan dari hasil tes sebelum dan sesudah pelaksanaan tindakan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini dilakukan di kelas II CLC Fantasi Generasi, dengan subjek penelitian berjumlah 22 orang yang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 12 orang perempuan. Namun dalam pelaksanaannya, kehadiran peserta didik bersifat fluktuatif. Pemahaman peserta didik tentang Pancasila dan pengamalan sila-silanya sangat rendah. Ketika ditanya apa itu Pancasila dan dipancing dengan penerapan sila dalam kehidupan sehari-hari, jawaban peserta didik beragam dan tidak satupun yang menjawab dengan benar, padahal materi tersebut sudah dipelajari selama dua bulan sebelumnya. Pada saat dilakukan pretes, dari 16 orang peserta didik yang hadir hanya 6,25% atau 1 orang saja yang berhasil meraih skor 80, 1 orang meraih skor 70, selebihnya dibawah 50 dan ada yang mendapatkan poin 0. Maka pemahaman belajar pada situasi ini masuk pada kategori sangat kurang dan ketuntasan klasikan tidak tercapai. Pada umumnya, peserta didik sudah hafal Pancasila dan mengenal lambangnya, sementara terkait penerapannya dalam kehidupan sehari-hari mereka belum mengerti, sementara ini adalah materi PKn yang ada dalam pembelajaran tematik kelas II. Sebetulnya materi ini sudah pernah diajarkan, namun perlu dilakukan sebuah upaya kontekstual yang berkesinambungan agar peserta didik lebih paham dan mengingat substansi materi untuk jangka panjang.

Penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan dengan dua siklus, masing-masing siklus dilaksanakan selama dua minggu.

Berikut akan dijabarkan pelaksanaan penelitian setiap siklus.

### **1. Siklus I**

Siklus ini dilaksanakan selama dua minggu, dimulai dari tanggal 1 hingga 15 April 2019.

### **a. Perencanaan**

- 1) Setelah ditemukan permasalahan, maka peneliti merencanakan tindakan yang akan dilakukan, meliputi model pembelajaran yang akan digunakan, waktu dan hari pelaksanaan.
- 2) Merancang program pembelajaran berupa rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), instrument untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap nilai-nilai Pancasila,
- 3) Merancang diary pancasila yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik.

### **b. Pelaksanaan tindakan**

Pada tahap pelaksanaan tindakan, peneliti melakukan pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Peneliti melaksanakan pembelajaran dengan metode *project based learning*. Dalam pelaksanaan tindakan, peneliti berperan sebagai guru. Langkah-langkah pembelajaran *project based learning* yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

- a) *Arrange*, guru menjelaskan tujuan belajar, jenis dan cara mengerjakan proyek serta *time line* yang diberikan.
- b) *Begin*, peserta didik diberikan waktu untuk mengerjakan proyek secara mandiri selama dua minggu.
- c) *Change*, guru membantu peserta didik membuat perubahan yang diperlukan untuk memperbaiki kualitas proyeknya setiap hari secara berkesinambungan.
- d) *Demonstrate*, tahap ini tidak dilakukan pada siklus pertama, namun direncanakan akan dilaksanakan pada akhir siklus.

Berikut diuraikan perkembangan pelaksanaan tindakan untuk siklus I. Siklus I dimulai pada hari Rabu, 1 April 2019. Sasaran materi untuk setiap siklus adalah sama, yaitu penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran ini adalah:

- 1) Peserta didik mengetahui apa itu Pancasila
- 2) Peserta didik mampu menyesuaikan sila-sila Pancasila dengan lambangnya

- 3) Peserta didik mampu mengorganisasikan perilakunya yang sesuai dengan sila-sila Pancasila
- 4) Peserta didik mampu menginternalisasikan Pancasila ke dalam dirinya sebagai output dari revitalisasi nilai-nilai Pancasila.

Kegiatan pembelajaran dimulai dengan kegiatan pendahuluan, motivasi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Guru kemudian membagikan diary Pancasila kepada masing-masing peserta didik. Setelah semuanya mendapatkan diary, guru lalu menjelaskan bagaimana teknik mengisinya, aturan pengisiannya adalah sebagai berikut.

- 1) Pada halaman depan, tersedia kolom untuk mengisi nama sebagai identitas peserta didik.
- 2) Setiap halaman diary, terdiri dari empat kolom. Kolom pertama berisi nomor (urutan catatan), kolom kedua berisi hari/tanggal, kolom ketiga berisi catatan perilaku, kolom keempat adalah penyesuaian dengan sila Pancasila.
- 3) Pengisian diary harus dilakukan di rumah, harus diisi setiap hari, sesuai dengan perilaku baik yang dilakukan oleh peserta didik, kemudian disesuaikan dengan sila pancasila
- 4) Diary yang sudah diisi, dibawa ke sekolah untuk diklarifikasi oleh guru.
- 5) Proyek pengisian diary dilakukan selama 30 hari, pada akhir proyek akan dipilih peserta terbaik sebagai bentuk penghargaan atas ketekunannya dalam bekerja.



**Gambar 1.** Peserta didik sedang mengisi identitas pada siklus 1

Pada hari berikutnya, proses pembelajaran berlangsung sebagaimana biasa, hanya saja terjadi sedikit perubahan dalam hal cara kerja guru. Sebelum pembelajaran dimulai, peserta didik diminta mengumpulkan diarynya. Pembelajaran di kelas 2 diawali dengan berdoa, membaca asmaul husna, membaca ayat pendek dan membaca buku selama lima belas menit sebagai bentuk kegiatan literasi. Pada saat peserta didik melakukan rangkaian kegiatan tersebutlah guru melakukan pemeriksaan terhadap diary yang diisi oleh peserta didik. Setelah ditemukan kekeliruan dalam penulisan, guru memanggil peserta didik secara individual. Hal ini dilakukan agar terjadi peningkatan kualitas pengisian diary pada hari berikutnya. Fase *change* ini dilakukan setiap pembelajaran selama siklus pertama berlangsung.



**Gambar 2.** Guru membimbing peserta didik secara individual untuk memahami teknik penulisan diary yang tepat.

### **c. Observasi dan Evaluasi**

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap proses pengisian diary yang dilakukan oleh peserta didik selama siklus 1, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Beberapa peserta didik disiplin dalam mengisi diary
- 2) Peserta didik mulai mampu menyesuaikan perilakunya dengan sila-sila Pancasila, terutama sila pertama. Namun belum bisa memahami perbedaan penguamalan sila kedua, ketiga, keempat dan kelima.
- 3) Peserta didik mengisi diary dengan kemauan sendiri, namun belum memiliki rasa percaya diri karena khawatir penyesuaiannya tidak tepat.

### **d. Refleksi**

Berdasarkan hasil pengamatan, observasi dan analisis terhadap proses pembelajaran dengan menggunakan metode *Project based learning* (PBL) pada siklus kedua yang dilaksanakan dari tanggal 1 hingga 15 April 2019, diperoleh hasil refleksi sebagai berikut.

- 1) Sikap yang dijadikan sebagai isi diary peserta didik umumnya monoton, perilaku yang ditulis itu-itu saja.
- 2) Peserta didik belum bisa menyesuaikan perilaku dengan sila, terbalik-balik.
- 3) Satu perilaku dibuat untuk banyak sila, harusnya satu perilaku disesuaikan dengan satu sila.
- 4) Posisi penomoran yang diberikan tidak tepat
- 5) Peserta didik menggabungkan banyak sikap untuk satu sila
- 6) Sebagian peserta didik tidak mengisi diary secara teratur
- 7) Peserta didik tidak mengisi satu halaman secara penuh, langsung pindah ke halaman berikutnya

Selama siklus I berlangsung, hanya terdapat 7 orang peserta didik yang memahami dengan benar teknik penulisan diary, selebihnya belum. Oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan yang mengacu pada hasil refleksi demi peningkatan kualitas project pada siklus II.

No.	Hari/Tanggal	Contoh	Sila Ke.
1	Senin April 2019	AKU Fejita Solat	2
2	Selasa Maret 2019	AKU Fejita Megeji	2
3	Rabu Maret 2019	AKU Mejuturak RUKU MV	4
4	Kamis April 2019	AKU Solat	3
5	Kamis April 2019	AKU Mankamimikud	2

No.	Hari/Tanggal	Contoh	Sila Ke.
1	Senin April 2019	AKU Megeji	2
2	Senin April 2019	AKU Solat	3
3	Rabu April 2019	AKU Megeji	1
4	Kamis April 2019	AKU Solat	1

**Gambar 3.** Contoh hasil pengisian diary pada siklus I

## **2. Siklus II**

Siklus II dilaksanakan sebanyak dua kali pertemuan yakni dari tanggal 16-31 April 2019.

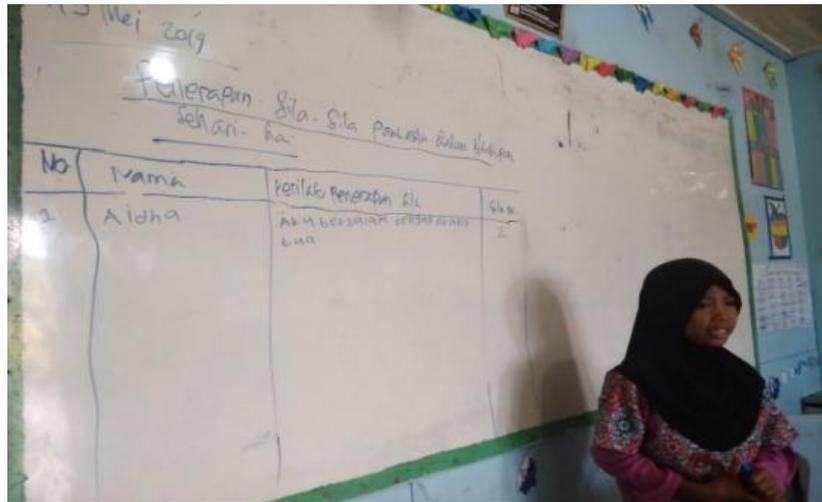
### **a. Perencanaan**

Dari hasil refleski di siklus I, dapai dikemukakan sejumlah perencanaan tindakan untuk siklus II. Cara meningkatkan kualitas project adalah sebagai berikut.

- 1) Perlu diberikan bimbingan lebih intensif kepada peserta didik yang masih belum mengerti bagaimana teknik mengisi diary
- 2) Pemanfaatan fungsi teman sebaya untuk menjelaskan kepada peserta didik agar pemahamannya meningkat
- 3) Di sela-sela pembelajaran, guru perlu menerapkan dalam bentuk Tanya jawab tentang perilaku sesuai sila Pancasila, serta memberikan penekanan terhadap perilaku-perilaku peserta didik yang sudah sesuai dengan sila Pancasila.

### **b. Pelaksanaan tindakan**

Pelaksanaan tindakan pada siklus II hampir sama dengan tindakan pada siklus I, hanya saja di dalam pelaksanaannya guru menekankan pada rencana yang telah diambil berdasarkan hasil refleksi. Langkah-langkah pembelajaran pada siklus II juga sama dengan langkah pembelajaran pada siklus I, hanya saja pada akhir siklus II dilaksanakan langkah *demonstrate*, dengan meminta peserta didik maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil pemahamannya. Pada proses ini peserta didik menuliskan perilaku yang sesuai sila Pancasila, kemudian meminta temannya menyesuaikan perilaku tersebut sesuai dengan sila ke berapa. Begitu seterusnya hingga semua peserta didik mendapat giliran tampil ke depan.



**Gambar 4.** Peserta didik mempresentasikan pemahamannya di depan kelas

### c. Observasi dan Evaluasi

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap proses pengisian diary yang dilakukan oleh peserta didik selama siklus II, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Terjadi peningkatan peserta didik yang disiplin dalam mengisi diary
- 2) Pemahaman peserta didik semakin meningkat. Peserta didik sudah mampu mengorganisasikan dengan baik antara perilaku dan sila Pancasila. Peserta didik sudah bisa memahami perbedaan pengaamalan sila kedua, ketiga, keempat dan kelima.
- 3) Peserta didik semakin bersemangat dalam mengisi diary karena mereka sudah memahami teknik pengisian yang benar.

### c. Refleksi

Berdasarkan hasil pengamatan, observasi dan analisis terhadap proses pembelajaran pada siklus kedua yang dilaksanakan dari tanggal 16 hingga 31 April 2019, diperoleh hasil refleksi sebagai berikut.

- 1) Sikap yang dijadikan sebagai isi diary peserta didik sudah mulai bervariasi.
- 2) Pemahaman terhadap pelaksanaan sila semakin membaik.
- 3) Penomoran lebih sistematis.



80%. Perolehan skor yang diambil dari perbandingan nilai pretes dan postes dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1.** Perbandingan Pemahaman Peserta Didik terhadap Pelaksanaan Sila-sila Pancasila

No.	Nama	Nilai Pretes	Nilai Postes
1	Aida Binti Donny William	-	70
2	Alif Safuan	0	-
3	Alif Silang	0	65
4	Ana Saputri	10	-
5	Aznil	-	-
6	Fahmia Binti Ating	-	100
7	Fendi Rikus	50	95
8	Khairul Ikram	40	85
9	Kristian	10	70
10	Meri Binti Titus	40	80
11	Miazarah Binti Marding	-	90
12	Mohd. Aiman	0	-
13	Mursid	-	85
14	Nurul Ainun Sudirman	30	85
15	Nurhayanti Binti Hendry	30	85
16	Nurul Atikah Arsad	70	80
17	Rika	30	80
18	Riski Samsudin	10	-
19	Selfi Binti Rahmat	80	90
20	Supriadi	30	85
21	Syopian	40	75
22	Masryafika	-	85

(Sumber: data primer)

Dari hasil analisis data dan refleksi pada siklus I, jika dibandingkan dengan siklus II dan indikator yang diharapkan dari penelitian ini ditemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemahaman peserta didik tentang Pancasila telah meningkat.
2. Peserta didik sudah mampu menyesuaikan Pancasila dengan lambang silanya.
3. Peserta didik sudah mampu mengorganisasikan perilakunya yang sesuai dengan Pancasila

4. Peserta didik sudah mampu menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila kedalam dirinya sebagai output dari revitalisasi nilai-nilai Pancasila.
5. Proses pembelajaran yang dilakukan melalui tahapan-tahapan pelaksanaan metode *Project Based Learning* (PBL) untuk meningkatkan pemahaman peserta didik tentang pelaksanaan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari mengalami peningkatan, tetapi dengan terus melakukan pendampingan yang berkelanjutan kepada peserta didik.

## **SIMPULAN**

Revitalisasi nilai Pancasila melalui implementasi model *Project Based Learning* (PBL) dengan menggunakan diary Pancasila dalam pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari hal ini terbukti dengan meningkatnya persentase pemahaman belajar peserta didik. Model *Project Based Learning* (PBL) dengan menggunakan diary Pancasila sebagai salah satu model pembelajaran cocok diterapkan pada semua jenjang pendidikan dalam upaya revitalisasi nilai-nilai Pancasila pada peserta didik terutama di kelas II SD karena sesuai dengan indikator yang diharapkan. Diary Pancasila merupakan produk inovatif yang efektif digunakan sebagai media revitalisasi nilai Pancasila karena fungsinya yang kontekstual dan dekat dengan kehidupan pada peserta didik.

## **REFERENSI**

- Altabany, Badar, T, I. (2014). *Mendesain model pembelajaran inovatif, progresif, dan kontekstual konsep, landasan, dan implementasinya pada kurikulum 2013 (kurikulum tematik integratif)*. Prenadamedia Grup: Jakarta.
- Chandra, Habibi, M. (2018). Strategi *direct writing activity* sebagai upaya peningkatan keterampilan menulis deskripsi bagi siswa Kelas II SD. *Jurnal Inovasi Pendidikan Dan Pembelajaran Sekolah Dasar*, 2(1), ISSN 2579-3403.
- Darmawan. (2018). *Revitalisasi Pancasila sebagai pedoman hidup bermasyarakat di era globalisasi*, Tesis. Program Pasca Sarjana (Pps). Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan.

- Elviana, Sari, P. (2017). Pembentukan sikap mandiri dan tanggung jawab melalui metode sosiodrama dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. 2017;5(2):134-144.
- Fathurrohman, M. (2015). *Model-model pembelajaran inovatif alternatif desain pembelajaran yang menyenangkan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Juni, D, P., Setiani, A. (2015). *Manajemen peserta didik dan model pembelajaran (cerdas, kreatif, dan inovatif)*. Bandung: Alfabeta.
- Mulyani, D., dkk (2020). Peningkatan karakter gotong royong di sekolah dasar. *Lectura: Jurnal Pendidikan*, 11(2), 225-238.
- Retnasari, Lisa & Suharno (2018). Strategi SMP Muhammadiyah Boarding School Yogyakarta dalam pembiasaan karakter kewarganegaraan pada peserta didik. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. 2018;6(1):52-62 DOI 10.25273/citizenship.v6i1.1903
- Tutuk, N., dkk (2015) Implementasi pendidikan karakter di SMP Negeri 8 dan SMP Negeri 9 Purwokerto. *Jurnal Pembangunan Pendidikan*, 3 (2). ISSN 2502 1648
- Wicaksono, D. Rahayu, Sinta, M. (2018). *Implementasi model pembelajaran berbasis proyek (project based learning) di sekolah dasar Alam Jingga*. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Era Revolusi. Universitas Muhammadiyah Jakarta. Vol. 5 No. 2 September 2018.
- Wadu, L. B., dkk (2020). Penerapan nilai kerja keras dan tanggung jawab dalam ekstrakurikuler pramuka di sekolah dasar. *Jurnal Bidang Pendidikan Dasar*, 4(1), 100 - 106. <https://doi.org/10.21067/jbpd.v4i1.3571>.
- Wahid, dkk.(2020) Kajian pendidikan karakter pada sekolah dasar ramah anak di Kabupaten Brebes, 2 (4), 48-54, apr. 2020. ISSN 2684-883X.

# Aktualisasi Pancasila sebagai Upaya Penguatan Etika Politik di Indonesia

Ravita Mega Saputri<sup>1</sup>, Mukhamad Murdiono<sup>2</sup>  
[ravitamega.2019@student.uny.ac.id](mailto:ravitamega.2019@student.uny.ac.id)<sup>1</sup>, [Mukhamad\\_murdiono@uny.ac.id](mailto:Mukhamad_murdiono@uny.ac.id)<sup>2</sup>

## Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana aktualisasi Pancasila sebagai penguatan etika politik di Indonesia. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah deskriptif kualitatif dengan menekankan pada studi pustaka. Penelitian dengan studi pustaka berusaha untuk menganalisis tentang aktualisasi Pancasila sebagai penguatan etika politik di Indonesia. Teknik pengumpulan data serta informasi yang mendukung penelitian ini meliputi studi dokumentasi serta studi pustaka dari hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data dari berbagai artikel ilmiah, laporan penelitian ilmiah, buku, jurnal, dan sumber-sumber yang relevan dengan topik dari artikel ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai moral Pancasila berperan dalam mewujudkan sistem etika politik yang baik di negeri ini. Kelemahan etika politik dapat dilihat dari berbagai pelanggaran ketertiban hukum yang terjadi di Indonesia, tindakan menyimpang seolah-olah telah dilembagakan di masyarakat dan sudah menjadi rahasia umum.

**Kata Kunci:** Aktualisasi, Pancasila, Penguatan Etika Politik.

## PENDAHULUAN

Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup masyarakat Indonesia. Dalam kehidupan berpolitik bahwa etika tertanam pada jiwa Pancasila. Kesadaran etika akan tumbuh subur apabila warga Indonesia menyakini nilai-nilai Pancasila dan menyakini kebenarannya. Sehingga kesadaran etika akan berkembang ketika nilai dan moral Pancasila dapat diterapkan dalam kehidupan. Dalam bidang politik, etika politik sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik sesuai dengan harapan, baik ditingkat pusat dan daerah demi keaslian berdemokrasi yang beradab sesuai dengan nilai-nilai etika dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Pratik politik harus menghasilkan nilai-nilai etika dan moral Pancasila sebagai pergerakan politik sistem di Indonesia, oleh karena itu tugas semua pihak untuk mengembangkan dengan integritas dan kepribadian yang kuat dengan memiliki pandangan hidup yang dimengerti, dihayati, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya dalam penelitian Widodo (2014: 128) bahwa untuk mewujudkan budaya politik yang beretika dalam rangka memperkuat kehidupan berbangsa dan bernegara maka harus ditanamkan suatu

kesadaran politik yang hendak mengedepankan pengabdian demi kesejahteraan masyarakat Indonesia bukan hanya memperjuangkan politik kekuasaan saja.

Pancasila sebagai ideologi terbuka bagi Republik Indonesia karena sistem pemikiran memiliki karakteristik bahwa nilai-nilai dan ciri-ciri yang akan diwujudkan tidak bisa dipaksakan dari luar, tetapi digali dan diambil dari moral maupun tata nilai budaya masyarakat itu sendiri (Latif, 2011:34). Dapat didefinisikan bahwa kedudukan Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bagi para pelaksana pemerintah juga para penyelenggara partai politik dan golongan fungsional. Di Indonesia etika politik diatur dalam Ketetapan MPR RI No. VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Dalam Ketetapan tersebut diuraikan bahwa etika kehidupan berbangsa tidak terkecuali kehidupan berpolitik merupakan rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa.

Etika politik harus memiliki kebajikan politik (keadilan, kebijaksanaan, hati nurani, hukum, tanggung jawab, kewajiban) dan juga pada etika lembaga politik (pertanyaan tentang kepentingan ekonomi dan sosial, politik keluarga, politik lingkungan, aspek moral kemajuan, etika politik internasional, dll). Seorang politisi hendaknya tidak hanya bijaksana, tetapi juga adil, berhati besar, dan cinta damai. Tidak ada moral khusus seorang politisi tidak bisa memiliki moral yang berbeda dari orang lain. Upaya untuk melepaskan moralitas negara dari moralitas individu merupakan bahaya besar bagi demokrasi (Fabel, 2002: 42). Etika berpolitik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, diakui bahwa saat ini banyak kalangan elite politik cenderung berpolitik dengan melalaikan etika kenegarawanan. Para elite politik yang saat ini cenderung kurang peduli terhadap terjadinya konflik masyarakat dan tumbuhnya budaya kekerasan. Elite politik bisa bersikap seperti itu karena sebagian besar berasal dari partai politik atau kelompok yang berbasis primordial sehingga elite politik cenderung berperilaku yang sama dengan perilaku pendukungnya. Bahkan elite politik tersebut merasa halal untuk

menggunakan massa untuk mendukung langkah politiknya. Elite politik dan massa yang cenderung berpolitik dengan mengabaikan etika, mereka tidak sadar bahwa sebenarnya kekuatan yang berbasis primordial, jika mereka terus berbenturan, tidak akan ada yang menang (Sedarmayanti, 2003: 112).

Kurangnya etika berpolitik disebabkan karena elite politik tersebut tidak memiliki pendidikan politik yang memadai. Negara tidak banyak mempunyai guru politik yang baik, yang dapat mengajarkan tentang berpolitik yang tidak hanya memperebutkan kekuasaan, namun dengan penghayatan etika serta moral. Politik yang mengedepankan *take and give*, berkonsensus, dan pengorbanan. Selain itu kurangnya komunikasi politik juga menjadi penyebab lahirnya elite politik yang tidak memiliki etika. Elite politik yang tidak mampu menyuarakan kepentingan rakyat, namun juga menghasilkan orang-orang yang cenderung otoriter, termasuk politik kekerasan yang semakin berkembang karena perilaku politik dipandu oleh nilai-nilai emosi.

Berdasarkan hasil penelitian Kusnadi dan Martini (2018: 663) lemahnya etika politik terlihat dari berbagai penyimpangan tatanan hukum yang terjadi di Indonesia, perbuatan menyimpang seolah-olah sudah terlembaga di masyarakat dan sudah menjadi rahasia umum. Bahkan bagi pejabat seperti kewajiban, dan dianggap menyimpang jika tidak dilakukan perbuatan kotor. Untuk itu diperlukan upaya penguatan etika politik Pancasila, antara lain upaya-upaya di antaranya: penguatan nilai-nilai yang terkandung dalam sistem pendidikan nasional, revitalisasi PKn sebagai inti etika politik, dan penanaman politik. pendidikan kepada warga negara.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah deskriptif kualitatif dengan menekankan pada studi pustaka. Studi pustaka merupakan penelitian yang menggunakan sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitian. Penelitian dengan studi pustakan berusaha untuk menganalisis tentang aktualisasi Pancasila sebagai penguatan etika politik di Indonesia. Teknik pengumpulan data serta informasi yang mendukung penelitian ini meliputi studi dokumentasi serta studi

pustaka dari hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data dari berbagai artikel ilmiah, laporan penelitian ilmiah, buku, jurnal, dan sumber-sumber yang relevan dengan topik dari artikel ini. Peneliti akan mendata kajian dari bahan-bahan ilmiah yang terkait dengan penelitian ini. Analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis isi. Analisis isi digunakan dengan cara membandingkan antara satu kajian dengan kajian yang lain dalam topik yang sesuai dengan artikel ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Etika**

Etika berasal dari bahasa Yunani “Ethos” dalam bentuk tunggal yang berarti kebiasaan. Menurut Bertens (2004: 6) bahwa etika memiliki tiga posisi, yaitu *pertama* sistem nilai, yakni nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya, *kedua* kode etik, yakni kumpulan asas atau nilai moral, dan *ketiga* filsafat moral, yakni ilmu tentang yang baik atau buruk. Dalam poin ini, akan ditemukan keterkaitan antara etika sebagai sistem filsafat sekaligus artikulasi kebudayaan.

Etika berperan pada semua diskusi mengenai ilmu. Secara umum, asal muasal etika berasal dari filsafat tentang situasi atau kondisi ideal yang harus dimiliki atau dicapai manusia. Dengan begitu, keteraturan antar kehidupan manusia bisa dimiliki secara kolektif tanpa harus mengganggu individu masing-masing. Disamping itu, teori etika yang ada hanyalah cara pandang atau sudut pengambilan pendapat tentang cara manusia bertingkah laku. Meskipun pada akhirnya akan mengacu pada satu titik yaitu kebahagiaan, kesejahteraan, kemakmuran, dan harmonisasi terlepas dari sudut pandang yang akan melihat, baik dari tujuan, teleologis, ataupun kewajiban (deontologis) (Peursen, 1980: 97). Dalam hal ini etika merupakan doktrin untuk berpegang teguh pada sistem moral. Ada dua kelompok etika yang dikenal yaitu etika umum dan etika khusus. Beberapa pemahaman tentang etika sebagai berikut.

- a. Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip etika berlaku untuk setiap tindakan manusia secara umum.

- b. Etika khusus berkaitan dengan hubungan atau penerapan prinsip dari etika umum dalam hubungannya kehidupan manusia. Etika khusus dibagi menjadi dua bagian yaitu etika individu yakni penerapan masalah etika kewajiban untuk mematuhi konsep hak yang salah yang diatur dalam sistem etika. Sedangkan etika sosial adalah tugas manusia untuk menerapkan etika dari manusia lain di masyarakat sesuai pegangan manusia sebagai makhluk sosial.

Etika menuntut pertanggungjawaban sebab banyak sekali ajaran moral maupun pandangan moral seperti di dalam kitab suci, petuah, wejangan dari kyai, pendeta, orang tua dan sebagainya. Disini manusia harus memilih dengan kritis dan mengikuti ajaran moral, sehingga mampu mempertanggung jawabkan atas pilihannya. Etika tidak membiarkan pendapat moral yang tidak bisa dipertanggung jawabkan. Jadi, etika berusaha untuk menjernihkan permasalahan moral.

### **Etika Politik**

Etika politik tidak dapat dipisahkan dengan subjek sebagai etika yaitu manusia. Oleh karena itu, etika politik berkaitan erat dengan pembahasan moral yang senantiasa menunjukkan kepada manusia tentang subjek etika. Dalam praktik politik, etika berlandaskan pada Pancasila agar mampu mencerminkan pemerintahan yang *good governance*. Pancasila disini sebagai pandangan dan ideologi bangsa Indonesia, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mengatur kehidupan masyarakat negara dan bangsa agar mampu menciptakan kehidupan yang damai, adil, sejahtera, dan tenang. Pancasila juga untuk mengatur tentang etika dalam politik, sebab politik tanpa etika akan terjadi kehidupan yang kacau bagi bangsa apabila tidak ada penanaman etika dalam diri pemimpin bangsa. Dengan demikian aktualisasi etika politik harus senantiasa mendasarkan kepada ukuran harkat dan martabat manusia sebagai manusia (Magnis, 1993: 120).

Di Indonesia, etika politik berlandaskan Pancasila untuk memastikan dalam diskusi ideologis tentang masalah yang dilakukan secara objektif. Masalah ideologis yang dimaksud adalah masalah berkaitan dengan hukum dan politik. Pancasila digunakan sebagai pilihan sebagai dasar kehidupan kewarganegaraan atau disebut juga sebagai dasar kehidupan politik, dengan demikian tidak netral

secara politik, akan tetapi harus didasarkan pada nilai-nilai etika yang sebagai salah satu tugas filsafat politik untuk mencerahkan makna politik dan nilai-nilai etika eksplisit dalam politik berdasarkan Pancasila. Saat ini, sering dijumpai aktor politik yang tidak bisa bertindak sesuai dengan etika politik Pancasila. Masih banyak pelanggaran etika politik yang terjadi di Indonesia. Sebagai contoh pelanggaran etika politik yang terjadi di Indonesia antara lain pejabat yang terlibat dalam korupsi, penegakan hukum yang tidak bermoral dan pengadilan menerima suap, elit politik terlibat kasus tetapi dalam hidup elit politik tersebut mendapatkan perlakuan khusus selama proses peradilan dan melayani hukuman (Widodo, 2014: 120).

Etika politik sebagai sarana yang diharapkan mampu menciptakan suasana harmonis antar pelaku dan antar kekuatan sosial politik serta antar kelompok kepentingan untuk mencapai kemajuan bangsa dan negara dengan mendahulukan kepentingan bersama dari pada kepentingan pribadi dan golongan. Etika politik mutlak diperlukan bagi perkembangan kehidupan politik. Etika politik merupakan prinsip pedoman dasar yang dijadikan sebagai fondasi pembentukan dan perjalanan roda pemerintahan yang biasanya dinyatakan dalam konstitusi negara (Budiarjo, 1997: 98).

Etika politik diatur dalam Ketetapan MPR RI No. VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Mengandung misi kepada setiap pejabat dan elite politik untuk bersikap jujur, amanah, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap untuk mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Huntington (2001: 45) menegaskan bahwa tahun-tahun pertama berjalannya masa kekuasaan pemerintahan demokratis yang baru, umumnya akan ditandai dengan bagi-bagi kekuasaan di antara koalisi yang menghasilkan transisi demokrasi tersebut, penurunan efektifitas kepemimpinan dalam pemerintahan yang baru sedangkan dalam pelaksanaan demokrasi itu sendiri belum mampu menawarkan solusi mendasar terhadap berbagai permasalahan sosial dan ekonomi di Negara. Tantangan bagi

konsolidasi demokrasi adalah menyelesaikan masalah-masalah tersebut dan tidak justru hanyut oleh permasalahan.

Konsolidasi demokrasi menuntut etika politik yang kuat yang memberikan kematangan emosional dan dukungan yang rasional untuk menerapkan prosedur-prosedur demokrasi. Berlandaskan penekanan pada pentingnya etika politik pada asumsi bahwa semua sistem politik termasuk sistem demokrasi, cepat atau lambat akan menghadapi krisis, dan etika politik yang tertanam dengan kuatlah yang akan menolong Negara-negara demokrasi melewati krisis tersebut. Implikasinya proses demokratisasi tanpa etika politik yang mengakar menjadi rentan dan bahkan hancur ketika menghadapi krisis seperti kemerosotan ekonomi, konflik regional atau konflik sosial, atau krisis politik yang disebabkan oleh korupsi atau kepemimpinan yang terpecah (Almond & Verba, 1965: 75).

Berpolitik tanpa kesadaran etika dan moral hanya akan melahirkan krisis kepemimpinan. Karena itu, sekarang yang diharapkan adalah adanya pencerahan dari budayawan dan agamawan yang bermoral sehingga kita senantiasa kembali pada etika, moralitas, dan kebhinnekaan. Krisis kehidupan berbangsa dan bernegara, yang sedang dihadapi bangsa Indonesia, antara lain karena persoalan etika dan perilaku kekuasaan. Saat ini kesadaran etika berpolitik sangat rendah maka tantangan yang mungkin kita hadapi kedepan adalah terjadinya feodalisme maupun kapitalisme dalam politik Indonesia yang dapat mengakibatkan bahwa kemerdekaan nasional justru memberi kesempatan kepada para pemimpin politik menjadi raja-raja yang membelenggu rakyatnya dalam ketergantungan dan keterbelakangan. Tantangan ini harus kita hadapi dengan penuh kesadaran untuk selalu berjuang menentang feodalisme dan perjuangan untuk membebaskan diri dari cengkeraman kapitalisme. Usaha ini sangat ditentukan juga melalui perjuangan partai politik (Dahl, 1998: 110).

Partai politik sebagai pilar demokrasi haruslah selalu berinteraksi dengan masyarakat. Kegiatan sosial kemasyarakatan merupakan agenda wajib begitu pula sikap cepat tanggap dalam menghadapi musibah dan bencana. Dengan demikian, maka apapun sikap dan kebijakan partai tidak akan terlepas dari kehendak masyarakat konstituennya, dan benar-benar menjadi penyambung lidah rakyat.

Sehingga dapat mencegah kekhawatiran bahwa partai hanya memperjuangkan kepentingan kelompoknya. Kegiatan pencerdasan politik masyarakat harus terus dipupuk oleh partai politik melalui respon terhadap realitas sosial dan politik. Selain itu berpolitik hendaknya dilakukan dengan cara yang santun, damai, dan menyejukkan.

### **Pancasila Sebagai Etika Politik di Indonesia**

Pancasila merupakan sistem etika dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai sebuah sistem, semua susunan Pancasila merupakan kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Dalam penyelenggaraan Negara, etika politik berdasarkan pada Pancasila yang bertujuan agar kekuasaan dalam negara dijalankan sesuai dengan asas legalitas (legitimasi hukum), yaitu dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku dan disahkan secara demokratis (legitimasi demokrasi) dan dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip moral (legitimasi moral) (Suseno, 2001: 115). Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki tiga dasar tersebut. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan Negara, yang berhubungan dengan kekuasaan, kebijakan umum, pembagian serta kewenangan harus berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila.

Menurut Kaelan (2010: 74-84), nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila I, berkaitan dengan legitimasi moral. Secara moral kehidupan Negara harus sesuai nilai-nilai yang berasal dari Tuhan. Sila II, perwujudan nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang berbudaya, bermoral dan beragama serta adil dalam hubungan diri sendiri dan sesama di lingkungan masyarakat. Sila III, mengandung nilai bahwa Negara Indonesia merupakan persekutuan diantara keragaman yang dilukiskan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai nasionalisme harus tercermin dalam segala aspek penyelenggaraan Negara. Sila IV, mengandung nilai bahwa Negara adalah dari, rakyat oleh dan untuk rakyat. Nilai demokrasi mutlak diterapkan dalam kehidupan bernegara, menyangkut aspek moralitas kenegaraan, aspek politik, dan aspek hukum dan perundang-undangan. Sila V, mengandung nilai yang merupakan tujuan Negara sebagai tujuan bersama nilai keadilan harus terwujud dalam kehidupan bersama (keadilan sosial) yang bertujuan untuk kesejahteraan seluruh warga Negara. Dengan

demikian bahwa nilai-nilai Pancasila sebagai etika berpolitik di Indonesia harus direalisasikan oleh setiap individu baik terlibat dalam pemerintahan maupun tidak terlibat dalam pemerintahan yang berdasarkan legitimasi hukum dan legitimasi demokratis juga harus berdasarkan legitimasi moral.

Pancasila merupakan tolok ukur moralitas suatu penggunaan kekuasaan dan penegakkan hukum. Akan tetapi pada saat ini seharusnya nilai-nilai Pancasila sebagai landasan etika politik sekarang melamah dengan adanya pelanggaran oleh elite politik. Seperti halnya pendapat Birch & Nicholas (2015: 44) menyatakan bahwa para politisi semestinya menjaga kepercayaan masyarakat agar tetap mempertahankan legitimasi publik. Akan tetapi faktanya kebanyakan elite politik bertindak sebaliknya. Masalah etika memang kerap mendera para politisi yang seharusnya etika politik sebagai standar norma atau tata aturan yang melekat pada peran dan fungsi yang seharusnya dipatuhi oleh setiap pejabat maupun elit politik.

Fenomena pelanggaran etika politik disebabkan oleh kurangnya kesadaran pejabat atau politisi terhadap norma yang berlaku, bisa juga dipicu oleh faktor permisivisme masyarakat dapat digambarkan sebagai suatu gejala di mana masyarakat tidak lagi peduli terhadap suatu hal. Dalam konteks politik dimaknai sebagai suatu gejala di mana masyarakat tidak begitu fokus terhadap isu sosial politik ataupun yang berkaitan dengan perilaku elite. Dengan demikian, tingkah laku politik yang justru merugikan masyarakat kurang mendapat tanggapan serius masyarakat. Fenomena apatisme masyarakat Indonesia dinilai tidak hanya didasari oleh tindakan personal melainkan sudah menjadi sikap umum.

### **Upaya Pemerintah dalam Memperkuat Pancasila Sebagai Etika Politik di Indonesia**

Seiring dengan datangnya era reformasi pada pertengahan tahun 1998, Indonesia memasuki masa transisi dari era otoritarian ke era demokrasi. Dalam masa transisi itu, dilakukan perubahan yang bersifat fundamental dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk membangun tatanan kehidupan politik baru yang demokratis. Namun dalam perjalanannya, tatanan kehidupan politik yang demokratis ini, lambat laun tergerus oleh kepentingan pribadi dan kelompok. Ini dapat terlihat bagaimana saat ini para elit berkuasa lebih mudah menghalalkan

segala cara apapun untuk mewujudkan kepentingannya. Mereka sudah tidak lagi mengindahkan nilai-nilai etika dan moralitas berpolitik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Kartono, 1990: 90).

Terlihat dalam etika di dunia pendidikan semakin dipinggirkan. Sekarang ini banyak orang yang suka melanggar etika akademis dan etika keilmuan, misalnya orang membeli gelar akademik dan suka mencuri karya keilmuan orang lain (plagiasi). Pada kasus lain, ada akademisi yang suka “menjual” keahlian untuk menuliskan tesis atau disertasi orang lain dengan imbalan tertentu. Mereka yang mengabaikan etika ilmiah akademik itu merupakan orang yang tidak keberatan membohongi diri sendiri. Dan apabila seseorang sudah bisa membohongi diri sendiri, maka dia tidak sungkan untuk membohongi orang lain, itulah ciri koruptor atau calon koruptor. Artinya, kemerosotan etika di dunia pendidikan turut berkontribusi banyak dalam keterpurukan moral dan etika bangsa (Soedijarto, 2010).

Di bidang hukum, yang terjadi sekarang adalah hukum dibuat dan ditegakkan tanpa bertumpu pada etika, moral, dan hati nurani sehingga menjauhi rasa keadilan. Aturan hukum yang dibuat seringkali tidak membawa perbaikan yang diinginkan. Salah satu sebabnya karena terjadinya pelanggaran etika melalui politik kompromistis dan transaksional saat pembahasan di lembaga legislatif. Di ranah penegakan hukum, para penegak hukum sering berhenti pada keinginan menegakkan bunyi pasal-pasal undang-undang itu sendiri tanpa melibatkan moral dan etika.

Hal serupa terjadi di bidang ekonomi. Ekonomi tidak bisa dilepaskan dari etika dan moral, karena ekonomi tanpa etika sama halnya dengan kejahatan. Namun demikian, saat ini kita melihat bagaimana aktivitas ekonomi yang dijalankan justru mengesampingkan etika. Maraknya kasus korupsi berupa suap dalam bentuk *commitment fee* atau *kick back* dalam proyek misalnya, menunjukkan bagaimana aktivitas ekonomi telah mengesampingkan etika. Padahal, jika saja etika untuk memperoleh proyek pemerintah dipegang teguh, korupsi dan suap akan bisa dicegah. Pelanggaran atas etika terjadi pula dalam bidang ekonomi terkait dengan lemahnya etika pemerintahan di birokrasi (Tilaar, 2002: 144).

Etika tidak lagi dijadikan sebagai acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka ini bukan lain adalah suara sirine tanda bahaya bagi negara ini. Ancaman bahaya itu ialah terjadinya penggerogotan dan pembusukan dari dalam negara ini sendiri. Krisis etika telah membuat kita sulit menemukan orang-orang dengan perangai santun, tulus, toleran, mengapresiasi orang lain secara berkeadaban dan manusiawi, dalam segala hal. Itu sesuatu yang ironis mengingat jati diri bangsa Indonesia sesungguhnya dibingkai oleh nalar untuk memberikan penghormatan terhadap nilai kebaikan, kemanusiaan, dan keadilan (Widjaya, 1982: 86).

Untuk memperkuat etika politik Pancasila yang akan berdampak pada tata pemerintahan yang baik harus dilakukan kemajuan berbagai dimensi, termasuk dimensi sistem pendidikan, mata pelajaran (revitalisasi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai induk dari pendidikan politik etika), pendidikan politik (lembaga formal, informal, dan non-formal).

Sistem pendidikan nasional Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional, isi substantif dari undang-undang ini jelas bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, budaya nasional Indonesia dan responsif terhadap tuntutan perubahan zaman. Ini berarti bahwa masalah pendidikan secara keseluruhan mengenai jenis regulasi, praksis instrumen pendidikan, infrastruktur dan sebagainya harus berprinsip pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, selanjutnya adalah revitalisasi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai induknya pendidikan etika politik bangsa di Indonesia.

Pancasila sebagai sumber etika politik dan pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan etika politik harus dikembangkan atas dasar wawasan sejarah yang memberikan pelajaran berharga dalam perjalanan kemerdekaan Negara Indonesia sehingga melekat erat dalam nasionalisme dan patriotisme warga negara yang beradab dan bermartabat (Sumarwa, 2017).

Penting bahwa pemberian pendidikan politik baik di lembaga formal, informal dan non-formal memperkuat etika politik Pancasila terintegrasi ke dalam

Pendidikan Kewarganegaraan. Dengan demikian, upaya untuk memperkuat etika politik Pancasila dalam memastikan tata pemerintahan yang baik akan tercapai serta arah dan tujuan serta cita-cita bangsa Indonesia yang tertulis dalam tujuan nasional Indonesia adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## **SIMPULAN**

Praksis politik yang terjadi mengarah pada dimensi dan ruang sebagai nilai diskresi, mengesampingkan etika atau moral, sejauh ini dari praktik politik etik sesuai dengan nilai-nilai filosofi bangsa Indonesia sendiri, menunjukkan lemah praktik politik sesuai dengan etika politik. Dari segi nilai, moral dan etika dalam politik sangat erat kaitannya satu sama lain. Etika politik harus dipahami sebagai ilmu yang berkaitan dengan prinsip-prinsip moralitas politik. Dengan demikian, nilai-nilai moral Pancasila berperan dalam mewujudkan sistem etika politik yang baik di negeri ini. Kelemahan etika politik dapat dilihat dari berbagai pelanggaran ketertiban hukum yang terjadi di Indonesia, tindakan menyimpang seolah-olah telah dilembagakan di masyarakat dan sudah menjadi rahasia umum. Bahkan untuk pejabat seperti kewajiban, dan dianggap menyimpang jika tidak melakukan perbuatan kotor. Untuk itu diperlukan upaya penguatan etika politik Pancasila.

## **REFERENSI**

- Almond, G.A. & S. Verba. (1965). *The civic culture: political attitudes and democracy in five nations*. Boston: Little Brown & Co.
- Birch, S & Nicholas Allen. (2015). Judging politicians: The role of political attentiveness in shaping how people evaluate the ethical behaviour of their leaders. *European Journal of Political Research*, 54(6). 43–60. DOI: 10.1111/1475-6765.12066.
- Bew, L. P. (2014). *Public ethics and political judgment*. London: The Committee on Standards in Public Life.
- Bertens, K. (2007). *Etika*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Budiarjo, M. (1997). *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: Gramedia.
- Dahl, R. (1998). *On democracy*. London: Yale University Press.

- Fobel P. (2002). Socialna etika ako aplikovana, In: Vseobecna a aplikovana etiky. Cast II. Aplikovane etiky. Univerzita Mateja Bela Banska Bystrica, Aprint Ziar n/Hronom.
- Huntington, Samuel P. (2001). *Gelombang demokratisasi ketiga*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Kaelan. (2010). Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradigma.
- Kartono, K. (1990). *Wawasan politik: mengenai sistem pendidikan nasional*. Bandung: Mandar Maju.
- Kusnadi, E & Martini, E (2018). Strengthening the political ethics of pancasila in making good governance. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 251.
- Ketetapan MPR RI No. VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa
- Undang-Undang No. 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Latif, Y. (2011). *Negara paripurna: historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*. Jakarta: Pustaka Gramedia.
- Magnis, F.S. (1993). *Etika dasar. masalah-masalah pokok filsafat moral*. Yogyakarta: Kanisius.
- Peursen, V. C.A. (1980). *Susunan ilmu pengetahuan: sebuah pengantar filsafat ilmu*. Jakarta: Gramedia.
- Sedarmayanti. (2003). *Good governance dalam rangka otonomi daerah*. Bandung: PT. Mandar Maju.
- Suwarma, A.M. (2017). *Ilmu kewarganegaraan. konstruksi nilai Pancasila dalam pendidikan kewarganegaraan*. Bandung: Laboratorium UPI.
- Soedijarto.(2010). “*Pendidikan Nasional dan Pembangunan Kebudayaan dan Karakter Bangsa (Jati Diri Bangsa) dan Implikasinya terhadap Sistem Kurikulum dan Proses Pembelajaran*”. Makalah disajikan pada Sarasehan Nasional Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa, 14 Januari 2010.
- Suseno, F.M. (2001). *Etika Jawa: sebuah analisa falsafi tentang kebijaksanaan hidup Jawa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

- Tilaar, H.A.R. (2002). *Mengindonesia etnisitas dan identitas bangsa indonesia: tinjauan dari perspektif ilmu pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Widjaya, A. (1982). *Budaya politik dan pembangunan ekonomi*. Jakarta: LP3ES
- Widodo, W. (2014). Muwujudkan budaya politik santun, bersih dan beretika. *HUMANIKA Vol. 19* (1). 114-129.

# **Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Pecinta Alam sebagai Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila**

**Repy Hapyan, S.Pd., M.Pd.**  
[repyhapyan@upi.edu](mailto:repyhapyan@upi.edu)

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan mendeskripsikan penguatan pendidikan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler pecinta alam sadagori sebagai aktualisasi nilai-nilai Pancasila.. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di ekstrakurikuler perhimpunan pecinta alam Sadagori SMAN 5 Bandung, dengan warga Sadagori. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Beberapa program dalam mengimplementasikan penguatan pendidikan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler pecinta alam dilakukan dengan intervensi dan habituasi melalui berbagai kegiatan, yaitu: (1) kegiatan rutin yang dilakukan secara terus menerus dan ditetapkan di program kerja; (2) pelaksanaan kegiatan yang dilakukan anggota Sadagori sesuai dengan program kerja; (3) Karakter yang terbentuk pada saat kegiatan dan internalisasi pasca kegiatan (4) hambatan dan upaya dalam mengatasi hambatan Maka dapat disimpulkan kegiatan PPA Sadagori dapat membentuk karakter anggota sadagori dengan terbentuknya karakter peduli lingkungan, kedisiplinan, pantang menyerah dan cinta tanah air.

**Kata Kunci:** Pendidikan Karakter, perhimpunan pecinta alam, nilai-nilai Pancasila.

## **PENDAHULUAN**

Penguatan pendidikan karakter merupakan sebuah gerakan untuk menginternalisasikan penguatan karakter generasi muda Indonesia. Dalam hal itu kekayaan utama bangsa Indonesia yang terdidik, tercerahkan, berintegritas dan berkarakter. sebagaimana yang dimaksudkan dalam tujuan pendidikan nasional Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Memperhatikan maksud dan tujuan pendidikan nasional sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang tersebut, nampaklah bahwa kesalahan yang terjadi bukan terletak pada makna dan isi Undang-Undang yang secara substantif telah sesuai dengan falsafah bangsa, tetapi semata-mata terletak pada praktik atau

implementasinya di lembaga sekolah, serta penerapan sanksi hukum (pelanggaran tata tertib sekolah atau disiplin pegawai) bagi semua pelaksana proses pembelajaran di sekolah secara jelas dan tegas.

Menurut Lickona (2012:50) menyatakan bahwa salah satu alasan mengapa pendidikan karakter itu diperlukan bagi suatu bangsa adalah adanya kenyataan bahwa kekurangan yang paling mencolok pada diri anak-anak adalah dalam hal nilai-nilai moral. Pada umumnya guru mereka mengatakan berawal dari masalah keluarga. Orang tua yang kurang perhatian menjadi salah satu alasan utama mengapa sekolah sekarang merasa terdorong untuk terlibat dalam pendidikan nilai-nilai moral dan karakter.

Selanjutnya, Kosoema (2018:57) Implementasi pendidikan karakter pada satuan pendidikan sekolah dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sekolah antara lain: peran kepala sekolah, tata tertib sekolah, keberadaan silabus, kurikulum yang mendukung, integritas siswa, kedisiplinan guru, profesionalisme guru, sarana prasarana sekolah yang mendukung, visi dan misi sekolah, kedisiplinan peserta didik, integritas karyawan, penerapan sanksi bagi yang melanggar tata tertib secara tegas dan komitmen warga sekolah terhadap pembinaan dan pendidikan karakter bangsa. Sedangkan faktor eksternal sekolah antara lain: kondisi lingkungan sekolah, kondisi masyarakat di luar sekolah, budaya masyarakat sekitar, lingkungan keluarga, dan peran tokoh masyarakat.

Gagasan dasar tentang pendidikan karakter secara umum sesungguhnya bukan sesuatu hal yang baru. Beberapa puluh tahun lalu Ki Hajar Dewantara telah menegaskan secara eksplisit bahwa pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran dan tubuh anak (Dewantara, 1977: 43). Selain itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 juga menegaskan tentang pentingnya penguatan

pendidikan karakter. Ini semua menandakan bahwa sesungguhnya pendidikan bertugas mengembangkan karakter sekaligus intelektualitas berupa kompetensi peserta didik.

Lickona (2012:82) menekankan pentingnya tiga komponen karakter yang baik dimana karakter yang baik terdiri dari mengetahui hal yang baik (*moral knowing*), menginginkan hal yang baik (*moral feeling*), dan melakukan hal yang baik (*moral action*) kebiasaan dalam cara berpikir, kebiasaan dalam hati, dan kebiasaan dalam tindakan. Oleh karena itu untuk membentuk karakter yang efektif adalah dengan melibatkan ketiga komponen tersebut. *Moral knowing* mudah diajarkan, sebab pengetahuan bersifat kognitif saja. Setelah *moral knowing* harus ditumbuhkan *moral feeling*, yakni bagaimana merasakan dan mencintai kebajikan yang senantiasa orang mau berbuat kebaikan, sehingga tumbuh kesadaran bahwa orang mau melakukan perilaku kebajikan karena cinta dengan perilaku kebajikan itu. Setelah terbiasa melakukan kebajikan, *moral action* akan berubah menjadi kebiasaan. Melalui kebiasaan-kebiasaan yang baik akan muncul hasrat untuk berubah dalam diri seseorang. Selain itu, agar seseorang memiliki karakter mulia dibutuhkan upaya dan kerjasama dari semua pihak, yaitu antara orang tua, sekolah dan masyarakat.

Salah satu lingkup gerakan penguatan pendidikan karakter yang sangat mendukung implementasi kemajuan pendidikan karakter adalah melalui Kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler sekolah yang baik sangat mendukung keberhasilan dari program pendidikan karakter. Namun ekstrakurikuler negatif akan menghambat pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah. Bila peserta didik memiliki karakter yang baik, akan berpengaruh langsung terhadap prestasi akademik yang tinggi. Oleh karena itu, langkah pertama dalam mengaplikasikan pendidikan karakter dalam satuan pendidikan formal adalah melalui ekstrakurikuler di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Menengah disebutkan bahwa: kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh siswa di luar jam belajar kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler, di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan, bertujuan

untuk mengembangkan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian siswa secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler merupakan wadah kegiatan peserta didik dalam mengembangkan minat dan bakat untuk menunjang soft skill dan hard skill peserta didik dalam melanjutkan kehidupan sesuai dengan potensi dan bakatnya masing-masing. Budaya sekolah yang positif akan mendorong semua warga sekolah untuk bekerjasama yang didasarkan saling percaya, mengundang partisipasi seluruh warga, mendorong munculnya gagasan-gagasan baru, dan memberikan kesempatan untuk terlaksananya pembaharuan di sekolah yang semuanya ini bermuara pada pencapaian hasil terbaik. Budaya sekolah yang baik dapat menumbuhkan iklim yang mendorong semua warga sekolah untuk belajar. Budaya sekolah yang baik dapat memperbaiki kinerja sekolah, baik bagi kepala sekolah, guru, siswa, karyawan maupun warga sekolah yang lain (Mora & Martos, 2012: 49). Dengan demikian, salah satu faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan proses pendidikan adalah budaya yang dibangun dengan baik. Jika sekolah berhasil membangun budaya sekolah yang baik, maka tidak hanya akan menghasilkan prestasi akademik saja, tetapi juga menghasilkan budaya sekolah dengan menanamkan nilai-nilai karakter yang baik.

Pada intinya, penguatan pendidikan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler pecinta alam tidak terlepas dari peran semua pihak di sekolah dan alumni. Seorang kepala sekolah mempunyai posisi strategis dalam menentukan kebijakan pendidikan karakter di sekolah. Guru sebagai pendidik, fungsi utamanya yaitu pelaksana kebijakan pendidikan karakter untuk diimplementasikan kepada siswa. Demikian halnya dengan peran tenaga kependidikan di lingkungan sekolah juga turut mendukung terciptanya pendidikan karakter yang sesuai dengan pendidikan karakter yang dilaksanakan di ekstrakurikuler sekolah. Peserta didik juga berperan aktif untuk mensosialisasikan serta memberikan contoh kepada siswa yang lain untuk membiasakan diri mengimplementasikan nilai-nilai karakter yang dikembangkan di sekolah.

Hal inilah yang menjadi inspirasi penulis untuk mencoba menuangkan gagasan dan ide-ide yang dimiliki, pendidikan karakter pecinta alam sebagai aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Dalam penelitian ini ingin diketahui secara mendalam mengenai penguatan pendidikan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler pecinta alam sebagai aktualisasi nilai-nilai Pancasila pada ekstrakurikuler perhimpunan pecinta alam Sadagori SMAN 5 Bandung. Sebuah sekolah yang terletak di Jalan Belitung No.8 Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Yin (2018:1) studi deskriptif merupakan strategi yang lebih cocok bila pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan *how* dan *why*, bila fokus penelitiannya terletak pada gambaran fenomena di dalam konteks kehidupan nyata. Sejalan dengan hal tersebut Creswell (2015:479) mengungkapkan metode studi deskriptif dapat digunakan untuk menggambarkan peristiwa atau kegiatan dari individu atau beberapa individu yang berasal dari kelompok. Studi ini dimaksudkan untuk mengungkapkan dan memahami kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya, secara intensif, mendalam, mendetail, dan komprehensif.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara yang mendalam dan studi dokumentasi. Observasi adalah proses pengumpulan informasi tangan pertama dengan mengamati orang dan tempat di perhimpunan pecinta alam Sadagori SMAN 5 Bandung. Wawancara kualitatif terjadi ketika peneliti menanyakan berbagai pertanyaan terbuka kepada partisipan dan mencatat jawaban mereka. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data tentang kegiatan-kegiatan perhimpunan pecinta alam Sadagori SMAN 5 Bandung. Dokumen merepresentasikan sumber data yang baik untuk data teks (kata) dalam penelitian kualitatif (Creswell, 2015:441). Untuk memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dalam penelitian ini dilakukan analisis data dengan teknik triangulasi. Oleh sebab itu, penelitian ini akan menggunakan model teknik analisis data dari Miles &

Huberman (2007:23) yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang dilakukan secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Dalam reduksi data peneliti melakukan pemilihan, dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh. Pada tahap penyajian data, peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang lazim digunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk teks naratif. Tahap penarikan kesimpulan, peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Perhimpunan Pecinta Alam (PPA) Sadagori SMAN 5 Bandung merupakan satu dari 36 ekstrakurikuler yang ada di bawah naungan SMAN 5 Bandung. Perhimpunan Pecinta Alam Sadagori SMA Negeri 5 Bandung yang berdiri pada tanggal 14 Maret 1982 dan diresmikan pada tanggal 11 Juni 1982, merupakan organisasi kepecinta-alaman di SMA Negeri 5 Bandung yang mewadahi para anggotanya untuk melakukan kegiatan yang bersifat petualangan di alam terbuka, juga dalam menjaga kelestarian alamnya. Perhimpunan pecinta alam Sadagori SMAN 5 Bandung yang terletak di Jalan Belitung No. 8, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat ini mempunyai visi dan misi yang bertujuan sebagai motivator dalam melaksanakan kegiatan kecintaalaman.

Visi Perhimpunan pecinta alam Sadagori SMAN 5 Bandung adalah "Menjadikan perhimpunan pecinta alam Sadagori sebagai wadah untuk meningkatkan skill dibidang kepecintalaaman serta mempererat silaturahmi antar Anggota". Serta diperkuat dengan misi, yaitu (1) Meningkatkan Intensitas dalam berkegiatan di alam bebas; (2) Pengadaan fasilitas penunjang di perhimpunan pecinta alam Sadagori; (3) Meningkatkan hubungan baik di internal sadagori

## **Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Pecinta Alam di Sadagori SMAN 5 Bandung sebagai aktualisasi nilai-nilai Pancasila**

Berdasarkan hasil penelitian, dalam membangun sumber daya manusia yang cerdas, terampil dan memiliki karakter yang baik, perhimpunan pecinta alam Sadagori SMAN 5 Bandung menjalin kerja sama dengan semua komponen sekolah (kepala sekolah, manajemen sekolah, guru, tenaga kependidikan, siswa, alumni, dewan pengurus, dewan kehormatan sadagori dan orang tua siswa) dan secara bersama-sama menyatukan langkah untuk membangun karakter yang baik di lingkungan organisasi, sekolah dan masyarakat Indonesia. Dalam pelaksanaan penanaman karakter di perhimpunan pecinta alam sadagori SMAN 5 Bandung terdapat berbagai metode, program, dan cara yang diterapkan agar tercipta aktualisasi nilai-nilai Pancasila yang dijalankan pada kehidupan nyata. Penanaman nilai-nilai karakter melalui ekstrakurikuler pecinta alam sadagori mencakup semua kegiatan yang dilakukan kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan ketika berkomunikasi dan berinteraksi dengan para siswa dengan menggunakan fasilitas sekolah. Interaksi tersebut berkaitan dengan berbagai aturan, norma, moral serta etika bersama yang berlaku di perhimpunan tersebut. Karakter yang dijiwai nilai-nilai Pancasila yakni karakter ketuhanan, karakter kemanusiaan, karakter kebangsaan, karakter kerakyatan dan karakter keadilan merupakan nilai-nilai yang dikembangkan dalam budaya perhimpunan. Melalui berbagai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di ekstrakurikuler pecinta alam sadagori yaitu kegiatan pra pendidikan, kegiatan pendidikan dasar, kegiatan masa bimbingan, kegiatan pengabdian sebagai dewan pengurus satu periode dan penjelajahan sadagori dengan ditanamkan perilaku-perilaku penguatan pendidikan berkarakter kepada anggota sadagori SMAN 5 Bandung.

Sebagaimana Damayanti (2014:12) memberikan pengertian pendidikan karakter adalah gerakan nasional menciptakan sekolah yang membina etika, bertanggungjawab dan merawat orang-orang muda dengan pemodelan dan mengajarkan karakter baik melalui penekanan pada universal, nilai-nilai yang kita semua yakini. Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu melibatkan aspek pengetahuan, perasaan, dan tindakan tanpa ketiga aspek ini

pendidikan karakter tidak akan efektif. Proses kegiatan yang dilakukan perhimpunan pencinta alam Sadagori SMAN 5 Bandung dalam mengimplementasikan penguatan pendidikan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler pencinta alam sebagai aktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai berikut.

### **Kegiatan Pra Pendidikan Dasar**

Kegiatan pra pendidikan dasar merupakan kegiatan yang dilakukan seluruh calon anggota sadagori secara berjenjang. Di perhimpunan pencinta alam Sadagori SMAN 5 Bandung kegiatan pra pendidikan dasar sadagori yang dilaksanakan seperti berikut:

- 1) Demontrasi MPLS (Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah). Kegiatan demonstrasi ini, sekolah manajemen bidang kesiswaan memfasilitasi kepada beberapa ekstrakurikuler untuk memperkenalkan ekstrakurikuler yang berada di SMAN 5 Bandung kepada peserta didik baru SMAN 5 Bandung. Dengan media ini ekstrakurikuler mempromosikan minat dan bakat siswa untuk dikembangkan di ekstrakurikuler sesuai dengan minat dan bakat siswa.
- 2) Smilling camp: kegiatan camping yang di fasilitasi oleh PPA sadagori kepada seluruh peserta didik SMAN 5 Bandung dalam rangka menjanging dan memperkenalkan kegiatan di alam terbuka.
- 3) Latihan materi kepencaalam. Kegiatan ini awal dimana peserta didik setelah melakukan pendaftaran calon anggota sadagori dan selanjutnya masuk ke tahap pemberian materi secara berkala kepada calon anggota PPA sadagori tentang kode etik perhimpunan pencinta alam Indonesia. Diharapkan calon anggota mampu mengenal dasar-dasar sejarah perhimpunan pencinta alam, dinamika serta eksistensi perhimpunan di Indonesia bahkan di dunia. Tahapan ini dilanjutkan untuk mengenal materi dasar lanjutan dan seleksi selama tiga bulan: tes fisik, tes kesehatan, materi bivak, navigasi darat, survival, panjat tebing, packing, manajemen perjalanan hingga dinyatakan lulus untuk siap mengikuti medan operasi “Pendidikan Dasar” calon siswa (anggota muda) sadagori.

- 4) Peduli lingkungan. Sesuai dengan visi sekolah yang berwawasan lingkungan, para peserta didik secara rutin melakukan kegiatan dengan membersihkan lingkungan baik di dalam maupun di luar kelas, tidak membuang sampah sembarangan, tidak mencoret-coret tembok, dan tidak merusak tanaman di sekitar sekolah. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan mengembangkan kerjasama dan kepedulian siswa pada lingkungan serta ikut serta merealisasikan sekolah wiyatamandala.
- 5) Budaya 5 S. sekolah memiliki budaya 5S yang tercermin dalam senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Budaya 5S dilaksanakan setiap hari di sekolah, dari masuk hingga pulang sekolah. Kegiatan ini antara lain diimplementasikan pada pagi hari sebelum bel berbunyi oleh kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan guru dengan berdiri di gerbang sekolah menyambut siswa dengan berjabat tangan.

Pelaksanaan kegiatan intrakurikuler di Sekolah Menengah Umum berdasarkan pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang mengamanatkan bahwa Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) jenjang pendidikan dasar dan menengah disusun oleh satuan pendidikan dengan mengacu kepada Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Kelulusan (SKL) serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP). Menurut Kunandar (2007: 177) yang dimaksud dengan kegiatan intrakurikuler merupakan kegiatan pengembangan diri yang dilaksanakan sebagian besar di dalam kelas (intrakurikuler). Kegiatan intrakurikuler ini tidak terlepas dari proses belajar mengajar yang merupakan proses inti yang terjadi di sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan formal. Berdasarkan hal tersebut, belajar diartikan sebagai suatu bentuk pertumbuhan atau perubahan dalam diri seseorang yang dinyatakan dalam cara-cara bertingkah laku yang baru berkat pengalaman dan latihan. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Oemar Hamalik (2003:4) yang menyatakan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku melalui interaksi antara individu dan lingkungan.

### **Kegiatan Pendidikan Dasar Sadagori**

Kegiatan pendidikan dasar (PD) yaitu kegiatan yang dilakukan secara berkala dilakukan setiap 1 tahun sekali. Kegiatan ini diikuti oleh peserta yang dinyatakan lolos seleksi pada saat pra pendidikan dasar baik berupa tes kesehatan, tes fisik dan kemampuan intelegensi penguasaan materi kepecintaalaman. kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan berbagai materi seperti Kompetensi, literasi hingga pembentukan karakter di alam terbuka. Dilaksanakan dibulan desember hingga januari dengan rentan waktu 10 hari sampai dengan 12 hari di alam terbuka. Pelaksanaan pendidikan dasar ini mencakup rangkaian syarat kelulusan menjadi anggota muda sadagori. Adapun materi dan kegiatan yang ditempuh oleh calon anggota sadagori seperti berikut:

- 1) Pembukaan Pendidikan dasar sadagori: kegiatan ini menjadi tanda bahwa dimulai nya pendidikan dasar dilaksanakan dengan di hadiri anggota sadagori, para alumni, tamu undangan perhimpunan pecinta alam (sekolah, perguruan tinggi dan perhimpunan pecinta alam kemasyarakatan), unsur manajemen sekolah sekaligus sambutan dan dibuka oleh kepala sekolah atau manajemen bidang kesiswaan SMAN 5 Bandung.
- 2) Manajemen perjalanan dan packing: peserta pendidikan dasar dilatih untuk mengatur fisik, perbekalan, mental dan waktu tempuh untuk melakukan perjalanan yang menjadi tujuan berikutnya dalam melaksanakan tahapan pendidikan dasar sadagori. Kegiatan ini diharapkan peserta dapat melatih keterampilan mengatur ritme pendidikan dasar, sikap pantang menyerah, orientasi medan, hingga bagaimana menghargai budaya setempat yang dilalui kegiatan pendidikan dasar sadagori.
- 3) Navigasi darat: kegiatan ini bagian dari unsur penting untuk membekali peserta pendidikan dasar sadagori untuk mengetahui, memahami sehingga mampu menentukan posisi dirinya di dalam peta, atau bahkan menentukan posisi dirinya didalam peta. Materi ini menjadi bagian dari kurikulum wajib di perhimpunan pecinta alam diharapkan mampu mengenal

gambaran bumi di dalam peta. Penguatan pendidikan karakter melalui media materi navigasi darat diharapkan calon anggota sadagori memaknai arti ketelitian, pengenalan vegetasi alam sebenarnya yang ada di dalam peta.

- 4) Survival dan bivak: kegiatan bentuk wujud dari pendidikan karakter dalam mempertahankan kehidupan di alam terbuka, dalam kondisi tertentu manusia dihadapkan dalam kondisi tidak berdaya dan tidak memiliki apa-apa. Siswa sadagori belajar mempertahankan hidup dengan cara survive di alam terbuka.
- 5) Panjat tebing dan tali menali: merupakan kegiatan olahraga yang focus pada keterampilan anggota sadagori pada atlet dan di jadikan tumpuan keterampilan ketika penjelajahan orad, susur pantai. Kegiatan ini merupakan dari keterampilan dasar yang sangat penting ketika berkegiatan di alam terbuka. Hal yang sangat muncul dalam pendidikan karakter yaitu ketelitian dan kerjasama antar anggota.
- 6) Apel, kegiatan apel atau pembinaan merupakan kegaiatan di pagi hari dan di sore hari, acara ini bentuk ritual pendidikan karakter motivasi kepada siswa sadagori untuk selalu sabar, sadar dan setia dalam menjalani pendidikan dasar sadagori.
- 7) Pertolongan pertama gawat darurat (PPGD): setiap kegiatan pendidikan materi ini di butuhkan karena resiko berkegiatan di alam bebas sangat rentan dengan peristiwa-peristiwa yang berbahaya. Maka dari itu materi ini sangat dibutuhkan anggota sadagori dalam menjelajah kegiatan di alam terbuka.

Pelaksanaan ini terlihat pada beberapa kegiatan pendidikan dasar siswa sadagori, rangkaian kegiatan kepecintalaman dan keorganisasian.pendidikan di alam terbuka ini menjadi kegiatan yang sangat di jadikan pedoman penguatan pendidikan karakter seperti yang dikemukakan oleh Koesoema (2018:23) penguatan pendidikan karakter itu terbagi menjadi tiga gerakan: gerakan berbasis budaya sekolah, gerakan budaya kelas dan gerakan berbasis komunitas. Pendidikan pecinta alam sadagori ini peneliti kategorikan kedalam pendidikan

karakter berbasis komunitas yang mana ekstrakuruler sebagai penunjang kegiatan pendidikan di luar kegiatan pembelajaran di dalam kelas.

### **Masa Bimbingan Anggota Muda Sadagori**

Dalam kegiatan masa bimbingan anggota muda sadagori yang telah dilantik setelah menyelesaikan tahapan pendidikan dasar sadagori SMAN 5 Bandung ini dewan pengurus menemani, mengawal, memahami dan merencanakan perencanaan penjelajahan yang merupakan bagian syarat mendapatkan nomor anggota penuh perhimpunan sadagori. Kegiatan masa bimbingan ini dilaksanakan sekitar tiga bulan dan menyiapkan rencana penjelajahan melalui proposal kegiatan di sidangkan melalui dewan penguji sidang sadagori yang dibentuk oleh pengurus.

Pelaksanaan pendidikan karakter sesuai apa yang diatur dalam desain induk pendidikan karakter (Kemendiknas, (2010, hlm. 9) dijelaskan konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosio kultur dapat dikelompokkan dalam olah hati (*intellectual dan emosional development*), olahraga dan kinestetik (*physical dan kinesthetic development*), olahraga dan karsa (*affective and creativity development*). Ke empat proses psikososial tersebut secara holistic dan koheren memiliki saling keterkaitan dan saling melengkapi yang bermuara pada pembentukan karakter yang menjadi perwujudan nilai-nilai luhur. Ke empat proses psikologis tersebut berlaku pada beberapa kegiatan perhimpunan pecinta alam sadagori olah raga, olah karsa, olah hati, dan pembentuka psikologis yang positif didalam mengembangkan habituasi budaya karakter yang teranam turun menurun. Kegiatan proses pembentukan karakter terutama pada saat pelaksanaan kegiatan pendidikan dasar sadagori yang mana dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yang cukup panjang dengan tempo yang cukup menguras konsentrasi, ketelitian, kedisiplinan, pembelajaran pantang menyerah, cinta tanah air serta arti kebersamaan dan loyalitas seperti bagan di bawah ini.

Tentunya pelaksanaan pendidikan perhimpunan kepecinta alamaan ini pelaksanaan mengacu pada kode etik kepecintaalaman perhimpunan pecinta alam Indonesia. Hasil temuan peneliti pada kegiatan tersebut ditemukan pelaksanaan

pendidikan karakter serta pengamalan nilai-nilai Pancasila yang telah menjadi budaya organisasi seperti: Kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan, rela berkorban, cinta tanah air, peduli lingkungan serta kedisiplinan dan ketelitian dalam melakukan tindakan. Karakter tersebut terbentuk karena proses alur mengikuti berbagai tahapan di PPA Sadagori. Pengamalan karakter ini jika anggota sadagori melakukan pendidikan misalnya kegiatan materi dan praktek Survival (ilmu cara bertahan hidup) ini memberikan pembelajaran ketelitian dalam melakukan tindakan jika salah melakukan maka nyawa yang dipertaruhkan. Maka pelaksanaan ini selaras seperti yang Selanjutnya di dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada satuan pendidikan dikembangkan dengan prinsip sebagai berikut.

- 1) Partisipasi aktif yakni bahwa kegiatan Ekstrakurikuler menuntut keikutsertaan siswa secara penuh sesuai dengan minat dan pilihan masing-masing; dan
- 2) Menyenangkan yakni bahwa kegiatan Ekstrakurikuler dilaksanakan dalam suasana yang menggembirakan bagi siswa.

Pelaksanaan kegiatan ini beberapa merujuk pada kecocokan apa yang dikemukakan oleh Komalasari dkk (2014:170) pada *Living Value Education Model in Learning and Extracurricular Activities to Construct the Students Character* tumbuhnya nilai-nilai karakter dengan proses integrasinya kegiatan pendidikan dengan peran berbasis yang lainnya seperti ekstrakurikuler. Dalam mempersiapkan karier peserta didik kedepannya.

### **Penjelajahan**

Penjelajahan ini dilaksanakan ke tempat-tempat yang memang nantinya diperoleh data-datanya di butuhkan oleh public. Mulai dari jalur pendakian, jalur evakuasi, sosialisasi pedesaan, vegetasi alam, potensi wilayah serta kelemahan wilayah, hukum adat setempat, flora dan fauna. Data tersebut dibuat dalam bentuk makalah dan di laporkan pada kegiatan sidang laporan pertanggungjawaban kepada penguji sidang. Proses kegiatan tersebut sejalan dengan konsep yang diutarakan oleh koesoema (2018:133) bahwa tahapan Pendidikan penguatan karakter merupakan pelibatan semua elemen yang hadir dalam membantu

Pendidikan. Komunitas yang ikut serta berperan dalam menunjang Pendidikan karakter. Proses penjelajahan kegiatan ekstrakurikuler ini sebagaimana puncak dari berbagai kegiatan dalam upaya menjaga kehadiran komunitas dalam kolaborasi dengan sekolah.

Latif (2018:17) Titik tumpu Pancasila, titik temu dan titik tuju merupakan melalui proses hambatan yang panjang yang dijalani nya dengan tekun. Sehingga setiap proses pembelajaran yang telah menjadi habituasi menjadi terbentuknya pengamalan dan kritisi terhadap aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Pancasila dari ruang-ruang Pembelajaran menjadi kiritisi sekaligus pengamalan dalam pembudayaan nilai-nilai luhur. Hambatan yang dialami setiap kehidupan manusia menjelma dalam diri filosofis Pancasila di ruang-runag pembelajaran termasuk upaya organisasi perhimpunan pecinta alam sadagori dalam mengarungi dinamika kehidupan perhimpunan. Peneliti tentunya menyadari setiap hambatan dan upaya yang ada di dalam dinamika organisasi tersebut memiliki ruang-ruang pembelajaran nilai aktualisasi Pancasila.

Tahapan terakhir untuk menjadi anggota penuh perhimpunan pecinta alam diakhiri dengan masa pengabdian sebagai dewan pengurus harian perhimpunan pecinta alam sadagori SMAN 5 Bandung. Masa pengabdian ini dilaksanakan selama 1 periode kepengurusan. Dewan pengurus sadagori merupakan anggota muda sadagori atau siswa SMAN 5 Bandung yang dinyatakan lulus pada saat pendidikan dasar perhimpunan sadagori. Setiap anggota muda diberikan kewenangan untuk menjadi pengurus dengan bidang masing-masing, pendidikan karakter pada masa ini dilatih untuk memimpin, siap dipimpin, berbicara di depan umum, memimpin rapat, mengemukakan pendapat, percaya diri, ketelitian, kemandirian, kerjasama, belajar menerima tekanan, hingga belajar merencanakan, melaksanakan dan evaluasi disetiap kegiatan. Dewan pengurus didampingi oleh dewan kehormatan (alumni Sadagori) dan Pembina bidang kesiswaan SMAN 5 Bandung. Pada fase tersebut sejalan dengan konsep Latif (2011:73) Pancasila dalam perbuatan sebagai bentuk dari aktualisasi nilai-nilai Pancasila.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan uraian dan pembahasan menanamkan karakter pada anggota dilakukan dengan tahap-tahap pendidikan sadagori dan pembiasaan melalui berbagai kegiatan, yaitu: (1) kegiatan pra pendidikan dasar; (2) kegiatan pendidikan dasar siswa sadagori yang dilakukan siswa yang lolos tahapan pra diklatsar secara berjenjang; (3) mabim atau masa bimbingan anggota muda sadagori yang dinyatakan lulus telah mengikuti pendidikan dasar sebagai masa dimana pendidikan karakter terus dilakukan; dan (4) mengikuti pengabdian kepada sadagori yaitu dengan menjadi dewan pengurus satu periode dan dilanjutkan dengan mengikuti program penjelajahan upaya implementasi pendidikan karakter di alam terbuka sebagai aktualisasi nilai-nilai Pancasila.

Implementasi pendidikan karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler pecinta alam sebagai aktualisasi nilai-nilai Pancasila merupakan peran semua pihak di sekolah, alumni sadagori dan anggota. Seorang kepala sekolah mempunyai posisi strategis dalam menentukan kebijakan pendidikan karakter di sekolah. Guru sebagai pendidik, fungsi utamanya yaitu pelaksana kebijakan pendidikan karakter untuk diimplementasikan kepada siswa. Demikian halnya dengan manajemen bidang kesiswaan juga turut mendukung terciptanya karakter anggota sadagori yang baik. Dewan kehormatan, alumni dan anggota kehormatan juga berperan aktif untuk mensosialisasikan serta memberikan contoh kepada anggota sadagori yang lain untuk membiasakan diri mengimplementasikan nilai-nilai karakter yang dikembangkan di sekolah.

## **REFERENSI**

- Creswell, J. (2015). *Riset pendidikan. perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi riset kualitatif & kuantitatif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Davis, K. (1990). *Human behavior at work; organizational behavior*. New Delhi: Tata McGraw-Hill Publishing.
- Damayanti, D. (2014). *Panduan Implementasi pendidikan karakter di sekolah*. Yogyakarta: Araska.
- Dewantara, K.H. (1977). *Pendidikan (bagian pertama): pemikiran, konsepsi, sikap merdeka*. Yogyakarta: Majelis Luhur Persatuan Taman Siswa.

- Haryati, S. (2012). Pengembangan pendidikan karakter menuju penguatan karakter dan jati diri bangsa di era global. *Jurnal PKn Progresif*. Vol.7 No.2 Desember 2012.
- Handayani, Sri. (2016). *Pendidikan karakter berbasis alam terbuka*. Bandung: Jurnal UPI.
- Handoyo, Eko. (2010). *Model Pendidikan karakter berbasis konservasi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang.
- Hariyanti, D. (2012) Peningkatan efektifitas guru paud paud dalam rangka pengembangan karakter peserta didik. *Jurnal*, hlm 1-11.
- Iriany, I.S. (2014). Pendidikan karakter sebagai upaya revitalisasi jati diri bangsa. *Jurnal Pendidikan Universitas Garut*. Vol. 08; No.01; 2014; 54-85.
- Katuuk, D. (2014) Pengembangan Instrumen pendidikan karakter pada siswa sd di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 4(1).
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.(2017). *Konsep dan Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter*.Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Kementerian Pendidikan Nasional.(2010). *Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa 2010-2025*.Jakarta : Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan Nasional.
- Koesoema, D. (2018). *Pendidikan karakter berbasis budaya sekolah*. Yogyakarta: Kanisius.
- Koesoema, D. (2018). *Pendidikan karakter berbasis komunitas*. Yogyakarta: Kanisius.
- Koesoema, D. (2018). *Pendidikan karakter berbasis kelas*. Yogyakarta: Kanisius.
- Komalasari, K. & Saripudin, D,. (2017). *Pendidikan karakter: konsep dan aplikasi living values education*. Bandung: Refika Aditama.
- Kusmiarsih. (2013). Pengembangan karakter semangat kebangsaan melalui metode tanya jawab dengan media gambar di Sekar Melati. *Jurnal Universitas Tanjungpura Pontianak*, hlm 1-11.
- Kusmiarsih. (2011). 18 Indikator pendidikan karakter bangsa. Diakses dari <http://belajaronlinegratis.com/content/18-indikator-pendidikan-karakter-bangsa> [Diakses 31 Oktober 2020]

- Kusmiarsih. (2014). *Rumus-rumus pengambilan sampel penelitian*. Daikses dari <http://tesisdisertasi.blogspot.com/2009/12/rumus-rumus-pengambilan-sampel.html> [Diakses 1 Nopember 2020]
- Kunandar. (2007). *Guru profesional: implementasi tingkat satuan pendidikan dan sukses dalam sertifikasi guru*. Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Latif, Y. (2011). *Negara paripurna (historis, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Latif, Y. (2018). *Wawasan Pancasila: bintang penuntun untuk kebudayaan*. Jakarta: Mizan
- Latif, Y. (2015). *Revolusi Pancasila: kembali ke rel perjuangan bangsa*. Jakarta: Mizan
- Laku, K. & Andreas. (2012) *Pancasila sebagai pembebas*. Yogyakarta: Kanisius.
- Lickona, T. (2012). *Education for Character: Mendidik Untuk Membentuk Karakter, Bagaimana Sekolah Dapat Mengajarkan Sikap Hormat Dan Tanggung Jawab*. Jakarta: Bumi Aksara
- Miles, M. B & Huberman, M. (1992). *Analisis data kualitatif. buku sumber tentang metode-metode baru*. Jakarta : UI Press.
- Mora, J & Martos. (2012). *Andalusia civic culture at secondary schools. Educational Reasearch Journal University of Alicante*.1 (12.03) 2254-0385.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. (2014). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62, Tahun 2014, Tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada satuan Pendidikan*.
- Presiden Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Presiden RI Nomor 87, Tahun 2017, Tentang Penguatan Pendidikan Karakter*.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang RI Nomor 20, Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Republik Indonesia. (2005). *Undang-Undang RI Nomor 14, 2005, tentang Guru dan Dosen*
- Safitri, N. M. (2015). *Implementasi pendidikan karakter Melalui Kultur Sekolah Di SMPN 14 Yogyakarta. Jurnal Pendidikan Karakter, 5(2), 173-183*
- Samani, M. & Hariyanto. (2017). *Konsep dan model pendidikan karakter*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Suprptiningrum & Agustini. (2015). Membangun karakter siswa melalui budaya sekolah di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 5(2), 219-228.

Yin, R. K. (2018). *Studi kasus: desain dan metode*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.

# Pembelajaran PPKn pada Masa Pandemi Covid-19 di MAN 1 Gunung Kidul

Mulyati

[mulyatkarjiyomarto@gmail.com](mailto:mulyatkarjiyomarto@gmail.com)

## Abstrak

Pembelajaran PPKn pada masa pandemi Covid-19 di MAN 1 Gunungkidul mengalami tantangan. Sehingga dilaksanakan penelitian dengan tujuan mengetahui media pembelajaran PPKn mana yang paling mudah diikuti oleh peserta didik. Metode yang digunakan adalah pengamatan, observasi dan wawancara. Pembelajaran jarak jauh pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di MAN 1 Gunungkidul menggunakan beberapa media. Media tersebut meliputi *geschool*, *googledrive*, *google classroom* dan *whatsapp* grup. Hasil yang diperoleh yaitu partisipasi peserta didik dengan menggunakan *Geschool* 75,8%, *Googledrive* 83,2%, *Google classroom* 72,7% dan *Whatsapp grup* 93,8%. Partisipasi tertinggi peserta didik dalam pembelajaran PPKn yaitu pada saat menggunakan media *Whatsapp*. Dari keempat media tersebut ternyata sebagaimana besar peserta didik memilih menggunakan whatsapp grup.

**Kata kunci:** Pembelajaran; PPKn; Covid-19

## PENDAHULUAN

Pembelajaran pada masa pandemi covid-19 mengalami perubahan dibandingkan dengan pembelajaran pada masa normal. Perubahan tersebut antara lain menyangkut regulasi, sistem dan proses belajar mengajarnya. Hal tersebut pasti berdampak bagi guru maupun peserta didik. Menurut Fadil Yudia Fauzi, dkk seorang guru harus menjadi seorang pengasuh bagi peserta didik, menjadi panutan dan teladan untuk dicontoh oleh peserta didik, guru pula harus menjadi pembimbing untuk membimbing anak didiknya yang memiliki integritas dan kedisiplinan dalam kehidupan sehari-hari. Peran guru tersebut menghadapi tantangan pada masa Pandemi Covid-19 seperti sekarang. Karena pembelajaran dilaksanakan dengan *daring*, pembelajaran dalam jaringan. Sehingga sampai waktu yang belum bisa ditentukan, tidak dapat lagi secara tatap muka. Kebijakan tersebut diambil dalam rangka mencegah penularan wabah tersebut sekaligus untuk melindungi keselamatan warga negara.

Pandemi Covid-19 yang melanda dunia, dirasakan bangsa Indonesia sejak bulan Maret 2020. Covid-19 adalah suatu wabah yang dapat menyebabkan penyakit menular berupa infeksi pada saluran pernafasan manusia yang disebabkan oleh virus. Karena pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan

bangsa harus terus berjalan. Menurut Agus Wasisto Dwi Doso Warso, mengutip pasal 2 halaman 3, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyatakan bahwa pendidikan nasional dilaksanakan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Oleh sebab itu, sebagai pedoman dalam implementasinya dengan diterbitkannya Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, nomor 2791 tentang Panduan Kurikulum Darurat pada Pendidikan Madrasah. Dalam melaksanakan berbagai peraturan tersebut untuk mencapai tujuan yang ditetapkan guru merupakan ujung tombaknya.

Peran guru dalam pembelajaran aktif yang utama adalah sebagai fasilitator. Menurut Warsono, dkk fasilitator adalah seseorang yang membantu peserta didik untuk belajar dan memiliki keterampilan-keterampilan yang diperlukan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Sebagai fasilitator guru harus menguasai kecakapan tertentu. Kecakapan tersebut antara lain kecakapan mendengar, mengamati, kepekaan/empati, mendiagnosa, mendukung/mendorong, menantang, keterbukaan dan menjadi model. Maka dari itu guru harus terus belajar untuk meningkatkan kualitas dirinya demi keberhasilan proses pembelajaran.

Menurut Azhar Arsyad, dalam suatu proses belajar mengajar, dua unsur yang amat penting adalah metode mengajar dan media pembelajaran. Menurut Criticos yang dikutip oleh Daryanto, media merupakan salah satu komponen komunikasi, yaitu sebagai pembawa pesan dari komunikator menuju komunikan. Sehingga berdasar definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa proses pembelajaran merupakan proses komunikasi. Penggunaan media pembelajaran pada tahap orientasi pembelajaran akan sangat membantu keefektifan proses pembelajaran dan penyampaian pesan dan isi pelajaran pada saat itu. Selain membangkitkan motivasi dan minat siswa, media pembelajaran juga dapat membantu siswa

meningkatkan pemahaman, menyajikan data dengan menarik dan terpercaya, memudahkan penafsiran data, dan memadatkan informasi. Dengan demikian media sangat penting dalam proses pembelajaran, apalagi pada masa pandemi covid-19 seperti sekarang.

Pembelajaran PPKn di MAN 1 Gunungkidul pada masa pandemi Covid-19, media yang digunakan meliputi aplikasi *geschool*, *google drive*, *google classroom* dan *whatsapp*. Penentuan penggunaan aplikasi pada awalnya berdasar kebijakan madrasah tentu saja disesuaikan dengan kemampuan guru dan peserta didik. Dari beberapa aplikasi tersebut akan dicari aplikasi mana yang paling mendukung untuk PJJ. Indikatornya salah satunya adalah partisipasi siswa dalam proses pembelajaran.

Beberapa peraturan perundang-undangan lain yang mendasari pelaksanaan pendidikan adalah Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, BAB XIII tentang Pendidikan dan Kebudayaan, Pasal 31 ayat (3) menyebutkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang undang. Untuk melaksanakan amanat UUD tersebut maka pemerintah bersama DPR membentuk undang undang yaitu Undang Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Seperti yang dikutip oleh Agus Wasisto Dwi Doso Warso, dalam pasal 2 halaman 3, undang undang tersebut menyatakan bahwa pendidikan nasional dilaksanakan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut diatas, maka dirumuskan berbagai kebijakan dalam implementasinya. Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang,

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas, dan kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Dalam proses pembelajaran agar pendidik memberikan keteladanan warga Negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Pelaksanaan undang-undang tersebut kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 37 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada kurikulum 2013 pada pendidikan dasar dan menengah.

MAN 1 Gunungkidul beralamatkan di Jalan Sunan Ampel Nomor 68 Kepek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta. Peserta didik yang sekolah di Madrasah ini, berasal dari berbagai kecamatan yang tersebar di Gunungkidul. Beberapa di antaranya berasal dari provinsi lain. Gunungkidul mempunyai karakter geografis unik. Daerah perbukitan yang dikenal dengan pegunungan seribu. Tantangan yang dihadapi dalam pembelajaran jarak jauh adalah keterbatasan jangkauan *provider*. Beberapa daerah di Gunungkidul menghadapi kesulitan jaringan atau sinyal. Hal ini menyebabkan dalam proses pembelajaran daring harus dipilih media yang sesuai.

Menurut Poncojari Wahyono dalam artikel yang berjudul Guru professional di masa pandemi COVID-19: Review implementasi, tantangan, dan solusi pembelajaran daring, pelaksanaan pembelajaran daring memiliki tantangan/kendala, baik dari aspek sumber daya manusia, sarana-prasarana, dan teknis implementasi. Sebagai rekomendasi ke depan, dibutuhkan kemitraan publik dan keterlibatan banyak pihak secara berkelanjutan. Kompetensi dan keterampilan guru harus terus diperkaya, didukung oleh kebijakan sekolah yang mendorong guru terus belajar. Pihak terkait juga perlu mengevaluasi pembelajaran daring tersebut agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal." Bagaimana pembelajaran PPKn pada masa pandemi Covid-19 di MAN 1 Gunungkidul? Apakah media yang paling tepat bagi peserta didik dalam pembelajaran jarak jauh di MAN 1 Gunungkidul?

## **METODE**

Metode adalah suatu proses atau cara sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu dengan efisiensi, biasanya dalam urutan langkah-langkah tetap yang teratur. Jenis penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Sembilan definisi metode penelitian kualitatif menurut ahli yang ditulis Amrie Muchta antara lain adalah sebagai berikut, menurut Maleong, penelitian kualitatif mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan apa yang diteliti. Menurut Creswell, penelitian kualitatif merupakan proses untuk memahami masalah sosial berdasarkan metodologi yang berbeda. Dalam hal ini peneliti menyusun gambaran yang kompleks, menganalisa kata demi kata dan menyusun hasil penelitian secara natural atau sesuai fakta dilapangan. Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang dilandasi filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan tri-angulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan arti dari pada generalisasi.

Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengertian paling sederhana dari metode observasi adalah melihat dan mendengarkan peristiwa atau tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang diamati, kemudian merekam hasil pengamatannya dengan catatan atau alat bantu lainnya. Metode observasi dilaksanakan dengan mengunjungi peserta didik. Kriteria peserta didik yang dikunjungi adalah yang mengalami hambatan dalam pembelajaran jarak jauh. Dalam kunjungan tersebut sekaligus melakukan wawancara. Metode wawancara (interview) yaitu percakapan antara beberapa orang yang disebut pewawancara atau responden atau nara sumber.

Wawancara tersebut dilaksanakan selain dengan peserta didik yang bersangkutan juga dengan orang tua/ wali murid atau anggota keluarga yang lain. Selain metode observasi dan metode wawancara penelitian ini juga menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data

dengan jalan mencatat data penelitian yang terdapat dalam buku-buku catatan, arsip dan lain sebagainya. Arsip yang digunakan sebagai sumber data penelitian adalah, dokumen KTSP MAN 1 Gunungkidul dan dokumen administrasi pembelajaran guru mata pelajaran.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pembelajaran PPKn**

Menurut Moh. Sholeh Hamid, pembelajaran merupakan proses, cara, perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil pengalaman atau latihan yang diperkuat. Belajar merupakan adanya interaksi antara stimulus dan respon. Di MAN 1 Gunungkidul pembelajaran PPKn pada masa pandemi covid-19 dilaksanakan dengan menggunakan cara daring. Pembelajaran, belajar dan pendidikan berkaitan erat satu sama lain. Meskipun pada masa pandemi pendidikan, belajar dan pembelajaran wajib terus dilaksanakan. Pendidikan merupakan usaha dalam mencapai tujuan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal tersebut sesuai Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alenia ke-4.

Menurut John Dewey yang dikutip Nadiah Ayu Wulandari, pendidikan adalah proses yang tanpa akhir (*education is the proses without end*), dan pendidikan merupakan proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental baik menyangkut daya pikir daya intelektual maupun emosional perasaan yang diarahkan kepada tabiat manusia kepada sesamanya. Oleh karena itu, proses belajar menjadi kunci untuk keberhasilan pendidikan agar proses belajar menjadi berkualitas membutuhkan tata layanan yang berkualitas.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dihadirkan guna membentuk peserta didik menjadi pribadi yang mengetahui tentang hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, serta memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, sesuai dengan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945. Berdasarkan struktur kurikulum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan termasuk dalam

kelompok A (wajib), dengan jumlah jam tatap muka, 2 jam perminggu. Jadi di MAN 1 Gunungkidul, peserta didik mendapat pelajaran PPKn dua jam tatap muka atau 2 x 45 menit setiap minggunya.

Pembelajaran PPKn dilaksanakan dengan berpedoman pada kompetensi inti dan kompetensi dasar dalam Kurikulum 2013, kemudian pada masa pandemi covid-19 direvisi melalui kurikulum darurat. Menurut M. Nawi Harahap kompetensi adalah seperangkat kemampuan yang menyangkut sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki oleh peserta didik setelah mempelajari suatu muatan pembelajaran (kompetensi dasar). Kompetensi inti dan kompetensi dasar digunakan sebagai panduan penyusunan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Silabus dapat didefinisikan sebagai "garis besar, ringkasan, atau pokok-pokok isi atau materi pelajaran". Sedangkan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Guru mempunyai kewenangan dalam mengembangkan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran.

Materi pelajaran PPKn untuk sekolah tingkat Aliyah kelas X meliputi; Nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara. Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, serta pertahanan dan keamanan. Fungsi dan kewenangan lembaga-lembaga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hubungan pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Faktor-faktor pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya dibidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pentingnya Wawasan Nusantara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk kelas XI; Pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kasus-kasus ancaman terhadap Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk kelas XII materi yang dibahas meliputi nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dinamika persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada masa Pandemi Covid-19, kompetensi inti dan kompetensi dasar untuk kelas X dan XI disederhankan, sedangkan untuk kelas XII tetap. Dalam praktiknya pembelajaran jarak jauh dilaksanakan sesuai dengan situasi kondisi, sehingga guru menekankan pada materi-materi yang esensial.

### **Aplikasi berbasis internet sebagai media pembelajaran PPKn**

Aplikasi adalah suatu sub-kelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Menurut Supriyono, dkk pada saat ini *mobile phone* sudah sangat berkembang sehingga mempunyai berbagai macam kemampuan seperti untuk akses internet dan juga mempunyai sistem operasi seperti layaknya komputer sehingga sering disebut dengan *smart mobile phone* atau lebih dikenal dengan istilah *smartphone*. Sehingga aplikasi sangat mendukung dalam proses pembelajaran PPKn secara *daring* di MAN 1 Gunungkidul.

Untuk pembelajaran PPKn di MAN 1 Gunungkidul terdapat dua guru mata pelajaran PPKn. Secara bersama saling membantu dalam proses pembelajaran. Pada beberapa tahun terakhir, filsafat pendidikan telah bergeser dari pengajaran yang berpusatkan pada guru atau pengajaran tradisional menjadi metode yang lebih interaktif, eksperiensial, dan melibatkan para siswa secara langsung.

Pembelajaran jarak jauh secara *daring* Kelas XII MAN 1 Gunungkidul, menggunakan aplikasi *geschool*, *google drive*, *whatsapp group*, dan *google classroom*. Penggunaan aplikasi disesuaikan dengan kemampuan dan pilihan guru. Sehingga antara satu guru dengan yang lain dapat berbeda. Namun demikian guru mata pelajaran dapat berkoordinasi dan saling bekerjasama dalam pelaksanaannya. Sedangkan pembelajaran luring dilaksanakan jika peserta didik belum memahami materi yang harus dikuasai. Beberapa peserta didik dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat mengambil materi ke madrasah. Peserta didik dan guru melaksanakan diskusi membahas materi tersebut. Jika peserta didik menghadapi kendala dan tidak bisa datang ke madrasah, maka materi dan tugas diantar oleh wali kelas atau guru mata pelajaran ke rumah peserta didik.

Pembelajaran PPKn secara *daring* menggunakan *geschool*. Aplikasi *geschool* merupakan aplikasi berbayar dengan cara pelaksanaan tertentu. Guru dan peserta didik terlebih dahulu mendaftar melalui admin *geschool*. Cara daftar *geschool* bagi peserta didik adalah masuk lewat *browser google chrome*, ketik dipencarian *geschool.net*, lalu enter. Setelah muncul tampilan *geschool*, lalu klik tombol daftar. Mengisi data lengkap lalu klik daftar. Isi data lagi nama, jenis kelamin dan sekolah. Kalau sudah berhasil daftar tinggal nunggu konfirmasi dari admin Madrasah. Dalam praktiknya, guru terlebih dahulu mempersiapkan materi. Setelah materi disimpan dalam bentuk *file pdf* dan sesuai dengan ketentuan kemudian diupload sesuai jadwal pelajaran. Dari kegiatan ini dapat diukur pemahaman peserta didik pada tiap materi yang disajikan. Pada proses pembelajaran dapat diketahui peserta didik yang aktif dan sudah memahami materi atau sebaliknya. Pencapaian hasil belajar peserta didik juga dapat diketahui dari hasil pada aplikasi tersebut. Dalam pembelajaran jarak jauh menggunakan aplikasi *geschool*, admin juga dapat memantau proses belajar mengajar, wali kelas masuk ke dalam admin sehingga dapat memantau guru yang sudah mengupload materi atau tugas dan peserta didik yang aktif maupun yang belum aktif. Dengan demikian wali kelas atau admin dapat mengingatkan guru agar mengupload materi atau tugas sesuai jadwal, dan mengingatkan peserta didik dari kelasnya untuk aktif

dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Kelemahannya ada beberapa peserta didik yang kesulitan membuka aplikasi tersebut, karena sinyal atau perangkat yang digunakan.

Pembelajaran PPKn dengan menggunakan *google drive*, dalam rangka mencari solusi bagi peserta didik yang menghadapi permasalahan ketika pembelajaran menggunakan *geschool*. Kemudahan bagi guru dan peserta didik pembelajaran melalui *google drive*, dapat dilaksanakan dan diakses dimana saja. Kelebihan *google drive* dibandingkan dengan *geschool*, waktu aksesnya lebih lama sehingga peserta didik mempunyai kesempatan mengakses lebih luas. Bagi guru hasil dari aktivitas proses belajar mengajar dapat direkam lebih mudah.

Pembelajaran PPKn dengan menggunakan aplikasi *whatsapp*. *Whatsapp* dapat digunakan secara pribadi maupun bersama-sama. Dalam satu kelas, karena melibatkan banyak peserta didik maka lebih baik dipilih *whatsapp* grup. Penggunaan *whatsapp* grup dalam pembelajaran PPKn di MAN 1 Gunungkidul diawali pada tahun 2015. Keadaan peserta didik mengundang keprihatinan para guru. Para guru sering menjumpai peserta didik aktif bermedia sosial pada saat proses belajar mengajar, sehingga mengganggu konsentrasi belajar. Keadaan demikian membuat guru mengambil langkah bagaimana agar media sosial *whatsapp* dapat dimanfaatkan dalam proses belajar mengajar.

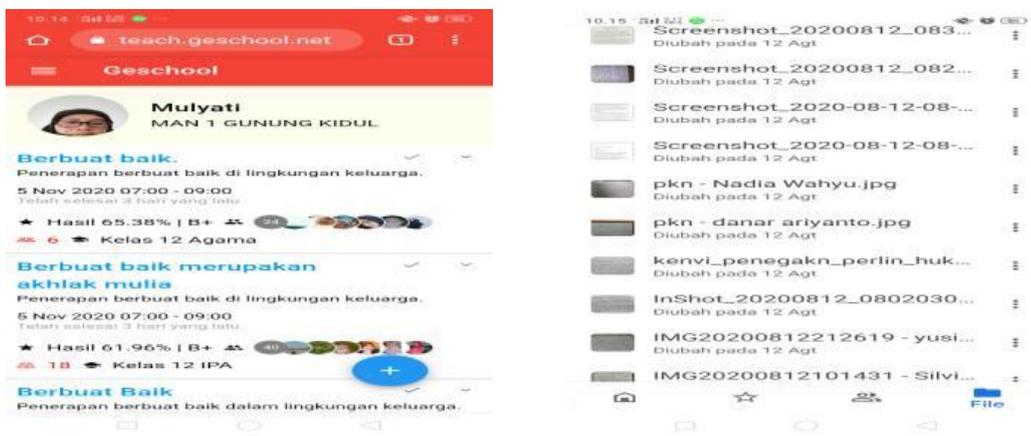
Untuk mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan iptek tersebut dibuatlah grup-grup *whatsapp*, Melalui aplikasi tersebut dapat mengirim pesan dalam bentuk pesan, video, foto, suara dan dokumen. Guru dan peserta didik dapat menyesuaikan diri bahkan dapat digunakan untuk mendukung keterbatasan pemanfaatan aplikasi lainnya.

Dari grup tersebut dapat dilihat siapa yang online atau aktif menggunakan media sosial. Guru mata pelajaran PPKn dapat memantau aktivitas peserta didik melalui grup *whatsapp* tersebut. Dari pantauan tersebut dapat mengambil nilai afektif masing-masing peserta didik. Nilai afektif atau sikap peserta didik antara lain melalui komentar digrup tersebut. Ketergantungan peserta didik pada gadget yang semakin mengkhawatirkan perlu dicarikan jalan keluar. Sehingga guru berusaha memanfaatkannya, guna mendukung keberhasilan proses belajar

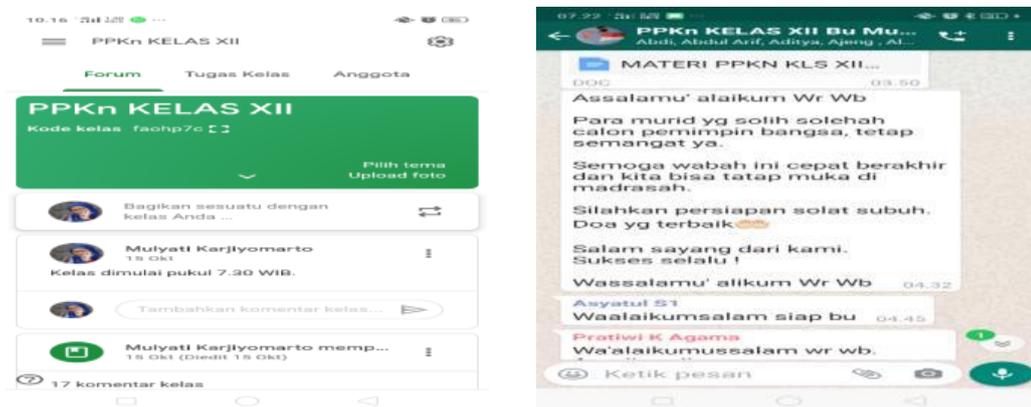
mengajar. Selain untuk melindungi peserta didik dari pengaruh buruk media sosial juga bisa dimanfaatkan sebagai alat kontrol dan pembiasaan memanfaatkan kemajuan iptek untuk hal yang positif. Guru menyiapkan materi dapat berupa file buku pelajaran, modul, PPT, video, foto atau *chattingan*. Materi tersebut disebarluaskan sesuai dengan jadwal dan bab yang harus dibahas. Komunikasi dan interaksi guru dan peserta didik dapat melalui *chatting whatsapp* atau *videocall*.



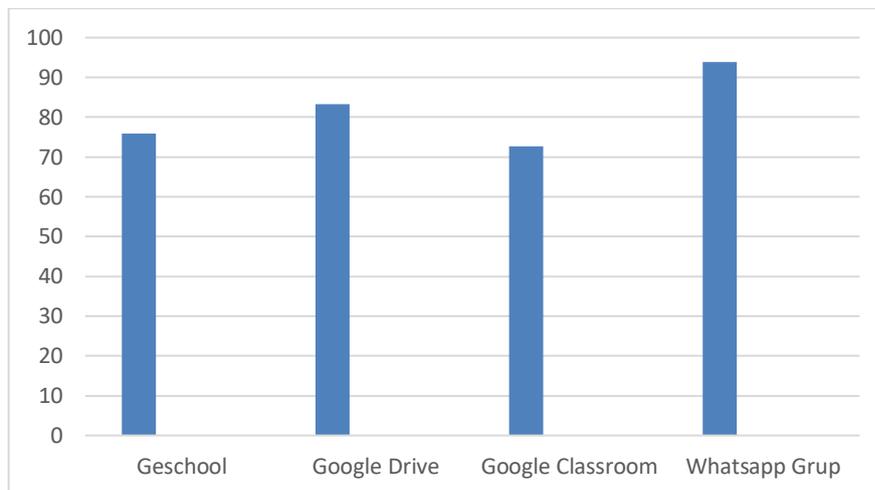
Gambar 1: Jadwal Guru Mengajar KBM Daring dan Pembelajaran di kelas.



Gambar 2: Proses penggunaan aplikasi geschool dalam pembelajaran PPKn



**Gambar 3:** Pembelajaran menggunakan google classroom dan whatsapp



**Gambar 4:** Partisipasi peserta didik kelas XII dalam Pembelajaran Jarak Jauh mata pelajaran PPKn di MAN 1 Gunungkidul

## SIMPULAN

Berbagai aplikasi dilaksanakan dalam pembelajaran jarak jauh di MAN 1 Gunungkidul. Alamat tempat tinggal peserta didik MAN 1 Gunungkidul mencakup seluruh wilayah kecamatan. Letak geografis Gunungkidul yang meliputi wilayah perbukitan memunculkan tantangan tersendiri. Kendala yang dihadapi peserta didik sebagian besar adalah sinyal.

Mata pelajaran PPKn merupakan mata pelajaran wajib. Berdasarkan kurikulum pembelajaran dilaksanakan dalam waktu 2 jam pertemuan perminggu. Pada masa pembelajaran jarak jauh, kebijakan yang ditempuh di MAN 1 Gunungkidul, guru dapat mengajar secara bersama-sama. Sampel dalam makalah ini adalah peserta didik kelas XII dengan jumlah 161. Media yang digunakan adalah internet dengan menggunakan beberapa aplikasi. Penggunaan beberapa aplikasi dengan tujuan untuk memfasilitasi peserta didik secara umum agar berpartisipasi aktif dalam proses belajar mengajar.

Dari berbagai aplikasi yang ada, whatsapp grup merupakan aplikasi yang paling mudah diikuti dan diakses oleh peserta didik. Hal tersebut berdasar data dimana dengan menggunakan whatapps grup paling banyak peserta didik yang

aktif. Prosentasenya adalah sebagai berikut menggunakan *Geschool* 75,8%, *Google drive* 83,2%, *Google classroom* 72,7 % dan *Whatsapp grup* 93,8%.

## REFERENSI

- Arsyad, A. (2019). *Media pembelajaran*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada
- Daryanto. (2016). *Media pembelajaran; peranannya sangat penting dalam mencapai tujuan pembelajaran*. Yogyakarta: Gava Media.
- Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama (2020). Keputusan Nomor 2791 tentang *Panduan Kurikulum Darurat pada Pendidikan Madrasah*.
- Hamid, M. S. (2013). *Metode edu tainment; menjadikan siswa kreatif dan nyaman di kelas*. Yogyakarta: Diva press.
- Hariyanto, W. (2017). *Pembelajaran aktif; teori dan asesmen*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Fauzi, F. Y., Arianto, I, & Solihatin, E. (2013). Peran guru pendidikan pancasila dan kewarganegaraan dalam upaya pembentukan karakter peserta didik. *Jurnal ppkn unj online*, 1(2), ISSN: 2337-5205. <http://skripsippknunj.org>.
- Muchta, A. (2019). *Sembilan Definisi Metode Penelitian Kualitatif Menurut Ahli*. <https://www.autoexpose.org/2019/06/definisi-metode-penelitian-kualitatif.html>.
- Supriyono, dkk. (2014). *Rancang bangun aplikasi pembelajaran hadis untuk perangkat mobile berbasis android*, *Jurnal Informatika (JIKO)*, 8(2). pp. 907-920. ISSN 1978-0524.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Wulandari, N., A. (2020). *Dampak pandemi covid-19 terhadap pelaksanaan pendidikan di Indonesia*. <http://pustakaberggerak.id/artikel/dampak-pandemi-covid-19-terhadap-pelaksanaan-di-indonesia-2>.
- Wahyono, P. (2020). *Guru profesional di masa pandemi COVID-19* (<https://wawasanpengajaran.blogspot.com/2017/12/pengertian-kelebihan-dan-kekurangan.html>).

# Eksistensi Pancasila dalam Pembentukan Karakter Bangsa Melalui Pendidikan Multikultural di Era Global

Rhindra Puspitasari  
[rhindra.puspitasari@upi.edu](mailto:rhindra.puspitasari@upi.edu)

## Abstrak

Sebagai sebuah bangsa dengan adanya globalisasi memiliki tantangan yang besar apakah kebudayaan yang menjadi jati diri dan karakter bangsa akan terkikis ataukah semakin menguat. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan pendidikan karakter bangsa sebagai perwujudan eksistensi Pancasila melalui Pendidikan Multikultural. Metode penulisan dari artikel ini adalah studi literatur. Temuan dalam artikel ini menunjukkan bahwa eksistensi Pancasila dalam pembentukan karakter bangsa melalui pendidikan multikultural dapat menjadi alternatif pengembangan kerangka konseptual filosofis pendidikan pancasila sebagai mata kuliah wajib umum di perguruan tinggi. Nilai-nilai Pancasila yang berakar dari budaya dan tradisi serta agama yang ada di Indonesia akan terus eksis apabila dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan multikultural dapat dijadikan sarana baru dalam membentuk karakter bangsa yang sangat prural seperti Indonesia. Pancasila lahir dengan spirit bernegara, beragama, berbudaya, dan berkemanusiaan di Nusantara ini.

**Kata Kunci:** *Eksistensi Pancasila, Pembentukan Karakter, Pendidikan Multikultural.*

## PENDAHULUAN

Perkembangan zaman pada era abad 21 seperti sekarang ini tentunya juga mempengaruhi perubahan peradaban manusia di dunia. Arus globalisasi yang ada di era ini juga turut mempengaruhi kebudayaan gaya hidup manusia dan tidak terbatas pada bidang ekonomi saja. Pendapat ini diperkuat oleh Giddens (2000:32) bahwa globalisasi pada kenyataannya bukan hanya tentang saling ketergantungan ekonomi, tetapi tentang transformasi ruang dan waktu yang berskala luas dalam kehidupan kita. Sebagai sebuah bangsa dengan adanya globalisasi memiliki tantangan yang besar apakah kebudayaan yang menjadi jati diri dan karakter bangsa akan terkikis ataukah semakin menguat. Hal ini karena globalisasi juga bisa berarti eliminasi batas-batas teritorial antara suatu bangsa dengan bangsa yang lain, antara tanah air yang satu dengan tanah air yang lain, antara kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain (Qardhawi 2001:301).

Di sisi lain dampak negatif dari globalisasi adalah banyaknya kenakalan remaja yang hanya meniru kebudayaan asing yang kurang sesuai dengan tradisi kita yang masuk ke Indonesia. Polda Metro Jaya merilis *crime index* atau indeks kejahatan sepanjang 2016. Total kejahatan yang terjadi selama 2016 meningkat

dari 44.304 pada 2015 menjadi 43.149 pada 2016. Peningkatannya lebih kurang tiga persen. Tercatat, ada 11 jenis kasus yang menonjol pada 2016 salah satu diantaranya adalah kenakalan remaja yang meningkat 400 persen (Kompas, 2016). Kenakalan remaja yang terjadi di antaranya adalah tawuran remaja, sex bebas, kekerasan di sekolah, dan lain sebagainya. Data di atas membuktikan bahwa generasi muda Indonesia mengalami mengikisan moral dan perilaku. Hal ini juga diperkuat oleh Zuriah (2015:1) yang menyatakan bahwa kita mengalami zaman edan dan dunia telah diliputi kemiskinan dan kejahatan, politik sangat korupsi dan anak-anak sama sekali tidak hormat kepada orang tuanya.

Hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua agar generasi muda Indonesia menjadi generasi yang berahlak mulia, beriman, dan bertaqwa, sehat, berilmu, mandiri seperti yang tertuang dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dapat dipahami sebenarnya konsep yang sedemikian baik dari setiap upaya yang dilakukan dalam dunia pendidikan baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat memiliki tujuan yang menyeluruh. Pancasila sebagai ideologi bangsa dalam hal ini mempunyai peran yang cukup besar dalam membentuk karakter kebangsaan warganegarannya. Bila kita melihat dari sejarah, filsafat, dasar hukum, dan realitas sosial, Pancasila sudah final sebagai ideologi bangsa.

Pancasila merangkul semua suku, agama, ras, antargolongan (SARA) tanpa menyembelih hak asasi kelompok tertentu. Pancasila menjadi milik semua, bukan milik pemerintah dan kelompok tertentu. Menjaga dan menggerakkannya menjadi tugas bersama, bukan hanya pemerintah. Di era milenial, Pancasila harus dihayati dengan nilai-nilai lokal yang berhubungan dengan Tuhan, alam, dan manusia. Konsep ini hampir semua agama, suku, dan kelompok di Nusantara ini menyetujuinya. Semua itu bisa digerakkan melalui pemanfaatan media siber, media sosial, dan layanan pesan (WA, BBM, Line) sebagai wahana kaum muda saat ini.

Adanya radikalisme dan terorisme terjadi menjadi pekerjaan bersama untuk menuntaskannya. Tak hanya terorisme seperti di Surabaya, Wonocolo, Sidoarjo, Riau kemarin, namun paham radikal dan anti-Pancasila masuk dalam

pendidikan. Setara Institute (2016) menyimpulkan 35,7% siswa terjangkiti faham intoleran dalam tataran pemikiran, 2,4% persen pada sikap intoleran dalam tindakan dan perkataan, serta 0,3% berpotensi menjadi teroris. BIN mencatat ada 39% mahasiswa perguruan tinggi terpapar faham radikalisme (MI, 30/5/2018). Tiga dosen ITS dipecat karena menyebarkan faham radikal (Tribunnews.com, 16/5/2018).

Tanggung jawab merupakan nilai karakter yang sangat esensial dalam pembinaan karakter bangsa dan secara tersirat sebagai muara dari karakter lainnya, sebab di dalamnya telah mencakup semua lingkup kehidupan baik pribadi, keluarga, sekolah, maupun masyarakat berbangsa dan bernegara. Hal itu dapat dilihat dari deskripsi tanggung jawab yang tercantum dalam Pusat Kurikulum (2010:28) yaitu sikap dari perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

Lickona (Megawangi, 2007:7) mengemukakan sepuluh gejala perilaku individu yang mengarah pada kehancuran suatu bangsa, salah satunya yaitu menurunnya rasa tanggung jawab individu dan warga negara. Hasil penelitian Megawangi (2007:9) terkait itu menunjukkan bahwa dari 5 Sekolah Menengah Kejuruan-Teknik Industri (SMK-TI) di Bogor telah terjadi peningkatan perilaku merusak diri yaitu 30,3 % siswa terlibat minum keras, 15,4 % siswa pecandu narkoba, 34,6 % siswa berjudi/taruhan, 68 % siswa menonton film porno, 3,2 % siswa pernah melakukan hubungan seks.

Beragam kondisi yang telah dipaparkan di atas tentu saja sangat memprihatinkan berbagai pihak, salah satunya Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Indonesia, Budiartna (Sapriya, 2007:127), mengemukakan bahwa tayangan porno, komik cabul, majalah, VCD, narkoba, hingga perjudian kian tak terkendali. Kerisauan ini juga senada dengan pendapat Wahyu (Somantri, 2011:225) bahwa banyak terjadi peristiwa yang memiriskan budi kemanusiaan. Kita melihat bagaimana martabat kemanusiaan bangsa Indonesia sudah terpuruk ke jurang paling dalam, mendekati tingkat kebinatangan.

Jika hal tersebut dibiarkan begitu saja dan tidak segera diatasi maka generasi muda bangsa ini akan mengalami kekacauan (*chaos*) dan kehancuran yang dahsyat diberbagai sisi. Oleh karena itu pembinaan karakter sangatlah penting, sebagaimana yang tercantum dalam Desain Induk Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025 (2010:1) salah satunya yaitu secara filosofis, pembangunan karakter bangsa merupakan sebuah kebutuhan asasi dalam proses berbangsa karena hanya bangsa yang memiliki karakter dan jati diri yang kuat yang akan eksis.

Pendekatan yang digunakan dalam membentuk karakter bangsa sesuai dengan nilai Pancasila salah satunya melalui pendekatan multikultural. Melalui pendidikan yang dilakukan dari lingkup terkecil yaitu keluarga sampai pendidikan tinggi, diharapkan mampu memberikan dampak yang besar bagi perbaikan kualitas generasi muda Indonesia. Pada jenjang pendidikan tinggi pendidikan Pancasila masuk kedalam Mata Kuliah Wajib hal ini tercantum dalam Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang SN Dikti yang disebutkan bahwa ada empat mata kuliah wajib diantaranya adalah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam jenis studi pustaka. Studi pustaka memiliki istilah lain yaitu tinjauan pustaka, kajian teoritis, landasan teori, studi pustaka (*literature review*) dan tinjauan teoritis. Yang dimaksud penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan atas karya tertulis, termasuk hasil penelitian baik yang telah maupun yang belum dipublikasikan (Embun, 2012). Walaupun merupakan sebuah penelitian, penelitian dengan studi literatur tidak harus turun ke lapangan dan bertemu dengan responden langsung. Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian dapat diperoleh dari sumber pustaka atau dokumen. Menurut Zed (2014), pada riset pustaka (*library research*), penelusuran pustaka tidak hanya untuk langkah awal menyiapkan kerangka penelitian (*research design*) akan tetapi sekaligus memanfaatkan sumber-sumber perpustakaan untuk memperoleh data

penelitian. Dalam konteks ini metode studi literatur yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*). Analisis dokumen/analisis isi dalam hal ini adalah terkait eksistensi Pancasila dalam pembentukan karakter bangsa melalui pendidikan multikultural di era global.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kajian Filosofis Pancasila Sebagai Pemersatu Bangsa Ditinjau dari Perspektif Multikultural**

Secara filosofis Pancasila dapat dikatakan sebagai pemersatu bangsa yang sangat kuat. Pancasila juga merupakan kristalisasi nilai-nilai agama, budaya dan tradisi yang sudah ada di Indonesia sejak lama. Bila kita mengkaji dari sisi agama Islam, Islam mengajarkan untuk menciptakan harmonisasi pada tiga elemen. Mulai *hablumminallah* (hubungan dengan Allah), *hablumminannas* (hubungan sesama manusia), dan *hablumminallam* (hubungan dengan alam). Islam memiliki rumus “tri ukhuwah Islam” yang bisa diterapkan. Pertama, *ukhuwah islamiyah*, persaudaraan berupa kasih sayang, kemuliaan, dan rasa saling percaya terhadap saudara se-akidah (Islam). Kedua, *ukhuwah basyariyah*, persaudaraan pada semua manusia secara universal tanpa membedakan ras, agama, suku dan lainnya. Ketiga, *ukhuwah wathaniyah*, persaudaraan diikat jiwa nasionalisme tanpa membedakan agama, suku, warna kulit, adat istiadat, budaya dan elemen lain (Ibda, 2018).

Mukti Ali (1972) merumuskan tiga kunci kerukunan. Pertama, rukun antarumat seagama. Kedua, rukun antarumat beragama. Ketiga, rukun antarumat beragama dengan pemerintah. Di Sunda, ada ajaran Tri Tangtu yaitu cara berpikir masyarakat tradisional Sunda. Tri Tangtu dari bahasa Sunda, di mana kata tri atau tilu berarti tiga dan tangtu artinya pasti atau tentu. Tiga ajaran kearifan itu adalah *ajiluhung* (hubungan dengan Tuhan), *aju kumara* (hubungan manusia), *aji wiwaha* (hubungan dengan alam) yang bisa menguatkan Pancasila (Sumardjo, 2010: 58).

Di Bali, ada ajaran *Tri Hita Karana* berasal dari kata “Tri” (tiga), “Hita” (kebahagiaan), dan “Karana” (penyebab). *Tri Hita Karana* berarti tiga penyebab

terciptanya kebahagiaan, yaitu *sang hyang karana, manusia, dan bhuana* yang intinya menciptakan kemesraan hubungan dengan Tuhan, manusia, dan alam. Di Fak Fak Papua ada ajaran Satu Tungku Tiga Batu. Ajaran ini menjadi doktrin rakyat Papua untuk menjaga kerukunan umat beragama (Latif, 2017). Meskipun berbeda tetapi tetap satu. Mereka, disana bisa menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup, mulai penghormatan tinggi terhadap pentingnya kerukunan hidup antarumat beragama yang ada di daerah itu, yakni Islam, Kristen, dan Katolik.

Di Lombok, ada ajaran *Watu Telu* yang tidak terlepas dari filosofi masyarakat adat Bayan. Ajaran ini mengajak manusia berpegang teguh pada tiga unsur atau keyakinan, yakni hubungan dengan Tuhan, manusia dan alam. Konsep harmonisasi dengan ruh Pancasila ini harus digerakkan untuk melahirkan gotong-royong, persatuan, kerukunan, dan perdamaian. Indonesia menjadi damai dan bebas radikalisme bila nilai-nilai Pancasila digerakkan diseluruh elemen masyarakat. Kita harus menghayati agama dengan melihat realitas sosial. Agama bukan masalah doktriner, namun erat dengan realitas sosial dan budaya. Di situlah letak Islam rahmat bagi semua alam yang hakikatnya senafas dengan Pancasila (Ibda, 2018).

Rumus kerukunan ini harus dihayati dan diamankan. Munculnya kekerasan atasnama agama lahir dari pemahaman dan doktrin jihad keliru. Pancasila harus dipahami sebagai konsep tertinggi untuk menciptakan kerukunan. Dalam Pancasila, ada lima sila yang menjadi simpul kerukunan yang sesuai prinsip dan substansi Islam. Mulai ketuhanan (*uluhiyah*), kemanusiaan (*insaniyah*), persatuan (*ukhuwah*), kerakyatan (*ra'iyah*) dan keadilan (*al-'adalah*). Jika simpul kerukunan di atas dijaga dan digerakkan, Indonesia akan damai, rukun dalam bingkai kebhinekaan. Pancasila lahir dengan spirit bernegara, beragama, berbudaya, dan berkemanusiaan di Nusantara ini.

### **Urgensi Pendidikan Karakter dan Pembudayaan Pendidikan Karakter**

Pendidikan karakter kebangsaan menjadi hal yang penting untuk digalakkan. Pemerintah telah mengeluarkan Perpres 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter yang di dalamnya memuat 17 karakter yang harus

dimiliki generasi muda Indonesia. Mengembangkan pendidikan karakter kebangsaan akan berhasil jika seluruh elemen Tri Sentra Pendidikan turut andil. Lickona (1991) berpendapat, komponen karakter yang baik harus mencakup menekankan pentingnya tiga komponen karakter yang baik (*components of good character*) yaitu '*moral knowing* (pengetahuan tentang moral), *moral feeling* (perasaan tentang moral), dan *moral action* (perbuatan bermoral)'. Hal ini diperlukan agar anak didik mampu memahami, merasakan, dan mengerjakan sekaligus nilai-nilai kebajikan. *Moral knowing* terdiri atas enam hal yaitu: (a) *moral awareness* (kesadaran moral), (b) *knowing moral value* (mengetahui nilai-nilai moral), (c) *perspective taking*, (d) *moral reasoning*, (e) *decision making*, dan (f) *self-knowledge*. *Moral feeling* terdiri atas enam hal yaitu: (a) *conscience* (nurani), (b) *self-esteem* (percaya diri), (c) *empathy* (merasakan penderitaan orang lain), (d) *loving the good* (mencintai kebenaran), (e) *self-control* (mampu mengontrol diri), dan (f) *humility* (kerendahan hati). *Moral action* dapat dilihat tiga aspek antara lain: (a) kompetensi (*competence*), (b) keinginan (*will*), (c) kebiasaan (habitiasi). Pusat Kurikulum (2010) memaknai pendidikan karakter sebagai pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa pada diripeserta didik sehingga mereka memiliki nilai dan karakter sebagai karakter dirinya, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya, sebagai anggotamasyarakat, dan warga negara yang religius, nasionalis, produktif, dan kreatif .

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter merupakan serangkaian proses penanaman nilai-nilai karakter secara utuh yang tercermin dari pikiran, perasaan, dan perbuatan atau perilaku yang baik, dalam kehidupan keluarga, sekolah, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Melihat pendapat Lickona, karakter mencakup serangkaian pemikiran, perasaan dan perilaku yang sudah menjadi kebiasaan. Hal ini menuntut peran serta orang tua dalam membentuk pembiasaan anak di lingkungan keluarga. Masyarakat juga harus ikut serta membentuk lingkungan berkarakter. Sehingga, menumbuhkan karakter kebangsaan sejak dini dapat menjadi salah satu solusi preventif untuk mengatasi terkikisnya moral bangsa. Tiga elemen Tri Sentra Pendidikan yaitu

orang tua, masyarakat dan pemerintah harus ikut peduli dan melaksanakan pendidikan karakter kebangsaan untuk anak. Dengan demikian generasi muda yang berkarakter kebangsaan akan terbentuk dan bukan hanya menjadi wacana saja. Pendidikan karakter pada dasarnya bertujuan untuk merevitalisasi dan mengkokohkan kembali nilai-nilai karakter bangsa sebagai pondasi atau *basic* membangun masa depan bangsa dan negara ke arah yang lebih baik. Pusat Kurikulum (2010:7) merumuskan tujuan pendidikan budaya dan karakter bangsa sebagai berikut.

- 1) Mengembangkan potensi kalbu/nurani/afektif peserta didik sebagai manusia dan warga negara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa;
- 2) Mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius;
- 3) Menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai generasi penerus bangsa;
- 4) Mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan; dan
- 5) Mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan (*dignity*).

Channing (Megawangi, 2007) mengungkapkan “*the great hope of society is individual character*” (harapan besar suatu masyarakat adalah kualitas akhlak individu). Hal ini dapat dimaknai bahwa eksistensi pendidikan karakter berorientasikan kualitas karakter yang mumpuni sebagai usaha untuk memenuhi harapan besar dari masyarakat. Pendapat lain dari Koesoema (2010) menyebutkan bahwa “pendidikan karakter akan memperluas wawasan para pelajar tentang nilai-nilai moral dan etis yang membuat mereka semakin mampu mengambil keputusan yang secara moral dapat dipertanggungjawabkan” Oleh karena itu pendidikan karakter bertujuan membangun manusia yang berkarakter baik dan utuh, tidak hanya segi intelektualnya melainkan juga segi moral (*attitude*) yang selaras, serasi, dan seimbang diberbagai lingkup kehidupan. Pembudayaan dan pembiasaan karakter sangat penting untuk dikembangkan. Elemen-elemen pendukung

pembudayaan karakter juga sangat kompleks, dari satuan pendidikan, keluarga serta masyarakat, yang dapat digambarkan sebagai berikut.



Sumber: *Grand Design Pendidikan Karakter, 2010.*

Pada konteks mikro pengembangan karakter berlangsung dalam konteks suatu satuan pendidikan atau satuan pendidikan secara holistik, namun peran keluarga dan, masyarakat juga memiliki andil yang besar dalam membentuk karakter bagi generasi muda Indonesia ke depan. Sehingga menjadi penting menyiapkan lingkungan yang berkarakter untuk membentuk keberlangsungan karakter bangsa Indonesia agar tidak terkikis oleh globalisasi yang makin tidak mudah dibendung.

### **Eksistensi Pancasila dalam Pembentukan Karakter Bangsa Melalui PKn Sebagai Pendidikan Multikultural**

Paradigma baru Pendidikan Kewarganegaraan sekarang ini, yaitu membentuk warga negara yang cerdas dan baik (*smart and good citizen*). Sementara itu, menurut Winataputra (2012:83) maksud warga negara Indonesia yang cerdas dan baik adalah mereka yang secara ajek memelihara, dan mengembangkan kompetensi warga negara (*civic knowledge, civic skills, maupun civic dispositions*). Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan tidak hanya menjadikan setiap warga negara menjadi warga negara yang baik (*to*

*be good citizen*), melainkan warga negara yang memiliki kecerdasan (*Civic Intelligence*) baik intelektual, emosional, sosial maupun spiritual. Memiliki rasa bangga dan bertanggung jawab (*Civic Responsibility*) dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (*Civic Participation*) agar tumbuh rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Konsep kurikulum maupun proses pembelajaran perlu diarahkan pada tujuan pengembangan karakter bangsa yang diwujudkan dalam transformasi pengetahuan PKn, dan keterampilan kewarganegaraan yang berusaha mengembangkan budaya kewarganegaraan (Yanuarto, 2019). Membangun karakter yang kita perlukan salah satunya melalui proses pembelajaran dimana dalam pembelajaran Abad 21 ini suatu pengintegrasian antara kemampuan literasi, kecakapan pengetahuan, keterampilan dan sikap, serta penguasaan terhadap teknologi sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan karakter bangsa (Kemendikbud, 2017).

Selain peran sekolah atau pendidikan yang bereperan dalam memabangun karakter generasi muda juga keluarga sangat diperlukan salah satunya mengenai pola asuh orang tua terhadap anak, pentingnya suatu bentuk atau model pengasuhan dan juga pendidikan orang tua kepada anaknya agar anaknya berperilaku baik (Martini dkk, 2017). Transformasi digital di era disrupsi membutuhkan persiapan yang inovatif dan kreatif sumber daya manusia untuk mampu bertahan dan mengembangkan warga pada zamannya, dengan membina nilai-nilai kemanusiaan berdasarkan karakter bangsa (Sari dkk, 2019). Dengan kecapakan abad 21 selain harus diimbangi dengan sikap, keterampilan dan pengetahuan serta harus juga melek teknologi agar manusia mampu hidup berdampingan dengan adanya kemajuan jaman namun harus memiliki keseimbangan dalam diri generasi muda yaitu nilai-nilai terpuji dalam diri yang mencerminkan nilai karakter bangsa. Dapat disimpulkan bahwasannya membangun nilai karakter sangat berkaitan erat dengan moral seseorang yang ada pada dalam diri pada setiap individu, baik sifat positif ataupun sesuatu hal sifat negatif yang ada pada setiap individu. Dalam membangun karakter generasi muda bangsa tidak akan terlepas dari budaya yang kita miliki dalam hal ini harus adanya

integrasi dari beberapa faktor untuk dapat membangun karakter bangsa yakni faktor keluarga, faktor sekolah dan juga faktor lingkungan atau masyarakat.

Pembangunan karakter bangsa yang tengah menghadapi era revolusi industri 4.0 dengan ditandainya kemajuan teknologi harus senantiasa tetap dijaga dan memperhatikan nilai-nilai karakter bangsa dengan ditunjang melalui kecakapan hidup abad 21 agar mampu beradaptasi dalam aktivitas kehidupan yang pada akhirnya mendukung ketercapaian sasaran pembangunan nasional dengan sumber daya manusia yang unggul melalui pembangunan karakter. Eksistensi Pancasila dalam pembentukan karakter bangsa dapat diimplementasikan melalui pendekatan pendidikan multikultural. Banks (1993) mengemukakan empat pendekatan dalam mengintegrasikan materi pendidikan multikultural ke dalam kurikulum maupun pembelajaran di sekolah maupun di perguruan tinggi. Diantaranya adalah:

1. Pendekatan kontribusi (*the contributions approach*). Level ini yang paling sering dilakukan dan paling luas digunakan, dalam fase pertama dari gerakan kebangkitan etnis. Cirinya adalah dengan memasukkan pahlawan-pahlawan dari suku bangsa/etnis dan benda-benda budaya ke dalam pelajaran yang sesuai.
2. Pendekatan aditif (*aditif approach*). Pada tahap ini dilakukan penambahan materi, konsep, tema, perspektif terhadap kurikulum tanpa mengubah struktur, tujuan dan karakteristik dasarnya. Pendekatan aditif ini sering dilengkapi dengan buku, modul, atau bidang bahasan terhadap kurikulum tanpa mengubah secara substansif.
3. Pendekatan transformasi (*the transformation approach*). Pendekatan transformasi berbeda secara mendasar dengan pendekatan kontribusi dan aditif. Pendekatan transformasi mengubah asumsi dasar kurikulum dan menumbuhkan kompetensi dasar siswa dalam melihat konsep, isu, tema, dan problem dari beberapa perspektif dan sudut pandang etnis.
4. Pendekatan aksi sosial (*the sosial action approach*). Pendekatan ini mencakup semua elemen dari pendekatan transformasi, namun menambah komponen yang mempersyaratkan siswa membuat aksi yang berkaitan

dengan konsep, isu, atau masalah yang dipelajari dalam suatu unit (Banks, 1993).

Pada mata kuliah wajib Pendidikan Pancasila, dosen dapat menggunakan pendekatan transformasi dan aksi sosial ketika mengajarkan materi Pancasila sebagai dasar negara, maksud Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila menjadi ruh bagi raga bangsa Indonesia dalam mempertahankan jati dirinya, Ir. Soekarno dalam pidato di sidang BPUPKI 1 Juni 1945, "*Philosophische grondslag* (dasar filosofi) dari Indonesia Merdeka. *Philosophische grondslag* itulah fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya (Noor Ms Bakry, 2009). Maka eksistensi Pancasila dapat dibumikan melalui pendekatan pendidikan multikultural. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang plural, tetapi memiliki dasar negara sama yakni Pancasila. Perpres No. 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter dalam pasal 3 menyebutkan bahwa: PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi;

- 1) Religius: sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain.
- 2) Jujur: perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat di percaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
- 3) Toleransi: sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku etnis, sikap, pendapat, dan tindakan orang lain yang berbeda darinya.
- 4) Disiplin: tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
- 5) Kerja keras: perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajardan tugas, serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
- 6) Kreatif: berpikir dan melakukan sesuatu untuk meng hasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.

- 7) Mandiri: sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas.
- 8) Demokrasi: cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.
- 9) Rasa ingin tahu: sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajari, dilihat, dan didengar.
- 10) Cinta tanah air: cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa.
- 11) Menghargai prestasi: Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui, serta menghormati keberhasilan orang lain.
- 12) Bersahabat/komunikatif: tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerjasama dengan orang lain.
- 13) Cinta damai: sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.
- 14) Gemar membaca: kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebijaksanaan bagi dirinya.
- 15) Peduli lingkungan: sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.
- 16) Peduli sosial: sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
- 17) Tanggung jawab: sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

Nilai-nilai karakter bangsa yang ditanamkan dengan baik harapannya memiliki korelasi yang positif terhadap sikap dan perilaku bangsa. Perilaku tindakan manusia dipengaruhi oleh nilai yang hendak diraihinya. Salah satu

pandangan psikologis, yang terkait dengan kedekatan hubungan nilai dengan tindakan dapat dipahami dari motivasi hierarki nilai kebutuhan yang akan diraih, untuk menjadi pengaktualisasi diri, sehingga menjadi manusia unggul. Kebanyakan orang hidup berdasarkan perjuangan mereka terhadap pemenuhan kebutuhan makanan, rasa aman dan perasaan dicintai. Sebagian besar manusia lebih banyak menekankan pada kebutuhan tingkat rendah ini. Sehingga sistem pendidikan dan politik telah dibangun diatas konsep kemanusiaan yang belum sempurna. Orang yang mencapai nilai aktualisasi diri tersebut dalam tindakannya akan meyakini hidupnya pada pekerjaan, tugas dan kewajiban yang merupakan panggilan tertentu yang dianggapnya penting. Sutarjo (2012: 69) menyatakan bahwa nilai menjadi acuan dalam menentukan sikap, dan sikap menjadi acuan dalam bertingkah laku. Perilaku bangsa merupakan *soft skill*, yaitu seperangkat kemampuan yang mempengaruhi individu dalam berinteraksi dengan orang lain (Hanum, 2009:2). Perilaku bangsa akan dapat menjadi karakter apabila dilatihkan secara terus menerus melalui proses sosialisasi dan internalisasi. Karakter bangsa akan terwujud apabila sikap dan perilaku warga negaranya telah mengamalkan nilai-nilai karakter bangsa dalam segala aspek kehidupan secara berkesinambungan.

## **SIMPULAN**

Pada intinya eksistensi Pancasila dalam pembentukan karakter bangsa melalui pendidikan multikultural dapat menjadi alternatif pengembangan kerangka konseptual filosofis pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah wajib umum di perguruan tinggi. Nilai-nilai Pancasila yang berakar dari budaya dan tradisi serta agama yang ada di Indonesia akan terus eksis apabila dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan multikultural dapat dijadikan sarana baru dalam membentuk karakter bangsa yang sangat prural seperti Indonesia. Pancasila lahir dengan spirit bernegara, beragama, berbudaya, dan berkemanusiaan di Nusantara ini. Menjaga Pancasila tak akan pernah cukup satu tahun, dua tahun atau bahkan seratus tahun, namun harus selamanya selama bumi masih berputar

## REFERENSI

- Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum dan Perbukuan. (2010). *Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Karakter (Berdasarkan Pengalaman Di Satuan Pendidikan Rintisan*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional.
- Banks. (1993). *Teaching strategies for ethnic studies*. Boston: Allyn and Bacon in.
- Budimansyah, D. (2010). *Penguatan pendidikan kewarganegaraan untuk membangun karakter bangsa*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Embun, B. (2012, April 17). *Banjir embun*. Retrieved from Penelitian Kepustakaan: <http://banjirembun.blogspot.co.id/2012/04/penelitian-kepustakaan.html>
- Giddens, A. (2000). *The third way*. Jakarta: Gramedia
- Hanum, F. (2009). Pendidikan multikultural sebagai sarana membentuk karakter bangsa (dalam perspektif sosiologi pendidikan). *Makalah Seminar Regional DIY-Jateng*. 14 Desember 2009, Ruang Sidang Rektorat UNY
- Ibda. H. (2018). Pancasila sebagai jimat kerukunan: *Kajian Filsafat*. *Jurnal Citra Ilmu*. 2(2).
- Koesoema A. D. (2010). *Pendidikan karakter, strategi mendidik anak di zaman global*. Jakarta: Grasindo.
- Latif, Y. (2017). *Negara paripurna, historisitas, rasionalitas, dan aktualitas, Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lickona, T. (1992). *Educating for character how our schools can teach respect and responsibility*. New York-Toronto-London-Sydney-Auckland: Bantam Books.
- Martini, E., Kusnadi, E., & Bagja, A., et al. (2017). Pengaruh pola asuh orang tua terhadap pembentukan karakter anak di Desa Budi Harja Kecamatan Cililin Kabupaten Bandung Barat. *CIVICS Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. 2(1) ISSN 2579742.
- Media Indonesia. 2018. *Tujuh Kampus Terpapar Radikalisme*. 30 Mei 2018
- Megawangi, R. (2007) *Pendidikan karakter (solusi yang tepat untuk membangun bangsa*. Jakarta: Indonesia Heritage Foundation.
- Mukti, A. (1972). *Alam pikiran Islam modern di Indonesia dan modern Islamic thought in Indonesia*. Yogyakarta: Yayasan Nida, 1972.
- Noor, M. B. (2009). *Pendidikan kewarganegaraan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 49 Tahun 2014 tentang SN Dikti.

- Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
- Polda Metro Jaya (2016). *Ini 11 kejahatan yang menonjol selama 2016*. Dalam harian Kompas 29 Desember 2016
- Qardhawi, Y. (2001). *Ummat Islam menyongsong abad 21 (ummatan aina qornain)*. Solo: Era Intermedia
- Sapriya. (2007). Analisis signifikansi “content” pkn persekolahan dalam menghadapi tuntutan era dekomrasi dan penegakan hak asai manusia. *Jurnal Civicu* (1) 57-72. Bandung. Jurusan PMPKN. UPI.
- Somantri, E. (2011). *Pendidikan karakter: nilai inti bagi upaya pembinaan kepribadian bangsa*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Sumardjo. (2010). *Simbol-simbol artefak budaya sunda: tafsir-tafsirpantun sunda*. Bandung: Kelir
- Sutarjo Adisusilo, J.R. (2012) *Pembelajaran nilai-karakter konstruktivisme dan VCT sebagai inovasi pendekatan pembelajaran afektif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Sejahtera.
- TribunNews. (2018). Tiga dosen ITS dipecat karena menyebarkan faham radikal (Tribunnews.com, 16/5/2018).
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Winataputra, U. S. & Saripudin, U. (2012). Jati diri pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana sistemik pendidikan demokrasi: suatu kajian konseptual dalam konteks pendidikan IPS. *Jurnal Pendidikan Program Pascasarjana*. 1(1). 3975.
- Yanuarto, B. (2019). Developing democratic culture through civic education. *Pertanika journal of social sciences and humanities*. 27(2). 915-924.
- Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zuriah, N. (2015). *Pendidikan moral dan budi pekerti dalam perspektif perubahan*. Jakarta: Bumi Kasara.

# Penguatan Jati Diri Pendidikan Kewarganegaraan di Era Revolusi Industri 4.0

Rianda Usmi

[riandausmi.2019@student.uny.ac.id](mailto:riandausmi.2019@student.uny.ac.id)

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penguatan jati diri pendidikan kewarganegaraan di era revolusi industri 4.0. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode kepustakaan. Sumber data penelitian diperoleh dari buku maupun jurnal yang berkaitan dengan studi pendidikan kewarganegaraan dan revolusi industri 4.0. Prosedur meta analisis dalam penelitian ini dengan mengumpulkan data pustaka, membuat catatan, dan mereview sumber data. Analisis data menggunakan analisis deskriptif dengan mengumpulkan dan menyusun suatu data yang kemudian dianalisis. Hasil yang diperoleh dalam studi ini menunjukkan bahwa penguatan jati diri pendidikan kewarganegaraan di era revolusi industri 4.0 dapat dilakukan dengan mengembangkan pendidikan kewarganegaraan ke arah pendidikan transformatif, yakni pendidikan dengan pendekatan maksimal yang bertujuan untuk memastikan warga negara siap untuk mengambil peran sebagai warga global yang bertanggung jawab di era revolusi industri 4.0

**Kata Kunci:** Penguatan Jati Diri; Pendidikan Kewarganegaraan; Revolusi Industri 4.0

## PENDAHULUAN

Dunia hari ini tengah berada dalam suatu era yang disebut dengan revolusi industri 4.0. Kehadiran era revolusi industri 4.0 sudah tidak dapat dielakkan lagi. Revolusi industri 4.0 hadir begitu cepat dan tak terduga, serta banyak hal yang tak terpikirkan sebelumnya karena tiba-tiba muncul, kemudian membentuk tatanan dunia baru. Pada era ini semakin terlihat wujud dunia yang telah menjadi kampung global. Kehadiran revolusi industri 4.0 bagaikan “buah simalakama”, hadir dengan membawa kemudahan dan peluang untuk mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, namun pada saat yang sama di bijalik kemudahan yang ditawarkan, revolusi industri 4.0 menyimpan berbagai dampak negatif. Lalu apa sesungguhnya revolusi industri 4.0 itu? dan tantangan apa yang akan dihadapi?.

Konsep “Industri 4.0” adalah sebuah istilah yang muncul pertama kali dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh Pemerintah Jerman pada tahun 2011 sebagai strategi teknologi modern Jerman untuk tahun 2020 (Zhou, Liu & Zhou, 2015: 2147; Satya, 2018: 20). Pada April 2013, istilah “Industri 4.0” kembali muncul dalam sebuah pameran industri di Hannover Jerman. Selanjutnya, dalam beberapa tahun terakhir, industri 4.0 menjadi bahasan yang mendunia dan menjadi

*hotspot* bagi sebagian besar industri global (Zhou, Liu & Zhou, 2015: 2147). Salah satu kekhasan era revolusi industri 4.0 adalah diwarnai oleh kecerdasan buatan atau *artificial intelligence* (Satya, 2018: 20; Tjandrawinata, 2016: 3).

Industri 4.0 merupakan suatu proses industri yang terhubung secara digital yang mencakup berbagai jenis teknologi. Sebelum revolusi industri 4.0, telah terjadi tiga revolusi industri, yaitu: (1) revolusi industri 1.0 yang ditandai dengan ditemukannya mesin uap dan kereta api tahun 1750-1930; (2) revolusi industri 2.0 yang dikenal dengan revolusi teknologi, ditandai dengan penemuan listrik, alat komunikasi, kimia, dan minyak tahun 1870-1900; (3) revolusi industri 3.0 yang ditandai dengan penemuan komputer, internet, dan telepon genggam tahun 1960-2000 (Satya, 2018: 20; Drath & Horch, 2014: 56). Zhou, Liu & Zhou (2015: 2147) juga mendeskripsikan tiga revolusi industri pertama, yang mana manusia telah menyaksikan dan menciptakan teknologi mekanik, listrik, dan informasi, yang ditujukan untuk meningkatkan produktivitas proses industri. *Revolusi industri pertama*, meningkatkan efisiensi melalui penggunaan tenaga air, peningkatan penggunaan tenaga uap dan pengembangan peralatan mesin; *Revolusi industri kedua*, membawa listrik dan produksi massal; *Revolusi industri ketiga*, semakin mempercepat otomisasi menggunakan elektronik dan teknologi informasi. Kemudian, lompatan besar terjadi di era tahun 2000-sekarang yang dinamai dengan era revolusi industri keempat, karena teknologi informasi dan komunikasi dapat dikelola sepenuhnya. *Revolusi industri keempat*, mengintegrasikan dunia nyata dengan era informasi untuk pengembangan industri di masa depan, yang ditandai dengan berkembangnya *internet of things* yang diikuti teknologi baru dalam sains, kecerdasan buatan, robotik, *cloud*, cetak tiga dimensi, dan teknologi nano (Ghufron, 2018: 333).

Revolusi industri sejatinya diterjemahkan sebagai suatu proses perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Maka dari itu, revolusi industri 4.0 akan mempengaruhi dan membentuk tatanan baru kehidupan manusia, karena pada dasarnya revolusi memiliki makna perubahan yang sangat cepat dan fundamental, dan terlebih memiliki sifat yang disruptif

artinya dapat merusak tatanan lama yang sudah ada bertahun-tahun lamanya, kemudian menggantinya dengan suatu tatanan baru.

Dewasa ini, revolusi industri 4.0 telah menyebabkan berbagai pergeseran nilai-nilai, tatanan sosial, dan budaya dalam masyarakat. Pergeseran nilai-nilai tersebut tercermin dari maraknya berbagai peristiwa yang akhir-akhir ini terjadi. Generasi milenial, yaitu generasi yang lahir dari tahun 1980-2000 sudah mulai menunjukkan gejala-gejala degradasi moral, seperti gaya hidup konsumerisme, kebebasan yang tanpa batas, hilangnya perilaku etis baik di dunia nyata terlebih di media sosial, serta masih banyak perilaku lainnya yang bertentangan dengan nilai dan jati diri masyarakat Indonesia.

Dalam situasi yang penuh perubahan dan tuntutan inilah mengharuskan pendidikan kewarganegaraan merespon dan menguatkan perannya, khususnya dalam pembangunan kecerdasan kewargaan (*civic intelligence*) dan karakter bangsa (*nation and character building*). Lalu, pertanyaan yang muncul adalah bagaimana pendidikan kewarganegaraan merespon era revolusi industri 4.0?, kemudian bagaimana pendidikan kewarganegaraan menguatkan jati dirinya sebagai suatu kajian ilmu di era revolusi industri 4.0?.

Paper ini bertujuan untuk mendeskripsikan penguatan jati diri pendidikan kewarganegaraan di era revolusi industri 4.0. Dalam paper ini akan disajikan jati diri keilmuan pendidikan kewarganegaraan yang terdiri dari hakikat pendidikan kewarganegaraan, tujuan dan fungsi pendidikan kewarganegaraan, serta visi-misi holistik pendidikan kewarganegaraan. Kemudian, akan disajikan juga suatu konsep bagaimana pendidikan kewarganegaraan merespon dan menguatkan jati dirinya di era revolusi industri 4.0, karena sebagaimana yang dikatakan McKinsey (dalam Rumapea, 2018: 453) bahwa menyikapi dampak dari teknologi digital revolusi industri 4.0 ialah dengan memiliki jati diri, dan mempersiapkan mental dan skill generasi muda yang unggul. Keseluruhan tuntutan ini sejalan dengan esensi pendidikan kewarganegaraan yakni membentuk warga negara muda yang baik dan cerdas (*Smart and good citizen*), sehingga berdasarkan gambaran tantangan di atas, pendidikan kewarganegaraan harus mampu membentuk generasi muda yang berkualitas sesuai dengan tantangan revolusi industri 4.0,

diantara caranya yaitu melalui pendidikan kewarganegaraan transformatif. Hal ini dikarenakan hakikat revolusi industri 4.0 adalah proses transformasi kehidupan manusia, sebagaimana yang dikatakan oleh Kanselir Jerman Angela Merkel (2014) yang dikutip Rumapea (2018: 453) bahwa revolusi industri 4.0 adalah transformasi komprehensif aspek kehidupan melalui teknologi digital dan internet.

## **METODE**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi literatur (kepuustakaan) yang bersumber baik dari buku maupun jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan dan revolusi industry 4.0. Prosedur meta analisis dalam penelitian ini diawali dengan mengumpulkan data pustaka, membuat catatan, kemudian mereview sumber data. Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Jati Diri Pendidikan Kewarganegaraan di Era Revolusi Industri 4.0**

Jati diri pendidikan kewarganegaraan dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 adalah dengan menempatkan pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu bidang kajian yang mengemban visi dan misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor “*value-based education*” (cerdas, terampil, dan berakarakter). Secara filsafati jati diri pendidikan kewarganegaraan harus diarahkan, yakni memiliki visi dan misi yang holistik-eklektis, linear, konsisten, dan koheren dengan esensi dan arah dari filosofi, fungsi, dan tujuan nasional. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Winataputra (2015: 3) bahwa secara sosiopolitik dan kultur pendidikan kewarganegaraan harus memiliki visi pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yakni dengan menumbuhkan kembangkan kecerdasan kewarganegaraan (*civic intelligence*).

Terlebih di era revolusi industri 4.0 yang mana salah satu kekhasan utamanya adalah kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), yang artinya menandakan tingginya tuntutan akan kecerdasan di era ini, sehingga apabila arah

filosofis (visi-misi), fungsi, dan tujuan pendidikan kewarganegaraan diorientasikan untuk membentuk kecerdasan kewarganegaraan, maka dapat dikatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu kajian ilmu telah sejalan dengan tuntutan revolusi industri 4.0. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan akan mampu memenuhi dan menjawab tantangan-tantangan di era revolusi industri 4.0, yaitu melahirkan generasi muda yang cerdas, berkualitas, unggul dan berdaya saing, serta berkarakter (*good citizen*).

*Civic intelligence* atau kecerdasan kewarganegaraan adalah kemampuan seseorang untuk memainkan peran dirinya secara proaktif sebagai warga negara dan warga masyarakat dalam tata kehidupan yang kompleks dengan berbasiskan identitas normatif bangsa. Seseorang yang memiliki kecerdasan kewarganegaraan akan menunjukkan *performance* sebagai warga negara yang peduli terhadap kondisi sosial, jujur dalam mensikapi berbagai fenomena yang ada, kritis terhadap kondisi yang ada, serta tangguh dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan yang dialaminya. Jika kecerdasan kewarganegaraan ini tumbuh subur dalam diri seseorang, maka akan lahirlah sosok warga negara yang baik (*good citizen*). Dengan demikian kunci pembentukan warga negara yang baik adalah *Civic Intelligence* (Masrukhi & Yuniawan, 2015:54).

Menurut Winataputra (2001) ada tujuh kecakapan yang harus dibangun dalam membentuk kecerdasan kewarganegaraan, yaitu (1) *civic knowledge*; (2) *civic skill*; (3) *civic disposition*; (4) *civic confidence*; (5) *civic commitment*; (6) *civic competence*; dan (7) *civic culture*. Tujuh kecakapan ini harus terintegrasi secara harmonis dalam aktivitas berpikir, bersikap, dan bertindak sebagai insan warga negara Indonesia, yang dilandasi oleh nilai-nilai kewarganegaraan (*civic values*). Ketujuh aspek *civic intelligence* tersebut merupakan satu kesatuan dalam proses kejiwaan seorang warga negara. Sebagai contoh, *civic knowledge* yang berkenaan dengan pengetahuan dan pemahaman akan kedudukan diri sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban dengan beberapa kecakapan lainnya. Jika warga negara memahami dan menguasai pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) dan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) maka akan terbentuk seorang warga negara yang berkompeten. Kemudian,

jika warga negara memahami dan menguasai pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) dan nilai-nilai kewarganegaraan (*civic values*) maka akan menjadi seorang warga negara yang memiliki rasa percaya diri, sedangkan warga negara yang telah memahami dan menguasai keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) dengan dilandasi oleh nilai-nilai kewarganegaraan (*civic values*) maka akan terbentuk seorang warga negara yang memiliki komitmen kuat. Selanjutnya, warga negara yang memahami dan menguasai pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), memahami dan menguasai keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dengan dilandasi oleh nilai-nilai kewarganegaraan (*civic values*) maka akan menjadi seorang warga negara yang berpengetahuan, terampil, dan berkepribadian/berkarakter. Inilah esensi dari Pendidikan kewarganegaraan sebagai kajian filosofik keilmuan melalui koridor “*value-based education*” dalam membentuk warga negara yang cerdas, berkualitas, unggul, terampil dan berdaya saing, serta berkarakter (*good citizen*).

### **1. Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan**

Banyak pengertian atau defenisi pendidikan kewarganegaraan yang dikemukakan oleh para pakar dan praktisi pendidikan dalam berbagai literatur. Akan tetapi, tidak jarang banyak yang keliru dalam memahami batasan tentang pendidikan kewarganegaraan, karena mengemukakan hakikat pendidikan kewarganegaraan hanya dengan kaca mata yang sempit, semisal memandang pendidikan kewarganegaraan adalah kajian yang membahas hak dan kewajiban warga negara atau tentang konstitusi negara yang dimaknai sama dengan tata negara. Padahal pendidikan kewarganegaraan memiliki batasan yang jelas dan karakter tersendiri sebagai suatu kajian disiplin ilmu pendidikan.

Menurut Sapriya (2012) sebagaimana yang dikutip Murdiono (2018: 30), pendidikan kewarganegaraan merupakan disiplin ilmu terintegrasi (*integrated scientific discipline*). Artinya, sebagai disiplin ilmu terintegrasi pendidikan kewarganegaraan tidak dapat terpisahkan dari disiplin ilmu lainnya, baik dari ilmu-ilmu sosial, humaniora, filsafat, bahkan ilmu-ilmu alam. Sebagai disiplin ilmu yang terintegrasi, pendidikan kewarganegaraan berakar dari ilmu kewarganegaraan (*civics*), ilmu politik, ilmu hukum, ilmu pendidikan

(pedagogik) serta bidang humaniora dan dimensi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, kajian pendidikan kewarganegaraan memiliki karakteristik pendekatan *interdisciplinary*, *multidisciplinary*, *transdisciplinary*, bahkan *crossdisciplinary* dan *multidimensional*.

Adapun menurut Winataputra (2001: ii) dalam penelitian disertasinya menyimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu tubuh pengetahuan yang memiliki ontologi-perilaku dan budaya kewarganegaraan yang bersifat multidimensional; epistemologi-penelitian, pengembangan, dan pembelajaran dalam konteks kurikuler dan sosio-kultural; dan aksiologi untuk memfasilitasi pengembangan tubuh pengetahuan itu sendiri, kurikulum dan pembelajaran, serta kegiatan sosial-kultural kewarganegaraan. Lebih lanjut Winataputra mengemukakan bahwa pendidikan kewarganegaraan telah berkembang menjadi kajian keilmuan (*scientific area of study*) yang bersifat *multifacet* dengan konteks lintas bidang keilmuan pendidikan kewarganegaraan memiliki ontologi dasar ilmu politik, yang kemudian dari dasar ontologis inilah berkembang menjadi *civics*, yang selanjutnya diakui secara akademis sebagai embrio dari *civic education*. Adapun epistemologisnya, pendidikan kewarganegaraan merupakan pengembangan salah satu dari tradisi *social studies* yakni *citizenship transmission*. Saat ini pendidikan kewarganegaraan telah berkembang pesat menjadi suatu *body of knowledge* yang memiliki paradigma sistemik dengan tiga komponen interaktif yakni kajian ilmiah kewarganegaraan, program kurikuler, dan kegiatan sosial-kultural kewarganegaraan.

Winataputra (2001: 305- 316) menerangkan hakikat pendidikan kewarganegaraan secara kajian filsafati, yaitu secara ontologi, epistemologi, dan aksiologi, sebagai berikut:

**a. Aspek Ontologi Pendidikan Kewarganegaraan**

Sebagai suatu bidang kajian ilmiah pendidikan disiplin ilmu yang bersifat terapan, pendidikan kewarganegaraan memiliki dua dimensi ontologi, yaitu obyek telaah dan obyek pengembangan. Obyek telaah adalah keseluruhan aspek idiil, instrumental, dan praksis pendidikan

kewarganegaraan yang secara internal dan eksternal mendukung sistem kurikulum dan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dan di luar sekolah, serta format gerakan sosial-kultural kewarganegaraan masyarakat. Sedangkan obyek pengembangan adalah keseluruhan ranah sosio-psikologis peserta didik, yakni ranah kognitif, afektif, konatif, dan psikomotorik yang menyangkut status, hak, dan kewajibannya sebagai warga negara yang perlu dikembangkan secara programatik guna mencapai kualitas warga negara yang cerdas dan baik.

**b. Aspek Epistemologi Pendidikan Kewarganegaraan**

Aspek epistemologi pendidikan kewarganegaraan secara konseptual-struktural berkaitan erat dengan aspek ontologi pendidikan kewarganegaraan, karena memang proses epistemologis pada dasarnya berwujud dalam berbagai bentuk kegiatan sistematis dalam upaya membangun pengetahuan bidang kajian ilmiah pendidikan kewarganegaraan yang sudah seharusnya terikat pada obyek telaah dan obyek pengembangan pendidikan kewarganegaraan. Sesuai jati diri kajian ilmiah pendidikan kewarganegaraan yang terpusat pada ontologi yang berdimensi obyek telaah, dan obyek pengembangan, maka kegiatan epistemologis pendidikan kewarganegaraan mencakup metodologi penelitian dan metodologi pengembangan. Metodologi penelitian digunakan untuk mendapatkan pengetahuan baru, sedangkan metodologi pengembangan digunakan untuk mendapatkan paradigm pedagogis dan rekayasa kurikuler.

**c. Aspek Aksiologi Pendidikan Kewarganegaraan**

Adapun yang termuat ke dalam aspek aksiologi pendidikan kewarganegaraan adalah berbagai manfaat dari hasil penelitian dan pengembangan dalam bidang kajian pendidikan kewarganegaraan yang telah dicapai bagi dunia pendidikan, khususnya pendidikan persekolahan dan pendidikan tenaga kependidikan.

Selanjutnya, pandangan Kerr (1999: 6) tentang pendidikan kewarganegaraan adalah:

*Citizenship or civics education is construed broadly to encompass the preparation of young people for their roles and responsibilities as citizens and, in particular, the role of education (through schooling, teaching and learning) in that preparatory process.*

Kewarganegaraan atau pendidikan kewarganegaraan ditafsirkan secara luas ialah mencakup penyusunan peran bagi kaum muda, kemudian secara khusus adalah tanggung jawab sebagai warga negara, yang prosesnya disiapkan melalui sekolah, pengajaran, dan pembelajaran. Adapun Hoge (2002: 105) memaknai pendidikan kewarganegaraan yaitu “*citizenship education may be defined as any conscious or overt effort to develop student knowledge of government, law, and, politics as those have evolved through history and presently operate in our society...*” artinya, pendidikan kewarganegaraan dapat didefinisikan sebagai usaha sadar atau terang-terangan untuk mengembangkan pengetahuan peserta didik tentang pemerintahan, hukum, dan politik yang telah berevolusi melalui sejarah dan saat ini hidup di masyarakat.

Senada dengan Kerr dan Hoge, Olibie & Akudolu (2013: 96) mengemukakan bahwa “*Citizenship education in its ideal form seeks to engage citizens in their communities and schools by teaching them*”. Artinya, pendidikan kewarganegaraan merupakan bentuk ideal yang berupaya melibatkan warga negara dalam komunitas dan sekolah melalui pengajaran. Oleh karenanya, pendidikan kewarganegaraan memiliki hakikat yang sangat penting dalam menyiapkan generasi muda yang cerdas, bertanggung jawab, dan berkarakter. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mak (2014: 2) “*...civic education is an essential element of whole person education because it aims to foster students’ positive values and attitudes...*”.

## **2. Tujuan dan Fungsi Pendidikan Kewarganegaraan**

Pendidikan kewarganegaraan baik dalam konteks kajian akademik, kurikuler, maupun sosio-kultural pada prinsipnya bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik (*to be a good citizen*). Sebagaimana pendapat

Hargreaves (1996: 15) bahwa tujuan dari pendidikan kewarganegaraan yaitu *“active citizens are as political as they are moral, moral sensibility derives in part from political understanding; political apathy spawns moral apathy”*, artinya pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam pembentukan karakter atau dapat disebut juga sebagai pendidikan karakter warga negara yang baik (*good citizen*). Senada dengan Hargreaves, Huang dan Chen (2013: 80) juga mengemukakan bahwa tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menumbuhkan nilai-nilai atau karakter pada peserta didik serta melaksanakan tanggung jawab dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai.

Tujuan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia tentu memiliki keterkaitan erat dengan tujuan pendidikan nasional. Secara holistik (psikologis, pedagogis, dan sosio-kultural) pendidikan kewarganegaraan bertujuan agar setiap warga negara muda memiliki rasa kebanggaan dan cinta tanah air dalam konteks nilai dan moral Pancasila, nilai dan norma UUD NRI Tahun 1945, nilai dan komitmen Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen bernegarakesatuan Republik Indonesia (Winataputra, 2015: 4). Adapun menurut Murdiono (2018: 36) bahwa tujuan Pendidikan kewarganegaraan adalah membentuk warga Negara yang baik (*good citizen*). Warga negara yang baik dapat diartikan sebagai warga negara yang memiliki berbagai kompetensi sehingga dapat melaksanakan fungsinya secara efektif dalam kehidupan bermasyarakat. Warga negara yang baik sebagai tujuan dari pendidikan kewarganegaraan harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap kewarganegaraan. Sikap kewarganegaraan berupa nilai-nilai yang dijadikan sebagai dasar pengembangan dua kompetensi lainnya, yakni pengetahuan dan keterampilan kewarganegaraan. Dengan demikian warga negara yang dibentuk melalui pendidikan kewarganegaraan adalah warga negara yang cerdas, terampil, dan memiliki sikap yang baik. Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan diarahkan dalam rangka membentuk kompetensi-kompetensi tersebut melalui pembelajaran kewarganegaraan yang tidak hanya mengedepankan aspek

pengetahuan dan keterampilan, melainkan juga mengembangkan sikap warga negara yang baik.

Sedangkan fungsi dari pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membangun karakter peserta didik. Melalui pendidikan kewarganegaraan, peserta didik dilatih untuk bersikap tanggung jawab baik di lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Selain itu, melalui Pendidikan kewarganegaraan peserta didik mampu mengambil keputusan dan memecahkan masalah secara demokratis, menyelesaikan konflik secara damai, menghargai lingkungan hidup, dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan politik lokal, nasional, dan global secara cerdas dan kritis. Dengan demikian, secara substansial fungsi Pendidikan kewarganegaraan adalah untuk menanamkan norma, mengembangkan karakter, dan mewujudkan warga negara yang baik dan berperan serta dalam membentuk masa depan bangsa.

### **3. Visi dan Misi Pendidikan Kewarganegaraan**

Di Indonesia, pendidikan kewarganegaraan memiliki visi formal-pedagogis yakni sebagai mata pelajaran sosial dalam dunia persekolahan maupun perguruan tinggi yang berfungsi sebagai wahana untuk mendidik warga Negara Indonesia yang Pancasilais (Winataputra, 2001: 294). Lebih lanjut dalam arti luas, visi pendidikan kewarganegaraan yang dikemukakan oleh Winataputra (2001: 295) yakni sebagai sistem pendidikan kewarganegaraan, agar berfungsi dan berperan sebagai: (1) program kurikuler dalam konteks pendidikan formal dan non-formal; (2) program aksi sosio-kultural dalam konteks kemasyarakatan; dan (3) sebagai bidang kajian ilmiah dalam wacana pendidikan disiplin ilmu. Visi ini mengandung dua dimensi yakni; *pertama*, dimensi substantif berupa muatan pembelajaran (*content and learning experiences*) dan obyek telaah serta obyek pengembangan (aspek ontologi); *kedua*, dimensi proses berupa penelitian dan pembelajaran (aspek epistemologi dan aksiologi). Secara makro dalam konteks pendidikan nasional, visi pendidikan kewarganegaraan ini merupakan bagian integral dari instrumen dan praksis pendidikan nasional, sehingga secara sosiopolitik dan kultur pendidikan kewarganegaraan memiliki visi pendidikan untuk mencerdaskan

kehidupan bangsa yakni dengan menumbuhkan kembangkan kecerdasan kewarganegaraan (*civic intelligence*).

Bertolak dari visinya tersebut, maka pendidikan kewarganegaraan mengemban misi yang bersifat multidimensional (Winataputra, 2015: 3, 2001: 297) yakni: (1) misi psikopedagogis, yakni misi untuk mengembangkan potensi peserta didik secara progresif dan berkelanjutan; (2) misi psikososial, yang bertujuan untuk memfasilitasi kematangan peserta didik untuk hidup dan berkehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara; dan (3) misi sosiokultural yang merupakan misi untuk membangun budaya dan keadaban kewarganegaraan sebagai salah satu determinan kehidupan yang demokratis. Sebagai kesimpulan, visi dan misi Pendidikan kewarganegaraan harus linear, konsisten dan koheren dengan esensi dan arah dari filosofi, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional seperti yang diamanatkan konstitusional.

#### **B. Penguatan Jati Diri Pendidikan Kewarganegaraan di Era Revolusi Industri 4.0**

Perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat di era global abad 21, khususnya di era revolusi industri 4.0, menuntut konsepsi yang lebih luas mengenai tujuan pendidikan kewarganegaraan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Banks (2008: 135) agar tujuan pendidikan kewarganegaraan dapat terwujud dengan baik maka perlu ada reformasi terhadap konsepsi pendidikan kewarganegaraan, yakni perubahan mainstream dari pengetahuan akademik menuju pengetahuan akademik transformatif. Pendidikan kewarganegaraan tidak lagi dipandang sebagai mata pelajaran di sekolah yang hanya mengembangkan kemampuan akademik, melainkan sebagai mata pelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan dan keterampilan sosial sebagai warga negara yang mampu menjawab tantangan era revolusi industri 4.0. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam membangun wawasan global di era revolusi industri 4.0. Pendidikan kewarganegaraan harus dikembangkan kearah pendidikan transformatif agar mampu membekali warga negara muda dengan pengetahuan tentang isu-isu global, budaya, lembaga, dan sistem Internasional. Pendidikan kewarganegaraan transformatif mencerminkan

pendekatan maksimal yang bertujuan untuk memastikan warga negara siap untuk mengambil peran sebagai warga global yang bertanggung jawab di era revolusi industri 4.0 (Murdiono, 2015: 552).

Lebih lanjut, Murdiono menjelaskan (2015: 553-554) pendidikan kewarganegaraan transformatif berakar pada pengetahuan akademis transformatif dan memungkinkan warga negara muda untuk memperoleh informasi, keterampilan, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk melawan ketimpangan dalam masyarakat, bangsa, dan dunia. Selain itu, membantu warga negara muda dalam mengembangkan kemampuan untuk mengambil keputusan dan keterampilan dalam aksi sosial yang diperlukan untuk mengidentifikasi dan memecahkan berbagai masalah dalam masyarakat. Dengan demikian, di era revolusi industri 4.0, Pendidikan kewarganegaraan transformatif perlu diterapkan di sekolah agar generasi-generasi muda mampu mengklarifikasi dan merefleksikan budaya nasional, regional, dan global, serta memahami bagaimana budaya tersebut saling terkait dan di bangun di era revolusi industri 4.0.

## **SIMPULAN**

Menghadapi era revolusi industri 4.0 yang penuh perubahan dan tuntutan mengharuskan pendidikan kewarganegaraan merespon dan menguatkan perannya, khususnya dalam pembangunan kecerdasan kewargaan (*civic intelligence*) dan karakter bangsa (*nation and character building*). Jati diri pendidikan kewarganegaraan dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 adalah dengan menempatkan pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu bidang kajian yang mengemban visi dan misi nasional melalui koridor “*value-based education*” (cerdas, terampil, dan berakarakter) dengan menumbuhkan kembangkan kecerdasan kewarganegaraan (*civic intelligence*). Apabila arah filosofis (visi-misi), fungsi, dan tujuan pendidikan kewarganegaraan diorientasikan untuk membentuk kecerdasan kewarganegaraan, maka dapat dikatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan sebagai suatu kajian ilmu telah sejalan dengan tuntutan revolusi industri 4.0. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan akan mampu memenuhi dan menjawab tantangan-tantangan di era revolusi

industri 4.0, yaitu melahirkan generasi muda yang cerdas, berkualitas, unggul dan berdaya saing, serta berkarakter (*good citizen*).

Kemudian, di era revolusi industri 4.0 untuk menguatkan jati diri pendidikan kewarganegaraan, pendidikan kewarganegaraan harus dikembangkan ke arah pendidikan transformatif agar mampu membekali warga negara muda dengan pengetahuan tentang isu-isu global, budaya, lembaga, dan sistem Internasional. Pendidikan kewarganegaraan transformatif mencerminkan pendekatan maksimal yang bertujuan untuk memastikan warga negara siap untuk mengambil peran sebagai warga global yang bertanggung jawab di era revolusi industri 4.0.

## REFERENSI

- Bank, J.A. (2008). Diversity, group identity, and citizenship education in a global age. *Educational Researcher*, 37(3), 129-139.
- Drath R., & Horch, A. (2014) Industrie 4.0: Hit or hype? (Industry Forum). *IEEE industrial electronics magazine*, 8(2), 56-58.
- Ghufron, M.A. (2018). *Revolusi Industri 4.0: Tantangan, peluang dan solusi bagi dunia pendidikan* (Prosiding seminar nasional dan diskusi panel multidisiplin hasil penelitian & pengabdian kepada masyarakat).
- Hargreaves, D. H. (1996). *Teaching as a research based profession: possibilities and prospects*. London: Teacher Training Agency.
- Hoge, J. D. (2002). Character education, citizenship education, and the social studies. *The Social Studies*, 93(3), 103-108.
- Huang, Tien-Chi & Chen, Chia-Chen. (2013). Animating civic education: developing a knowledge navigation system using blogging and topic map technology. *Educational Technology & Society*, 16, 79-92.
- Kerr, D. (1999). *Citizenship education: an international comparison*. London: National Foundation for Educational Research (NFER).
- Mak, S. W. (2014). Evaluation of a moral and character education group for primary school students. *Discovery – SS Student E-Journal*, 4(3), 142-164.
- Masrukhi & Yuniawan. (2015). *Pengembangan civic intelligence berbasis kegiatan ekstrakurikuler di sekolah dasar* (Prosiding seminar nasional penguatan komitmen akademik dalam memperkuat jati diri pendidikan kewarganegaraan). Laboratorium Pendidikan kewarganegaraan

Departemen Pendidikan kewarganegaraan FPIPS UPI: Bandung.

- Murdiono, M. (2018). *Pendidikan kewarganegaraan global: membangun kompetensi global warga negara muda*. Yogyakarta: UNY Press.
- \_\_\_\_\_. (2015). *Pendidikan kewarganegaraan transformatif untuk mengembangkan wawasan global peserta didik di sekolah* (Prosiding seminar nasional penguatan komitmen akademik dalam memperkokoh jati diri pendidikan kewarganegaraan). Laboratorium Pendidikan kewarganegaraan Departemen Pendidikan kewarganegaraan FPIPS UPI: Bandung.
- Olibie E.I., & Akudolu L.R. (2013). Toward a functional citizenship education curriculum in nigerian colleges of education for sustainable development in the 21<sup>st</sup> Century. *American International Journal Of Contemporary Research*. 3(8).
- Rumapea, Marlina. M.E. (2018). *Tantangan pendidikan pada era revolusi 4.0* (Prosiding Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan). Vol. 2, 451-455.
- Satya, V.E. (2018). Strategi indonesia menghadapi industri 4.0. *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*. 10(9) 19-24.
- Tjandrawinata, R.R. (2016). Revolusi industri abad ini dan pengaruhnya pada bidang kesehatan dan bioteknologi. *Jurnal Medicinus*, 20(1).
- Winataputra, U.S. (2001). *Jati diri pendidikan kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan demokrasi*, (Disertasi). Bandung: UPI.
- \_\_\_\_\_. (2015). *Pendidikan pancasila dan kewarganegaraan (pendidikan kewarganegaraan) untuk generasi emas indonesia: rekonstruksi capaian pembelajaran* (Prosiding seminar nasional penguatan komitmen akademik dalam memperkokoh jati diri pendidikan kewarganegaraan). Laboratorium Pendidikan kewarganegaraan Departemen Pendidikan kewarganegaraan FPIPS UPI: Bandung.
- Zhou, Liu & Zhou. (2015). Industry 4.0: towards future industrial opportunities and challenges (2015 12<sup>th</sup> international conference on fuzzy systems and knowledge discovery/FSKD). IEEE, hlm. 2147-2152.

# Peran Perguruan Tinggi dalam Membangun Karakter Generasi Muda Indonesia

Saiful<sup>1</sup>, Muhammad Husen<sup>2</sup>, Masri<sup>3</sup>  
[saiful\\_usman@unsyiah.ac.id](mailto:saiful_usman@unsyiah.ac.id).

## Abstrak

Dunia pendidikan dituntut tidak hanya melahirkan generasi yang mampu mandiri dalam pengetahuan (*knowledge*) dan keterampilan (*skill*) saja. Tetapi dunia pendidikan juga dituntut untuk melahirkan generasi muda Indonesia yang mempunyai moralitas dan etika yang baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang peran perguruan tinggi dalam membangun karakter generasi muda Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif menggambarkan tentang peran perguruan tinggi dalam membangun karakter generasi muda Indonesia, adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Pimpinan Perguruan Tinggi, Ketua UPT, MKU, Ketua UP3AI, dan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Syiah Kuala. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan keseluruhan data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan karakter generasi muda Indonesia, terutama bagi mahasiswa di Universitas Syiah Kuala dilakukan melalui kegiatan kurikuler, seperti melalui Mata Kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Pendidikan Agama, Pendidikan Bahasa Indonesia, Ilmu Alamiyah Dasar (IAD), Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (ISBD), Pengetahuan Kebencanaan dan Lingkungan, ditambah lagi dengan materi-materi ke-Unsyiahian, serta melalui kuliah umum dan seminar maupun melalui kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler, yang sangat memungkinkan tentang pelaksanaan pendidikan karakter bagi generasi bangsa Indonesia.

**Kata Kunci:** *Perguruan Tinggi, Karakter, Generasi Muda Indonesia*

## PENDAHULUAN

Pendidikan karakter merupakan bagian yang sangat penting untuk terus dikembangkan pada setiap jenjang pendidikan di Indonesia, sehingga dapat membentuk karakter kepribadian generasi muda Indonesia yang utuh. Dinamika kehidupan generasi muda Indonesia dari masa ke masa terus saja berubah, banyak yang berkembang ke arah yang positif seperti penemuan-penemuan teknologi terbaru. Tetapi perkembangan ke arah yang negatif juga tidak sedikit, seperti penggunaan narkoba, sex bebas, perilaku menyimpang kawin sejenis, dan perilaku-perilaku negatif lainnya, yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Perilaku negatif generasi muda pada saat ini tidak terjadi begitu saja, tetapi banyak faktor yang mempengaruhinya. Generasi muda Indonesia pada saat ini sudah tidak dapat lagi membedakan salah-benar; baik-buruk. Manusia bertindak sesuai dengan kehendaknya demi kepentingan diri dan kelompok, tanpa memperhatikan orang lain. Mereka tidak menyadari bahwa tindakan yang

dilakukan akan merugikan dan bahkan dapat mencelakakan orang lain. Krisis moral pada dasarnya sama dengan krisis kemanusiaan.

Adaikan masalah tersebut tidak mendapat perhatian khusus, apalagi dengan dibiarkan begitu saja. Tidak menutup kemungkinan karakter generasi muda pada masa yang akan datang semakin hancur dan terpuruk.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif menggambarkan tentang peran perguruan tinggi dalam membangun karakter generasi muda Indonesia, adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Pimpinan Perguruan Tinggi, Ketua UPT. MKU, Ketua UP3AI, dan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Syiah Kuala. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (*in-deph interview*), dan keseluruhan data dianalisis secara deskriptif kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pendidikan Karakter**

Pendidikan karakter sebagai sesuatu yang harus dilakukan. Hal ini dikarena pendidikan karakter sebagai upaya dalam mewariskan nilai kepada generasi muda, suatu proses dan pada setiap jenjang pendidikan. Apabila kita merujuk kepada Undang-Undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 dalam pasal 3 disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab" maka kita dapat memahami bahwa tujuan utama pendidikan adalah membentuk insan yang beriman dan berakhlak mulia.

Dari hal yang telah dijelaskan, menunjukkan bahwa pendidikan yang diselenggarakan di negara Indonesia ada yang belum sesuai dengan harapan yang tertuang dalam undang-undang tersebut. Karena itu, penting adanya pendidikan

karakter yang harus diimplimentasikan dalam program kegiatan baik pada program kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Pendidikan karakter adalah suatu upaya dalam mendidik generasi muda Indonesia kearah yang lebih baik. Sehingga generasi muda Indonesia kedepan dapat memberikan kontribusi yang positif pada bangsa dan negara. Adapun nilai-nilai karakter yang ditanamkan kepada generasi muda Indonesia adalah nilai-nilai bersifat universal.

Berdasarkan *grand design* yang dikembangkan Kemendiknas (2010), secara psikologis dan sosial kultural, pembentukan karakter dalam diri individu merupakan fungsi dari seluruh potensi individu manusia dalam konteks interaksi sosial kultural yang berlangsung sepanjang hayat. Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosial-kultural tersebut dapat dikelompokkan dalam: (1) Olah Hati (*Spiritual and emotional development*); (2) Olah Pikir (*intellectual development*); (3) Olah Raga dan Kinestetik (*Physical and kinesthetic development*), dan (4) Olah Rasa dan Karsa (*Affective and Creativity development*).

Para pakar telah mengemukakan berbagai teori tentang pendidikan moral. Dalam hal ini, Menurut Hersh (1980), di antara berbagai teori yang berkembang, ada enam teori yang banyak digunakan; yaitu: *pendekatan pengembangan rasional, pendekatan pertimbangan, pendekatan klarifikasi nilai, pendekatan pengembangan moral kognitif, dan pendekatan perilaku sosial*. Berbeda dengan klasifikasi tersebut, Elias (1989) mengklasifikasikan berbagai teori yang berkembang menjadi tiga, yakni pendekatan kognitif, pendekatan afektif, dan pendekatan perilaku. Klasifikasi didasarkan pada tiga unsur moralitas, yang biasa menjadi tumpuan kajian psikologi, yakni perilaku, kognisi, dan afeksi.

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka ditegaskan bahwa pendidikan karakter merupakan upaya yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis untuk membantu peserta didik memahami nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan,

perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, dan adat istiadat.

### **Perguruan Tinggi dalam Membangun Karakter Generasi Muda Indonesia**

Penguatan dalam membangun karakter bagi generasi muda Indonesia merupakan suatu keharusan, sehingga dengan membangun karakter tersebut dapat mendorong lahirnya generasi yang memiliki watak yang baik. Berkembangnya karakter yang baik pada setiap generasi muda Indonesia akan melahirkan kemampuan dalam menghayati dan mengamalkan secara benar makna dan tujuan hidup mereka.

Pengembangan karakter bukanlah sesuatu yang mudah, semudah membalik telapak tangan. Akan tetapi, pengembangan karakter memerlukan suatu keseriusan yang dilandasi oleh tekad dan sikap konsistensi dari seluruh komponen masyarakat Indonesia.

Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Tahun 2003 telah dijelaskan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Oleh karena itu, Peran perguruan tinggi sebagai salah satu komponen lembaga pendidikan di Indonesia sangatlah penting. Perguruan tinggi mempunyai peran penting dalam membangun dan mengembangkan pendidikan karakter, sehingga dapat membentuk kepribadian generasi muda Indonesia menjadi manusia yang baik, warga negara yang baik yang sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan, yang bersumber kepada Pancasila. Pendidikan untuk kewarganegaraan tidak hanya menekankan pada pengetahuan kewarganegaraan dan masyarakat kewargaan saja, tetapi juga pada pengembangan nilai, keterampilan (Winataputra & Budimansyah, 2012:146).

Melalui peran perguruan tinggi, karakter generasi muda Indonesia dapat dibangun melalui dimensi pengetahuan, pelaksanaan, dan kebiasaan. Walaupun

kita ketahui bahwa karakter tidak hanya terbatas pada pengetahuannya saja. Karena seseorang yang memiliki pengetahuan belum tentu sikap dan perilaku yang baik. Karakter menjangkau wilayah emosi dan kebiasaan diri. Dengan demikian, diperlukan tiga komponen karakter yang baik (*components of good character*) yaitu *moral knowing* (pengetahuan tentang moral), *moral feeling* atau penguatan emosi tentang moral, dan *moral action* atau perbuatan bermoral. Hal ini diperlukan agar mahasiswa yang terlibat dalam sistem pendidikan tersebut sekaligus dapat memahami, merasakan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai moral yang bersumber kepada Pancasila.

Pelaksanaan pendidikan di perguruan tinggi secara formal melalui program kurikulum, program ekstrakurikuler serta program kegiatan kokurikuler. Sehingga dengan ketiga kegiatan program ini sangatlah berpeluang dalam membangun dan mengembangkan pendidikan karakter, sehingga generasi muda Indonesia memiliki karakter yang berjiwa Pancasila.

Sejalan dengan program pemerintah tersebut, dunia pendidikan melalui materi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan mempunyai makna penting dalam menjadikan generasi muda yang baik, yang mampu mendukung bangsa dan negara. Upaya mewarganegarakan individu atau orang-orang yang hidup dalam suatu negara merupakan tugas pokok negara. Konsep warganegara yang baik (*good citizen*) tentunya amat tergantung dari pandangan hidup dan sistem politik negara yang bersangkutan (Winarno, 2011).

Warga negara sebuah negara tidak dapat dipisahkan dari keberadaan sebuah negara yang erat kaitannya dengan aspek-aspek hukum pada sebuah negara. Persoalan kewarganegaraan dewasa ini semakin mengedepankan dan semakin luas jangkauannya. Oleh sebab itu, setiap negara di dunia akan amat memperhatikan dan bertanggung jawab terhadap warganegaranya dimanapun mereka berada (Wahab, 2011).

Berpijak pada tujuan utama pendidikan Indonesia dalam menciptakan manusia Indonesia seutuhnya, perlu dilakukan melalui penyelenggaraan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi. Yang berfokus pada pengembangan kompetensi setiap mahasiswa untuk menjadi manusia Indonesia yang cerdas,

bertanggung jawab serta memiliki perilaku yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; berperikemanusiaan yang adil dan beradab; mendukung persatuan dan kesatuan bangsa; mendukung kerakyatan yang mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan individu, dan melibatkan diri dalam upaya mewujudkan keadilan sosial (Abdulkarim, 2020:9).

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Kelima nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut merupakan suatu kesepakatan bersama bahwa nilai-nilai yang terkandung didalamnya disetujui sebagai milik bersama (Winarno, 2011:26). Para pendiri bangsa kita telah mewariskan kepada kita suatu dasar falsafah dan pandangan hidup negara dalam meraih cita-cita dan mencapai tujuan nasional (Pimpinan MPR dan Badan Sosialisasi MPR RI Periode 2014-2019, 2017:101). Sehingga tanggungjawab pembinaan karakter generasi muda tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, akan tetapi juga dituntut adanya partisipasi warganegaranya. Yang dapat melawan berbagai gerakan radikalisme di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kegiatan akademik menuntut konsentrasi mahasiswa terhadap keilmuan sehingga kegiatan sosial bukan menjadi tuntutan prioritas utama, kepekaan terhadap interaksi sosial merupakan perwujudan dari pembentukan karakter. Pendidikan karakter sangat penting diterapkan di perguruan tinggi. Mahasiswa sebagai *agent of change* perlu dibekali dengan tatanan nilai berdasarkan konsensus kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, Pendidikan karakter kebangsaan sangat diperlukan untuk membentuk kepribadian mahasiswa yang beradab sehingga secara sistemik akan melahirkan pemimpin yang baik dan bersih (Rizal dalam Yusuf, 2017).

Pelaksanaan pembentukan karakter generasi muda Indonesia, terutama bagi mahasiswa di Universitas Syiah Kuala dilakukan melalui kegiatan kurikuler, seperti melalui Mata Kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Pendidikan Agama, Pendidikan Bahasa Indonesia, Ilmu Alamiyah Dasar (IAD), Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (ISBD), Pengetahuan Kebencanaan dan Lingkungan, ditambah lagi dengan materi-materi ke-Unsyiahian, serta melalui

kuliah umum dan seminar maupun melalui kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler, yang sangat memungkinkan tentang pelaksanaan pendidikan karakter bagi generasi bangsa Indonesia.

## **SIMPULAN**

Dalam rangka mengsucceskan tugas pokok pemerintah dalam upaya mewarganegarakan warganegaranya, terutama dalam membentuk karakter warganegara, khususnya karakter generasi muda Indonesia dengan menintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Perguruan tinggi sebagai salah satu lembaga pendidikan di Indonesia, mempunyai peran penting dalam membangun dan mengembangkan karakter generasi muda Indonesia, terutamanya generasi muda Aceh. baik pelaksanaan pendidikan karakter yang dilakukan melalui dilakukan melalui kegiatan kurikuler, seperti melalui Mata Kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Pendidikan Agama, Pendidikan Bahasa Indonesia, Ilmu Alamiah Dasar (IAD), Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (ISBD), Pengetahuan Kebencanaan dan Lingkungan, ditambah lagi dengan materi-materi ke-Unsyiah, serta melalui kuliah umum dan seminar maupun melalui kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler, yang sangat memungkinkan tentang pelaksanaan pendidikan karakter bagi generasi bangsa Indonesia.

## **REFERENSI**

- Abdulkarim, Aim, dkk. (2020). *Pendidikan Pancasila: berbasis kebhinekaan Indonesia untuk perguruan tinggi*. Bandung: Laboratorium Departemen Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia.
- Kemendiknas. (2010). *Pembinaan pendidikan karakter di sekolah menengah pertama*. Jakarta.
- Lickona, T. (2015). *Educating for character how our schools can teach respect and responsibility (bagaimana sekolah dapat mengajarkan sikap hormat dan tanggung jawab)*: Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, L. (2005). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Nasution, S. (2011). *Metode research (penelitian ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Pimpinan MPR dan Badan Sosialisasi MPR RI Periode 2014-2019. (2017). *Materi sosialisasi empat pilar MPR RI*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
- Purnama, Budi, dkk. (2017). *Nilai-nilai kebangsaan yang bersumber dari UUD NRI tahun 1945*. Jakarta: Kedepatian Bidang Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan Lemhannas RI.
- Wahab, Abdul, A. & Sapriya. (2011). *Teori dan landasan pendidikan kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno. (2011). *Paradigma baru pendidikan kewarganegaraan*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Winataputra., Udin, S., & Budimansyah, D. (2012). *Pendidikan kewarganegaraan dalam perspektif internasional*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Yusuf, R. (2017). *Pendidikan karakter kebangsaan: seri praktis pembangunan karakter di perguruan tinggi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik*. Banda Aceh: Bina Karya Akademika.

# Penanaman Pendidikan Karakter dalam Membentuk Sikap dan Perilaku Anak Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka

Septi Kuntari, Nur Afiyati  
[septikuntari@untirta.ac.id](mailto:septikuntari@untirta.ac.id)

## Abstrak

Tujuan dalam penulisan artikel ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penanaman pendidikan karakter dalam pembentukan sikap dan perilaku anak melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Metode penulisan ini menggunakan meta sintesis yang merujuk pada artikel-artikel terdahulu yang relevan. Anak merupakan pewaris masa depan, seperti yang kita lihat saat ini, sikap dan moral anak pada zaman ini mengalami pergeseran. Semakin luasnya dampak globalisasi sehingga semakin meningkat juga berkembangnya teknologi, sehingga memudahkan anak untuk melakukan perilaku yang dapat dikategorikan menyimpang. Untuk itu pendidikan karakter perlu ditanamkan sejak dini untuk membentuk sikap dan perilaku yang memunculkan nilai-nilai moral yang tinggi pada anak, sehingga anak dapat membatasi diri terhadap hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam kehidupan saat ini. Hasil dari pembahasan penelitian menunjukkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler pramuka di sekolah dapat menanamkan pendidikan karakter pada anak. Kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah dilaksanakan secara terstruktur sehingga mampu membentuk sikap dan perilaku sosial anak melalui rangkaian kegiatan yang ada didalamnya, rangkaian kegiatan pramuka dilaksanakan dengan menarik dan mudah dipahami sehingga mampu menanamkan nilai-nilai karakter kepada anak serta dapat membentuk sikap tanggung jawab pada diri anak.

**Kata kunci:** *Pendidikan Karakter; Ekstrakurikuler; Pramuka*

## PENDAHULUAN

Pendidikan adalah suatu rangkaian proses dalam memberikan latihan (Syah dalam Candra, 2009). Proses pemberian tersebut membutuhkan adanya pengajaran, tuntutan, dan pimpinan mengenai kecerdasan pikiran. Pendidikan yaitu proses pembentukan perilaku dan sikap seorang individu maupun kelompok dalam mencapai usaha untuk pendewasaan dengan cara pengajaran dan pelatihan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pendidikan merupakan hal yang sangat penting, yang didalamnya mengandung pengajaran dan pelatihan untuk mengasah daya intelektual maupun keterampilan peserta didik untuk tujuan pendewasaan manusia.

Setiap anak semestinya mendapatkan pendidikan, baik yang dimulai dari pendidikan dalam lingkungan keluarga maupun pendidikan yang diperoleh setiap anak pada saat dia sekolah. Pendidikan yang diperoleh seorang anak terkadang belum mampu memunculkan dari pembentukan karakter anak melalui pendidikan karakter. Sebenarnya, pendidikan karakter dapat diterapkan jika tepat saat

penerapannya. Penerapan pendidikan karakter dinilai tepat diterapkan jika mampu membentuk nilai-nilai karakter kepada anak. Salah satu tugas dan kewajiban seorang pendidik adalah memberikan pengetahuan kepada anak didiknya. Seorang pendidik juga seharusnya mampu memberikan penanaman pendidikan karakter dalam kegiatan belajar. Dapat kita lihat bahwa pendidikan mengandung pengajaran dan pembelajaran.

Namun pendidikan terutama pendidikan karakter seharusnya tidak hanya mementingkan aspek intelektual saja, melainkan juga harus mengedepankan pendidikan karakter yang seharusnya diterapkan oleh peserta didik, yaitu aspek emosional serta aspek spiritualitasnya Chairiyah (2014). Pendidikan yang hanya berpaku pada pemberian materi didalam kelas saja tidak cukup membuat anak menguasai dan mengimplementasikan pendidikan karakter dalam kehidupan sehari-hari. Seorang anak akan jenuh dan merasa bosan ketika berjam-jam menerima materi didalam kelas. Kurangnya pendidikan karakter yang diajarkan akan mengakibatkan terjadinya krisis moral yang akan berakibat banyaknya perilaku menyimpang dalam masyarakat, seperti kekerasan, pelecehan seksual, pergaulan bebas, dan sebagainya.

Banyaknya fenomena dalam pendidikan mengenai kenakalan remaja pada saat ini bahkan tidak jarang juga terjadi kepada anak yang masih berusia dibawah umur. Semakin berkembangnya zaman, etika seorang anak mulai terkikis, teknologi merubah segala tata cara dan pola hidup manusia menjadi lebih praktis sehingga memudahkan manusia untuk berekspresi sesuai keinginan tanpa memperhatikan batasan-batasan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Sering terjadinya tawuran antar pelajar, banyak terjadi kekerasan, penganiayaan, bahkan pembunuhan antar teman maupun antar kerabat, dan juga berbagai macam kejahatan lainnya menciptakan rasa takut dan was-was terhadap warga karena hilangnya rasa aman dalam diri setiap warga masyarakat yang diakibatkan berbagai macam kejahatan yang merejalela. Fenomena ini jika terus dibiarkan akan mempengaruhi psikologi anak-anak bangsa sehingga berpengaruh pada merosotnya mental anak dalam berperilaku.

Pendidikan merupakan hak bagi setiap masyarakat dan pendidikan seharusnya didalamnya juga mengajarkan ajaran moral melalui pendidikan karakter. Sebagai masyarakat kita harus mampu memperjuangkan pendidikan yang demokratis dan di dalamnya mengandung unsur nilai-nilai moral serta yang disesuaikan dengan perkembangan masyarakat pada saat ini. Sejalan dengan hal tersebut, menurut Setiawan (2017) bahwa dalam negara demokrasi sangat diharapkan adanya suatu proses dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta berbangsa mampu sejalan memperjuangkan hak dengan lebih terbuka sesuai dengan perkembangan masyarakat.

Seperti yang dikemukakan Daryanto & Darmiatun (2013) bahwa dewasa ini Indonesia sedang digencarkan oleh menurunnya kualitas moral dalam kehidupan bermasyarakat. Bahkan pendidikan dituntut agar menyelenggarakan pendidikan karakter terutama di sekolah dalam kalangan siswa. Setiap sekolah diharapkan mampu menanamkan pendidikan karakter dengan cara memainkan peran sekaligus tanggung jawab sebagai tempat mencari ilmu agar dapat membentuk nilai-nilai karakter dan mengembangkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pendidikan karakter tidak cukup hanya diajarkan dengan pemberian teori didalam kelas saja, melainkan harus adanya praktik dilapangan sebagai penanaman sekaligus pembiasaan peserta didik dalam penerapan pendidikan karakter.

Di Indonesia saat ini implementasi pendidikan karakter memang sangat mendesak. Fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat bahkan dalam dunia pendidikan di Indonesia menjadi acuan terbesar bagi masyarakat untuk mengimplementasikan pendidikan karakter pada anak di Indonesia. Pendidikan karakter memang sangat diperlukan untuk dikembangkan di Indonesia, melihat kenakalan remaja yang semakin meningkat, seperti tawuran antar pelajar, minum-minuman keras, narkoba, kekerasan, *bullying* yang dilakukan senior terhadap junior, dan lain sebagainya. Kenakalan-kenakalan tersebut sudah banyak terjadi dalam dunia pendidikan maupun diluar pendidikan. Namun umumnya lebih banyak terjadi di kota-kota besar (Samani & Hariyanto, 2016)

Pendidikan karakter merupakan pengajaran yang lebih mengedepankan untuk menanamkan nilai-nilai moral kepada peserta didik sebagai usaha membentuk kepribadian anak yang tangguh, beretika, dan berakhlakul karimah yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter dilaksanakan dengan tujuan agar terjadinya perubahan, baik secara personal maupun lingkungan atau lembaga. Perubahan personal yaitu perubahan yang terjadi dalam individu untuk membentuk pribadi yang berkarakter sehingga individu tidak mudah terbawa arus perkembangan jaman yang negatif untuk kemudian menjadi *trend setter* positif dalam pergaulannya. Kemudian dari kepribadian individu yang berkarakter tersebut pada akhirnya akan membawa perubahan baik pada lingkungannya, misalnya dalam lembaga sekolah. Dengan karakter yang baik dalam sekolah, maka sekolah akan menjadi *school culture* dan *family culture* (Hapudin, 2018).

Berikut nilai dalam pendidikan karakter yang seharusnya ditanamkan dalam diri anak yakni religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab. Melalui ekstrakurikuler pramuka diharapkan peserta didik bisa mendapatkan pengajaran dan pelatihan mengenai penerapan pendidikan karakter bagi peserta didik.

Penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh Maunah (2015) di mana meneliti terkait implementasi pendidikan karakter dalam pembentukan karakter holistik siswa. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu metode kualitatif. Dimana hasil dari penelitian tersebut dapat ditarik dua kesimpulan yaitu pertama, pengelolaan dalam pendidikan karakter dibagi menjadi strategi internal dan strategi eksternal, kemudian simpulan kedua untuk bagian internal sekolah meliputi kegiatan belajar di kelas, kegiatan sehari-hari melalui *school culture*, *habituation*, ko-kurikuler, serta strategi eksternal dapat melalui kerjasama orang tua dan masyarakat. Lebih lanjut penelitian yang telah dilakukan oleh Ikhsan, dkk (2018) mengenai peran pendidikan karakter melalui kegiatan kepramukaan pada siswa MI bahrul ulum Jakarta barat, hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa

memiliki tanggung jawab akan hak serta kewajibannya dan hanya sedikit siswa yang kurang memiliki sikap tanggung jawab dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Dilanjutkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Elisa & Hadi (2019) dengan judul penanaman nilai-nilai pendidikan karakter siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka, mengemukakan hasil penelitiannya bahwa sudah adanya penanaman dari nilai pendidikan karakter yang diterapkan oleh pembina pramuka, cara menanamkannya yaitu dengan jalan praktek secara langsung, hal ini diketahui pada saat kegiatan observasi dilakukan.

Penelitian juga pernah dilakukan oleh Sumarto, Sulistyarini, & Parijo (2013) dengan judul penerapan pendidikan karakter melalui kepramukaan di SMA Kemala Bhayangkari 1 Kubu Raya, dengan hasil penelitian bahwa penerapan pendidikan karakter di SMA Kemala Bhayangkari 1 Kubu Raya dilakukan dengan adanya kegiatan rutin dari sekolah, yaitu meliputi kegiatan yang terjadi secara langsung atau spontan, adanya keteladanan, suatu pengkondisian dari mata pelajaran pendidikan karakter serta kegiatan ekstrakurikuler. Penelitian yang terakhir yaitu yang dilakukan oleh Marzuki & Hapsari (2015), mengenai pembentukan karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan di MAN 1 Yogyakarta, menunjukkan hasil bahwa pembentukan karakter melalui kegiatan pramuka dilaksanakan lewat peran serta dari para pembina pramuka yang telah memberikan dukungan, motivasi serta memberikan fasilitas dengan kegiatan yang menarik, modern serta menantang.

Dari hasil beberapa penelitian terdahulu dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pembentukan karakter melalui kegiatan pramuka, dibutuhkan dari peran serta pembina yang membimbing kegiatan pramuka sehingga siswa memiliki kemampuan tanggung jawab yang tinggi, hal ini menunjukkan bahwa adanya pembentukan karakter pada diri siswa kearah yang diharapkan, yaitu pembentukan karakter siswa yang dikaitkan melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang ada di sekolah masing-masing. Kegiatan yang dilakukan rutin dalam kegiatan sekolah yang telah diintegrasikan melalui ekstrakurikuler pramuka, dapat menunjukkan capaian tanggung jawab dari siswa, karena siswa mampu menerapkan atau mempraktekan di sekolah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, penulis memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui penanaman pendidikan karakter dalam membentuk sikap dan perilaku anak melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Kemudian bagaimana kegiatan ekstrakurikuler pramuka dapat melatih dan menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter melalui kegiatan-kegiatan yang menarik dan menyenangkan bagi siswa sehingga siswa dapat menerapkan nilai-nilai karakter tersebut dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam lingkungan sekolah. Hal ini diharapkan dapat membentuk sikap disiplin dan tanggung jawab yang tinggi dari siswa, melalui integrasi pendidikan karakter melalui ekstrakurikuler pramuka.

## **METODE**

Metode yang digunakan yaitu menggunakan *systematic Riview* kualitatif atau bisa disebut juga meta sintesis. Pengertian meta sintesis sendiri yaitu metode penelitian yang digunakan dengan melakukan identifikasi, evaluasi, dan juga menginterpretasi hasil penelitian yg relevan untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian. Teknik meta sintesis digunakan untuk menggabungkan beberapa data berupa data primer yang relevan untuk menghasilkan pemahaman yang baru mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Teknik meta sisntesis memiliki langkah-langkah yang sistematis dan secara urut, yang pertama mengidentifikasikan pertanyaan penelitian; kemudian melakukan pencarian literasi; kemudian menyeleksi data-data berupa jurnal, artikel, maupun skripsi yang relevan dengan topik penelitian yang diangkat; Selanjutnya memberikan kesimpulan sekaligus menyusun laporan akhir penelitian. Untuk memenuhi syarat atau langkah-langkah tersebut, terdapat pertanyaan; Bagaimana kegiatan ekstrakurikuler pramuka dapat melatih dan menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter; dan bagaimana penerapan nilai-nilai pendidikan karakter di sekolah melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Dan untuk keperluan hal tersebut, kemudian peneliti menggunakan rujukan yang berupa artikel jurnal maupun buku-buku yang relevan dengan judul yang diangkat oleh peneliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sikap Dan Perilaku Anak**

Trianingsih (2016) Pada dasarnya, anak merupakan individu yang menarik karena setiap anak memiliki karakteristik dan keunikannya masing-masing. Lucy (2016) Anak juga memiliki bakatnya masing-masing, serta setiap anak juga memiliki sikap atau perilaku yang berbeda antara anak yang satu dengan anak yang lainnya Karena, tidak ada satupun anak di dunia ini lahir dengan memiliki sikap atau perilaku yang sama. Sikap atau perilaku yang terbentuk pada diri setiap anak pada dasarnya dapat berasal dari pengaruh berbagai hal, salah satunya adalah adanya pengaruh dari lingkungan anak tersebut. Ketika orang tua menuntuk anak untuk menjadi pribadi yang bertanggungjawab, maka anak harus memiliki sikap yang menunjukkan rasa tanggung jawab. Anak yang ada di lingkungan sekolah akan dengan mudahnya bergaul dengan teman-teman sebayanya. Pembentukan karakter anak yang bisa ditunjukkan melalui sikap dan perilaku si anak dalam lingkungan sekolah, dipengaruhi oleh faktor pendidik dalam mendidik di sekolah.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pendidik yaitu membentuk sikap anak melalui penerapan pendidikan karakter melalui ekstrakurikuler pramuka. Pendidik memiliki tujuan menanamkan pendidikan karakter lewat kegiatan ekstrakurikuler pramuka yaitu agar siswa memiliki tanggung jawab dan siswa memiliki moral yang baik dalam menajlankan kehidupannya, bukan hanya di lingkungan sekoalh saja tetapi juga di lingkungan luar. Banyak anak yang terpengaruh oleh adanya perkembangan globalisasi, dimana globalisasi itu sendiri mampu merubah setiap tatanan terutama mampu merubah sikap dan perilaku siswa, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kuntari (2019) terkait globalisasi itu sendiri bahwa globalisasi tidak mungkin bisa kita hindari, karena globalisasi kemajuannya sangat pesat, setiap individu harus mampu membekali diri terutama dalam menghadapi pengaruh negatif dari globalisasi itu sendiri. Perlu sekali diterapkan pendidikan karakter melalui ekstrakurikuler pramuka agar siswa memiliki sikap dan perilaku yang diharapkan, serta siswa menjadi tidak terpengaruh oleh dampak globalisasi yang sifatnya negatif.

Menurut Mashar (2011) semakin berkembang pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju, dalam implementasiannya tidak selalu membawa dampak baik saja bagi manusia. Kehidupan kompleks dan modern juga dapat membawa individu pada keadaan yang semakin rentan mengalami berbagai gangguan baik secara fisik maupun mental atau psikologi. Hal ini juga bisa terjadi pada anak jika tanpa dibekali pengetahuan, pendidikan, dan juga pengawasan. Banyaknya Perilaku menyimpang yang terjadi pada anak merupakan salah satu sikap membuktikan bahwa anak sebenarnya belum siap menyikapi kondisi lingkungan yang ada disekitarnya. Hal tersebut tentu seharusnya menjadi perhatian para orang tua, anak sebagai generasi penerus bangsa tentu perlu dibekali dengan kemampuan untuk dapat mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki dan berusaha meminimalkan kelemahan yang dimilikinya. Periode anak merupakan tahap awal seorang individu memulai kehidupan yang akan dapat membuat sikap, perilaku, dan penentuan individu kelak di masa depan.

#### **Penerapan Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka**

Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah biasanya lebih menarik untuk peserta didik pada tingkat sekolah dasar dan juga menengah, sehingga dapat menghasilkan dampak yang luar biasa pada peserta didik untuk penanaman nilai-nilai pendidikan karakter. Contohnya dalam ekstrakurikuler tertentu peserta didik dilatih untuk mempunyai kepekaan terhadap lingkungan sekitar dengan cara bersama-sama membantu ketika terdapat terjadi banjir yaitu menolong warga yang berada di pengungsian (Suparno, 2015).

Pendidikan kepramukaan merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler di sekolah yang pelaksanaannya sangat didukung bahkan diwajibkan dalam setiap sekolah baik SD, SMP, dan juga SMA. Menurut Sumarlika (2015) berdasarkan hasil penelitiannya di SMP Negeri 4 Banyuasin III bahwa pendidikan kepramukaan sangat memiliki pengaruh positif yang besar terhadap pembentukan karakter siswa. Dimana pemberian pengaruh tersebut tidaklah mudah, bukan hanya dengan pemberian materi dan nasehat atau intruksi semata, melainkan juga dalam pembentukan karakter ini memerlukan teladan, kesebaran, habituasi, dan dilakukan secara berulang-ulang.

Di dalam ekstrakurikuler pramuka terdapat tingkatan atau jenjang yang biasanya disesuaikan berdasarkan usia atau tingkatan kelas dalam sekolah. Tingkatan tersebut terdiri dari :

1. Siaga, berumur 7-10 tahun (biasanya merupakan anak yang menduduki kelas 1-3 SD)
2. Penggalang, berumur 11-15 tahun (biasanya anak yang menduduki kelas 4 Sd sampai kelas IX SMP)
3. Penegak, berumur 15-20 tahun (biasanya merupakan siswa yang menduduki kelas X-XII SMA).

Selain 3 tingkatan tersebut, masih terdapat dua tingkatan lagi, namun biasanya bukan merupakan siswa yang masih menduduki bangku sekolah, melainkan tingkatan yang lebih tinggi lagi yaitu Pandega dan Pembina. Gerakan pramuka dilaksanakan dengan tujuan untuk membentuk sikap setiap anggotanya untuk memiliki kepribadian yang baik, beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, memiliki rasa nasionalisme, menjunjung nilai budaya dan bangsa, dan sebagainya. Sesuai kode kehormatan yang pramuka yang harus diamalkan oleh setiap anggotanya.

Kode kehormatan dalam gerakan pramuka merupakan kode etik atau budaya organisasi yang melandasi sikap dan tingkah laku setiap anggotanya. terdapat dua kode kehormatan dalam pramuka, yaitu Tri Satya dan Dasa Dharma. Namun, khusus untuk kode kehormatan pada tingkatan siaga, berbeda dengan tingkatan lainnya, karena tergolong masih berlindung kepada Bundanya. Kode kehormatan dalam tingkatan siaga yaitu Dwi satya dan Dwi Dharma. Kode kehormatan merupakan landasan organisasi kepramukaan. Berdasarkan point-point diatas dapat dilihat bahwa dari kode kehormatan pramuka sendiri sudah mengandung 18 nilai-nilai pendidikan karakter yang perlu ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari oleh setiap anggotanya. Menurut Sunardi (2013), selain memiliki kode kehormatan diatas, ekstrakurikuler pramuka juga menganut sistem among yang dicetuskan oleh Bapak pendidikan Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara. Sistem Among tersebut berbunyi: “Ing ngarso sungtolodo, Ing madyo mangon karso, tutwuri handayani”.

Sistem among juga menjadi acuan pendidikan di Indonesia. Arti dari sisem among sendiri yaitu didepan menjadi teladan, ditengah-tengah membangun semangat, dan dibelakang memberi dorongan. Dari kode kehormatan dan sistem among yang dianut tersebut, anggota pramuka diharapkan dapat menjadi pribadi yang mengamalkan nilai-nilai pendidikan karakter yang terkandung di dalamnya. Selain itu, ekstrakurikuler pramuka juga setiap pertemuannya melakukan kegiatan yang bukan melalui pemberian materi saja, melainkan kegiatan di lapangan yang membutuhkan daya nalar dan melatih kreatifitas siswa yang disajikan dengan hal-hal yang menarik dan menyenangkan sehingga tidak membuat siswa merasa bosan. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam kepramukaan yaitu Upacara, Baris-berbaris, Permainan, Berkemah dialam bebas, Lintas alam, dan Bakti Sosial terhadap warga sekitar.

Dapat kita lihat bahwa kegiatan pramuka membentuk pribadi anggotanya untuk mempunyai nilai-nilai karakter dalam dirinya, hal ini terlihat dari penerapan aktivitas maupun kegiatan yang menarik. Penerapan ekstrakurikuler pramuka sendiri pasti di laksanakan dengan berbeda antara sekolah yang satu dengan yang lainnya. Seperti penerapan kegiatan pramuka di SMP Islam Al azhar 12 Rawangun jakarta timur yang dilaksanakan dengan persiapan yang cukup matang oleh pihak sekolah, serta adanya kegiatan tersebut dilaksanakan setiap minggunya dan selalu ada evaluasi dari kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Adanya evaluasi dari kegiatan pramuka diharapkan mampu mewujudkan kepribadian siswa yang dapat mengamalkan nilai-nilai dari pendidikan karakter (Supadi & Soraya, 2020). Penerapan ekstrakurikuler pramuka yang telah dilakukan oleh pihak sekolah dimana terdapat nilai-nilai karakter didalamnya, selain kedisiplinan juga adanya suatu kebiasaan yang dilakukan dalam kegiatan pramuka yaitu melalui pembiasaan keteladanan sehingga penerapan ekstrakurikuler pramuka dapat dijalankan dengan baik dan tersusun secara sistematis (Luthviyani dkk, 2019).

### **Pembentukan Karakter melalui Kegiatan ekstrakurikuler Pramuka**

Pembentukan karakter yang ada pada diri setiap individu dilatarbelakangi oleh peran orang tua maupun peran dari pihak sekolah dalam membentuk karakter yang sesuai harapan, pendidikan karakter diharapkan dapat membentuk moral

yang baik pada diri setiap siswa. Pembentukan karakter dapat melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang dilaksanakan oleh sekolah. Penelitian yang dilakukan oleh Hikmah (2015) dengan judul upaya pembentukan karakter siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka di SDIT Salsabila 2 Klasemen Sinduharjo Ngaglik Sleman bahwa pramuka merupakan alat yang digunakan untuk membentuk karakter siswa melalui jalur pendidikan non formal yang ada dalam lingkungan sekolah. Kegiatan pramuka diajarkan dengan menarik serta menyenangkan dan tentunya mengandung unsur dari nilai pendidikan. Kemudian dilanjutkan, Samani & Harianto (2016) bahwa berbagai nilai yang terdapat dalam pendidikan karakter dapat diklasifikasikan menjadi dua cara yakni pertama, melihat keterkaitan nilai tersebut berdasarkan empat olah (olah pikir, olah raga, olah hati, olah rasa, dan olah karsa). Kedua, melihat keterkaitan atau hubungan nilai-nilai dengan kewajiban Tuhan Yang Maha Esa, kewajiban atas dirinya sendiri, kewajiban terhadap keluarga, dan juga terhadap orang lain dan lingkungan yang ada di sekitarnya. Setiap kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, sesuai dengan pelaksanaan kegiatan tersebut, apapun itu pastilah mengandung dan menanamkan nilai-nilai karakter yang perlu diterapkan oleh anggota-anggotanya.

Dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka sendiri nilai-nilai pendidikan karakter yang dikembangkan didalamnya adalah :

1. Melalui kegiatan ruangan, nilai karakter yang akan terbentuk dalam diri anak antara lain; nilai patriotisme, keberanian, kerja sama antar teman, toleransi, saling tolong-menolong,
2. Melalui kegiatan yang dilakukan didalam ruangan, lebih memfokuskan pada pembentukan jiwa kepemimpinan, melatih kreatifitas, manajemen, dan memupuk jiwa kewirausahaan.
3. Riang riya atau bernyanyi dan bertepuk tangan, yang bisa dilakukan didalam maupun diluar ruangan. Meningkatkan keceriaan dan membangun semangat anak dalam menjalankan hidup (Samani & Harianto, 2016)

Jadi dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa kegiatan pramuka membentuk karakter siswa lebih baik karena dalam pramuka diajarkan dengan menarik serta menyenangkan. Kegiatan pramuka ini dapat memunculkan nilai-nilai pendidikan

karakter yang dapat diwujudkan dalam karakter siswa masing-masing. Kegiatan yang dilakukan dalam pramuka juga lebih banyak dengan kegiatan di lapangan, hal ini memiliki tujuan salah satunya adalah agar siswa tidak merasa bosan.

### **Penanaman Pendidikan Karakter dalam Membentuk Sikap dan Perilaku Anak Melalui Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka**

Pendidikan merupakan kebutuhan setiap individu dan juga termasuk aset yang paling berharga bagi tercapainya tujuan suatu bangsa, termasuk bangsa Indonesia. Dengan adanya pendidikan dapat membantu manusia dari yang awalnya tidak mampu menjadi manusia yang mampu melakukan suatu hal dan juga menciptakan sesuatu yang bertujuan untuk kemajuan bangsa sehingga menjadikan Indonesia dipandang sebagai bangsa yang bermartabat. Pendidikan sangat berperan penting dalam upaya mempersiapkan generasi penerus bangsa yang memiliki karakter untuk menghadapi tantangan zaman yang terus mengalami perkembangan. Maka dari itu, pendidikan harus siap menciptakan peserta didik yang berkualitas, kreatif dan kompetitif, baik dalam bidang intelektual maupun dalam menerapkan sikap dan moral yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan pendidikan di Indonesia harus dilakukan secara merata baik untuk anak-anak dari kalangan yang berstatus tinggi maupun anak-anak dari kalangan yang berstatus menengah dan rendah. Pendidikan harus berorientasi pada tujuan menghadapi tantangan zaman untuk masa depan.

Penelitian yang dilakukan oleh Maulana (2017) yaitu terkait penanaman pendidikan karakter melalui ekstrakurikuler pramuka di SD NU Nurul Qur'an kecamatan singojuruh kabupaten banyuwangi, menunjukkan bahwa adanya upaya yang dilakukan oleh para Pembina pramuka dengan jalan perencanaan kegiatan ekstrakurikuler dengan pengembangan karakter disiplin. Penanaman pendidikan multikultural melalui pendidikan pramuka muncul pada sebagian dari jumlah siswa. Dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa ekstrakurikuler pramuka dapat digunakan sebagai alternatif dalam menerapkan pendidikan karakter. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Erliani (2017) dengan judul peran gerakan pramuka untuk membentuk karakter kepedulian sosial dan kemandirian (studi kasus di SDIT Ukhwah dan MIS An-Nuriyyah 2 Banjarmasin), dengan hasil bahwa

gerakan pramuka diterapkan dengan prinsip terpadu yaitu melalui tiga kegiatan pokok, yaitu adanya suatu perangkat pendukung kepramukaan yaitu meliputi prinsip, kode kehormatan, metode pramuka sebagai mata pelajaran yang wajib untuk diterapkan. Kemudian adanya beberapa kegiatan rutin yang dijalankan dalam kegiatan pramuka yang dapat membentuk karakter siswa. Selanjutnya, adanya peran gerakan pramuka dalam membentuk karakter kepribadian yang lebih mandiri.

Samani & Harianto (2016) memaknai pendidikan secara sederhana yaitu sebuah usaha sadar yang dilakukan untuk tujuan membantu para peserta didik dalam upaya melatih keterampilan sehingga dapat mengembangkan potensi maupun bakat yang dimilikinya secara maksimal dan terkontrol. Potensi itu berupa kemampuan yang berasal dari hati, pikiran, rasa, karsa, dan juga raga). Pendidikan yang dilakukan tersebut semata-mata untuk menghadapi masa depan.

Menurut Samani & Harianto (2016) karakter diartikan sebagai cara pandang dan berperilaku yang menjadi kepribadian diri dalam setiap individu yang dijadikan sebagai acuan untuk bertingkah laku dan menjalankan hidup, bekerja sama dengan individu atau kelompok, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara. Individu yang memiliki kepribadian dan berkarakter baik yaitu individu yang selain mampu untuk membuat keputusan, juga selalu siap mempertanggungjawabkan setiap resiko yang ditimbulkan akibat dari keputusan yang dibuatnya tersebut.

Dari hal yang telah dijelaskan, dapat kita pahami bahwa karakter merupakan suatu nilai yang dapat menjadi pondasi diri yang dimiliki seseorang untuk dijadikan batasan-batasan bagi dirinya sendiri untuk berperilaku sesuai dengan norma yang ada dimasyarakat. Karena keberadaan norma saja tidak cukup membuat seseorang berperilaku baik dalam masyarakat. Melainkan diperlukan adanya nilai-nilai karakter yang mengakar dalam diri, sehingga seseorang akan berpikir berulang kali untuk melakukan hal yang dipandang kurang baik dalam masyarakat dan berusaha untuk tidak melanggar norma-norma yang akan menciderai nama baik diri dan keluarga dalam lingkungan masyarakat.

Secara sederhana, karakter dapat juga disebut sebagai kunci keberhasilan bagi manusia. Pendidikan karakter pengajarannya tidak hanya sekedar mengajarkan kepada peserta didik untuk dapat membedakan mana hal yang baik yang boleh atau harus dilakukan dan mana yang buruk saja, melainkan lebih dari itu, pendidikan karakter merupakan tahapan penanaman nilai-nilai yang bersifat positif terhadap peserta didik melalui berbagai macam metode dan strategi pengajaran yang dibuat sedemikian rupa oleh pengajar agar dalam pembelajarannya lebih menarik dan mudah dipahami oleh peserta didik. Di Indonesia, pendidikan karakter menjadi suatu pergerakan yang terus didorong pelaksanaannya dalam pendidikan yang sangat mendukung adanya perkembangan sosial, perkembangan emosional, dan juga pembangunan nilai-nilai moral pada peserta didik. Pendidikan karakter merupakan upaya aktif yang dilaksanakan dalam pendidikan baik oleh sekolah sendiri maupun oleh pemerintah setempat untuk mendorong peserta didik agar dapat mengembangkan nilai-nilai pokok pendidikan karakter baik nilai etik maupun nilai-nilai kinerja seperti sikap jujur, rajin, rasa kepedulian, tanggung jawab, kerja keras dan kesabaran, dan juga saling menghargai.

Dalam kaitannya dengan pembentukan sikap dan perilaku anak, pendidikan karakter diajarkan dan ditanamkan kepada peserta didik dengan maksud untuk memfasilitasi peserta didik untuk menjadi manusia yang memiliki kualitas etika, moral, keberhasilan, kesantunan, berkewarganegaraan, kebaikan, kepatuhan, dan sebagainya, sehingga kehadirannya dapat diterima oleh orang lain dalam bermasyarakat. Pembentukan karakter pada ekstrakurikuler pramuka biasanya dilakukan dengan memberikan praktik-praktik dilapangan yang dikaitkan dengan materi yang ada dalam kepramukaan. Banyak sekali komponen pendidikan katakter yang bisa diajarkan bagi peserta didik.

Dalam peraturan Kemendikbud RI nomor 81 A tentang implemantasi Kurikulum 2013, menjelaskan bahwasanya kegiatan ekstrakurikuler merupakan salah satu kegiatan didalam pendidikan yang dijalankan peserta didik diluar dari jam belajar standar kurikulum namun masih dalam bimbingan sekolah, dengan tujuan untuk mengembangkan minat, bakat, dan segala kemampuan yang dimiliki

peserta didik. jadi, kegiatan ekstrakurikuler ini merupakan salah satu program kegiatan kulikuler yang dijadikan sebagai wadah untuk mengembangkan potensi dalam diri peserta didik dan alokasi waktu untuk pelaksanaannya tidak ditetapkan didalam kurikulum (Jalil, 2018). Sesuai dengan Undang- Undang no 12 tahun 2010 tentang Gerakan pramuka menjadi dasar hukum bagi semua komponen bangsa dalam penyelenggaraan pendidikan kepramukaan yang bersifat mandiri, sukarela, dan nonpolotis dengan semangat Bhineka Tunggal Ika. Berdasarkan Undang-Undang tersebut pula, bahwa gerakan pramuka sudah tercantum dan disahkan keberadaannya dalam undang-Undang.

## **SIMPULAN**

Kegiatan ekstrakurikuler pramuka diselenggarakan sebagai upaya penanaman moral dan juga melatih kreatifitas anak dalam menggali dan mengembangkan kemampuan dalam dirinya dan juga menciptakan kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai pendidikan karakter. Penanaman pendidikan karakter dalam membentuk sikap dan dan perilaku anak melalui pendidikan karakter dinilai mampu, dengan adanya wujud dari rasa tanggung jawab yang melekat pada diri siswa melalui penerapan sikap disiplin dalam membentuk karakter siswa, dan hal tersebut melekat erat pada diri setiap siswa. Hal ini dikarenakan setiap siswa mampu menerapkan dalam kegiatan sehari-hari terutama dalam lingkungan sekolah yang dapat dilihat dari adanya wujud sikap dan perilaku anak yang selalu taat terhadap setiap aturan yang berlaku dalam sekolah.

## **REFERENSI**

- Cairiyah. (2014). Pendidikan karakter dalam dunia pendidikan. *Literasi*, 4 (1), 42-51.
- Elisa., Prasetyo, S.A., & Hadi, H. (2019). Penanaman nilai-nilai pendidikan karakter siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka. *Mimbar Pgsd Undiksha*, 7 (2), 114-121. <http://dx.doi.org/10.23887/jjpgsd.v7i2.17553> .
- Erliani, S. (2017). Peran gerakan pramuka untuk membentuk karakter kepedulian sosial dan kemandirian (studi kasus di sdit ukhwah dan mis an-nuriyyah 2 banjarmasin. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 7(1), 35-52.

- Daryanto & Darmiatun, S. (2013). *Pendidikan karakter di sekolah*. Yogyakarta: Gava Media.
- Hapudin, M., S. (2018). *Membentuk karakter baik pada anak*. Jakarta: Tazkia Press.
- Hikmah, A., N. (2015). Upaya pembentukan karakter siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka di sdit salsabila 2 klasemen sinduharjo ngaglik sleman. *Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 7 (1), 63-74. <https://doi.org/10.14421/al-bidayah.v7i1.155> .
- Ihsan, A. N., Magdalena, I., Sa'odah., Sumiyani., Enawar. (2018). Peran pendidikan karakter melalui kegiatan kepramukaan pada siswa mi bahrul ulum Jakarta barat. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 9 (2), 112-123. <https://doi.org/10.21009/JPD.092.010> .
- Jalil, Jasman. (2018). *Pendidikan karakter : implementasi oleh guru, kurikulum, pemerintah, dan sumber daya pendidikan*. Sukabumi : CV Jejak.
- Kuntari, S. (2019). Relevansi pendidikan ips dalam arus globalisasi. *Jurnal Hermeneutika*, 5 (1), 19-26. <http://dx.doi.org/10.30870/hermeneutika.v5i1.7389> .
- Lucy, B. (2016). *Panduan praktis tes minat & bakat anak*. Jakarta: Penebar Plus (Penebar swadaya grup).
- Luthviyani, I.R., Setianingsih, E. S., Handayani, D.E. (2019). Analisis pelaksanaan ekstrakurikuler pramuka terhadap nilai-nilai karakter siswa di sd negeri pamongan 2. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 12 (2), 113-122. <https://doi.org/10.33369/pgsd.12.2.113-122> .
- Marzuki & Hapsari, L. (2015). Pembentukan karakter siswa melalui kegiatan kepramukaan di man 1 yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Karakter*, (2), 142-156 . <https://doi.org/10.21831/jpk.v0i2.8619>.
- Mashar, R. (2011). *Emosi anak usia dini dan strategi pengembangannya*. Jakarta: Kencana.
- Maulana, D. I. (2017). Penanaman pendidikan karakter melalui ekstrakurikuler pramuka di sd nu nurul qur'an kecamatan singorujuh kabupaten banyuwangi. *Jpkn*, 2 (2), 105-111.
- Maunah, B. (2015). Implementasi pendidikan karakter dalam pembentukan kepribadian holistik siswa. *Jurnal Pendidikan Karakter*, (1), 90-101. <https://doi.org/10.21831/jpk.v0i1.8615>.
- Republik Indonesia. (2010). *Undang-Undang RI Nomor 12, Tahun 2010, tentang Gerakan Pramuka*.

- Samani, M., & Hariyanto. (2016). *Pendidikan karakter*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Setiawan, R. (2017). Menjadikan kesejahteraan sebagai isu inti demokrasi. *Indonesian Journal of Sociology and Education Policy*, 2(1), 110-115.
- Sumarlika., Alfiandra & Kurnisar. (2015). Fungsi ekstrakurikuler pada kegiatan kepramukaan dalam pembentukan karakter siswa di SMP Negeri 4 Banyuasin III. *Jurnal Bhineka Tunggal Ika*, 2(2), 136-141. <https://doi.org/10.36706/jbti.v2i2.4584> .
- Sumarto, T., Sulistyarini & Parijo. (2013). Penerapan pendidikan karakter melalui kepramukaan di SMA Kemala Bhayangkari 1 Kubu Raya. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 2 (8), 1-16.
- Sunardi, A.B. (2013). *BOYMAN ragam latihan pramuka*. Bandung: Nuansa Muda.
- Supadi & Soraya, E. (2020). Manajemen kegiatan ekstrakurikuler pramuka di SMP Islam Al Azhar 12 Rawamangun Jakarta Timur. *Jurnal Improvement*, 7(1), 70-77.
- Suparno, P. (2015). *Pendidikan karakter di sekolah*. Yogyakarta : PT Kanisius.
- Traningsih, R. (2016). Pengantar praktik mendidik anak usia sekolah dasar. *Jurnal Al Ibtida*, 3(2), 197-211.

# **Rumpi (Rumah Pintar): Sekolah Dusun Berbasis Pendidikan Karakter Guna Mengatasi Dekadensi Moral di Indonesia**

**Siska Dwi Utami**  
[skadutami@gmail.com](mailto:skadutami@gmail.com)

## **Abstrak**

Kurangnya penanaman pendidikan karakter di pendidikan dan dampak negatif media massa menambah pelik penyebab dekadensi moral di Indonesia. Oleh karena itu, pendidikan karakter perlu ditanamkan pada generasi bangsa yang dapat dimulai dari pedesaan. Menanggapi hal tersebut, salah satu wujud implementasinya yaitu melalui sekolah di setiap dusun berbasis pendidikan karakter dengan melibatkan pemudanya sebagai tenaga pengajar yang dinamakan RUMPI. Sehingga tujuan penelitian ini yaitu menjelaskan konsep penerapan RUMPI guna mengatasi dekadensi moral di Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan menggunakan data kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik analisis data dari literatur yang terkait. RUMPI dilaksanakan satu minggu sekali pada hari Minggu untuk anak-anak dusun dengan kegiatannya yang terjadwal seperti melihat film edukasi, bermain permainan tradisional, dan memfasilitasi untuk bertanya PR. Harapannya, dengan konsep RUMPI dan kolaborasi mutualisme antar pihak-pihak terkait dapat meningkatkan karakter luhur seluruh generasi muda Indonesia dan menciptakan penerus bangsa yang memiliki nilai-nilai pendidikan karakter.

**Kata kunci:** *Dusun; Karakter; Moral; Pendidikan; Sekolah*

## **PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman kebudayaan hasil dari warisan nenek moyang terdahulu dengan nilai-nilai luhur di dalamnya. Budaya yang sesuai dengan nilai-nilai karakter bermartabat menjadi salah satu sumber nilai yang termuat dalam pendidikan karakter bangsa Indonesia. Pendidikan karakter dimaknai sebagai pendidikan yang mengembangkan nilai-nilai karakter pada diri peserta didik sehingga mereka memiliki nilai dan karakter sebagai karakter dirinya, menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya, sebagai anggota masyarakat dan warganegara yang religius, nasionalis, produktif, dan kreatif (Kementerian Pendidikan Nasional, 2010:4). Menurut Nucci, Narvaez, & Krettenauer (2014) pendidikan karakter memiliki makna yang lebih tinggi daripada pendidikan moral. Adapun pengertian pendidikan karakter menurut Pala (2011) adalah gerakan nasional dalam menciptakan sekolah yang mendorong kaum muda agar bermoral, bertanggung jawab, dan peduli dengan mencontoh dan mengajarkan karakter yang baik melalui penekanan pada nilai-nilai universal yang kita semua miliki.

Menurut Agbola & Tsai (2012) pendidikan karakter adalah disiplin yang tumbuh dengan upaya yang disengaja untuk mengoptimalkan perilaku etis siswa. Hasil dari pendidikan karakter selalu mendorong, secara kuat, dan terus-menerus mempersiapkan para pemimpin masa depan. Sementara menurut Mulyasa (2012) pengertian pendidikan karakter adalah suatu sistem penanaman nilai-nilai karakter pada peserta didik yang meliputi komponen: kesadaran, pemahaman, kepedulian, dan komitmen yang tinggi untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut, baik terhadap Allah Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama, lingkungan, maupun masyarakat dan bangsa secara keseluruhan sehingga menjadi manusia sempurna sesuai dengan kodratnya. Pendidikan karakter adalah pendidikan untuk membentuk kepribadian seseorang (Pesci, 2018) dan tidak hanya berhubungan dengan masalah benar atau salah, tetapi juga bagaimana menanamkan kebiasaan tentang hal-hal baik dalam kehidupan (Sanderse, 2012).

Menurut Jalaludin (2012: 2) tujuan pendidikan adalah untuk pembentukan karakter yang terwujud dalam kesatuan esensial subjek dengan perilaku dan sikap hidup yang dimilikinya. Selain itu, Verger & Novelli (2012) berpendapat bahwa fungsi pendidikan nasional yaitu untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter nasional dan peradaban yang bermartabat untuk mendidik kehidupan bangsa. Oleh karena itu, di Indonesia pendidikan karakter dimuat dalam pelaksanaan pendidikan dari jenjang sekolah atau madrasah yang paling awal sampai di perguruan tinggi. Namun, banyak lulusan sekolah dan perguruan tinggi yang memperoleh nilai akhir tinggi, akan tetapi kenyataannya mereka bermental lemah dan bermoral rendah. Mereka mudah tergoda oleh kekuasaan, kedudukan, jabatan, dan uang sehingga lupa akan tanggung jawab moral kesariaannya terhadap rakyat (Fatimah, 2012:117). Ini memberikan sebuah simpulan bahwa penanaman pendidikan karakter yang diikutsertakan dalam pendidikan di Indonesia masih rendah dan belum berhasil dalam mencetak generasi bangsa yang bermartabat dan bermanfaat bagi masyarakat.

Selain dunia pendidikan yang bersifat formal, penanaman pendidikan karakter juga memerlukan bantuan dari semua pihak termasuk dari lingkungan, terutama pada media massa televisi dan internet. Gempuran gelombang

kebudayaan asing yang masuk lewat televisi dan internet, menimbulkan banyak dampak spesifik perkembangan pola pikir (Wardani, 2013:2), termasuk dampak yang negatif. Hal ini dapat terjadi karena acara televisi yang disiarkan sekarang ini kurang mendidik dan internet yang memberikan kemudahan dalam mengakses hal apapun justru digunakan mengakses hal negatif. Salah satu contoh pengaruh negatif remaja menonton televisi adalah merasa terlalu percaya diri dan emosi yang meningkat sehingga membuatnya sukar menerima nasehat dari orang tuanya (Purwanti, 2015). Sedangkan, sisi negatif dalam dunia maya seperti kecanduan gadget *game online*, terlibat jaringan narkoba, kecanduan pornografi, dan bahkan terjerumus dalam LGBT (Syur'aini, dkk., 2018). Banyaknya dampak negatif dari media massa apabila seorang remaja tidak bisa membentengi diri, secara otomatis menambah pelik penyebab dekadensi moral selain kurang berhasilnya pendidikan karakter yang ditanamkan di dunia pendidikan.

Dekadensi moral khususnya di kalangan remaja tidak dapat dihindari lagi saat ini. Segala permasalahan yang pelik menjerat hampir seluruh remaja yang ada di negara Indonesia ini, bahkan sampai ke pedesaan (Putry, 2018:40). Sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa bangsa ini mengalami dekadensi moral pada generasi mudanya, padahal pemerintah banyak berharap pada generasi muda Indonesia dalam memajukan bangsa ini, terlebih lagi dengan adanya bonus demografi pada tahun 2045. Sehingga apabila dekadensi moral ini dibiarkan berlarut-larut, maka akan menjadi sebuah kemerosotan moral bangsa Indonesia yang merugikan bangsa dan masyarakat, serta remaja itu sendiri.

Pendidikan karakter yang memuat nilai-nilai karakter bermartabat perlu ditanamkan pada generasi bangsa yang mulai mengalami kemerosotan moral, termasuk generasi muda di pedesaan. Menanggapi hal tersebut, salah satu wujud implementasinya yaitu melalui sekolah yang berlokasi di setiap dusun berbasis pendidikan karakter dengan melibatkan pemudanya sebagai tenaga pengajar. Sekolah ini dinamakan RUMPI (Rumah Pintar) yang bertujuan mendukung implementasi penanaman pendidikan karakter di sekolah formal sekaligus sebagai upaya untuk mengurangi aktivitas pemuda-pemudi dusun yang kurang bermanfaat

dengan dioptimalkan sebagai tenaga pengajar. Dengan demikian, berdasarkan dari tujuan tersebut maka gagasan ini berpeluang untuk diimplementasikan saat ini.

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Santoso & Rusmawati (2019) dengan judul penelitian “Pendampingan Belajar Siswa di Rumah Melalui Kegiatan Bimbingan Belajar di Desa Guci Karanggeneng Lamongan.” Hasil penelitian ini berupa perkembangan motivasi siswa yang menunjukkan hasil yang positif disertai sikap antusias siswa dalam mengikuti kegiatan bimbingan belajar. Perkembangan prestasi belajar siswa rata-rata menunjukkan perkembangan yang positif menuju ke arah yang lebih baik. Selain itu, penelitian relevan lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Zahroh dan Na’imah (2020) dengan judul penelitian Peran Lingkungan Sosial Terhadap Pembentukan Karakter Anak Usia Dini di *Jogja Green School*. Hasil dari penelitian ini berupa lingkungan sosial yang terbukti memiliki peran sangat signifikan terhadap perkembangan anak, terutama dalam pembentukan karakter anak. Baik lingkungan keluarga, sekolah, teman sebaya, sosial masyarakat, dan lingkungan fisik. Keseluruhan aspek lingkungan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, harus saling mendukung dalam mewujudkan kondisi yang kondusif dalam menumbuhkan karakter anak.

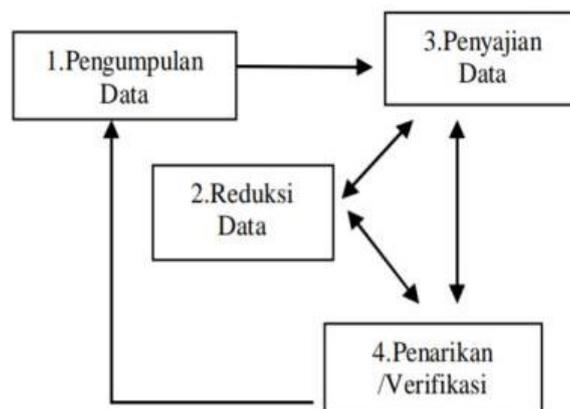
Dari latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis dapat membuat rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana konsep penerapan RUMPI guna mengatasi dekadensi moral di Indonesia? Adapun tujuan penelitian ini yaitu menjelaskan konsep penerapan RUMPI guna mengatasi dekadensi moral di Indonesia.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif sehingga data yang diperoleh bukan berupa data statistik atau data angka, melainkan data bersifat kualitatif. Penulis mendeskripsikan RUMPI sebagai sekolah dusun berbasis pendidikan karakter guna mengatasi dekadensi moral di Indonesia. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penulisan ini meliputi studi literatur (baik cetak atau elektronik) serta observasi atau

pengamatan. Prosedur pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik analisis dokumen jurnal, artikel, buku, dan sebagainya. Penulis menganalisis data dengan cara mengkaji jurnal, artikel, buku, dan sebagainya dari sumber terpercaya melalui internet. Selain itu, setelah menganalisis jurnal tersebut penulis dapat menyimpulkan hasil dan saran dari penelitian ini.

Sumber data dalam penulisan ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari jurnal, artikel ilmiah, prosiding, dan sebagainya. Sumber data sekunder didapat dari dokumentasi jurnal ilmiah, buku, dan literatur lain untuk menunjang pengembangan RUMPI sebagai sekolah dusun berbasis pendidikan karakter guna mengatasi dekadensi moral di Indonesia. Teknik analisis data menurut Bogdan & Bikler (Wandi, dkk., 2013) menjelaskan bahwa analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah data menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Teknik analisis data penelitian ini mengacu pada pendapat Miles & Huberman yang menggunakan model analisis interaktif. Tahapan analisis data tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini yaitu sebagai berikut.



Gambar 1. Model Analisis Interaktif Miles & Huberman  
(Sumber: Miles & Huberman, 1992 (Wandi, dkk., 2013))

1. Pengumpulan data, peneliti melakukan pengumpulan data dari studi literatur.
2. Reduksi data, artinya merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.

3. Penyajian data, merupakan sekumpulan susunan informasi untuk memudahkan langkah selanjutnya.
4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, kesimpulan berupa deskripsi atau gambaran obyek yang sebelumnya masih remang-remang namun, setelah diteliti menjadi jelas.

Validitas data diperoleh dengan menggunakan triangulasi sumber data. Dalam memvalidasi data yang diperoleh, penulis mengomparasikan data yang diperoleh melalui referensi-referensi dari jurnal, prosiding, buku dan artikel lainnya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sekolah Dusun sebagai Implementasi Mengatasi Dekadensi Moral**

Sekolah dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran baik menurut tingkatannya (dasar, lanjutan, tinggi) maupun jurusannya (dagang, guru, teknik, pertanian, dan sebagainya). Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pembelajaran peserta didik (murid) di bawah pengawasan pendidik (guru) dalam upaya menciptakan peserta didik (murid) agar dapat mengalami kemajuan setelah melalui proses pembelajaran (Sari, 2013:307). Sekolah sebagai tempat terselenggaranya pendidikan sudah banyak didirikan di Indonesia sebagai upaya menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berintegritas tinggi. Adanya nilai-nilai dalam rinci indikatornya digunakan untuk mengembangkan karakter melalui program-program sekolah (Sukaningtyas, dkk., 2017:263). Namun, pengembangan karakter sebaiknya bukan hanya bertumpu pada sekolah formal saja, mengingat peserta didik juga hidup di lingkungan tempat tinggalnya. Sehingga pemanfaatan lingkungan sebagai pendukung dalam penyelenggaraan pengembangan karakter sangat diperlukan. Adapun 18 nilai dalam pengembangan pendidikan karakter bangsa yang dibuat oleh Kemendiknas yaitu dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Nilai dan Deskripsi Nilai Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa

No.	Nilai	Deskripsi
1.	Religius	Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta hidup rukun dengan pemeluk agama lain.
2.	Jujur	Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.
3.	Toleransi	Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis, pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya.
4.	Disiplin	Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.
5.	Kerja Keras	Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar, tugas dan menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya.
6.	Kreatif	Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki.
7.	Mandiri	Sikap dan perilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas.
8.	Demokratis	Cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain.
9.	Rasa Ingin Tahu	Sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari sesuatu yang dipelajari, dilihat, dan didengar.
10.	Semangat Kebangsaan	Cara berpikir, bertindak, dan berwawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.
11.	Cinta Tanah	Cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan

No.	Nilai	Deskripsi
	Air	kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa.
12.	Menghargai Prestasi	Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, mengakui, dan menghormati keberhasilan orang lain.
13.	Bersahabat/ Komunikatif	Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerja sama dengan orang lain.
14.	Cinta Damai	Sikap, perkataan, dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya.
15.	Gemar Membaca	Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.
16.	Peduli Lingkungan	Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.
17.	Peduli Sosial	Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan pada orang lain dan masyarakat yang membutuhkan.
18.	Tanggung Jawab	Sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.

(Sumber: Kementerian Pendidikan Nasional, 2010)

Sekolah dengan memanfaatkan lingkungan guna mendukung penanaman pendidikan karakter pada generasi muda merupakan langkah yang tepat. Konsep sekolah lingkungan ini sudah pernah diterapkan di Indonesia pada beberapa daerah untuk mendukung pengembangan karakter pada anak-anak. Salah satu sekolah dengan konsep ini yaitu Sekolah Alam Bengawan Solo yang merupakan sekolah dasar swasta berbasis alam dengan mengembangkan kurikulum yang telah ada/ditetapkan pemerintah sebelumnya, menjadi kurikulum Sekolah Alam

Bengawan Solo yang berbasis pendidikan karakter. Keunggulan pada kurikulum ini adalah memanfaatkan sumber daya daerah sekitar aliran Sungai Bengawan Solo yang merupakan wujud/bentuk kearifan lokal budaya dan potensi ekonomi lokal sekitar (Nugraheni, 2016: 3). Sekolah tersebut tentunya sangat menguntungkan bagi peserta didik karena dapat menanamkan nilai karakter pada diri peserta didik melalui lingkungan dan kearifan lokal di sekitarnya.



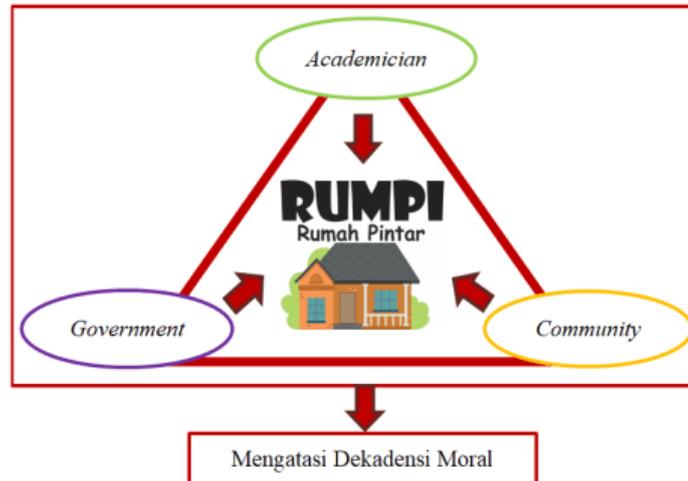
Gambar 2. Kegiatan Anak-Anak di Sekolah Alam Bengawan Solo

(Sumber: Prihatama, 2017)

Penanaman pendidikan karakter melalui sekolah yang memanfaatkan lingkungan dapat menjadi solusi permasalahan dekadensi moral generasi muda bangsa Indonesia. Pengembangan tersebut dapat diwujudkan melalui RUMPI (Rumah Pintar). RUMPI merupakan sekolah yang bertempat di setiap dusun pedesaan dengan memanfaatkan lingkungan di sekitar dusun dan kegiatan lainnya yang tidak diberikan pada sekolah formal (memasak, bermain permainan tradisional) sebagai media pembelajaran dalam menanamkan pendidikan karakter dengan mengoptimalkan pemuda-pemudi dusun sebagai tenaga pengajar. Pendirian RUMPI selain untuk penanaman pendidikan karakter, juga untuk memfasilitasi anak-anak dalam mengerjakan pekerjaan rumah (PR) yang sulit. Sehingga dengan pendirian RUMPI ini, waktu luang anak-anak dan pemuda-pemudi dusun tersalurkan secara positif.

Dalam implementasi RUMPI, diperlukan usaha kolektif dari berbagai pihak yaitu *academician* (akademisi), *community* (masyarakat), dan *government* (pemerintah). Hubungan ketiga pihak tersebut dibutuhkan dalam mengoptimalkan

RUMPI sebagai solusi mengatasi dekadensi moral di Indonesia. Adapun skema kolaborasi ketiga peran tersebut yaitu sebagai berikut.



Gambar 3. Skema Kolaborasi Antar Peran dalam Rangka Implementasi RUMPI  
(Sumber: Olahan Penulis)

Berdasarkan gambar 3, maka dapat dijabarkan fungsi dari masing-masing peran sebagai berikut.

1. *Academician* (akademisi), salah satunya adalah civitas pendidikan di lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi. Akademisi memiliki fungsi penggerak pemberdayaan masyarakat, penelitian, dan mengimplementasikan iptek berupa pengembangan lebih lanjut untuk efisiensi dan efektivitas gagasan RUMPI.
2. *Government* (pemerintah), meliputi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pemerintah berfungsi sebagai katalisator (memberi rangsangan berupa dukungan protektif, intensif, dan pelayanan publik yang baik), mensosialisasikan RUMPI, memberikan legalitas, dan regulator (membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung implementasi).
3. *Community* (masyarakat), meliputi semua warga dusun pada segala usia yang berperan aktif dalam mendukung dan mempromosikan RUMPI pada masyarakat luas dan juga dapat memelopori gerakan sekolah dusun. Anak-anak merupakan sasaran dari gagasan ini dan pemuda-pemudi dusun berperan sebagai tenaga pengajar di RUMPI. Serta, orang tua berperan memberikan kepercayaan kepada pemuda-pemudi untuk mendidik anak mereka di RUMPI.

## Konsep Pengembangan RUMPI

RUMPI (Rumah Pintar) sebagai sekolah dusun harus memiliki sesuatu yang dapat menarik minat dan memberikan kesan yang positif. Teknik memberikan edukasi karakter merupakan salah satu unsur yang penting dalam perencanaan RUMPI. Walaupun mengusung tema pendidikan, bukan berarti RUMPI dikemas membosankan seperti sekolah formal. RUMPI dikemas dengan konsep yang unik yaitu dengan adanya edukasi karakter melalui pemanfaatan lingkungan di sekitar dusun, pelaksanaan kegiatan sederhana yang bersifat mendidik, dan permainan tradisional sebagai wujud dari kearifan lokal.

Gagasan ini dapat dilaksanakan di sebuah rumah warga yang sudah mendapatkan izin, lumbung dusun (tempat penyimpanan perkakas di dusun), dan masjid. RUMPI dilakukan setiap seminggu sekali yaitu pada hari Minggu di pagi hingga siang hari. Pemilihan hari ini didasarkan pada hari libur anak sekolah dan pemuda-pemudi dari bekerja atau sekolah. Adapun jadwal kegiatan utama pada setiap minggunya akan berbeda-beda, hal ini diperlukan untuk meminimalisir rasa bosan pada anak dan sebagai daya tarik dari RUMPI. Berikut ini adalah contoh jadwal kegiatan yang dapat dilakukan di RUMPI yaitu sebagai berikut.

Tabel 2. Contoh Jadwal Kegiatan di RUMPI

### Bulan Januari

Pertemuan	Kegiatan
Minggu Pertama	<b>Jalan-Jalan → Belajar</b> Anak-anak akan dipandu oleh pemuda-pemudi untuk jalan-jalan memutari dusun sambil membawa bekal (makanan ringan dan minuman) dan tugas rumah (PR sekolah) yang sudah diperintahkan sebelumnya. Kemudian, di suatu tempat yang telah ditentukan akan istirahat dengan memakan dan meminum bekal sambil mengerjakan tugas sekolah yang sulit dengan dibantu pemuda-pemudi. Adapun pada akhir kegiatan, pemuda-pemudi akan memberikan himbauan untuk membawa sampah makanan ringan pulang untuk dibuang pada tempat sampah.

## Bulan Januari

Pertemuan	Kegiatan
Minggu Kedua	<p><b>Melihat Film Edukasi → Belajar</b></p> <p>Anak-anak akan diajak pemuda-pemudi untuk melihat film yang mengedukasi berwawasan kebangsaan Indonesia guna menumbuhkan rasa cinta tanah air seperti film Tanah Surga Katanya, Laskar Pelangi, dan Jembatan Pensil. Setelah kegiatan melihat film selesai, maka anak-anak diberi pertanyaan terkait <i>scene</i> mana yang paling disukai dan pesan moral yang didapat dari film yang ditayangkan. Setelah anak-anak dapat menjawab dan memahami pesan moral dari film, maka kegiatan akan dilanjutkan dengan belajar (mengerjakan tugas rumah dari sekolah).</p>
Minggu Ketiga	<p><b>Memasak Bersama → Belajar</b></p> <p>Anak-anak dan pemuda-pemudi akan masak bersama, dimana pada pertemuan sebelumnya anak-anak diperintah untuk membawa satu jenis sayuran (mentah) dan satu jenis lauk pauk yang sudah ditentukan (mentah), nasi (mentah), dan perlengkapan makan dari rumah. Nasi dapat dimasak dengan variasi warna (pewarna alami) sehingga anak-anak tertarik untuk memakannya. Anak-anak akan berpartisipasi aktif dalam memasak sampai setelah makan bersama (cuci piring), kemudian akan dilanjutkan dengan belajar.</p>
Minggu Keempat	<p><b>Permainan Tradisional → Belajar</b></p> <p>Anak-anak akan diajak bermain permainan tradisional seperti gobak sodor, petak umpet, singkongan, dan betengan. Di sini anak-anak diberi pemahaman terkait pentingnya kerjasama dalam kelompok, kejujuran, dan toleransi melalui permainan tradisional sebagai wujud dari kearifan lokal. Bagi anak-anak yang masih belum dapat bermain permainan tersebut, akan dilatih dan bermain permainan tradisional lainnya seperti</p>

## Bulan Januari

Pertemuan	Kegiatan
	congklak, engklek, ular naga, dan cublak-cublak suweng. Setelah puas melakukan permainan tersebut, akan dilanjutkan dengan belajar.

(Sumber: Olahan Penulis)

Kegiatan utama dari jadwal RUMPI yaitu jalan-jalan, menonton film edukasi, memasak bersama, bermain permainan tradisional, menanam tumbuhan (sayuran, bunga, buah, apotek hidup), membersihkan tempat ibadah, dan bersepeda. Setelah kegiatan utama selesai maka dilanjutkan dengan kegiatan belajar. Adapun acara puncak dari RUMPI dilaksanakan enam bulan sekali pada liburan semester sekolah yaitu dengan melakukan *outbond* di dusun atau mengunjungi tempat-tempat yang mengedukasi seperti kebun binatang dan museum. Anak-anak di RUMPI juga dilatih terkait cara menabung dan keuntungannya di masa depan, budaya 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun), dan budaya 5R (Ringkas, Rapi, Resik, Rawat, Rajin).

Belajar di RUMPI diartikan sebagai kegiatan mengerjakan pekerjaan rumah (PR) dari sekolah yang sulit untuk dikerjakan. RUMPI memfasilitasi anak-anak untuk bertanya kepada pemuda-pemudi dusun yang lebih paham akan PR tersebut. Hal ini sangat diperlukan, mengingat beberapa orang tua dari anak-anak dusun tidak lulus SD atau putus sekolah, bahkan tidak mengenyam pendidikan sama sekali. RUMPI memfasilitasi semua anak yang memiliki keinginan belajar tanpa memandang usia. Untuk anak yang masih berusia di bawah lima tahun, RUMPI memfasilitasi anak-anak tersebut belajar huruf dan mengenal lingkungan di sekitarnya seperti nama-nama binatang, alat transportasi, dan profesi.

Penanaman pendidikan karakter dengan memanfaatkan lingkungan dan kegiatan-sehari-hari (memasak, mencuci perlengkapan makan), dan permainan sebagai wujud kearifan lokal diharapkan dapat berlangsung secara terus-menerus guna memperbaiki krisis moral di bangsa ini. Ketertarikan anak-anak terhadap gagasan ini merupakan salah satu kunci untuk dapat mengeksplorasi lingkungan di sekitar sekaligus melestarikan permainan tradisional sebagai kearifan lokal

yang mulai hilang tergerus zaman. Selain itu, dengan adanya RUMPI, pemuda-pemudi dusun dapat memanfaatkan waktu luangnya (mengurangi kegiatan negatif) untuk mengajar pendidikan karakter dan mengamalkan ilmu yang dimilikinya. Hingga akhirnya dapat tercapailah tujuan dari RUMPI, yaitu mengatasi dekadensi moral generasi muda melalui kegiatan yang positif sehingga mampu menciptakan generasi bangsa yang memiliki nilai-nilai pendidikan karakter guna menjadi pemuda-pemudi yang berkarakter unggul dan luhur.

### **Analisis SWOT**

Di bawah ini adalah analisis pendirian RUMPI (Rumah Pintar).



Gambar 4. Analisis SWOT RUMPI

(Sumber: Olahan Penulis)

### **SIMPULAN**

Karakter generasi muda suatu bangsa merupakan cerminan dari nilai luhur warisan nenek moyang dan keberhasilan suatu bangsa dalam memberikan pendidikan karakter. Oleh karena itu, penanaman pendidikan karakter harus dimulai sejak anak usia dini untuk membentuk generasi muda yang berkarakter unggul dan luhur. Sehingga penanaman pendidikan karakter pada anak-anak perlu dilakukan di tiap-tiap daerah, termasuk dilakukan di pedesaan hingga unit terkecil yaitu dusun. RUMPI (Rumah Pintar): Sekolah Dusun Berbasis Pendidikan Karakter Guna Mengatasi Dekadensi Moral di Indonesia merupakan salah satu

upaya dalam mengatasi dekadensi moral khususnya pada generasi muda di era digital sekarang ini. Konsep penerapan RUMPI guna mengatasi dekadensi moral di Indonesia yaitu dengan didirikannya sekolah satu minggu sekali pada hari Minggu untuk anak-anak dusun dengan pengajar pemuda-pemudi dusun. Kegiatannya terjadwal yang memuat pendidikan karakter seperti pemanfaatan lingkungan, kegiatan-sehari-hari (memasak, mencuci perlengkapan makan), permainan tradisional, dan kegiatan utama lainnya yang mengandung nilai karakter. RUMPI juga memfasilitasi anak-anak untuk bertanya terkait PR. Selain itu, dengan adanya RUMPI maka pemuda-pemudi dusun dapat memanfaatkan waktu luangnya (mengurangi kegiatan negatif) untuk mengajar pendidikan karakter dan mengamalkan ilmu yang dimilikinya.

Dengan demikian, adanya konsep RUMPI dan kolaborasi mutualisme antar pihak-pihak terkait diharapkan RUMPI dapat meningkatkan karakter luhur seluruh generasi muda Indonesia dan menciptakan penerus bangsa yang memiliki nilai-nilai pendidikan karakter. Adapun dalam implementasinya diperlukan dukungan kuat dari segala pihak terhadap pemuda-pemudi dusun untuk tetap berperan sebagai tenaga pengajar. Sebab mereka merupakan sosok panutan dari generasi yang lebih muda dan berada di usia yang mudah terpengaruhi, terutama pada kebudayaan luar yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa.

## **REFERENSI**

- Agboola, A. & Tsai, K. C. (2012). Bring character education into classroom. *European Journal Of educational Research*, 1(2), 163-170.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2020). KBBI Daring [Online]. Tersedia di: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sekolah> (Diakses pada 18 Agustus 2020)
- Fatimah, S. (2012). Formalisme pendidikan karakter di Indonesia: telaah pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam UIN Sunan Gunung Djati*, 17(1), 115-127.
- Jalaludin. (2012). Membangun SDM bangsa melalui pendidikan karakter. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 13(2), 1-14.
- Kementerian Pendidikan Nasional. (2014). *Pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan.

- Mulyasa. (2012). *Manajemen paud*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nucci, L., Narvaez, D., & Krettenauer, T. (2014). *Handbook of moral and character education*. New York: Routledge.
- Nugraheni, H.N. dan Minsih. (2016). Pendidikan karakter dalam penerapan kurikulum di sekolah alam bengawan solo. *Artikel Publikasi. Program S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- Pala, A. (2011). The need for character education. *International Journal of Social Sciences and Humanity Studies*, 3(2), 23-32. [http://www.sobiad.org/eJOURNALS/journal\\_IJSS/archieves/2011\\_2/aynur\\_pala.pdf](http://www.sobiad.org/eJOURNALS/journal_IJSS/archieves/2011_2/aynur_pala.pdf).
- Pesci, F. (2018). *The family and affective education. in tham (ed.), sexuality, gender & education*. Roma: IF Press.
- Prihatama, Y. A. (2017). Sekolah alam bengawan solo berpijak dari kearifan lokal dan masalah sekitar. nusantara bicara [Online]. Tersedia di: <https://www.nusantarabicara.co/2017/12/sekolah-alam-bengawan-solo-berpijak.html?m=1> (Diakses pada 18 Agustus 2020).
- Purwanti, D. dan Sundari. (2015). Dampak media televisi pada perilaku negatif remaja (studi kasus desa gladagsari kecamatan ampel kabupaten boyolali). *Artikel Publikasi Ilmiah. Program S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
- Putry, R. (2018). Nilai pendidikan karakter anak di sekolah perspektif kemendiknas. *Gender Equality: Internasional Journal of Child and Gender Studies*, 4(1), 39-54.
- Sanderse, W. (2012). *Character education*. Delft: Eburon Uitgeverij B.V.
- Santoso, A., & Rusmawati Y. (2019). Pendampingan belajar siswa di rumah melalui kegiatan bimbingan belajar di desa guci karanggeneng lamongan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 36-43.
- Sari, Y. (2013). Peningkatan kerjasama di Sekolah Dasar. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 1(1), 307-467.
- Sukaningtyas, D., Djam'an S., & Udin S.S. (2017). Pengembangan kapasitas manajemen sekolah dalam membangun pemahaman visi dan misi. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 36(2), 257-266.
- Syur'aini, Setiawati, & Sunarti, V. (2018). Penanaman nilai karakter sebagai upaya mereduksi dampak negatif era digital. *Jurnal Ilmiah Teknologi Pendidikan*, 6(2).

- Verger, A., & Novelli, M. (2012). *Campaigning for “education for all”: histories, strategies and outcomes of transnational advocacy coalitions in education*. Rotterdam - Boston - Taipei: Springer Science & Business Media.
- Wardani, A. D. K. (2013). Kontribusi media massa dalam perubahan perilaku remaja di dusun Bawang, Kaloran, Temanggung. *Skripsi*. Program S1 Pendidikan Luar Sekolah. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Zahroh, S. dan Na'imah. (2020). Peran lingkungan sosial terhadap pembentukan karakter anak usia dini di *Jogja Green School*. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Anak Usia Dini*, 7(1), 1-9.

# Peran Mahasiswa dalam Menuntaskan Degradasi Moral Politik dan Merawat Demokrasi

Sismonika Puspitasari<sup>1</sup> , Imam Asrofi<sup>2</sup>  
[sismonikapuspitasari@gmail.com](mailto:sismonikapuspitasari@gmail.com)

## Abstrak

Tujuan dari tulisan ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar peran mahasiswa dalam menuntaskan degradasi moral politik serta merawat demokrasi di Indonesia. Melalui pendidikan dan literasi, diharapkan mampu menuntaskan dan menggiring generasi muda khususnya mahasiswa untuk melek terhadap politik dinegaranya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif atau kepustakaan. Mahasiswa merupakan generasi harapan bangsa sekaligus sebagai pengemban amanah demokrasi. Mahasiswa sangat berpengaruh terhadap jalannya pemerintahan di Indonesia yang saat ini mengalami berbagai masalah dari segi politiknya. Maka dari itu diperlukan peran mahasiswa sebagai *agent of change*, *agent of control*, dan sebagai unit politik di Indonesia yang semakin terdegradasi dengan adanya praktek-praktek yang melenceng dari azas-azas demokrasi.

**Kata Kunci:** *Degradasi Moral, Demokrasi, Mahasiswa, Politik*

## PENDAHULUAN

Mahasiswa merupakan generasi harapan bangsa sekaligus sebagai pengemban amanah demokrasi. Dalam sistem demokrasi di Indonesia, peran mahasiswa sangat berpengaruh, terutama dalam bidang politik. Tercatat sejarah bahwa politik di Indonesia mengalami degradasi seiring dengan cara memimpin suatu negara. Tidak ada narasi negatif tentang pemaknaan demokrasi sebagai sistem kenegaraan kita. Yang harus dibangun oleh mahasiswa adalah sikap kritis dalam mengawal terdegradasinya moral politik dan juga marwah demokrasi saat ini. Jika dibiarkan secara terus menerus, diamnya mahasiswa dalam menghadapi moral politik akan menambah fatal persoalan tersebut. Mahasiswa perlu memahami dan belajar tentang apa dampak dan akibat jika mereka senantiasa acuh dan tidak peduli terhadap demokrasi dan juga politik. Demokrasi yang sejatinya sebagai penyeimbang kekuasaan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, jangan sampai hal tersebut berbalik arah dan menjadikan bomerang bagi jati diri mahasiswa.

George Santayana, filosof Spanyol berpendidikan Amerika (1863-1952), memberikan alarm bahwa seseorang yang gagal mengambil hikmah dari sejarah dipastikan akan mengulangi pengalaman sejarah itu. Sejarah adalah siklus kehidupan yang terus berputar, dinamis, sehingga pembacaan terhadap sejarah harus terus digiatkan untuk menemukan formulasi kehidupan yang lebih baik dimasa mendatang. Sejarah adalah kontinuitas antara masa lampau, masa sekarang dan masa depan (Amin Rais, 2008). Sebagai bangsa Indonesia bisa saja kita merasa telah lepas dari penjajahan secara fisik, namun, penjajahan itu berevolusi menerkam sektor-sektor penting dari pembuluh darah bangsa ini sehingga kita tak mampu merasakan kehidupan menjadi bangsa yang sejahtera.

Dengan itu mahasiswa adalah salah satu dari pembuluh darah bangsa yang harus memiliki perhatian kritis terhadap problematika kebangsaan dari masa kemasa. Penobatan mahasiswa sebagai aktor intelektual, seharusnya tidak mendustainya dengan perilaku yang anti intelektualisme dengan membekukan kajian terhadap isu-isu kebangsaan dan keummatan di negeri ini. Begitupula kajian itu tidak semata-mata hanya sebagai produk intelektual yang hanya menghasilkan timbunan kata-kata dan aksara. Selanjutnya harus dapat di transformasikan menjadi aksi nyata, setidaknya dapat menjadi perban pada luka bangsa ini. Harapan pada generasi muda tentu harus dijawab dengan gagah berani oleh mahasiswa Jika generasi muda saja bisu melihat penyakit yang menggrogoti bangsa ini, lalu kepada siapa lagi masyarakat yang lemah dan terindas akan berharap.

Nasionalisme hari ini seperti yang diungkapkan oleh Amin Rais layaknya Nasionalisme yang dangkal. Semua orang meneriakkan pembelaan terhadap merah putih hanya dalam hal-hal yang bersifat simbolik belaka. Namun ketika kekayaan alam dikuras oleh korporasi, semuanya terdiam. Tak heran bila aktor reformasi itu mengatakan kemerdekaan Indonesia adalah “Semu” belaka, karena sebagai bangsa tenggelam dan tak mampu mandiri berdiri diatas kaki sendiri. Indonesia kini mengalami luka dan sakit yang parah. Semua orang mungkin saja sadar, namun tak banyak dari mereka yang sadar nuraninya tergugah, ada yang nuraninya tergugah namun tidak memiliki kemampuan untuk merubah. Pada

posisi-posisi yang genting itu seharusnya dan selayaknya mahasiswa mampu menempatkan diri mengisi celah-celah yang kosong untuk menyokong bangsa ini berdiri dari kelelahannya memikul beban sejarah yang tak kunjung usai. Nalar mahasiswa sebagai salah satu actor intelektual muda seharusnya memberikan desakan-desakan terhadap pemimpin bangsa ini untuk segera kembali kepada cita-cita awal kemerdekaan. Jika sikap pemimpin bangsa terus saja bertindak arogan dan hanya memikirkan kepentingan sekelompok orang maka bisa saja Indonesia terkapar di selokan peradaban. Pancasila yang sampai saat ini menjadi kebanggaan bangsa ini belum mampu diwujudkan sepenuhnya. Sila yang paling sial adalah sila ke-5 yaitu “*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”. Padahal keinginan untuk merdeka berawal dari keinginan untuk memenuhi keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat bangsa ini. Sejak kemerdekaan sampai saat ini rakyat Indonesia masih saja tunggang langgang menghadapi kemiskinan yang menimpa dirinya. Keadilan dari seluruh sektor kehidupan belum dapat dirasakan oleh rakyat negeri ini. Benarkah kemerdekaan Indonesia hanya sampai di depan pintu gerbang saja.

Kelumpuhan demokrasi dan hilangnya keadilan dari bangsa ini harus kembali dijadikan perhatian bersama oleh semua pihak khususnya generasi muda. Karena mau tidak mau bangsa ini akan dipegang oleh kaula muda. Menyuarakan keadilan dan menuntut demokrasi agar tidak dijadikan alat untuk melegitimasi kepentingan sepihak harus diselesaikan secepat mungkin. Demokrasi dan keadilan yang menjadi masalah bangsa ini adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Sehingga mahasiswa juga memiliki tugas mendesak keadilan keatas (elite politik) dan mencerdaskan otak dan pencerahan hati masyarakat luas agar tidak lagi menjadi mangsa retorik politik yang membius dan membungkam.

Menurut Davidson (2008) yang menyebabkan demokrasi di Indonesia berkualitas rendah karena mempunyai aturan hukum yang lemah, banyaknya korupsi dan kurangnya transparansi, adanya oknum elite politik yang menindas kaum minoritas, cacat dalam hal kebebasan beragama dan penindasan kaum minoritas agama tertentu, yang terjadi pelanggaran, pelanggaran hak asasi manusia oleh oknum militer yang tidak diproses hukum, kesediaan para legislator

dalam menerima suap sebagai imbalan dukungan, akses rakyat terbatas dalam politik. Dalam buku *Perubahan Konstitusi dan Demokrasi di Indonesia*, dalam survey Bank Dunia, meskipun nilai pemerintahan Indonesia masih rendah, tetapi sepanjang dasawarsa ini mengalami kenaikan akibat tamatnya rezim Suharto. Munculnya perubahan-perubahan yang positif dan menonjol dalam indeks bank, adanya perubahan dalam pemberantasan kasus korupsi.

Di era globalisasi ini, degradasi moral generasi muda sangat memprihatinkan. Dapat kita lihat dalam kaca mata pribadi, bahwa masih banyak mahasiswa yang mulai acuh terhadap situasi politik dinegaranya. Oleh karena itu, pendidikan dan literasi tentang moral, politik perlu dipahami lagi oleh mahasiswa guna untuk acuan dasar mereka dalam menentukan sikap sebagai agen perubahan di negaranya. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2009 menegaskan Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 tahun sampai 30 tahun. Sedangkan ayat 2 berbunyi Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.

Guna memenuhi kebutuhan akan demokrasi dinegaranya agar selamat, maka generasi muda diharapkan untuk bangkit dalam melawan segala bentuk mara bahaya yang terjadi di negaranya. Generasi muda harus mampu mengintegrasikan dalam mengawal dan memberikan pemahaman tentang politik pada masyarakat, sehingga tujuannya untuk melahirkan demokrasi yang bersih, jujur, berkualitas, dan terhindar dari berbagai penyimpangan.

## **METODE**

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif atau penelitian kepustakaan, yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang di peroleh baik dari bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Setelah data terkumpul dilakukan pengolahan data dengan cara koding, disistematiskan dan di kelompokkan sesuai dengan pokok permasalahan yang

hendak dijawab. Selanjutnya dilakukan analisis data secara kualitatif dan hasilnya disajikan dalam bentuk deskriptif untuk ditarik suatu kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Mahasiswa**

Demokrasi Indonesia terdapat nilai-nilai yang lahir dari perjuangan kaum muda, yang kemudian sejarah mencatatnya sebagai kelahiran Budi Oetomo, Tri Koto Dhormo yang kemudian berubah nama menjadi Jong Java dan diikuti lahirnya berbagai organisasi mahasiswa seperti HMI, PMII, GMNI, IMM dan GMKI yang saat ini masih eksis dan berkembang dalam pergerakan demi pergerakannya, dari dahulu kala di tangan para mahasiswa gagasan menjadi sebuah kenyataan. Selain sebagai insan akademik yang sedang menuntut ilmu, pembelajaran politik bagi mahasiswa juga penting namun dengan tetap tidak melupakan orientasinya sebagai pencari pengetahuan yang benar untuk kemudian ditransformasikan melalui berbagai jalur yang menjadi basis profesionalismenya. Selain kewajiban menimba ilmu sebanyak-banyaknya mahasiswa juga berkewajiban mengabdikan dirinya untuk agama, masyarakat dan bangsa.

Tindakan partisipatoris mahasiswa adalah kumpulan penting bagi tegaknya demokrasi dan merupakan cerminan pemahaman dan kecintaanya terhadap sistem demokrasi Indonesia. Mahasiswa memiliki tanggungjawab mengawal perjalanan demokrasi. Kesalahan terbesar yang sering terjadi adalah aspirasi yang dipraktikkan secara non demokratis, *sporadic* dan cenderung amoral. Kebiasaan ini menjadi terus tergambar oleh kelompok dan individu mahasiswa. Pemahaman politik dalam kehidupan berdemokrasi membuat peran menjaga keutuhan dan perbedaan tidak lagi dirasa penting. Hari ini degradasi pergerakan mahasiswa kian menjamur, penyebutan *the agent of change* mulai keluar dari garis pergerakan yang semestinya. Hal ini terus dilakukan dan dijadikan suatu konsep dalam hati tiap mahasiswa secara umum dan fungsionaris organisasi mahasiswa secara khususnya. Mahasiswa dituntut untuk memiliki kemampuan dan keterampilan ekstra dalam menyikapi keadaan lingkungan dan harus peka terhadap isu dalam hiruk pikuknya bangsa ini. Kemunduran pergerakan dan pemikiran mahasiswa

saat ini menghawatirkan akan mempengaruhi demokrasi 5 atau 10 tahun mendatang.

Dalam sistem demokrasi Pemilu merupakan bagian darinya. Sangat diperlukan peran dari semua elemen masyarakat terutama kaum terpelajar seperti mahasiswa, sudah seharusnya ikut merawat demokrasi dengan mengawal system demokrasi Indonesia ini. Tahun 2019 merupakan pesta Demokrasi yang menyita perhatian publik, hal ini dikarenakan adanya keserentakan dalam pemilu tahun 2019 yang memiliki perbedaan dengan pemilu 2014. Mulai dari penyelenggaraan, jumlah parpol peserta Pemilu, hingga metode perhitungan suara parpol. Perbedaan itu ditandakan dengan digabungkannya Undang-Undang Pileg, Undang-Undang Pilpres, dan Undang-Undang penyelenggaraan Pemilu menjadi hanya UU Pemilu saja. Maka, tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan banyak kejangggalan, kecurangan dan fitnah yang menimbulkan kegaduhan bangsa ini. Semenjak di tetapkan calon nahkoda tertinggi bangsa ini isu-isu negative kian menjadi-jadi untuk menjatuhkan antar dua calon Presiden dan wakil Presiden serta antar partai politik. Banyak orang yang menyalahgunakan demokarasi yang ada dengan menyebarkan informasi yang bersifat provokasi yang menyebabkan terjadinya perselisihan dalam masyarakat. Makanya mesti ada pengembalian karakter dan keadaan yang sudah hilang pada diri mahasiswa.

Sebagai intelektual yang disiapkan untuk membangun bangsa mahasiswa dituntut untuk berfikir kritis dan berpengetahuan luas. Ditangan merekalah masa depan demokrasi ini akan dipertaruhkan, apakah cukup dengan keadaan sekarang atau ada perubahan yang mereka ciptakan. Pengamatan kritis terhadap pemerintahan sekarang akan menjadi batu pijakan mahasiswa untuk membangun indonesia dimasa mendatang. oleh karenanya peran mahasiswa sekarang jangan ditutup oleh kepentingan kelompok yang tidak bertanggung jawab.

### **Mempertegas kembali Peran Mahasiswa**

Mahasiswa kaum terdidik yang sudah menanamkan jati dirinya sebagai manusia yang peka terhadap keadaan sekitar terutama agama dan bangsa. Ada banyak yang mesti diperbaiki di negeri ini baik dari sector ekonomi, politik dan hukum semua itu membutuhkan control dan pemikiran dari mahasiswa. Tidaklah

berguna seseorang mahasiswa apabila tidak ingin ada perubahan dan kemajuan dari bangsanya sendiri.

Seperti yang dijelaskan diatas setidaknya ada dua tugas penting bagi mahasiswa. Pertama, *the agent of change* mahasiswa dituntut untuk membuat perubahan dalam setiap kondisi. Kehidupan akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Pada posisi inilah peran mahasiswa sangat dibutuhkan. Dengan ambisi muda yang menggebu-gebu dan daya nalar sangat tinggi memudahkan menemukan permasalahan yang cocok dengan zamannya. Pengamatan dari zaman sebelumnya juga menjadi pintu penghubung untuk semua permasalahan. Disinilah fungsi sejarah akan dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan para intelektual muda.

Kedua, Sebagai *agent of control* artinya mahasiswa dan kaum terdidik seharusnya mengembalikan fungsi mengawasi yang sudah melekat pada diri mahasiswa dalam merawat kehidupan berdemokrasi. Peran yang mulai hilang hendaknya cepat disadari sebagai suatu keburukan dan tidak akan menjadikan bangsa ini lebih baik. Maka dalam Pemilu 2019 mahasiswa harus memahami dan berpartisipasi baik dari segi hak suara maupun memberikan kontribusi terbaik dalam mengawal pesta demokrasi dengan berbagai cara. Tidak terkecuali baik individu maupun organisasi mahasiswa.

### **Perlunya Pemahaman Kembali Terhadap Demokrasi**

Kesadaran terhadap pemahaman demokrasi semakin merosot dikalangan pelajar dan mahasiswa. Terbukti dengan banyaknya pernyataan-pernyataan mahasiswa yang mengatakan tidak percaya terhadap system Negara dalam menyelenggarakan pemilihan pimpinan bangsa ini, bahkan dengan penyelenggara, pengawas dan pengamanan. Hal ini perlu tindakan baik pemerintah dan lapisan akademisi untuk memberikan pemahaman terutama anak muda sebagai penerus. Seputar pentingnya demokrasi baik melalui kurikulum pendidikan maupun melalui pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Karena sangat miris melihat pemuda yang mudah terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman untuk merubah system bangsa ini.

Mulainya kekikisan demokrasi haruslah dibarengi dengan penanaman pemahaman baru terhadap demokrasi. Diantaranya ialah membangun budaya demokrasi yang mengakar didalam lubuk hati terdalam kelapisan masyarakat terlebih para generasi penerus. Dalam membangun kontruksi pembangunan demokrasi ini haruslah dileburkan dalam sikap dan perilaku hidup keseharian maupun kehidupan kenegaraan.

Penanaman karakter demokrasi dalam kehidupan merupakan salah satu hal jitu dalam memahamkan kaulah muda tentang demokrasi. Pendidikan karakter demokrasi akan menjadikan kaum muda memiliki karakter yang demoktaris. Dengan karakter itu mereka tidak akan mudah dimasuki pemahaman yang menyimpang. Seperti memberoktak ke pemerintahan yang sah.

### **Kembalikan Netralitas Organisasi Mahasiswa**

Pemilihan Presiden dan pemilihan anggota legislatif tingkat provinsi dan daerah sangat berpengaruh terhadap senior dan ideologi organisasi. Hari ini organisasi mahasiswa sedang diuji untuk mengendepankan idealis dan independensi organisasi. Terutama pimpinan organisasi mahasiswa sebagai *public figure* yang menjadi panutan haruslah memberikan pemahaman kepada kader-kadernya bahwa mengawal demokrasi sangatlah penting dari pada sibuk menyatakan sikap terhadap calon pilihannya.

Secara aturan tidak ada yang salah menyatakan sikap terhadap pilihannya, namun sebagai perkumpulan mahasiswa yang mempunyai kekuatan secara ideologi dan massa, maka peran organisasi mahasiswa sangatlah diharapkan demi terciptanya keharmonisan dalam pesta demokrasi saat ini. Dalam pidatonya, Presiden Pertama Indonesia Ir. Soekarno pernah mengatakan "Jangan mewarisi abu sumpah pemuda, tapi warisi Api sumpah pemuda, kalau sekedar mewarisi abu, saudara akan Indonesia yang sekarang sudah satu bahasa, satu bangsa, dan satu tanah air".

### **Moral Politik Indonesia**

Kualitas sumber daya manusia dapat menentukan nasib bangsa di masa depan. Sember daya manusia yang baik tidak hanya dibentuk dengan pengetahuan saja, tetapi harus melibatkan partisipasi masyarakat dalam isu atau permasalahan

yang berkaitan dengan politik. Partisipasi politik masyarakat merupakan bentuk aktualisasi dari demokrasi dalam politik yang akan mendukung demokratisasi sesuai dengan nilai-nilai demokrasi, yaitu adanya keterbukaan, kebebasan, dan aturan yang berlaku.

Sebagai masyarakat politik kita harus mendorong setiap orang atau setiap individu untuk bertindak mensosialisasikan kepentingan masing-masing agar muncul atau tumbuh serta melahirkan kesepakatan bersama tanpa merugikan orang lain atau pihak manapun. Contoh bahwa politik telah bergabung, yaitu ketika kita bersaing dengan tetangga sebelah rumah untuk mendapatkan suatu jabatan rukun warga untuk tetangga, atau berdebat mengenai tingginya tarif transportasi umum yang dipengaruhi oleh kenaikan harga bahan bakar minyak dunia.

Berbicara mengenai partisipasi, berarti juga membicarakan atau membahas persoalan kerelawanan dalam bertindak. Yang menarik pada pemilihan Presiden Republik Indonesia lalu, di Indonesia sekarang ini banyak sekali relawan yang berasal dari kalangan anak muda untuk mensukseskan pesta demokrasi di tahun 2019, seperti pengawas TPS, KPPS dan lain-lain. Dilain sisi juga banyak pemuda yang acuh bahkan golput dalam pesta demokrasi pada tahun 2019. Keberadaan partai politik dinilai dan dipandang untuk mendapatkan kesadaran masyarakat melalui peran politik, partai politik baru atau menyadari pentingnya memperhatikan anak muda sebagai potensi pemilih suara dari kalangan masyarakat.

Generasi anak muda adalah generasi yang memberikan keuntungan bagi partai politik dikarenakan ilmu pendidikan politik pada generasi muda ini di berikan secara intensif dengan kesadaran berpolitik yang tinggi dan berdemokrasi dalam berproses politik pasti akan terwujud pendidikan politik sangat penting bagi generasi muda karena mereka adalah generasi pemilih di masa akan datang. Generasi anak muda yang ada di Indonesia ini sangat berpengaruh pada politik karena anak muda sekarang ini lebih dikenalkan pada pendidikan politik, politik dibangun sedini mungkin agar demokrasi proses politik tercapai. Hal yang perlu diperhatikan dalam membangun wawasan politik generasi muda adalah

pentingnya nilai-nilai demokrasi. Berdasarkan hal tersebut dikatakan bahwa kalangan anak muda saat ini mudah mendapatkan informasi tentang politik dari berbagai media baik secara langsung dari mulut ke mulut cetak maupun online.

Indonesia menganut sistem demokrasi dalam tata cara pemerintahannya. Pemilihan umum dilakukan oleh satu orang untuk satu suara tanpa memandang tingkat pendidikan ekonomi dan status sosial bila tidak berpartisipasi dalam pemilihan umum suara yang tidak digunakan bisa saja digunakan oleh pihak tertentu sebab setiap warga negara berhak memilih dan dipilih tentunya partisipasi dan kesadaran akan pentingnya politik bagi generasi muda harus dilandasi oleh hasrat untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu mulai dari sekarang generasi anak muda Indonesia harus aktif berpolitik boleh mengikuti dalam pemilihan umum atau menyampaikan aspirasinya dengan tidak menggunakan kekerasan pada orang lain. Agar demokrasi ini berkualitas dapat terwujud atau tersampaikan.

Politik yang ada di Indonesia saat ini mengalami kerusakan yang begitu parah dengan hukum yang tidak jelas yang mereka buat sendiri justru merekalah yang melanggar. Kita sebagai warga Indonesia membutuhkan pemimpin yang bertanggungjawab, adil, mau mengajari, mengayomi, dan menolong rakyatnya dengan kualitas kepribadian seorang pemimpin tersebut. Tetapi di Indonesia ini sulit menemukan seorang pemimpin yang mempunyai jiwa yang adil serta bertanggung jawab di zaman sekarang ini, dimana pada zaman sekarang ini banyaknya kasus korupsi yang dilakukan oleh seorang pemimpin itu sendiri. Politik di Indonesia sistem pemerintahannya sangat kacau. Korupsi belum bisa diberantas sampai pada akar-akarnya.

Pada tahun-tahun belakangan ini banyak pengangguran. Dan banyak rakyat yang depresi dikarenakan mirisnya keadaan perekonomian mereka. Bahkan belum terlihat usaha pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dan hal yang terjadi pada saat ini adalah orang yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Dengan adanya kasus korupsi yang merajalela. Tidak ada tindak lanjut dari pemerintah, mereka hanya memberikan janji manis yang tidak terealisasikan. Dengan harga sembako semakin mahal dan melonjak tinggi.

Banyak sekali rakyat yang kelaparan. Pemerintah tidak memikirkan hal itu, yang mereka pikirkan hanya materi dan materi.

Jalan satu-satunya untuk mengubah hal itu agar efektif, yaitu untuk generasi kita saat ini diharapkan untuk melahirkan generasi kita yang baru seperti anak bayi yang baru lahir yang nantinya akan diajari dan diarahkan untuk menjadi seorang pemimpin yang bertanggungjawab. Pemimpin yang tidak akan melakukan sebuah tindakan yg tidak diinginkan. Dan tidak mementingkan diri sendiri. Dengan itu para pemimpin harus bisa lebih bertanggungjawab, jika ingin menjadikan negara indonesia ini menjadi negara yang lebih baik di tahun yang akan datang.

Kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin di masa yang akan datang adalah sebagai berikut:

1. Pemimpin harus terbuka dan jujur

Kejujuran merupakan faktor terpenting bagi seorang pemimpin. Kepercayaan masyarakat akan pemimpinnya ditentukan dengan kejujuran dan keterbukaan pemimpin. Sehingga dalam konteks demokrasi masyarakatlah kontrol tertinggi bagi seorang pemimpin. Pemimpin hanyalah seorang yang ditugaskan masyarakat untuk mengurus urusannya. Maka dari pemimpin harus bisa bersikap terbuka dan jujur agar dapat dipercaya oleh masyarakat.

2. Pemimpin memiliki tingkat proposional yang tinggi

Pemimpin dituntut pula memiliki pengetahuan yang luas, memiliki keterampilan dan oleh bahasa yang fasih dan lugas. Seorang pemimpin dengan pengetahuan yang luas akan mudah menjalankan program pemerintahannya dengan detail dan cermat. Pengalaman pengetahuan ini digunakan sebagai batu pijakan dalam untuk menyusun program pemerintahan. Hal yang harus diperhatikan lagi ialah tentang kefasihan bahasa seorang pemimpin. Pemimpin dengan suara yang lantang dan mudah dipahami akan menjadi pembakar semangat untuk para masyarakat seperti apa yang praktekkan bung Karno yang dijuluki singa podium. Dan yang Tak kalah penting adalah mampu berdiplomasi dengan beberapa negara yang barang tentu harus menguasai bahasa internasional untuk memudahkannya.

### 3. Memiliki visi dan misi dimasa depan

Visi merupakan komponen terpenting yang digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan misi-misi. Seseorang yang memiliki visi cenderung mempunyai motivasi, tekad dan keinginan yang sangat tinggi untuk menghadapi tantangan. Pemimpin haruslah memiliki tekad untuk membuat perubahan baru. Bukan hanya mengikuti kebijakan yang telah ada tetapi juga berani merombak ataupun membuat keputusan baru.

### **Demokrasi**

Indonesia telah menerapkan beberapa bentuk demokrasi, yaitu demokrasi liberal (1950-1959), demokrasi terpimpin (1959-1965), dan demokrasi Pancasila (1966-sekarang). Dibandingkan demokrasi yang lain, demokrasi Pancasila lebih cocok dan memiliki kekhasan tersendiri. Mei 1998, gerakan reformasi berhasil menjatuhkan negara Orde Baru. Berawal pada masa itu dinamika politik di Indonesia meningkat tajam, yang antara lain ditandai oleh ledakan-ledakan partisipasi politik (*Explosions of political participation*). Pada dekade pertama sejak jatuhnya Orde Baru, bentuk-bentuk partisipasi politik tidak-konvensional (*unconventional political participation*), menonjol dan secara kuantitatif mengungguli bentuk-bentuk partisipasi politik konvensional (*unconventional political participation*). Demokrasi dijelaskan sebagai bentuk pemerintahan yang bertopang pada kedaulatan rakyat bukan kedaulatan pemerintah maupun pemimpin. Sehingga dalam demokrasi di Indonesia rakyat pemegang kekuasaan tertinggi di negara.

Sistem demokrasi di Indonesia sejak orde baru menganut Demokrasi Pancasila, yaitu di masa pemerintahan Soeharto masyarakat Indonesia dilibatkan secara langsung dalam menentukan pemimpin negaranya melalui Pemilihan Umum. Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi kedaulatan rakyat dimana peneraannya sesuai dengan sila-sila dalam Pancasila. Meskipun demikian, di era ini praktik demokrasi belum bisa dijalankan dengan maksimal karena sistem pemerintahan Soeharto yang masih mendasarkan pada kekuatan militernya, terhadap kelompok minoritas dan kelompok agama. Tetapi, penerapan Demokrasi Pancasila yang berdasar nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

merupakan sistem pemerintahan yang memungkinkan untuk diterapkan di Indonesia dibandingkan dengan konsep demokrasi lain yang pernah gagal diterapkan di Indonesia. Demokrasi Pancasila merupakan perbuatan dari realitas masyarakat Indonesia yang mempunyai ciri beragam atau multikultural, namun tetap menempatkan budaya gotong royong sebagai ciri khas dan persatuan di atas segala perbedaan. Penerapan sila ke 4 musyawarah untuk mencapai suatu mufakat merupakan bukti bahwa Demokrasi Pancasila tujuannya mengutamakan keselarasan, keseimbangan, dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan.

Tantangan demokrasi di Indonesia sejak era reformasi mulai terlihat dari kebebasan pers dan kebebasan berpendapat di kalangan masyarakat dalam mengkritik pemerintah. Namun di sisi lain, era reformasi juga membawa dilema tersendiri untuk bangsa ini, salah satunya yaitu karena kebebasan berpendapat kerap disalahgunakan sebagai penegasan terhadap kelompok tertentu atas nama mayoritas. Hal tersebut tentunya menjadi permasalahan tersendiri bagi bangsa ini dan dapat mencederai hakikat Demokrasi Pancasila.

Banyak kita temukan konflik berbasis perbedaan agama dan budaya terjadi di masyarakat. Melihat situasi politik belakangan ini, banyak politikus yang memanfaatkan isu-isu SARA untuk saling menyerang lawan politik mereka demi mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Kasus ini dapat mencederai Demokrasi Pancasila dan memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

Sebagai bangsa demokratis, negara harus mengakomodasi aspirasi atau suara rakyat karena dalam sistem demokrasi rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi atas pemerintahan yang dijalankan. Oleh karena itu, sebagai upaya menjalankan demokrasi yang bebas, adil, dan jujur, penentuan pemimpin harus dilakukan melalui pemilihan umum yang melibatkan penuh aspirasi rakyat, atau kata kuncinya adalah legitimasi. Dengan kata lain, legitimasi merupakan suatu tolok ukur prinsip demokrasi dijalankan dengan baik atau tidak karena legitimasi merupakan representasi dari suara rakyat yang seharusnya dijadikan referensi utama oleh negara dalam menentukan pemimpin. Musyawarah untuk mencapai mufakat yang merupakan prinsip utama demokrasi juga harus dilakukan secara

bertanggung-jawab karena dengan cara inilah rakyat dapat menentukan harapan bersama dengan tetap menjaga kerukunan sosial-politik.

Melalui sektor pendidikan, negara harus memberikan pendidikan politik dan demokrasi yang baik agar kebebasan berpendapat dapat diutarakan dengan kritis, santun, dan bertanggung jawab. Satu hal yang terpenting dari penerapan demokrasi yang kita jalankan yaitu harus berdasar pada kemanusiaan karena demi terciptanya suatu masyarakat yang adil, makmur, dan beradab.

## **SIMPULAN**

Mahasiswa sangat perlu mengikuti organisasi untuk belajar mempersiapkan dirinya karena mahasiswa sebagai *agent of control* tentang masalah degradasi moral di Indonesia saat ini. Pentingnya nalar berfikir dengan mengikuti organisasi pergerakan mahasiswa saja tidak cukup jika tidak diiringi dengan usaha mengembangkan diri dan meningkatkan intelektualitas. Kemampuan membaca keadaan dan menerjemahkan lapangan sangat diperlukan oleh mahasiswa. Sehingga dalam menjalankan tugasnya mahasiswa mampu menjadi ambasadur dalam merawat kewarasan demokrasi yang terselenggara di Indonesia.

Perlakuan elite politik yang memperlakukan demokrasi secara semanya sendiri dan mementingkan kepentingan golongan daripada kepentingan rakyat jika dibiarkan akan berakibat pada bobroknya demokrasi di tanah air. Selain itu perlu adanya sanksi tegas bagi mereka yang melanggar aturan dalam berdemokrasi. Sehingga keadilan dalam bernegara tidak tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Sudah selayaknya kita sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus tampuk peradaban untuk bersikap murni dalam praktek-praktek demokrasi. Memperjuangkan suara rakyat dan beerdasarkan kepentingan rakyat. Betapa gelisahnya pahlawan kita yang sekarang berbaring di dalam kubur mereka jika kita bertingkah seolah-olah sebagai pemuda yang diam melihat keburukan dan bersikap apatis seolah-olah masalah tersebut sudah wajar terjadi. Semoga kita sebagai mahasiswa yang tahu ilmu pengetahuan bukan hanya sekedar dihafalkan, tetapi diamalkan.

## **REFERENSI**

- Amas, M. (2011). *Narasi demokrasi*. Yogyakarta. Mata Padi Pressindo.
- Arnitasari., Hartati, N. *Posisi Kaum Muda Dalam Pancasila Dan Negara Bagi Indonesia*.
- Donald, H. (2014). *Perubahan konstitusi dan demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Idham, H., et. al. (2019). *Integritas kebangsaan generasi muda di kawasan Timur Indonesia*.
- Juhansya, I. (2013). *Peran mahasiswa merawat demokrasi*  
[www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com).
- Rais, A. M. (2008). *Agenda mendesak bangsa: Selamatkan Indonesia*. PT Mizanc Publika.
- Sahya, A. (2013). *Sistem politik Indonesia*. Bandung. Pustaka Setia.
- Sumodiningrat, dkk. (2015). *Revolusi mental*. PT.Buku Seru.
- Suhanda, C., Mukhadi, &Poespito Hadi, W. (2019).Peran seskoad dalam mendidik calon pemimpin di era globalisasi. *Jurnal Strategi dan Kampanye Militer*. 5(1).
- Widodo,T. (2011). Memahami makna praksis pelaksanaan pembelajaran sejarah kontroversia.paramita: *Historical Studies Journal*. 21(2)

# **Penguatan Karakter Empati Mahasiswa Kebidanan Melalui Metode Sosiodrama pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan**

**Supriyono<sup>1</sup>, Muhammad Mona Adha<sup>2</sup>**  
[supriyono@upi.edu](mailto:supriyono@upi.edu)

## **Abstrak**

Penguatan karakter empati pada mahasiswa kebidanan dapat dilakukan melalui pendidikan kewarganegaraan. Kemampuan penggunaan metode untuk menguatkan karakter harus dimiliki seorang dosen. Tujuan penelitian ini yaitu menguatkan karakter empati mahasiswa kebidanan melalui metode sosiodrama pada pendidikan kewarganegaraan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi literatur. Partisipan yang dilibatkan dalam penelitian ini yaitu dosen dan mahasiswa jurusan kebidanan yang mengontrak mata kuliah pendidikan kewarganegaraan di Politeknik Kesehatan Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan menggunakan metode sosiodrama pada mahasiswa kebidanan dapat menguatkan karakter empati. Karakter empati pada mahasiswa terbentuk melalui proses mengamati, menghayati dan menganalisa masalah pada drama yang ditampilkan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan.

**Kata Kunci:** *Karakter, Sosiodrama, Pendidikan Kewarganegaraan*

## **PENDAHULUAN**

Kondisi karakter bangsa Indonesia yang memprihatinkan sekarang ini, mendorong pemerintah untuk mengambil inisiatif untuk memprioritaskan pembangunan karakter. Secara historis dan sosio-kultural pembangunan bangsa dan pembangunan karakter (*nation and character building*) merupakan komitmen nasional yang telah lama tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara (Ruyadi dkk, 2011). Mengenai hal tersebut, secara konstitusional sesungguhnya sudah tecermin dari Fungsi dan Tujuan Pendidikan Nasional yaitu Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat berilmu, demokratis cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang yang demokratis dan bertanggung jawab. Berdasarkan hal tersebut dapat juga disebutkan bahwa (1) karakter merupakan hal sangat esensial dalam berbangsa dan bernegara, hilangnya karakter akan menyebabkan hilangnya generasi penerus bangsa; (2) karakter berperan sebagai “kemudi” dan

kekuatan sehingga bangsa ini tidak terombang-ambing; (3) karakter tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus dibangun dan dibentuk untuk menjadi bangsa yang bermartabat. Selanjutnya, ditegaskan bahwa pembangunan karakter bangsa harus difokuskan pada "...tiga tataran besar, yaitu (1) untuk menumbuhkan dan memperkuat jati diri bangsa, (2) untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan (3) untuk membentuk manusia dan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia dan bangsa yang bermartabat.

Pendidikan karakter pada anak harus ditanamkan sejak dini melalui pendidikan di keluarga untuk pembentuk akhlak yang mulia. Melalui pendidikan di tingkat sekolah maka seorang anak akan mendapatkan pendidikan karakter. Penanaman karakter pada mahasiswa di perguruan tinggi sangat penting sebagai kelanjutan pendidikan karakter di keluarga dan sekolah. Oleh karena itu, sekarang ini dalam kurikulum pendidikan nilai-nilai karakter lebih dikedepankan dalam pembelajaran. Akan tetapi hingga sekarang ini sayangnya praktik pendidikan yang masih mengagung-agungkan ranah kognitif saja dan mengabaikan ranah afektif serta psikomotor seringkali ditemukan. Padahal dengan demikian pembelajaran yang tersebut sangat bertentangan dengan kerangka yuridis pendidikan nasional. Hasil dari proses pembelajaran hanya akan melahirkan mahasiswa berpengetahuan luas secara akademik akan tetapi memiliki karakter atau akhlak yang tidak baik. Mahasiswa yang seharusnya memiliki kematangan dalam bersikap karena pendidikan yang sudah diperolehnya sejak di tingkat sekolah sampai perguruan tinggi justru menunjukkan sikap yang bertolak belakang. Hampir 75% mahasiswa baik di Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta menggunakan busana yang tidak patut ketika kuliah. Cara berperilaku dan komunikasi mahasiswa dengan dosen seringkali menggunakan bahasa gaul yang membuat tidak nyaman (Kompasiana.com, 2016). Hal tersebut menunjukkan bahwa, masalah kemerosotan moral sudah melanda kalangan mahasiswa. Diperlukan sebuah penguatan karakter melalui pendidikan sehingga kedepannya pendidikan akan menghasilkan orang-orang yang profesional dibidangnya sekaligus memiliki akhlak mulia.

Profesional dan akhlak mulia menjadi prioritas hasil pendidikan di perguruan tinggi. Begitu juga dengan mahasiswa jurusan kebidanan yang ngedepankan professional dan akhlak mulia setelah lulus nantinya. Salah satu akhlak mulia yang dikuatkan bagi mahasiswa jurusan kebidanan yaitu rasa empati. Karakter empati menjadi penting bagi mahasiswa jurusan kebidanan karena tugas yang diemban nantinya membantu persalinan. Rasa empati digambarkan sebagai orang yang toleran, dapat mengendalikan diri, ramah, memiliki pengaruh dan bersifat humanistik (Sari, dkk, 2003). Karakter empati inilah yang harus terbentuk pada mahasiswa jurusan kebidanan. Karakter empati tidak dapat muncul dengan sendirinya pada diri seseorang. Mahasiswa perlu diberikan pembelajaran mengenai kajian-kajian masalah atau kasus yang membuka kepekaan hatinya. Kemampuan merasakan apa yang dialami orang lain inilah yang akan membuat seseorang empati seolah-olah mengalami sendiri peristiwa tersebut (Eisenberg & Fabes, 1989). Oleh karena itu, program pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sangatlah tepat untuk membentuk karakter empati. Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia perlu lebih menfokuskan kepada aspek yang mendorong peserta didik memikirkan dan berefleksi tentang situasi dan kondisi sekitarnya, tentang dirinya, keluarganya, masyarakat dan negara serta bongsanya secara lebih cerdas dan berjangka panjang (Kalidjernih, 2009). Pendidikan Kewarganegaraan diarahkan untuk mencapai dua sasaran pokok yang seimbang yaitu *pertama* meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik tentang etika, moral dan azas-azas dalam hidup berbangsa dan bernegara. *Kedua* membentuk sikap perilaku dan kepribadian sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Sekarang ini yang diperlukan hanyalah metode pembelajaran apa yang sekiranya tepap dapat digunakan untuk membentuk karakter empati.

Model pembelajaran yang tepat mengkaji kasus-kasus dan dapat memberikan pengalaman belajar menyenangkan bagi mahasiswa yaitu metode pembelajaran sosiodrama. Model pembelajaran dengan menggunakan metode sosiodrama merupakan bentuk pendramatisan peristiwa-peristiwa kehidupan yang terjadi dalam masyarakat. Kebaikan dari model belajar sosiodrama melatih mahasiswa untuk mendramatisasikan sesuatu serta melatih keberanian (Ahmadi,

2005). Model Belajar Sosiodrama, titik tekanannya terletak pada keterlibatan emosional dan penghayatan masalah. Dengan demikian, mahasiswa tidak hanya menerima penjelasan materi secara teoritis tetapi juga ikut mengamati, menghayati dan menganalisa masalah yang sedang diperankan. Kemudian bagaimana penguatan karakter empati mahasiswa kebidanan melalui metode sosiodrama pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan inilah yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini. Oleh karena itu agar penelitian tidak meluas maka masalah dibatasi pada 1) membangun karakter melalui pendidikan kewarganegaraan, dan 2) penguatan karakter empati melalui metode sosiodrama. Tujuan dari penelitian ini yaitu bagaimana muangatkan karakter empati pada mahasiswa jurusan kebidanan melalau pendidikan kewarganagaraan.

Penelitian-penelitian mengenai pembentukan karakter melalui pendidikan kewarganegaraan seringkali dilakukan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Tri Hardini mengenai peningkatan keaktifan dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKn melalui metode sosiodrama di kelas 5 SD Tlompakan 01-Tuntang. Selain itu, juga penelitian yang dilakukan oleh Premita Sari Octa Elviana menegnai pembentukan sikap mandiri dan tanggung jawab melalui penerapan metode sosiodrama dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dari kedua penelitian yang sudah dilakukan sama-sama melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan metode sosiodrama tetapi memiliki tujuan yang berbeda dalam pencapaian pembelajarannya. Begitu juga penelitian yang dilakukan ini memiliki pembaharuan dalam menguatkan karakter empati pada mahasiswa jurusan kebidanan melalui metode sosiodrama dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Sesuai fungsinya, penelitian kualitatif digunakan untuk menggali informasi secara mendalam, seperti menelaah peranan, sikap, nilai, dan persepsi. Metode deskriptif digunakan oleh peneliti untuk mendeskripsikan suatu peristiwa atau masalah sebagai sumber pembelajaran. Hal ini sesuai pendapat (Nasution,

1992) bahwa penelitian deskriptif digunakan untuk memberi gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi sosial. Peneliti mendeskripsikan peristiwa atau masalah disajikan dalam metode sosiodrama pada pembelajaran pendidikan kewarganegaraan.

Partisipan yang dilibatkan dalam penelitian ini yaitu dosen pendidikan kewarganegaraan dan mahasiswa yang mengontrak matakuliah pendidikan kewarganegaraan. Penelitian dilakukan pada mahasiswa jurusan kebidanan di politeknik Kesehatan Bandung. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui observasi, wawancara dan studi literatur. Observasi dilakukan di kelas pada matakuliah pendidikan kewarganegaraan ketika metode sosiodrama digunakan dalam pembelajaran. Wawancara dilakukan kepada dosen dan delapan mahasiswa yang dipilih secara acak di dalam kelas yang berbeda. Studi literatur digunakan untuk mengkaji teori-teori yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian yang didapatkan melalui observasi dan wawancara kemudian dilakukan pembahasan dengan dukungan teori-teori yang relevan dari studi literatur. Pembahasan hasil penelitian dilakukan untuk menjawab permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Pembahasan hasil penelitian dideskripsikan sebagai berikut:

### **Membangun Karakter Melalui Pendidikan kewarganegaraan**

Karakter adalah mustika yang membedakan manusia dengan binatang. Manusia tanpa karakter adalah manusia yang sudah membinatang. Orang-orang yang berkarakter kuat dan baik secara individual maupun secara sosial ialah mereka yang memiliki akhlak, moral dan budi pekerti yang baik. Menurut Coon (Zubaedi, 2012) mendefinisikan karakter sebagai suatu penilaian subjektif terhadap kepribadian seseorang yang berkaitan dengan atribut kepribadian yang dapat atau tidak dapat diterima oleh masyarakat. Karakter merupakan keseluruhan disposisi kodrati dan disposisi yang telah dikuasai secara stabil yang mendefinisikan seorang individu dalam keseluruhan tata perilaku psikis yang menjadikannya tipikal dalam cara berpikir dan bertindak. Menurut Ekowarni

(Zubaedi, 2012) pada tatanan mikro karakter diartikan sebagai (a) kualitas dan kuantitas reaksi terhadap diri sendiri, orang lain, maupun situasi tertentu; dan (b) watak, akhlak dan ciri psikologis. Sebagai aspek kepribadian karakter merupakan cerminan dari kepribadian secara utuh dari seseorang: mentalitas sikap dan perilaku, Secara universal berbagai karakter dirumuskan sebagai nilai hidup bersama berdasarkan atas pilar kedamaian (*peace*), menghargai (*respect*), kerjasama (*cooperation*) kebebasan (*freedom*), kebahagiaan (*happiness*), kejujuran (*honesty*), kerendahan hati (*humility*), kasih sayang (*love*), tanggung jawab (*responsibility*), kesederhanaan (*simplicity*), toleransi (*tolerance*) dan persatuan (*unity*). Karakter (*character*) mengacu pada serangkaian sikap (*attitudes*), perilaku (*behaviors*), motivasi (*motivations*) dan keterampilan (*skills*).

Membangun karakter diakui jauh lebih sulit dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Situasi dan kondisi karakter bangsa yang sedang memprihatinkan telah mendorong pemerintah untuk mengambil inisiatif untuk memprioritaskan pembangunan karakter bangsa. Pembangunan karakter bangsa dijadikan arus utama pembangunan nasional. Hal ini mengandung arti bahwa setiap upaya pembangunan harus selalu diarahkan untuk memberi dampak positif terhadap pengembangan karakter.

Jika dilihat dari sudut pandang pembangunan bangsa faktor yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menentukan prioritas pengembangan karakter adalah (1) kebutuhan menjaga keutuhan bangsa; (2) kebutuhan untuk membangun masyarakat berakhlak mulia; (3) kebutuhan untuk menjadi bangsa yang maju; (4) Kebutuhan untuk meningkatkan kemakmuran bangsa secara berkelanjutan; dan (5) kebutuhan untuk menegakan keadilan. Proses pembentukan karakter pada seseorang dipengaruhi oleh faktor khas yang ada dalam diri orang yang bersangkutan yang sering disebut faktor endogen dan oleh faktor lingkungan atau yang sering disebut faktor eksogen. Perlu diingat bahwa faktor endogen boleh dikatan sebagai faktor yang berada di luar jangkauan masyarakat. Segala sesuatu yang berada dalam pengaruh kita, baik sebagai individu maupun bagian dari masyarakat adalah faktor lingkungan (eksogen). Secara normatif, pembentukan atau pengembangan karakter yang baik memerlukan kualitas lingkungan yang

baik pula. Sekian banyak faktor lingkungan yang berperan dalam pembentukan karakter yaitu keluarga, media masa, lingkungan sosial dan lembaga pendidikan (Raka, dkk, 2011).

Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan karakter mahasiswa. Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata kuliah umum di perguruan tinggi dirumuskan secara luas untuk mencakup proses penyiapan generasi muda untuk mengabil peran dan tanggung jawabnya sebagai warganegara dan secara khusus peran pendidikan termasuk didalamnya persekolahan, pengajaran dan belajar dalam proses penyiapan warganegara. Menurut (Cogan, 1999) bahwa *Civic Education, the fundamental course work in school designed to prepare young citizen for an active role in their adult lives* atau suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warganegara muda agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif di dalam masyarakat. Dari situ tampak bahwa dari pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dilihat sebagai suatu domain pendidikan yang bersifat multi dimensional dan tersebar secara programatik dalam keseluruhan tatanan kurikulum. Dalam hal ini lebih lanjut (Cogan, 1999) mengungkapkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya digunakan dalam pengertian luas di dalam lembaga pendidikan formal (di sekolah dan dalam program pendidikan guru) dan diluar sekolah baik berupa program lain yang berfungsi memfasilitasi proses pendewasaan atau pematangan sebagai warganegara.

Rumusan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan akan berbeda-beda sejalan dengan tujuan nasional negara masing-masing. Secara umum tujuan negara mengembangkan program Pendidikan Kewarganegaraan adalah agar setiap warganegara menjadi warga negara yang baik (*to be good citizens*) yakni warganegara yakni yang memiliki kecerdasan (*civic intelegence*) baik secara intelektual, emosional sosial maupun secara spiritual mempunyai tanggung jawab (*civic responsibility*) dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Mengembangkan strategi dan model pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan menggunakan pendekatan terpadu, diperlukan adanya analisis kebutuhan (*needs assessment*) mahasiswa dalam belajar Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam kaitan ini diperlukan adanya serangkaian kegiatan, antara lain:

- a. Mengidentifikasi isu-isu sentral yang bermuatan moral dalam masyarakat untuk dijadikan bahan kajian dalam proses pembelajaran di kelas dengan menggunakan metode klarifikasi nilai.
- b. Mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan mahasiswa dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan agar tercapai kematangan moral yang komprehensif yaitu kematangan dalam pengetahuan moral perasaan moral, dan tindakan moral.
- c. Mengidentifikasi dan menganalisis masalah-masalah dan kendala-kendala instruksional yang dihadapi oleh para dosen di perguruan tinggi dan para orang tua mahasiswa di rumah dalam usaha membina perkembangan moral mahasiswa, serta berupaya memformulasikan alternatif pemecahannya.
- d. Mengidentifikasi dan mengklarifikasi nilai-nilai moral yang inti dan universal yang dapat digunakan sebagai bahan kajian dalam proses pendidikan moral.
- e. Mengidentifikasi sumber-sumber lain yang relevan dengan kebutuhan belajar pendidikan moral.

Dengan memperhatikan kegiatan yang perlu dilakukan dalam proses aplikasi Pendidikan Kewarganegaraan tersebut, kaitannya dengan kurikulum yang senantiasa berubah sesuai dengan akselerasi politik dalam negeri, maka sebaiknya pendidikan moral juga dilakukan penngkajian ulang untuk mengikuti *competetion velocities* dalam persaingan global.

### **Penguatan Karakter Empati Melalui Metode Sosiodrama**

Karakter masyarakat Indonesia sebelum kemerdekaan terbilang sangat kuat, hal tersebut dapat terlihat dari perjuangan para pahlawan dalam mencapai kemerdekaan. Semangat persatuan, rela berkorban dan tidak putus asa merupakan karakter yang dimiliki oleh para pahlawan sehingga hanya bermodalkan senjata bambu runcing dapat membuat penjajah keluar dari tanah air

Indonesia. Sekarang ini masyarakat Indonesia tidak sekuat pada masa lalu, sudah sangat rapuh. Semangat juang bangsa ini nyaris hilang ditelan berbagai godaan dan kepentingan sesaat. Menurut (Gede Raka, dkk, 2011) kondisi karakter bangsa Indonesia saat ini dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Kebiasaan korupsi yang sulit diberantas.

Negara Indonesia masih dikategorikan sebagai salah satu negara yang terkorup di wilayah Asia Pasifik. Semua orang tau bahwa kebiasaan korupsi merupakan manifestasi nyata dari akhlak yang rusak. Namun, banyak orang yang tetap saja melakukan tindakan tercela tersebut. Menjadi sangat mencemaskan bahwa sikap yang menerima korupsi sebagai hal yang tidak bisa dihindari, serta sirnanya perasaan bersalah dan rasa malu pada mereka yang melakukan tindakan korupsi.

2. Lemahnya kedisiplinan

Hal yang sangat memprihatinkan, lebih dari setengah abad sesudah negara Indonesia merdeka, pendidikan kita belum mampu menghasilkan warganegara Indonesia yang mampu mentaati peraturan. Lebih mencemaskan lagi, ketidaktaatan itu semakin meluas dan makin dianggap sebagai hal yang biasa.

3. Melemahnya jiwa keindonesiaan

Kaum muda Indonesia makin menonjolkan kepentingan daerahnya daripada kepentingan bangsa. Masyarakat Indonesia seperti kehilangan cita-cita bersama yang bisa mengikatnya sebagai bangsa yang kokoh, masyarakat kita lebih menonjolkan cita-cita golongan untuk mengalahkan golongan lain.

4. Menurunnya kemampuan untuk menerima dan menghargai perbedaan

Aktualisasi semangat Bhinneka Tunggal Ika yang ada di Pancasila belum dapat dilakukan secara optimal. Hal tersebut terlihat dari semakin banyaknya tindakan kekerasan atau pemaksaan kehendak yang dilakukan oleh suatu kelompok terhadap kelompok lain yang dianggap berbeda, apalagi jika kelompok yang berbeda ini dinilai lebih lemah.

#### 5. Kurangnya rasa keterdesakan

Sudah banyak wacana mengenai pentingnya perubahan yang disampaikan oleh para pejabat, namun perubahan yang diharapkan tidak kunjung terwujud atau dirasakan berjalan terlambat. Salah satu penyebab terjadinya keadaan seperti ini adalah kurangnya rasa keterdesakan.

#### 6. Kesenjangan antara yang diketahui dan yang dilakukan

Banyak orang yang tau tentang perilaku dan sikap yang baik, namun melakukannya dalam kehidupan sehari-hari sebaliknya. Jadi, ada kesenjangan antara yang dikatakan dengan yang dilakukan.

Pengembangan nilai-nilai karakter tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhan. Dengan demikian, dalam pengembangan nilai-nilai karakter dapat menambah ataupun mengurangi sesuai dengan kebutuhan, tujuan dan targetan dalam suatu masyarakat atau lembaga-lembaga tertentu. Seperti pada mahasiswa calon bidan maka pengembangan karakter menekankan pada sikap empati. Sikap empati yang harus tertanam pada mahasiswa calon bidan tentunya akan sesuai dengan kebutuhan profesinya menjadi pelayan masyarakat dalam membantu kelahiran seorang ibu. Dengan demikian mata kuliah pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib umum memiliki tanggungjawab dalam pembentukan karakter empati mahasiswa.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai kajian ilmu kependidikan yang memusatkan perhatian pada pengembangan warganegara yang cerdas, demokratis dan religious serta memiliki karakteristik yang multidimensional perlu dilihat dalam tiga kedudukan. *Pertama*, Pendidikan Kewarganegaraan sebagai suatu bidang kajian ilmiah mengenai *civic virtue* dan *civic culture* yang menjadi landasan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai program kurikuler dan gerakan sosial budaya kewarganegaraan. *Kedua*, Pendidikan Kewarganegaraan sebagai program kurikuler yang memiliki visi dan misi pengembangan kualitas warganegaran yang cerdas, demokratis dan religious baik dalam lingkungan pendidikan di perguruan tinggi maupun diluar perguruan tinggi yang berfungsi sebagai dasar orientasi dari keseluruhan upaya akademis untuk memahami fenomena dan masalah-masalah social secara inter disipliner sehingga mahasiswa dapat mengambil keputusan

yang benar dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi individu, masyarakat, bangsa dan negara. *Ketiga*, Pendidikan Kewarganegaraan sebagai gerakan sosial-budaya kewarganegaraan yang sinergistik dilakukan dalam upaya membangun *civic virtue* dan *civic culture* melalui partisipasi aktif secara cerdas, demokratis dan religius di lingkungannya. Penguatan karakter empati melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dirasa cocok dengan menggunakan metode sosiodrama. Metode sosiodrama merupakan metode mengajar dengan cara mempertunjukkan kepada peserta didik tentang pembelajaran tertentu (Anitah, 2009). Di sisi lain (McLennan, 2011:407) berpendapat, “*Sociodramais a step-by-step tool of creative, dramatic exploration that uses role-playing and improvisation to help participants explore, analyze and resolve everyday social issues*”. Sosiodrama adalah langkah kreatif, eksplorasi dramatis yang menggunakan bermain peran dan improvisasi untuk membantu peserta mengeksplorasi, menganalisis dan menyelesaikan isu-isu sosial sehari-hari.

Menurut Bennet (Romlah, 2001), sosiodrama adalah permainan peranan yang ditunjukkan untuk memecahkan masalah sosial yang timbul dalam hubungan antar manusia. Dalam sosiodrama individu akan memerankan suatu peranan tertentu dari situasi masalah sosial. Pendapat lain dari (Winkel & Hasturi, 2004) sosiodrama merupakan salah satu teknik dalam bimbingan kelompok yaitu role playing atau teknik bermain peran. Sosiodrama merupakan dramatisasi dari persoalan-persoalan yang dapat timbul dalam pergaulan dengan orang lain, tingkat konflik-konflik yang dialami dalam pergaulan sosial. Permainan sosiodrama yaitu suatu jenis permainan yang melibatkan kelompok dan masing-masing anggota kelompok memerankan suatu peran yang dimainkan. Permainan sosiodrama merupakan salah satu jenis dari *pretend play*. Permainan sosiodrama sangat berperan dalam perkembangan kreatifitas, inteligensi, keterampilan sosial dan perkembangan bahasa. Permainan sosiodrama adalah suatu alat penyelesaian masalah yang digunakan anak untuk belajar dan juga sebagai sarana yang dapat membantu para dosen untuk belajar tentang mahasiswanya. Metode sosiodrama merupakan metode mengajar dengan cara mempertunjukkan kepada peserta didik tentang masalah-masalah hubungan sosial, untuk mencapai tujuan pembelajaran

tertentu. Masalah hubungan sosial tersebut didramatisasikan oleh peserta didik di bawah pimpinan guru. Melalui metode sosiodrama dosen ingin mengajarkan cara-cara bertingkah laku dalam hubungan antar sesama manusia. Cara yang paling baik untuk memahami nilai sosiodrama adalah mengalami sendiri sosiodrama, mengikuti penuturan terjadinya sosiodrama dan mengikuti langkah-langkah guru pada saat memimpin sosiodrama (Anitah, 2009).

Kelebihan metode sosiodrama menurut (Anitah, 2009) yaitu:

- 1) Mengembangkan kreativitas peserta didik,
- 2) Menumbuhkan bakat peserta didik dalam seni drama,
- 3) Peserta didik lebih memperhatikan pelajaran karena menghayati sendiri,
- 4) Memupuk keberanian berpendapat di depan kelas,
- 5) Melatih peserta didik untuk menganalisis masalah dan mengambil kesimpulan dalam waktu singkat.

Sedangkan kelemahannya adalah:

- 1) Adanya kurang kesungguhan para pemain menyebabkan tujuan tak tercapai, dan
- 2) Pendengar sering menertawakan tingkah laku pemain sehingga merusak suasana.

Mansyur (Sagala, 2003) mengemukakan kebaikan metode sosiodrama ialah: 1) murid melatih dirinya untuk melatih, memahami, dan mengingat bahan yang akan didramakan; 2) mahasiswa akan terlatih untuk berinisiatif dan berkeratif. Pada waktu bermain drama para pemain dituntut untuk mengemukakan pendapatnya sesuai dengan waktu yang tersedia; 3) bakat yang terpendam pada mahasiswa dapat dipupuk sehingga dimungkinkan akan muncul atau timbul bibit seni dari perguruan tinggi. Jika seni drama mereka dibina dengan baik kemungkinan besar mereka akan jadi pemain yang baik kelak; 4) kerja sama antar pemain dapat ditumbuhkan dan dibina dengan sebaik-baiknya; 5) anak memperoleh kebiasaan untuk menerima dan membagi tanggung jawab dengan sesamanya, dan 6) bahasa lisan mahasiswa dapat dibina menjadi bahasa yang baik agar mudah dipahami orang lain.

Sedangkan kelemahan teknik sosiodrama, antara lain: (1) sebagian besar anak yang tidak ikut bermain drama mereka menjadi kurang aktif; (2) banyak memakan waktu, baik waktu persiapan dalam rangka pemahaman isi bahan pelajaran maupun pada pelaksanaan pertunjukkan; (3) memerlukan tempat yang cukup luas, jika tempat bermain sempit menyebabkan gerak para pemain kurang bebas, dan (4) kelas lain sering terganggu oleh suara pemain dan para penonton yang kadang-kadang bertepuk tangan dan sebagainya. Kelebihan metode sosiodrama antara lain: (1) melatih peserta didik untuk berkreasi dan berinisiatif, (2) melatih peserta didik untuk memahami sesuatu dan mencoba melakukannya, (3) memupuk bakat peserta didik yang memiliki bibit seni dengan baik melalui sosiodrama yang sering dilakukannya dalam metode ini, (4) memupuk kerja sama antar teman dengan baik, dan (5) membuat mahasiswa merasa senang, karena dapat terhibur oleh fragmen teman-temannya. Sedangkan kekurangannya antara lain: (1) pada umumnya yang aktif hanya yang berperan saja, (2) cenderung dominan unsur kreasinya daripada kerjanya, karena untuk berlatih sosiodrama memerlukan banyak waktu dan tenaga, (3) membutuhkan ruangan yang cukup luas, (4) sering mengganggu kelas lain yang sedang KBM.

## **SIMPULAN**

Pendidikan kewarganegaraan sebagai mata kuliah wajib umum di perguruan tinggi pada dasarnya mempersiapkan manusia untuk memiliki kepribadian, wawasan kebangsaan, dan mencintai tanah air. Kepribadian mahasiswa yang dibentuk melalui proses pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan disesukan dengan visi dan misi perguruan tinggi. Pada mahasiswa program studi kebidanan disiapkan untuk memiliki karakter empati sesuai dengan profesi mahasiswa nantinya sebagai tenaga medis yang memiliki tugas pelayanan masyarakat. Penguatan karakter empati pada mahasiswa melalui pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dilakukan dengan metode sosiodrama. Metode sosiodrama sangat tepat untuk membentuk karakter empati mahasiswa karena mahasiswa dapat menghayati peran dan jalan cerita dalam drama tersebut.

## REFERENSI

- Ahmadi. (2005). *Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi belajar mengajar*. Bandung: Pustaka Setia.
- Anitah, Sri. (2009). *Media pembelajaran*. Surakarta: Panitia Sertifikasi Guru Rayon 13 FKIP UNS Surakarta.
- Cogan, J.J. (1999). *Developing the Civic Society, the Role of Civic Education*. Bandung: CICODE.
- Elviana, P. S. O. (2017). Pembentukan sikap mandiri dan tanggung jawab melalui penerapan metode sosiodrama dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. *Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(1), 134-144.
- Eisenberg, N & Fabes, (1989). *The roots of prosocial behavior in children*. New York: Cambridge University Press
- Hardini, T. (2015). Peningkatan keaktifan dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran PKn melalui metode sosiodrama di kelas 5 SD Tlompakan 01-Tuntang. *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 5(3), 120-135.
- Kalidjernih, Freddy K (2009). *Puspa ragam konsep dan isu kewarganegaraan*. Bandung: Widya Aksara Press.
- McLennan, D.M.P. (2011). "Using sociodrama to help young children problem solve". *Early Childhood Education Journal*. Springer Science & Business Media.
- Nasution. (1992). *Buku penuntun membuat karya ilmiah: makalah, skripsi, disertasi, tesis*. Bandung: Jemmars.
- Ruyadi, Y., dkk. (2011). *Membentuk karakter mahasiswa calon guru melalui penciptaan kultur akademik ilmiah, edukatif dan religius*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Raka, G., dkk. (2011). *Pendidikan karakter di sekolah dari gagasan ke tindakan*. Jakarta: PT Gramedia.
- Romlah, T. (2001). *Teori dan praktek bimbingan dan konseling kelompok*. Malang: Universitas Negeri Malang Press.
- Sari, A. T. O., Ramdhani, N., & Eliza, M. (2003). Empati dan perilaku merokok di tempat umum. *Jurnal Psikologi*, 30(2), 81-90.
- Sagala, S. (2003). *Konsep dan Makna Pembelajaran*. Bandung: CV Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Winkel, W.S. & Sri Hastuti. (2004). *Bimbingan dan konseling di institusi pendidikan*. Yogyakarta: Media Abadi.

Zubaedi. (2012). *Desain pendidikan karakter (konsepsi dan aplikasinya dalam lembaga pendidikan)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

## **Penanaman Nilai Karakter Nasionalis Berbasis Budaya Sekolah pada Sekolah Muhammadiyah**

**Syifa Siti Aulia, Dikdik Baehaqi Arif, Iqbal Arpanudin**  
[syifasitiaulia@ppkn.uad.ac.id](mailto:syifasitiaulia@ppkn.uad.ac.id)

### **Abstrak**

Usia remaja merupakan proses untuk mencari jati diri. Pembentukan karakter nasionalis diperlukan untuk mengantisipasi agar tidak melakukan perbuatan menyimpang. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penanaman nilai karakter nasionalis berbasis budaya sekolah di sekolah Muhammadiyah Kota Yogyakarta. Metode penelitian yang dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Manfaat penelitian untuk mengetahui beragam faktor yang memengaruhi penanaman nilai karakter nasionalis berbasis budaya sekolah di sekolah Muhammadiyah di Kota Yogyakarta

**Kata kunci:** Karakter Nasionalis; Budaya Sekolah; PPKn, Sekolah Muhammadiyah

### **PENDAHULUAN**

Bangsa yang maju adalah bangsa yang memperhatikan dan selalu menanamkan jiwa nasionalis kepada warga negaranya. Nilai nasionalis suatu bangsa tidak muncul begitu saja melainkan atas dasar sejarah yang cukup panjang dan dikehendaki antar generasi. Namun saat ini Indonesia sedang menghadapi tantangan cukup serius terkait dengan nasionalis bangsa. Nilai karakter nasionalis belum diterapkan secara menyeluruh dapat dilihat antara lain adanya aksi-aksi teror dan tindakan tidak terpuji lainnya terjadi beberapa tahun terakhir sangat meresahkan masyarakat Indonesia.

Di era sekarang ini terdapat degradasi moral yang ditandai dengan mudarnya sikap sopan santun, jiwa kebhinekaan, gotong royong, serta makin maraknya sikap anarkisme di kalangan peserta didik mulai dari pelajar sampai mahasiswa. Di sisi lain makin maraknya korupsi yang dilakukan oleh para pejabat baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional baik di instansi pemerintah maupun swasta. Hal tersebut menunjukkan bahwa negara ini telah terjadi degradasi moral, akhlak, serta karakter yang seharusnya ditunjukkan sebagai budaya Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang bermartabat. Pentingnya nilai moral tersebut diperkuat oleh pernyataan Aristoteles tentang nilai-nilai (Dahlbeck, 2018, hal. 922) yang menyatakan bahwa Aristoteles menafsirkan nilai-nilai etis sebagai kondisi perantara yang menyeimbangkan antara kekurangan dan

kelebihan. Seni menjalani kehidupan yang seimbang dijaga oleh keinginan untuk berjuang untuk bertindak berdasarkan kebajikan yang ditempatkan di antara dua kutub ekstrem, yang keduanya sama-sama tidak diinginkan.

Agama seringkali dijadikan kambing hitam atas aksi teror yang meresahkan tersebut. Anggapan tersebut muncul di dalam maupun luar negeri padahal pelaku hanya sebuah oknum atau kelompok bukan secara menyeluruh umat Islam. Sejatinya Islam adalah agama yang cinta kedamaian. Selama lebih dari sepuluh tahun, pilar demokrasi Indonesia (negara), polisi, dan masyarakat sipil Muslim belum mampu menghentikan serangan (Menchik, 2014). Masyarakat Muslim Indonesia berakar pada Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, yang bersama-sama mengelola ribuan sekolah dan universitas, ratusan rumah sakit dan klinik, organisasi pemuda, masjid, lingkaran doa, partai politik, dan sayap perempuan, dan memilih pemimpin di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, desa, dan lingkungan (Mujani & Liddle, 2004). Dari dua ratus juta Muslim Indonesia, 75 persen mengidentifikasi satu atau yang lainnya. Persoalan kehidupan manusia sejatinya berkuat pada rasa menghargai, mencintai, dan menolong sesamanya. Berbagai literatur dan ajaran di dalam kitab suci dipenuhi dengan peringatan untuk merawat orang sakit, miskin, yatim piatu, dan janda, dan para musafir di jalan Tuhan (Kosmin & Ritterband, 1991).

Jika melihat sejarah berdirinya negara ini tentu tidak terlepas dari peran tokoh-tokoh di bidang agama seperti Raden Fatah (Raja pertama Demak), HOS. Cokroaminoto (pendiri Sarekat Islam), KH. Hasyim Asyari (pendiri Nahdhatul Ulama), KH. Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah), dan masih banyak tokoh lainnya. Bagaimana para tokoh negara dan agama membuktikan rasa nasionalismenya dengan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan tersebut belum selesai, tibalah pada masa generasi penerus bangsa untuk mengisi paska kemerdekaan dengan kegiatan positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk mencapai cita-cita bangsa.

Mencegah penyebaran paham radikalisme perlu dilaksanakan dari berbagai elemen salah satunya peran dari organisasi masyarakat (Ormas) keagamaan. Pengertian radikalisme menurut Zakiyah (Ali et al., 2018, hal. 106–

107) menjelaskan sebagai “gerakan semangat keagamaan yang bertujuan mengubah sebuah tatanan politik atau tatanan sosial dengan taktik kekerasan. Ormas mampu menjadi kontrol sosial mengenai pola-pola yang terjadi di masyarakat jika terjadi penyimpangan-penyimpangan”. Organisasi keagamaan bersama pemerintah aparat keamanan menyelenggarakan penyuluhan atau sosialisasi dalam bentuk pengajian, kegiatan ibadah, kepada warga Bekasi dalam upaya mencegah Radikalisme (Ali et al., 2018). Ada banyak ormas keagamaan yang muncul Indonesia, dua organisasi besarnya adalah Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah. Kedua organisasi tersebut dicetuskan dua tokoh ternama dan berpengaruh yang mengajarkan rasa cinta terhadap tanah air.

Selain itu usaha pemerintah untuk menanamkan karakter kepada masyarakat salah satunya melalui dikeluarkannya Permendikbud No 20 tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) pada satuan pendidikan formal. Di dalamnya terdapat penguatan karakter nasionalis dengan mengoptimalkan fungsi kemitraan tri pusat pendidikan salah satunya melalui sekolah yakni melalui budaya sekolah. Sikap nasionalis dapat ditunjukkan melalui sikap apresiasi terhadap budaya bangsa sendiri, cinta tanah air, menjaga lingkungan, taat hukum, menghormati keragaman budaya, suku, dan agama. Dalam proses pembentukan karakter dapat dilakukan dengan pembiasaan di dalam sekolahan. Pembiasaan yang berlangsung lama tersebut akan menjadi budaya di sekolah tersebut. Budaya tersebut merupakan nilai-nilai positif yang berkembang dan terus dilestarikan oleh warga sekolah baik kepala sekolah, guru, maupun peserta didik.

Pada kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari karakter tersebut belum dipahami secara mendalam dan belum dilaksanakan menyeluruh di Indonesia. Sebab masih adanya tindakan-tindakan tidak terpuji dikalangan pelajar. Beberapa literatur dan penelitian yang terkait dengan penyimpangan menurut Santrock, Maria, dkk. dalam Ruby dan Willis dalam Sujoko (Palupi, Purwanto, & Noviyani, 2013, hal. 8) menjelaskan bahwa kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh remaja di bawah usia 17 tahun sangat beragam, mulai dari perbuatan yang bersifat amoral maupun anti sosial. Perbuatan tersebut dapat berupa berkata jorok,

mencuri, merusak, kabur dari rumah, indisipliner di sekolah, membolos, membawa senjata tajam, merokok, berkelahi dan kebut-kebutan di jalan sampai pada perbuatan yang sudah menjurus pada perbuatan kriminal atau perbuatan yang melanggar hukum, seperti pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, seks bebas, pemakaian obat-obatan terlarang dan tindak kekerasan lainnya yang sering diberitakan di media masa.

Sebagai contoh lingkup Yogyakarta yang merupakan kota pelajar dan kota budaya. Dimana di masyarakatnya memiliki semboyan Jogja berhati nyaman. Namun semboyan berhati nyaman tersebut ternodai dengan adanya beberapa aksi *klitih* yang marak terjadi beberapa tahun terakhir. Aksi *klitih* merupakan salah satu bentuk dari perilaku agresif. Menurut Atkinson & Hilgard (Pratiwi, 2018, hal. 299) “Agresivitas merupakan perilaku yang dilakukan untuk menyakiti orang lain baik dalam bentuk fisik maupun verbal, serta menghancurkan harta benda orang lain”. Harian Jogja Tribunnews yang terbit pada tanggal 16 Oktober 2017, menyebutkan bahwa Kabid Humas Polda DIY, AKBP Yuliyanto (Pratiwi, 2018) menyatakan “Sepanjang tahun 2016 terjadi 43 kasus klitih. Sedangkan, pada tahun 2017 sampai bulan Maret sebanyak 22 kasus klitih yang tercatat di jajaran kepolisian wilayah DIY”.

Organisasi Muhammadiyah memiliki peran guna menjaga dan merawat karakter nasionalis. Mengingat Muhammadiyah merupakan organisasi Islam besar sehingga pengaruhnya cukup besar di Indonesia. Melihat pendapat Asmaria & Ponirin (2013) bahwa “untuk mencapai maksud dan tujuan Muhammadiyah yaitu dengan melaksanakan Dakwah *Amar Makruf Nahi Munkar* yang diwujudkan dalam usaha di bidang agama, pendidikan, sosial dan ekonomi.” Organisasi ini sadar dalam membentuk karakter bangsa dapat dimunculkan melalui amal usahanya di bidang pendidikan. Organisasi Islam atas pemikiran KH. Ahmad Dahlan ini yang ingin Islam pembaharuan sampai sekarang berkembang sangat pesat seperti banyaknya pondok pesantren, sekolah, dan perguruan tinggi tersebar di Indonesia. Sedangkan Tujuan pendidikan yang menjadi rujukan bagi perguruan Muhammadiyah adalah sebagaimana tentang Qoidah Pendidikan Dasar dan Menengah Bab I Pasal 3(Asmaria & Ponirin, 2013) sebagai berikut:

Pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah bertujuan: Membentuk manusia muslim yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cakap, percaya pada diri sendiri, berdisiplin, bertanggung jawab, cinta tanah air, memajukan dan memperkembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan dan beramal menuju terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridoi Allah SWT.

Dalam pernyataan tersebut menjelaskan bahwa amal usaha pendidikan Muhammadiyah tidak hanya terfokus pada pembelajaran ilmu-ilmu umum maupun ilmu agama saja namun juga membentuk karakter berakhlak mulia dan cinta tanah air. Hal ini juga sejalan dengan yang dipaparkan dalam Permendikbud mengenai penguatan pendidikan karakter. Sehingga adanya penguatan seperti ini dapat melahirkan kader-kader bertakwa, berakhlak, intelektual, dan nasionalis sehingga bermanfaat bagi kemaslahatan umat.

Di Kota Yogyakarta merupakan lahirnya dan pusat berkembangnya organisasi Muhammadiyah. Hal ini dapat dilihat dari bidang yang paling menonjol adalah pendidikan, dimana tersebar banyak sekolah Muhammadiyah dan terdapat beberapa perguruan tinggi Muhammadiyah. Adanya kontribusi dalam pembentukan karakter nasionalis yang dapat ditanamkan melalui budaya sekolah. Usia remaja merupakan proses untuk mencari jati diri. Bimbingan dari berbagai pihak sangat diperlukan terutama sekolahan agar peserta didik tidak melakukan perbuatan menyimpang.

Dengan latar belakang masalah tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penanaman nilai karakter nasionalis berbasis budaya sekolah di sekolah Muhammadiyah Kota Yogyakarta dengan manfaat penelitian untuk mengetahui beragam faktor yang memengaruhi penanaman nilai karakter nasionalis berbasis budaya sekolah di sekolah Muhammadiyah di Kota Yogyakarta.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan adalah melalui metode penelitian kualitatif didasarkan pada kajian penelitian yang berupaya untuk budaya sekolah yang belum terlaksana maksimal dalam penguatan pendidikan karakter khususnya mengenai nilai karakter nasionalis pada peserta didik. Berdasarkan metode

penelitian yang digunakan, proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada para subjek terpilih untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang urgensi pendidikan lingkungan hidup. Untuk dapat mengungkap realitas tersebut, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang bersifat terbuka kepada informan.

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik pengolahan data dan analisis melalui proses menyusun, mengategorikan data, dan mencari kaitan isi dari berbagai data yang diperoleh dengan maksud mendapatkan maknanya. Data yang diperoleh dan dikumpulkan dari peneliti melalui hasil studi dokumentasi dan wawancara yang selanjutnya dideskripsikan dalam bentuk laporan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Organisasi Muhammadiyah memiliki peran guna menjaga dan merawat karakter nasionalis. Mengingat Muhammadiyah merupakan organisasi Islam besar sehingga pengaruhnya cukup besar di Indonesia. Melihat pendapat Asmaria & Ponirin (2013) bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan Muhammadiyah yaitu dengan melaksanakan Dakwah *Amar Makruf Nahi Munkar* yang diwujudkan dalam usaha di bidang agama, pendidikan, sosial dan ekonomi. Organisasi ini sadar dalam membentuk karakter bangsa dapat dimunculkan melalui amal usahanya di bidang pendidikan. Organisasi Islam atas pemikiran KH. Ahmad Dahlan ini yang ingin Islam pembaharuan sampai sekarang berkembang sangat pesat seperti banyaknya pondok pesantren, sekolah, dan perguruan tinggi tersebar di Indonesia. Sedangkan Tujuan pendidikan yang menjadi rujukan bagi perguruan Muhammadiyah adalah sebagaimana tentang Qoidah Pendidikan Dasar dan Menengah Bab I Pasal 3 (Asmaria & Ponirin, 2013) sebagai berikut.

Pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah bertujuan: Membentuk manusia muslim yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cakap, percaya pada diri sendiri, berdisiplin, bertanggung jawab, cinta tanah air, memajukan dan memperkembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan dan beramal menuju terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridoi Allah SWT.

Sekolah muhammadiyah memiliki beberapa program untuk menanamkan nilai karakter nasionalis, melalui ekstra kurikuler Tapak Suci, Hizbul Wathan, dan organisasi intra sekolah berupa Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Selain itu, sekolah melakukan internalisasi dengan memasukan kegiatan tersebut ke dalam RKAS. Kegiatan ISMUBA juga dilaksanakan bukan hanya dalam ranah kognitif, tapi juga afektif dan psikomotorik. Nilai-nilai Kemuhammadiyah dan nilai nasionalisme dapat diwujudkan melalui kegiatan Hizbul Wathon, Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) dan Tapak Suci, karena kita menganut pendidikan yang holistik-integratif. Kita berharap siswa-siswa kita bukan hanya menjadi cerdas dan pintar, namun juga berkepribadian, berkarakter, berakhlak karimah dan berjiwa kepeloporan. Muhammadiyah berharap aspek akademis dan non-akademis ini dikemas sedemikian rupa menjadi identitas dan pembeda dengan sekolah yang lain. Sekolah-sekolah muhammadiyah harus memberikan *added values*, nilai lebih, yang ditawarkan kepada masyarakat.

Dalam pernyataan tersebut menjelaskan bahwa amal usaha pendidikan Muhammadiyah tidak hanya terfokus pada pembelajaran ilmu-ilmu umum maupun ilmu agama saja namun juga membentuk karakter berakhlak mulia dan cinta tanah air. Hal ini juga sejalan dengan yang dipaparkan dalam Permendikbud mengenai penguatan pendidikan karakter. Sehingga adanya penguatan seperti ini dapat melahirkan kader-kader bertaqwa, berakhlak, intelektual, dan nasionalis sehingga bermanfaat bagi kemaslahatan umat.

Di Kota Yogyakarta merupakan lahirnya dan pusat berkembangnya organisasi Muhammadiyah. Hal ini dapat dilihat dari bidang yang paling menonjol adalah pendidikan, di mana tersebar banyak sekolah Muhammadiyah dan terdapat beberapa perguruan tinggi Muhammadiyah. Adanya kontribusi dalam pembentukan karakter nasionalis yang dapat ditanamkan melalui budaya sekolah. Usia remaja merupakan proses untuk mencari jati diri. Bimbingan dari berbagai pihak sangat diperlukan terutama sekolah agar peserta didik tidak melakukan perbuatan menyimpang.

Selanjutnya dikaitkan dengan pendidikan kewarganegaraan, pendidikan kewarganegaraan dalam domain kajian akademik/ilmiah tidak hanya terdiri dari

pengetahuan, nilai dan keterampilan, tetapi juga mencakup penerapan pengetahuan, nilai, dan keterampilan dalam situasi kehidupan nyata dengan berpartisipasi secara aktif (Doğanay, 2012). Peran Pendidikan kewarganegaraan secara substantif tidak saja mendidik generasi muda menjadi warga negara yang cerdas dan sadar akan hak dan kewajibannya dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang merupakan penekanan dalam istilah Pendidikan Kewarganegaraan, melainkan juga membangun kesiapan warga negara untuk menjadi warga dunia (*global society*).

Tujuan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia tidak terlepas dari tujuan yang dikembangkan dalam sistem pendidikan nasional. Pada awal kemerdekaan, pendidikan nasional lebih diarahkan untuk membentuk semangat patriotisme yang mampu menghasilkan patriot bangsa yang rela berkorban untuk negara dan bangsa. Semangat patriotisme pada masa awal kemerdekaan sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang baru saja merdeka. Ciri warga negara yang Indonesia yang dikehendaki ketika itu antara lain, warga negara Indonesia yang memiliki perasaan bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta kepada alam, negara, bangsa dan kebudayaan nasional, cinta dan bakti kepada Ibu dan Bapak, yang menyadari hak dan kewajibannya (Sumantri, 2011, hal. 2). Ciri-ciri seperti inilah yang menunjukkan sebagai karakter warga negara Indonesia yang baik pada masa awal kemerdekaan. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yang telah dirumuskan, maka pendidikan nasional menurut Ki Hadjar Dewantara (Dewantara, 1977, hal. 14) harus beralaskan pada garis hidup bangsanya (*cultureel-nationaal*) dan ditujukan untuk keperluan perikehidupan (*maatschappelijk*) yang dapat mengangkat derajat rakyat dan negara untuk kemuliaan seluruh manusia di dunia.

Dalam perspektif yang lebih luas, tujuan pendidikan kewarganegaraan tidak sekadar membentuk warga negara yang baik dalam konteks nasional, melainkan juga dalam konteks global. Dinamika perkembangan di abad 21, menuntut konsepsi yang lebih luas mengenai tujuan pendidikan kewarganegaraan. Menurut Banks (Banks, 2008) perlu konsepsi ulang mengenai pendidikan kewarganegaraan di era global abad 21, agar mampu mendidik siswa secara

efektif menjadi warga negara yang dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Agar reformasi terhadap pendidikan kewarganegaraan dapat berhasil, maka harus ada perubahan mainstream dari pengetahuan akademik menuju pengetahuan akademik transformatif.

Watak atau karakter merupakan paduan dari segala tabiat manusia yang bersifat tetap, sehingga menjadi tanda yang khusus untuk membedakan manusia satu dengan yang lainnya. Karakter terjadi karena perkembangan dasar yang telah kena pengaruh ajar. “Dasar” sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya merupakan kodrat (biologis), sedangkan yang dimaksud dengan “ajar” yaitu segala sifat pendidikan dan pengajaran mulai anak dalam kandungan hingga akil balig yang dapat mewujudkan “*intelligible*” yakni tabiat yang dipengaruhi oleh angan-angan (Dewantara, 2011, hal. 407).

Konsep pendidikan karakter sendiri oleh Ki Hajar Dewantara disebut dengan pendidikan budi pekerti atau pendidikan adab (Dewantara, 2011). Pendidikan karakter atau pendidikan budi pekerti menjadikan manusia sebagai ‘manusia merdeka’ (berpribadi) yang dapat memerintah atau menguasai diri sendiri. Hal inilah yang disebut sebagai manusia yang beradab. Singkatnya, watak atau budi pekerti yang merupakan “dasar biologis” dapat dipengaruhi oleh pendidikan dan segala pengalaman serta keadaan (Dewantara, 2011).

Sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang memiliki peradaban yang mulia dan peduli dengan pendidikan bangsa, sudah seyogianya kita berupaya untuk menjadikan nilai-nilai karakter mulia itu tumbuh dan bersemi kembali menyertai setiap sikap dan perilaku bangsa, mulai dari pemimpin tertinggi hingga rakyat jelata, sehingga bangsa ini memiliki kebanggaan dan diperhitungkan eksistensinya di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Salah satu upaya ke arah itu adalah melakukan pembinaan karakter di semua aspek kehidupan masyarakat, terutama melalui institusi pendidikan.

Pendidikan yang merupakan *agent of change* harus mampu melakukan perbaikan karakter bangsa kita. Karena itu, pendidikan kita perlu direkonstruksi ulang agar dapat menghasilkan lulusan yang lebih berkualitas dan siap menghadapi “dunia” masa depan yang penuh dengan problema dan tantangan

serta dapat menghasilkan lulusan yang memiliki karakter mulia. Dengan kata lain, pendidikan harus mampu mengemban misi pembentukan karakter (*character building*) sehingga para peserta didik dan para lulusannya dapat berpartisipasi dalam mengisi pembangunan di masa-masa mendatang tanpa meninggalkan nilai-nilai karakter mulia.

Membangun karakter bangsa membutuhkan waktu yang lama dan harus dilakukan secara berkesinambungan. Karakter yang melekat pada bangsa kita akhir-akhir ini bukan begitu saja terjadi secara tiba-tiba, tetapi sudah melalui proses yang panjang. Potret kekerasan, kebrutalan, dan ketidakjujuran anak-anak bangsa yang ditampilkan oleh media baik cetak maupun elektronik sekarang ini sudah melewati proses panjang. Budaya seperti itu tidak hanya melanda rakyat umum yang kurang pendidikan, tetapi sudah sampai pada masyarakat yang terdidik, seperti pelajar dan mahasiswa, bahkan juga melanda para elite bangsa ini.

Arah dan tujuan pendidikan nasional seperti diamanatkan oleh UUD 1945, adalah peningkatan iman dan takwa serta pembinaan akhlak mulia para peserta didik yang dalam hal ini adalah seluruh warga negara yang mengikuti proses pendidikan di Indonesia. Amanat konstitusi kita ini dengan tegas memberikan perhatian yang besar akan pentingnya pendidikan karakter (akhlak mulia) dalam setiap proses pendidikan dalam membantu membumikan nilai-nilai agama dan kebangsaan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi yang diajarkan kepada seluruh peserta didik. Keluarnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan kembali fungsi dan tujuan pendidikan nasional kita. Pada pasal 3 undang-undang ini ditegaskan, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Misi besar pendidikan nasional seperti di atas menuntut semua pelaksana pendidikan memiliki kepedulian yang tinggi akan masalah moral atau karakter. Upaya yang bisa dilakukan untuk pembinaan karakter peserta didik di antaranya adalah dengan memaksimalkan fungsi mata pelajaran (mata kuliah) yang sarat dengan materi pendidikan karakter (akhlak/nilai) seperti Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan. Peserta didik melakukan proses pembiasaan dalam membangun karakter mulia.

Pemerintah menggalakan Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang merupakan kelanjutan dan kesinambungan dari Gerakan Nasional Pendidikan Karakter Bangsa Tahun 2010. Tujuan program PPK adalah menanamkan nilai-nilai pembentukan karakter bangsa secara masif dan efektif melalui implementasi nilai-nilai utama Gerakan Nasional Revolusi Mental (religius, nasionalis, mandiri, gotong-royong dan integritas) yang akan menjadi fokus pembelajaran, pembiasaan, dan pembudayaan, sehingga pendidikan karakter bangsa sungguh dapat mengubah perilaku, cara berpikir dan cara bertindak seluruh bangsa Indonesia menjadi lebih baik dan berintegritas (Kemendikbud, 2017).

Berbeda dengan pendidikan budaya dan karakter bangsa yang mempunyai delapan belas nilai sebagai fokus utama, dalam PPK hanya ada lima nilai utama karakter yang saling berkaitan membentuk jejaring nilai yang perlu dikembangkan sebagai prioritas Gerakan PPK. Kelima nilai utama karakter bangsa yang dimaksud yaitu: 1) religious; 2) nasionalis; 3) mandiri; 4) gotong royong; dan 5) integritas.

Dalam upaya membangun jati diri keindonesiaan maka perlu diperkuat kembali nilai karakter nasionalis. Nilai karakter nasionalis merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Sub nilai nasionalis antara lain apresiasi budaya bangsa sendiri, menjaga kekayaan budaya bangsa, rela berkorban, unggul, dan berprestasi, cinta tanah air, menjaga lingkungan, taat hukum, disiplin,

menghormati keragaman budaya, suku, dan agama. Prinsip implementasinya, PPK dilaksanakan dengan berbasis kelas, berbasis budaya sekolah, dan berbasis budaya masyarakat.

## **SIMPULAN**

Nilai karakter nasionalis melalui budaya sekolah sudah diterapkan. Sekolah sudah menjalin kerja sama dengan Dinas lingkungan hidup kota Yogyakarta terkait menjaga lingkungan sekitar atau sekolah Adiwiyata, kerja sama dengan polisi (polisi kota Yogyakarta) untuk membantu menyosialisasikan disiplin dan taat aturan baik di sekolah maupun di luar. Kerjasama dengan Lembaga pembinaan khusus anak untuk menyadarkan akan taat hukum. Kerjasama dengan beberapa pihak luar negeri untuk melaksanakan program sekolah yakni pertukaran pelajar. Adanya kebijakan pemerintah kota memakai pakaian adat di sekolah saat Kamis pahing, sekolah dibawah naungan Muhammadiyah sehingga didik untuk menjadi peserta didik yang berkarakter cinta tanah air dan religius. Faktor penghambat diantaranya masih terdapat beberapa peserta didik yang kurang maksimal dalam mengikuti suatu ekstrakurikuler, hizbul wathan merupakan ekstra wajib namun terdapat beberapa peserta didik yang mengikuti dengan kehadiran tidak maksimal, dan minat ekstrakurikuler pilihan tari hanya sedikit yang mengikuti dan dominan anggotanya perempuan.

## **REFERENSI**

- Ali, Y., Sukendro, A., Sarjito, A., & Saragih, H. (2018). *Peran organisasi keagamaan dalam mencegah radikalisme di wilayah Kota Bekasi. 4*, 104–119.
- Asmaria, I., & Ponirin. (2013). Perkembangan amal usaha organisasi Muhammadiyah di bidang pendidikan dan kesehatan. *Jurnal Ilmu Pemertintahan dan Sosial Politik, 1*(2), 101–111.
- Banks, J. A. (2008). Diversity, group identity, and citizenship education in a global age. *Educational Reseach, 37*(3), 129–139.
- Dahlbeck, J. (2018). *Becoming virtuous: Character education and the problem of free will*. Malmö University.
- Dewantara, K. H. (1977). *Karya Ki Hadjar Dewantara. Bagian pertama: Pendidikan*.

- Dewantara, K. H. (2011). *Bagian pertama: pendidikan*. Majelis Luhur Persatuan Tamansiswa.
- Doğanay, A. (2012). A curriculum framework for active democratic citizenship education. In M. Print & D. Lange (Ed.), *School, curriculum and civic education for building democratic citizens* (hal. 19–39). Sense Publisher.
- Kemendikbud. (2017). *Modul pelatihan penguatan pendidikan karakter bagi guru*. Kemendikbud.
- Kosmin, B. A., & Ritterband, P. (1991). *Contemporary Jewish philanthropy in America*. Rowman & Littlefield.
- Menchik, J. (2014). Productive intolerance: godly nationalism in Indonesia. *Comparative Studies in Society and History*, 56(3), 591–621. <https://doi.org/10.1017/S0010417514000267>
- Mujani, S., & Liddle, R. W. (2004). Indonesia's approaching elections: politics, Islam, and public opinion. *Journal of Democracy*, 15(1), 109–123. <https://doi.org/10.1353/jod.2004.0006>
- Palupi, A. O., Purwanto, E., & Noviyani, D. I. (2013). Pengaruh religiusitas terhadap kenakalan remaja. *Educational Psychologi Jurnal*, 2(1), 7–12.
- Pratiwi, Y. A. (2018). Rasa bersalah pada remaja pelaku klitih. *Jurnal Riset Mahasiswa Bimbingan dan Konseling*, 4, 298–308.
- Sumantri, E. (2011). Pendidikan budaya dan karakter suatu keniscayaan bagi kesatuan dan persatuan bangsa. In *Pendidikan Karakter: Nilai Inti Bagi Upaya Pembinaan Kepribadian Bangsa*. Widaya Aksara Press.

# Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Penguatan Karakter untuk Memperkuat Nilai Gotong Royong

Taufiqurrahman

[taufiqurrahman041@gmail.com](mailto:taufiqurrahman041@gmail.com).

## Abstrak

Pendidikan Kewarganegaraan membawa misi mulia dalam memperkuat nilai gotong royong dengan adanya program penguatan pendidikan karakter. Nilai Gotong Royong perlu di terapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat mewujudkan warga negara yang baik sesuai dengan tanggung jawab warga negara. Nilai Karakter gotong royong merupakan wujud dari kebersamaan serta solidaritas masyarakat Indonesia yang mejemuk demi mewujudkan Negara yang Indonesia yang kuat dan bersatu. Tujuan dari penulisan artikel ini Mengetahui Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Penumbuhan Karakter Gotong Royong. Penelitian yang digunakan dalam artikel ini ialah studi pustaka (*library research*) yakni mengelaborasi secara sistimatis dari berbagai macam sumber buku, jurnal yang relevan kemudian dianalisis terkait urgensi pendidikan kewarganegaraan sebagai penumbuhan karakter untuk memperkuat nilai gotong royong, dari Teori di simpulkan Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peranan penting dalam memperkuat nilai-nilai gotong royong di kehidupan masyarakat dengan peningkatan kompetensi *civic skill*, *civic knowledge*, dan *civic disposition* sehingga pemahaman gotong royong masyarakat tidak hanya dipahami secara tekstual melainkan kontekstual dalam mewujudkan tatanan global dan menjadi warga negara global yang tidak kehilangan identitas sebagai warga negara global.

**Kata Kunci :** Pendidikan Kewarganegaraan; Karakter; Nilai Gotong Royong

## PENDAHULUAN

Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia membawa misi mulia dalam mencerdaskan warga negara Indonesia yang *Smart and Good Citizen* serta bertujuan untuk mengembangkan kepribadian dan menjadi kunci pengembangan kompetensi kewarganegaraan di era globalisasi sekarang ini. Perkembangan dan kemajuan negara di dunia akhir-akhir ini dapat dilihat dari budaya dan peradaban yang berkembang dan mampu bertahan di tengah arus globalisasi (Hungtingon 2003: 20). Globalisasi ditandai dengan kemajuan teknologi informasi seperti jaringan internet, penggunaan gadget yang memudahkan manusia berinteraksi tidak hanya pada tingkat lokal tetapi dengan mudah berkomunikasi pada tingkat internasional dengan cepat. Globalisasi adalah fenomena empiris yang terutama dirasakan sebagai struktural transformasi sistem ekonomi dunia yang beroperasi secara kompleks dalam ruang dan waktu serta dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan komunikasi (Papastephanou, M. 2005:534).

Di era global dengan ciri dunia tanpa batas, dunia datar (dunia maya) secara langsung maupun tidak langsung banyak persoalan yang menerpa masyarakat dan tidak disadari dengan masuknya nilai-nilai dan ideologi asing yang justru menjadi pandangan hidup, seperti materialisme, hedonisme, konsumerisme (Rukiyati, 2008:32). Negara Indonesia memiliki kearifan lokal, budaya, dan tradisi yang multikultural akhir-akhir ini mengalami persoalan seperti berkembangnya paham radikalisme, kerusakan lingkungan, serta nilai budaya yang kian merosot. Salah satu nilai kearifan lokal masyarakat Indonesia yaitu gotong royong yang akhir-akhir ini mengalami degradasi, padahal gotong royong sebagai kekuatan untuk mendorong kemajuan Indonesia dalam mempertahankan peradaban menjadi lebih solid dan mampu hidup dalam kemajemukan.

Berbagai dampak yang terjadi seperti terjadinya perselisihan yang berujung konflik karena kurangnya kebersamaan, munculnya sikap yang individualis serta mengesampingkan sosialisasi dan kerja sama antara satu dan lainnya (Anggrowati, 2015). Selain itu, Memudarnya nilai gotong royong terjadi apabila rasa kebersamaan mulai menurun dan setiap pekerjaan tidak lagi bersifat sukarela, bahkan hanya dinilai dengan materi atau uang (Bintari & Darmawan, 2016: 59). Beberapa penelitian yang menjelaskan bahwa nilai gotong royong pada kehidupan masyarakat Indonesia mengalami pergeseran yakni, Wati, dkk (2017) menjelaskan faktor penyebab terjadinya pergeseran nilai gotong royong adalah kesibukan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup serta cara pandang masyarakat yang berubah dengan berkembangnya zaman maupun kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kian berkembang. Berbagai aktivitas kesibukan masyarakat dalam meningkatkan taraf ekonomi mengakibatkan kurangnya kesadaran dalam menanamkan nilai-nilai gotong royong, Irfan (2016). Sementara itu, Radjab & Bagas (2019) menyatakan, tergerusnya nilai gotong royong bukan saja berdampak pada masyarakat kota, melainkan masyarakat desa, dilihat dari penurunan nilai gotong royong yang begitu drastis disebabkan antara adanya ketidakseimbangan luas lahan pertanian masyarakat yang semakin bertambah dengan sumber daya manusia yang semakin sedikit, selain itu banyaknya masyarakat yang bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia dengan tujuan

meningkatkan ekonomi sehingga masyarakat mencari solusi dengan menggunakan tenaga buruh dari desa lain. Masyarakat pedesaan pulau bawean saat ini mengalami perubahan budaya gotong royong dengan masuknya perkembangan globalisasi dan modernisasi (Nafisah, 2020: 385).

Perkembangan gelombang modernisasi pada abad ke 21 memberikan dampak negatif bagi budaya lokal Negara Indonesia jika tidak diperkuat dengan nilai-nilai karakter. Gotong royong merupakan nilai karakter yang hidup dan sudah ada sebelum Indonesia merdeka, bahkan hampir diseluruh wilayah Indonesia, masyarakat tidak bisa terlepas dari budaya gotong royong hal tersebut dapat meningkatkan nilai persaudaraan antar sesama sehingga dapat saling membantu antara satu dengan yang lain (Panjaitan 2016:38). Gerakan Pendidikan Karakter di Indonesia menempati kedudukan yang strategis dengan mencanangkan program revolusi mental (revolusi karakter) sebagaimana yang tertuang dalam (Nawacita 8) serta menerbitkan RPJMN 2014-2019 pada kepemimpinan presiden Joko Widodo menjadi langkah awal pemerintahan Negara Indonesia memperkuat identitas bangsa dalam bingkai budaya lokal masyarakat (PPK, 2017).

Penguatan karakter budaya lokal masyarakat menjadi kunci dalam melestarikan nilai-nilai budaya, sehingga gotong royong menjadi identitas bagi masyarakat dalam melestarikan kearifan lokal di setiap daerah. Program Pendidikan Karakter (PPK) yang disingkat dengan beberapa nilai yaitu, RENAMAGI (Religius, Nasionalis, Mandiri, Gotong Royong dan Integritas) menjadi pekerjaan rumah bagi pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia yang lebih pada PKn di persekolahan maupun di PKn kemasyarakatan sehingga terciptanya warga negara yang cerdas secara kognitif dan juga terampil atau dengan kata lain memiliki keahlian *skills* sebagai seorang warga negara (aktif dan partisipatif) dalam kehidupan bernegara (Kerr, 1999). Pendidikan Kewarganegaraan dan budaya lokal bersifat transformatif yang memiliki keberlanjutan nilai dalam membangun identitas jati diri bangsa. Di tengah tantangan global sekarang ini membutuhkan solusi global, solusi teknologi,

regulasi politik, dan keuangan demi mewujudkan pembangunan berkelanjutan pada suatu negara (Vander, 2018: 56).

Namun, dengan perkembangan teknologi serta munculnya tantangan global menjadikan kajian pendidikan kewarganegaraan penting untuk diperkuat dengan pengembangan kajian-kajian yang mendalam oleh para ahli dan memperkuat karakter gotong royong sebagai jati diri bangsa Indonesia yang dimiliki masyarakat serta mampu menjawab tantangan global. Oleh karena itu, Pendidikan Kewarganegaraan menjadi solusi peradaban dalam mewujudkan budaya lokal yang kuat dalam menghadapi tantangan zaman yang begitu kompleks. Dengan demikian, penulis melakukan studi *literature review* mengenai “Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Karakter Untuk Memperkuat Nilai Gotong Royong Dalam Kehidupan Bermasyarakat”.

## **METODE**

Metode yang digunakan adalah kajian pustaka. Jenis penelitian ini merupakan bagian dari penelitian dengan menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian pustaka ini hanya menggunakan literatur perpustakaan tanpa harus melakukan penelitian lapangan. Melalui metode ini nantinya studi pendahuluan akan terjawab sekaligus akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam berkenaan dengan gejala-gejala baru yang muncul dan berkembang di tengah masyarakat (Zed, 2004:14). Penelitian kepustakaan juga dapat dimaknai sebagai suatu bentuk kegiatan terencana berkaitan dengan metode dalam pengumpulan data dari perpustakaan dengan cara mencatat, membaca, dan melakukan pengolahan data dari berbagai macam bahan penelitian. Penelitian ini, sumber dan jenis datanya diolah dan diambil berbagai macam referensi kepustakaan yang memiliki korelasi dengan judul yang akan dibahas. Dengan demikian, cara pengumpulan datanya didasarkan pada studi kepustakaan.

Sumber acuan yang digunakan dalam penulisan ini terdiri atas buku dan jurnal yang berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan dan gotong royong. Untuk jenis data yang ada atau didapat bermacam-macam, dengan kata lain datanya merupakan gabungan dari data kualitatif. Sedangkan untuk tekniknya,

dengan menggunakan cara kajian pustaka, yaitu menganalisis macam-macam literatur terkait antara variabel. Buku, jurnal, dan artikel memiliki hubungan sebagai informasi yang reliabel atau dapat dipertanggung jawabkan, selanjutnya data atau informasi yang didapat dari buku, jurnal, dan artikel dianalisis serta disusun berdasar variabel sehingga memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya dan tidak keluar dari bahasan atau judul yang sudah ditentukan. Dalam tahapan ini analisis dilakukan secara induktif dengan tahap proses reduksi, yaitu pemilihan data yang valid dari berbagai sumber yang dikumpulkan dan penyajian data merupakan pengambilan kesimpulan. Simpulan didapat sesudah proses penyatuan data dan mengacu dari apa yang ingin dicapai, berdasarkan pada penjabaran dan pencampuran. Dalam kesimpulan perlu untuk mengamati bentuk dalam menyediakan data yang ada pada apa yang ingin dicapai untuk menjelaskan ide utama pembahasan dalam penulisan ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pendidikan kewarganegaraan sebagai penumbuhan karakter Gotong Royong masyarakat menjadi tanggung jawab penting dalam pelaksanaannya di era Industri 4.0. Dalam pengembangan nilai pendidikan kewarganegaraan yang diejawantahkan melalui program penguatan pendidikan karakter, ada lima nilai utama yang dikembangkan dalam menjaga kekayaan budaya bangsa, sehingga terbentuknya sikap rela berkorban, unggul, dan menghormati keragaman budaya, suku, dan agama. berprestasi, serta cinta tanah air. Adapun nilai tersebut menurut Program Penguatan Pendidikan Karakter 2017:6 antara lain (1). Nilai karakter religius, mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan, agama, dan kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan agama, menjunjung tinggi sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan lain, hidup rukun dan damai dengan pemeluk agama lain. (2). Nilai karakter nasionalis merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. (3). Nilai karakter mandiri, merupakan sikap

dan perilaku yang tidak bergantung pada orang lain, dan menggunakan segala tenaga, pikiran untuk merealisasikan harapan bangsa dan tujuan negara. (4). Nilai karakter gotong royong, mencerminkan tindakan menghargai semangat kerjasama dan bahu membahu menyelesaikan persoalan bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan, memberi bantuan/pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan. (5). Nilai karakter integritas merupakan nilai yang mendasari perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan, memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral (integritas moral).

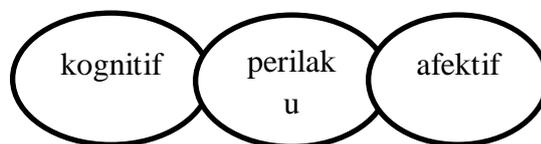
Program penguatan pendidikan karakter pada hakikatnya bertumpu pada tanggung jawab kearifan lokal nusantara yang begitu kompleks sehingga Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tanggung jawab dalam merawat nilai karakter dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penerapan tersebut dilihat dari pelaksanaan Pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang memiliki karakter gotong royong. Tarigan (2017:276) PKn merupakan mata pelajaran yang bertujuan meningkatkan kemampuan pada diri warga negara. Pendidikan Kewarganegaraan memegang peranan penting dalam membentuk aspek pengembangan pengetahuan warga negara, keterampilan kewarganegaraan dan watak kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai embrio dalam mewujudkan masyarakat yang memiliki karakter gotong royong maka harus memahami urgensi PKn sebagai tujuan dari pembangunan berkelanjutan bagi suatu daerah. Dalam membangun nilai karakter diperlukan pendidikan kewarganegaraan sehingga pokok utama dalam pendidikan kewarganegaraan ialah sebagai wadah dalam membentuk warga negara yang memiliki karakter sesuai dengan nilai-nilai dan ideologi yang berlaku dalam masyarakat (Harmanto, 2018).

Sebagai bagian mata pelajaran yang terintegrasi, menurut (Kerr, 1999; Choudhury, 2017) bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki peranan yang sangat penting dalam menumbuhkan kembangkan pola pikir, sikap dan perilaku rukun, damai serta toleran tanpa meninggalkan kebhinekaan yang memang sudah

menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Braskamp (2008) mengatakan tujuan kewarganegaraan adalah untuk menciptakan warga negara global sehingga dapat mengetahui, berkomitmen pada kebaikan bersama, dan keinginan untuk berhubungan dengan orang lain serta dapat memahami dan menghormati keadilan, kesetaraan, keadilan, dan kesempatan yang sama sebagai kebajikan dan nilai-nilai yang merupakan tujuan pendidikan. Toukan (2018) bahwa pendidikan kewarganegaraan harus memiliki tiga dimensi yang harus di eksplorasi seperti, pertama sikap, nilai, dan keyakinan; kedua, berpikir kritis dan ketiga, partisipasi, keterlibatan dan tindakan. Pada dasarnya, tanggung jawab pendidikan kewarganegaraan sangat besar dalam membangun watak kewarganegaraan yang menjunjung tinggi nilai lokal masyarakat, karena tugasnya tidak hanya untuk membangun pengetahuan kewarganegaraan (pengetahuan kewarganegaraan), tetapi juga untuk membangun keterampilan sipil (keterampilan sipil) dan karakter (disposisi sipil). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan membentuk masyarakat Indonesia yang dapat berperan secara bermartabat, aktif, dan cerdas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Ubaedillah., & Rozak, 2015: 6).

Tujuan kewarganegaraan adalah menjadi warga negara yang sah dari suatu negara dan juga warga negara yang partisipatif aktif dapat didorong melalui pendidikan dan tindakan dalam masyarakat (Kiwani, 2008:60 Birdwell, et. al. 2013). Tarigan (2017:276) menjelaskan hal pokok PKn yaitu membentuk karakter sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada masyarakat dan juga berdasarkan ideologi Pancasila. PKn memiliki tiga hal yang harus di tingkatkan yaitu, pengetahuan, keterampilan, dan karakter. Warga negara wajib memiliki komitmen dan kepercayaan diri harus ada pada tiap individu karena merupakan syarat utama harus di pegang. Maksud dari pendidikan kewarganegaraan dapat menghasilkan pemikiran cerdas, tanggung jawab, akhlak yang baik, berpartisipasi dengan kritis dalam menanggapi suatu permasalahan pada bangsa dan negara. Inti dari PKn ini merupakan pengetahuan yang membentuk karakter warga negara yang berdemokrasi dimana harus menaati hukum yang berlaku, dan norma yang ada pada masyarakat.

Dalam kurikulum CCE Australia membagi tiga bagian paradigma PKn yaitu (ACARA, 2012:8–9):



Gambar 1. Kurikulum CCE Australia

Kurikulum CCE ini antara lain yaitu: pertama, memahami, penalaran, dan mengetahui (rana kognitif); kedua, keterampilan, perilaku, dan keterlibatan (rana perilaku) dan ketiga, disposisi, nilai-nilai dan sikap (rana efektif). Maka dapat disimpulkan bahwa kurikulum CCE memiliki dua komponen yaitu pengetahuan mengenai kewarganegaraan dan pemahaman mengenai kewarganegaraan. Sebagai masyarakat Indonesia yang multikultur maka, hakikat PKn merupakan usaha secara teratur yang dapat membangun pola pikir masyarakat sehingga meningkatkan jati diri dan moral bangsa. Pebriyenn (2017:32) berpendapat dengan mengatakan bahwa untuk terciptanya masyarakat yang memiliki kemauan dalam membela negara berdasarkan pada politik kebangsaan maka harus meningkatkan karakter moral dan gotong royong dalam kehidupan masyarakat. Untuk itu isi dari pendidikan kewarganegaraan diantaranya yaitu, peningkatan terhadap: pertama, menerapkan jiwa cinta kepada NKRI; kedua, memiliki kesadaran untuk mentaati dan menegakan hukum hukum dalam kehidupan bermasyarakat; ketiga, memiliki nilai sesuai dengan Pancasila; keempat, tidak melanggar hak asasi manusia dan meningkatkan nilai demokrasi dalam lingkungan hidup; kelima, berjuang untuk bangsa negara; dan keenam, membela negara. Pendidikan kewarganegaraan diwujudkan dalam konteks pendidikan sebagai proses dari proses kebudayaan yakni dengan olahpikir, olahrasa, olahkarsa, dan olahraga, Yudi Latif dalam Sinamoed, 2014:23). Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang oleh Joko Widodo disebut sebagai salah satu bagian dari program revolusi mental, memiliki tuntutan yang besar dalam

pembangunan manusia yang cerdas dan berkepribadian menuju masyarakat berkepribadian.

Pancasila merupakan kristalisasi jiwa dan semangat gotong royong dalam membangun solidaritas dan kesatuan bagi perwujudan kejayaan Indonesia. Peran Pendidikan Kewarganegaraan menjadi basic kekuatan dalam mewujudkan nilai gotong royong sangat diperlukan. Kata gotong royong menjadi salah satu kosa kata dalam bahasa Indonesia. Gotong royong berasal dari bahasa Jawa bahasa, atau setidaknya memiliki ciri-ciri bahasa Jawa (Pranowo,2010). Dalam kebudayaan masyarakat Bima goyong disebut sebagai gagarumutan atau bagarumutan, tolong menolong dalam upacara perkawinan, upacara keagamaan atau upacara kematian (Rahman, 2017: 168). Pada masyarakat suku Bali ada istilah mepalusan adalah suatu kegiatan kerja sama antar satu individu terhadap individu lainnya (Artini, dkk. 2018: 82). Di Papua Barat gotong royong dikenal sebagai tradisi baku bantu pembangunan rumah-rumah ibadah yang dilakukan secara bersama-sama dengan atau gotong-royong (Ernas, 2014:69). Padukuhan rejokusuman dan Tanaman sebagai wadah dalam merealisasikan nilai gotong royong di Yogyakarta menunjukkan lemahnya nilai gotong royong (Febriani dkk, 2020:60). Selanjutnya, peta gotong-royong ini berbanding terbalik dengan peta sifat individualis dalam masyarakat, yakni semakin kuat nilai gotong-royong dalam masyarakat semakin lemah sifat individualis dalam masyarakat.

Dalam nilai gotong royong akhir-akhir ini ini mulai terdegradasi dengan banyaknya masyarakat atau individu dimana konsensus yang melemah, nilai-nilai dan tujuan (*goal*) bersama meluntur, kehilangan pegangan nilai-nilai norma dan kerangka moral, baik secara kolektif yang terjadi karena perubahan sosial yang begitu cepat sehingga terjadinya disorientasi nilai (Suwignyo, 2019:10). Masyarakat mulai meninggalkan nilai-nilai dan tradisi gotong royong karena dianggap tidak berpengaruh pada peningkatan tatanan kehidupan masyarakat. Meningkatnya pemahaman masyarakat dalam budaya materialisme dan modernisme telah mendominasi kehidupan dan telah menjadi penyebab penurunan nilai gotong royong (Mustaqim, 2013).

Secara empiris, nilai gotong royong mengalami dekadensi dalam konteks nasional. Fenomena ini dicatat oleh Labkurtannas (Laboratorium nilai-nilai universal) sehingga perlunya untuk membangun peradaban bangsa negara di dunia yang dimulai dari aspek sosial budaya seperti, sistem nilai, perilaku, dan artefak, harmoni, kesetaraan, dan kesejahteraan, (Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional dan Simulasi Kebijakan Publik, 2015). Kegiatan gotong royong yang ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia sudah berlangsung diterapkan untuk waktu yang lama (Bowen, 2011). Nilai gotong royong dilakukan sejak masa kerajaan berjaya di nusantara hingga sekarang di era modern. Konsep gotong royong tidak hanya dilakukan oleh masyarakat, namun hingga kini konsep gotong royong terus tertanam di hati rakyat Indonesia. Hal inilah yang menjadi ciri hidup kebersamaan dan saling membantu lainnya di Indonesia. Nilai-nilai gotong royong penting untuk mengimplementasikan pada masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan Indonesia dengan mendorong warga dan pemuda untuk berperan aktif dalam bagaimana mereka beraksi dapat diperjuangkan kemaslahatan masyarakat (Tulius, 2012)

Tujuan gotong royong adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang masalah lingkungan, masalah komunitas dan mencari solusi yang mungkin, dan meletakkan dasar untuk individu partisipasi yang terinformasi penuh dan aktif dalam perlindungan solidaritas, pemanfaatan masyarakat yang bijaksana dan rasional, ide/komunitas potensial. Kecenderungan untuk mengganti nilai gotong-royong kepada individualisme, konsumerisme dan materialisme sudah sangat terasa di kota-kota besar. Tentunya tidak lepas dari konteks usia. Perubahan cepat dan mendasar di tata kelola kehidupan dewasa dan hubungan antara bangsa telah terjadi sebagai akibat dari globalisasi. Intensifikasi hubungan sosial dalam skala global membuat semua negara, termasuk Indonesia, bukan hanya menghadapi potensi ledakan pluralisme dari dalam, tetapi juga keragaman tekanan eksternal.

Oleh karena itu Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk terdiri dari beragam suku, agama, bahasa, budaya, adat istiadat, dan lain sebagainya. Pluralitas di satu sisi sebenarnya adalah kekayaan yang tak ternilai,

tetapi di sisi- sisi lain bisa menjadi bom waktu yang mengerikan jika dibelah masing-masing warga negara tidak mengerti arti sebenarnya dari Persatuan Nasional. Pendidikan kewarganegaraan menjawab tantangan krisis gotong royong yang terjadi di Indonesia dengan adanya penguatan pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan, sehingga kedepanya nilai gotong royong selalu dapat menjadi kekuatan bagi masyarakat dalam mempertahankan identitas lokal di tengah arus globalisasi sekarang ini.

## **SIMPULAN**

Nilai gotong royong di era globalisasi sekarang ini harus dipahami secara global, tidak hanya gotong royong pada aspek pemahaman lokal, akan tetapi masyarakat Indonesia yang merupakan warga negara nasional serta menjadi bagian dari warga negara global harus memahami budaya lokal gotong royong sebagai manifestasi dari kepribadian masyarakat Indonesia yang tercermin secara global. Gotong royong saat ini perlu dipahami tidak sebatas tekstual akan tetapi secara kontekstual, sehingga tidak ditafsirkan secara sempit. Pendidikan kewarganegaraan dipahami sebagai bagian dari penumbuhan pengetahuan global masyarakat dengan tidak menghilangkan identitas lokal masyarakat Indonesia. Urgensi pendidikan kewarganegaraan diupayakan dengan meningkatkan penumbuhan karakter warga negara dengan peningkatan, *civic knowledge*, *civic skill*, dan *civic disposition*. Penumbuhan karakter warga negara dapat dilakukan melalui penguatan pendidikan karakter yang dilakukan dengan pengembangan pemahaman kompetensi kewarganegaraan di dalam pendidikan kewarganegaraan kemasyarakatan yang dilaksanakan dengan penerapan Gotong Royong. Pendidikan kewarganegaraan harus mampu menjawab tantangan global dengan menyelesaikan persoalan yang begitu kompleks, sehingga penerapan Pendidikan Kewarganegaraan dapat terlaksana di semua lini kehidupan.

## **REFERENSI**

Australian Curriculum and Reporting Authority. (2012). *The shape of the australian curriculum: civics and citizenship*. Sydney

- Anggrowati, P & Sarmini. (2015). *Pelaksanaan gotong royong di era global (studi kasus di Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan. Kajian Moral dan Kewarganegaraan. 1(3) : 39- 53.*
- Bowen, J.R. (2011). Tentang konstruksi politik tradisi: gotong Royong di Indonesia. *The Journal of Asian Studies* , 45 (3), 545-561.
- Braskamp, A. L. (2008). Developing global citizens. *Journal of College & Character. 1(10). 1-6.*
- Ernas., & Saidin. (2014). Dinamika integrasi sosial di papua fenomena masyarakat fakfak di Provinsi Papua Barat. *Jurnal Kawistar. 4(1). 1-11.*
- Febriani., & Dwandru, U, T. (2020). The effect of mutual cooperation values towards people's lifestyle in the form of maps. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan. 17(1) . 60 – 66.* Doi. 10.21831/jc.v17i1.29617
- Harmanto, Listyaningsih, & Wijaya, R. (2018). Characteristics of competence and civic education materials curriculum in primary school in Indonesia. *Journal of Physics: Conference Series. 953. 012150.* Doi:10.1088/1742-6596/953/1/012150.
- Hungtington. P.S (2003). *Konflik peradaban.* Yojoyakarta : Penerbit IRCiSod
- Irfan, M. (2016). Crowdfunding sebagai Pemaknaan Energi Gotong-Royong Terbarukan. *Share: Sosial Work Journal. 6(1). 30-42.*
- Intari, P.N., & Darmawan, C. (2016). Peran pemuda sebagai penerus tradisi sambatan dalam rangka pembentukan karakter gotong royong. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial. 25(1) .57-76.*
- Kerr, D. (1999). *Citizenship education: An international comparison.* England: National foundation for Educational Research-NFER.
- Kiwan, D. (2008). A Journey to citizenship in the United Kingdom. *International Journal on Multicultural Societies. 1(10). 60-74.*
- Konsep dan Pedoman Penguatan Pendidikan Karakter. (2017). *Pusat analisis dan sinkronisasi kebijakan sekretariat jenderal kementerian dan kebudayaan.*
- Mustaqim, A. H. (2013). Gotong royong dalam dwilogi padang bulan dan cinta di dalam gelas karya andrea hirata (sebuah kajian sosiologi sastra). *WANASTRA. IV(1).*
- Nafisah, A. (2020). Tranformasi budaya gotong royong di era globalisasi pada masyarakat pulau bawean. *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan. 8(2). 383-400.*

- Pranowo, M. B (2010). *Multidimensi ketahanan nasional*. Cetakan 1. September. Jakarta: Pustaka Alvabet. ISBN 978-979-3064-91-8.
- Pebriyenni. (2017). Peran pendidikan kewarganegaraan dalam memperkuat karakter bangsa. *Jurnal PPKn & Hukum*. 2(12).
- Papastephanou, M. (2005). Globalisation, globalism and cosmopolitanism as an educational ideal. *Educational Philosophy and Theory*. 37(4) 533–551. Doi:10.1111/j.1469-5812.2005.00139.
- Panjaitan, S. C., & Dewantara, A. (2019). Gotong royong sebagai prinsip masyarakat indonesia untuk menanggapi konflik multikulturalisme. <https://doi.org/10.31219/osf.io/wqd5v>.
- Rahman & Ghazali. (2017). Gotong royong lalawatan pada tradisi haul masyarakat banjar pahuluan desa andhika sebagai sumber pembelajaran IPS. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial*. 6 (2). 161-175.
- Radjab & Bagas. (2019). Tergerusnya gotong royong di Desa Tadang Palie Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone. *Hasanuddin Journal Of Sociology (Hjs)*. 1(2).
- Rukiyati, dkk. (2008). *Pendidikan pancasila buku pegangan kuliah*. Yogyakarta : UNY Press.
- Suwignyo, A. (2019). Gotong royong as social citizenship in Indonesia, 1940s to 1990s. *Journal of Southeast Asian Studies*. 50(3). 387-408. Doi: 10.1017/S0022463419000407.
- Sinamo, J. (2014). *Revolusi mental: dalam institusi, birokrasi, dan korporasi*. Jakarta: Institut Darma Mahardika.
- Sistem Pengukuran Ketahanan Nasional dan Simulasi Kebijakan Publik. (2015). Edisi 5. Jakarta: Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional. Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
- Tarigan, E. T.B. (2017). Membangun karakter bangsa melalui pendidikan kewarganegaraan. *Prosiding Seminar Nasional Tahunan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan*. 1(1).
- Tulius, J. (2012). Orang-orang yang terdampar: narasi mitos tentang penduduk pertama mentawai pulau. *Wacana* . 14 (2). 215-240.
- Toukan. V., E. (2018). Educating citizens of ‘the global’: Mapping textual constructs of UNESCO’s global citizenship education 2012–2015. *Journal Education, Citizenship and Social Justice*. 1(13). 51-56 DOI: 10.1177.

- Ubaedillah. A., & Rozak A. (2015). *Pendidikan kewarnegaraan (civic education) pancasila, demokrasi, ham, dan masyarakat madani*. Jakarta: Prenada Media group.
- Wati, R. N. (2017). *Pergeseran nilai gotong royong di Desa Tasamaju*. Makassar: Universitas Negeri Makassar
- Vander Dussen Toukan, E. (2018). Educating citizens of ‘the global’: Mapping textual constructs of UNESCO’s global citizenship education 2012–2015. *Education, Citizenship and Social Justice*. 13(1). 51–64. Doi: <https://doi.org/10.1177/1746197917700909>.
- Zed, M. (2004). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

# Implementasi Pancasila di Era Globalisasi Bagi Peserta Didik

Tri Utami<sup>1</sup>, Mukhamad Murdiono<sup>2</sup>  
[tri327pasca.2019@student.uny.ac.id](mailto:tri327pasca.2019@student.uny.ac.id)

## Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Pancasila di era globalisasi bagi peserta didik dapat dilakukan. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah studi pustaka. Penelitian dengan studi pustakan bertujuan untuk menganalisis tentang implimentasi Pancasila di era globalisasi bagi peserta didik. Teknik pengumpulan data serta informasi yang mendukung penelitian ini meliputi studi dokumentasi serta studi pustaka dari hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data dari berbagai artikel ilmiah, laporan penelitian ilmiah, buku, jurnal, dan sumber-sumber yang relevan dengan topik dari artikel ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalm Pancasila penting untuk diberikan kepada peserta didik. Implementasi nilai-nilai Pancasila di era globalisasi kepada peserta didik dapat dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai karakter melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

**Kata Kunci:** *Pancasila; Globalisasi; Peserta Didik*

## PENDAHULUAN

Peserta didik memiliki daya dan potensi untuk berkembang dan siap pula untuk dikembangkan. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dijelaskan bahwa peserta didik itu adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Selanjutnya, menurut Roqib (2009:59) mengemukakan bahwa peserta didik adalah semua manusia, yang mana pada saat yang sama dapat menjadi pendidik sekaligus peserta didik. Maka dari itu, peserta didik merupakan manusia seutuhnya yang berusaha untuk mengasah potensi supaya lebih potensial dengan bantuan pendidik atau orang dewasa (Harahap, 2016). Maka dari itu, peserta didik merupakan masyarakat yang sedang berusaha untuk mengembangkan potensi diri melalui suatu proses pembelajaran yang tersedia.

Namun kenyataannya saat ini, kecenderungan prilaku yang bertentangan dengan nilai dan prinsip demokrasi yang dilakukan oleh anak usia sekolah masih mudah ditemukan. Berbagai fenomena prilaku yang bertentangan dengan semangat demokrasi tersebut seperti tawuran pelajar, melakukan pelanggaran dan kejahatan hukum, melakukan pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat (hukum, agama, kesusilaan, dan sopan santun), tidak memiliki rasa

nasionalisme dan patriotisme, tidak menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, tidak mau melaksanakan hak dan kewajibannya, tidak mengakui dan menghargai multikulturalisme, serta perilaku lainnya tidak sedikit berakibat pada peristiwa-peristiwa yang fatal.

Dekadensi moral telah merajalela dalam dunia pendidikan sehingga menjadi potret buram dalam dunia pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari maraknya peredaran video porno yang diperankan oleh para pelajar, maraknya perkuliahan antar pelajar, adanya kecurangan dalam ujian nasional, banyaknya kasus narkoba yang menjerat siswa, banyaknya begal motor yang diperankan oleh siswa, perpisahan sekolah dengan baju bikini, dan berbagai peran negatif lainnya (Maunah, 2015). Selanjutnya, Ningrum (2015) menyatakan bahwa remaja Indonesia sudah sangat jauh dari ajaran-ajaran agama, dan perilaku menyimpang seperti pergaulan bebas dan seks bebas yang dianggap sudah biasa dikalangan remaja sekarang ini. Kenyataan ini menunjukkan bahwa perilaku yang bertentangan dengan semangat demokrasi anak usia sekolah merupakan salah satu masalah sosial yang sangat kompleks dan menyeluruh, yang dapat menghambat laju pembangunan, karena masalah tersebut dapat mengganggu ketertiban, ketenteraman, serta keamanan baik jasmani, rohani maupun sosial dalam kehidupan bersama, secara langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut terjadi karena adanya dampak negatif dari globalisasi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Kurniawan (2015) bahwa terjadinya penurunan kualitas moral bangsa merupakan salah satu dampak negatif dari globalisasi. Era globalisasi telah menjadi sebuah realitas yang harus dihadapi oleh masyarakat dan bangsa Indonesia. perubahan yang berlangsung begitu cepat dan munculnya berbagai tantangan sebagai dampak globalisasi harus dihadapi dan diselesaikan dengan baik.

Pendidikan mau tidak mau tidak mau terlibat di dalamnya dan dituntut untuk mampu memberikan kontribusi yang nyata. Ini dikarenakan, apabila peserta didik dibiarkan tumbuh dan berkembang secara alamiah tanpa bantuan dari pendidikan, hal ini sangat memungkinkannya kehilangan arah dalam menempuh perjalanan menuju kebaikan. Menurut Trianto (2017:11) menyatakan bahwa

pendidikan yang baik adalah pendidikan yang tidak hanya mempersiapkan para siswanya untuk suatu profesi atau jabatan tetapi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.

Pendidikan yang sedang berlangsung saat ini, harus mampu mempersiapkan siswa minimal lima kompetensi yang dibutuhkan di era globalisasi saat ini, yaitu : (1) kompetensi intelektual yakni kemampuan berfikir dan bernalar, kreatif inovatif, kemampuan memecahkan masalah, dan kemampuan mengambil keputusan strategis, (2) kompetensi personal, yakni memiliki keluhuran jiwa dan moral yang baik, berupa kejujuran, disiplin, kemandirian, kritis, dan bertanggung jawab, (3) kompetensi komunikatif, yakni memiliki kemampuan bahasa dan komunikasi dengan orang lain, (4) kompetensi sosial budaya, yakni kemampuan hidup bersama dan bekerjasama dengan orang lain, dan (5) kompetensi kinestesis vokasional, yakni kemampuan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung kemajuan kehidupan global (Istiarsono, 2016:3).

Dalam rangka mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab di era globalisasi ini, maka diperlukannya pendidikan yang tidak terlepas dari ajaran Pancasila sebagai dasar untuk melaksanakan pendidikan di Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara bagi Indonesia yang merupakan sumber ilmu pengetahuan dan nilai-nilai luhur. Jika dilihat dari sejarah pembuatan Pancasila, Pancasila dibuat berdasarkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, yang dalam hal ini adalah nilai-nilai kearifan lokal bangsa Indonesia (Sukmayadi, 2018). Sebagai dasar negara, Pancasila lahir berdasarkan nilai-nilai budaya yang terkandung sejak zaman nenek moyang terdahulu (Asmaroni, 2017). Pancasila sejak kelahirannya

mengandung pemahaman yang luhur dengan dijiwai semangat ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kehidupan yang demokratis dan keadilan sosial (Saputra, 2017). Kelangsungan hidup bangsa Indonesia di era globalisasi, mengharuskan kita untuk melestarikan dan menerapkan nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik, agar generasi penerus bangsa tetap dapat menghayati dan mengamalkannya dan agar nilai-nilai luhur Pancasila tetap terjaga dan menjadi pedoman bangsa Indonesia sepanjang masa. Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti Implementasi Pancasila di Era Globalisasi Bagi Peserta Didik. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Pancasila di era globalisasi bagi peserta didik.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah studi pustaka. Studi pustaka merupakan penelitian yang menggunakan sumber kepustakaan untuk memperoleh data penelitian. Penelitian dengan studi pustaka berusaha untuk menganalisis tentang implimentasi Pancasila di era globalisasi bagi peserta didik. Teknik pengumpulan data serta informasi yang mendukung penelitian ini meliputi studi dokumentasi serta studi pustaka dari hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data dari berbagai artikel ilmiah, laporan penelitian ilmiah, buku, jurnal, dan sumber-sumber yang relevan dengan topik dari artikel ini. Peneliti akan mendata kajian dari bahan-bahan ilmiah yang terkait dengan penelitian ini. Analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis isi. Analisis isi digunakan dengan cara membandingkan antara satu kajian dengan kajian yang lain dalam topik yang sesuai dengan artikel ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kedudukan Pancasila**

Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang oleh Bung Karno disebut sebagai *filosofic grondslag* atau pandangan hidup. Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia telah dipilih berdasarkan perenungan yang mendalam oleh *the*

*founding fathers* bangsa Indonesia. Oleh karena itu, keyakinan terhadap Pancasila sebagai falsafah bangsa merupakan akar kebenaran untuk memahami eksistensi bangsa Indonesia. Dimana pun berada, dalam arti kendatipun tidak dalam wilayah Indonesia, namun manakala dirinya adalah warga bangsa Indonesia maka Pancasila menjadi filsafat hidupnya (Hadiwijono, 2016). Pancasila adalah dasar negara, ideologi bangsa dan falsafah serta pandangan hidup bangsa yang di dalamnya terkandung nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praksis (Irhandayaningsih, 2012).

Dalam perjalanan bangsa Indonesia, banyak perdebatan yang terjadi, apakah Pancasila yang telah dirumuskan dapat menjadi satu-satunya dasar bagi bangsa Indonesia atau hanya bertahan sebentar saja. Sebelum terjadinya proklamasi, banyak terjadi gejolak yang dialami, mulai dari diusulkannya oleh Bung Karno dengan urutan yang berbeda. Selain itu Bung Karno juga mengusulkan dari lima sila menjadi 3 sila atau yang dikenal dengan Tri-sila dan setelah itu mengusulkan lagi menjadi Eka-Sila. Beberapa tokoh menyampaikan gagasannya yang kemudian terjadi pembahasan dan perdebatan yang sangat sengit, namun pada akhirnya disepakati dasar negara Indonesia adalah Pancasila yang isinya seperti yang dicantumkan dalam alenia IV pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Muslimin, 2016:34).

Dasar negara Indonesia, Pancasila menjadi landasan fundamental dalam kehidupan berbangsa. Pancasila adalah dasar dan ideologi bangsa Indonesia yang mempunyai fungsi dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia (Semadi, 2019). Selain itu Pancasila sebagai dasar negara pada hakekatnya adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum. Landasan hukum Pancasila sebagai dasar negara memberi akibat hukum dan filosofis, yaitu kehidupan negara dari bangsa ini haruslah berpedoman kepada Pancasila (Kansil & Cristine, 2011:29). Pancasila telah ada dalam segala bentuk kehidupan rakyat Indonesia. Pancasila sebagai falsafah hidup menginginkan agar moral Pancasila menjadi cita-cita dan merupakan inti semangat bersama dari berbagai moral yang secara nyata terdapat di Indonesia.

Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu nilai dan merupakan sumber dari segala penjabaran norma, baik norma hukum, norma moral maupun norma kenegaraan lainnya. Dalam filsafat pancasila terkandung di dalamnya suatu pemikiran-pemikiran yang bersifat kritis, mendasar, rasional, sistematis dan komprehensif dan sistem pemikiran ini merupakan suatu nilai. Maka dari itu, suatu pemikiran filsafat tidak secara langsung menyajikan norma-norma yang merupakan pedoman dalam suatu tindakan atau aspek praktis melainkan suatu nilai-nilai yang bersifat mendasar (Kaelan, 2014:78).

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki fungsi sebagai pegangan atau acuan bagi masyarakat Indonesia dalam bersikap dan bertingkah laku, yang berkaitan dengan sistem nilai, baik atau buruk, adil, jujur, dan sebagainya. Dengan Pancasila, perpecahan bangsa Indonesia akan mudah dihindari karena pandangan pancasila bertumpu pada pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, sehingga perbedaan apapun yang ada dapat dibina menjadi satu pola kehidupan yang dinamis, penuh dengan keanekaragaman yang berada dalam satu keseragaman yang kokoh (Muzayin, 1992:16).

Pancasila sebagai pandangan hidup akan memasuki domain etika, masalah moral yang menjadi kepedulian manusia sepanjang masa, membahas hal ihwal yang selayaknya dikerjakan dan yang dihindari. Jika Pancasila dikaitkan dengan sistem etika maka akan memberi jawaban mengenai konsepsi dasar mengenai kehidupan yang dicita-citakan, karena di dalamnya terkandung prinsip terdalam dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik (Kartika, 2018).

Kedudukan dan fungsi Pancasila dalam negara dan bangsa Indonesia menurut Munir, dkk (2016:18) adalah sebagai berikut:

1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia

Pancasila sebagai bangsa adanya/lahirnya bersamaan dengan adanya bangsa Indonesia. Jiwa bangsa Indonesia mempunyai arti statis (tetap/tidak berubah). Jiwa ini diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal/perbuatan. Pancasila melekat erat pada kehidupan bangsa Indonesia. Segala aktivitas bangsa Indonesia disemangati pancasila.

2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia

Sikap mental, tingkah laku dan amal perbuatan bangsa Indonesia mempunyai ciri-ciri khas yang dapat membedakan dengan bangsa lain. Pancasila merupakan pilihan unik yang paling tepat bagi bangsa Indonesia, karena merupakan cerminan sosio-budaya bangsa Indonesia sendiri sejak adanya di bumi Nusantara. Secara integral, Pancasila adalah “materai” yang khas Indonesia.

3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk, penuntun, dan pegangan dalam mengatur sikap dan tingkah manusia Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

4. Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia

Pancasila oleh bangsa Indonesia diyakini benar-benar memiliki kebenaran. Falsafah berarti pula pandangan hidup, sikap hidup, pegangan hidup, atau tuntunan hidup. Pancasila juga merupakan hasil proses berfikir yang menyeluruh dan mendalam mengenal hakikat diri bangsa Indonesia, sehingga merupakan pilihan yang tepat dan satu-satunya untuk bertingkah laku sebagai manusia Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

5. Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia

Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia berakar pada pandangan hidup dan budaya bangsa, dan bukannya mengangkat atau mengambil ideologi dari bangsa lain. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan tujuan bersama bangsa Indonesia yang diimplementasikan dalam pembangunan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik material dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana peri-kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai.

6. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia

Pancasila telah disepakati dan disetujui oleh rakyat Indonesia melalui perdebatan dan tukar pikiran baik dalam sidang BPUPKI maupun PPKI oleh para pendiri negara. Perjanjian luhur tersebut dipertahankan terus oleh negara dan bangsa Indonesia.

7. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia

Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma serta kaidah, baik moral maupun hukum negara dan menguasai hukum dasar baik yang tertulis dalam UUD maupun yang tidak tertulis. Dalam kedudukannya sebagai dasar negara, Pancasila mempunyai kekuatan mengikat secara hukum.

8. Pancasila sebagai sumber hukum nasional

Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila merupakan sumber kaidah hukum negara yang secara konstitusional mengatur negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya yaitu rakyat, wilayah serta pemerintah negara.

### **Nilai-nilai yang Terkandung dalam Pancasila**

Nilai-nilai Pancasila harus tetap dibangun dan dibumikan di dalam aktivitas masyarakat Indonesia sehari-hari. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi pihak-pihak yang telah melupakan Pancasila bahkan ada beberapa bagian orang yang belum begitu paham mengenai nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa (Adha, 2020). Pancasila merupakan suatu sistem etika dalam kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai sebuah sistem, semua susunan Pancasila merupakan kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Perlu adanya aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan ideologi Pancasila (Chairiyah, 2014). Pancasila merupakan kumpulan lima nilai unidimensional yang dijadikan acuan tingkah laku bangsa Indonesia (Meinaro, 2016). Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila akan mengajarkan cara berfikir dan bertindak yang sesuai dengan ideologi negara (Damanhuri, et. al., 2016).

Sebagai manusia yang menjunjung keharmonisan dan keserasian sebagai jati diri bangsa maka sangatlah tepat jika nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai moral untuk landasan dalam menjalin kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Misnaini, 2018). Pancasila sebagai dasar negara mengandung makna bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dan pedoman dalam membentuk dan menyelenggarakan negara, termasuk menjadi sumber dan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (Octavian, 2018).

Kahar & Susila (2012:128) menjelaskan bahwa keterkaitan sila-sila Pancasila sebagai landasan jalannya penyelenggaraan negara di Indonesia. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar yang memimpin cita-cita kenegaraan Indonesia untuk menyelenggarakan segala yang baik bagi rakyat dan masyarakat. Oleh karena itu, nilai ketuhanan dianggap penting untuk dijadikan landasan kehidupan bernegara, yaitu sebagai salah satu poin yang tercantum dalam Pancasila (Meirarno, 2012). Dasar kemanusiaan adalah kelanjutannya sebagai dasar perbuatan yang baik di dalam praktek kehidupan bermasyarakat. Dasar persatuan Indonesia menegaskan sifat negara Indonesia sebagai negara nasional yang satu dan tidak terbagi-bagi berdasar ideologi sendiri. Dasar kerakyatan menciptakan pemerintah yang adil yang mencerminkan kemauan rakyat, yang dilakukan dengan rasa tanggung jawab, agar terlaksana keadilan sosial. Dasar keadilan sosial ini adalah pedoman dan sekaligus tujuan. Nilai-nilai Pancasila adalah sebagai sumber nilai dalam realisasi normatif dan praksis dalam kehidupan bernegara dan kebangsaan (Zabda, 2016).

Berikut ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila Pancasila menurut Asmaroini (2017):

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama ini adalah dimana kita sebagai manusia yang diciptakan wajib menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangan-Nya. Setiap masyarakat Indonesia berhak untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing dan wajib menjalankan apa yang diperintahkan dalam agama masing-masing.

2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab

Sila kedua ini menjelaskan bahwa kita sesama manusia mempunyai derajat yang sama di hadapan hukum.

3. Persatuan Indonesia

Makna persatuan hakikatnya adalah satu, yang artinya bulat tidak terpecah.

4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan

Dalam sila ini menjelaskan tentang demokrasi, adanya kebersamaan dalam mengambil keputusan dan penanganannya, dan kejujuran bersama.

5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Makna sila ini adalah adanya kemakmuran yang merata bagi seluruh rakyat, seluruh kekayaan dan sebagainya dipergunakan untuk kebahagiaan bersama dan melindungi yang lemah.

### **Implementasi Nilai Pancasila di Era Globalisasi Bagi Peserta Didik**

Arus globalisasi semakin menyebar ke segenap penjuru dunia. Penyebarannya berlangsung secara cepat dan meluas, tak terbatas pada negara-negara maju dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi juga melintasi batas negara-negara berkembang dan miskin dengan pertumbuhan ekonomi rendah. Agustin (2011) mengungkapkan bahwa dalam perkembangan globalisasi menimbulkan berbagai masalah dalam bidang kebudayaan, misalnya hilangnya budaya asli suatu daerah atau suatu negara, terkikisnya rasa cinta budaya dan nasionalisme generasi muda, menurunnya rasa nasionalisme dan patriotisme, hilangnya sifat kekeluargaan dan gotong royong, kehilangan kepercayaan diri dan gaya hidup kebarat-baratan.

Arus globalisasi telah mengubah jutaan masyarakat mulai dari pola pikir, kebiasaan, hingga gaya hidup. Derasnya arus informasi membuat kecenderungan yang mengarah pada pemudaran nilai-nilai luhur yang ada di masyarakat. Maka dari itu perlunya penanaman kembali nilai-nilai Pancasila kepada peserta didik dalam rangka pembenahan akhlak dan moral generasi penerus bangsa di era globalisasi.

Implementasi nilai-nilai Pancasila pada generasi muda khususnya peserta didik di era globalisasi dapat dilakukan melalui pendidikan. Hidayatillah (2014) menyatakan bahwa Pancasila memiliki kaitan erat dengan pendidikan pada umumnya, dan secara khusus pada Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Ini dikarenakan melalui pendidikan kewarganegaraan setiap individu dapat mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan, sebagai upaya untuk mempersiapkan dirinya menghadapi konteks kehidupan bermasyarakat yang lebih luas (Alfiansyah & Wangid, 2018). Selain itu, Pendidikan kewarganegaraan diberikan adalah untuk mempersiapkan mereka untuk menjadi warga negara yang baik dan untuk mengembangkan kompetensi kewarganegaraan secara umum (Merry & Schinkel, 2016).

Pendidikan kewarganegaraan bermaksud untuk menciptakan peserta didik agar memiliki karakter yang mencerminkan nilai-nilai pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia yang dimanifestasi dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai ini juga mampu menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan Pendidikan Kewarganegaraan mempersiapkan kaum muda untuk hidup secara baik dan efektif di kehidupan keluarga, masyarakat, negara, dan global (Bologum & Yusuf, 2019).

Implementasi nilai-nilai Pancasila di era globalisasi kepada peserta didik dapat dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai karakter. Menurut Daryanto (2013:47) telah teridentifikasi 18 nilai yang bersumber dari agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional, yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai presentasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab. Sebagaimana diketahui bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang secara khusus membentuk pelajaran yang secara khusus membentuk karakter yang "*smart and good citizen*" berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

## **SIMPULAN**

Pancasila menjadi landasan jalannya suatu negara. Pancasila memiliki serangkaian nilai yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Pancasila telah ada dalam segala bentuk kehidupan rakyat Indonesia. Pancasila sebagai falsafah hidup menginginkan agar moral Pancasila menjadi cita-cita dan merupakan inti semangat bersama dari berbagai moral yang secara nyata terdapat di Indonesia. Implementasi nilai-nilai Pancasila di era globalisasi kepada peserta didik dapat dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai karakter melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

## **REFERENSI**

- Adha, M. M. (2020). Kekuatan nilai-nilai Pancasila dalam membangun kepribadian masyarakat Indonesia. *Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan*. 15(1). 121-138.
- Agustin, Y. S. D. (2011). Penurunan rasa cinta budaya dan nasionalisme generasi muda akibat globalisasi. *Jurnal Sosial Humaniora*. 4(2), 177-185.
- Alfiansyah, H. R., & Wangid, M.N. (2018). Muatan pendidikan kewarganegaraan sebagai upaya membelajarkan civic knowledge, civic skill, dan civic disposition di sekolah dasar. *Jurnal Pembangunan Pendidikan*. 6(2). 185-194.
- Asmaroni. P. A. (2017). Menjaga eksistensi Pancasila dan penerapannya bagi masyarakat di era globalisasi. *Jurnal Pancasila dan Kewaragaearaan*. 2(1). 50-64. E-ISSN 2527-7057.
- Balogum, I. N., & Yusuf, A. (2019). Teaching civic education to learners through best practices. *Anatolian Journal of Eduction*. 4(1). 39-48. Doi: 10.29333/aje.2019.414a.
- Chairiyah. (2014). Revitalisasi Nilai-nilai Pancasila sebagai pendidikan karakter. *Jurnal Pendidikan Ke-SD-an*. 1(1). 54-62.
- Damnhuri, et al. (2016). Implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai upaya pembangunan karakter bangsa. *Untirta Civic Education Journal*. 1(2).185-198.
- Daryanto & Suyatri. (2013). *Implimentasi pendidikan karakter di sekolah*. Yogyakarta. Gava Media.
- Hadiwijono, A. (2016). Pendidikan Pancasila, eksistensinya bagi mahasiswa. *Jurnal Cakrawala Hukum*. 7(1). 82-97.

- Harahap, M. (2016). Esensi peserta didik dalam prespektif pendidikan Islam. *Jurnal Al-Thariqah*. 1(2). 140-155. *Jurnal Pelopor Pendidikan*. 6(2).
- Hidayatillah, Y. (2014). Urgensi eksistensi Pancasila di era globalisasi (studi kritis terhadap persepsi mahasiswa STKIP PGRI Sumenep tentang eksistensi Pancasila).
- Irhandayaningsih, A. (2012). Peranan pancasila dalam menumbuhkan kesadaran nasionalisme generasi muda di era global. *Humanika*. 16(9). 1-10.
- Istiarsono, Z. (2016). Tantangan pendidikan dalam era globalisasi: kajian teoritik. *Jurnal Intelegensia*. 1(2).
- Kaelan. (2014). *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kahar, J., & Susila. (2012). *Pokok-pokok pemikiran Bung Hatta*. Yogyakarta: Mata Padi. Pressindo.
- Kansil, & Christine. (2011). *Empat pilar berbangsan dan bernegara*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Kartika, I.M. (2018). Peranan nilai-nilai pancasila dalam membangun etika politik di Indonesia. *Widya Accarya*, 9(2).
- Kurniawan. I. M, (2015). Tri pusat pendidikan sebagai sarana pendidikan karakter anak di sekolah dasar. *Journal Pedagogia*. 4(1). 41-49. ISSN 2089-3833.
- Maunah, B. (2015). Implementasi pendidikan karakter dalam pembentukan kepribadian holistik siswa. *Jurnal Pendidikan Karakter*. V(1). 90-101. Doi: <https://doi.org/10.21831/jpk.v0i1.8615>.
- Meinaro, A.E., Dkk. (2012). *Manusia dalam kebudayaan masyarakat*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Merry, S. M. & Schinkel, A. (2016). Voting rights for older children and civic education. *Public Affairs Quarterly*. 30(3). 197-213. <http://www.jstore.com/stable/44732769>.
- Misnaini, S. (2018). Pengaruh pembelajaran nilai-nilai pancasila terhadap perilaku mahasiswa di STIK Bina Husada. *Jurnal Ilmiah P2M STKIP Siliwangi*. 5(2). 75-84.
- Munir, M.B.M, Salamah,U & Suratman. (2016). *Pendidikan Pancasila*. Malang: Madani Media.
- Muslimin, H. (2016). Tantangan terhadap pancasila sebagai ideologi dan dasar negara pasca reformasi. *Jurnal Cakrawala Hukum*. 7(1). 30-38.
- Muzayin. (1992). *Ideologi Pancasila (bimbingan ke arah penghayatan dan pengamalan bagi remaja)*. Jakarta: Golden Terayon Press.

- Ningrum, D. (2015). Kemerosotan moral di kalangan remaja: sebuah penelitian mengenai parenting styles dan pengajaran adab. *UNISIA*. Vol XXXVII. NO 82.
- Octavian, A.W. (2018). Urgensi memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai sebuah bangsa. *Jurnal Bhineka Tunggal Ika*. 5(2). 123-128.
- Roqib, M. (2009). *Ilmu pendidikan Islam, pengembangan pendidikan integrative di sekolah, keluarga, dan masyarakat*. Yogyakarta: LkiS.
- Semadi, P.Y. (2019). Filsafat pancasila dalam pendidikan di Indonesia menuju bangsa berkarakter. *Jurnal Filsafat Indonesia*. 2(2). 82-89.
- Saputra, I. (2017). Aktualisasi nilai Pancasila sebagai kunci mengatasi penyalahgunaan narkoba di Indonesia. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*. 2(2). 26-35. Doi: 10.24269/v2.n2.2017.26-35.
- Sukmayadi, T. (2018). Nilai-nilai kearifan lokal dalam pandangan hidup masyarakat adat kampong Kuta. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*. 3(1). 19-29. ISSN 2527-7057.
- Trianto. (2007). *Model-model pembelajaran inovatif berorientasi konstruktivistik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Zabda, S.S. (2016). Aktualisasi nilai-nilai pancasila sebagai dasar falsafah negara dan implementasinya dalam pembangunan karakter bangsa. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*. 26(2). 106-114.

## **Penguatan Nilai-Nilai Pancasila di Kalangan Siswa SMA Negeri 9 Bandar Lampung**

**Wayan Putra Irawan**

### **Abstrak**

Penguatan nilai-nilai Pancasila dalam proses pendidikan merupakan hal sangat penting untuk digali. Hal tersebut termasuk sekolah menengah atas sebagai penyelenggara Pendidikan. Penelitian ini didasarkan pada pentingnya penguatan nilai Pancasila dikalangan siswa-siswi SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penguatan nilai-nilai Pancasila di SMA Negeri 9 Bandar Lampung dan untuk mengetahui kegiatan apa saja dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila di SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian ini adalah kepala sekolah, guru sekolah, staff sekolah, disdikbud lampung, pemprov lampung, dan siswa-siswi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan nilai-nilai Pancasila dilaksanakan dengan serangkaian kegiatan sosialisasi Pancasila melalui pengembangan sosial budaya yang dilakukan dengan melaksanakan upacara bendera, memperingati hari kesaktian Pancasila, Kegiatan pramuka, melaksanakan salat jamaah dan program lampung mengaji, melaksanakan program *Eco-Office*, melaksanakan kegiatan rutin PUSDIKLATGAB setiap tahun, dan sosialisasi sekolah toleransi SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Kegiatan rutin yang diimplementasikan SMA Negeri 9 Bandar Lampung ini mampu menguatkan nilai-nilai Pancasila dikalangan siswanya.

**Kata kunci:** *Pancasila; Nilai; Penguatan; Revolusi industri 4.0*

### **PENDAHULUAN**

Perkembangan pendidikan pada Revolusi Industri 4.0 saat ini ditandai dengan terjadinya Perubahan sangat signifikan pada aspek ilmu pengetahuan, teknologi, dan komunikasi dan sangat berpengaruh pada karakter manusia dan dunia kerja (Maemunah, 2018; Trisiana et al., 2019). Pada masa ini juga akan terjadi perubahan pada era sebelumnya, sehingga dampak logis yang harus dihadapi adalah perubahan dan pergeseran jenis tenaga kerja pada era sekarang dan mendatang (Suwardana, 2018). Indonesia sebagai negara berkembang yang turut berkomitmen dalam era ini juga harus mampu menyiapkan sumber daya manusia yang andal, memiliki disiplin yang bagus, memiliki kualitas dan kuantitas yang tinggi, hingga mampu bersaing pada era persaingan global (Subekti et al., 2018).

Namun pada kenyataannya, Indonesia saat ini masih dihadapkan pada kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) dengan angkatan kerja berkisar 58.76% yang merupakan lulusan SD SMP dan masalah ketidakcocokan mencapai 63%, oleh sebab itu diperlukan suatu usaha dari sedini mungkin dalam upaya

pembangunan SDM agar keterampilan dan kompetensi sumber daya manusia di Indonesia mampu bersaing (Kusdiantini, 2018). Hal tersebut menunjukkan bahwa keadaan sumber daya manusia di Indonesia masih rendah dan jauh dari kata produktif. Padahal seharusnya sumber daya manusia pada era ini harus lebih mampu bersaing dan lebih baik dari sebelumnya.

Kondisi pendidikan pada era revolusi industri saat ini ibarat seperti dua sisi mata uang. Satu sisi memiliki nilai positif bagi produktivitas hasil kerja dan efisiensi proses produksi. Namun pada sisi lain, revolusi industri juga memiliki sisi negatif, diantaranya adalah kompetitif dunia kerja yang berujung banyaknya tenaga kerja tidak terpakai dan disrupsi teknologi yang harus diantisipasi oleh Indonesia (Satya, 2018). Perubahan tersebut juga berdampak pada perkembangan dunia yang masuk pada era digital yang disebut era disrupsi, sehingga semua sektor termasuk politik, ekonomi, dan pendidikan juga merasakan dampaknya (Harto, 2018).

Dampak tersebut menyebabkan dunia pendidikan sebagai sarana untuk melaksanakan dan penyaluran ilmu pengetahuan secara eksplisit harus memiliki sistem yang dapat mendukung bagi terselenggaranya kegiatan tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari tantangan yang turut dihadapi pendidikan di Indonesia yang dituntut agar memiliki cara berpikir, cara belajar, dan cara bertindak para peserta didik yang masih terbatas. Oleh sebab itu, perlu adanya upaya dari dini yang dilakukan oleh pendidik untuk menghasilkan pendidikan yang bermutu dan berkualitas dan memperbaiki moral generasi emas di masa yang akan datang (Nursyifa, 2019).

Pengaruh teknologi dan komunikasi yang cepat pada era disrupsi ini juga berpengaruh pada Tingginya penggunaan media sosial yang digunakan oleh masyarakat (Triyanto & Fadhilah, 2018). Hal itu ditunjukkan dengan digunakan oleh masyarakat (Triyanto & Fadhilah, 2018). Hal itu ditunjukkan dengan media sosial yang sekarang semakin menjamur, sehingga menimbulkan perilaku anti sosial dan melunturkan kebiasaan-kebiasaan baik yang berakar dari nilai-nilai Pancasila di kalangan masyarakat terutama siswa (Amedie, 2015; Nasihuddin, 2016), belum lagi terjadinya ketimpangan antara sikap moral yang diharapkan

ideal dengan keadaan sebenarnya mengenai keadaan sosial yang terjadi di sekolah maupun di masyarakat. Hal tersebut menandakan perlu ditingkatkannya penguatan nilai-nilai Pancasila dalam proses pendidikan yang dilakukan melalui proses kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menguatkan nilai-nilai Pancasila. Pada tataran instrumental makro, perlu adanya pendidikan nilai berbasis sekolah dan pendidikan nilai berbasis masyarakat sebagai wadah dalam memperbaiki nilai-moral secara sistemis dan menyeluruh untuk menciptakan kondisi budaya sosial di sekolah yang sesuai dengan apa yang diharapkan (Hakam, 2011). Cara yang tepat untuk dilakukan dapat dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan penguatan, penanaman dan memberikan pengetahuan awal mengenai Pancasila sejak usia remaja terutama pada umur 15–18 tahun, yaitu pada jenjang sekolah menengah atas. Hal tersebut dikarenakan siswa SMA/MA masih ada di tingkatan awal dan sangat potensial untuk menerima pemahaman mengenai nilai-nilai Pancasila sejak remaja. Siswa SMA/MA juga dapat dijadikan sebagai acuan dalam proses penyusunan dalam penguatan nilai-nilai Pancasila, sehingga dapat mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis yang diajarkan oleh para pendidik di sekolah dan Menentukan fondasi awal untuk melangkah melanjutkan pendidikan (Mares, et. al., 2015).

Oleh karena itu, perlu adanya upaya penguatan di sekolah menengah atas. Salah satunya adalah SMA Negeri 9 Bandar Lampung yang menjadi sekolah agama yang berada di tengah kota Bandar Lampung, memiliki keunggulan dan prestasi yang cukup banyak pada bidang akademik dan non-akademik. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan di SMA Negeri 9 Bandar Lampung dengan tujuan untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh sekolah untuk penguatan nilai-nilai Pancasila dan mengetahui kegiatan apa saja dalam memperkuat nilai-nilai Pancasila di SMA Negeri 9 Bandar Lampung.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif pada salah satu SMA Negeri di kota Bandar Lampung yang menerapkan kurikulum 2013 dan lebih menekankan pada aspek penilaian dan pengembangan kognitif, afektif, dan psikologis siswa. Penentuan informan dalam penelitian ini ditentukan lewat teknik pengambilan sampel secara sengaja, artinya informan yang dipilih berdasarkan pada penilaian, alasan yang jelas, dan tujuan yang sudah ditentukan, misalnya orang-orang yang dianggap telah memahi situasi sosial atau masalah yang akan diteliti (Sugiyono, 2012). Oleh karena itu narasumber pada penelitian ini adalah Kepala Sekolah SMA Negeri 9 Bandar Lampung selaku pengawas kegiatan disekolah dan praktisi atas sosialisasi yang dilaksanakan pada lingkungan sekolah demi penguatan nilai-nilai pancasila pada siswa SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Kemudian, dari pihak laur sekolah sangat membantu sekali dalam proses penguatan nilai-nilai Pancasila dilingkungan sekolah kami, diataranya Disdikbud dan Pemprov Lampung yang telah mengesahkan program Eco Office di SMA Negeri 9 Bandar Lampung.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi kepustakaan, observasi, wawancara kepala sekolah dan guru pada SMA Negeri 9 Bandar Lampung, serta dokumentasi kegiatan. Validitas data pada penelitian ini menggunakan triangulasi data, sumber, dan teknik. Analisis data pada penelitian ini berlangsung selama proses pengumpulan data dan setelah selesai pengumpulan data yang menggunakan teknik dari Creswell (2014) yang terdiri dari mengorganisasikan dan menyiapkan data, membaca data, analisa umum mendeskripsikan tema-tema kedalam penjelasan kualitatif, dan analisis akhir.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penguatan dan pelaksanaan sosialisasi nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan melalui berbagai cara. Salah satunya dapat diterapkan melalui pengembangan kekuasaan (Budimansyah, 2010). Penguatan nilai-nilai Pancasila di SMA/MA merupakan bagian dari jalur pendidikan pembelajaran karakter 2020 yang diterapkan oleh Nadiem makarim menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, beliau menjelaskan bahwa pendidikan karakter yang memiliki landasan Pancasila

selama ini direpresentasikan hanya sebatas pada metode penghafalan butir-butir Pancasila, namun minim pada pengalaman dan pengaplikasian. Padahal menurutnya hal penting dari pendidikan karakter adalah bagaimana seorang pendidik memberikan dan menunjukkan contoh nyata nilai-nilai karakter yang sudah ada pada Pancasila kedalam aktivitas pembelajaran secara konkrit. Upaya-upaya yang dapat ditempuh dalam menguatkan nilai-nilai Pancasila di SMA/MA dapat dilihat dari berbagai kegiatan-kegiatan sekolah dan program pemerintah yang dilakukan di sekolah tersebut. Kegiatan di SMA Negeri 9 Bandar Lampung yang dapat mendukung untuk mengutamakan nilai-nilai Pancasila dapat dijabarkan sebagai berikut.

#### 1. Melaksanakan Upacara Bendera

Pelaksanaan kegiatan upacara bendera merupakan kegiatan rutin yang dilakukan pada setiap hari senin pukul 07.00 WIB. Kegiatan ini juga dilakukan dalam rangka memperingati hari-hari nasional, seperti: sumpah pemuda; 17 agustus; hari guru; hari pendidikan; hari Pramuka; dan lain sebagainya. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan diantara siswa, guru, dan staf pendukung di sekolah, memupuk rasa nasionalisme dan patriotism sedini mungkin dikalangan siswa. Melalui kegiatan rutin ini jugalah siswa dan seluruh warga di sekolah menjadi terbiasa untuk bersikap disiplin dan tepat waktu. Hal tersebut dikarenakan upacara yang selalu dilakukan oleh pihak sekolah selalu diadakan pada pagi hari, pukul 07.00 WIB, sehingga siswa dan guru-guru banyak yang terlambat dan menunggu di luar pagar.



Gambar 1. Pelaksanaan kegiatan upacara bendera

Oleh karena itu, dengan melaksanakan upacara ini turut mendukung perubahan warga sekolah menjadi lebih baik. Kegiatan upacara bendera ini diikuti oleh siswa kelas X-XII yang memang masuk pada pagi hari dan juga seluruh guru dan staff sekolah. Petugas upacara secara bergiliran dilaksanakan oleh kelas yang berbeda, mulai dari kelas X sampai kelas XII akan bergiliran setiap minggu bertugas sebagai pemimpin upacara, membacakan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, MC, dan doa. Petugas yang menyampaikan amanat pada pagi hari pun juga berbeda-beda. Hal ini bertujuan untuk menghindari rasa bosan dan monoton bila hanya kepala sekolah saja yang berbicara setiap minggu nya.

## 2. Memperingati Hari Kesaktian Pancasila

Momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober menjadi salah satu saat yang tepat bagi siswa siswi SMA Negeri 9 Bandar Lampung untuk belajar toleransi dan mengenang sejarah. Tanggal tersebut diperingati berkaitan dengan peristiwa gerakan 30 September yang dikenal dengan singkatan (G30S/PKI) yang terjadi 30 September 1965. Gerakan tersebut adalah gerakan yang merongrong ideologi Pancasila bangsa Indonesia yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Pancasila sebagai dasar ideology bangsa Indonesia, merupakan pengikat. Mengingat Indonesia secara geografi terdiri dari ribuan pulau yang masing-masing pulau didiami oleh berbagai Ras, suku, etnis, budaya, dan agama.

Pada dasarnya Indonesia itu kaya, kaya akan segala macam hal dari kaya Ras, Suku, Agama, Pulau, Etnis dan Budayanya. Dari sinilah seluruh siswa-siswi kita belajar saling menghargai, menghargai dalam berbagai macam dari mulai agama misalnya karena ketika sudah berada disekolah siswa-siswi sudah terdapat berbagai macam ras, suku, budaya dan agama. Namun, seiring dengan arus modernisasi yang terus melekat dalam kehidupan masyarakat, semangat dan nilai-nilai Pancasila rasanya sudah mulai hilang dari peredaran, khususnya bagi generasi pemuda saat ini. Belum lagi, pengaruh kekuatan global yang kian merasuk, sehingga generasi penerus bangsa harus mampu membentengi diri agar tidak mudah terpengaruh.

Dalam peringatan hari kesaktian Pancasila, Kepala sekolah SMA 9 Bandar Lampung, Drs. H. Suharto, M.Pd menyampaikan bahwa “momentum peringatan hari kesaktian pancasila adalah momentum kita untuk lebih mengenal perbedaan dan membentengi dari dari pengaruh global yang tidak baik”. Secara luas Pengertian Pancasila Sebagai Ideologi Negara Indonesia adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ialah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan serta menjunjung tinggi nilai keadilan.

### 3. Kegiatan Pramuka

Kegiatan pelatihan pramuka dilakukan setiap hari jumat. Hal ini dilakukan untuk melatih sikap kepemimpinan dan latihan baris-berbaris yang rapi dan teratur. Kegiatan ini dilakukan selama 1-2 jam yang diisi dengan materi dan praktik kepramukaan. Bisa berupa latihan baris-berbaris di lapangan, ataupun latihan tali-menali yang baik, ataupun menyanyikan lagu-lagu mengenai semangat kepramukaan. Siswa yang mengikuti kegiatan ini adalah siswa kelas X-XII. Tujuan lain dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan diantara para peserta didik, memupuk rasa percaya diri dan meningkatkan keterampilan siswa dalam sikap dan ketahanan mental untuk mengikuti kemah di luar sekolah nantinya.



Gambar 3. Kegiatan Pramuka

Adapun rangkaian kegiatan atau pelaksanaan pramuka di SMA Negeri 9 Bandar Lampung sebagai berikut.

1) Latihan Rutin

Latihan rutin dilaksanakan setiap Jumat, sepulang sekolah. Latihan ini dilaksanakan dalam rangka mengasah minat dan bakat setiap anggota dalam kepramukaan.

2) Pelantikan Bantara dan Laksana

Pelantikan bantara dan laksana merupakan pelantikan kenaikan tingkatan setiap anggota pramuka yang telah memenuhi persyaratan . Kegiatan ini bertujuan untuk menumnuhkan jiwa kepemimpinan setiap anggota.

3) Rekreasi Variatif (Rekvar)

Rekreasi variatif ini merupakan kegiatan penyegaran kembali, baik jasmani maupun rohani anggota-anggota pramuka sembilan setelah melewati beberapa kegiatan dalam kurun waktu kurang lebih setengah tahun. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan rasa kekeluargaan antaranggota.

4) Buka Bersama

Buka bersama merupakan acara tahunan pramuka sembilan yang diadakan pada bulan Ramadhan. Acara ini melibatkan pembina, alumni, dan juga anggota-anggota pramuka sembilan. Tujuan dari acara ini adalah terjalinnya hubungan dan komunikasi yang baik antara pembina, alumni, maupun anggota.

5) Bakti Sosial

Bakti sosial merupakan suatu kegiatan berupa wujud dari kepedulian terhadap sesama sebagai makhluk sosial. Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kepedulian terhadap sesama, meningkatkan kesadaran akan rasa kemanusiaan.

4. Melaksanakan Salat Jamaah dan Program Lampung Mengaji

Manusia selalu berusaha untuk menirukan dunia yang suci ke dunia nyata yang fana seperti saat ini dengan berusaha menerima kebaikan Tuhan melalui

kegiatan agama (Puspitasari et al., 2012). Oleh karena itu, setiap wilayah secara material terkait dengan berbagai hal-hal immaterial di dunia (Goh & van der Veer, 2016). Salah satunya adalah wilayah SMA/MA pada penelitian ini terdiri dari siswa, guru, dan pengurus yang menganut agama Islam. Kegiatan religius dan berbau agama yang selalu diterapkan oleh pihak sekolah adalah melaksanakan salat jamaah Zuhur dan Asar. Kegiatan ini dilakukan saat istirahat kedua bagi siswa kelas X, XI, dan XII tepat dengan waktu salat Zuhur. Kegiatan salat jamaah ini dilakukan lima hari saja, yakni Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Pada kegiatan ini, kepala sekolah ataupun guru laki-laki yang akan memimpin sebagai imam.



Gambar 4. Pelaksanaan Salat Jamaah dan Program Lampung Mengaji

Kebiasaan melaksanakan salat berjamaah ini juga dilakukan agar siswa dapat bersosialisasi dengan siswa dari kelas yang lain. Selain itu, melalui kegiatan ini juga dapat memupuk rasa religius siswa akan agama yang dianut, mendisiplinkan dan melatih siswa untuk salat tepat waktu. Karena pada dasarnya, upaya yang niscaya dapat dilakukan untuk menguatkan nilai ketuhanan di SMA/MA tersebut dapat diterapkan melalui pengajaran, peneladanan, pelatihan, pembinaan disiplin dan kontrol diri, dan memberi contoh yang baik dalam menjalankan ajaran agama yang dianut untuk membantu siswa dalam membiasakan diri dalam bersikap disiplin dan religius pada setiap kegiatan di lingkungan sekolah dan masyarakat.

Selain melaksanakan salat berjamaah SMA Negeri 9 Bandar Lampung juga melaksanakan program Pemprov Lampung yaitu Lampung Mengaji, kegiatan ini dilakukan sebelum memulai pembelajaran dikelas. Biasanya pada

saat membaca ayat Al-Qur'an akan dipimpin langsung oleh guru mata pelajaran atau wali kelas masing-masing. Program Lampung mengaji disahkan pada tahun 2019 oleh Pemerintah Provinsi Lampung yang akan diterapkan di sekolah mulai dari SD, SMP, hingga SMA/SMK. Program tersebut sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2023 dan juga misi gubernur dan wakil gubernur Lampung 2019-2024.

#### 5. Pelaksanakan Program Eco-Office

Program Eco Office yang digalakkan Pemerintah Provinsi Lampung tidak hanya di lingkungan pegawai saja, namun program tersebut melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung dideklarasikan di sekolah-sekolah yang ada di Lampung. Seperti yang dilakukan SMA Negeri 9 Bandar Lampung yang melakukan deklarasi Eco Office di sekolahnya, pada kegiatan tersebut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lampung Sulpakar. Pada kegiatan tersebut Sulpakar mengatakan program ini bertujuan untuk mengurangi sampah yang sulit terurai seperti plastik dan kertas. "Deklarasi ini tidak lain untuk membiasakan diri menjaga lingkungan agar bersih dan sehat," kata dia, Jumat (4/10/2019).



Gambar 6. Pelaksanaan Program Eco-Office

Menjaga lingkungan, menurutnya harus melibatkan semua elemen masyarakat termasuk siswa sekolah. "Makanya sasaran kita anak-anak di sekolah, karena paling banyak menggunakan plastik. Sehingga kita turun ke sekolah agar program tersebut berjalan," ungkapnya. Program ini sangat penting dalam penguatan nilai-nilai Pancasila yaitu pada sila ke tiga "Persatuan Indonesia". Kita bersatu bersama-sama dalam menjaga

lingkungan sekitar dengan cara yang sederhana seperti kegiatan Eco Office ini.

#### 6. Melaksanakan Kegiatan Rutin PUSDIKLATGAB

Kegiatan tahunan yang bertujuan untuk membangun karakter siswa guna mempersiapkan siswa yang mandiri serta berkarakter baik. Kegiatan yang berlangsung di Taman Bumi Kedaton yang diselenggarakan pada tanggal 18-19 Oktober 2019 telah terlaksana dengan lancar. Kegiatan ini diikuti oleh siswa kelas X-XI SMA Negeri 9 Bandar Lampung yang tergabung di dalam 15 Ekstrakurikuler di antaranya, Cyber9, Kolastra, Ansamble, NEC, Futsal, Basket, Volly, Tinju, Sagita, KIR, PMR, Pramuka, Paskibra, Pasmala, Rohis, dan OSS. Banyak materi yang diberikan kepada siswa baik tentang Kepemimpinan, Manajemen, Kerjasama, Solidaritas, Gotong royong, Problem Solving, dan banyak materi lainnya.



Gambar 6. Melaksanakan Kegiatan Rutin PUSDIKLATGAB

Salah satu pemateri dalam kegiatan orientasi kali ini adalah Bapak Irjen. (Pol) Dr. Hi. Ike Edwin, S.Ik, SH, MH, MM yang merupakan mantan Kapolda Lampung yang memberikan materi tentang kepemimpinan dan karakter. Beliau berpesan kepada siswa agar mengedepankan karakter baik dan agar serius dalam mengapai cita-cita. Kegiatan telah berjalan dengan baik dan lancar, semua materi telah dipaparkan dan diberikan kepada siswa. Semoga akan menjadi bekal untuk siswa tentang pengembangan diri, karakter dan menjadi bekal bagi siswa agar berprestasi baik di bidang akademik maupun non akademik.

## 7. Sosialisasi Sekolah Toleransi SMA Negeri 9 Bandar Lampung

Kepolisian RI menggelar sosialisasi SEKOLAH TOLERANSI. Karo Penmas Div Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar saat pemaparannya ke seluruh siswa SMA Negeri 9 Bandar Lampung, Jumat (26/9) mengatakan, sosialisasi ini sasarannya agar seluruh siswa memahami nilai-nilai Pancasila. SEKOLAH TOLERANSI adalah singkatan dari Sarana – Edukatif – Kolektif – Orientasi – Langsung – Aspek – Harmoni – Tenggang Rasa- Orang Lain – Empati – Rukun – Akur – Nilai – Sejati – Indonesia. SEKOLAH TOLERANSI mengupayakan penanaman nilai toleransi pada generasi muda. Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjend Boy Rafli Amar menyebutkan generasi muda bangsa Indonesia sudah ada yang mengidolakan teroris. “Polri dalam konstitusi negara bertugas melindungi masyarakat Indonesia dengan fokus pada generasi muda. Dengan membuat ekskul SEKOLAH TOLERANSI ini diharapkan ada pemahaman terhadap nilai-nilai kebangsaan yang telah ditetapkan pendiri bangsa. Yakni Pancasila, UUD 1946, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Empat konsensus itu yang diambil dari nilai-nilai luhur budaya bangsa yang melindungi Indonesia sendiri dari berbagai pengaruh luar. Empat konsensus itu yang menjadi jati diri kita, identitas kita sebagai bangsa Indonesia,” Ekskul SEKOLAH TOLERANSI menyasar khusus anak usia Sekolah Menengah Atas. Polda Lampung adalah Polda kedua setelah Polda Metro Jaya yang cepat menyambut hangat agar program tersebut dilaksanakan di Provinsi Lampung. Untuk kota Bandar Lampung sendiri, SMA Negeri 9 Bandar Lampung menjadi sekolah pertama yang akan melaksanakan program ekskul tersebut.



Gambar 7. Sosialisasi Sekolah Toleransi SMA Negeri 9 Bandar Lampung.

## **SIMPULAN**

Penguatan nilai-nilai Pancasila di SMA Negeri 9 Bandar Lampung secara keseluruhan dilaksanakan dengan jalur sosialisasi Pancasila melalui pengembangan sosial budaya yang dilakukan dengan melaksanakan upacara bendera, memperingati hari kesaktian Pancasila, Kegiatan pramuka, melaksanakan salat ja-maah dan program lampung mengaji, melaksanakan program Eco-Office, melaksanakan kegiatan rutin PUSDIKLATGAB setiap tahun, dan sosialisasi sekolah toleransi SMA Negeri 9 Bandar Lampung. Berbagai upaya-upaya yang dilakukan SMA Negeri 9 Bandar Lampung berjalan dengan baik dan lancar. Hasil yang menunjukan sangat bagus, bahkan sekolah SMA Negeri 9 Bandar Lampung menjadi percontohan bagi sekolah-sekolah di Kota Bandar Lampung.

Secara keseluruhan penguatan nilai-nilai Pancasila di SMA Negeri 9 Bandar Lampung terdapat perubahan sikap dari anti sosial, egois menjadi lebih disiplin, siswa memiliki sikap peduli sosial, sadar akan menjaga dan melestarikan lingkungan, serta dapat menjaga keseimbangan diri dari masuknya era pendidikan revolusi industry 4.0 di Indonesia saat ini. Penguatan nilai-nilai Pancasila di SMA Negeri 9 Bandar Lampung ini secara keseluruhan juga dapat mengubah perilaku siswa menjadi lebih empati, bersikap peduli sosial, memiliki disiplin tinggi, dan peduli akan lingkungan sekitar merupakan hal yang perlu dipelihara dan diteruskan adalah kesadaran dan kepedulian akan sesama. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan seluruh elemen baik sekolah maupun negara dalam upaya penguatan nilai-nilai Pancasila di SMA Negeri 9 Bandar Lampung agar dapat meningkatkan kepedulian siswa akan lingkungan dan sikap sosial peserta didik dan dapat mewujudkan generasi emas yang berprestasi di masa yang akan datang.

## **REFERENSI**

Home / Berita Sekolah / Pusat Pendidikan Latihan Gabungan #PUSDIKLATGAB2019  
Home / Berita Sekolah / Sosialisasi SEKOLAH TOLERANSI di SMA Negeri 9 Bandar Lampung  
<https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/29030>

- Maemunah. (2018). Kebijakan pendidikan pada era revolusi industri 4.0. Prosiding Seminar Nasional Lembaga Penelitian Dan Pendidikan (LPP) Mandala.  
<http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/Prosiding/article/view/423/408>
- Madjid, A. (2020). ECOMSTER, Strategi Pendidikan Karakter Ala Menteri Mursalin Yasland/ Red:
- Nursyifa, A. (2019). Transformasi pendidikan ilmu pengetahuan sosial dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(1), 51–64.
- Revolusi Industri 4.0 dan Pentingnya Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia Halaman all - Kompasiana.com. (n.d.). Retrieved September 30, 2020, from <https://www.kompasiana.com/danielmashudi/5c2f217143322f1bad375914/revolusi-industri-4-0-danpentingnya-pengembangan-sumber-daya-manusia-indonesia?page=all>.
- Sasongko, A. (2019). <https://republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/pww8i3313/program-lampung-mengaji-di-sekolah-diluncurkan>  
<https://saungberita.com/sman-9-bandarlampung-ikut-deklarasi-eco-office/>.
- Satya, V. E. (2018). Pancasila dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. In Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI: Vol. X (Issue 09).

## **Pengarusutamaan Aspek Karakter Kewarganegaraan (*Civic Disposition*) dalam Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan**

**Zain Nugroho**  
[zain.nannerl@gmail.com](mailto:zain.nannerl@gmail.com).

### **Abstrak**

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjadi bagian dari upaya mengarusutamakan aspek civic disposition sebagai salah satu titik tekan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) di dalam kurikulum. Upaya ini bukan berarti semata-mata persoalan kuantitas persentase yang sama dengan dua aspek lain dari kompetensi PKn (civic knowledge dan civic skills) yang tersebar di dalam muatan kurikulum baik di SD, SMP, maupun SMA, akan tetapi, lebih dari itu, yakni, mendorong kualitas pada tataran praktik untuk mendapat perhatian lebih serius. Penelitian ini menggunakan sumber sekunder yang hendak menunjukkan data faktual mengenai komposisi tiga kompetensi PKn lintas kurikulum di berbagai jenjang pendidikan, sehingga urgensi pengarusutamaan civic disposition menjadi tampak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komposisi tiga kompetensi PKn di sejumlah kurikulum di jenjang SD, SMP, dan SMA, tidak berada pada posisi yang seimbang. Dengan demikian, pengarusutamaan aspek civic disposition menjadi mendesak untuk dilakukan agar misi PKn untuk membentuk watak warga negara yang baik dapat terwujud.

**Kata Kunci:** Karakter Kewarganegaraan, Kurikulum, PKn

## **PENDAHULUAN**

Setiap bangsa dan negara mengakui pentingnya pembangunan karakter bangsa (*national character building*) dalam kerangka mempertahankan eksistensi sebagai suatu negara bangsa (*nation state*), dan untuk membangun sekaligus untuk membentuk karakter kewarganegaraan yang baik (*good citizen*). Oleh karenanya kita tidak bisa melepaskan diri dari pentingnya peran pendidikan, sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pendidikan berperan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan kewarganegaraan dalam pengertian yang paling minimal, adalah ikhtiar untuk membentuk warga negara yang baik. Apabila demikian upaya yang hendak ditempuh, maka usaha membentuk warga negara yang baik telah terekam dengan sangat rapi dalam lintasan sejarah umat manusia. Manusia-manusia yang berada dalam dimensi ruang dan waktu yang berbeda telah berkhidmat kepada kemanusiaan mereka, dengan memenuhi takdir dan mengejawantahkan potensi yang mereka miliki untuk merancang bangunan pemikiran atas *good citizen*.

Rancang bangun pemikiran tersebut dapat ditelusuri secara surut hingga masa Yunani kuno. Kehidupan politik demokrasi yang dipraktikkan oleh penduduk Athena, tidak semata untuk melahirkan kebijakan yang baik serta mampu meliputi seluruh penduduk kota, akan tetapi lebih dari itu. Praktik kehidupan semacam Athena menjadi sumber daya bagi pendidikan kewarganegaraan warga kota tersebut. Ilustrasi Plato atas hal ini tercatat melalui dialog imajiner antara tiga orang laki-laki: Clinias, Megilus, dan seorang warga Athena tanpa nama. Dalam salah satu bagiannya, sang lelaki Athena menyampaikan kalimat-kalimatnya, “...ask in general what great benefit the state derives from the training by which it educates its citizens, and the reply will be perfectly straightforward. The good education they have received will make them good men...” (Plato, 1997: 641b7-10). Di bagian lain, lelaki tersebut melanjutkan mengenai tujuan pendidikan dimaksud, “...what we have in mind is education from childhood in virtue, a training which produces a keen desire to become a perfect citizen who knows how to rule and be ruled as justice demands,” (Plato, 1997: 643e3-6).

Pengandaian Plato di atas, yakni mengenai warga negara paripurna yang mengetahui cara memerintah sekaligus menjadi yang diperintah, disampaikan pula oleh muridnya, Aristoteles. Bagi Aristoteles, kedua pengetahuan tersebut memerintah dan diperintah mesti dimiliki oleh warga negara (Aristoteles, 1998: 1295<sup>b</sup>15-20). Kemampuan memerintah (*to rule*) dan diperintah (*be ruled*) mesti dikuasai bersamaan. Aristoteles menegaskan bahwa jika hanya salah satu

kemampuan yang dimiliki, maka timbul kedengkian di satu sisi, serta arogansi di sisi berseberangan.

Pada perkembangan masa sekarang, salah satu bentuk pendidikan kewarganegaraan terwujud ke dalam persekolahan. Mengapa persekolahan lantas menempati posisi penting dalam upaya ini? Terdapat sejumlah argumen mengenai hal ini. Pertama disampaikan oleh Sherrod, Flanagan, dan Younnis (2002: 264-272). Mereka membantah temuan yang lebih awal bahwa persekolahan tidak memiliki pengaruh berarti sebagai sarana pendidikan kewarganegaraan. Generasi muda, sebagai fokus utama studi mereka, menempati posisi kunci dan relatif lebih mudah untuk mampu bertransformasi berkaitan dengan kebiasaan dan nilai-nilai yang mereka anut. Argumen kedua disampaikan oleh Amy Gutmann (1990: 15). Menurutnya, persekolahan adalah bentuk yang paling disengaja dari aktivitas pengajaran terhadap manusia.

Meski demikian, bentuk pendidikan kewarganegaraan melalui persekolahan masih menemui hal klise. Paradigma positivisme maupun empirisme masih menyelimuti pendidikan kewarganegaraan lewat sekolah-sekolah. Manifestasi yang jamak ditemui adalah kecenderungan memandang siswa sebagai objek, dan oleh karenanya siswa dikuantifikasi ke dalam wujud angka-angka.

Untuk konteks Indonesia, misalnya, tampak dari studi yang dilakukan oleh Bouchier maupun Kalidjernih (Samsuri, 2010). Studi mereka menunjukkan bahwa selama tiga dekade masa Orde Baru kerangka pikir pendidikan kewarganegaraan lebih dititikberatkan pada pembentukan karakter kepatuhan warga negara, dalam hal ini siswa, terhadap tafsir resmi rezim politik. Karakter tersebut dianggap sebagai kebajikan atau keutamaan warga negara (*civic virtues*) yang dilekatkan pada misi pendidikan kewarganegaraan ketika itu. Pada satu sisi, kepatuhan ini memunculkan ketidakselarasan antara wacana dengan tindakan kewargaan (*civic action*) yang diharapkan. Sedangkan di sisi berseberangan, faktor eksternal seperti tekanan dan kepentingan politik serta ekonomi dalam jabatan publik, lebih banyak mempengaruhi ukuran keutamaan tindakan

kewargaan sebagai akibat dari ketidakselarasan tadi. Oleh karenanya, tindakan kewargaan yang diekspresikan seseorang cenderung bersifat semu.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam konteks Kurikulum 1994 memuat materi tafsiran pengamalan nilai-nilai Pancasila yang cenderung mereduksi arti penting Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan itu sendiri (Samsuri, 2013: 6). Kecenderungan tersebut terlihat dari model *delivery system* yang belum menyentuh aspek praksis ber-Pancasila seorang warga negara di ruang publik, yang termanifestasi ke dalam model penataran/hafalan butir-butir nilai pengamalan Pancasila dalam P4.

Dalam konteks Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) atau Kurikulum 2006, analisis kajian Pusat Kurikulum Balitbang menemukan bahwa secara kuantitatif komposisi Kompetensi Dasar (KD) dari ranah kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan (*civic knowledge*, *civic disposition* dan *civic skill/participation*), terdapat ketidakseimbangan sebagai muatan KD untuk tiap-tiap Standar Kompetensi (SK) baik di SD, SMP, maupun SMA (Samsuri, 2010). Tiga jenis kompetensi ini, yakni aspek *civic disposition* dan *civic skill/participation* yang menurut Puskur menjadi titik penekanan Pendidikan Kewarganegaraan, menempati proporsi yang relatif lebih sedikit apabila dibandingkan dengan aspek *civic knowledge*.

Dalam Kurikulum 2013, kajian Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 2013 menempatkan tanggung jawab pembentukan karakter tidak hanya pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, di mana Kompetensi Inti yang meliputi Kompetensi Sikap Spiritual, Sikap Sosial, Pengetahuan dan Keterampilan secara vertikal dan horisontal menjadi tanggung jawab semua mata pelajaran.

Menurut pandangan Samsuri yang menyitir Gerhard Himmelmann (Samsuri, 2013:6), fokus utama mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan melalui keberadaan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar telah berubah paradigma. Paradigma dimaksud semula berfokus kepada program pengajaran dan transfer pengetahuan kewarganegaraan. Kemudian paradigma ini berubah menjadi pendekatan yang menekankan sikap-sikap personal-individual,

moral dan perilaku sosial sebagaimana disposisi dan nilai-nilai bersama dari warga negara dalam kehidupan bersama yang menghargai hak-hak asasi manusia dan demokrasi di dunia yang penuh konflik.

Lebih lanjut, Samsuri menilai bahwa aspek penting dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 2013 adalah pentingnya penggunaan pendekatan ilmiah (saintifik) dalam segenap pembelajaran. Menurutnya, semangat keilmuan kajian Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 2006 telah dilestarikan dalam Kurikulum 2013, di mana basis keilmuan yang menjadi kajian pokok Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan haruslah jelas dan tegas batas-batas disiplinnya.

Kembali pada persoalan *civic disposition* yang menempati area tepi, upaya yang perlu ditempuh selanjutnya adalah dengan menempatkannya pada posisi semestinya. Pengarusutamaan aspek *civic disposition* menjadi penting agar ruh mata pelajaran PPKn menjadi seimbang. Pengarusutamaan dalam hal ini bukan berarti semata-mata persoalan kuantitas persentase yang sama dengan dua aspek yang lain (*civic knowledge* dan *civic skills*) di dalam sebaran KD untuk tiap-tiap Standar Kompetensi (SK) baik di SD, SMP, maupun SMA, akan tetapi, lebih dari itu yakni kualitas pada tataran praktik menjadi lebih utama untuk mendapat perhatian serius.

Dengan demikian, berdasar lintasan sejarah yang niscaya memiliki pemikiran akan pendidikan kewarganegaraan yang sesuai dengan konteks zaman, maka kebutuhan kontemporer pun membutuhkan hal serupa. Tulisan singkat ini merupakan upaya untuk menempatkan kembali kedudukan aspek *civic disposition* ke tempat yang semestinya yakni menjadi salah satu kompetensi penting dari pendidikan kewarganegaraan guna membentuk karakter warga negara. Upaya ini tentu terkait dengan analisis mengenai kedudukan aspek *civic disposition* dalam sejumlah kurikulum sebelumnya guna dijadikan pembanding. Dengan begitu, lagi-lagi pendidikan kewarganegaraan dapat selaras dengan dimensi waktu sekaligus ruang yang tersedia.

## **METODE**

Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan penelitian studi pustaka. Penelitian studi pustaka berusaha untuk menganalisis, mendeskripsikan serta mengidentifikasi tentang Pancasila sebagai dasar negara serta manifestasi kebangsaan Indonesia. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini meliputi studi pustaka dari berbagai hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini serta melakukan dokumentasi. Sumber data yang dalam penelitian ini di peroleh dari buku-buku, berbagai artikel ilmiah, laporan penelitian ilmiah, jurnal serta sumber-sumber yang relevan dengan penelitian ini. Peneliti akan mengidentifikasi kajian dari bahan-bahan yang diperoleh dalam penelitian ini, yang terkait dengan topik penelitian. Analisis dalam penelitian menggunakan analisis isi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tinjauan tentang *Civic Disposition***

Pengenalan istilah “paradigma baru” terkait pendidikan kewarganegaraan, tampak menjadi alur pikir yang diikuti di dunia. Murray Print, misalnya, menawarkan ciri-ciri utama pendidikan kewarganegaraan paradigma baru ini (Print, 1999: 12). Ciri-ciri utama pendidikan kewarganegaraan dimaksud paling tidak memuat kajian tentang hak-hak dan tanggung jawab warga negara; pemerintah dan lembaga-lembaga negara; sejarah dan konstitusi; identitas nasional; sistem hukum dan *rule of law*; hak-hak asasi manusia, politik, ekonomi dan sosial; prinsip dan proses yang bersifat demokratis; partisipasi aktif warga negara dalam masalah kewargaan; perspektif internasional; serta nilai-nilai kewarganegaraan demokratis.

Visi pendidikan kewarganegaraan paradigma baru adalah memberikan penekanan yang lebih kuat pada *nation and character building*, pemberdayaan warga negara, dan memperkuat berkembangnya masyarakat kewargaan. Sedangkan misi pendidikan kewarganegaraan paradigma baru adalah pembentukan warga negara yang baik (*good citizen*). Ciri-ciri warga negara yang

baik yakni aktif berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, berbudaya politik kewarganegaraan (*civic culture*), dan berpikir kritis maupun kreatif (Cholisin, 2004:19).

Salah satu komponen mendasar dari Pendidikan Kewarganegaraan adalah watak atau karakter kewarganegaraan (*civic disposition*), di samping pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) dan keterampilan kewarganegaraan (*civic skill*). Watak dimaksud diisyaratkan Margaret Stimmann Branson muncul dalam karakter publik maupun privat yang penting bagi pemeliharaan serta pengembangan demokrasi konstitusional (Branson dkk., 1999: 23). *Civic dispositions* tersebut tumbuh secara perlahan dalam diri individu sebagai akibat dari apa yang telah dia pelajari dan alami di sejumlah lingkungan seperti lingkungan rumah, sekolah, komunitas, maupun organisasi-organisasi dalam lingkup masyarakat kewargaan (*civil society*). Hal-hal yang telah dipelajari dan dialami oleh individu tersebut mestinya mampu membangkitkan pemahaman mereka bahwasanya demokrasi mensyaratkan adanya pemerintahan mandiri yang bertanggungjawab dari tiap-tiap individu.

Branson lantas membagi ranah *civic dispositions* menjadi dua, yakni terkait cakupan di lingkup privat serta publik. Keduanya saling melengkapi di dalam diri seorang individu. Karakter privat mewujud ke dalam bentuk seperti tanggung jawab moral, disiplin diri, serta penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu. Sedangkan karakter publik terwujud ke dalam sejumlah karakter yang sangat diperlukan agar demokrasi berjalan dengan sukses, seperti kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, mengindahkan aturan main (*rule of law*), berpikir kritis, dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi sekaligus berkompromi. Lebih lanjut, Branson mendeskripsikan karakter privat dan publik ke dalam beberapa hal berikut (Branson dkk., 1999: 23-25):

1. Menjadi anggota masyarakat yang independen
2. Memenuhi tanggung jawab personal kewarganegaraan di bidang ekonomi dan politik
3. Menghormati harkat dan martabat kemanusiaan tiap individu

4. Berpartisipasi dalam urusan-urusan kewarganegaraan secara efektif dan bijaksana
5. Mengembangkan berfungsinya demokrasi konstitusional secara sehat

Menurut Sapriya, sebagai program pendidikan, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki lingkup yang cukup luas serta meliputi paling tidak tiga wilayah dalam proses pembentukan karakter. Pertama, secara konseptual pendidikan kewarganegaraan berperan dalam mengembangkan konsep-konsep dan teori. Kedua, secara kurikuler pendidikan kewarganegaraan mengembangkan sejumlah program pendidikan dan model implementasinya dalam mempersiapkan peserta didik menjadi manusia dewasa yang berkarakter melalui lembaga-lembaga pendidikan. Ketiga, secara sosio kultural pendidikan kewarganegaraan melaksanakan proses pembelajaran kepada masyarakat agar menjadi warga negara yang baik (Mulyono, 2017: 218-225).

### **Tinjauan tentang Aspek *Civic Disposition* dalam Kurikulum**

Perjalanan bangsa Indonesia sejak merdeka telah menunjukkan bahwa kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan diwarnai oleh beragam perubahan. Pada saat kurikulum era Orde Lama, pendidikan kewarganegaraan diejawantahkan dengan nomenklatur Civics (1962) yang hendak membentuk karakter warga negara yang “sosialis Indonesia yang susila” yang merujuk pada Keputusan Presiden No. 145 tahun 1965. Kemudian pada masa Orde Baru, terdapat sejumlah penamaan, mulai dari Pendidikan Kewargaan Negara (1968), PMP (1975 dan 1984), hingga PPKn (1994). Pada masa ini kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan tampak menjadi instrumen yang sangat efektif dalam menerjemahkan nilai-nilai Orde Baru yang ingin membentuk “manusia pembangunan yang Pancasila” melalui wujud 36 butir P4 sebagai reduksi atas Pancasila yang menjadi nilai dasar dari Pendidikan Kewarganegaraan. Sementara itu, kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan pada masa Reformasi hadir dengan paradigma baru. Dengan mengusung nomenklatur Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) pada kurikulum 2004 dan 2006 serta Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dalam kurikulum 2013, semangat yang diusung yakni

untuk membentuk warga negara yang “kritis, demokratis, dan partisipatif”. Meski demikian, Pendidikan Kewarganegaraan paradigma baru yang mengadopsi dari *Center for Civic Education* (CCE) Amerika Serikat ini, memunculkan kritik karena dianggap terlalu liberal (Mulyono, 2017).

Sebagai catatan, dalam konteks Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) atau Kurikulum 2006, keberhasilan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) memproduksi Standar Isi (SI) maupun Standar Kompetensi Lulusan (SKL) memunculkan kritik tersendiri. Mitra BSNP sendiri seperti Pusat Kurikulum Balitbang menemukan beberapa persoalan dalam SI sejumlah mata pelajaran termasuk Pendidikan Kewarganegaraan (Samsuri, 2010). Dari analisis kajian Puskur ditemukan bahwa berkaitan dengan beban belajar, komposisi jumlah Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) dalam SI Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk tiap semester baik untuk SD, SMP maupun SMA dianggap cukup memadai. Akan tetapi, ditilik secara kuantitatif dari komposisi KD dari ranah kompetensi Pendidikan Kewarganegaraan (*civic knowledge, civic disposition dan civic skill/participation*) terdapat ketidakseimbangan sebagai muatan KD untuk tiap-tiap SK baik di SD, SMP, maupun SMA. Proporsi dua jenis kompetensi yaitu aspek *civic disposition* dan *civic skill/participation*, yang menurut Puskur menjadi titik penekanan Pendidikan Kewarganegaraan, menempati kadar yang relatif lebih sedikit apabila dibandingkan dengan aspek *civic knowledge*. Pada tingkat SD, misalnya, dari 57 KD, hanya 4 KD (7,02%) yang termasuk ke dalam aspek *civic disposition* di samping 16 KD (28,07%) yang termasuk ke dalam aspek *civic skill/participation*. Sementara terdapat 37 KD (64,91%) yang merupakan bagian dari *civic knowledge*.

Pada tingkatan SMP, hanya 9 KD (19,56%) yang memuat aspek *civic disposition* dan 5 KD (10,87%) aspek *civic skill/participation*, sedangkan yang memuat aspek *civic knowledge* berjumlah 32 KD (69,56%). Terakhir, pada tingkatan SMA, hanya 7 KD (12,96%) yang termasuk aspek *civic disposition* dan 7 KD (12,96%) termasuk aspek *civic skill/participation*, sementara ada 109 KD (69,43%) termasuk aspek *civic knowledge*.

Dari data yang telah dijelaskan di atas, secara keseluruhan hanya 12% KD yang memuat aspek *civic disposition* dan 20,17% aspek *civic skill/participation*. Sedangkan KD yang memuat aspek *civic knowledge* mendominasi dengan persentase 69,43%. Menurut Puskur, hal ini menunjukkan bahwa susunan tersebut tidak konsisten dengan misi Pendidikan Kewarganegaraan yang bertujuan untuk membentuk watak warga negara yang baik (Samsuri, 2010).

Berbeda halnya dengan Kurikulum 2013, kajian Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 2013 menempatkan tanggung jawab pembentukan karakter tidak hanya pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, akan tetapi Kompetensi Inti yang meliputi Kompetensi Sikap Spiritual, Sikap Sosial, Pengetahuan dan Keterampilan secara vertikal dan horisontal justru tanggung jawab semua mata pelajaran.

Menurut pandangan Samsuri yang menyitir Gerhard Himmelmann (Samsuri, 2013:6), fokus utama mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan melalui keberadaan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar telah berubah paradigma. Paradigma dimaksud semula berfokus kepada program pengajaran dan transfer pengetahuan kewarganegaraan. Kemudian paradigma ini berubah menjadi pendekatan yang menekankan sikap-sikap personal-individual, moral dan perilaku sosial sebagaimana disposisi dan nilai-nilai bersama dari warga negara dalam kehidupan bersama yang menghargai hak-hak asasi manusia dan demokrasi di dunia yang penuh konflik.

Lebih lanjut, Samsuri menilai bahwa aspek penting dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 2013 adalah pentingnya penggunaan pendekatan ilmiah (saintifik) dalam segenap pembelajaran. Menurutnya, semangat keilmuan kajian Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 2006 telah dilestarikan dalam Kurikulum 2013, di mana basis keilmuan yang menjadi kajian pokok Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan haruslah jelas dan tegas batas-batas disiplinya.

## **Urgensi Pengarusutamaan Aspek Civic Disposition dalam Kurikulum**

Melihat berbagai perjalanan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan dari era pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi, terdapat benang merah yakni penempatan Pancasila sebagai nilai dasar yang mewarnai mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk membentuk karakter warga negara. Hal ini telah ditunjukkan oleh sejarah bahwa Pancasila justru menjadi alat yang dieksploitasi sedemikian rupa daripada menjadikannya sebagai tujuan dalam hidup berbangsa.

Pendidikan kewarganegaraan sebagai kegiatan kurikuler, sangat relevan dengan isyarat Hilda Taba mengenai fungsi pendidikan (Taba, 1962: 18-30), yaitu “*education as preserver and transmitter of the cultural heritage; education as an instrument for transforming culture; education for individual development.*” Menurut penulis, ketiga hal tersebut berkelindan satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan di Indonesia, Pancasila sebagai nilai dasar yang meliputi pendidikan kewarganegaraan, tidak mampu diwariskan tanpa melalui upaya pengajaran. Ikhtiar pengajaran yang ditempuh semestinya mampu masuk ke proses selanjutnya yakni *transforming culture* yang dalam tataran mikro berdampak pada perkembangan pribadi seseorang. Perkembangan pribadi individu inilah yang berkaitan erat dengan topik utama tulisan ini yaitu watak atau karakter kewargaan (*civic disposition*).

Kajian literatur yang muncul dalam bagian sebelumnya telah mengungkap bahwa terdapat sejumlah pengesampingan aspek *civic disposition* di dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan. Padahal pengembangan kemampuan afektif atau *civic disposition* merupakan pengembangan lebih lanjut dari kemampuan kognitif, yang pada akhirnya akan masuk lebih jauh ke dimensi moral seorang individu (Muchson, 2009: 16-28).

Menilik implementasi pendidikan kewarganegaraan di dalam kurikulum yang pernah dan tengah berlaku di Indonesia, berdasarkan kajian literatur yang telah disampaikan di muka, maka menjadi sangat penting untuk menempatkan kembali aspek *civic disposition* ke tempat semestinya. Elemen karakter kewarganegaraan yang menempati posisi penting dalam alam pikir pendidikan

kewarganegaraan, harus menjadi perhatian penting bagi pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan yang hendak membentuk warga negara yang ideal.

Apabila melihat konteks kurikulum yang tengah berlaku di Indonesia, yakni Kurikulum 2013, seperti disebutkan sebelumnya bahwa kurikulum ini masih membutuhkan pengembangan utamanya terkait tenaga kependidikan dan peran Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/Pendidikan Kewarganegaraan di LPTK. Jika demikian arah yang hendak dituju maka evaluasi kurikulum menjadi relevan.

Terdapat empat standar untuk evaluasi kurikulum. Keempat standar ini diakui oleh 16 organisasi profesi yang berkenaan dengan evaluasi (Hasan, 2009: 244-255). Pertama, *utility standards*, yaitu standar untuk menyatakan bahwa pekerjaan evaluasi yang dilakukan menyediakan informasi yang diperlukan oleh pemakai hasil evaluasi. Kedua, *propriety standards*, yakni standar untuk memberikan jaminan bahwa evaluasi yang dilakukan legal, etis, dan peduli dengan kesejahteraan mereka yang terlibat dalam evaluasi dan mereka yang terkena hasil evaluasi. Ketiga, *feasibility standards*, merupakan standar yang menunjukkan bahwa evaluasi yang dilakukan bersifat *realistic*, *prudent*, *diplomatic*, dan *frugal*. Terakhir, *accuracy standards*, adalah standar untuk meyakinkan evaluator dan pengguna bahwa pekerjaan evaluasi yang dilakukan mampu mengungkapkan informasi yang cukup dan diperoleh dengan cara yang benar untuk digunakan dalam menentukan *merit* dan *worth* dari kurikulum yang sedang dievaluasi.

Keempat standar tersebut yang diuraikan Hamid Hasan tersebut dapat diterapkan pula untuk melakukan evaluasi terhadap Kurikulum 2013. Meski fokus utama mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di dalam Kurikulum 2013 melalui keberadaan Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar telah berubah paradigma, akan tetapi faktor tenaga kependidikan dan peran Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/Pendidikan Kewarganegaraan di LPTK menjadi penting untuk diperhatikan guna eksistensi sekaligus keterjagaan kualitas dari aspek *civic disposition* di dalam Kurikulum 2013.

## **SIMPULAN**

Perjalanan kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan dari era pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi, terdapat benang merah yakni penempatan Pancasila sebagai nilai dasar yang mewarnai mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan untuk membentuk karakter warga negara. Hal ini telah ditunjukkan oleh sejarah bahwa Pancasila justru menjadi alat yang dieksploitasi sedemikian rupa daripada menjadikannya sebagai tujuan dalam hidup berbangsa. Hal ini berdampak terhadap eksistensi aspek *civic disposition*, yang merupakan aspek utama dari kompetensi kewarganegaraan (*civic knowledge, civic skills, civic disposition*). Eksistensi *civic disposition* memiliki kecenderungan untuk menempati proporsi yang sedikit (dibandingkan dengan aspek kompetensi kewarganegaraan lain) dalam kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia, kecuali Kurikulum 2013. Penting untuk melakukan evaluasi terhadap kurikulum pendidikan kewarganegaraan. Upaya evaluasi tersebut dapat ditempuh dengan menggunakan empat standar utama, yaitu *utility standards, propriety standards, feasibility standards, accuracy standards*. Khusus untuk Kurikulum 2013 yang tengah berlaku di Indonesia. Evaluasi dimaksud terutama terkait faktor tenaga kependidikan dan peran Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/Pendidikan Kewarganegaraan di LPTK.

## **REFERENSI**

- Aristoteles. (1998). C.D.C. Reeve (terj.). *Politics*. Indianapolis: Hackett Publishing Company.
- Branson, M.S., dkk. (1999). *Belajar civic education dari Amerika*. (Terjemahan Syafruddin, dkk.). Yogyakarta: LKiS.
- Cholisin. (2004). *Diktat pendidikan kewarganegaraan (Civic Education)*. Tidak Diterbitkan. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.
- Gutmann, A. (1990). *Democratic education*. Princeton: Princeton University Press.
- Hasan, H. (2009). *Evaluasi Kurikulum*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muchson, A., R. (2009). "Dimensi Moral dalam Pendidikan Kewarganegaraan." *Jurnal Civics*, 6 (1): 16-28.

- Mulyono, B. (2017). "Reorientasi Civic Disposition dalam Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Upaya Membentuk Warga Negara yang Ideal." *Jurnal Civics*, 14 (2): 218-225.
- Plato. "Laws". Trevor J. Saunders (terj.). Dalam Cooper, John M. (ed). 1997. *Plato complete works*. Indianapolis: Hackett Publishing Company.
- Print, M. (1999). "Introduction, civic education and civil society in the Asia-Pacific." Dalam Murray Print, James Ellickson-Brown and Abdul Razak Baginda. (eds.). *Civic Education for Civil Society*. London: ASEAN Academic Press, hlm. 9-18.
- Samsuri. (2010). Transformasi masyarakat kewargaan (*Civil Society*) dalam reformasi pendidikan kewarganegaraan di Indonesia (Studi Politik Pendidikan dalam Pembentukan Masyarakat Demokratis). Disertasi. Bandung: Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia.
- Samsuri. (2013). Paradigma pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum 2013. Kuliah Umum Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, 15 September 2013.
- Sherrod, L.R., Flanagan, C., & Younnis, J. (2002). "Dimensions of citizenship and opportunities for youth development: The What, Why, When, Where, and Who of Citizenship Development." *Applied Developmental Science*, 6 (4): 264-272.
- Taba, H. (1962). *Curriculum development: theory and practice*. New York: Harcourt, Brace & World, Inc.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.